



# RKPD

RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ACEH SELATAN  
TAHUN 2021



## BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH SELATAN TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2008-2028.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya di sebut RKPK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kebijakan umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

RKPK disusun dengan maksud menghasilkan rancangan yang sistematis terarah, terpadu menyeluruh lengkap dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta pembangunan.

### Pasal 3

RKPK disusun dengan tujuan sebagai dasar dalam penyusunan KUA, PPAS Tahun 2021.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN**

**Pasal 4**

RKPK Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJM Kabupaten

**Pasal 5**

- (1) RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat tentang evaluasi hasil pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan.
- (2) Muatan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 7 (tujuh) BAB berikut matriks dan tabelnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 17 Juli 2020 M  
26 Dzulqaidah 1441 H

 **BUPATI ACEH SELATAN,**  
*[Signature]*  
**AMRAN**

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 17 Juli 2020 M  
26 Dzulqaidah 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN**

 *[Signature]*  
**NASJUDDIN**

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 23

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.5. Sistematika Dokumen RKPD .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi...	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis .....	II-8
2.1.1.2.1 Posisi Astronomis .....	II-8
2.1.1.2.2 Posisi Geostrategik .....	II-8
2.1.1.2.3 Kondisi Kawasan .....	II-9
2.1.1.2.3.1. Kondisi Kawasan Pedesaan.....	II-9
2.1.1.2.3.2 Kondisi Kawasan Gampong Agraris...	II-10
2.1.1.2.3.3 Kondisi Kawasan Pesisir.....	II-10
2.1.1.2.3.4 Kondisi Kawasan Gampong Wisata..	II-11
2.1.1.2.3.5 Kondisi Kawasan Gampong Industri.	II-12
2.1.1.3 Topografi.....	II-13
2.1.1.3.1 Kemiringan Lahan .....	II-13
2.1.1.3.1.1 Dataran dengan kondisi kemiringan lahan 0–8%.....	II-13
2.1.1.3.1.2 Wilayah landai dengan kondisi kemiringan 8–15%.....	II-14
2.1.1.3.1.3 Wilayah bergelombang dengan kondisi kemiringan 15–25%.....	II-14
2.1.1.3.1.4 Wilayah perbukitan dan curam dengan kondisi kemiringan 25–40%.	II-14
2.1.1.3.1.5 Wilayah pegunungan dengan kondisi kemiringan > 40%.....	II-14
2.1.1.3.2 Ketinggian Lahan.....	II-15
2.1.1.4 Geologi.....	II-19
2.1.1.4.1 Struktur dan Karakteristik.....	II-19
2.1.1.4.2 Potensi.....	II-21
2.1.1.5 Hidrologi.....	II-22

2.1.1.5.1 Daerah Aliran Sungai.....	II-22
2.1.1.5.2 Sungai, Danau dan Rawa.....	II-23
2.1.1.5.2.1 Wilayah Sungai.....	II-23
2.1.1.5.2.1.1 Wilayah Sungai Krueng Baroe- Kluet.....	II-23
2.1.1.5.2.1.2 Wilayah Sungai Alas-Singkil.....	II-24
2.1.1.5.2.2 Wilayah Danau.....	II-25
2.1.1.5.2.3 Wilayah Rawa .....	II-25
2.1.1.6 Klimatologi .....	II-26
2.1.1.6.1 Tipe .....	II-26
2.1.1.6.2 Curah Hujan .....	II-26
2.1.1.7 Suhu .....	II-27
2.1.1.8 Penggunaan Lahan .....	II-27
2.1.1.8.1 Kawasan Budidaya .....	II-27
2.1.1.8.2 Kawasan Lindung .....	II-28
2.1.2 Demografi .....	II-30
2.1.2.1 Jumlah dan struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	II-30
2.1.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk .....	II-32
2.1.2.3 Dinamika Penduduk Yang Dipengaruhi Oleh Kelahiran, Kematian Dan Perpindahan Penduduk .....	II-34
2.1.2.3.1 Angka Kelahiran (Natalitas) .....	II-34
2.1.2.3.2 Angka Kematian (Mortalitas) .....	II-35
2.1.2.3.3 Perpindahan Penduduk (Migrasi) .....	II-36
2.1.2.4 Distribusi/Persebaran Penduduk .....	II-37
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-38
2.1.3.1 Kawasan Peruntukan Perikanan .....	II-38
2.1.3.1.1 Kawasan Perikanan Tangkap .....	II-38
2.1.3.1.2 Kawasan Perikanan Budidaya .....	II-39
2.1.3.2 Kawasan Peruntukan Pertanian .....	II-39
2.1.3.3 Kawasan Peruntukan Pariwisata .....	II-41
2.1.3.4 Kawasan Peruntukan Industri .....	II-41
2.1.3.5 Kawasan Peruntukan Perdagangan .....	II-41
2.1.3.6 Kawasan Peruntukan Permukiman .....	II-42
2.1.3.7 Kawasan Peruntukan Lainnya .....	II-42
2.1.4 Wilayah Rawan Bencana .....	II-43
2.1.4.1 Rawan Banjir .....	II-43
2.1.4.2 Rawan Tsunami .....	II-43
2.1.4.3 Rawan Abrasi .....	II-43
2.1.4.4 Rawan Longsor .....	II-44
2.1.4.5 Rawan Gempa .....	II-44
2.1.4.6 Rawan Erosi .....	II-44
2.1.4.7 Rawan Angin Kencang .....	II-45

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-45
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-45
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB .....	II-45
2.2.1.2 Pengeluaran Per Kapita .....	II-50
2.2.1.3 Indeks Gini .....	II-51
2.2.1.4 Laju Inflasi .....	II-51
2.2.1.5 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan .....	II-52
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-53
2.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH) .....	II-53
2.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah .....	II-55
2.2.2.3 Harapan Angka Sekolah .....	II-55
2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup (UHH) .....	II-56
2.2.2.5 Rasio Penduduk Yang Bekerja .....	II-57
2.2.2.6 Kriminalitas (Angka Kriminalitas).....	II-58
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-59
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-60
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib .....	II-60
2.3.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar .....	II-60
2.3.1.1.1 Pendidikan .....	II-60
2.3.1.1.1.1 Angka partisipasi Kasar (APK) .....	II-60
2.3.1.1.1.2 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) .....	II-62
2.3.1.1.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) .....	II-62
2.3.1.1.1.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) ....	II-63
2.3.1.1.1.5 Angka Putus Sekolah .....	II-65
2.3.1.1.1.6 Fasilitas Pendidikan .....	II-65
2.3.1.1.1.7 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia SekolahSD/MI dan SMP/MTs .....	II-66
2.3.1.1.1.8 Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI dan SMP/MTs .....	II-67
2.3.1.1.2 Kesehatan .....	II-69
2.3.1.1.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Kematian Bayi, Kematian Balita, Kematian Neonatal dan Angka Kematian Ibu .....	II-69
2.3.1.1.2.2 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita .....	II-71
2.3.1.1.2.3 Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk .....	II-72

2.3.1.1.2.4 Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk .....	II-74
2.3.1.1.2.5 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk..	II-75
2.3.1.1.2.6 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk .....	II-75
2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-76
2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-78
2.3.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-79
2.3.1.1.6 Sosial .....	II-81
2.3.1.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .....	II-82
2.3.1.2.1 Ketenagakerjaan .....	II-82
2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .....	II-83
2.3.1.2.3 Pangan .....	II-84
2.3.1.2.4 Pertanahan .....	II-85
2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup .....	II-86
2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II-86
2.3.1.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-87
2.3.1.2.8 Perhubungan .....	II-88
2.3.1.2.9 Komunikasi dan Informatika .....	II-90
2.3.1.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	II-91
2.3.1.2.11 Statistik .....	II-93
2.3.1.2.12 persandian .....	II-94
2.3.1.2.13 Perpustakaan .....	II-94
2.3.1.2.14 Kearsipan .....	II-95
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-96
2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan .....	II-96
2.3.2.2 Pariwisata .....	II-99
2.3.2.3 Pertanian .....	II-103
2.3.2.4 Perdagangan .....	II-105
2.3.2.5 Perindustrian .....	II-107
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-109
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-109
2.4.1.1. Nilai Tukar Petani (NTP) .....	II-109
2.4.1.2 Produktifitas Total Daerah .....	II-110
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ...	II-112

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan .....	II-112
2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Kendaraan Umum .....	II-113
2.4.2.3 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Per Tahun .....	II-113
2.4.2.4 Luas Wilayah Industri.....	II-114
2.4.2.5 Luas Wilayah Kebanjiran .....	II-114
2.4.2.6 Luas Wilayah Perkotaan .....	II-115
2.4.2.7 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang .....	II-115
2.4.2.8 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih .....	II-116
2.4.2.9 Rasio Ketersediaan Daya Listrik .....	II-117
2.4.3 Fokus Iklim Investasi .....	II-118
2.4.3.1 Angka Kriminalitas .....	II-118
2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi .....	II-119
2.4.3.3 Lama Proses Perizinan .....	II-120
2.4.3.4 Jumlah dan Macam Pajak dan Restribusi Daerah .....	II-121
2.4.3.5 Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) Atau Qanun Yang Mendukung Iklim Usaha .....	II-122
2.4.3.6 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa .....	II-123
2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia .....	II-125
2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja (Lulusan S1/S2/S3) .....	II-125
2.4.4.2 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan .....	II-126
2.4.5 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan .....	II-127
2.4.5.1. Pendidikan .....	II-127
2.4.5.1.1 Angka Melek Al-Qur'an .....	II-127
2.4.5.1.2 Hafiz Al-Qur'an .....	II-127
2.4.5.1.3 Peningkatan Kualitas Keagamaan .....	II-128
2.4.5.1.3.1 Cerdas Cermat .....	II-128
2.4.5.1.4 Pengembangan Sumberdaya Syari'at Islam .....	II-128
2.4.5.2 Keagamaan .....	II-129
2.4.5.2.1 Sarana dan Prasarana Peribadatan ...	II-129
2.5 Data Kondisi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan .....	II-129
2.6 Evaluasi .....	II-131

2.6.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	II-131
2.6.2 Pengukuran Konsistensi Antar Dokumen ..	II-185
2.6.3 Kesimpulan dan Rekomendasi .....	II-187
2.6.3.1 Kesimpulan .....	II-187
2.6.3.2 Tindak Lanjut/Rekomendasi .....	II-188
2.7 Permasalahan Pembangunan .....	II-188
2.7.1 Aspek-aspek Kesejahteraan Masyarakat..	II-189
2.7.2 Aspek Pelayanan Umum .....	II-189
2.7.3 Aspek Daya Saing .....	II-191
2.7.4 Dinul Islam, Keistimewaan Aceh, Sosial Dan Kebudayaan .....	II-191

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN**

<b>KABUPATEN ACEH SELATAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun 2021 .....	III-4
3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-4
3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	III-6
3.1.1.3 Struktur Ekonomi .....	III-10
3.1.1.4 PDRB Per Kapita.....	III-12
3.1.1.5 Investasi Daerah .....	III-13
3.1.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM).....	III-14
3.1.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	III-15
3.1.1.8 Inflasi .....	III-16
3.1.1.9 Tingkat Kemiskinan .....	III-17
3.1.1.10 Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021 .....	III-18
3.1.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2021 .....	III-19
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-21
3.2.1 Analisa Keuangan Daerah Dalam Penyusunan RKPD .....	III-22
3.2.1.1 Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun Rencana .....	III-22
3.2.1.2 Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah .....	III-24
3.2.1.3 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun Rencana .....	III-31

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....**

IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.1.1 Visi RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 .....	IV-1
4.1.2 Misi RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 .....	IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 .....	IV-6
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 .....	IV-58
4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 .....	IV-58
4.2.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 .....	IV-58
4.2.3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2021 .....	IV-58
4.3 Data Kondisi COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan .....	IV-75
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRK Aceh Selatan Tahun 2021 .....	IV-78
 <b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	 V-1
 <b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	 VI-1
 <b>BAB VII PENUTUP.....</b>	 VII-1

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS). Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Untuk mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan RKPD, dilakukan penjaringan saran dan masukan dari stakeholder melalui Konsultasi Publik. Selain itu, hasil reses maupun pokok-pokok pikiran DPRD juga menjadi masukan dalam penyusunan RKPD yang diharmonisasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri

nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 merupakan perencanaan tahunan ketiga yang merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023. Melalui RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 akan dirumuskan program dan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032;
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028;
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036;
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Selain itu, secara hierarki, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPKP Aceh Selatan Tahun 2021 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJM Aceh Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah

pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Aceh.

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 akan digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2021, serta sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2021, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021.

Sementara tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 yaitu:

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2021 pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

#### **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian penjelasan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sistematika penyusunan dokumen RKPD, dan maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat uraian penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMK, dan permasalahan pembangunan daerah.

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang telaah kondisi ekonomi makro Kabupaten Aceh Selatan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019.

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai dengan pendanaannya.

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memuat penjelasan secara menyeluruh mengenai target-target capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**BAB VII PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan rangkaian penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab VI.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Selatan merupakan kondisi Kabupaten Aceh Selatan yang dilihat dari Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing daerah dan permasalahan pembangunan di Kabupaten. Bab II ini juga disertai Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan Realisasi RPJMD Tahun 2018-2023. Penulisan RKPK Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2016. Selengkapnya masing masing akan dijelaskan sebagai berikut:

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi.

#### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.

##### 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencapai 4.173,82 Km<sup>2</sup> atau 417.382,50 Ha, dengan batas-batas wilayah secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Gayo Lues
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tenggara
- Sebelah Selatan : Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil
- Sebelah Barat : Samudra Hindia sampai dengan berbatasan dengan Kabupaten Simeulu

Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 43 (empat puluh tiga) Mukim dan 260 (dua ratus enam puluh) Gampong dengan luas masing-masing Kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase	Mukim	Gampong
1.	Trumon Timur	285,34	6,84	1	8
2.	Trumon Tengah	123,50	2,96	1	10
3.	Trumon	765,92	18,35	3	12
4.	Bakongan Timur	73,81	1,77	1	7
5.	Kota Bahagia	244,63	5,86	2	10

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase	Mukim	Gampong
6.	Bakongan	57,62	1,38	2	7
7.	Kluet Selatan	106,58	2,55	3	17
8.	Kluet Timur	449,03	10,76	2	9
9.	Kluet Tengah	801,08	19,19	1	13
10.	Kluet Utara	73,24	1,75	3	21
11.	Pasie Raja	98,11	2,35	2	21
12.	Tapaktuan	100,73	2,41	2	16
13.	Samadua	112,91	2,71	4	28
14.	Sawang	189,38	4,54	4	15
15.	Meukek	465,06	11,14	4	23
16.	Labuhanhaji Timur	95,50	2,29	2	12
17.	Labuhanhaji	54,83	1,31	3	16
18.	Labuhanhaji Barat	76,56	1,83	3	15
<b>Total</b>		<b>4173,82</b>	<b>100,00</b>	<b>43</b>	<b>260</b>

Sumber: RPJMK Aceh Selatan 2018-2023

Secara administratif wilayah Kabupaten Aceh Selatan terbagi dalam 18 kecamatan yang terdiri dari 43 kemukiman dan 260 desa, rinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Kecamatan, Kemukiman dan Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan**

No.	Kecamatan	Kemukim	Gampong
1.	Trumon Timur	1. Krueng Luas	1. Krueng Luas 2. Jambo Dalem 3. Kapa Seusak 4. Seuneubok Punto 5. Seuneubok Pusaka 6. Alue Bujok 7. Titie Poben 8. Pinto Rimba
2.	Trumon Tengah	1. Ladang Rimba	1. Krueng Batee 2. Kampong Teungoh 3. Gunong Kapo 4. Pulo Paya 5. Lhok Raya 6. Ladang Rimba 7. Jambo Papeun 8. Naca 9. Ie Jeureuneh 10. Cot Bayu
3.	Trumon	1. Keude Tumon	1. Keude Tumon 2. Ujong Tanoh

No.	Kecamatan	Kemukim	Gampong
		2. Kuta Tuha  3. Bulusseuma	3. Sigleng 4. Ie Meudama 5. Teupin Tinggi 6. Seuneubok jaya 7. Padang Harapan 8. Kuta Baro 9. Pantan Bili 10. Gampong Teungoh 11. Kuta Padang 12. Raket
4.	Bakongan Timur	1. Seubadeh	1. Seubadeh 2. Ladang Rimba 3. Ujong Pulo Rayeuk 4. Sawah Tingkeum 5. Simpang 6. Ujong Pulo Cut 7. Seuleukat
5.	Kota Bahagia	1. Beutong  2. Ujong Tanoh	1. Buket Gadeng 2. Seuneubok Keuranji 3. Rambong 4. Ujong Gunong Rayeuk 5. Beutong 6. Jambo Keupok 7. Ujong Tanoh 8. Ujong Gunong Cut 9. Seuneubok Alur Buloh 10. Alur Dua Mas
6.	Bakongan	1. Keude Bakongan  2. Ujung Padang	1. Keude Bakongan 2. Ujong Mangki 3. Gampong Baro 4. Ujung Padang 5. Gampong Drien 6. Padang Barahan 7. Darul Ikhsan
7.	Kluet Selatan	1. Jaya  2. Kandang	1. Suaq Bakong 2. Rantau Binuang 3. Barat Daya 4. Sialang 5. Kapeh 6. Pulo Ie 7. Keudai Rundeng 8. Keudai Kandang 9. Luar 10. Ujung 11. Jua

No.	Kecamatan	Kemukim	Gampong
		3. Utama	12. Pasie Meurapat 13. Ujung Pasir 14. Geulumbuk 15. Pasie Lembang 16. Ujong Padang 17. Indra Damai
8.	Kluet Timur	1. Perdamaian  2. Makmur	1. Sapik 2. Alai 3. Durian Kawan 4. Lawe Sawah 5. Lawe Buluh Didi 6. Puck Lembang 7. Paya Dapur 8. Lawe Cimanok 9. Paya Laba
9.	Kluet Tengah	1. Manggamat	1. Koto Manggamat 2. Alur Keujrun 3. Jambo Papan 4. Malaka 5. Koto Indarung 6. Siurai-urai 7. Kampung Sawah 8. Kampung Padang 9. Pulo Air 10. Lawe Melang 11. Mersak 12. Simpang Tiga 13. Simpang Dua
10.	Kluet Utara	1. Asahan  2. Sejahtera  3. Kuala Ba'ú	1. Fajar Harapan 2. Krueng Batee 3. Pasie Kuala Asahan 4. Gunong Pulo 5. Pulo Ie I 6. Jambo Manyang 7. Simpang Empat 8. Kampung Tinggi 9. Ruak 10. Limau Purut 11. Pulo Kambing 12. Kampung Paya 13. Krueng Batu 14. Krueng Kluet 15. Alur Mas 16. Simpang Lhee 17. Suaq Geuringgeng 18. Pasie Kuala Ba'ú 19. Keude Padang 20. Kota Fajar

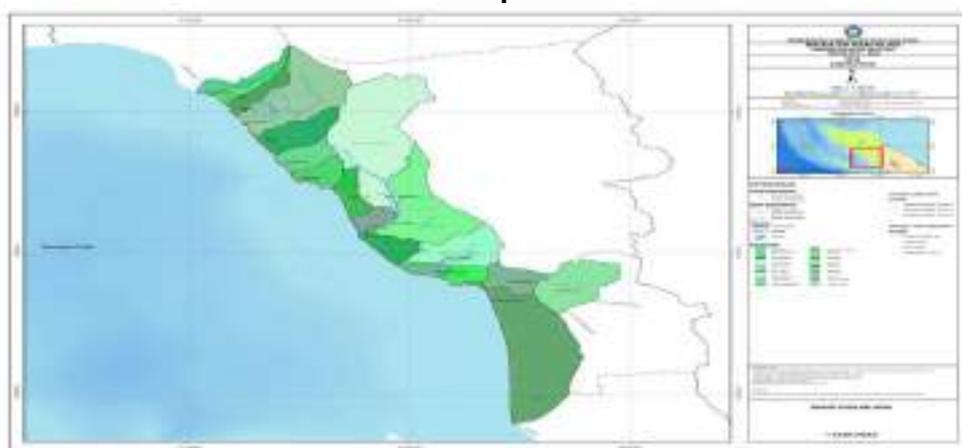
No.	Kecamatan	Kemukim	Gampong
			21. Gunung Pudung
11.	Pasie Raja	1. Terbangan  2. Rasian	1. Ladang Teungoh 2. Pucok krueng 3. Silolo 4. Kampung Baru 5. Panton Bili 6. Paya Ateuk 7. Ladang Tuha 8. Mata Ie 9. Ujung Batee 10. Lhok Sialang Cut 11. Seuneubok 12. Ie Mirah 13. Pasie Rasian 14. Ujung Padang Rasian 15. Krueng Kalee 16. Lhok Sialang Rayeuk 17. Kampung Baro 18. Teupin Gajah 19. Ujung Padang Asahan 20. Pulo Ie II 21. Pante Raja
12.	Tapaktuan	1. Hilir  2. Hulu	1. Lhok Keutapang 2. Hilir 3. Padang 4. Hulu 5. Jambo Apha 6. Teupi Air 7. Gunung Kerambil 8. Air Berudang 9. Pasar 10. Lhok Bengkuang 11. Batu Itam 12. Panton Luas 13. Panjupian 14. Lhok Rukam 15. Air Pinang 16. Lhok Bengkuang Timur
13.	Samadua	1. Panton Luas	1. Dalam 2. Subarang 3. Kuta Baru 4. Gunung Ketek 5. Ladang Panton Luas 6. Madat

No.	Kecamatan	Kemukim	Gampong
		2. Sedar  3. Suaq  4. Kasik Putih	7. Alur Seumerah 8. Tengah 9. Gunurng Cut 10. Alur Pinang 11. Kuta Blang 12. Batee Tunggai 13. Ujung Tanah 14. Ujung Kampung 15. Jilatang 16. Luar 17. Lubuk Layu 18. Suaq Hulu 19. Tampang 20. Payonan Gadang 21. Arafah 22. Gadang 23. Baru 24. Ladang Kasik Putih 25. Air Sialang Hilir 26. Air Sialang Hulu 27. Air Sialang Tengah 28. Balai
14.	Sawang	1. Sikulat  2. Lhok Pawoh  3. Trieng Meuduro  4. Alue Paku	1. Sikulat 2. Sawang I 3. Meuligo 4. Lhok Pawoh 5. Sawang II 6. Ujung Karang 7. Trieng Meuduro Baroh 8. Trieng Meuduro Tunong 9. Panton Luas 10. Simpang Tiga 11. Kuta Baro 12. Blang Geulinggang 13. Mutiara 14. Ujung Padang 15. Sawang Bak'u
15.	Meukek	1. Ateuh  2. Meuh	1. Kuta Buloh II 2. Kuta Buloh I 3. Ie Dingen 4. Drien Jalo 5. Jambo Papeun 6. Bukets Meuh 7. Blang Kuala 8. Rot Teungoh 9. Alue Baro 10. Ladang Tuha

No.	Kecamatan	Kemukim	Gampong
		3. Teungoh  4. Ujung	11. Lhok Mamplam 12. Kuta Baro 13. Aron Tunggai 14. Blang Teungoh 15. Blang Bladeh 16. Ie Buboh 17. Keude Meukek 18. Tanjung Harapan 19. Labuhan Tarok 20. Labuhan Tarok II 21. Lhok Aman 22. Alue Meutuah 23. Ladang Baro
16.	Labuhanhaji Timur	1. Peulumat  2. Keumumu	1. Tengah Peulumat 2. Paya Peulumat 3. Padang Peulumat 4. Awur Peulumat 5. Limau Saring 6. Beutong 7. Peneulop 8. Gunung Rotan 9. Keumumu Hilir 10. Sawang Indah 11. Keumumu Hulu 12. Keumumu Seberang
17.	Labuhanhaji	1. Padang Bakau  2. Pawoh Apha  3. Pisang Baru	1. Bakau Hulu 2. Padang Bakau 3. Manggis Harapan 4. Pasar Lama 5. Apha 6. Ujung Batu 7. Pawoh 8. Dalam 9. Kota Palak 10. Cacang 11. Tengah Pisang 12. Pisang 13. Hulu Pisang 14. Tengah Baru 15. Lembah Baru 16. Padang Baru
18.	Labuhanhaji Barat	1. Blang Keujeren  2. Blang Baru	1. Tutong 2. Teungah Iboh 3. Peulokan 4. Kuta Iboh 5. Ujung Padang 6. Blang Baru 7. Blang Poroh

No.	Kecamatan	Kemukim	Gampong
		3. Kuta Trieng	8. Pulo ie 9. Suaq Lokan 10. Ikue Lhueng 11. Kuta Trieng 12. Pantee Geulima 13. Panton Pawoh 14. Batee Meucanag 15. Panton Reubek

**Gambar 2.1.**  
**Peta Administrasi Kabupaten Aceh Selatan**



Sumber : RPJMK Aceh Selatan 2018-2023

### 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.

#### 2.1.1.2.1. Posisi Astronomis.

Wilayah geografis Kabupaten Aceh Selatan secara astronomis terletak antara 02° 23' 24" - 03° 44' 24" Lintang Utara dan 96° 57' 36" - 97° 56' 24" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah rata-rata 25 meter di atas permukaan laut (dpl).

#### 2.1.1.2.2. Posisi Geostrategik.

Berdasarkan letak dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Aceh Selatan berada pada jalur lintasan transportasi pantai barat-selatan Provinsi Aceh, menjadikan daerah ini sebagai sentral penghubung kabupaten-kabupaten pantai barat selatan dengan Ibukota Provinsi Aceh maupun wilayah Sumatera Utara. Sesuai dengan potensi dan kedudukan wilayah Kabupaten Aceh Selatan, tentu memiliki arti penting yang strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya, Lingkungan hidup serta stabilitas ketertiban dan keamanan.

### 2.1.1.2.3. Kondisi Kawasan.

#### 2.1.1.2.3.1. Kondisi Kawasan Pedesaan.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan kemampuan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Kawasan pedesaan di Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola sumber daya tersebut rata-rata terkendala dengan SDM yang relatif rendah. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kondisi kawasan pedesaan di Kabupaten Aceh Selatan adalah 16,54 persen atau 43 Gampong tertinggal yang tersebar di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Tertinggal di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah		Persentase
		Gampong	Gampong Tertinggal	
1.	Trumon Timur	8	0	0
2.	Trumon Tengah	10	1	10,00
3.	Trumon	12	2	16,67
4.	Bakongan Timur	7	2	28,57
5.	Kota Bahagia	10	0	0
6.	Bakongan	7	2	28,57
7.	Kluet Selatan	17	4	23,53
8.	Kluet Timur	9	2	22,22
9.	Kluet Tengah	13	3	23,08
10.	Kluet Utara	21	0	0
11.	Pasie Raja	21	4	19,05
12.	Tapaktuan	16	2	12,50
13.	Samadua	28	8	28,57
14.	Sawang	15	2	13,33
15.	Meukek	23	5	21,74
16.	Labuhanhaji Timur	12	0	0
17.	Labuhanhaji	16	2	12,50
18.	Labuhanhaji Barat	15	4	26,67
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>43</b>	<b>16,54</b>

*Sumber : Kemendes PDT dan Transmigrasi Tahun 2017*

### 2.1.1.2.3.2. Kondisi Kawasan Gampong Agraris.

Gampong Agraris adalah Gampong yang bercirikan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan darat. Jumlah Gampong Agraris di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 162 Gampong atau sebesar 62,31 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Agraris**  
**di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah		Persen tase
		Gampong	Gampong Agraris	
1.	Trumon Timur	8	8	100,00
2.	Trumon Tengah	10	10	100,00
3.	Trumon	12	4	25,00
4.	Bakongan Timur	7	1	14,29
5.	Kota Bahagia	10	10	100,00
6.	Bakongan	7	1	14,29
7.	Kluet Selatan	17	12	70,59
8.	Kluet Timur	9	9	100,00
9.	Kluet Tengah	13	13	100,00
10.	Kluet Utara	21	16	76,19
11.	Pasie Raja	21	15	71,43
12.	Tapaktuan	16	1	6,25
13.	Samadua	28	16	57,14
14.	Sawang	15	5	33,33
15.	Meukek	23	12	52,17
16.	Labuhanhaji Timur	12	9	75,00
17.	Labuhanhaji	16	10	62,50
18.	Labuhanhaji Barat	15	10	66,67
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>162</b>	<b>62,31</b>

*Sumber : SIPD Tahun 2020*

### 2.1.1.2.3.3. Kondisi Kawasan Pesisir.

Gampong Pesisir adalah Gampong yang bercirikan kelautan dan perikanan tangkap. Jumlah Gampong pesisir di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 92 Gampong atau sebesar 35,38 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Pesisir**  
**di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah		Persentase
		Gampong	Gampong Pesisir	
1.	Trumon Timur	8	0	0
2.	Trumon Tengah	10	0	0
3.	Trumon	12	8	75,00
4.	Bakongan Timur	7	6	85,71
5.	Kota Bahagia	10	0	0
6.	Bakongan	7	6	85,71
7.	Kluet Selatan	17	5	29,41
8.	Kluet Timur	9	0	0
9.	Kluet Tengah	13	0	0
10.	Kluet Utara	21	5	23,81
11.	Pasie Raja	21	6	28,57
12.	Tapaktuan	16	12	75,00
13.	Samadua	28	11	39,29
14.	Sawang	15	8	53,33
15.	Meukek	23	11	47,83
16.	Labuhanhaji Timur	12	3	25,00
17.	Labuhanhaji	16	6	37,50
18.	Labuhanhaji Barat	15	5	33,33
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>92</b>	<b>35,38</b>

*Sumber : SIPD Tahun 2020*

#### 2.1.1.2.3.4. Kondisi Kawasan Gampong Wisata.

Gampong Wisata adalah Gampong yang bercirikan objek wisata alam, agro wisata, budaya dan religius. Jumlah gampong wisata di Kab. Aceh Selatan sebanyak 20 Gampong atau sebesar 7,69 persen. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Wisata**  
**di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah		Persentase
		Gampong	Gampong Wisata	
1.	Trumon Timur	8	0	0
2.	Trumon Tengah	10	0	0

No.	Kecamatan	Jumlah		Persentase
		Gampong	Gampong Wisata	
3.	Trumon	12	2	16,67
4.	Bakongan Timur	7	2	28,57
5.	Kota Bahagia	10	0	0
6.	Bakongan	7	1	14,29
7.	Kluet Selatan	17	0	0
8.	Kluet Timur	9	0	0
9.	Kluet Tengah	13	1	7,69
10.	Kluet Utara	21	2	9,52
11.	Pasie Raja	21	1	4,76
12.	Tapaktuan	16	5	31,25
13.	Samadua	28	1	3,57
14.	Sawang	15	1	6,67
15.	Meukek	23	1	4,34
16.	Labuhanhaji Timur	12	1	8,33
17.	Labuhanhaji	16	1	6,25
18.	Labuhanhaji Barat	15	1	6,67
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>20</b>	<b>7,69</b>

Sumber : SIPD Tahun 2020

#### 2.1.1.2.3.5. Kondisi Kawasan Gampong Industri.

Gampong Industri adalah Gampong yang bercirikan industri rumah tangga dan industri kecil. Jumlah Gampong industri di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 6 Gampong atau sebesar 2,31 persen. Untuk jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Gampong dan Persentase Gampong Industri**  
**di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah		Persentase
		Gampong	Gampong Industri	
1.	Trumon Timur	8	0	0
2.	Trumon Tengah	10	0	0
3.	Trumon	12	0	0
4.	Bakongan Timur	7	0	0
5.	Kota Bahagia	10	0	0
6.	Bakongan	7	0	0
7.	Kluet Selatan	17	0	0
8.	Kluet Timur	9	0	0

No.	Kecamatan	Jumlah		Persentase
		Gampong	Gampong Industri	
9.	Kluet Tengah	13	0	0
10.	Kluet Utara	21	0	0
11.	Pasie Raja	21	0	0
12.	Tapaktuan	16	3	18,75
13.	Samadua	28	1	3,57
14.	Sawang	15	2	13,33
15.	Meukek	23	0	0
16.	Labuhanhaji Timur	12	0	0
17.	Labuhanhaji	16	0	0
18.	Labuhanhaji Barat	15	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>260</b>	<b>6</b>	<b>2,31</b>

Sumber : SIPD Tahun 2020

### 2.1.1.3. Topografi.

Secara Topografis bahwa lahan datar di wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdapat sekitar  $\pm 46,63\%$  yang merupakan lahan dengan tingkat kemiringan 0–25% dan 53,88% merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan, yang sebagian besar kawasan tersebut yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung.

#### 2.1.1.3.1. Kemiringan Lahan.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, antara lain adalah dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal 25% sampai > 40%. Sebaran kemiringan lahan tersebut terdiri dari:

##### 2.1.1.3.1.1. Dataran dengan kondisi kemiringan lahan 0–8%.

Pada umumnya memiliki relief permukaan landai dengan luas 138.765,48 Ha (33,24%). Kawasan ini sangat ideal untuk dipergunakan sebagai lahan pengembangan pertanian. Bentuk dataran ini juga sangat ideal untuk pengembangan perkotaan dan kegiatan budidaya jangka pendek. Dominan wilayah berombak terdapat di Kec. Bakongan, Bakongan Timur, Kluet Timur, Samadua dan Sawang.

### 2.1.1.3.1.2. Wilayah landai dengan kondisi kemiringan 8–15%.

Luasnya lebih kurang 14.168,60 Ha (3,39%), ini sangat ideal untuk lokasi pengembangan budidaya perkebunan atau tanaman tahunan. Bentuk permukaan bergelombang tersebar disetiap kecamatan, yang dominan terletak di Kecamatan Trumon Timur, Bakongan Timur dan Sawang.

### 2.1.1.3.1.3. Wilayah bergelombang dengan kondisi kemiringan 15–25%.

Luas wilayah tersebut adalah 39.420,82 Ha (9,44%). Bentuk permukaan bergelombang ini tersebar di setiap kecamatan, yang dominan dijumpai di Kecamatan Kota Bahagia, Kluet Timur dan Meukek.

### 2.1.1.3.1.4. Wilayah perbukitan dan curam dengan kondisi kemiringan 25–40%.

Wilayah ini tersebar di setiap kecamatan dengan luas lebih kurang 157.705,82 Ha (37,78%). Wilayah perbukitan tersebar hampir di semua kecamatan yang dominan terletak di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timur dan Meukek.

### 2.1.1.3.1.5. Wilayah pegunungan dengan kondisi kemiringan > 40%.

Bentuk permukaan wilayah ini curam bervariasi terjal, umumnya dijumpai sebagai kerucut dan puncak vulkan, lahan mudah longsor, hingga kawasan ini sangat riskan diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman dan produksi, sebaiknya kawasan seperti ini diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Wilayah pegunungan ini memiliki luas 67.319,56 Ha (16,12%) dengan penyebaran paling dominan terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timur dan Meukek. Penyebaran kemiringan lahan pada Kabupaten Aceh Selatan dapat di lihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Penyebaran Kemiringan Lahan Kabupaten Aceh Selatan**

Kecamatan	Luas Total (ha)	Kemiringan Lereng (Ha)				
		(0–8%)	(8–15%)	(15–25%)	(25–40%)	(> 40%)
1. Trumon Timur	28.534,27	16.763,86	5.077,65	5.532,54	1.160,22	-

Kecamatan	Luas Total (ha)	Kemiringan Lereng (Ha)				
		(0-8%)	(8-15%)	(15-25%)	(25-40%)	(> 40%)
2. Trumon Tengah	12.350,23	3.598,20	1.584,09	3.534,44	3.571,05	62,44
3. Trumon	76.591,03	76.378,47	58,78	141,27	12,80	-
4. Bakongan Timur	7.381,20	3.122,92	279,57	1.817,77	2.160,95	-
5. Kota Bahagia	24.463,29	5.212,31	1.729,51	5.896,08	9.726,17	1.899,21
6. Bakongan	5.762,14	5.751,58	9,31	1,25	-	-
7. Kluet Selatan	10.658,50	10.211,71	118,01	143,31	185,23	-
8. Kluet Timur	44.902,95	5.128,57	1.614,56	5.339,72	25.284,25	7.535,85
9. Kluet Tengah	80.107,91	1.542,84	1.008,76	3.454,45	45.881,82	28.220,03
10. Kluet Utara	7.323,68	4.220,52	332,97	772,76	1.821,58	175,87
11. Paseraja	9.811,37	3.012,93	271,87	932,50	5.219,48	374,60
12. Tapaktuan	10.072,58	73,02	154,45	2.586,91	6.271,32	1.654,67
13. Samadua	11.290,66	493,28	365,66	1.911,13	7.429,57	1.091,02
14. Sawang	18.937,61	256,91	314,59	2.738,70	12.576,31	3.202,90
15. Meukek	46.506,18	696,92	402,93	3.120,29	24.396,57	17.889,47
16. Lab. Haji Timur	9.550,22	349,49	336,70	1.168,75	6.006,04	1.670,25
17. Labuhanhaji	5.482,51	421,62	127,21	296,46	3.126,68	1.510,54
18. Lab. Haji Barat	7.656,10	1.532,54	362,97	852,08	2.875,80	2.032,71
<b>Aceh Selatan</b>	<b>417.382,50</b>	<b>138.767,66</b>	<b>14.168,59</b>	<b>39.420,84</b>	<b>157.705,84</b>	<b>67.319,57</b>
<b>Presentase</b>	<b>100,00</b>	<b>33,30</b>	<b>3,39</b>	<b>9,43</b>	<b>37,76</b>	<b>16,12</b>

Sumber : RTRW Aceh Selatan 2016-2036

### 2.1.1.3.2. Ketinggian Lahan.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan sebaran ketinggian daratan menurut selang ketinggian setiap 400 meter bahwa di bawah 400 meter terdapat di pesisir pantai mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai dengan Kecamatan Trumon dan juga di wilayah Kecamatan Trumon Timur, Kota Bahagia, Kluet Timur dan Kluet Tengah, sedangkan ketinggian di atas 400 meter sebagian besar merupakan gugusan bukit barisan seperti di wilayah Kecamatan Labuhanhaji Barat, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Meukek, Sawang, Samadua, Tapaktuan, Kluet Tengah, Kluet Timur, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon Tengah dan Trumon Timur.

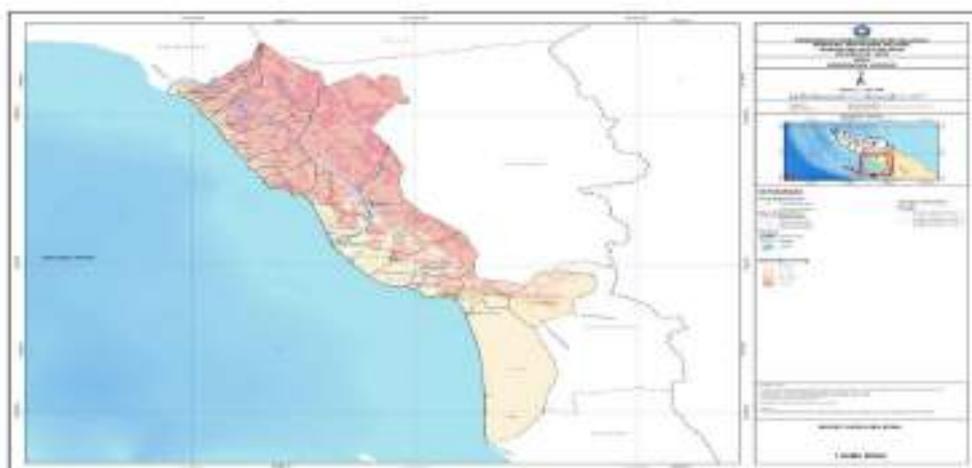
Ketinggian di atas 1.000 meter berada dikawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Gunung Leuser, lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.9**  
**Sebaran Ketinggian Lahan di Kabupaten Aceh Selatan**

No	Ketinggian	Luas (Hektar)
1	0 - 400 mdpl	228.353,20
2	400 - 800 mdpl	71.150,73
3	800 - 1.200 mdpl	47.967,37
4	1.200 - 1.600 mdpl	27.312,62
5	Di atas 1.600 mdpl	42.598,57
<b>Total</b>		<b>417.382,50</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-2036*

**Gambar 2.2**  
**Peta Ketinggian dari Permukaan Laut Wilayah Kabupaten Aceh Selatan**



*Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-2036*

Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pedalaman, terpencil, pesisir dan pegunungan di Kabupaten Aceh Selatan merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata serta sektor pertanian/perkebunan dan perikanan. Wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebelah barat yang bercorak pesisir pantai sangat potensial untuk dikembangkan wilayah perikanan dan agrowisata yang memiliki potensi wisata alam yang prospektif dimasa datang. Hasil penelitian Bappeda Provinsi Aceh Tahun 2018 tentang Zona Agroekologi menyatakan Wilayah di Kabupaten Aceh Selatan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan Pertanian/Perkebunan berbasis agroindustri dengan perkebunan unggulan seperti kelapa, cengkeh, pala, pinang, kapuk/randu,

sagu, kayu manis dan nilam. Tanaman palawija unggulan adalah jagung dan kacang tanah. Sedangkan Tanaman buah-buahan unggulan di Kabupaten Aceh Selatan adalah mangga dan durian. Besaran nilai Location Quotion (LQ) Tanaman Perkebunan Unggulan, Palawija Unggulan dan Tanaman Buah-buahan Unggulan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Location Quotion (LQ) Tanaman Perkebunan Unggulan,**  
**Palawija Unggulan dan Tanaman Buah-buahan Unggulan**  
**di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018**

No	Uraian	Location Quotion (LQ)
<b>Tanaman Perkebunan</b>		
1	Pala	21,99
2	Kayu Manis	3,81
3	Nilam	3,53
4	Sagu	3,05
5	Cengkeh	1,99
6	Kelapa	1,63
7	Kapuk/Randu	1,30
8	Pinang	1,08
<b>Tanaman Palawija</b>		
9	Jagung	2,76
10	Kacang Tanah	2,63
<b>Tanaman Buah-buahan</b>		
11	Durian	1,88
12	Mangga	1,53

*Sumber: Hasil Penelitian Bappeda Provinsi Aceh Tahun 2018.*

Analisa Location Quotion (LQ) (Miller, Gibson, and Wright) merupakan pendekatan untuk mengetahui sektor-sektor basis/unggulan pada suatu wilayah. LQ adalah suatu ukuran yang digunakan oleh para ahli ekonomi makro untuk membandingkan sektor ekonomi unggulan pada suatu wilayah berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai LQ yang bernilai lebih dari 1 memperlihatkan unggulnya suatu

komoditas dan sebaliknya apabila nilainya dibawah 1 artinya komoditas tersebut bukan komoditas unggulan di suatu daerah. Berdasarkan fakta di atas, maka ada 8 jenis komoditas untuk Tanaman Perkebunan, 2 jenis komoditas untuk Tanaman Palawija dan 2 jenis komoditas untuk Tanaman buah-buahan. Di samping itu, menurut hasil penelitian Bappeda Provinsi Aceh Tahun 2018 tentang Zona Agroekologi menyertakan komoditas Padi dengan LQ sebesar 0,37 , komoditas Ubi Kayu dengan LQ sebesar 0,30 , Komoditas Kedelai dengan LQ sebesar 0,86 dan komoditas Kelapa sawit dengan LQ sebesar 0,97 dalam skenario pengembangan komoditas di Kabupaten Aceh Selatan pada masa yang akan datang, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
**Skenario pengembangan komoditas unggulan**  
**di Kabupaten Aceh Selatan**

<b>Kabupaten Aceh Selatan</b>			
<b>Alternatif</b>	<b>Pilihan 1</b>	<b>Pilihan 2</b>	<b>Pilihan 3</b>
A1	Skenario 3 Ubi Kayu, Jagung, Kacang Tanah, Kelapa Sawit , Pala, Nilam	Skenario 2 Kedelai, Kacang Tanah, Jagung, Kelapa, Pinang, Nilam	Skenario 1 Padi, jagung, Ubi Kayu Kelapa Sawit, Cengkeh, Pala
A2	Skenario 2 Kedelai, Kacang Tanah, Jagung, Kelapa, Pinang, Nilam	Skenario 1 Padi, Jagung, Ubi Kayu, Kelapa Sawit, Cengkeh, Pala	Skenario 3 Ubi Kayu, Jagung, Kacang Tanah, Kelapa Sawit, Pala, Nilam
A3	Skenario 2 Kedelai, kacang Tanah, Jagung, Kelapa, pinang, Nilam	Skenario 1 Padi, Jagung, Ubi Kayu, Kelapa Sawit, Cengkeh, Pala	Skenario 3 Ubi Kayu, Jagung, Kacang Tanah, Kelapa Sawit, Pala, Nilam

*Sumber: Hasil Penelitian Bappeda Provinsi Aceh Tahun 2018.*

Skenario pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Aceh Selatan pada masa yang akan datang dengan misalnya alternatif A1 dan pilihan 1 dengan skenario 3 yaitu komoditas Ubi Kayu, Jagung, Kacang Tanah, Kelapa Sawit , Pala, Nilam. Pilihan 2 skenario 2 yaitu dengan Kedelai, Kacang Tanah, Jagung, Kelapa, Pinang, Nilam serta pilihan 3 dengan scenario 1

yaitu Padi, jagung, Ubi Kayu Kelapa Sawit, Cengkeh, Pala. Apabila dipilih alternative A3 dengan skenario 1 maka komoditas unggulan yang dikembangkan adalah Padi, Jagung, Ubi Kayu, Kelapa Sawit, Cengkeh, Pala. Rekomendasi dari penelitian Bappeda Aceh ini, pada satu point kesimpulan juga menyertakan bahwa Kabupaten Aceh Selatan pada masa yang akan datang dapat menjadikan **ubi kayu** dan **kelapa sawit** sebagai komoditas unggulan.

#### 2.1.1.4. Geologi.

##### 2.1.1.4.1. Struktur dan Karakteristik.

Wilayah yang sebagian besar adalah perbukitan dan pegunungan dengan susunan tanah sebagai berikut: Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Organosol, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning, Renzina dan latosol. Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.10**  
**Jenis Tanah di Kabupaten Aceh Selatan**

No.	Kecamatan	Jenis Tanah
1.	Trumon Timur	Aluvial, Gromosol, Organosol, Regosol, Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning dan latosol
2.	Trumon Tengah	Aluvial, Gromosol, Organosol, Regosol, Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning dan latosol
3.	Trumon	Aluvial, Gromosol, Organosol, Regosol, Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning dan latosol
4.	Bakongan Timur	Aluvial, Gromosol, Organosol, Regosol, Podsolik Coklat, Podsolik Merah Kuning dan latosol
5.	Kota Bahagia	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Organosol, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning, Renzina dan latosol
6.	Bakongan	Aluvial, Podsolik Coklat, Gromosol, Organosol dan Regosol
7.	Kluet	Aluvial, Podsolik Coklat, Gromosol,

No.	Kecamatan	Jenis Tanah
	Selatan	Organosol, Regosol dan Podsolik Merah Kuning
8.	Kluet Timur	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Organosol, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning, Renzina dan latosol
9.	Kluet Tengah	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Organosol, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning, Renzina dan latosol
10.	Kluet Utara	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
11.	Pasie Raja	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
12.	Tapaktuan	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
13.	Samadua	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
14.	Sawang	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
15.	Meukek	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
16.	Labuhanhaji Timur	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
17.	Labuhanhaji	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning
18.	Labuhanhaji Barat	Aluvial, Gromosol, Regosol, Podsolik, Podsolik Coklat, Litosol, Rock Outcrops, Podsolik Merah Kuning

**Sumber : RTRW Aceh Selatan Tahun 2016-2036**

Adapun penguasaan hutan mayoritas di tangan negara, sedangkan pertanian/perkebunan baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

#### 2.1.1.4.2. Potensi.

Secara geologis wilayah Kabupaten Aceh Selatan memiliki struktur yang rumit, mempunyai struktur lipatan, patahan (sesar) yang merupakan bagian sistem patahan Sumatera. Akibat dari struktur geologi seperti ini, maka Kabupaten Aceh Selatan kaya dengan potensi bahan tambang mineral logam dan mineral bukan logam serta batuan. Namun disisi lain Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi yang relatif besar untuk terkena bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor dan gempa tektonik. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat potensial di Kabupaten Aceh Selatan, mengingat bahan tambang dan mineral tersedia dalam jumlah relatif banyak dan tersebar mulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai Kecamatan Trumon Timur. Potensi bahan tambang dan mineral tersebut antara lain mineral logam, dan batuan jenis A, B dan C seperti emas primer (Au), bijih besi (Fe), mangan, batu granit, sirtu, tanah urug, batu gamping, marmar, andesit dan pasir kuarsa yang tersebar di sepanjang jalur Kabupaten Aceh Selatan.

Sementara untuk mineral non logam belum ditemukan cadangannya di Kabupaten Aceh Selatan, namun potensi pertambangan ini belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini dikarenakan selama ini hasil pertambangan Aceh Selatan yang dominan biji besi dan hasil ikutannya dijual atau diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah (added value) dari produksi ini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh Selatan. Disamping itu eksploitasi alam untuk usaha pertambangan sarat dengan kerusakan lingkungan bila tidak dikelola dengan cara praktek pertambangan yang baik (good minning practice), dimana sektor pertambangan ini satu sisi memberi kontribusi nyata berupa peningkatan PAD Kabupaten Aceh Selatan, di sisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama penambangan yang dilakukan tanpa izin (PETI).

**Tabel 2.11**  
**Potensi Bahan Tambang Kabupaten Aceh Selatan**

NO.	Kecamatan	Bahan Tambang		
		Mineral Logam	Mineral Non Logam	Batuan

NO.	Kecamatan	Bahan Tambang		
		Mineral Logam	Mineral Non Logam	Batuan
1.	Labuhanhaji Barat	Emas Primer		Sirtu Sungai
2.	Labuhanhaji	Emas Primer		Sirtu Sungai
3.	Labuhanhaji Timur	Emas Primer		Marmer, Sirtu
4.	Meukek	Emas Primer Biji Besi		Batu Gamping, Tanah Lempung
5.	Sawang	Emas Primer, Galena, Bijih Besi		Batu Granit, Tanah Lempung, Sirtu Sungai
6.	Samadua	Emas Primer		Batu Granit, Tanah Lempung Sirtu Sungai
7.	Tapaktuan	Emas Primer		Batu Gamping, Tanah Urug Pasir Kuarsa, Sirtu Sungai
8.	Pasie Raja	Emas Primer, Biji Besi		Batu Gamping
9.	Kluet Utara	Emas Primer		Sirtu Sungai, Tanah Lempung
10.	Kluet Tengah	Emas Primer, Biji Besi		Batu Kapur, Kuarsit, Sirtu Granit
11.	Kluet Timur	-		Batu Sabak, Sirtu Sungai
12.	Kluet Selatan	-		Tanah Lempung, Sirtu Sungai
13.	Bakongan	Mangan		Andesit, Basal, Sirtu Sungai
14.	Bakongan Timur	Biji Besi		Batu Gamping, Sirtu Sungai
15.	Trumon	Biji Besi		Mikrodiorit, Tanah Lempung
16.	Trumon Timur	Biji Besi		Batu Gamping, Sirtu Sungai

*Sumber : Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Selatan.*

#### 2.1.1.5. Hidrologi.

##### 2.1.1.5.1. Daerah Aliran Sungai (DAS).

Komponen penting dalam distribusi sumber daya air adalah sarana sungai, dalam hal ini pemanfaatan sumber daya air akan mengandalkan sungai agar dapat mencapai tujuan pemanfaatannya. Wilayah sungai yang terdapat di Kabupaten

Aceh Selatan merupakan wilayah sungai lintas kabupaten yang terdiri dari wilayah sungai krueng baroe–kluet dan wilayah aliran sungai alas–singkil. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di kabupaten ini meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air secara terpadu (integrated) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai krueng Aceh Selatan, meliputi:

#### **2.1.1.5.2. Sungai, Danau dan Rawa.**

##### **2.1.1.5.2.1. Wilayah Sungai.**

##### **2.1.1.5.2.1.1. Wilayah Sungai Krueng Baroe–Kluet.**

Wilayah Sungai Krueng Baroe–Kluet, terdiri dari berbagai daerah aliran sungai (DAS) antara lain adalah :

- Daerah Aliran Sungai (DAS) Bakongan seluas 25.320 Ha, meliputi Kecamatan Bakongan seluas 4.142 Ha, Bakongan Timur 961 Ha, Kluet Timur 846 Ha, Kota Bahagia 19.327 Ha dan Trumon Tengah seluas 44 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet seluas 163.551 Ha, meliputi Kecamatan Kluet Selatan seluas 715 Ha, Kluet Tengah 74.197 Ha, Kluet Timur 22.402 Ha, Kluet Utara 1.369 Ha, Labuhanhaji 1.250 Ha, Labuhanhaji Barat 892 Ha, Labuhanhaji Timur 4.384 Ha, Meukek 34.903 Ha, Pasie Raja 3.281 Ha, Samadua 4.415 Ha, Sawang 10.094 Ha dan Tapaktuan seluas 4.685 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Lembang seluas 25.683 Ha, meliputi Kecamatan Bakongan seluas 44 Ha, Kluet Selatan 4.142 Ha dan Kluet Timur seluas 21.497 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Meukek seluas 9.465 Ha, meliputi Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 921 Ha dan Meukek seluas 8.545 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Trumon seluas 45.567,78 Ha, meliputi Kecamatan Trumon seluas 13.059,40 Ha, Trumon Tengah 9.080,92 Ha dan Trumon Timur seluas 23.375,96 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Baro seluas 7.637 Ha, meliputi Kecamatan Labuhanhaji seluas 1.572 Ha, Labuhanhaji Barat 5.318 Ha dan Labuhanhaji Timur seluas 742 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Butea seluas 4.170 Ha, meliputi Kecamatan Kluet Selatan seluas 40 Ha, Kluet Tengah 9 Ha, Kluet Utara 4.090 Ha dan Pasie Raja seluas 4 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Dingin seluas 5.450 Ha, meliputi Kecamatan Samadua seluas 4.628 Ha dan Sawang seluas 822 Ha.

- Daerah Aliran Sungai (DAS) Labuhanhaji seluas 6.141 Ha, meliputi Kecamatan Labuhanhaji seluas 2.661 Ha, Labuhanhaji Barat 1.985 Ha dan Labuhanhaji Timur seluas 1.495 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Laut Bangko seluas 5.189 Ha, meliputi Kecamatan Bakongan seluas 1.303 Ha, Kluet Selatan 1.038 Ha, Kluet Tengah 172 Ha dan Kota Bahagia seluas 2.676 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Panjupian seluas 6.331 Ha, meliputi Kecamatan Pasie Raja seluas 3.360 Ha dan Tapaktuan seluas 2.971 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Peuleumat seluas 2.203 Ha, meliputi Kecamatan Labuhanhaji Timur seluas 2.008 Ha dan Meukek seluas 195 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Rasian seluas 9,798 Ha, meliputi Kecamatan Kluet Tengah seluas 4.768 Ha, Kluet Utara 1.856 Ha dan Pasie Raja seluas 3.174 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Serullah seluas 3.749 Ha, meliputi Kecamatan Samadua seluas 1.335 Ha dan Tapaktuan seluas 2.414 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Seuleukat seluas 8.300 Ha, meliputi Kecamatan Bakongan Timur seluas 3.976 Ha, Kota Bahagia 628 Ha, Trumon 799 Ha dan Trumon Tengah seluas 2.897 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Sikulat seluas 11.266 Ha, meliputi Kecamatan Meukek seluas 2.333 Ha, Samadua 913 Ha dan Sawang seluas 8.021 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Suak Panjang seluas 4.998 Ha, meliputi Kecamatan Kluet Selatan seluas 2.433 Ha dan Kluet Timur seluas 2.565 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Ujong Pulo Cut seluas 2.548 Ha, meliputi Kecamatan Bakongan seluas 52 Ha, Bakongan Timur 2.434 Ha dan Kota Bahagia seluas 62 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamedame seluas 11.584 Ha, meliputi Kecamatan Trumon seluas 11.584 Ha.

#### **2.1.1.5.2.1.2. Wilayah Sungai Alas–Singkil.**

Wilayah Sungai Alas–Singkil, terdiri dari berbagai daerah aliran sungai (DAS) antara lain adalah :

- Daerah Aliran Sungai (DAS) Singkil seluas 23.624 Ha, meliputi Kecamatan Trumon seluas 16.480 Ha, Trumon Tengah 329 Ha, Trumon Timur 5.107 Ha, Kota Bahagia 1.738 Ha dan Kluet Tengah seluas 108 Ha;

- Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuala Hitam seluas 9.575 Ha, meliputi Kecamatan Trumon seluas 9.575Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Hitam seluas 14.632 Ha, meliputi Kecamatan Trumon seluas 14.632 Ha.
- Daerah Aliran Sungai (DAS) Anun seluas 10.698 Ha, meliputi Kecamatan Trumon seluas 10.698 Ha.

#### **2.1.1.5.2.2. Wilayah Danau.**

Secara Hidrologis Kabupaten Aceh Selatan disamping terdiri dari wilayah sungai krueng baroe–kluet dan alas–singkil juga ada satu danau yaitu danau Laot Bangko yang terletak di Desa Ujung Padang Kecamatan Bakongan seluas 131,50 Ha, memiliki keindahan dan daya tarik panorama alam danau yang khas dan masih alami di dukung dengan panorama alam pegunungan hutan hujan tropis yang masih asli.

Kondisi jalannya menuju lokasi sudah baik dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat dari Tapaktuan (ibukota Kab. Aceh Selatan) dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam atau sekitar 90 km. Danau laot bangko belum ada fasilitas untuk pendukung wisata di lokasi tersebut sehingga pengunjung yang datang biasanya pulang hari atau tidak bermalam.

#### **2.1.1.5.2.3. Wilayah Rawa.**

Rawa adalah daerah rendah yang tergenang air, lahan yang tergenang air secara ilmiah dan terjadi secara terus menerus atau terjadi secara musiman yang diakibatkan karena drainase yang terhambat atau tanah berlumpur yang terbuat secara alami. Rawa seperti ini biasanya terdapat di area kehutanan yang memiliki banyak pohon-pohon besar, lebat dan juga liar. Ciri khusus rawa antara lain : bila dilihat dari segi air, rawa memiliki air yang asam dan berwarna coklat bahkan sampai kehitam-hitaman; berdasarkan tempatnya, rawa-rawa yang terdapat di area pedalaman daratan, namun banyak pula yang terdapat disekitar pantai, air rawa yang berada di sekitar pantai sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, ketika air laut sedang pasang maka permukaan rawa akan tergenang banyak sementara ketika air laut surut daerah ini akan nampak kering bahkan tidak ada air sama sekali.

Berbagai macam jenis rawa dapat dibedakan dari segi kandungan airnya yaitu rawa air tawar merupakan rawa yang airnya tawar dan airnya tidak mengalami pergerakan terdapat di area hutan-hutan yang lokasinya dekat aliran sungai yang mempunyai sifat asam karena banyak sisa-sisa jasad makhluk hidup yang membusuk; rawa air asin merupakan rawa yang memiliki air asin biasanya terdapat di sekitar pantai, rawa ini air dapat mengalami pergerakan sehingga terjadi pergantian air karena adanya gelombang laut pasang yang merendam sebagian atau seluruh kawasan rawa; sedangkan rawa air payau merupakan rawa yang memiliki air yang bercampur dari air tawar dan juga air asin biasanya berada di dekat muara sungai dan dapat mengalami pergerakan sehingga airnya dapat mengalami pergantian. Di samping itu rawa juga mempunyai berbagai manfaat bagian kehidupan manusia sehari-hari yaitu sebagai tempat budidaya jenis-jenis ikan tertentu, tanaman-tanaman tertentu, sebagai lahan pengganti sawah, tempat berkembangnya berbagai keanekaragaman hayati dan sebagai pengurangan polusi dan pencemaran udara.

Di Kabupaten Aceh Selatan rawa seperti ini terdapat di daerah Kecamatan Kluet Selatan, Bakongan, Kota Bahagia, Bakongan Timur, Trumon dan Labuhanhaji. Wilayah rawa ini dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan dan tanaman bakau yang berfungsi sebagai penahan abrasi pantai dan sungai.

#### **2.1.1.6. Klimatologi.**

##### **2.1.1.6.1. Tipe.**

Klimatologi adalah studi mengenai iklim, secara ilmiah didefinisikan sebagai kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Berdasarkan sebaran curah hujan, maka Kabupaten Aceh Selatan digolongkan kedalam iklim tipe A-1 dengan suhu rata-rata berkisar antara 28°C – 34°C dan kecepatan angin antara 90 Knot – 140 Knot. Hal ini dikarenakan topografi dan vegetasi di Aceh Selatan yang lebih dominan bukit dan pegunungan serta curah hujan yang tinggi.

##### **2.1.1.6.2. Curah Hujan.**

Curah hujan di Kabupaten Aceh Selatan tergolong tinggi rata-rata berkisar antara 2000–3500 mm/tahun dan curah hujan tertinggi mencapai >3500 mm/tahun atau seluas 52,43% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan dan hampir jatuh disetiap

kecamatan kecuali Kecamatan Trumon. Akibat tingginya curah hujan berdampak positif pada ketersediaan air yang berlimpah dan dapat dikelola sebagai sumber air irigasi sehingga memenuhi kebutuhan distribusi untuk pertanian tanaman pangan, sedangkan curah hujan terendah 2000-2500 mm/tahun disebagian kecil Kecamatan Trumon Tengah, Trumon, Labuhanhaji, Labuhanhaji Timur, Labuhanhaji Barat dan disebagian lagi Kecamatan Bakongan Timur, Kluet Tengah dan Meukek, untuk lebih rinci sebaran curah hujan dapat dilihat pada peta berikut:

**Gambar 2.3**  
**Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Selatan**



*Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016 – 2036*

#### **2.1.1.7. Suhu.**

Suhu rata-rata Kabupaten Aceh Selatan berkisar antara 28°C – 34°C dan kecepatan angin antara 90 Knot – 140 Knot. Daerah ini sangat ideal untuk tumbuh-tumbuhan tropis yang beragam dan mampu menyimpan air serta mengurangi panas suhu iklim tropis, apalagi Kabupaten Aceh Selatan berbatasan langsung dengan samudera Indonesia yang berhawa panas.

#### **2.1.1.8. Penggunaan Lahan.**

##### **2.1.1.8.1. Kawasan Budidaya.**

Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas wilayah mencapai 417.382,50 Ha. Luas pemanfaatan lahan pada Tahun 2015 adalah 126.889,56 Ha terdiri dari hutan produksi 14.855,83 Ha (3,56%), hutan produksi terbatas 5.877,23 Ha (1,41%),

perkebunan 44.155,87 Ha (10,58%), permukiman 6.390,32 Ha (1,53%), permukiman KAT 351,24 Ha (0,08%), pertanian lahan basah 12.115,17 Ha (2,90%), pertanian lahan kering 35.693,71 Ha (8,55 %), peternakan 800,49 Ha (0,19%), transmigrasi 6.648,02 Ha (1,59%), ruang terbuka hijau 2,22 Ha (0,005 %).

#### 2.1.1.8.2. Kawasan Lindung.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 103 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan keputusan Menteri kehutanan No. 865/Menhut II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, luas Hutan Lindung di Kab. Aceh Selatan adalah lebih kurang 152.484,88 Ha (36,53%), suaka marga satwa rawa singkil 57.901,96 Ha (13,87%), dan taman nasional gunung leuser 78.382,08 Ha (18,78%). Untuk lebih jelasnya kawasan hutan dan penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.12**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Aceh Selatan**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Bandara	108,18	0,03
2.	Hutan Lindung	152.484,88	36,53
3.	Suaka Marga Satwa Rawa Singkil	57.901,96	13,87
4.	Taman nasional Gunung Leuser	78.382,08	18,78
5.	Hutan Produksi	14.855,83	3,56
6.	Hutan Produksi Terbatas	5.877,23	1,41
7.	Perkebunan	44.155,87	10,58
8.	Permukiman	6.390,32	1,53
9.	Permukiman KAT	315,24	0,08
10.	Pertanian Lahan Basah	12.115,17	2,90

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
11.	Pertanian Lahan Kering	35.697,71	8,55
12.	Peternakan	800,49	0,19
13.	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	10,05	0,00
14.	Transmigrasi	6.648,02	1,59
15.	Ruang Terbuka Hijau	2,22	0,005
16.	Sungai	1.605,25	0,38
<b>Total</b>		<b>417.382,50</b>	<b>100,00</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Selatan 2016-2036*

Di lain pihak, distribusi lahan yang tidak dapat digunakan berdasarkan penelitian Bappeda Provinsi Aceh pada tahun 2018 adalah seluas 304.095 Ha atau 72,83 persen sementara lahan yang dapat digunakan hanya seluas 113.448 Ha atau 27,17 persen dari total lahan Kabupaten. Lahan yang dapat digunakan didominasi oleh jenis Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 43.817 Ha dan Perkebunan Campuran seluas 36.011 Ha. Jika digabungkan kedua jenis lahan tersebut terhadap lahan yang dapat digunakan adalah sebesar 70,37 persen. Selebihnya, jenis lahan seperti sawah berigasi, semak belukar, hutan rawa sekunder, ladang, ladang terbuka, padang rumput dan rawa pesisir sebesar 29,63 persen terhadap lahan yang dapat digunakan.

**Tabel 2.13**  
**Distribusi Lahan yang Tidak Dapat digunakan**  
**dan yang Dapat Digunakan**  
**Di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018**

No	Uraian	Luas Lahan(Ha)
<b>Lahan Tidak Dapat Digunakan untuk Pengembangan</b>		
1	Bandara/Pelabuhan	0
2	Permukiman	3.637
3	Pertambangan	0
4	Waduk/Danau	150
5	Sungai	1.579

No	Uraian	Luas Lahan(Ha)
6	Tambak	0
7	Hutan Lahan Kering	214.273
8	Hutan Manggrove Sekunder	0
9	Hutan Rawa Primer	78.673
10	Kelapa Sawit	5.783
<b>Jumlah</b>		<b>304.095 (72,83 %)</b>
<b>Lahan Dapat Digunakan untuk Pengembangan</b>		
11	Rawa Pedalaman	0
12	Rawa Pesisir	26
13	Hutan Lahan Kering Sekunder	43.817
14	Hutan Rawa Sekunder	6.869
15	Ladang	4.902
16	Lahan Terbuka	1.117
17	Perkebunan Campuran	36.011
18	Padang Rumput	303
19	Semak Belukar	8.989
20	Sawah Irigasi	11.414
<b>Jumlah</b>		<b>113.448 (27,17 %)</b>
<b>Total Lahan</b>		<b>417.543</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Bappeda Provinsi Aceh Tahun 2018*

### 2.1.2. Demografi.

#### 2.1.2.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Semester II Tahun 2019 tercatat sejumlah 234.761 jiwa, yang terdiri dari 117.791 jiwa penduduk laki-laki dan 116.970 jiwa penduduk perempuan. Penduduk menurut kelompok umur ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni Penduduk Usia Muda (0-14 Tahun), Usia Produktif (15-64 Tahun) dan usia Tua (65 Tahun ke atas). Secara lebih rinci, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2.14**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Selatan**  
**Menurut Kelompok Umur**  
**dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	9.167	8.517	17.684
2.	5 – 9	10.469	9.741	20.210
3.	10 – 14	10.184	9.504	19.688
4.	15 – 19	11.599	10.897	22.496
5.	20 – 24	11.334	10.423	21.757
6.	25 – 29	9.843	9.056	18.899
7.	30 – 34	9.537	9.224	18.761
8.	35 – 39	8.940	9.163	18.103
9.	40 – 44	7.923	8.652	16.575
10.	45 – 49	7.859	8.050	15.909
11.	50 – 54	6.377	6.693	13.070
12.	55 – 59	5.029	5.714	10.743
13.	60 – 64	3.625	3.917	7.542
14.	65 – 69	2.609	3.012	5.621
15.	70 – 74	1.624	2.140	3.764
16.	>= 75	2.323	3.214	5.537
<b>Jumlah</b>		<b>118.442</b>	<b>117.917</b>	<b>236.359</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2019.*

Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2019 didominasi oleh penduduk laki-laki dengan angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 1,00. Penduduk menurut kelompok umur ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni Penduduk Usia Muda (0-14 Tahun), Usia Produktif (15-64 Tahun) dan usia Tua (65 Tahun ke atas). Secara lebih rinci, jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019, dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.14 dst.....**  
**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin**  
**Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Trumon Timur	4.212	4.117	8.329	1,03
2.	Trumon Tengah	3.354	3.227	6.581	1,03
3.	Trumon	3.046	2.917	5.963	1,03
4.	Bakongan Timur	3.099	3.031	6.130	1,03
5.	Kota Bahagia	3.523	3.450	6.973	1,02
6.	Bakongan	2.671	2.671	5.342	1,01
7.	Kluet Selatan	7.212	7.178	14.390	1,00
8.	Kluet Timur	5.364	5.326	10.690	1,01
9.	Kluet Tengah	3.800	3.654	7.454	1,04
10.	Kluet Utara	12.864	12.528	25.392	1,02
11.	Pasieraja	9.237	9.016	18.253	1,03
12.	Tapaktuan	11.595	12.069	23.664	0,95
13.	Samadua	8.232	8.463	16.695	0,97
14.	Sawang	7.984	8.014	15.998	1,00
15.	Meukek	10.670	10.657	21.327	0,99
16.	Labuhanhaji Timur	5.164	5.069	10.233	1,01
17.	Labuhanhaji	6.853	6.907	13.760	0,99
18.	Labuhanhaji Barat	8.911	8.676	17.587	102,70
<b>Jumlah</b>		<b>117.791</b>	<b>116.970</b>	<b>234.761</b>	<b>100,70</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester II Tahun 2020.

Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15-64 Tahun, sedangkan penduduk yang tidak produktif 0-14 Tahun, dan penduduk dianggap kurang produktif 65 Tahun keatas. Jika dilihat dari Kecamatan bahwa gambaran rasio jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

### 2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk adalah penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Penduduk Kabupaten Aceh Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari Tahun 2013 sebanyak 210.071 menjadi 236.359 pada Tahun 2019 dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun, dengan demikian terjadi penambahan penduduk sebesar 26.228 Jiwa atau 11,12% per 7 tahun atau rata-rata 1,58% pertahun, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.15**  
**Perkembangan Penduduk Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2013–2019**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
----	-------	------------------------

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	2013	210.071
2.	2014	220.971
3.	2015	224.897
4.	2016	229.565
5.	2017	230.254
6.	2018	233.756
7.	2019	236.359

**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020.**

Berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah penduduk Tahun 2018, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0,68%. Pertumbuhan penduduk tersebut lebih disebabkan karena faktor alamiah dan migrasi, juga keberhasilan pelaksanaan program KB dan KS. Secara lebih rinci, dapat di lihat pada tabel jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan.

**Tabel 2.16**  
**Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
		2018	2019	
1.	Trumon Timur	8.329	8.680	4,21
2.	Trumon Tengah	6.581	6.710	1,96
3.	Trumon	5.963	6.110	2,46
4.	Bakongan Timur	6.130	6.279	2,43
5.	Kota Bahagia	6.973	7.120	2,10
6.	Bakongan	5.342	5.386	0,82
7.	Kluet Selatan	14.390	14.554	1,13
8.	Kluet Timur	10.690	10.804	1,06
9.	Kluet Tengah	7.454	7.590	1,82
10.	Kluet Utara	25.392	25.612	0,86
11.	Pasie Raja	18.253	18.439	1,01
12.	Tapaktuan	23.664	23.307	(1,50)
13.	Samadua	16.695	16.654	(0,24)
14.	Sawang	15.998	16.106	0,67
15.	Meukek	21.327	21.447	0,56
16.	Labuhanhaji Timur	10.233	10.190	(0,42)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
		2018	2019	
17.	Labuhanhaji	13.760	13.629	(0,95)
18.	Labuhanhaji Barat	17.587	17.742	0,88
<b>Jumlah</b>		<b>234.761</b>	<b>236.359</b>	<b>0,68</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020.

Jika dilihat dari tabel diatas terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Labuhan Haji barat sedangkan di beberapa Kecamatan ada terjadi pengurangan penduduk akibat dari banyaknya penduduk yang meninggal dan Pindah Alamat tinggal.

### 2.1.2.3. Dinamika Penduduk yang Dipengaruhi Oleh Kelahiran, Kematian dan Perpindahan Penduduk.

Dinamika penduduk adalah suatu perubahan keadaan penduduk. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor angka kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.

#### 2.1.2.3.1. Angka Kelahiran (Natalitas).

Angka Kelahiran adalah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk pertahun. Berdasarkan data akta kelahiran yang diterbitkan Disdukcapil Kab. Aceh Selatan dalam Buku Agregat Perkembangan Data kependudukan Semester II Tahun 2019, dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.17**  
**Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase
1.	Trumon Timur	8.329	3.750	43,20
2.	Trumon Tengah	6.581	2.704	40,30
3.	Trumon	5.963	2.340	38,30
4.	Bakongan Timur	6.130	2.548	40,58
5.	Kota Bahagia	6.973	2.635	37,01
6.	Bakongan	5.342	2.195	40,75
7.	Kluet Selatan	14.390	5.512	37,87
8.	Kluet Timur	10.690	4.335	40,12
9.	Kluet Tengah	7.454	3.017	39,75

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	Persentase
10.	Kluet Utara	25.392	9.942	38,82
11.	Pasie Raja	18.253	7.814	42,38
12.	Tapaktuan	23.664	9.709	41,66
13.	Samadua	16.695	6.296	37,80
14.	Sawang	15.998	6.315	39,21
15.	Meukek	21.327	7.771	36,23
16.	Labuhanhaji Timur	10.233	3.437	33,73
17.	Labuhanhaji	13.760	4.544	33,34
18.	Labuhanhaji Barat	17.587	5.532	31,18
<b>Jumlah</b>		<b>234.761</b>	<b>90.396</b>	<b>38,25</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020.

### 2.1.2.3.2. Angka Kematian (Mortalitas).

Angka Kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 penduduk pertahun. Jumlah penerbitan Akta Kematian tahun 2019 meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya, karena masyarakat mulai paham kegunaan dari Akta Kematian, termasuk juga karena ada bantuan kematian dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan data akta kematian yang diterbitkan Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan dalam Buku Agregat Perkembangan Data kependudukan Semester II Tahun 2019, dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.18**  
**Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kematian**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	Persentase
1	Trumon Timur	8.329	68	0,81
2	Trumon Tengah	6.581	33	0,50
3	Trumon	5.963	35	0,58
4	Bakongan Timur	6.130	98	1,59
5	Kota Bahagia	6.973	65	0,93
6	Bakongan	5.342	52	0,97
7	Kluet Selatan	14.390	112	0,77
8	Kluet Timur	10.690	60	0,56
9	Kluet Tengah	7.454	52	0,69

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Kepemilikan Akta Kematian</b>	<b>Persentase</b>
10	Kluet Utara	25.392	237	0,93
11	Pasie Raja	18.253	137	0,75
12	Tapaktuan	23.664	304	1,28
13	Samadua	16.695	171	1,02
14	Sawang	15.998	172	1,07
15	Meukek	21.327	205	0,96
16	Labuhanhaji Timur	10.233	94	0,91
17	Labuhanhaji	13.760	125	0,90
18	Labuhanhaji Barat	17.587	126	0,71
<b>Jumlah</b>		<b>234.761</b>	<b>2.146</b>	<b>0,91</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020.*

### 2.1.2.3.3. Perpindahan Penduduk (Migrasi)

Perpindahan adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Migrasi dibagi menjadi beberapa macam:

- Emigrasi ialah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain.
- Imigrasi ialah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah negara tertentu.
- Urbanisasi ialah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota.
- Transmigrasi ialah suatu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara.
- Remigrasi ialah kembalinya suatu penduduk ke negara asal sesudah beberapa lama berada di negara orang lain.

Dinamika penduduk salah satunya dipengaruhi oleh perpindahan penduduk. Untuk menentukan jumlah penduduk yang masuk dan keluar dapat dilakukan dengan mengadakan sensus penduduk dengan cara ini jumlah penduduk yang masuk dan keluar akan tercatat. Pada tahun 2019 jumlah penduduk keluar lebih banyak dibanding penduduk yang masuk ke Kabupaten Aceh Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2.19**  
**Jumlah Penduduk yang Masuk dan Keluar**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Penduduk yang masuk	Penduduk yang Keluar
1.	Trumon Timur	95	77
2.	Trumon Tengah	81	67
3.	Trumon	102	127
4.	Bakongan Timur	51	34
5.	Kota Bahagia	39	51
6.	Bakongan	49	47
7.	Kluet Selatan	144	127
8.	Kluet Timur	60	81
9.	Kluet Tengah	28	35
10.	Kluet Utara	189	223
11.	Pasieraja	184	307
12.	Tapaktuan	271	422
13.	Samadua	123	203
14.	Sawang	121	206
15.	Meukek	149	229
16.	Lab.Haji Timur	95	77
17.	Labuhanhaji	144	237
18.	Lab.Haji Barat	219	211
<b>Jumlah</b>		<b>2.117</b>	<b>2.828</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020.

#### 2.1.2.4. Distribusi/Persebaran Penduduk.

Distribusi penyebaran penduduk tertinggi di Kabupaten Aceh Selatan terpusat di Kecamatan Kluet Utara dan Tapaktuan dengan persentase penduduk masing-masing sebesar 10,81% dan 10,08% dari total keseluruhan penduduk, namun wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kluet Utara (346,70 jiwa/km<sup>2</sup>) dan Tapaktuan (234,70 jiwa/km<sup>2</sup>), lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20**  
**Distribusi dan Kepadatan Penduduk**  
**Menurut Kecamatan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
-----	-----------	---------------------	--

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Trumon Timur	3.55	29.19
2	Trumon Tengah	2.80	53.29
3	Trumon	2.54	7.79
4	Bakongan Timur	0.26	8.31
5	Kota Bahagia	2.97	28.50
6	Bakongan	2.28	92.71
7	Kluet Selatan	6.13	135.02
8	Kluet Timur	4.55	23.81
9	Kluet Tengah	3.18	9.30
10	Kluet Utara	10.82	346.70
11	Pasieraja	7.78	186.05
12	Tapaktuan	10.08	234.93
13	Samadua	7.11	147.86
14	Sawang	6.81	84.48
15	Meukek	9.08	45.86
16	Lab.Haji Timur	4.36	107.15
17	Labuhanhaji	5.86	250.96
18	Lab.Haji Barat	7.49	229.72
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020.

### 2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti:

#### 2.1.3.1. Kawasan Peruntukan Perikanan.

##### 2.1.3.1.1. Kawasan Perikanan Tangkap.

Kawasan Perikanan Tangkap terdapat di kecamatan-kecamatan sepanjang pesisir pantai Aceh Selatan dengan daerah penangkapan ikan seluas 367.753,40 Ha, dengan demikian keberadaan perairan laut memiliki potensi yang cukup besar dibidang perikanan tangkap dan budidaya laut namun sampai saat ini potensi tersebut masih belum dapat dikembangkan secara optimal. Dengan kayanya potensi yang masih dimiliki wilayah perairan tersebut maka dapat diprediksi bahwa usaha perikanan laut baik dari kegiatan penangkapan maupun usaha budidaya dapat dijadikan sebagai usaha andalan untuk mata

pencarian pokok baik oleh masyarakat maupun pihak swasta (investor). Pengembangan budidaya laut ini akan dialokasikan di daerah yang memiliki teluk relatif tenang seperti Tapaktuan, Labuhanhaji, Sawang, Bakongan Timur (pulau dua) dan Trumon. Kondisi alam yang mendukung pengembangan budidaya ikan tambak dan budidaya laut terbuka luas hanya menunggu sentuhan dana dan pengelolaan yang baik untuk pengembangannya, dengan demikian perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memperlancar pengembangan perikanan ke depan.

#### **2.1.3.1.2. Kawasan Perikanan Budidaya.**

Kawasan Perikanan Budidaya seluas 285,75 Ha. Pengolahan hasil perikanan dapat dikembangkan di beberapa daerah seperti Gampong Pasar Lama Kec. Labuhanhaji, Keude Meukek Kec. Meukek, Keude Bakongan Kec. Bakongan, Ujung Pulo Rayeuk dan Ujung Pulo Cut Kec. Bakongan Timur dan Gampong Keude Trumon Kec. Trumon.

#### **2.1.3.2. Kawasan Peruntukan Pertanian.**

Sehubungan dengan pengembangan potensi sumber daya wilayah untuk sektor pertanian, sesuai dengan persyaratan agroklimat tanaman seperti iklim, tanah dan topografi akan memberikan hasil yang optimal dengan kualitas yang prima. Keragaman sifat lahan ini merupakan modal dasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan perwilayah komoditas pertanian. Klasifikasi kawasan ini adalah meliputi:

- Kawasan pertanian lahan basah, dialokasikan seluas 15.013,18 ha.  
Upaya peningkatan produksi dilakukan melalui penerapan paket teknologi dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada antara lain dengan pemanfaatan pupuk organik, menggalakkan program penggunaan benih unggul serta menciptakan prasarana irigasi agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim.
- Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- Kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura, seluas 31.400,36 Ha dapat digunakan untuk komoditas cabe,

pisang, pepaya, nenas, semangka, jenis kacang/polong dan terong.

- Kawasan peternakan yang potensial untuk pengembangan tempat budidaya hijauan pakan ternak dan areal pengembangan ternak baik ternak besar maupun ternak kecil. Kawasan ini tidak diplotkan secara khusus pada peta pola ruang karena kegiatan ini potensial diseluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.
- Kawasan Perkebunan, seluas lebih kurang 86.849 Ha. terdiri dari :
  - Kawasan perkebunan besar, seluas lebih kurang 8.386 Ha. Terkait dengan terjadinya konflik atau sengketa tapal batas lahan perkebunan besar antara pemegang HGU dengan masyarakat disekitar lahan HGU di Kecamatan Trumon dan Trumon Timur maka Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten berserta jajaran telah membentuk Tim Terpadu Penetapan Tapal Batas Lahan HGU. Adapun komoditas pada kawasan peruntukan perkebunan besar di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan kajian komoditas unggulan sektor pertanian/perkebunan antara lain pala, kelapa sawit, kelapa, kakao, cengkeh, pinang, kopi, nilam, kapuk, kemiri dan sagu.
  - Kawasan perkebunan rakyat, seluas lebih kurang 78.463 Ha. Kawasan perkebunan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan luas lebih kurang 47.255 Ha. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan sehingga penyebutan kawasan yang termasuk dalam usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam dokumen RTRW Kab. Aceh Selatan menerapkan mekanisme outline yaitu penyebutan nama kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan diikuti dengan nama kawasan yang diusulkan menjadi bukan kawasan hutan, maka pencantuman nama kawasan perkebunan rakyat dalam dokumen RTRW Kab. Aceh Selatan adalah:
    - Zona Hutan Lindung (HL)/kawasan perkebunan rakyat seluas lebih kurang 17.988 Ha.
    - Zona Hutan Produksi (HP)/kawasan perkebunan rakyat seluas lebih kurang 14.017 Ha.

- Zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)/kawasan perkebunan rakyat seluas lebih kurang 5.877 Ha.
- Zona Suaka Margasatwa Trumon (SM)/kawasan perkebunan rakyat seluas lebih kurang 9.373 Ha.

#### **2.1.3.3. Kawasan Peruntukan Pariwisata.**

Kawasan Peruntukan Pariwisata, rencana pengembangannya dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan peruntukan pengembangan wisata yang direncanakan terdiri atas:

- Kawasan wisata alam, meliputi objek wisata alam yang potensial dikembangkan seperti wisata pantai/bahari dan wisata gunung.
- Kawasan wisata budaya, religi dan sejarah.
- Kawasan objek wisata minat khusus seperti surfing, diving, perahu naga dayung, arung jeram simpali, kolam renang (ie sijek, pemandian lubuk dan kolam aroya), goa batee mencanang, goa klongsong, goa muslimin dan goa kalam.

#### **2.1.3.4. Kawasan Peruntukan Industri.**

Kawasan Peruntukan Industri, terdiri dari kawasan peruntukan industri kecil menengah seluas lebih kurang 12,65 Ha dan kawasan peruntukan industri rumah tangga di seluruh kecamatan.

#### **2.1.3.5. Kawasan Peruntukan Pertambangan.**

Kawasan Peruntukan Pertambangan, rencana pengembangan kawasan ini dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian. Kawasan ini mengandung kawasan mineral logam seluas lebih kurang 152.511,42 Ha, bukan logam dan batuan seluas lebih kurang 15.488,57 Ha serta radio aktif seluas lebih kurang 58.189,04 Ha.

### **2.1.3.6. Kawasan Peruntukan Permukiman.**

Kawasan peruntukan Permukiman, rencana pengembangan kawasan ini dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Lokasi lingkungan permukiman harus memenuhi kriteria keamanan, kesehatan, kenyamanan, keindahan/keserasian/keteraturan (kompatibilitas), Fleksibilitas, keterjangkauan jarak dan lingkungan berjati diri. Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan ditetapkan berdasarkan kriteria yang secara teknis dapat digunakan untuk kawasan permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan seluas lebih kurang 2.372,58 Ha dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas lebih kurang 3.982,78 Ha diarahkan di gampong-gampong yang tidak termasuk dalam ibukota kecamatan. Pengembangan infrastruktur dasar permukiman di perdesaan diarahkan pada gampong tertinggal, terpencil, permukiman kumuh nelayan, gampong di kawasan rawan bencana serta di gampong perbatasan.

### **2.1.3.7. Kawasan Peruntukan Lainnya.**

Kawasan Peruntukan Lainnya, yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan yaitu kawasan pertahanan keamanan meliputi:

- Kawasan pertahanan dan keamanan negara, seluas lebih kurang 53,59 Ha.
- Kawasan transmigrasi, seluas lebih kurang 7.556,78 Ha.
- Kawasan Komunitas Adat Terpencil (KAT), seluas lebih kurang 351,19 Ha.
- Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, seluas lebih kurang 30,31 Ha.
- Kawasan Bandar Udara T. Cut Ali, seluas lebih kurang 108,68 Ha yang secara hirarki berfungsi sebagai bandar udara berada di Gampong Teupin Gajah Kec. Pasie Raja.

#### **2.1.4. Wilayah Rawan Bencana.**

Kawasan rawan bencana di wilayah Kab. Aceh Selatan terdiri dari kawasan rawan bencana banjir, abrasi dan gelombang pasang, gempa, gerakan tanah, tsunami, erosi dan angin kencang.

##### **2.1.4.1. Rawan Banjir.**

Banjir dapat terjadi selama atau setelah hujan lebat, apabila melebihi daya tampung sungai maka air akan meluap dan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Akibat aktifitas manusia dapat menimbulkan terjadinya banjir seperti membuang sampah ke saluran pembuangan dan sungai yang ada, mendirikan perumahan di daerah resapan air dan penebangan pohon secara liar. Daerah potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar terdapat pada daerah aliran sungai dan daerah pengaruh muara sungai besar serta dorongan air laut pasang. Banjir di Kabupaten Aceh Selatan juga dapat terjadi akibat hujan di hulu sungai soraya (Aceh Singkil) dan atau di kabupaten Aceh Tenggara (berupa banjir kiriman) yang terjadi setiap tahun sampai saat ini yang menimpa 3 Kecamatan yaitu Trumon Timur, Trumon Tengah dan Trumon.

##### **2.1.4.2. Rawan Tsunami.**

Tsunami adalah gelombang laut yang besar terjadi secara tiba-tiba karena adanya gempa dilaut atau longsoran besar didasar laut dengan kekuatan lebih dari 5 skala richter dengan kedalaman kurang dari 33 Km. Oleh karena itu kejadian gempa dan tsunami harus dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

##### **2.1.4.3. Rawan Abrasi.**

Abrasi umumnya terjadi di daerah yang mempunyai kondisi fisik pantai yang landai pada kawasan kegiatan permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, gelombang pasang air laut terjadi hampir setiap tahun di sepanjang pesisir pantai.

#### **2.1.4.4. Rawan Longsor.**

Potensi gerakan tanah umumnya banyak terjadi pada fisiografi pegunungan/perbukitan karst dan vulkan. Kawasan rawan gerakan tanah yang diindikasikan di Kabupaten Aceh Selatan terbagi dalam 3 (tiga) zona yang antara lain meliputi zona I dengan tingkat kerawanan gerakan tanah rendah, zona II dengan tingkat kerawanan gerakan tanah menengah dan zona III dengan tingkat kerawanan gerakan tanah tinggi. Penanganan lokasi yang terkena kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan mengupayakan pembuatan tanggul/bronjong/tembok, pembuatan saluran pembuangan (parit), pembersihan saluran pembuangan air, penanaman pohon kembali (reboisasi) dan pembuatan talud pengamanan disekitar bukit yang rawan longsor.

#### **2.1.4.5. Rawan Gempa.**

Gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang belum dapat dicegah, disebagian besar daerah yang rawan terhadap gempa bumi disebabkan karena aspek geologinya yang cukup kompleks. Aktifitas gempa bukanlah suatu hal yang luar biasa karena wilayah Aceh Selatan khususnya dan umumnya Pulau Sumatera memang terletak di jalur gempa. Gempa merupakan kejadian retaknya batuan didalam kerak bumi bila kekuatannya cukup kuat dan kedalamannya dangkal maka guncangan gempa akan segera disusul oleh retaknya batuan dipermukaan. Berdasarkan percepatan gempa maka wilayah Kab. Aceh Selatan dibagi dalam 3 (tiga) zona yaitu zona I dengan percepatan gempa rendah, zona II gempa sedang dan zona III gempa tinggi.

#### **2.1.4.6. Rawan Erosi.**

Bahaya erosi terutama terdapat di daerah perbukitan yang bertekstur sedang. Factor utama bahaya erosi tanah antara lain ditentukan oleh kemiring lahan, stabilitas tanah dan tekstur tanah. Kawasan rawan bencana erosi terbagi dalam 5 (lima) zona yang indikasi sesbarannya meliputi zona I dengan tingkat bahaya erosi sangat ringan, zona II dengan tingkat bahaya erosi ringan, zona III dengan tingkat bahaya erosi sedang, zona IV dengan tingkat bahaya erosi berat dan zona V dengan tingkat bahaya erosi sangat berat.

#### **2.1.4.7. Rawan Angin Kencang.**

Potensi bencana angin kencang hanya terdapat di Kecamatan Kluet Utara, Kluet Timur dan Kluet Selatan yang terbagi 3 (tiga) zona yang indikasi sebarannya meliputi zona I dengan tingkat bahaya angin kencang rendah, zona II dengan tingkat bahaya angin kencang menengah dan zona III dengan tingkat bahaya angin kencang tinggi.

### **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.**

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

#### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.**

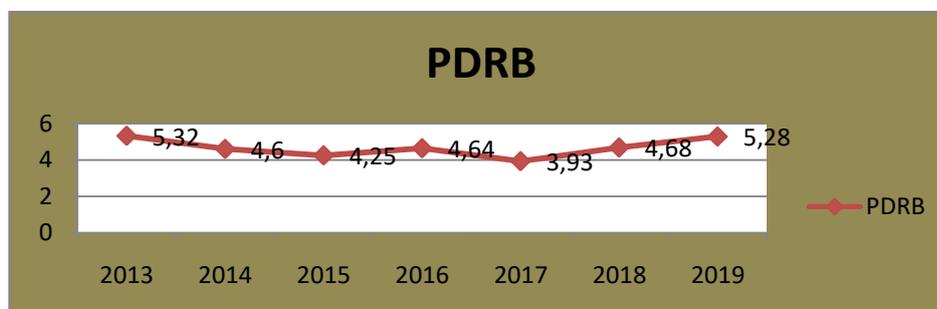
Berbagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi seperti Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Laju Inflasi.

##### **2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB.**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. begitu juga sebaliknya. PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 adalah 5.521,9 miliar rupiah.

Sementara itu, PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 mencapai 5,28%, naik sebesar 1,05% dibanding tahun 2015.

**Grafik. 2.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015–2019**



**Sumber : BPS Aceh Selatan Tahun 2020**

Menurut perkembangan pembangunan khususnya pada bidang ekonomi telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat terlihat pada Pertumbuhan PDRB kabupaten setiap tahunnya, baik dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan PDRB ADHB berdasarkan nilai kontribusi menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut :

**Tabel 2.21**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor**  
**dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019 ADHB**  
**(Juta Rupiah) Kabupaten Aceh Selatan**

No	Sektor	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.096.162,44	25,76	1.172.145,70	25,73	1.236.510,2	25,47	1.323.157,0	25,4	1.376.750	24,94
2	Pertambangan dan Penggalian	186.308,22	4,38	164.457,20	3,61	151.430,2	3,12	150.719,6	2,89	155.840	2,82
3	Industri Pengolahan	147.486,19	3,47	150.463,50	3,30	157.731,7	3,25	167.608,4	3,22	174.630	3,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.222,01	0,08	3.526,10	0,08	3.871,0	0,08	4.176,7	0,08	4.320	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	822,40	0,02	949,30	0,02	1.052,3	0,02	1.1064,1	0,02	1.150	0,02
6	Konstruksi	671.685,11	15,78	752.249,00	16,51	806.412,1	16,61	875.377,7	16,80	906.230	16,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	621.784,99	14,61	679.338,50	14,91	742.200,9	15,29	803.678,8	15,43	285.080	15,12
8	Transportasi dan Pergudangan	248.721,39	5,84	237.056,80	5,20	249.653,0	5,14	260.026,5	4,99	28.720	5,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	19.473,15	0,46	21.447,10	0,47	24.367,8	0,5	26.657,7	0,51	259.750	0,52
10	Informasi dan Komunikasi	213.635,84	5,02	221.332,40	4,86	232.739,6	4,79	243.311,3	4,67	126.070	4,70
11	Jasa	93.953,88	2,21	100.321,10	2,20	109.558,3	2,26	116.753,6	2,24	126.070	2,28

No	Sektor	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Keuangan dan Asuransi										
12	Real Estate	154.373,34	3,63	169.110,60	3,71	184.267,7	3,8	202.070,8	3,88	238.280	4,32
13	Jasa Perusahaan	24.471,37	0,57	26.141,50	0,57	27.741,0	0,57	29.513,5	0,57	30.910	0,56
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	526.564,75	12,37	585.378,40	12,85	634.018,9	13,06	686.972,1	13,19	723.770	13,11
15	Jasa Pendidikan	116.688,85	2,74	131.334,20	2,88	143.770,9	2,96	157.845,7	3,03	160.320	2,90
16	Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial	71.013,18	1,67	76.356,60	1,68	81.885,0	1,69	87.995,1	1,69	92.850	1,68
17	Jasa Lainnya	59.563,27	1,40	63.769,70	1,40	68.295,2	1,41	73.058,0	1,41	77.150	1,40
	<b>PDRB</b>	<b>4.255.930,36</b>	<b>100,00</b>	<b>4.555.377,70</b>	<b>7,04</b>	<b>4.855.505,7</b>	<b>100,00</b>	<b>5.210.086,4</b>	<b>100,00</b>	<b>5.521.190</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka) Tahun 2020.

Sedangkan Target PDRB ADHB per kapita Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 Rp. 24,89,-. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa target PDRB per kapita Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 yang dihitung berdasarkan ADHB masih diatas capaian tahun 2019 yang hanya Rp. 23,52.

Selanjutnya untuk PDRB Kabupaten Aceh Selatan dari Tahun 2015-2019 yang dihitung berdasarkan ADHK dapat dilihat pada tabel 2.22 sebagai berikut :

**Tabel. 2.22**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB**  
**Tahun 2015-2019 ADHK**  
**(Juta Rupiah) Kabupaten Aceh Selatan**

No	Sektor	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	890 319,26	3,88	923 194,90	3,56	951.998,6	3,12	989.612,1	3,95	1.003.110	1,36
2	Pertambangan dan Penggalian	175 264,02	-9,16	164 498,00	-4,95	147.916,7	-8,35	147.229,8	-0,46	159.900	8,6
3	Industri Pengolahan	126 693,00	2,79	127 529,20	0,66	128.795,2	0,99	133.748,6	3,85	138.150	3,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3 434,54	5,34	3 710,40	8,03	3.895,1	4,98	4.147,8	6,49	4.210	1,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	692,13	5,34	732,80	5,88	766,9	4,65	809,7	5,58	820	0,86
6	Konstruksi	554 123,64	5,76	603 814,50	8,84	631.274,2	4,55	663.153,6	5,05	680.580	2,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	513 901,64	5,26	538 468,00	4,67	568.615,3	5,6	600.407,4	5,59	629.720	4,88
8	Transportasi dan Pergudangan	202 816,77	5,04	200 391,60	0,79	210.483,7	5,4	217.163,6	3,17	229.350	5,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16 497,16	3,87	17 313,10	4,95	18.291,1	5,65	19.217,3	5,06	19.590	1,93
10	Informasi dan Komunikasi	191 976,68	5,53	199 739,00	4,04	207.559,3	3,92	217.003,3	4,55	221.980	2,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	71 632,42	2,24	74 144,20	3,51	77.060,1	3,93	79.238,9	2,83	84.960	7,22
12	Real Estate	126 456,63	6,19	134 839,30	6,63	141.808,0	5,17	149.979,8	5,76	155.720	3,82
13	Jasa Perusahaan	23 130,91	4,07	24 423,70	5,59	25.535,4	4,55	26.736,5	4,70	27.230	1,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	461 151,52	6,66	496 891,00	7,63	526.233,4	5,91	559.004,3	6,23	585.680	4,77
15	Jasa Pendidikan	103 340,27	5,99	110 935,40	7,35	117.583,7	5,99	125.137,6	6,42	136.950	9,44
16	Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial	63 826,91	5,50	67 460,90	5,69	71.675,1	6,25	75.967,5	5,99	78.350	3,13
17	Jasa Lainnya	52 620,14	4,68	55 317,60	5,13	57.728,5	4,36	60.394,4	4,62	62.400	3,33

PDRB	3 577 877,65	4,25	3 743 403,80	4,72	3.887.220, 2	3,93	4.068.952,2	4,68	4. 283. 680	5,2 8
------	-----------------	------	--------------	------	-----------------	------	-------------	------	-------------------	----------

Sumber: BPS (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka) Tahun 2020.

Sedangkan Target PDRB ADHK per kapita Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 Rp. 19,30,-. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa target PDRB per kapita Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 yang dihitung berdasarkan ADHK masih diatas capaian tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 18,25,-.

PDRB Kab. Aceh Selatan menurut lapangan usaha Tahun 2019 yang dihitung dengan ADHK mencapai sebesar Rp. 4.283.680.000,00. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,27% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 4.068.952.200,00. Bila di lihat persektor maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB yang menjadi keunggulan daerah sebesar Rp. 1.003.110.000,00 (1,36%), urutan kedua diikuti oleh sektor konstruksi sebesar Rp. 680.580.000,00 (2,63%), urutan ketiga perdagangan besar dan eceran sebesar Rp. 629.720.000,00 (4,88%) dan urutan keempat administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar Rp. 585.680.000,00 (4,77%). Dari uraian diatas disimpulkan bahwa Kab. Aceh Selatan memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan prioritas yang harus tetap dilakukan, karena merupakan leading sektor perekonomian daerah, yang didukung dengan penguatan sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, administasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial, trasportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, pertambangan dan penggalian, real estate, industri pengolahan, jasa pendidikan, jasa keuangan dan asuransi serta katagori lainnya. Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2015 s.d 2019 kombinasi ADHB dan ADHK Kab. Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB**  
**Tahun 2015-2019 ADHB dan ADHK**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

No	Sektor	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		ADHB	ADHK								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

No	Sektor	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		ADHB	ADHK								
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,76	3,88	25,73	3,56	25,47	3,12	25,40	3,95	24,94	1,36
2	Pertambangan dan Penggalian	4,38	- 9,16	3,61	- 4,95	3,12	-8,35	2,89	-0,46	2,82	8,6
3	Industri Pengolahan	3,47	2,79	3,30	0,66	3,25	0,99	3,22	3,85	3,16	3,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	5,34	0,08	8,03	0,08	4,98	0,08	6,49	0,08	1,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	5,34	0,02	5,88	0,02	4,65	0,02	5,58	0,02	0,86
6	Konstruksi	15,78	5,76	16,51	8,84	16,61	4,55	16,80	5,05	16,41	2,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	14,61	5,26	14,91	4,67	15,29	5,6	15,43	5,59	15,12	4,88
8	Transportasi dan Pergudangan	5,84	5,04	5,20	0,79	5,14	5,4	4,99	3,17	5,16	5,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	3,87	0,47	4,95	0,5	5,65	0,51	5,06	0,52	1,93
10	Informasi dan Komunikasi	5,02	5,53	4,86	4,04	4,79	3,92	4,67	4,55	4,70	2,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,21	2,24	2,20	3,51	2,26	3,93	2,24	2,83	2,28	7,22
12	Real Estate	3,63	6,19	3,71	6,63	3,8	5,17	3,88	5,76	4,32	3,82
13	Jasa Perusahaan	0,57	4,07	0,57	5,59	0,57	4,55	0,57	4,70	0,56	1,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	12,37	6,66	12,85	7,63	13,06	5,91	13,19	6,23	13,11	4,77
15	Jasa Pendidikan	2,74	5,99	2,88	7,35	2,96	5,99	3,03	6,42	2,90	9,44
16	Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial	1,67	5,50	1,68	5,69	1,69	6,25	1,69	5,99	1,68	3,13
17	Jasa Lainnya	1,40	4,68	1,40	5,13	1,41	4,36	1,40	4,62	1,40	3,33
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>4,25</b>	<b>100,00</b>	<b>4,64</b>	<b>100,00</b>	<b>3,93</b>	<b>100,00</b>	<b>4,68</b>	<b>100,00</b>	<b>5,28</b>

Sumber : BPS (Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka) Tahun 2020

Selanjutnya pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB ADHB dimana sektor real estate memberikan sumbangan sebesar 0,44 persen dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 0,94 persen sementara sektor lainnya memberikan kontribusi yang lebih rendah. Pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB ADHK dimana sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,06 persen dan jasa keuangan dan asuransi memberikan sumbangan sebesar 4,39 persen sementara sektor lainnya memberikan kontribusi yang lebih rendah.

**Tabel 2.24**  
**Pertumbuhan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2019**  
**ADHB dan ADHK Kabupaten Aceh Selatan**

No	Sektor	Pertumbuhan	
		ADHB (%)	ADHK (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-(0,46)	1,39
2	Pertambangan dan Penggalian	-(0,07)	8,6
3	Industri Pengolahan	-(0,06)	3,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0	1,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0,86
6	Konstruksi	-(0,13)	2,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	-(0,31)	4,88
8	Transportasi dan Pergudangan	0,17	5,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,01	1,93
10	Informasi dan Komunikasi	0,03	2,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,04	7,22
12	Real Estate	0,44	3,82
13	Jasa Perusahaan	-(0,01)	1,82
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	-(0,08)	4,77
15	Jasa Pendidikan	-(0,13)	9,44
16	Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial	-(0,01)	3,13
17	Jasa Lainnya	0	3,33
<b>PDRB</b>		<b>-(0,57)</b>	<b>5,28</b>

Sumber : BPS (Kab.A.Selatan Dalam Angka) Thn 2020, Rumus: persentase tabel 2.23 ADHB Thn 2020 idem ADHK

### 2.2.1.2 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

**Tabel Pengeluaran per kapita Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2020**

NO	Uraian	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan-Makanan	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan-Bukan Makanan	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Perkotaan dan Perdesaan-Jumlah
1	Kabupaten Aceh Selatan	571.914,39	449.330,89	1.021.245,28

Target Rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020 adalah Rp. 957.763,77,-. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020 masih di bawah target, capaian tahun 2020 sebesar Rp. 1.021.245,28,-

### 2.2.1.3 Indeks Gini

Koefisien Gini (gini Rasio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk.

**Tabel Perkembangan Gini Rasio  
Kabupaten Aceh Selatan**

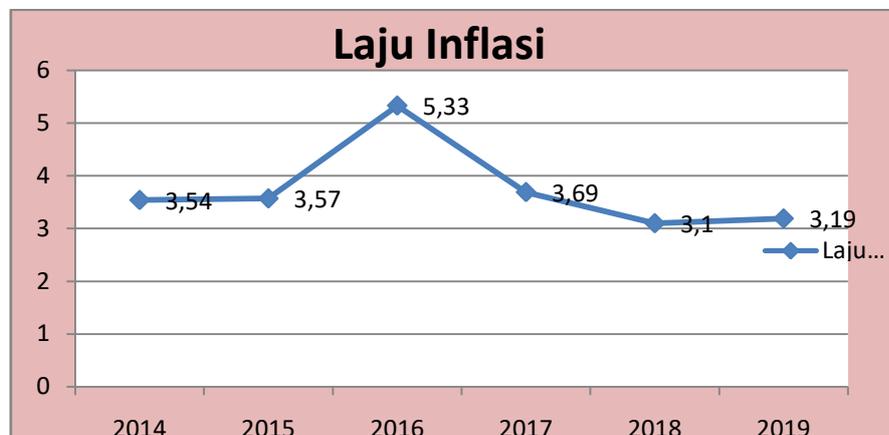
NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Gini Rasio	0,311	0,313	0,321	0,312	0,273

Target Gini Rasio Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 adalah 0,255. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian gini rasio Kabupaten Aceh selatan masih dibawah target yang diharapkan.

### 2.2.1.4 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Tahun 2019 sebesar 3,19% jauh lebih rendah dari laju inflasi Tahun 2018 sebesar 3,1% dan lebih rendah dari laju inflasi Tahun 2017 sebesar 3,69% dan lebih rendah dari laju inflasi Tahun 2014 sebesar 3,54%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik. 2.3**  
**Laju Inflasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**



Sumber : BPS Aceh Selatan Tahun 2020

#### 2.2.1.5 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 adalah Rp. 332.177 meningkat menjadi Rp. 369.107 pada Tahun 2019 atau meningkat sebesar Rp. 36.930 selama 3 tahun.

Persentase penduduk miskin tahun 2012-2019 mengalami penurunan rata-rata 0,2 persen setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 adalah 13,09%.

**Tabel 2.25**  
**Perkembangan Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Tahun 2012–2019 Kabupaten Aceh Selatan**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Garis kemiskinan (Rp)	301.185	283.446	285.301	288.619	390.000	332.177	351.228	369.107
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	31.450	29,30	28,40	29.610	30.680	32.510	32.810	31,06
3	Persentase Penduduk Miskin	14,81	13,44	12,79	13.17	13.36	14,07	13,96	13,09

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020.

Target jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 adalah 30.731 orang. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh selatan tahun 2019 masih di bawah target.

**Tabel kedalaman Kemiskinan  
Kabupaten Aceh Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan</b>	<b>Indeks Keparahan Kemiskinan</b>
2015	1,94	0,42
2016	1,83	0,35
2017	2,44	0,64
2018	1,78	0,37
2019	1,58	0,31

Target kedalaman kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 adalah 1,47. Dari tabel di atas terlihat jika capaian kedalaman kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 masih dibawah target yang hanya 1,58.

### **2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.**

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja.

Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator sebagai berikut:

#### **2.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. AMH dapat digunakan untuk:

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.

- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat menjadi dasar kabupaten yang mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Aceh Selatan selama periode Tahun 2014–2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.26**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2014–2019**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia di atas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	116.418	120.930	121.521	128.068	138.560	160.876
2	Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas	119.985	122.984	123.542	131.826	140.818	163.085
3	Angka melek huruf	97,03	98,33	98,36	97,15	98,37	98,65

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.*

Perkembangan Angka Melek Huruf selama periode ini memperlihatkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 97,03% pada Tahun 2014 menjadi 98,65% pada Tahun 2019 sehingga angka buta aksara tinggal sebesar 1,35% lagi. Jika dibandingkan dengan target capaian dalam RPJMK, realisasi pada Tahun 2019 meningkat sebesar 0,01%. Hal ini menunjukkan bahwasanya program-program yang dilaksanakan telah dapat menurunkan angka buta aksara.

### 2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2019 adalah sebesar 8,20 atau setara dengan kelas II SMP/MTs. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 8,04 dari Tahun 2014 sebesar 7,59. Jika dibandingkan dengan target capaian dalam RPJMK sebesar 8,22, realisasi pada Tahun 2019 sudah sesuai target. Hal ini memberikan indikasi peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.27**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2013-2019**

No	Kabupaten	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh Selatan	7,59	7,60	7,79	8,02	8,33	8,18	8,20

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.*

### 2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah.

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondidi pembangunan pendidikan di berbagai jenjang.

**Tabel Harapan Lama Sekolah**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

No	Kabupaten	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Aceh Selatan	13,80	14,15	14,41

Target Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 adalah 14,95. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 masih di bawah target.

#### 2.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup (UHH).

Usia Harapan Hidup (UHH) atau Expectation of Life menggambarkan kondisi panjang umur penduduk dalam suatu wilayah. UHH Kabupaten Aceh Selatan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai indikator makro pembangunan bidang kesehatan, UHH juga dipengaruhi oleh Angka kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu. Pada Tahun 2017 UHH Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar 71,1 tahun dan meningkat menjadi 71,2 tahun pada Tahun 2018 dan pada tahun 2019 tetap sebesar 71,2 tahun, namun masih di bawah target RPJMK tahun 2019 sebesar 64,04 tahun. Meningkatnya UHH sangat erat kaitannya dengan pendidikan, pola hidup sehat dan gizi makanan yang semakin baik dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat (daya beli), maka untuk itu pemerintah dalam setiap kebijakan pembangunan harus mampu meningkatkan sektor riil dalam hal ini berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Karena UHH identik dengan tingginya pendapatan berupa kemampuan memenuhi kebutuhan hidup agar hidup itu lebih berkualitas dengan kesehatan yang lebih baik. Walaupun angka usia harapan hidup tersebut meningkat pertahunnya, namun angka dimaksud masih dibawah UHH rata-rata nasional yang mencapai 69,43 tahun. Mengingat angka tersebut masih dibawah angka rata-rata nasional 69,43 tahun, maka diperlukan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

**Tabel 2.28**  
**Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2017-2019**

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Angka Usia Harapan Hidup	71,1	71,2	71,2

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Selatan

### 2.2.2.5 Rasio Penduduk yang Bekerja.

Problematika sumberdaya manusia (SDM) khususnya di Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang sesuai ketersediaan sumberdaya yang ada dan sesuai dengan potensi daerah agar kegiatan ini mampu menstimulir kegiatan pembangunan serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar (trickal down effect).

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (labour force) menurut Soemitro Djojohadikusumo mendefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio kesempatan kerja Kabupaten Aceh Selatan dari Tahun 2014-2019 mengalami peningkatan dengan demikian perlu mendapatkan perhatian untuk perluasan lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.29**  
**Rasio Penduduk yang Bekerja**  
**di Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2014-2019**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Bukan Angkatan Kerja	56.005	65.022	67.204	65.683	65.59	46.231
2.	Angkatan Kerja	98.112	92.151	99.807	97.316	100.881	119.257
3.	Bekerja	88.779	82.931	90.655	90.266	91.846	109.508
4.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,9049	0,8999	0,9083	0,9276	0,9104	0.9341

*Sumber : BPS Kab. Aceh Selatan*

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Selatan memperlihatkan sebesar 0,9049 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 0,9341 pada tahun 2019. Capaian Rasio penduduk yang bekerja sebesar 0,9341 artinya jumlah masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang bekerja adalah sebesar 93,41 persen atau pengangguran sebesar 6,59 persen.

#### **2.2.2.6 Kriminalitas (Angka Kriminalitas).**

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 232 tindak kriminal dan pada Tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 166 tindak kriminal, pada Tahun 2018 kembali meningkat sebesar 161 tindak kriminal namun pada Tahun 2019 terjadi penurunan kembali sebesar 146 tindak kriminal.

Dengan demikian untuk mengatasinya, apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir sehingga roda Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan dapat berjalan dengan lancar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2.30**  
**Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2016-2019**

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus Narkoba	17	24	30	37
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	1	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	15	11	16	14
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	46	20	37	20
5.	Jumlah kasus Pencurian	76	64	44	33
6.	Jumlah kasus Penipuan	10	11	12	8
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	232	166	161	146
9.	Jumlah Penduduk	229.565	230.254	234.761	232.403
10.	Angka Kriminalitas $\{ (8)/(9) \} \times 100$	10,10	7,14	6,92	6,28

**Sumber : Polres Aceh Selatan**

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Kinerja pembangunan seni dan budaya Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator seperti jumlah grup kesenian, gedung kesenian, klub olahraga dan gedung olahraga serta masing-masing dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.31**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga**  
**Tahun 2013-2017 Kabupaten Aceh Selatan**

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah grup kesenian	70	70	70	70	70
2.	Jumlah Gedung Kesenian	1	0	0	0	0
3.	Jumlah Klub	311	315	332	342	345

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Olahraga					
4.	Jumlah Gedung Olah raga	1	2	2	2	2

*Sumber : Dispora dan Disdikbud Kabupaten Aceh Selatan*

Upaya mengembangkan kesenian diharapkan memberikan dampak kesejahteraan bagi pelaku seni untuk mendukung pengembangan kesenian terutama dengan melakukan pembinaan serta pembangunan sarana dan prasarana gedung kesenian secara memadai juga menambah event-event kesenian dan budaya bertaraf nasional.

### **2.3. Aspek Pelayanan Umum.**

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup pelayanan urusan wajib dan pilihan. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek pelayanan umum selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

#### **2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.**

Kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi beberapa bidang urusan.

##### **2.3.1.1. Layanan Urusan Wajib Dasar.**

###### **2.3.1.1.1. Pendidikan.**

###### **2.3.1.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar (APK).**

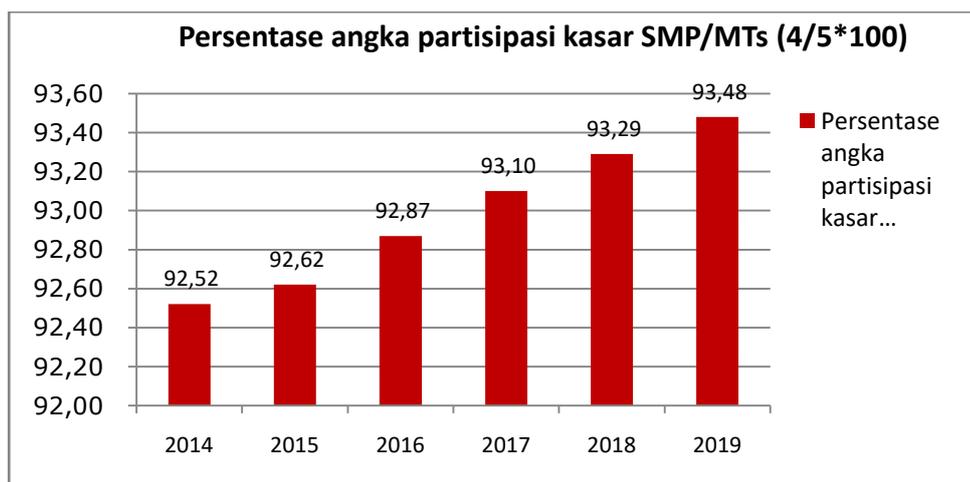
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs per jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

**Tabel 2.32**  
**Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**SD/Mi dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Jumlah penduduk usia sedang sekolah SD/MI	27.542	27.346	27,166	28.391	29.089	29.804
2	Jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD/MI	25.586	25.989	25,882	27.837	28.463	29.103
3	Persentase angka partisipasi kasar SD/MI ( $1/2*100$ )	107,64	105,22	104,96	101,99	102,19	102,41
4	Jumlah penduduk usia sedang sekolah SMP/MTs	11.994	11.914	11.762	11.880	12.172	12.471
5	Jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SMP/MTs	12.963	12.863	12.665	12.760	13.047	13.341
6	Persentase angka partisipasi kasar SMP/MTs ( $4/5*100$ )	92,52	92,62	92,87	93,10	93,29	93,48

**Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.**

**Grafik. 2.4**  
**Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Tahun 2014-2019**  
**Kabupaten Aceh Selatan**



### 2.3.1.1.1.2. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT).

Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs pada tahun pengamatan per total jumlah penduduk pada tahun pengamatan.

**Tabel 2.33**  
**Persentase Angka Pendidikan Yang di Tamatkan**  
**SD/Mi dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan SD/MI	25.586	25.989	25.882	27.723	28.405	29.103
2.	Total jumlah penduduk	220.971	224.897	228.603	230.254	231.893	235.115
3.	Persentase APT SD/MI ( $1/2*100$ )	11,58	11,55	11,32	12,04	12,30	12,55
4.	Jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan SMP/MTs	12.963	12.863	12,665	12.708	13.021	13.341
5.	Persentase APT SMP/MTs ( $4/2*100$ )	5,87	5,72	5,54	5,52	5,64	5,75

*Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Aceh Selatan.*

### 2.3.1.1.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM).

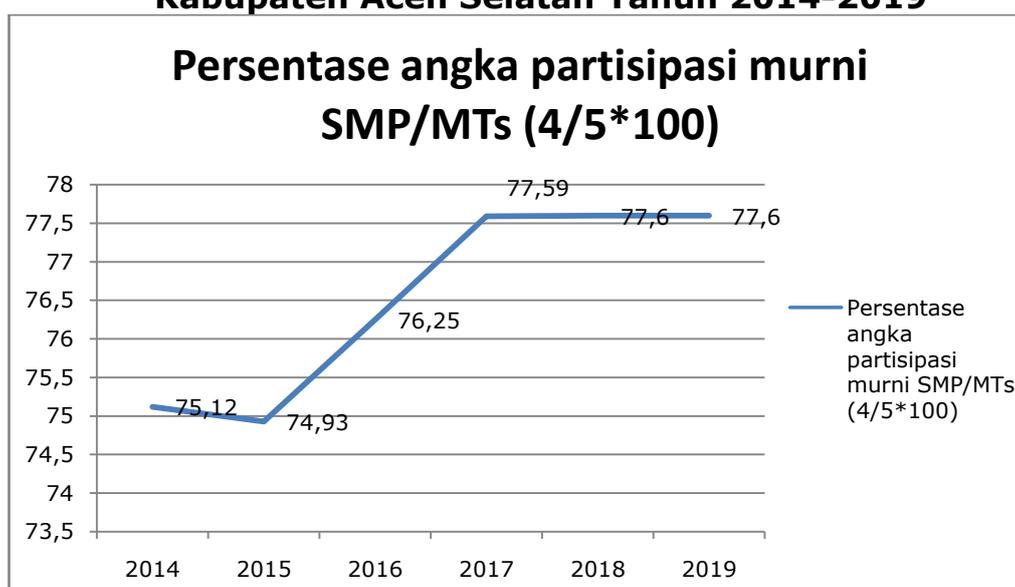
Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Murni, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja indikatornya antara lain angka partisipasi murni SD/MI dan SMP/MTs adalah jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI dan SMP/MTs usia 13-15 Tahun per jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun SD/MI dan usia 13-15 Tahun SMP/MTs.

**Tabel 2.34**  
**Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**SD/Mi dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

<b>N o</b>	<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1.	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI	25.041	24.987	25,142	27.027	27.692	28.373
2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	25.586	25.989	25,882	27.723	28.405	29.103
3.	Persentase angka partisipasi murni SD/MI ( $1/2*100$ )	97,87	96,14	97,14	97,45	97,49	97,49
4.	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs	9.738	9.638	9,658	9.861	10.104	10.352
5.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	12.963	12.863	12,665	12.708	13.021	13.341
6.	Persentase angka partisipasi murni SMP/MTs ( $4/5*100$ )	75,12	74,93	76,25	77,59	77,60	77,60

**Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.**

**Grafik. 2.5**  
**Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**



**Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan.**

#### **2.3.1.1.1.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS).**

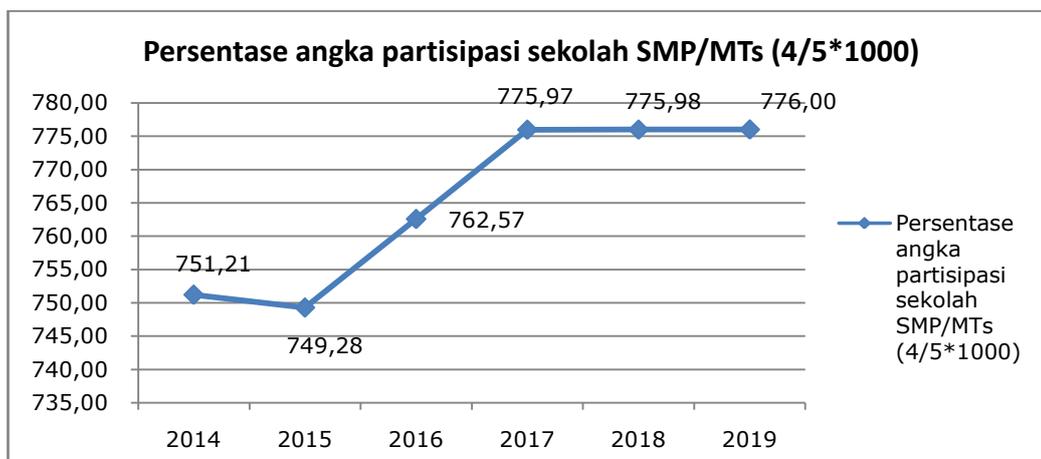
Realisasi kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja indikatornya antara lain angka partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs adalah jumlah murid usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI dan SMP/MTs usia 13-15 Tahun per jumlah penduduk usia 7-12 Tahun SD/MI dan usia 13-15 Tahun SMP/MTs.

**Tabel 2.35**  
**Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah murid usia 7-12 Tahun	25.041	24.987	25.142	27.027	27.692	28.373
2	Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun	25.586	25.989	25.882	27.723	28.405	29.103
3	Persentase angka partisipasi sekolah SD/MI ( $1/2 \times 1000$ )	978,70	961,45	971,41	974,89	974,90	974,92
4	Jumlah murid usia 13-15 Tahun	9.738	9.638	9,658	9.861	10.104	10.352
5	Jumlah penduduk usia 13-15 Tahun	12.963	12.863	12,665	12.708	13.021	13.341
6	Persentase angka partisipasi sekolah SMP/MTs ( $4/5 \times 1000$ )	751,21	749,28	762,57	775,97	775,98	776,00

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan.*

**Grafik. 2.6**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Tahun 2014-2019 Kabupaten Aceh Selatan**



### 2.3.1.1.1.5. Angka Putus Sekolah.

Realisasi kinerja indikator angka putus sekolah, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja indikator angka putus sekolah yaitu antara lain angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.36**  
**Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Capaian Kinerja Angka Putus Sekolah SD/MI	30	25	5	3	1,7	2
2	Jumlah Seluruh Angka Putus Sekolah SD/MI	76	70	35	15	16	23
3	Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI ( $1/2 \times 100$ )	0.29	0.4	0.36	0.26	0,11	0.09
4	Jumlah Capaian Kinerja Angka Putus Sekolah SMP/MTs	54	53	36	21	1.6	0.5
5	Jumlah Seluruh Angka Putus Sekolah SMP/MTs	110	105	96	87	11	8
6	Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs ( $4/5 \times 100$ )	0.49	0.5	0.38	0.24	0,15	0.06

**Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan**

### 2.3.1.1.1.6. Fasilitas Pendidikan.

Realisasi kinerja indikator fasilitas pendidikan, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja indikatornya jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik dibagi dengan jumlah seluruh sekolah SD/MI dan jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik dibagi dengan jumlah seluruh sekolah SMP/MTs, lebih jelas dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.37**  
**Persentase Fasilitas Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah seluruh sekolah SD/MI	238	238	239	239	239	239
2.	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	162	185	211	234	229	233
3.	Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs	73	74	80	80	80	80
4.	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	39	55	63	77	69	77
5.	Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (2/1 *100)	68.07	77.73	88.28	97.91	95.81	97.49
6.	Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (4/3*100)	53.42	74.32	78.75	96.25	86.25	96.25

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan*

#### 2.3.1.1.1.7. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs.

Realisasi kinerja indikator Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar adalah jumlah sekolah SD/MI+SMP/MTs per jumlah penduduk usia (7-12 Tahun) + (13-15 Tahun).

**Tabel 2.38**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**  
**SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

NO	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah sekolah SD/MI	238	238	239	239	239	239
2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	25.586	25.989	25.882	27.723	28.405	29.103
3.	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI (1/2*10.000)	93,02	91,58	92,34	86,21	84,14	82,12

4.	Jumlah sekolah SMP/MTs	73	74	80	80	80	80
5.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	12.963	12.863	12,665	12.708	13.021	13.341
6.	Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs ( $4/5 \times 10.000$ )	56,31	57,53	63,17	62,95	61,44	59,96

**Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan**

Jenjang pendidikan SD/MI rasio gedung sekolah dengan penduduk usia sekolah adalah sebesar 93,02 Tahun 2014, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat menampung 1 : 111 penduduk usia sekolah SD/MI atau 234 gedung sekolah per 26.056 penduduk usia sekolah SD/MI. Pada Tahun 2019 rasio tersebut menjadi 82,12 artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 1 : 121 penduduk usia sekolah SD/MI atau 239 gedung sekolah per 29.103 penduduk usia sekolah SD/MI.

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio gedung sekolah dengan penduduk usia sekolah adalah sebesar 56,31 pada Tahun 2014, artinya rata-rata satu gedung sekolah dapat menampung 1 : 177 penduduk usia sekolah SMP/MTs atau 73 gedung sekolah per 12.963 penduduk usia sekolah SMP/MTs. Pada Tahun 2019 rasio tersebut menjadi 80 artinya setiap satu gedung sekolah dapat menampung 1 : 166 penduduk usia sekolah SMP/MTs atau 80 gedung sekolah per 13.341 penduduk usia sekolah SMP/MTs.

#### **2.3.1.1.1.8. Rasio Guru/Murid Sekolah SD/MI dan SMP/MTs.**

Realisasi kinerja indikator Rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs adalah jumlah guru SD/MI+SMP/MTs per jumlah murid SD/MI+SMP/MTs.

**Tabel 2.39**  
**Rasio Jumlah Guru/Murid Sekolah SD/MI dan SMP/MTs**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014–2019**

NO	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Guru SD/MI	4.016	4.003	3.995	4,325	5.294	5.424
2.	Jumlah Murid SD/MI	27.542	27.346	27,166	28.391	29.089	29.804

NO	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.	Rasio jumlah guru dan murid SD/MI ( $1/2 * 10.000$ )	1458,14	1463,83	1470,59	1537,72	1819,93	1819.89
4.	Jumlah Guru SMP/MTs	1.284	1.232	1.228	1.431	1.332	1.365
5.	Jumlah Murid SMP/MTs	11.994	11.914	11.762	11.880	12.172	12.471
6.	Rasio jumlah guru dan murid SMP/MTs ( $4/5 * 10.000$ )	1.070,54	1.034,08	1.044,04	1.092,70	1.094,31	1.094.54

**Sumber : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan**

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata rasio Guru tingkat SD/MI dari Tahun 2014 adalah sama (1 : 7) dan meningkat menjadi (1 : 5) pada tahun 2019, untuk tingkat SMP/MTs (1 : 9) pada tahun 2014 dan juga 1 : 9) pada tahun 2019. Dengan demikian rata-rata rasio dari tingkat SD/MI s.d SMP/MTs masih dibawah standar Nasional artinya Kabupaten ini telah terjadi kelebihan guru tinggal bagaimana meningkatkan kompetensi guru.

Hasil penelitian Bappeda Provinsi Aceh mengenai masih rendahnya mutu pendidikan kepada pemerintah daerah diharapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- perlu meningkatkan pengelolaan semua jenis dan satuan pendidikan;
- perlu menerapkan Instructional leadership pada semua jenis dan satuan pendidikan yang masih "kurang";
- perlu adanya keterpenuhan semua Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua jenis dan satuan pendidikan (rata-rata masih dibawah 60 %);
- perlu pemerataan guru yang "top" kualitasnya pada semua satuan pendidikan yang masih sangat "bermasalah";
- perlu penempatan kepala sekolah yang "tepat";
- perlu adanya kebijakan yang "berkeadilan" pada sekolah unggul yang dikelola Pemerintah;
- perlu penguatan koordinasi antar lembaga kependidikan;
- "tumpang tindih" pelaksanaan tugas antara lembaga-lembaga think tank, LPTK, penjamin mutu dan pelaksanaan pendidikan untu satuan pendidikan harus dtiadakan;
- Perlu adanya fasilitas pendukung pembinaan guru dan tenaga kependidikan.

Hal tersebut diatas, jika dilaksanakan maka akan meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Aceh Selatan. Rasio kecukupan guru sudah memadai bahkan melebihi bila dibandingkan dengan standar Nasional, hanya saja pemerataan guru terutama guru-guru untuk daerah terpencil/terisolir masih kekurangan guru. Hal ini dikarenakan guru-guru lebih senang ditugaskan di daerah perkotaan yang memiliki sarana publik yang memadai. Ini tentunya bertolak belakang dengan rona kehidupan pedesaan yang minim fasilitas publik baik segi jumlah maupun kualitas. Sehingga dalam mengakses kebutuhan kehidupan hariannya terasa sulit, lambat dan lama, namun permasalahan ini sudah dilakukan beberapa langkah kebijakan berupa adanya kompensasi bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil/terisolir diberikan insentif lebih berupa penambahan honor atau gaji dari gaji pokok. Untuk itu kita harapkan bersama adanya sosialisasi dan koordinasi yang menyeluruh sehingga program ini dapat diketahui dan dimanfaatkan para stakeholder yang berkompeten di dunia pendidikan pada saat sekarang ini.

Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah di kabupaten Aceh Selatan juga diikuti dengan bertambahnya jumlah gedung sekolah yang dibangun serta penambahan tenaga pendidikan.

Rasio guru/murid pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Selatan untuk tingkat SD/MI dari tahun 2019 mengalami perbandingan yang sama yaitu 1 : 5 artinya rata-rata satu orang guru dapat mengajar 5 orang murid. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio guru/murid adalah sebesar 1 : 9 pada Tahun 2014, artinya rata-rata satu orang guru mengajar 8 murid sedangkan pada Tahun 2019 rasio tersebut menjadi 1 : 10 artinya setiap satu orang guru mengajar 9 murid.

#### **2.3.1.1.2. Kesehatan.**

##### **2.3.1.1.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Kematian Bayi, Kematian Balita, Kematian Neonatal dan Angka Kematian Ibu.**

Salah Satu indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah menurunnya angka Kematian bayi. Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Semakin tinggi

Angka Kematian Bayi mengindikasikan juga jeleknya keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Aceh selatan selama priode Tahun 2014 – 2019 menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 995/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2014 menjadi 997/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2019. Meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) tersebut juga meningkatnya Angka Kematian Bayi yaitu dari 5/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2015 menjadi 13/1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2019.

Fenomena ini tidaklah menjadi ukuran, bahwasanya program Keluarga Berencana (KB) sudah berhasil, namun fenomena ini harus disikapi lebih mendalam faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan kelahiran bayi yang bergizi buruk, untuk itu pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan akan pentingnya merencanakan kelahiran baik dari segi jumlah maupun jarak kelahiran anak.

**Tabel 2.40**  
**Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi,**  
**Kematian Bayi, Kematian Balita,**  
**Kematian Neonatal dan Angka Kematian Ibu**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014–2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun.	17	33	44	35	42	48
2	Jumlah Kelahiran Hidup.	3.743	3.845	3.706	4.427	3.912	3699
3	Angka Kematian Bayi	5	9	12	13	10	13
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	995	991	996	997	989	997
5	Angka Kematian Balita	4	4	5	5	12	15
6	Angka Kematian Neonatal	31	27	21	19	6	11

7	Angka Kematian Ibu	1	2	5	6	7	270
---	--------------------	---	---	---	---	---	-----

**Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.**

### **2.3.1.1.2.2. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) Per Satuan Balita.**

Posyandu merupakan suatu wahana komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas Kesehatan dan KB yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS (Norma keluarga kecil bahagia sejahtera)
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada posyandu. karena posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan, diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio Posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu, perlu dihitung rasio ketersediaan Posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah Posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

**Tabel 2.41**  
**Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2014–2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah posyandu	313	316	319	78	68	326
2.	Jumlah balita	17.711	18.160	18.302	19.704	21.831	18674
3.	Rasio ( $1/2 \times 1000$ )	17,67	17,40	17,43	3,96	3,11	17,45

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan.*

Perkembangan Posyandu di Kabupaten Aceh Selatan selama periode 2014-2019 menunjukkan perkembangan yang proporsional dengan perkembangan jumlah balita. Rasio Posyandu per balita Tahun 2014 adalah 1 : 57 dan juga 1 : 57 pada Tahun 2019. Berdasarkan data-data tersebut, maka jumlah posyandu yang ada saat ini belum memadai dan perlu penambahan serta bagaimana cara memberdayakan Posyandu tersebut dengan kualitas pelayanan yang prima.

### **2.3.1.1.2.3. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Per Satuan Penduduk.**

Perkembangan dari masing-masing rasio puskesmas, poliklinik dan pustu di Kabupaten Aceh Selatan selama periode Tahun 2013–2019 tidak menunjukkan perkembangan yang

nyata, hanya saja pada rasio pustu sedikit mengalami penurunan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.42**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**  
**di Kab. Aceh Selatan Tahun 2014–2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Puskesmas	23	23	23	24	24	24
2.	Jumlah Poliklinik	2	5	5	6	8	8
3.	Jumlah Pustu	54	53	53	53	53	56
4.	Jumlah Penduduk	220.971	224.897	229.565	230.254	233.756	238081
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	0,26	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24

**Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan**

Berdasarkan data-data tersebut, maka jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu yang ada saat ini belum memadai, bahkan ada beberapa puskesmas dan pustu yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk itu perlu dibenahi dengan kualitas pelayanan yang prima. Seiring dengan perkembangan informasi diikuti juga dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi terutama tentang informasi medis semakin hari semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dan pendapatan yang lebih baik akan menjadikan masyarakat lebih berkeinginan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik (prima) terutama dari segi akses dan pelayanan medis. Ini ditandai dengan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih, lebih senang berobat langsung ke Klinik swasta (Dokter Spesialis) daripada berobat ke Puskesmas, Poliklinik dan Pustu. Walaupun kita ketahui bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menjamin warga negaranya atau menanggung segala biaya pengobatan warganya. Fenomena ini seharusnya tidak terjadi

bila pemerintah mengambil sikap tegas bahwasanya pelayanan kesehatan masyarakat merupakan hak hakiki masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sama bagi setiap warga Negara.

#### 2.3.1.1.2.4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk.

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Perkembangan rasio rumah sakit persatuan penduduk di kabupaten Aceh Selatan priode 2013–2019 mengalami peningkatan dari 0,0045 pada Tahun 2014 menjadi 0,0042 pada Tahun 2019. Walau demikian, pengembangan RSUD Yulidin Away baik dari segi fasilitas, penambahan tenaga dokter spesialis dan penataan arealnya perlu mendapat prioritas, apalagi saat ini RSUD Yulidin Away sudah menjadi salah satu rumah sakit regional di Provinsi Aceh.

**Tabel 2.43**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk**  
**Kab. Aceh Selatan Tahun 2014–2019**

<b>N O</b>	<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	-	
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-	
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	-	-	-	-	-	
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
6.	Jumlah Penduduk	220.971	224.897	228.603	230.254	233.756	238081
7.	Rasio Jumlah Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0045	0,0044	0,0043	0,0087	0,0089	0,0042

**Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan**

### 2.3.1.1.2.5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk.

Salah satu permasalahan dalam urusan kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan saat ini adalah masih kurangnya tenaga dokter khususnya tenaga dokter spesialis. Apalagi bila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dimana idealnya Satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Memperhatikan perkembangan rasio dokter per jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan yang dilayani selama lima tahun terakhir, pada Tahun 2019 menunjukkan perbandingan 1 orang dokter melayani 3.629 penduduk. Ini bermakna masih kurangnya tenaga dokter di Kabupaten Aceh Selatan.

**Tabel 2.44**  
**Jumlah Dokter Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2014-2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Dokter	63	64	64	81		118
2	Jumlah Penduduk	220.971	224.897	228.603	230.254	235.115	238.081
3	Rasio Dokter per satuan penduduk	1:3.628	1:2.677	1:2.721	2,72	1:4798	1:2017

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan*

### 2.3.1.1.2.6. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk.

Sehubungan dengan masih tingginya jumlah penduduk yang sakit di Kabupaten Aceh Selatan, disamping perlu tersedianya jumlah dokter yang memadai juga harus didukung dengan tersedianya tenaga medis yang cukup.

Rasio tenaga medis persatuan penduduk mengindikasikan besar ketersediaan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Perkembangan rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah sebesar 2,2537 atau 1 : 443 penduduk pada Tahun 2014 dan sebesar 3,0058 atau 1 : 343 pada Tahun 2017 dan pada tahun 2019 sebesar 0,4956 atau 1 : 2.017. Menurunnya rasio ini disebabkan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah tenaga medis dimasukkan jumlah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan, namun data pada tahun

2019 jumlah tenaga medis yang dimasukkan hanya jumlah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi saja.

**Tabel 2.45**  
**Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2014-2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tenaga medis	498	676	601	670	739	132
2	Jumlah Penduduk	220.971	224.897	228.603	230.254	235.115	238.081
3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk /1000 pddk	2,2537	3,0058	1,9689	2,9098	3,1431	0,5544

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan*

Dilihat dari indikator aspek pelayanan umum di bidang kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah dan terus berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui menyediakan fasilitas kesehatan tersebut yang dapat memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan.

#### **2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

Salah satu infrastruktur pembangunan yang sangat umum adalah penyediaan prasarana transportasi berupa jalan dan jembatan, agar pelaksanaan barang dan jasa berjalan dengan lancar, maka dapat terwujud apabila pelaksanaan perbaikan jalan dan jembatan dilakukan secara efisien dengan mengutamakan aksesibilitas yang tinggi dan teratur. Indikator kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.46**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pekerjaan Umum**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015-2019**

Indikator	Tahun
-----------	-------

	2015	2016	2017	2018	2019
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,63	0,69	0,486	0,459	0,456
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00436	0,00436	0,00426	0,00420	0,00411
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	63,31	69,33	48,55	45,91	45,57
Rasio jaringan irigasi	4,53	5,07	5,22	5,07	5,79

**Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Selatan Tahun 2020**

Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi kinerja beberapa indikator yaitu antara lain proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 0,63 pada Tahun 2015 dan menurun pada Tahun 2019 menjadi 0,456. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk terjadi peningkatan dari 0,00436 pada Tahun 2015 menjadi 0,00411 pada Tahun 2019. Selanjutnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 63,13% pada Tahun 2015 menurun menjadi 45,57% pada Tahun 2019, sedangkan Rasio jaringan irigasi sebesar 4,53 pada tahun 2015 meningkat menjadi 5,79 pada tahun 2019.

Kinerja dari aspek pelayanan umum urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain ruang terbuka hijau yang ada di Kab. Aceh Selatan serta banyaknya bangunan yang ber Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan yang ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- Didominasi komunitas tumbuhan.

Selanjutnya IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan ruang dapat dilihat dari luas ruang terbuka hijau serta bangunan yang ber IMB. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah ruang terbuka hijau tercatat seluas 1,9072 ha. Jumlah tersebut diharapkan akan terus meningkat ditahun-tahun mendatang seiring dengan ditingkatkannya penataan kota dan penegakan Perda mengenai IMB. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mematuhi regulasi tentang pendirian bangunan.

Namun demikian upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pada regulasi tata ruang dan bangunan tersebut perlu dibarengi dengan pelayanan perizinan yang lebih baik.

**Tabel 2.47**  
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang**  
**Tahun 2015–2019**

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Luas RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kawasan kabupaten	1,9072	1,9072	1,9072	1,9072	1,9072
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	-	HGB 42.234	HGB 42.234	HGB 42.234	HGB 42.234
3.	Rasio Ruang Terbuka Hijau/Luas wilayah ber HPL/HGB	-	0,00071	0,00071	0,00071	0,00071
4.	Jumlah bangunan berIMB	74	124	177	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020

#### 2.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pembangunan perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman akan mengikutsertakan banyak aspek karena harus dilakukan dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan terpadu dengan sektor-sektor lain.

Perubahan sosial ekonomi yang dapat membawa dampak berubahnya kondisi perumahan dimana perubahan kebutuhan perumahan dan permukiman tidak pernah menurun sementara di sisi lain tidak diikuti dengan bertambahnya persediaan

perumahan dan permukiman secara proporsional. Indikator kinerja makro urusan perumahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.48**  
**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Rumah layak Huni	0,25	0,26	0,26	0,27	0,16	0,16
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (unit)				215	241	360
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau (%)				0,01	0,0036	0,00054
Jumlah Rumah (Unit)				66.180	66.180	66.180
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)				38.147	38.837	10.279
Jumlah Rumah Berakses Air Minum				10.886	54.820	57.561
Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi				22.571	47.014	47.664
Jumlah Rumah Tinggal Tidak Berakses Listrik				1.126	7.592	7.212
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sanitasi layak				34,11	71,04	72,02

*Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020*

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa beberapa indikator dengan realisasi kinerja seperti rumah tidak layak huni pada tahun 2019 berjumlah 10.279 unit dan cakupan ketersediaan rumah layak huni berjumlah 360 unit hanya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 0,0054 % sedangkan rumah tinggal tidak berakses listrik berjumlah 7.212 unit, artinya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kab. Aceh Selatan.

#### **2.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.**

Kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilakukan melalui pembinaan

terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Untuk mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan pula ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan juga didukung dengan keberadaan Pos Siskamling di setiap Gampong. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis, sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

**Tabel 2.49**  
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenteraman,**  
**Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Linmas	2.298	2.386	251	1.700	1.700	1.700
2.	Jumlah penduduk	220.971	224.897	228.603	230.254	235.115	238.081
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	100,52	106,09	10,93	73,83	72,30	71,40
4.	Jumlah LSM terdaftar	41	41	46	59	59	59
5.	Jumlah LSM tidak aktif	38	20	20	26	20	20
6.	Jumlah LSM aktif (1-2)	3	21	26	33	39	39
7.	Jumlah Pembinaan Terhadap LSM Ormas dan OKP	-	-	1	1	-	-
8.	Jumlah Pembinaan Politik	-	-	-	-	-	-

	Daerah						
--	--------	--	--	--	--	--	--

*Sumber Satpol PP, Kesbang Pol dan Dukcapil*

Kondisi LSM yang terdaftar pada saat Tahun 2014 dan 2015 tetap berjumlah 41 LSM, terjadi peningkatan mulai Tahun 2015 berjumlah 46 LSM dan tahun 2016 sampai tahun 2019 tetap berjumlah 59 LSM. LSM yang tidak aktif pada Tahun 2014 berjumlah 38 LSM, pada Tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan 20 LSM, Tahun 2017 adanya peningkatan berjumlah 26 LSM. Tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan berjumlah 20 LSM. Jumlah LSM aktif Tahun 2014 berjumlah 3 LSM, Mulai Tahun 2015 terjadi kenaikan menjadi 21 LSM, Tahun 2016 meningkat menjadi 26 LSM, Tahun 2017 meningkat menjadi 33 LSM, sedangkan tahun 2018 dan 2019 berjumlah 39 LSM. Sedangkan kondisi aspek pelayanan umum dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan dalam lima tahun ini menunjukkan masih kurangnya kegiatan pembinaan politik daerah serta pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, hanya satu jumlah pembinaan saja pada Tahun 2016 dan tahun 2017, dengan demikian Pemerintah Daerah perlu adanya pembinaan lebih lanjut.

#### **2.3.1.1.6. Sosial.**

Aspek pelayanan umum bidang Sosial terlihat dari beberapa indikator antara lain sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS (jiwa), persentase PMKS yang tertangani, persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dan persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Adapun kinerja urusan ini dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.50**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Sosial**  
**Tahun 2015–2019**

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Panti Asuhan	8	8	7	7	5
2.	Panti Jompo	1	1	1	1	0
3.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	28,10	28,10	14,85	14,00	0
4.	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang)	32.625	82.664	18.419	82.664	151.316
5.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	28,10	28,10	14,85	14,85	37,78
6.	Persentase PMKS yang tertangani		28,10	14,85	8	
7.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	40	65	70	25	0,01
8.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	0,1	0,1	0,1	
9.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
10.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	70	75	75	75	100
13.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	75	80	80	60	14,53

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari beberapa indikator hanya indikator korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat yang mencapai target yaitu 100%, dengan demikian untuk indikator lain perlu adanya bantuan dari pihak Pemerintah Daerah yang berkelanjutan.

### **2.3.1.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.**

#### **2.3.1.2.1. Ketenagakerjaan.**

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan terlihat dari beberapa indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.52**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 s/d 2019**

Indikator	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk usia kerja	150.938	154.117	157.173	N/A	162.999	163.665	165.488
Angkatan Kerja	92.935	98.112	92.151	N/A	97.316	100.881	119.257
Tingkat partisipasi angkatan kerja	61.57	63.66	58.33	N/A	59.70	58.40	59.90
Penduduk yang Bekerja	85.684	88.799	82.931	N/A	90.266	101.957	109.508
Pengangguran terbuka	7.251	9.313	9.220	N/A	7.050	9.323	9.607
Tingkat pengangguran terbuka	7.80	9.49	10.01	N/A	7.24	7.34	9.07

**Sumber: BPS satkernas, diolah Pusdatinaker**

Target Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Selatan tahun 2019 adalah 9.589 orang. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja selama Tahun 2013 mencapai 61,57% atau sedikit di bawah Tahun 2014 sebesar 63,66% dan pada Tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 58,33%. Indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 sebesar 59,70%, terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 58,40% dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 59,905. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2019 sebesar 9,07 % atau terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga merupakan program prioritas Pemerintah Daerah dalam pembangunan dimana penduduk kabupaten lebih banyak sebesar 3% dari jumlah penduduk laki-laki. Dalam rangka pemberdayaan perempuan tersebut diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta. Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.52**  
**Perkembangan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3.701	3.701	3.701	3,723	3,164	3,258
Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRK	1	1	1	1	1	3
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	0,0006	0,0009	93,81	56,16	16,99	29,81
Rasio KDRT			0,00090	0,0038	0,0028	0,0015

**Sumber : BP3AKB Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 3,258%, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK mencapai 10% atau 3 orang dari jumlah total anggota DPRK sebanyak 30 orang. Selanjutnya partisipasi perempuan di lembaga swasta mencapai 29,81% sedangkan rasio KDRT menurun menjadi 15 persepuluh ribu keluarga dari target 35 persepuluh ribu rumah tangga. Indikator ini akan diperkuat dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mencerminkan keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Aceh Selatan.

### 2.3.1.2.3. Pangan.

Kinerja urusan Pangan bisa dilihat dari beberapa indikator antara lain ketersediaan pangan utama dan produksi hasil ternak, regulasi ketahanan pangan, ketersediaan energi dan protein perkapita serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

**Tabel 2.53**  
**Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2014-2019**

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan pangan utama (Kg/1000 penduduk)	202.184	196.758	193.072	198.438		125.664
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	3 Sampel	-	-	5 Sampel	5 Sampel	6 Sampel

**Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020**

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa indikator ketersediaan pangan utama yaitu padi mencapai 125.664 ton. Sedangkan indikator produksi hasil ternak khusus daging mencapai 9.080.000 kg sudah tercapai sesuai dengan target di Tahun 2019. Penurunan angka ketersediaan pangan utama disebabkan adanya penurunan luas baku sawah dari 12.832,10 ha menjadi 7.816 ha. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap luas tanam, luas panen dan produksi gabah/beras.

#### 2.3.1.2.4. Pertanahan.

Indikator pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi pertanahan sebagai bentuk kepastian hukum dalam kepemilikannya. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

**Tabel 2.54**  
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan**  
**Tahun 2014–2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase luas lahan bersertifikat perluas wilayah Kabupaten	2,87	5,60	3,00	15	16	18

*Sumber : BPN Kabupaten Aceh Selatan.*

Berdasarkan tabel di atas peningkatan yang signifikan terhadap persentase dari tahun 2014 s/d 2016 adalah relatif atas pengurusan dokumen sertifikat tanah oleh masyarakat yang sadar akan pentingnya dokumen tanah tersebut. Peningkatan yang signifikan terhadap persentase dari tahun 2017 s/d 2019 adalah relatif program PTSL dan Program Sertifikat Tanah Miskin serta Program Landerfrom agar masyarakat sadar pentingnya dokumen tanah. Untuk menilai kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan karena data indikator "luas lahan bersertifikat perluas wilayah kabupaten" ini diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan (BPN) sehingga 9 kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pertanahan sesuai Lampiran Huruf J undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum terlihat pencapaiannya dikarenakan semua sumber data dibidang pertanahan diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan (BPN).

### 2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Persentase penanganan sampah, Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit), Jumlah daya tampung TPS (m<sup>3</sup>), dan Rasio TPS per penduduk. Adapun penjelasan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.55**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Lingkungan Hidup**  
**Tahun 2014-2019 Kabupaten Aceh Selatan**

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penanganan sampah	-	-	6,75	7,36	7,52	7,47
Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS)	-	-	1037	1135	1223	1,072
Jumlah daya tampung TPS	-	-	176,2	186	196,3	179,7
Rasio TPS per penduduk	-	-	4,35	4,76	5,3	4,56

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020*

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Persentase penanganan sampah pada Tahun 2019 mencapai 7,47%. Kemudian pada indikator Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) mencapai 1.072 unit. Untuk indikator jumlah daya tampung TPS mencapai realisasi kinerja sebesar 179,7 m<sup>3</sup>, sedangkan pada indikator Rasio TPS per penduduk mencapai realisasi kinerja sebesar 4,56.

### 2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Penataan administrasi kependudukan menjadi program prioritas daerah dalam rangka menerapkan E-KTP yang juga merupakan program prioritas nasional. Adapun indikator-indikator kependudukan dan catatan sipil, dapat dilihat pada tabel diibawah ini:

**Tabel 2.56**  
**Aspek Pelayanan Umum Bidang Administrasi**  
**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2019**

No	Indikator	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.63	0.66	0.78	0.85	0.81		0,92
2.	Penduduk wajib KTP	162.508	166.793	168.511	164.175	165.131		170.376
3.	Rasio bayi berakte kelahiran	0.80	0.86	0.66	0.63	0.64		0,68
4.	Bayi berakte kelahiran	1.207	1.318	1.361	1.394	1.531		1.827
5.	Jumlah bayi < 1 tahun	1.518	1.524	2.053	2.211	2.407		2.693
6.	Rasio Pasangan berakte nikah	0.27	0.28	0.31	0.34	0,36		0,52
7.	Pasangan berakte nikah	11.693	12.607	14.245	15.886	17.114		25.156
8.	Jumlah pasangan nikah	43.359	44.339	45.738	46.863	47.216		47.895
9.	Jumlah penduduk ber KTP	102.665	109.668	130.809	140.293	143.496		156.850
10.	Rasio penduduk berakte kelahiran/kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	309	347	367	401	553		638
11.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		Sudah

**Sumber : Disdukcapil kabupaten Aceh Selatan**

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan per tahun pada Tahun 2019 mencapai 170.376 jiwa sedangkan indikator jumlah penduduk yang ber KTP mencapai 156.850 jiwa atau 66,36% berarti jumlah penduduk yang belum memiliki KTP sebanyak 79.509 Jiwa atau 33,64%. Realisasi kinerja indikator jumlah pasangan nikah yang diketahui sekarang adalah 47.895 pasangan sedangkan jumlah pasangan berakte nikah yang ada sebanyak 25.156 pasangan atau 52,52% berarti masih ada pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah lebih kurang berjumlah 22.703 pasangan atau 47,48% dengan demikian perlu adanya himbauan dari Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.

### **2.3.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

Pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut:

**Tabel 2.57**  
**Aspek Pelayanan Umum Bidang Pengendalian Penduduk**  
**dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak	98.816	99.510	87.675	85.772	53.926
2	Jumlah keluarga	51.871	52.726	53.891	53.410	56.926
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,72	1,48	1,72	1,80	1,85
4	Jumlah akseptor KB	26.330	26.867	26.123	4.631	3.000
5	Rasio akseptor KB	0,68	0,69	70,53	71,86	71
6	Jumlah Peserta KB Aktif	-	30.514	28.280	30.540	17.621
7	Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I	36.449	37.217	36.417	23.195	53.925

**Sumber : BKKP3A Kabupaten Aceh Selatan dan Dukcapil Tahun 2019**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator rata-rata jumlah anak per keluarga di Tahun 2019 mencapai 1,85 orang dan sudah melebihi target Tahun 2019 sebesar 2,5. Untuk indikator rasio akseptor KB di Tahun 2019 mencapai 71 dan masih di bawah target Tahun 2019 sebesar 0,84. Untuk indikator jumlah peserta KB aktif Tahun 2019 mencapai 17.621 orang sedangkan indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Tahun 2019 mencapai 53.925 keluarga.

### **2.3.1.2.8. Perhubungan.**

Sektor perhubungan merupakan salah satu sektor yang sangat urgen dalam mengembangkan ekonomi dan pembangunan daerah. Di Kab. Aceh Selatan, sektor ini terdiri dari subsektor angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara serta subsektor komunikasi. Mengingat begitu pentingnya peranan sektor pengangkutan dan transportasi ini dalam mengembangkan perekonomian daerah, juga telah direspon oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai program dan kegiatan prioritas pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Pemerintah Daerah juga menyadari beberapa permasalahan disektor perhubungan yang harus mendapat penanganan yang serius seperti masih kurangnya sarana transportasi ke daerah pedalaman dan terpecil, serta penanganan beberapa ruas jalan negara dan jalan propinsi yang melintasi Kab. Aceh Selatan. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan urusan

perhubungan terdiri dari beberapa indikator, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.58**  
**Aspek Pelayanan Umum Bidang Perhubungan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2019**

No	Indikator	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Arus Penumpang angkutan umum	46.941	51.835	51.592	59.130	68.040	80.328	85.860
2	Rasio Izin Trayek	82,11	56,65	72,6	75,50	44,02	0	0
3	Jumlah izin kir Angkutan umum	537	397	522	564	334	341	335
4	Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	7	7	7	8	8	8
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	50%	50%	60%	60%	65%	68%	73%
6	Persentase kepemilikan Kir Angkutan umum	94%	91%	96%	97%	86,90%	87,03%	89,60%
7	Pemasangan Rambu-Rambu	586	25	337	362	0	0	0
8	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	11,5	12,8	14,1	15,5	17,2	18,3	19,5
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	15.000	16.910	17.340	18.900	20.400	20.500	20.750
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal	8606	8923	9803	1033	1045	80328	85860

**Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan.**

Jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami peningkatan dari 46.941 orang Tahun 2013 menjadi 85.860 orang pada Tahun 2019. Peningkatan tersebut mengindikasikan juga berkembangnya perekonomian daerah, dimana peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan pula mobilitas penduduk baik antar kecamatan antar kabupaten maupun antar provinsi, disamping itu juga peningkatan ini dimungkinkan karena adanya fasilitas sarana dan prasana perhubungan seperti pelabuhan laut, terminal maupun bandara. Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang kedalamnya.

Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang kedalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Untuk subsektor perhubungan laut sampai dengan Tahun 2019 terdapat 4 (empat) unit dermaga/pelabuhan laut yaitu pelabuhan laut Tapaktuan, Ujung Pulo, Meukek dan angkutan penyeberangan Labuhanhaji. Tantangan kedepan adalah bagaimana

mewujudkan Pelabuhan Laut tersebut dapat menjadi bahagian dari rencana tol laut Pemerintah Pusat mengingat Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pariwisata sehingga dapat menciptakan nilai tambah dari potensi tersebut serta memperluas aksesibilitas daerah. Kemajuan di sektor perhubungan tersebut didukung pula dengan adanya transportasi udara lewat jalur penerbangan perintis Tapaktuan–Medan dan Tapaktuan-Banda Aceh melalui Bandara Perintis Teuku Cut Ali di Terbangun Kec. Pasie Raja. Selanjutnya untuk subsektor perhubungan darat terdapat 5 unit terminal yaitu terminal Tapaktuan, Kota Fajar, Labuhanhaji, Krueng luas dan Bakongan yang melayani trayek angkutan umum di Kabupaten Aceh Selatan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek, secara umum jaringan trayek terdiri dari jaringan trayek lintas batas negara, antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, perkotaan dan perdesaan. Izin trayek yang diberikan oleh Pemkab Aceh Selatan adalah izin jaringan trayek perdesaan yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum. Sementara izin trayek perkotaan dan trayek antar kota dalam provinsi, izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

#### **2.3.1.2.9. Komunikasi dan Informatika.**

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi di Kabupaten Aceh Selatan bertujuan agar informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan sampai kepada masyarakat, mencerdaskan pola pikir masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Ada beberapa indikator di bidang Komunikasi dan informatika, dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.59**  
**Aspek pelayanan umum**  
**Bidang komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan pengembangan dan	18 Kec	-	-	-	-

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan					
2	Cakupan layanan Telekomunikasi	-	-	87 BTS	87 BTS	87 BTS
3	Persentase penduduk yang menggunakan Hp/telepon	-	-	65%	67%	69%
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	-	-	575 Pelanggan	575 Pelanggan
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	-	-	-	-	-

**Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018.**

### 2.3.1.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bersifat kekeluargaan juga menjadi fokus pembangunan pemerintah daerah, yang dilakukan melalui pengembangan lembaga Perkoperasian dan UMKM. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Koperasi yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Kinerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari beberapa indikator antara lain dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.60**  
**Aspek Pelayanan Umum**  
**Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

NO	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi Aktif	240	239	245	258	258	263
2	Jumlah Koperasi	434	399	408	358	359	376
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	3.850	2.701	2.701	2.701	2.654	2.464

NO	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	Persentase Koperasi Aktif	55	60	61	68	71,87	69.94
5	Jumlah Usaha Mikro dan kecil	1.292	2.625	4.411	4.169	4.227	4.383
6	Persentase Mikro dan Kecil	34	98	7,572	96	97,75	87,41

**Sumber : Disperindagkop Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020**

Berdasarkan tabel diatas persentase koperasi yang ada menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 54,5% pada Tahun 2014 menjadi 69,94% pada Tahun 2019 meningkat sebesar 6,5 persen. Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif merupakan cerminan dari pembinaan yang lebih intensif, sehingga lembaga koperasi diharapkan menjadi wadah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan bukan sebagai lembaga untuk mencari modal atau dana bagi kelompok tertentu yang mengatasnamakan koperasi. Disamping mengembangkan usaha perkoperasian, Pemerintah Daerah juga concern mengembangkan usaha kecil dan menengah dalam rangka memperkuat kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Jumlah UKM non BPR/LKM yang ada menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 3.850 unit pada Tahun 2014 menjadi 2.464 unit pada Tahun 2019, sedangkan jumlah usaha mikro dan kecil juga mengalami peningkatan yaitu dari 1.292 unit pada Tahun 2013 menjadi 4,383 unit pada Tahun 2019.

Berkembangnya usaha mikro dan kecil tersebut telah membawa dampak yang positif bagi pembangunan perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan pengembangannya melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar-benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil.

#### 2.3.1.2.11. Statistik.

Perencanaan pembangunan tanpa didukung data dan informasi, akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang bias, tidak valid dan tidak akuntabel serta jauh lebih besar kerugian yang ditanggung oleh generasi yang akan datang. Menyadari hal yang demikian, Bappeda Aceh Selatan selaku penyelenggara urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan statistik daerah berupaya menyediakan data dan informasi pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholder, baik berupa dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen data dan informasi pembangunan. Kinerja pembangunan pelayanan urusan statistik pada masing-masing indikator menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang berisi data dan informasi pembangunan tetap tersedia dari tahun ke tahun, masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.61**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Statistik**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2019**

No	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Tesedianya sistim data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada
2.	Buku Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka	ada	ada	ada	ada
3.	Buku PDRB	ada	ada	ada	ada

*Sumber : BPS kabupaten Aceh Selatan 2020*

### 2.3.1.2.12. Persandian.

Kinerja urusan bidang persandian dapat dilihat dari indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

**Tabel 2.62**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Persandian**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2017**

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	1	1	1	1	1
2.	Jumlah total perangkat daerah	53	53	53	53	56
3.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	-	-	-	-	-

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan*

Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah sebanyak 1 SKPK pada Tahun 2013 dan tidak mengalami perubahan pada Tahun 2017. Jumlah SKPK sebanyak 53 pada tahun 2013 meningkat menjadi 56 SKPK pada Tahun 2017.

### 2.3.1.2.13. Perpustakaan.

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustaka untuk masyarakat umum. Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, sehingga jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas

penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Aspek pelayanan umum bidang Perpustakaan meliputi beberapa indikator.

**Tabel 2.63**  
**Aspek Pelayanan Umum Bidang Perpustakaan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015–2019**

NO	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	6455	7695	7031	6.243	4.421
2.	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	22.873	26.245	26.815	26.815	26.815
3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,302	0,392	0,391	0,391	1,98
4.	Jumlah perpustakaan	446	445	446	446	446
5.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	6.385	-	-	-	6.369
6.	Jumlah koleksi Judul buku perpustakaan	6.466	7.147	7.278	7.278	7.278
7.	Jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	-	-	-	-	-

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019*

#### 2.3.1.2.14 Kearsipan.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.64**  
**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kearsipan**  
**Tahun 2015–2019**

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	98,50	98.50	98,7	98.7	98,7
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Tidak ada	Tidak ada	1	1	Tidak ada

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020.*

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa masalah yang dihadapi, tantangan, kendala dan hambatan, yaitu sebagai berikut:

Masalah dan tantangan

NO	Masalah yang dihadapi	Tantangan Utama
----	-----------------------	-----------------

<b>NO</b>	<b>Masalah yang dihadapi</b>	<b>Tantangan Utama</b>
1.	Tidak tersedianya tenaga Fungsional Pustakawan dan Arsiparis.	- Tidak optimalnya dalam pemberian pelayanan pada masyarakat, baik bidang pustaka maupun bidang arsip.
2.	Tidak memiliki gedung DEPO Arsip	- Kurang amannya arsip yang disimpan.
3.	Minimnya Anggaran Kegiatan	- Masih Minimnya Titik Layanan Perpustakaan Keliling Setiap Kabupaten - Tidak tertatanya Arsip pada tiap SKPD
4.	Tidak efektifnya Pustaka Gampong	- Masih sangat kurangnya sarana perpustakaan gampong dan kurangnya insentif petugas pustaka Gampong
5.	Rendahnya Kualitas SDM.	- Sulitnya dalam perencanaan kegiatan.
6.	Kurangnya sarana dan prasarana seperti : Mobil Perpustakaan Keliling, mobil operasional arsip, Almari arsip yang presentatif dan pagar gedung.	- Tidak terpenuhinya SPM - Sulitnya dalam penjemputan Bahan Arsip - Tidak Terlayananya semua Desa untuk Perpustakaan Keliling. - Sulitnya mendata lingkungan yang aman, nyaman, rindang dan bersih.

#### A. HAMBATAN

1. Tidak ada anggaran Program dan Kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sebagai kegiatan prioritas SKPD.
2. Masih menggunakan buku lama dan kurangnya sarana pada layanan perpustakaan.

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan.

#### 2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan.

Kabupaten Aceh Selatan memiliki wilayah laut yang cukup luas dengan potensi sumber daya ikan yang beragam seperti ikan tuna, cakalang, tenggiri, udang dan ikan karang. Ikan tuna dan cakalang sangat potensial untuk dikembangkan demikian juga ikan karang terutama untuk memenuhi kebutuhan ekspor sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menambah devisa bagi negara. Usaha perikanan tangkap pada umumnya masih menggunakan alat, teknik dan armada yang relatif sederhana, sehingga hasil yang diperoleh juga belum optimal. Kondisi ini membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya melalui modernisasi peralatan, teknologi

dan armada penangkapan ikan. Perkembangan produksi perikanan Kabupaten Aceh Selatan selama Tahun 2014 sampai Tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang rata-rata meningkat. Produksi perikanan tersebut berasal dari hasil perikanan tangkap (perikanan laut dan perairan umum), serta dari kegiatan budidaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.65**  
**Perikanan Laut di Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2014-2019**

No	Kecamatan	Produksi Perikanan Laut (ton)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Trumon	408,9	222,48	278,1	311,90	322,08	278,3
2	Trumon Tengah	-	-	-	-	-	-
3	Trumon Timur	-	-	-	-	-	-
4	Bakongan	2.266,71	3.504,16	4.380,2	3.986,86	4.016,81	3.677,64
5	Kota Bahagia	-	-	-	-	-	-
6	Bakongan Timur	669,36	690,96	863,7	962,91	962,91	930,4
7	Kluet Selatan	138,90	172,40	215,5	278,88	289,06	233,48
8	Kluet Timur	-	-	-	-	-	-
9	Kluet Utara	272,40	189,84	237,3	270,19	277,56	325,39
10	Kluet Tengah	-	-	-	-	-	-
11	Pasie Raja	221,88	525,60	657	677,01	688,9	566,59
12	Tapaktuan	3.113,94	896,64	1.120,8	1.518,77	1.555,30	1.477,63
13	Samadua	216,23	261,56	326,95	449,71	464,83	314,68
14	Sawang	5.950,80	8.835,36	11.044,2	11.895,14	11.994,28	11.879,02
15	Meukek	3.658,17	5.143,68	6.429,6	6.921,26	6.939,17	6.349,29
16	Labuhanhaji	2.852,94	2.769,60	3.462	4.198,08	4.217,76	3.974,11
17	Labuhanhaji Timur	131,38	75,60	94,5	145,46	145,46	131,01
18	Labuhanhaji Barat	473,19	633,60	792	800,40	811,12	718,44
<b>T O T A L</b>		<b>12.536,84</b>	<b>20.374,77</b>	<b>23.921,48</b>	<b>29.901,85</b>	<b>32.712,7</b>	<b>30.856,0</b>

**Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan**

Penurunan jumlah produksi perikanan budidaya di Kab. Aceh Selatan pada tahun 2019 di bandingkan pada tahun 2018 di karenakan banyak kolam ikan air tawar yang tidak aktif lagi karena petani tambak terutama untuk pengadaan pakan.

**Tabel 2.66**  
**Perkembangan Perikanan Budidaya**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

No	Kecamatan	Produksi Perikanan Budidaya (ton)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Trumon	1,20	1,70	8,77	8,37	8,49	6,32
2	Trumon Tengah	2,00	4,10	0,28	0,28	0,33	0,27
3	Trumon Timur	-	2,80	0,33	0,32	0,35	0,31
4	Bakongan	0,90	4,80	0,66	0,66	0,66	0,55
5	Kota Bahagia	0,70	0,60	21,88	19,63	17,15	1,09
6	Bakongan Timur	2,00	1,89	1,18	1,18	1,34	0,96
7	Kluet Selatan	10,50	10,26	35,00	49,5	61,3	51,58
8	Kluet Timur	4,60	15,32	7,92	7,92	8,89	6,92
9	Kluet Utara	14,30	19,72	12,37	12,57	24,07	20,62
10	Kluet Tengah	6,00	7,00	7,35	7,35	7,41	6,03
11	Pasie Raja	12,70	32,58	41,08	47,08	44,07	42,28

No	Kecamatan	Produksi Perikanan Budidaya (ton)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	Tapaktuan	6,30	9,05	14,18	14,18	11,68	10,42
13	Samadua	3,10	7,44	2,00	2	2,35	2,12
14	Sawang	26,00	6,88	14,55	14,55	15,89	12,27
15	Meukek	9,10	12,56	8,7	8,73	15,28	12,71
16	Labuhanhaji	8,60	9,35	33,61	33,61	24,67	23,14
17	Labuhanhaji Timur	5,70	14,24	8,23	8,23	9,4	8,87
18	Labuhanhaji Barat	7,70	21,57	25,72	25,72	16,38	15,43
<b>T O T A L</b>		<b>65,83</b>	<b>121,40</b>	<b>181,06</b>	<b>243,4</b>	<b>268,8</b>	<b>221,89</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan.

Produksi perikanan laut tahun 2014-2019 dapat dilihat penurunan jumlah produksi perikanan laut pada tahun 2019 di bandingkan dengan jumlah produksi perikanan laut pada tahun 2018. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan jumlah Trip melaut yang disebabkan para nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim berupa gelombang pasang dan badai yang sering terjadi pada tahun 2019 tersebut. Selain itu juga terjadinya penurunan jumlah Armada Perikanan yang disebabkan sebagian armada sudah tidak beroperasi lagi karena rusak dan tidak layak lagi untuk beroperasi ke laut. Sementara jumlah armada baru relative lebih sedikit. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.67**  
**Aspek Pelayanan Umum**  
**dalam Bidang Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Aceh selatan Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Produksi perikanan (ton)	20.458,33	23.921,48	30.238,53	32.756,29	33,087.25	31.183,64
2.	Persentase pencapaian produksi perikanan (%)	163,33	189,10	236,68	248,00	1.01	0,93
3.	Konsumsi ikan	42/Kg/Jiwa/th	42/Kg/Jiwa/th	53,11/kg/jiwa/th	56,68/kg/jiwa/th	56,43/kg/jiwa/th	60,59/kg/jiwa/th
4.	Persentase Pencapaian konsumsi ikan (%)	123.53	120.00	147.22	151.35	-0.44	95
5.	Jumlah Kelompok Nelayan (Kelompok)	79	102	107	107	107	96
6.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	79	33	35	107	107	60
7.	Kontribusi Sub Sektor terhadap PDRB (%)	2,53	6,56	6,54	-	-	4,69

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Selatan/BPS Aceh Selatan Tahun 2020

Peningkatan konsumsi ikan pada tahun 2019 disebabkan adanya peningkatan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kandungan Gizi ikan terhadap kesehatan. Terjadinya penurunan cakupan

bina kelompok di karenakan ada kelompok-kelompok yang sudah tidak aktif lagi dan banyak kelompok yang anggotanya tumpang tindih di beberapa KTP, sehingga mereka harus memilih salah satu dari kelompok yang ada.

### 2.3.2.2. Pariwisata.

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dengan didukung letak geografisnya yang terdiri dari pantai dan pegunungan. Disepanjang pantai terdapat beberapa lokasi wisata menakjubkan yang terdiri dari teluk yang indah dengan pasir putih dan bersih. Selain itu, lautnya yang memiliki berbagai macam jenis ikan hias dan terumbu karang dapat dijadikan objek wisata bahari. Hutannya yang relatif masih perawan dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai salah satu dari 2 objek warisan dunia oleh UNESCO dan kebun pala masyarakat juga dapat dijadikan sebagai objek ekoturisme. Aceh Selatan juga memiliki sejumlah situs sejarah, kesenian, budaya dan adat istiadat tradisional yang layak dijual. Wisatawan juga akan disugahi beragam makanan/kuliner bercitarasa khas daerah. Namun sampai saat ini Masterplan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten ini belum dapat diselesaikan.

**Tabel 2.68**  
**Tempat Wisata dalam Kabupaten Aceh Selatan**

NO	Kecamatan Nama-nama Tempat Wisata	Jarak Dari Ibukota Kecamatan	Jarak Dari Ibukota Kabupaten
1	Labuhanhaji Barat Sungai Kreung Baru Kuburan Syahid Gua Batu Sicanang	2,5 Km 3 Km 3 Km	53,5 Km 54 Km 57 Km
2	Labuhanhaji Makam Abuya Syech H. Muda Waly Al-Khalidy Suluk Pesantren Darussalam Goa Kelongsong Sungai Pagar Gantung Pantai Ujung Kitab Al-Quran Kampung Dalam Pelabuhan Penyeberangan antar Pulau Kolam Air Sejuk Pantai Gosong/Gosong Gila Goa Panjang	5 Km 5 Km 2 Km 4 Km 3 Km 1 Km 0,5 Km 0,5 Km 1 Km 1,5 Km	47 Km 47 Km 47 Km 47 Km 47 Km 47 Km 47 Km 47 Km 48 Km 48,5 Km
3	Labuhanhaji Timur Pantai Batu Meletus Sungai Batu Berhujan Pantai Sawang Biduk Buruk/Sawang Indah Pantai Batu Bermenung Makam Tgk. Keuramat Peulumat	2 Km 5 Km 2 Km 1,5 Km 2,5 Km	45 Km 48 Km 45 Km 44,5 Km 45,5 Km

NO	Kecamatan Nama-nama Tempat Wisata	Jarak Dari Ibukota Kecamatan	Jarak Dari Ibukota Kabupaten
4	Meukek Pantai Lhok Aman Pantai Lhok Bengkuang Air Terjun Ceuraceu	7 Km 2 Km 4 Km	35 Km 35 Km 35 Km
5	Sawang Pantai Pasi Tuan Hilang Air Terjun Tuwi Lhok Pulau Ujung Serudung Sungai Trieng Meuduro	1 Km 5 Km 6 Km 6 Km	22 Km 22 Km 22 Km 22 Km
6	Samadua Batu Berlayar Sungai Sekabu Sungai Lubuk Layu Pantai Pasir Putih Batu Sumbang Air Terjun Air Dingin	3 Km 5 Km 5 Km 6 Km 7 Km 7 Km	10 Km 10 Km 10 Km 10 Km 10 Km 22 Km
7	Tapaktuan Gunung Lampu Makam, Tapak, Tongkat, Topi Tuan Tapa Pantai Lhok Rukam Air Terjun Tingkat Tujuh Pantai Batu Merah Pantai Rindu Alam Gua Kalam Panorama Hatta Pasir Setumpuk Lhok Rukam Kolam Renang Aroya Mesjid Tuo Bunker Jepang Kelurahan Hilir Bevak Belanda Pantan Luas Lubuk Simerah Pemandian Alam Pajupian	0,5 Km 1 Km 11 Km 7 Km 2 Km 2 Km 3 Km 10 Km 7 Km 1 Km 0,5 Km 0,5 Km 5 Km 1 Km 10 Km	0,5 Km 1 Km 11 Km 7 Km 2 Km 2 Km 3 Km 10 Km 7 Km 1 Km 0,5 Km 0,5 Km 5 Km 1 Km 10 Km
8	Pasie Raja Batee Goa Pantan Bili Pasie Ladang Tuha Pucok Krueng Pantai Pasir Rasian Lancang	3 Km 1 Km 3 Km 6 Km	15 Km 15 Km 15 Km 15 Km
9	Kluet Utara Makam Abuya Syech H. Jailani Musa Pesantren Darul Rahmah Pesantren Simpang Tiga Pantai Darussa'dah Kubah/Makam Mesjid Tua/Kuta Pulo Kambang Pantai Kuala Ba'u	0,5 Km 0,5 Km 2 Km 0,5 Km 5 Km 3 Km 5 Km	28,5 Km 28,5 Km 29 Km 28,5 Km 33 Km 31 Km 33 Km
10	Kluet Tengah Irigasi Gunong Pudong Muara Simpali Batu Hampa Batu Sumbang Alue Kejrung+Air Terjun Telaga Batu Damar Buih	12 Km 8 Km 7 Km 8 Km 15 Km 20 Km	40 Km 40 Km 40 Km 40 Km 40 Km 40 Km
11	Kluet Timur Irigasi Paya Dapur Gunung Sikorong Makam Tgk. Panglima Raja Lelo Makam Badan Cut Ali Alur Muhrang Batu Putri Alur Muhrang Tapak Aulia Air Terjun Simpali	3 Km 3 Km 1 Km 10 Km 10 Km 6 Km 8 Km	38 Km 38 Km 36 Km 45 Km 45 Km 41 Km 43 Km
12	Kluet Selatan		

NO	Kecamatan Nama-nama Tempat Wisata	Jarak Dari Ibukota Kecamatan	Jarak Dari Ibukota Kabupaten
	Makam Teuku Cut Ali Pantai Cemara Lubuk Sipuru Hutan Lindung Pantai Ratu Sialang Ujung Gunung Kalam Baluh Gelumbuk	0,5 Km 1 Km 6 Km 15 Km 3 Km	31,5 Km 32 Km 37 Km 46 Km 34 Km
13	Bakongan Pantai Ujung Pulo Cut Pulau Dua Pantai Ujung Mangki Pantai Ujung Kreung Makam Teuku Raja Angkasah Danau Laut Bangko Pantai Ie Hitam	6 Km 3 Km 3 Km 4 Km 5,5 Km 12 Km 1 Km	66 Km 57 Km 57 Km 56 Km 65,5 Km 72 Km 61 Km
14	Bakongan Timur Irigasi/Air Terjun Simpang Seubadeh Pantai Lhok Jamin Seubadeh Air Terjun/Sungai Seulekat Seubadeh	5 Km 3 Km 4 Km	76 Km 68 Km 75 Km
15	Trumon Pantai Trumon Pulau Trumon Mesjid Tua/Makam Raja Gunong Pinto Angen Pantai Calok Bate Alam Trumon Benteng Kuta Bate Desa Keude Komplek Rumah Raja Trumon Batu Bertulis/Batu Bersurat Desa Panton Bili Kuburan Nek Raya Bate Desa Kuta Tua Lapangan Terbang Peninggalan Jepang Makam Kuburan Syahid di G. Kapur	1 Km 5 Km 0,5 Km 8 Km 7 Km 1,5 Km 0,5 Km 3 Km 7 Km 3 Km 1 Km 7 Km	110 Km 114 Km 109,5 Km 117 Km 116 Km 109 Km 109,5 Km 112 Km 116 Km 112 Km 110 Km 116 Km
16	Trumon Timur Gunung Tengku Makam Tengku	6 Km 8 Km	120 Km 122 Km

**Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan**

Sebagai sarana penunjang bagi wisatawan tersedia sejumlah restoran/rumah makan, hotel dan penginapan yang sebahagian besar terletak dipinggir pantai dan menghadap ke laut.

**Tabel 2.69**  
**Perkembangan Jumlah Hotel dan Penginapan**  
**di Kab. Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Hotel berbintang	0	0	0	0	0	0
2.	Hotel Melati	20	23	18	16	18	20
3.	Kamar Tersedia	233	259	224	266	266	286
4.	Rata-rata penggunaan kamar per hari	93	78	79	199	199	219

**Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

Sampai saat ini pada Tahun 2019 terdapat hotel katagori melati sebanyak 20 unit dengan jumlah kamar tersedia mencapai 286 kamar meningkat dari Tahun 2014 hotel katagori melati sebanyak 20 unit dengan jumlah kamar tersedia mencapai 233 kamar. Ada penambahan jumlah hotel melati di aceh selatan sebanyak 2 buah. Semua itu dikarenakan telah meningkatnya perekonomian masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan industry kreatif. Jumlah rumah makan menurun menjadi 63 unit dari Tahun 2019 dari 77 unit pada Tahun 2014. Demikian juga dengan warkop/cape menunjukkan adanya penurunan dari 65 unit pada Tahun 2014 menjadi 62 unit pada Tahun 2019.

**Tabel 2.70**  
**Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2014-2019**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Restoran	2	2	2	2	2	2
2	Rumah Makan	77	85	89	26	52	63
3	Cafe/warkop	65	72	83	13	47	62

*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.*

Guna mengoptimalkan potensi pariwisata tersebut, terbuka peluang bagi investor untuk mengembangkan sarana dan prasarana wisata sehingga dapat menarik minat wisatawan. Untuk menarik calon investor, Pemerintah Daerah berupaya memberi kemudahan berupa pelayanan yang baik dalam pengurusan usaha dengan membuka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) dan informasi yang jelas dengan pelibatan organisasi dan pemandu wisata seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan membina Gampong Wisata yang bercirikan syari'ah. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.71**  
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata**  
**Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	357,280	393,008	421,210	475,540	481,700	490.600
2.	Lama Kunjungan Wisata	3	3	3	3	3	3
3.	PAD Sektor Pariwisata	19,120,000	20,838,000	33,875,000	38,800,000	26,550,000	25.500.000

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan.

Dari jumlah kunjungan wisata pada tahun 2019 telah mengalami peningkatan sebanyak 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun 2019 kunjungan wisata ke aceh selatan meningkat sebanyak 490.600 jiwa.

### 2.3.2.3. Pertanian.

Kabupaten Aceh Selatan ditinjau dari keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian. Dengan kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan beragam pula pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan. Hasil penelitian Bappeda Provinsi Aceh Tahun 2018 tentang Zona Agroekologi menyatakan Wilayah di Kabupaten Aceh Selatan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan Pertanian/Perkebunan berbasis agroindustri dengan perkebunan unggulan seperti kelapa, cengkeh, pala, pinang, kapuk/randu, sagu, kayu manis dan nilam. Tanaman palawija unggulan adalah jagung dan kacang tanah. Sedangkan Tanaman buah-buahan unggulan di Kabupaten Aceh Selatan adalah mangga dan durian. Adapun kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.72**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Pertanian**  
**Tanaman Pangan Utama Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2014–2019**

No	Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Utama	Luas dan Produksi	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Padir Sawah	- Luas Tanam (Ha) - Luas Panen (Ha) - Produksi Gabah (Ton) - Produksi Beras (Ton) - Produktivitas (Ton/Ha)	14.896,00 15.174,00 76.356,00 41.443,26 5,00	15.619,00 14.841,00 75.626,80 50.420,39 5,10	15.790,00 14.703,00 75.750,50 39.503,49 5,20	14.444,60 14.505,00 77.920,30 40.635,04 5,40	14.988,00 16.139,60 89.357,00 46.599,44 5,50	10296 8.982,50 50.403,29 26285,057 5,6

No	Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Utama	Luas dan Produksi	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
2	Padi Ladang	- Luas Tanam (Ha) - Luas Panen (Ha) - Produksi Gabah (Ton) - Produksi Beras (Ton) - Produktivitas (Ton/Ha)	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	169 263,5 1317,5 687.069 5
3	Jagung	- Luas Tanam (Ha) - Luas Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Ton/Ha)	13.251,00 15.103,00 99.133,50 6,56	8.596,00 8.986,00 53.832,20 5,99	8.037,00 2.863,00 17.701,00 6,18	10.120,50 9.435,00 58.308,30 6,18	5.562,00 5.562,00 32.514,30 5,84	4532,5 4274,8 25.553,89 5,98
4	Kacang Tanah	- Luas Tanam (Ha) - Luas Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Ton/Ha)	310,00 274,00 497,10 1,81	330,00 234,00 1,41 0,33	262,00 360,00 632,30 1,76	187,00 208,00 374,40 1,80	105,00 105,00 187,00 1,78	91,4 67,5 126,26 1,87
5	Ubi Kayu	- Luas Tanam (Ha) - Luas Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Ton/Ha)	504,00 235,00 1.823,70 7,76	90,00 89,00 673,00 7,56	77,00 81,00 687,90 8,49	50,00 66,00 590,70 8,95	43,00 45,00 404,50 8,98	37 35 316,50 9,04
6	Ubi Jalar	- Luas Tanam (Ha) - Luas Panen (Ha) - Produksi (Ton) - Produktivitas (Ton/Ha)	85,00 126,00 858,20 6,81	72,00 71,00 430,80 6,07	56,00 59,00 280,90 28,40	55,00 43,00 214,14 4,98	59,00 67,00 291,00 4,34	56 55 275,00 5,00
7	Kacang Kedelai	- Luas Tanam (Ha) - Luas Panen (Ha) - Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)	67,00 74,00 107,50 1,45	1.25,00 815,00 1047,95 1,28	11,00 206,00 247,20 1,42	4,00 5,00 5,00 1,00	- - - -	5 5 6,00 1
8	Kacang Hijau	- Luas Tanam (Ha) - Luas Panen (Ha) - Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)	124,00 146,00 299,30 2,05	6,00 120,00 157,40 1,31	31,00 38,00 53,95 1,42	20,00 22,00 31,90 1,45	21,00 20,00 23,90 1,19	13 17 24 1,42

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Selatan

Untuk sektor perkebunan, pala tetap merupakan komoditi unggulan Kabupaten Aceh Selatan dengan Location Question (LQ) sebesar 21,99 dan salah satu unsur penting dalam perekonomian masyarakat. Luas areal komoditas pala Tahun 2019 mencapai 16.989 Ha dengan petaninya sejumlah 18.185 KK dan produksi berjumlah 5.363 Ton dan pada umumnya kebun pala yang dimiliki masyarakat sebagian besar diperoleh dari warisan turun temurun, kendati demikian pasca serangan hama dan penyakit pala, masyarakat sudah mulai menanam komoditi perkebunan lainnya seperti coklat, pinang, kelapa sawit, dan nilam. Namun demikian, mengingat pala merupakan komoditi historis, pemerintah daerah tetap berupaya melestarikan tanaman tersebut. Selain pala, komoditi perkebunan yang memiliki potensi dikembangkan di Aceh Selatan adalah nilam, kakao, kelapa, kelapa sawit, pinang serta mengembangkan kembali komoditi perkebunan rakyat yang pernah terkenal seperti kopi Manggamat, kopi Meukek dan beberapa komoditi lainnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.73**  
**Luas Areal Komoditi Perkebunan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

NO	Uraian	Luas Areal (Ha)						Produksi (Ton)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Karet	1.239	1.239	1.157	1.092	1.003	967	292	258,00	262	232	141	122,00
2	Kopi	1.465	1.470	1.470	1.512	1.425	1.422	321	343,00	346	355	358	340,00
3	Kelapa Sawit	14.797	8.471	9.270	10.221	10.578	11.388	50.850	53.698,00	16.215	19.824	23.945	25.789,00
4	Kakao	1.503	1566	2.005	1.584	1.433	1.354	209	343,00	428	397	352	346,00
5	Tebu	24	22	38	58	72	63	3	4,68	13	19	21	19,00
6	Kelapa Dalam	7.233	7.196	7.056	6.944	6.845	6.839	2.949	3.284,00	3.884	3.588	3.260	3.265,00
7	Pala	15.810	15.821	15.821	16.289	16.941	16.989	6.510	6.614,00	5.747	5.238	5.251	5.363,00
8	Nilam	214	174	293	318	316	326	20	20,70	65	64	64	37,00
9	Pinang	1.629	15.821	2.060	2.317	2.606	2.774	425	487,00	407	512	632	696,00
10	Cengkeh	1.187	1.187	1.187	1.140	1.053	1.028	6	372	386	346	299	324,50
11	Kemiri	346	351	414	419	358	403	43	51	80	88	90	95,00
12	Cassiavera	129	129	121	104	78	58	11	12,15	19	13	8	5,00
13	Kapok/randu			159	152	123	106			23	20	11	8,00
14	Sagu			243	237	232	227			155	164	142	128,00

**Sumber : Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Aceh Selatan.**

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB baik pertanian/palawija maupun sektor perkebunan (tanaman keras), selama kurun waktu 5 Tahun terakhir relatif mengalami penurunan. Rendahnya produktivitas pertanian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti permukiman penduduk, rendahnya tingkat penerapan teknologi, kurangnya sarana produksi (jalan usaha tani, irigasi, bibit dll) disamping belum optimalnya kerja penyuluh pertanian dan anomali cuaca juga mengubah kultur (Culture) pola pikir para petani dari yang tidak produktif menjadi petani yang produktif. Oleh karenanya penataan kembali (Revitalisasi) pembangunan pertanian di Kabupaten Aceh Selatan harus segera dilakukan diantaranya pengembangan komoditas pertanian perlu memperhatikan komoditas unggulan daerah dan Zona Agroekologi yang sesuai untuk tanaman. Selanjutnya, perlu adanya dukungan infrastruktur, bimbingan dan pendampingan pada petani secara berkelanjutan, memperhatikan keinginan petani dan ketersediaan pasar yang menguntungkan secara ekonomis.

#### **2.3.2.4. Perdagangan.**

Secara umum selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan juga mengalami perubahan yang fluktuatif seiring dengan kondisi perekonomian daerah dan nasional yang juga

berkembang secara fluktuatif. Jenis usaha perdagangan yang berkembang di Kabupaten Aceh Selatan adalah jenis usaha menengah dan kecil.

Pemerintah Daerah juga berupaya untuk mengembangkan sektor perdagangan tersebut yang disinergiskan dengan pengembangan sektor pertanian. Dengan berkembangnya sektor perdagangan tersebut diharapkan terjadinya ekspansi (perluasan) kegiatan ekonomi, dan ini harus didukung pula dengan regulasi dibidang perizinan yang dilaksanakan dengan sistem One Stop Service (Pelayanan satu pintu) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Selatan. Sektor Perdagangan juga memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB Aceh Selatan.

**Tabel 2.74**  
**Perkembangan Sektor Perdagangan**  
**Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**  
**yang diberikan Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perusahaan Besar (PB)	-	-	-	5	62	62
2.	Perusahaan Menengah (PM)	13	9	13	4	448	467
3.	Perusahaan Kecil (PK)	172	177	192	211	4.231	4.459
4.	Mikro Kecil (MK)	-	-	-	-	11	26
<b>Jumlah</b>		<b>185</b>	<b>186</b>	<b>205</b>	<b>220</b>	<b>4752</b>	<b>5.014</b>

*Sumber : Disperindagkop & UKM dan KPPT Kabupaten Aceh Selatan*

Komoditi perdagangan yang menjadi andalan Kabupaten Aceh Selatan adalah: Pala, Nilam, Pinang, Kemiri, Kacang Tanah, Karet, Kacang Kedelai, Kelapa, Ikan Keumamah/ikan kayu, ikan teri, ikan hias dan sarang burung walet. Persoalan utama urusan perdagangan adalah bagaimana Kabupaten Aceh Selatan mampu merebut peluang pasar dari berbagai komoditi unggulannya.

Untuk jelasnya kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.75**  
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan**  
**Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)	5,68	5,26	4,67	4,67		5,59
2.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	13,98	14,49	14,61	14,9	15,29	15,43
3.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal dan formal	1,394	9,450	8,539	8,539	7761	7825
4.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100	100	95	28	30	31

Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) mencapai 15,43% dan melebihi target Tahun 2019 sebesar 15,1%.

### 2.3.2.5. Perindustrian.

Sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap PDRB. Oleh karena itu pengembangan sektor industri harus tetap dilaksanakan dengan mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kondusif dengan memperbesar cakupan industri kecil menengah serta ramah lingkungan. Jenis usaha industri yang berkembang di Kab. Aceh Selatan umumnya bergerak pada jenis industri kecil dan kerajinan rumah tangga berdasarkan kondisi dan potensi daerah antara lain industri manisan pala/kue pala, sirup pala dan kacang asin (gongseng), sandang, kayu, barang-barang dari kayu, penerbitan/percetakan, barang-barang kimia, tanah liat/semen/kapur/gips, barang logam, furniture/perhiasan/meubel dan pemeliharaan/reparsi.

**Tabel 2.76**  
**Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Sektor Industri Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

No	Jenis Industri	Perkembangan					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8

No	Jenis Industri	Perkembangan					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Industri Formal						
1	Jumlah Unit Usaha	160 Unit	327 Unit	434 Unit	441 Unit	456 Unit	428 Unit
2	Tenaga Kerja	604 Orang	1.265 Orang	1.608 Orang	1.641 Orang	1.682 Orang	1526 Orang
3	Nilai Investasi	Rp 9.769.500.000,-	Rp.20.301.000.000	Rp. 23.082.752.000	Rp. 23.428.994.000	Rp. 23.528.792.000	Rp.22.998.652.000
4	Nilai Produksi	Rp 37.298.525.000,-	Rp.98.299.525.000	Rp.121.956.890.000	Rp.123.786.244.000	Rp.142.507.100.000	Rp.133.921.645.000
5	Nilai BB/BP	-	Rp.47.697.765.000	-	67.021.970.000	-	Rp. 75.698.921.500
B	Industri NonFormal						
1	Jumlah Unit Usaha	1.273 Unit	1.111 Unit	1,356 Unit	1,348 Unit	1,403 Unit	1,525 unit
2	Tenaga Kerja	3.656 Orang	2.730 Orang	3,204 Orang	3,284 Orang	3,367 Orang	3773 Orang
3	Nilai Investasi	Rp.40.576.397.000,-	Rp.30.090.810.000	Rp.100.598.312.000	Rp.102.107.296.000	Rp.108.998.238.000	Rp. 40.374.357.000
4	Nilai Produksi	Rp. -	Rp.76.261.805.000	Rp. -	Rp.84.543.987.000	Rp.184.035.924.000	Rp.161.7774.381530
5	Nilai BB/BP	Rp-	Rp.76.261.853,-				Rp. 106.318.500.341

**Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Selatan.**

Sektor industri formal dapat menyerap tenaga kerja di Tahun 2014-2019. Pada Tahun 2014 sebanyak 604 orang dengan jumlah usaha 160 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat menampung 4 orang tenaga kerja, pada Tahun 2015 meningkat menjadi 1.265 orang dengan jumlah usaha 327 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat menampung 4 orang tenaga kerja, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 1.608 orang dengan jumlah usaha 437 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat menampung 4 orang tenaga kerja dan pada tahun 2019 menjadi 1.526 orang dengan jumlah usaha sebanyak 428 unit artinya setiap 1 unit usaha dapat menyerap sebanyak 3 orang.

Sektor industri non formal dapat menyerap tenaga kerja pada periode tahun 2014-2019 seperti berikut: pada Tahun 2014 meningkat menjadi 3.656 orang dengan jumlah usaha 1.273 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat menampung 3 orang tenaga kerja, pada Tahun 2015 menurun menjadi 2.730 orang dengan jumlah usaha 1.111 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat menampung 3 orang tenaga kerja, pada Tahun 2016 meningkat menjadi 3.204 orang dengan jumlah usaha 1.356 unit artinya setiap 1 unit rata-rata usaha industri dapat menampung 2 orang tenaga kerja dan pada tahun 2019 menjadi 3.373 orang dengan 1.525 unit usaha yang artinya 1 unit usaha dapat menyerap sebanyak 1-2 orang.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perindustrian di Kabupaten Aceh Selatan pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.77**  
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian**  
**Tahun 2014-2019**

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	3,98	3,51	3,46	3,52	3,52	3,24
2.	Pertumbuhan sektor Industri dalam PDRB	6,29	4,15	3,21	3,11	3,0	3,1
3.	jumlah kelompok pengrajin	984	984	984	984	984	984
4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	100	29	35	43	45	47

*Sumber : Produk Dosmetik Regional Bruto, BPS Kabupaten Aceh Selatan*

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah.

Daya saing adalah suatu kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap beberapa indikator antara lain:

#### 2.4.1.1. Nilai Tukar Petani (NTP).

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang

dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode Tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

**Tabel 2.78**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2013-2015**

No	Uraian	2013	2014	2015
1.	Indeks yang diterima petani (It)	126.62	108.24	113.65
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	130.31	110.28	117.61
3.	NTP	97,17	98.15	96.64

*Sumber : BPS Kabupaten Aceh Selatan (diolah).*

Berdasarkan data yang dirilis BPS Aceh Selatan, menunjukkan terjadinya peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) selama empat tahun terakhir, yaitu dari 96,54 persen pada Tahun 2012, menjadi 98.15 persen di Tahun 2014, dan terjadi penurunan pada Tahun 2015 (96,64) persen atau menurun sebesar 1,51 persen, artinya terjadi penurunan kesejahteraan petani selama periode tersebut. Sedangkan untuk Tahun 2016 tidak dapat diinput karena belum tersedianya data di BPS Aceh Selatan.

#### **2.4.1.2. Produktifitas Total Daerah.**

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor (17). Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak membawa tingkat kesejahteraan masyarakat manakala pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmati.

Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari Kontribusi pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Aceh Selatan.

**Tabel 2.79**  
**Produktivitas Total Daerah Tahun 2018**

No	Sektor	Tahun 2018 (Rp)		
		PDRB ADHB	Tenaga Kerja	Produktivitas Total Daerah
		(Rp. Jutaan)	(Orang)	PDRB
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.376.750,0	39.837	33.214.273,2
2	Pertambangan dan Penggalian	155.840,0	3.121	48.292.085,9
3	Industri Pengolahan	174.630,0	4.318	38.816.211,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.320,0	258	16.188.759,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.050,0		
6	Konstruksi	906.230,0	11.939	73.320.856
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	285.080,0	16.793	47.857.964,6
8	Transportasi dan Pergudangan	28.720,0	3.779	68.808.282,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26.657,7		
10	Informasi dan Komunikasi	126.070,		
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	126.070,0	818	142.730.562
12	Real Estate	328.280,0		
13	Jasa Perusahaan	30.910,0		
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	723.770,0	21.094	32.567.180,2
15	Jasa Pendidikan	160.320,0		
16	Jasa Kesehatan dan Jasa Sosial	92.850,0		
17	Jasa Lainnya	77.150,0		
<b>Jumlah</b>		<b>5.521.190,0</b>	<b>101.957</b>	<b>51.100.820,9</b>

**Sumber : BPS, Aceh Selatan Dalam Angka tahun 2020**

Tabel di atas dapat diketahui bahwa produktivitas total daerah Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2018 sebesar Rp.51.100.820,9 didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 39.837 orang kemudian diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan sosial yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 21.094 orang dan sektor Perdagangan Besar dan eceran sebanyak 16.793 orang. Untuk meningkatkan daya saing daerah, maka fokus pembangunan tetap diarahkan pada pembangunan sektor pertanian secara keseluruhan dengan membangun berbagai infrastrukturnya dan mengintensifkan lahan yang ada. Bagi investor masih terbuka peluang untuk berinvestasi disektor tersebut termasuk membangun dan mengembangkan industri pengolahannya.

## 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antar Kabupaten/Kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan.

### 2.4.2.1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Aceh Selatan selama 5 tahun terakhir adalah adanya penurunan rasio dari 0,1168 kendaraan per kilomaternya pada Tahun 2013 menjadi 0,0134 kendaraan per kilomaternya pada Tahun 2019. Kondisi ini disebabkan semakin banyaknya jumlah kendaraan, namun kapasitas jalan yang ada relatif masih sangat memadai.

Dengan demikian kedepan harus menjadi perhatian untuk dapat memperbaiki jalan yang rusak dan menambah ruas jalan baru.

**Tabel 2.80**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2019**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Panjang Jalan	964,45	977,12	981,37	995,81	995,81	995,81	995,81
2	Jumlah Kendaraan	8.260	9.086	9.086	61.509	72.000	73.195	74.100
3	Rasio (1/2)	0,1168	0,1076	0,1080	0,0162	0,0138	0,0126	0,0134

*Sumber : Dishub Kabupaten Aceh Selatan.*

### 2.4.2.2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data-data yang ada maka penggunaan sarana perhubungan darat masih mendominasi penggunaan jasa perhubungan, disusul penggunaan jasa perhubungan laut dan udara.

**Tabel 2.81**  
**Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2019**

NO	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% Pertumbuhan
1.	Jumlah orang	Orang	6.100	33.236	34.236	34.236	68.040	80.328	85.860	1225,57
2.	Jumlah Barang	Ton	8.591	14.964	17.874	17.874	18.976	45.335	48.905	467,16

*Sumber : Dishub Kabupaten Aceh Selatan.*

### 2.4.2.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun.

**Tabel 2.82**  
**Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Aceh Selatan**

NO	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1	Dermaga	22.284	14.460	24.512	14.964	41.477	16.599	46.682	22.845	34142	39288	42025	43835
2	Bandara	1.456	9.632	1.601	10.595	1.033	7.082	-	-	-	-	-	-
3	Terminal	9.320	-	9.320	-	11.220	5.080	68.040	132.678	70,850	133,878	72,653	74,566
	<b>Jumlah</b>	<b>33.060</b>	<b>26.092</b>	<b>35.433</b>	<b>25.559</b>	<b>53.730</b>	<b>28.761</b>	<b>114.722</b>	<b>155.523</b>	<b>108,992</b>	<b>173,166</b>	<b>114,678</b>	<b>118,401</b>

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data-data yang ada maka penggunaan sarana perhubungan darat masih mendominasi penggunaan jasa perhubungan, disusul penggunaan jasa perhubungan laut dan udara.

Kabupaten Aceh Selatan selain merupakan ibu kota Tapaktuan, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Aceh Barat, Nagan Raya dan Abdya) menuju wilayah Selatan Aceh hingga ke Sumatera Utara atau sebaliknya sehingga Kabupaten Aceh Selatan merupakan penopang jalur distribusi perekonomian wilayah pantai barat selatan Provinsi Aceh. Kondisi infrastruktur merupakan unsur penting yang perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsi dengan optimal dalam mendukung aksesibilitas Kabupaten Aceh Selatan. Daya saing lainnya di bidang sarana prasarana perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan udara/laut, terminal bus yang mampu menghubungkan antar Kota antar Provinsi.

#### 2.4.2.4. Luas Wilayah Industri.

Luas wilayah industri yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.83**  
**Rasio Luas Wilayah Industri**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016**

NO	Uraian	2016
1.	Luas Kawasan Peruntukan Industri Kecil Menengah	12,65
2.	Luas Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga	
3.	Rasio (1/2)	

*Sumber: Disdagperinkop dan UKM dan RTRW Aceh Selatan Tahun 2017*

#### 2.4.2.5. Luas Wilayah Kebanjiran.

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah banjir sampai Tahun 2019 mencapai 1,55 persen dari luas wilayah budidaya Kabupaten Aceh Selatan menurun dari kondisi tahun 2018 sebesar 3,39 persen. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor seperti rusaknya hutan di hulu DAS, terjadinya pengalihan fungsi lahan, dan berkurangnya daerah serapan air serta kurangnya drainase. Banjir dapat terjadi selama atau setelah hujan lebat, apabila melebihi daya tampung sungai maka air akan meluap dan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Akibat aktifitas manusia dapat menimbulkan terjadinya banjir seperti membuang sampah ke

saluran pembuangan dan sungai yang ada, mendirikan perumahan di daerah resapan air dan penebangan pohon secara liar. Daerah potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar terdapat pada daerah aliran sungai dan daerah pengaruh muara sungai besar serta dorongan air laut pasang. Banjir di Kabupaten Aceh Selatan juga dapat terjadi akibat hujan di hulu sungai soraya (Aceh Singkil) dan atau di kabupaten Aceh Tenggara sungai Alas (berupa banjir kiriman) yang terjadi setiap tahun hingga sampai saat ini yang menimpa 3 Kecamatan yaitu Trumon Timur, Trumon Tengah dan Trumon.

**Tabel 2.84**  
**Rasio Luas Wilayah Kebanjiran**  
**di Kab. Aceh Selatan Tahun 2013-2019**

<b>N O</b>	<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Luas Wilayah Kebanjiran	305,5	305,5	322,73	1.382,80	1.401	5664	2592
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	167.051,16	167.051,16	167.051,16	167.051,16	167.051,16	167.051,16	167.051,16
3	Rasio (1/2)	0,001	0,001	0,001	0,008	0,008	0,0339	0,0155

**Sumber : BPBD dan RTRW Aceh Selatan Tahun 2016-2036**

#### **2.4.2.6. Luas Wilayah Perkotaan.**

Luas wilayah permukiman perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Aceh Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.85**  
**Rasio Luas Wilayah Permukiman Perkotaan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>2019</b>
1.	Luas Wilayah Permukiman Perkotaan	2.372,58
2.	Luas Wilayah Permukiman Perdesaan	3.982,78
3.	Rasio (1/2)	0,60

**Sumber: RTRW Aceh Selatan Tahun 2016-2036**

#### **2.4.2.7. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang.**

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang

mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna //memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

**Tabel 2.86**  
**Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013–2016**

NO	Sektor	Jumlah			
		2013	2014	2015	2016
1.	Perusahaan Asuransi				
1.1.	Konvensional	4	4	4	4
1.2.	Syariah	-	-	-	-
	Jumlah	4	4	4	4

*Sumber : Bagian Ekonomi Setdakab.*

#### **2.4.2.8. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih.**

Air Bersih (clean Water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (drinking water) air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas:

1. Air Hujan;
2. Air Sungai dan Danau;
3. Mata Air;
4. Air Sumur Dangkal;
5. Air Sumur Dalam.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah RT menggunakan air bersih

sebagai air minum. Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Aceh Selatan pada saat ini terbagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipaan meliputi hampir seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Sistem jaringan perpipaan di Kabupaten Aceh Selatan ini pelayanan dan pengelolannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan pelayanan 35.031 RT atau 52,32 persen RT yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

**Tabel 2.87**  
**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih**  
**Tahun 2013–2018**

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase RT menggunakan air bersih	93,99%	5,96%	5,88%	4,76%	52,32	11,08	
2	- Pemakaian air bersih RT	43.432						45.412
3	- RT berlangganan PDAM	2.596	3.037	3.051	3.199	35.031	6.444	6.492
	- Jumlah RT	50.039	50.956	51.871	52.726	66.951	58.140	

*Sumber : BPS dan PDAM dan Dukcapil*

#### 2.4.2.9. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan.

**Tabel 2.88**  
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik**  
**Kab. Aceh Selatan Tahun 2014-2019**

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Tangga pengguna listrik	12.954	43.306	87.387	51.895	41.488	15397
2.	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	50.956	51.871	67.154	66.180	58.140	
3.	Persentase Rumah Tangga pengguna listrik	25,42	83,49	130,13	78,41	71,36	
4.	Jumlah Daya Listrik Terpasang	29.862.815	31.287.115	33.074.933	38.609.250		
5.	Jumlah Kebutuhan Listrik	49.913.350	53.381.917	59.509.412	61.064.978		
6.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (4/5)	0,5983	0,5861	0,5558	0,6323		

*Sumber : PLN Tapaktuan, PLN Kotafajar, dan PLN Labuhanhaji dan ASDA 2020.*

Tahun 2017 rasio ketersediaan listrik baru mencapai 0,6323. Semakin bertambahnya kebutuhan terhadap energi listrik, perlu diimbangi dengan kapasitas pemasangannya. Untuk itu kedepan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik tersebut, guna meningkatkan daya saing daerah, perlu penambahan kapasitas pemasangan listrik dimaksud melalui pembangunan pembangkit listrik oleh PLN baik dengan membangun PLTU, maupun menggunakan energi alternatif seperti tenaga surya, tenaga bayu dan lainnya yang mengacu kepada Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang disusun oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Selatan ataupun dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN).

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban memasang listrik untuk masyarakat yang tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.

### **2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.**

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, serta tersedianya berbagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi tersebut. Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dapat juga dilakukan terhadap indikator angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

#### **2.4.3.1. Angka Kriminalitas.**

Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparat

pemerintah. Kondusifnya kondisi keamanan tersebut dapat dilihat dari rendahnya angka kriminalitas yang terjadi. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa angka kriminalitas cenderung kondusif yaitu 10,10 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2016 dan menurun menjadi xxxx kasus per 10.000 penduduk pada tahun xxxx. Pada umumnya kasus kriminal yang menonjol adalah narkoba, penganiayaan, pencurian dan penipuan.

**Tabel 2.89**  
**Angka Kriminalitas Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2016-2019**

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus Narkoba	17	24	30	37
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	0	1	1	0
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	15	11	16	14
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	46	20	37	20
5.	Jumlah kasus Pencurian	76	64	44	33
6.	Jumlah kasus Penipuan	10	11	12	8
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	0	0	0	0
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	232	166	161	146
9.	Jumlah Penduduk	229.565	230.254	234.761	
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	10,10	7,2	6,8	

*Sumber : Polres Aceh Selatan*

#### 2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi.

Kabupaten Aceh Selatan cukup kondusif sebagai tempat untuk berinvestasi, demikian juga jumlah demonstrasi yang terjadi relatif rendah bahkan bisa dibilang tidak ada sama sekali. Hal ini menandakan bahwa daerah ini cukup kondusif bagi investor yang tentunya harus didukung pula dengan adanya kepastian hukum dalam hal perizinan dan pertanahan, kemudahan dalam pengurusan perizinan, serta kemudahan dalam perpajakan dan meniadakan pungutan liar lainnya.

**Tabel. 2.90**  
**Jumlah Demonstrasi Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2016-2019**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
----	--------	------	------	------	------

1	Bidang Politik	-	-	-	-
2	Ekonomi	-	-	-	-
3	Kasus pemogokan kerja	-	-	-	-
4	Sosial budaya	1	-	-	-
5	Jumlah Demonstrasi/ Unjuk Rasa	-	-	1	-

Sumber : Polres Aceh Selatan 2020

### 2.4.3.3. Lama Proses Perizinan

Perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari), jenis perizinan yang dianalisis antara lain :

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IUI : Izin Usaha Industri
4. TDI : Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

Untuk meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan pelayanan perizinan satu pintu (One Stop Services), dalam proses perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Selatan. Kepastian prosedur, waktu dan keamanan perizinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi, dengan kemudahan perizinan berinvestasi diharapkan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Selatan.

**Tabel. 2.91**  
**Lama Proses Perizinan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017**

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP	3 hari	3 – 6	Bebas biaya
2.	TDP	3 hari	3 – 6	Bebas biaya
3.	IUI	5 hari	8	Bebas biaya
4.	TDI	3 hari	7	Bebas biaya
5.	IMB	14 hari	10	Sesuai Qanun Daerah
6.	HO	15 hari	12	Sesuai Qanun Daerah

Sumber : BPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan

Hal yang penting untuk mendapat perhatian adalah perlunya promosi investasi yang sistematis baik melalui pembuatan profil investasi daerah, maupun membentuk tim investasi daerah, karena tidak adanya SKPD khusus yang menangani bidang investasi ini di Kabupaten Aceh Selatan.

#### **2.4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah.**

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan), seperti retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah.

Perkembangan penerimaan pajak daerah selama Tahun 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan adanya peningkatan yang fluktuatif. Pada Tahun 2014 Rp.6.707.954.528, pada Tahun 2015 menjadi Rp. 10.671.019.805 dan meningkat pada Tahun 2016 sebesar 20.040.506.120,00 dan pada Tahun 2017 menurun menjadi sebesar Rp 14.160.145.206,81 serta pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar Rp. 11.543.658.343,00 dan meningkat sedikit pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 13.062.978.774,00 Upaya penyesuaian terhadap regulasi yang baru mutlak segera dilakukan agar daya saing di bidang pajak daerah mampu segera diakomodir. Secara rinci penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Selatan selama kurun waktu 2014 - 2019 dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel. 2.92**  
**Aspek Daya Saing bidang**  
**Pengenaan Pajak dan Retribusi Daerah**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014–2019**

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Pajak Daerah</b>	<b>6,707,954,528</b>	<b>10,671,019,805</b>	<b>20,040,506,120</b>	<b>14,160,145,207</b>	<b>11,543,658,343</b>	<b>13,062,978,774</b>
	- Pajak Hotel	63,337,207	32,387,344	34,460,289	36,270,178	30,244,544	143,652,451
	- Pajak Restoran	1,318,134,668	1,374,725,999	1,927,708,930	2,286,304,606	2,350,667,426	2,578,809,436
	- Pajak Hiburan	9,325,000	6,563,000	4,950,000	12,556,400	7,000,000	4,840,000
	- Pajak Reklame	144,408,828	186,553,718	137,658,540	110,364,785	157,974,569	145,791,318
	- Pajak Penerangan Jalan	3,130,925,756	3,593,211,829	3,997,035,525	4,786,811,990	5,270,554,036	6,224,023,776
	- Pajak Mineral Bukan Logam	1,426,155,741	2,720,340,955	4,008,767,518	3,153,528,328	2,900,308,929	3,224,306,628
	- Pajak Air Bawah Tanah	-	-	-	-	8,066,000	12,071,000
	- Pajak sarang Burang Walet	61,920,000	72,244,100	51,650,000	49,590,000	50,994,000	-
	- Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHHTB)	72,447,328	2,164,580,000	9,261,350,400	3,098,329,750	192,498,835	583,673,340
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	481,300,000	520,412,860	616,924,918	626,389,170	575,350,004	145,810,825
2	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>7,581,548,513</b>	<b>953,011,402</b>	<b>3,422,532,343</b>	<b>9,327,679,236</b>	<b>9,197,544,675</b>	<b>9,999,808,438</b>
	- Retribusi Jasa Umum	4,903,240,425	88,986,000	367,532,877	6,264,708,574	6,671,917,775	7,530,518,400
	- Retribusi Jasa Usaha	2,453,438,463	624,772,327	2,771,932,091	2,906,064,162	2,314,854,900	2,398,320,538
	- Retribusi Perizinan Tertentu	224,869,625	239,253,075	283,067,375	156,906,500	210,772,000	70,969,500
3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak dipisahkan</b>	<b>2,690,273,354</b>	<b>3,920,190,094</b>	<b>4,402,490,842</b>	<b>5,395,995,915</b>	<b>6,213,503,535</b>	<b>6,225,248,989</b>
4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah</b>	<b>57,480,251,367</b>	<b>68,566,013,271</b>	<b>91,115,920,171</b>	<b>105,628,654,413</b>	<b>119,050,513,784</b>	<b>104,811,061,875</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>74,460,027,762</b>	<b>84,110,234,572</b>	<b>118,981,449,475</b>	<b>134,512,474,771</b>	<b>146,005,220,337</b>	<b>134,099,098,076</b>

**Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Selatan.**

Pengenaan pajak daerah tersebut tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

#### **2.4.3.5. Jumlah Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun yang Mendukung Iklim Usaha.**

Perda/Qanun merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, maka memang masih sangat sedikit perda yang

diterbitkan dalam mendukung iklim pengembangan usaha di Kabupaten Aceh Selatan, dan hanya ada 1 (satu) perda/qanun yang terkait hal tersebut pada Tahun 2015.

#### **2.4.3.6. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa.**

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah disekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain disetiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan disegala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang. Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 desa, yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Pengertian masing-masing klasifikasi desa tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Desa Terbelakang atau Desa Swadaya.**

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Biasanya desa terbelakang berada di wilayah yang terpencil jauh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penunjang yang mencukupi.

##### **2. Desa Sedang Berkembang atau Desa Swakarsa.**

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa swakarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah peralihan desa terpencil dan kota. Masyarakat pedesaan swakarsa masih sedikit yang berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian saja serta banyak mengerjakan sesuatu secara gotong royong.

### 3. Desa Maju atau Desa Swasembada.

Desa maju adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/kelurahan. Saat ini masih terdapat 260 Gampong (Desa) di Kabupaten Aceh Selatan yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Desa Swadaya sejumlah 187 Desa;
2. Desa Swakarya sejumlah 63 Desa;
3. Desa Swasembada sejumlah 10 Desa.

Minimnya infrastruktur dasar seperti listrik, air minum jaringan jalan dan akses informasi serta SDM penduduk yang relatif rendah merupakan hal penyebab potensi desa tidak tergarap secara maksimal, sehingga perekonomian desa belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah khususnya di Aceh Selatan. Kebijakan pemerintah ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk membangun Gampong Mandiri.

**Tabel. 2.93**  
**Jumlah Gampong Swasembada**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2019**

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Gampong/Kelurahan Swadaya	-	247	170	187	187	187	187
2.	Jumlah	99	12	18	63	63	63	63

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Gampong/Kelurahan Swakarya							
3.	Jumlah Gampong/Kelurahan Swasembada	149	1	10	10	10	10	10
4.	Jumlah Gampong/Kelurahan (1)+(2)+(3)	248	260	260	260	260	260	260
5.	Persentase Gampong berstatus swasemda dibagi jumlah Gampong/kelurahan (3)/(4)	60,08	0,38	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84

**Sumber : BPM Kabupaten Aceh Selatan**

#### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.

##### 2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3).

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.94**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019**

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah lulusan S1	5.397	5.819	6.341	6.896	7.199		8.960
2	Jumlah lulusan S2	155	172	182	203	223		265
3	Jumlah lulusan S3	1	0	3	3	3		4
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	5.553	5.991	6.526	7.102	7.624		9.229
5	Jumlah Penduduk	223.522	226.679	227.732	229.565	230.955		236.359
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	2,48	2,64	2,86	3,09	3,30		3,90

**Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020**

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Rasio lulusan S1/S2/S3 mencapai 3,90% atau sudah melampaui target tahun 2017 sebesar 3,30.

#### 2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan).

Rasio beban ketergantungan atau dependensi ratio digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 Tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 Tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 - 64 Tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Indikator Rasio Ketergantungan tahun 2019 mencapai 30,68%. Hasil analisis rasio ketergantungan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel . 2.95**  
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh selatan**  
**Tahun 2013-2019**

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	57.337	56.104	55.211	55.554	55.743		57.582
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	11.580	11.984	13.598	13.506	13.683		14.922
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	68.917	68.088	68.809	69.060	69.426		72.504
4	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	154.605	158.591	158.923	160.505	161.529		163.855
5	Jumlah Penduduk	223.522	226.679	227.732	229.565	230.955		236.359
6	Rasio ketergantungan (3)/(4)*100	44,58	42,93	43,30	43,03	42,92		30,68

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020

Struktur dan komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Aceh Selatan relatif menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 30 orang penduduk yang tidak produktif. Disisi lain kualitas SDM dengan adanya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga keterampilan yang ada diharapkan akan mampu menopang kebutuhan pasar tenaga kerja.

## 2.4.5. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

### 2.4.5.1. Pendidikan

#### 2.4.5.1.1. Angka Melek Al-Qur'an

Angka melek Al-Qur'an merupakan perbandingan antara Jumlah penduduk usia di atas 15 Tahun yang bisa membaca Al-Qur'an dengan Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas. Angka melek Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini belum tersedia datanya.

**Tabel.2.96**  
**Perkembangan Angka Melek Al-Qur'an**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia di atas 15 Tahun yang bisa membaca Al-Qur'an							
2	Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas	117.526	119.985	122.984	123.542	140.818		178.777
3	Angka melek Al-Quran							

*Sumber: Dinas Syariat Islam*

#### 2.4.5.1.2. Hafiz Al-Qur'an

Jumlah Hafiz Al-Qur'an di di Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini berjumlah 88 Orang dan meningkat dibanding tahun 2015 sebanyak 32 orang dan tahun 2016 sebanyak 58 orang. Peningkatan yang pesat tersebut memberikan indikasi bahwa pengamalan Al-Qur'an sudah semakin baik di Kabupaten ini.

**Tabel.2.97**  
**Jumlah Hafiz Al-Qur'an Kabupaten Aceh Selatan**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Hafiz Al-Qur'an	32	58	81		88

*Sumber : Dinas Syariat Islam*

### 2.4.5.1.3. Peningkatan Kualitas Keagamaan

#### 2.4.5.1.3.1. Cerdas Cermat

Persentase peserta cerdas cermat agama terlihat masih relatif sangat kecil yaitu 0,24 persen pada tahun 2013 menjadi 0,27 persen pada tahun 2017, namun jumlah pesertanya masih memperlihatkan jumlah yang statis baik dari tingkat SD maupun tingkat SMP yaitu masing-masing sebanyak 54. Meningkatnya jumlah peserta cerdas cermat tersebut akan meningkat pula pengetahuan tentang agama Islam di tingkat SD dan SMP.

**Tabel.2.98.**  
**Persentase dan Jumlah Peserta Cerdas Cermat**  
**Kab. Aceh Selatan Tahun 2015-2019**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Peserta Cerdas Cermat SD	54	54	54		
2	Jumlah Siswa SD	20.353	21.038	19.761		28.373
3	Persentase Peserta Cerdas Cermat SD	0,26	0,25	0,27		
4	Jumlah Peserta Cerdas Cermat SMP	54	54	54		
5	Jumlah Siswa SMP	9.696	8,807	8.872		10.352
6	Persentase Peserta Cerdas Cermat SMP	0,55	0,61	0,65		

*Sumber : Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan*

#### 2.4.5.1.4. Pengembangan Sumberdaya Syariat Islam

Pengembangan sumberdaya syariat Islam terlihat dari beberapa indikator berikut seperti pada tabel berikut :

**Tabel.2.99.**  
**Jumlah Pengembangan Sumberdaya Syariat Islam**  
**di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015-2019**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tajhiz Jenazah	76	130	160		54
2	Jumlah Qanun Syariat Islam					
3	Jumlah Remaja Mesjid	299	72	72		
4	Jumlah Imam Mesjid	221	72	108		60
5	Jumlah Guru TPA		300	108		40
6	Jumlah Guru Pendidikan Agama					
7	Jumlah Santri Pondok Pasantren	11,415	12,725	13,614	14,328	14,875

*Sumber : Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah*

Jumlah santri per pondok pesantren adalah sebesar 142 santri per pondok pesantren pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 170 santri per pondok pesantren pada tahun 2019.

## 2.4.5.2. Keagamaan

### 2.4.5.2.1. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Sebagai salah satu Kabupaten di Aceh yang mayoritas Muslim jumlah sarana peribadatan memperlihatkan peningkatan yang signifikan dari Tahun 2015 sampai dengan 2019. Rasio Masjid per penduduk di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 1,27576 pada tahun 2013 menurun menjadi 1,17696 pada tahun 2017. Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.100.**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan**  
**di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015-2019**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Masjid	268	268	271		274
2	Jumlah Meunasah	522	522	522		478
3	Jumlah Balee Seumeubeut	65	70	74	80	100
4	Jumlah TPA	226	211	211	211	211
5	Jumlah Pondok Pasantren	80	84	85	86	90
6	Jumlah Areal Kuburan	-	-	-	-	-
7	Jumlah Madrasah Ulumul Quran	1	1	1	1	1

**Sumber : Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Selatan**

## 2.5. Data Kondisi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan

Data update revisi covid 19 Kabupaten Aceh Selatan per tanggal 20 juli 2020 :

- a) Suspek = 29 orang
  - Suspek dirawat = 1 orang
  - Suspek masih isolasi = 6 orang
  - Suspek selesai isolasi = 22 orang
- b) Kasus terkonfirmasi = 3 orang
  - Kasus terkonfirmasi dirawat = 2 orang
  - Kasus terkonfirmasi sembuh = 1 orang

- c) Traveler = 5.081 orang
- Traveler masih isolasi = 209 orang
  - Traveler yang selesai isolasi = 4.872 orang

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, untuk itu percepatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan daerah yang sampai saat ini masih terus mengalami peningkatan kasus positif Corona.

Sampai dengan tanggal 30 juni 2020 realisasi Dana BTT (Penanganan Wabah Virus Covid-19 TA 2020) Kabupaten Aceh Selatan telah mencapai Rp. 11.605.924.700,- dengan rincian Dinas Kesehatan sebesar Rp. 307.500.000,- RSUD sebesar Rp. 2.118.880.000,- Dinas Pangan 1.054.300.000,- DISPERINDAGKOP sebesar Rp. 809.770.000,- DPMG sebesar Rp. 390.000.000,- dan Dinas Sosial sebesar Rp. 4.499.514.000,-.

Berikut daftar rincian penanganan dampak virus Corona Disease (COVID-19) di Kabupaten Aceh Selatan :

**Tabel 2.101.**  
**LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU**  
**PENANGANAN COVID-19 BULAN JUNI TAHUN 2020**  
**KABUPATEN ACEH SELATAN**

<b>NO</b>	<b>SKPK</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1.500.000.000,-	809.770.000
		<b>JUMLAH 1</b>	<b>1.500.000.000,-</b>	<b>809.770.000,-</b>
2	DINAS SOSIAL	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	4.500.000.000,-	4.499.514.000,-
		<b>JUMLAH 2</b>	<b>4.500.000.000,-</b>	<b>4.499.514.000,-</b>
3	DINAS PANGAN	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	1.200.000.000,-	1.054.300.000,-
		<b>JUMLAH 3</b>	<b>1.200.000.000,-</b>	<b>1.054.300.000,-</b>

NO	SKPK	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	
4	DPMG	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	403.000.000,-	390.000.000,-
		<b>JUMLAH 4</b>	<b>403.000.000,-</b>	<b>390.000.000,-</b>
5	RSUD	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	3.000.000.000,-	2.118.880.000
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	458.245.290,-	0
		<b>JUMLAH 5</b>	<b>3.458.245.290,-</b>	<b>2.118.880.000,-</b>
6	Dinas Kesehatan	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Penyakit Menular	682.500.000,-	0
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	304.520.000,-	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	316.500.000,-	0
		Biaya Operasional Kesehatan Sekunder (DAK Non Fisik)	303.751.300,-	0
		Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik)	633.868.481,-	0
		Dukungan BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)	32.640.000,-	0
		Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	9.500.000,-	0
		<b>JUMLAH 6</b>	<b>2.283.279.781,-</b>	<b>0</b>
7	BPKD	Belanja Tidak Terduga (BTT)	4.690.906.025	2.733.460.700
		<b>JUMLAH 7</b>	<b>4.690.906.025,-</b>	<b>2.733.460.700,-</b>

*Sumber : BPKD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020*

## 2.6. Evaluasi

### 2.6.1. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Selatan Semester II tahun 2019 dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program/kegiatan yaitu membandingkan realisasi capaian program/kegiatan baik fisik maupun keuangan tiap SKPK sampai dengan Bulan Desember Tahun 2019 dengan target yang telah ditetapkan untuk setiap program dan kegiatan pembangunan. Hasil perhitungan ditetapkan dalam satuan persentase dengan

formulasi perhitungan sebagai berikut : (Rerata Indikator Capaian = Nilai realiasi yang dicapai sampai dengan Semester II tahun 2019/ target Semester II tahun 2019 x 100%).

Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan katagori indeks rerata juga dibagi menjadi 5 katagori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Nilai dari hasil perhitungan setiap indikator program dan kegiatan selanjutnya juga menjadi nilai capaian kinerja setiap SKPK yang melaksanakan Program dan kegiatan tersebut.

Adapun kriteria katagori skala penilaian yang digunakan adalah sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/1749/II/Bangda adalah sebagai berikut :

- (1)  $91\% \leq 100\%$  : Sangat tinggi
- (2)  $76\% \leq 90\%$  : Tinggi
- (3)  $66\% \leq 75\%$  : Sedang
- (4)  $51\% \leq 65\%$  : Rendah
- (5)  $\leq 50\%$  : Sangat Rendah

Evaluasi RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 per Bidang Urusan Pemerintahan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh**

##### **1. Dinas Syariat Islam**

**Tabel 2.102**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Syari'at Islam**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>4</b>	<b>Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh</b>				
<b>4.01</b>	<b>Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang</b>				
<b>4.01.05</b>	<b>Dinas Syariat Islam</b>				
<b>4.01.4.01.05.01</b>	<b>Dinas Syariat Islam</b>				
4.01.4.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	605.660.325,-	560.687.683,-	92,57%	Sangat Tinggi
4.01.4.01.05.01.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	44.000.000,-	41.761.700,-	94,91%	Sangat tinggi
4.01.4.01.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.500.000,-	20.950.000,-	97,44%	Sangat Tinggi
4.01.4.01.05.01.29	Program Peningkatan Kualitas Keagamaan pada Anak Usia Dini/ Setingkat SD, SLTP, SLTA/Sederajat/ Prog.	90.000.000,-	87.997.504,-	97,78%	Sangat tinggi

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
	Dakwah Peribadatan				
4.01.4.01.05.01.30	Program Pembinaan Hukum dan Pengawasan Syariat Islam	190.000.000,-	180.689.952,-	95,10%	Sangat Tinggi
4.01.4.01.05.01.31	Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Syariat Islam	3.973.269.867,-	3.867.167.137,-	97,33%	Sangat tinggi
4.01.4.01.05.01.32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	4.413.800.000,-	4.364.913.000,-	98,89%	Sangat tinggi
4.01.4.01.05.01.38	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Al-Quran	60.000.000,-	52.774.200,-	87,96%	Tinggi
4.01.4.01.05.01.46	Program Kajian, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Syariat Islam	1.464.220.000,-	1.447.406.800,-	98,85%	Sangat tinggi
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.4.01.05.01.28	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah	59.620.000-	26.865.000,-	45,06%	Sangat rendah
<b>4.03.</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.05.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.922.070.192,-</b>	<b>10.651.212.976,-</b>	<b>97,52%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari ke 12 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPK dan DPA Tahun 2019 namun tidak terdapat dalam RPJM/Renstra yaitu Program Kajian, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Syariat Islam, dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPD yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **97,52%** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 10.651.212.976,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 ini adalah sebesar 58,51% untuk capaian kinerja dan 90,55% untuk capaian keuangannya.

## 2. Dinas Pendidikan Dayah

**Tabel 2.103**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Pendidikan Dayah**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/	Anggaran	Realisasi Anggaran
------	-----------------	----------	--------------------

	Kegiatan		SPJ	%	Katagori
<b>4</b>	<b>Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh</b>				
<b>4.01</b>	<b>Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang</b>				
<b>4.01.28</b>	<b>Sekretariat Dinas Pendidikan Dayah</b>				
<b>4.01.4.01.01.28</b>	<b>Sekretariat Dinas Pendidikan Dayah</b>				
4.01.4.01.01.28.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	420.239.400,-	405.436.800,-	96,48%	Sangat Tinggi
4.01.4.01.01.28.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	129.380.000,-	128.258.100,-	99,13%	Sangat Tinggi
4.01.4.01.01.28.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.01.28.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.01.28.22	Program Pembinaan Manajemen Dayah	-	-	-	-
4.01.4.01.01.28.31	Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Syariat Islam	2.394.950.000,-	2.345.282.620,-	97,93%	Sangat Tinggi
4.01.4.01.01.28.32	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peribadatan	8.256.145.000,-	7.786.880.300,-	94,32%	Sangat tinggi
4.01.4.01.01.28.32	Program Pendidikan Dayah	-	-	-	-
4.01.4.01.01.28.36	Program Pembinaan Sumber Daya Manusia	727.800.000,-	620.422.000,-	85,25%	Tinggi
4.01.4.01.01.28.37	Program Pendataan, Pengawasan dan Pengembangan Pesantren dan Balai Pengajian	-	-	-	-
4.01.4.01.01.28.xx	program pengembangan seni dan budaya	-	-	-	-
4.01.4.01.01.28.xx	program pemberdayaan ekonomi mandiri Dayah Berbasis Syariah	-	-	-	-
4.01.4.01.01.28.xx	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	-	-	-	-
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.4.01.01.28.28	Program Pelaksanaan Hari-hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah	87.950.000,-	87.950.000,-	100%	Sangat Tinggi
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.016.464.400,-</b>	<b>11.374.229.820,-</b>	<b>94,66%</b>	<i>Sangat tinggi</i>

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Sekretariat Majelis Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 14 (empat belas) program. Dari ke 14 program tersebut terdapat 5 (lima) program yang hanya direncanakan dalam Renstra namun tidak dilanjutkan untuk tahun 2019 ini, 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD Tahun 2019 dan 1 (satu) program yang direncanakan dalam RKPD 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **94,6%** dengan realisasi anggaran **Rp. 11.374.229.820,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **64,73%** dan **95,06%**.

### 3. Sekretariat Majelis Adat Aceh

**Tabel 2.104**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Sekretariat Majelis Adat Aceh**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>4</b>	<b>Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh</b>				
<b>4.01</b>	<b>Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang</b>				
<b>4.01.25</b>	<b>Sekretariat Majelis Adat Aceh</b>				
<b>4.01.4.01.01.25</b>	<b>Sekretariat Majelis Adat Aceh</b>				
4.01.4.01.01.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	351.799.900,-	347.165.061,-	98,68%	Sangat tinggi
4.01.4.01.01.25.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	34.083.100,-	34.083.079,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.01.25.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.01.25.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	27.721.000,-	27.721.000,-	100%	Sangat Tinggi
4.01.4.01.01.25.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	-	-
4.01.4.01.01.25	Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	-	-	-	-
4.01.4.01.01.25	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh	-	-	-	-
4.01.4.01.01.25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.4.01.01.25.28	Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan, Nasional dan Daerah	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.01.25.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>413.604.000,-</b>	<b>408.969.140,-</b>	<b>98,88%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 10 (sepuluh) program. Dari 10 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra namun tidak dilanjutkan, 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD namun tidak dilanjutkan dan 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RKPD.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sudah **Sangat tinggi** yaitu **98,88%** dengan realisasi anggaran **Rp. 408.969.140,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **21,43%** dan **99,68%**.

Hasil lain yang didapati dari evaluasi ini adalah, Renstra Perubahan Sekretariat Majelis Adat Aceh sangat tidak

direkomendasikan atau dengan kata lain sangat banyak terdapat kesalahannya.

#### 4. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

**Tabel 2.105**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>4</b>	<b>Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh</b>				
<b>4.01</b>	<b>Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang</b>				
<b>4.01.26</b>	<b>Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh</b>				
<b>4.01.4.01.01.25</b>	<b>Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh</b>				
4.01.4.01.01.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	199.415.000,-	190.339.525,-	95,45%	Sangat tinggi
4.01.4.01.01.25.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	15.605.000,-	14.986.050,-	96,03%	Sangat tinggi
4.01.4.01.01.25.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.01.25.05	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.01.25.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-
4.01.4.01.01.25.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	-	-	-
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>				
1.01.4.01.01.25.24	Program Peningkatan Mutu Pendidikan				
	<b>JUMLAH</b>	<b>301.620.000,-</b>	<b>291.925.575,-</b>	<b>96,79%</b>	<i>Sangat tinggi</i>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 7 (tujuh) program. Dari 7 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra, 1 Program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD, dan 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RKPD tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **96,79%** dengan realisasi anggaran **Rp. 291.925.575,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **33,33%** dan **97,51%**.

## 5. Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama

**Tabel 2.106**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Majelis Permusyawaratan Ulama**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
4	Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh				
4.01	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				
4.01.24	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama				
4.01.4.01.01.24	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama				
4.01.4.01.01.24.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244.134.000,-	240.480.390,-	98,50%	Sangat Tinggi
4.01.4.01.01.24.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	36.800.000,-	31.579.000,-	85,81%	Tinggi
4.01.4.01.01.24.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.01.24.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.01.24.33	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	1.542.810.000,-	1.008.313.500,-	78,05%	Tinggi
<b>JUMLAH</b>		<b>1.823.744.000,-</b>	<b>1.476.297.890,-</b>	<b>80,95%</b>	<b>Tinggi</b>

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 5 (lima) program. Dari 5 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sudah **Tinggi** yaitu **80,95%** dengan realisasi anggaran **Rp.1.476.297.890,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **58,57%** dan **88,16%**.

## 6. Sekretariat Baitul Mal

**Tabel 2.107**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
4	Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh				
4.01	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				
4.01.27	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Umat				

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01.4.01.01.27</b>	<b>Sekretariat Majelis Permusyawaratan Umat</b>				
4.01.4.01.01.27.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	198.637.000,-	198.251.300,-	99,81%	Sangat tinggi
4.01.4.01.01.27.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	22.649.500,-	22.100.500,-	97,58%	Sangat tinggi
4.01.4.01.01.27.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.01.27.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.01.27.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	-	-	-	-
4.01.4.01.01.27.41	Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin	118.215.500,-	118.135.500,-	99,93%	Sangat tinggi
<b>4.01</b>	<b>Adminstrasi Pemerintahan</b>				
4.01.4.01.01.27.28	Program Hari-Hari Besar, Keagamaan Nasional dan Daerah	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.01.27.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>399.502.000,-</b>	<b>338.487.300,-</b>	<b>99,70%</b>	<i>Sangat tinggi</i>

Berdasarkan tabel atas terlihat bahwa Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan) program. Dari 8 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/ Renstra dan RKPd dan 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RPKD 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,70%** dengan realisasi anggaran masih **Rp.338.487.300,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPKD Tahun 2019 adalah sebesar **19,44%** dan **99,49%**.

## B. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

### 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Tabel 2.108**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>				
<b>1.01.01</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>				
<b>1.01.101.01.01</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>				
1.01.1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.608.930.000,-	1.544.071.426,-	95,97%	Sangat tinggi
1.01.1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	274.000.000,-	235.862.000,-	86,08%	Tinggi
1.01.1.01.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin	-	-	-	-

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
	<b>Aparatur</b>				
1.01.1.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	390.000.000,-	332.767.400,-	85,32%	Tinggi
1.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	10.063.411.000,-	10.003.762.200,-	99,41%	Sangat tinggi
1.01.1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	35.034.293.839,-	34.740.479.852,-	99,16%	Sangat tinggi
1.01.1.01.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	1.574.954.000	1.506.529.870,-	95,66%	Sangat tinggi
1.01.1.01.01.01.20	Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.726.030.000,-	1.506.529.870,-	95,66%	Sangat Tinggi
1.01.1.01.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	25.632.020.000,-	24.903.900.491,-	97,16%	Sangat tinggi
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>				
2.16.1.01.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	59.550.000,-	59.415.000,-	99,77%	Sangat tinggi
2.16.1.01.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	30.000.000,-	29.835.000,-	99,45%	Sangat tinggi
2.16.1.01.01.01.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	-	-
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.1.01.01.01.28	Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan Nasional dan Daerah	140.000.000,-	91.310.000,-	65,22%	Rendah
	<b>Jumlah</b>	<b>76.533.188.839,-</b>	<b>75.162.204.039,-</b>	<b>98,21%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga belas) program. Dari 13 program tersebut terdapat 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD Tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **98,21%** dengan realisasi anggaran **Rp.75.162.204.039,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **58,21%** dan **90,13%**.

## 2. Dinas Kesehatan

**Tabel 2.109**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Aceh selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>				
<b>1.02.01</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>				
1.02.1.02.01.01.01	Program Administrasi Perkantoran	1.795.657.800,-	1.700.455.592,-	94,70%	Sangat Tinggi
1.02.1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	849.600.000,-	746.691.900,-	90,60%	Tinggi
1.02.1.02.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
1.02.1.02.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
1.02.1.02.01.01.15	Program obat dan Perbekalan Kesehatan	6.335.739.000,-	5.710.805.712,-	90,14%	Tinggi
1.02.1.02.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	22.229.295.800,-	18.835.702.094,-	84,73%	Tinggi
1.02.1.02.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	88.450.000,-	84.160.000,-	95,15%	Sangat tinggi
1.02.1.02.01.01.20	Program Peningkatan Gizi Masyarakat	65.417.700,-	63.412.700,-	96,94%	Sangat tinggi
1.02.1.02.01.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	646.637.700,-	637.629.900,-	98,61%	Sangat Tinggi
1.02.1.02.01.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1.02.1.02.01.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	22.868.546.200,-	20.251.356.927,-	88,56%	Tinggi
1.02.1.02.01.01.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	18.788.377.000,-	18.282.075.549,-	97,31%	Sangat tinggi
1.02.1.02.01.01.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1.02.1.02.02.01.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	50.000.000,-	48.445.000,-	96,89%	Sangat tinggi
1.02.1.02.01.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	-	-	-	-
1.02.1.02.01.01.31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	50.977.000,-	49.417.000,-	96,94%	Sangat tinggi
1.02.1.02.02.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	58.000.000,-	54.620.000,-	94,17%	Sangat tinggi
1.02.1.02.01.01.33	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	3.707.830.000,-	2.849.060.504,-	76,84%	Tinggi
1.02.1.02.01.01.33	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-
1.02.1.02.01.01.37	Program Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-
1.02.1.02.01.01.38	Program PTM (Penyakit Tidak Menular)	89.450.000,-	89.116.000,-	99,63%	Sangat tinggi
<b>1.11</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan</b>				
1.11.1.02.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	40.000.000,-	38.150.000,-	95,38%	Sangat tinggi
<b>2.04</b>	<b>Pertanahan</b>				
2.04.1.02.01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.568.000.000,-	1.227.663.800,-	78,29%	Tinggi
<b>2.05</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>				
2.05.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	115.650.000,-	109.510.000,-	94,69%	Sangat tinggi
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.1.02.01.01.38	Program Hari-hari Besar, Keagamaan Nasional dan daerah	40.400.000,-	40.400.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>79.388.028.200,-</b>	<b>70.841.713.678,-</b>	<b>89,23%</b>	<b>Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 25 (dua puluh lima) program. Dari 25 program tersebut terdapat 7 (tujuh) program yang hanya direncanakan dalam Renstra.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **tinggi** yaitu **89,23%** dengan realisasi anggaran **Rp.70.841.713.678,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKP Tahun 2019 adalah sebesar **96,28%** dan **94,25%**.

### 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Tabel 2.110**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>				
<b>1.03.02</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>				
1.03.1.03.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.070.280.000,-	1.027.728.436,-	96,02%	Sangat Tinggi
1.03.1.03.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	334.675.000,-	316.613.450,-	94,60%	Sangat Tinggi
1.03.1.03.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
1.03.1.03.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.000.000,-	9.000.000,-	100%	Sangat tinggi
1.03.1.03.02.01.07	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	26.825.341.000,-	26.151.101.600,-	97,49%	Sangat tinggi
1.03.1.03.02.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.170.500.000,-	1.157.028.000,-	98,85%	Sangat tinggi
1.03.1.03.02.01.18	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	447.000.000,-	442.229.000,-	98,93%	Sangat tinggi
1.03.1.03.02.01.22	Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
1.03.1.03.02.01.23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	390.000.000,-	384.748.500,-	98,65%	Sangat Tinggi
1.03.1.03.02.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8.137.893.700,-	7,854.992.127,-	96,52%	Sangat tinggi
1.03.1.03.02.01.28	Program Pengendalian Banjir	36.309.325.437,-	35.282.982.189,-	97,17%	Sangat tinggi
1.03.1.03.02.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang	990.000.000,-	964.089.000,-	97,38%	Sangat Tinggi
1.03.1.03.02.01.16	Program Pemanfaatan Ruang	62.200.000,-	58.428.500,-	93,94%	Sangat tinggi
1.03.1.03.02.01.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	85.000.000,-	80.817.000,-	95,08%	Sangat tinggi
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.1.03.02.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	99.201.000,-	99,20%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>76.303.776.126,-</b>	<b>74.185.151.996,-</b>	<b>97,22%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel 2.110 di atas terlihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas) program. Dari ke-15 program tersebut terdapat 2 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **97,22%** dengan realisasi anggaran **Rp.74.185.151.996,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **57,99%** dan **96,97%**.

#### 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Tabel 2.111**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Dinas Perumahan dan Permukiman**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>1.04</b>	<b>Urusan Wajib Pekerjaan Umum</b>				
<b>1.04.1.04.01.01</b>	<b>Dinas Perumahan dan Permukiman</b>				
1.04.1.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.070.280.000,-	1.027.728.436,-	96,02%	Sangat tinggi
1.04.1.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	334.675.000,-	316.613.450,-	94,60%	Sangat tinggi
1.04.1.04.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
1.04.1.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	9.000.000,-	9.000.000,-	100%	Sangat tinggi
1.04.1.04.01.01.15	Program Pengembangan Perumahan	309.450.000,-	303.808.960,-	98,18%	Sangat tinggi
1.04.1.04.01.01.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1.621.100.000,-	1.599.518.000,-	98,67%	Sangat tinggi
1.03.1.04.01.01.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	4.673.950.000,-	4.643.396.500,-	99,35%	Sangat tinggi
1.04.1.04.01.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	12.133.715.800,-	11.938.668.400,-	98,39%	Sangat tinggi
1.04.1.04.01.01.29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	15.429.799.400,-	15.045.773.000,-	97,51%	Sangat tinggi
1.04.1.04.01.01.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	15.095.978.800,-	14.885.894.344,-	98,61%	sangat tinggi
1.04.1.04.01.01.xx	Program Penyediaan Sistem Informasi/ Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
<b>1.11</b>	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan</b>				
1.11.1.04.01.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	20.000.000,-	0,-	0%	Sangat Rendah
	<b>Jumlah</b>	<b>50.697.949.000,-</b>	<b>49.770.401.090,-</b>	<b>98,17%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari 12 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra yaitu Program Penyediaan Sistem Informasi/ Database Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD namun tidak dilanjutkan ke DPA Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **98,17%** dengan realisasi anggaran **Rp.49.770.401.090,-**.

Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **73,94%** dan **87,96%**.

## 5. Satpol PP dan WH

**Tabel 2.112**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Kantor Satpol PP dan WH**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
<b>1.05.01</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah</b>				
<b>1.05.01.01</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah</b>				
1.05.1.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.074.400.000,-	1.062.905.334,-	98,93%	Sangat tinggi
1.05.1.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108.840.000,-	104.604.282,-	96,11%	Sangat tinggi
1.05.1.05.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
1.05.1.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.000.000,-	23.722.000,-	98,84%	Sangat Tinggi
1.05.1.05.01.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	215.000.000,-	214.059.500,-	99,56%	Sangat tinggi
1.05.1.05.01.01.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	250.380.000,-	250.343.200,-	99,99%	Sangat tinggi
1.05.1.05.01.01.33	Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Syariat Islam	155.280.000,-	155.075.750,-	99,87%	Sangat Tinggi
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.1.05.01.01.28	Program Peringatan Hari-hari Besar	28.000.000,-	27.992.000,-	99,97%	Sangat Tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>1.855.900.000,-</b>	<b>1.838.702.066,-</b>	<b>99,07%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan) program. Dari 8 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,07%** dengan realisasi anggaran **Rp.1.838.702.066,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **87,50%** dan **99,48%**.

## 6. Dinas Sosial

**Tabel 2.113**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Sosial**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>				
<b>1.06.01</b>	<b>Dinas Sosial</b>				
<b>1.06.01.01</b>	<b>Dinas Sosial</b>				
1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	660.102.680,-	609.219.381,-	92,29%	Sangat tinggi
1.06.1.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	339.470.000,-	336.991.300,-	99,27%	Sangat tinggi
1.06.1.06.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
1.06.1.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.400.000,-	12.912.000,-	96,36%	Sangat tinggi
1.13.1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	-	-	-	-
1.06.1.06.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	392.240.000,-	389.329.800,-	99,26%	Sangat Tinggi
1.06.1.06.01.01.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	-	-	-	-
1.06.1.06.01.01.19	Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	205.524.320,-	198.951.514,-	99,22%	Sangat tinggi
1.13.1.13.01.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	-	-	-	-
1.06.1.06.01.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	995.813.000,-	991.849.142,-	99,60%	Sangat tinggi
1.06.1.06.01.01.xx	Program Penanganan Fakir Miskin	-	-	-	-
1.06.1.06.01.01.xx	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-
1.06.1.06.01.01.xx	Program Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.1.06.01.01.28	Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan Nasional dan Daerah	106.250.000,-	105.875.000,-	99,65%	Sangat Tinggi
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.1.06.01.01.15	Program Pengembangan Data Informasi	-	-	-	-
4.03.1.06.01.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	77.500.000,-	77.390.00,-	99,86%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>2.785.300.000,-</b>	<b>2.722.518.737,-</b>	<b>97,75%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas) program. Dari 15 program tersebut terdapat 4 (empat) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan ke dalam DPA 2019, 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD, dan 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RKPD Tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **97,75%** dengan realisasi anggaran **Rp.2.722.518.737,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **54,28%** dan **96,95%**.

### C. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

#### 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana

**Tabel 2.114**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada DP3AKB**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar</b>				
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
<b>2.02.01</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak &amp; Keluarga Berencana</b>				
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	602.308.000,-	591.801.399,-	98,26%	Sangat tinggi
2.02.2.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	116.545.000,-	95.521.300,-	81,96%	Tinggi
2.02.2.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.02.2.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
2.02.2.02.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	127.000.000,-	125.264.000,-	98,63%	Sangat tinggi
2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100.000.000,-	98.205.805,-	98,21%	Sangat tinggi
2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	185.000.000,-	181.832.500,-	98,29%	Sangat tinggi
2.02.2.02.01.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-Padu	25.000.000,-	24.998.000,-	99,99%	Sangat tinggi
<b>2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>				
2.08.2.02.01.15	Program Keluarga Berencana	2.208.883.920,-	2.065.155.275,-	93,49%	Sangat Tinggi
2.08.2.02.01.18	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	426.000.000,-	296.837.000,-	69,68%	Sedang
2.08.2.02.01.22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	506.460.000,-	492.120.000,-	97,17%	Sangat tinggi
2.08.2.02.01.23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	3.486.451.080,-	3.287.671.080,-	94,30%	Sangat tinggi
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.2.02.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7.783.648.000,-</b>	<b>7.259.406.359,-</b>	<b>93,26%</b>	<b>Sedang</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa DP3AKB Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga belas) program. Dari ke-13 program tersebut

terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD namun tidak dilanjutkan dalam DPA 2019, dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPD 2019 yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **93,26%** dengan realisasi anggaran **Rp.7.259.406.359,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **65,71%** dan **93,09%**.

## 2. Dinas Pangan

**Tabel 2.115**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Pangan**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar</b>				
<b>2.03</b>	<b>Pangan</b>				
<b>2.03.01</b>	<b>Dinas Pangan</b>				
<b>2.03.01.01</b>	<b>Dinas Pangan</b>				
2.03.2.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	494.180.000,-	488.706.777,-	98,89%	Sangat tinggi
2.03.2.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.700.000,-	96.025.900,-	98,29%	Sangat tinggi
2.03.2.03.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.03.2.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000,-	12.380.000,-	82,53%	Tinggi
2.03.2.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.500.000,-	33.490.000,-	99,97%	Sangat tinggi
2.03.2.03.01.01.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	470.500.000,-	463.325.050,-	98,90%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>1.110.880.000,-</b>	<b>1.095.927.727,-</b>	<b>98,65%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program dan hanya 1 (satu) program yang direncanakan dalam RPJM/Renstra yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **98,65%** dengan realisasi anggaran **Rp.1.095.927.727,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **81,79%** dan **95,63%**.

## 3. Dinas Pertanian

**Tabel 2.116**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Pertanahan**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>2.04</b>	<b>Pertanahan</b>				
<b>2.04.01</b>	<b>Dinas Pertanahan</b>				
<b>2.04.01.01</b>	<b>Dinas Pertanahan</b>				
2.04.2.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	615.325.000,-	590.914.449,-	96,03%	Sangat Tinggi
2.04.2.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	170.734.000,-	168.186.600,-	98,51%	Sangat Tinggi
2.04.2.04.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.04.2.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
2.04.2.04.01.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-
2.04.2.04.01.15	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran tanah	30.250.000,-	29.639.800,-	97,98%	Sangat tinggi
2.04.2.04.01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	51.496.000,-	47.145.000,-	91,55%	Sangat Tinggi
2.04.2.04.01.17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1.570.000,-	1.570.000,-	100%	Sangat tinggi
2.04.2.04.01.xx	Program Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penataan, Penerbitan Izin dan Perubahan Penggunaan Tanah	-	-	-	-
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.2.04.01.01.28	Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan Nasional dan Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>869.375.000,-</b>	<b>837.455.849,-</b>	<b>96,33%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 10 (sepuluh) program. Dari ke 10 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD 2019 namun tidak dilanjutkan dalam DPA 2019, dan 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RKPD tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut masih **sangat tinggi** yaitu **96,33%** dengan realisasi anggaran **Rp.837.455.849,-**. Sedangkan tingkat capaian realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **21,64%** dan **96,19%**.

#### 4. Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 2.117**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>				
<b>2.05.01</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>				
<b>2.05.01.01</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>				
2.05.2.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	692.446.000,-	597.887.800,-	94,99%	Sangat tinggi
2.05.2.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	760.077.452,-	760.659.000,-	99,99%	Sangat tinggi
2.05.2.05.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.05.2.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
1.08.1.08.01.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	-
2.05.2.05.01.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.272.490.000,-	1.271.628.000,-	99,99%	Sangat tinggi
2.05.2.05.01.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	915.000.000,-	909.233.200,-	99,61%	Sangat Tinggi
1.08.1.08.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air	500.000.000,-	486.950.000,-	97,39%	Sangat tinggi
2.05.2.05.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan	93.354.000,-	92.826.250,-	99,43%	Sangat tinggi
2.05.2.05.01.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.750.000.0000,-	1.738.787.000,-	99,36%	Sangat tinggi
2.05.2.05.01.01.25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Limbah	15.000.000,-	15.000.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>3.799.616.500,-</b>	<b>3.673.853.264,-</b>	<b>96,69%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari 12 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPD Tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **98,98%** dengan realisasi anggaran **Rp.5.875.171.250,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **53,20%** dan **99,05%**.

#### 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Tabel 2.118**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.06</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>				
<b>2.06.01</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
2.06.2.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	737.262.920,-	696.064.335,-	94,41%	Sangat tinggi
2.06.2.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	377.350.000,-	359.040.200,-	95,15%	Sangat tinggi
2.06.2.06.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
1.10.1.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
2.06.2.06.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.081.825.080,-	2.006.357.595,-	96,37%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>3.196.438.000,-</b>	<b>3.061.462.130,-</b>	<b>95,78%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 5 (lima) program. Dari 5 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan ke dalam RKPD dan DPA 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **95,78%** dengan realisasi anggaran **Rp.3.061.462.130,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **88,17%** dan **96,53%**.

## 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

**Tabel 2.119**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat &amp; Desa</b>				
<b>2.07.01</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong</b>				
2.07.2.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	734.850.000,-	669.045.119,-	91,05%	Sangat tinggi
2.07.2.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	283.240.000,-	267.176.663,-	94,33%	Sangat tinggi
1.22.1.22.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.07.2.07.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63.900.000,-	58.470.000,-	91,50%	Sangat tinggi
2.07.2.07.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	134.868.000,-	130.983.214,-	97,12%	Sangat tinggi
2.07.2.07.01.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.180.200.000,-	1.149.671.777,-	97,41%	Sangat tinggi
2.07.2.07.01.01.16	Program Pengembangan	565.602.000,-	547.390.390,-	96,78%	Sangat

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
	Lembaga Ekonomi Pedesaan				Tinggi
2.07.2.07.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	85.000.000,-	77.186.000,-	90,81%	Tinggi
2.07.2.07.01.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	149.000.000,-	147.385.000,-	98,92%	Sangat tinggi
2.07.2.07.01.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan Dipedesaan	225.000.000,-	198.442.000,-	88,20%	Tinggi
2.07.2.07.01.01.xx	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong	-	-	-	-
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
2.02.2.07.01.01.11	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	700.840.000,-	681.824.000,-	97,29%	Sangat Tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>4.122.500.000,-</b>	<b>3.927.574.163,-</b>	<b>95,27%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 12 (dua belas) program. Dari 12 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan ke dalam RKPD dan DPA 2019 yaitu Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong, dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **95,27%** dengan realisasi anggaran **Rp.3.927.574.163,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **72,29%** dan **93,80%**.

## 7. Dinas Perhubungan

**Tabel 2.120**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.09</b>	<b>Perhubungan</b>				
<b>2.09.01</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>				
2.09.2.09.01.01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	582.637.357,-	550.300.948,-	94,45%	Sangat tinggi
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	286.227.140,-	278.412.995,-	97,27%	Sangat tinggi
2.09.2.09.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
2.09.2.09.01.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	225.025.000,-	223.422.000,-	99,29%	Sangat tinggi
2.09.2.09.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan	212.718.500,-	193.567.900,-	91,00%	Sangat tinggi

Fasilitas LLAJ					
2.09.2.09.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	188.500.000,-	181.367.000,-	96,22%	Sangat tinggi
2.09.2.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-	-
2.09.2.09.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	15.000.000,-	14.650.000,-	97,67%	Sangat tinggi
2.09.2.09.01.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Lalulintas	1.912.000.000,-	1.895.677.800,-	99,15%	Sangat tinggi
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.442.107.997,-</b>	<b>3.337.399.243,-</b>	<b>97,52%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 11 (sebelas) program. Dari ke 11 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan RPJM/Renstra dan 2 (dua) program yang hanya direncanakan RPJM/Renstra dan Renja 2019/RKPD 2019 namun tidak dilanjutkan dalam DPA 2019, dan 2 (dua) program yang langsung dikerjakan dalam DPA tahun 2019 yang disebut **PENUMPANG GELAP** yaitu Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **97,52%** dengan realisasi anggaran **Rp.3.337.399.243,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **43,54%** dan **96,66%**.

## 8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

**Tabel 2.121**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Dinas Komunikasi, Informatika**  
**dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi</b>				
<b>2.10.01</b>	<b>Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian</b>				
2.10.2.10.01.01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	615.525.000,-	610.444.036,-	99,17%	Sangat tinggi
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	337.300.000,-	335.911.000,-	99,59%	Sangat tinggi
2.10.2.10.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.10.2.10.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	436.500.000,-	394.896.000,-	90,47%	Tinggi
2.10.2.10.01.18	Program Kerjasama Infomasi dengan Mass Media	106.800.000,-	85.654.000,-	80,20%	Tinggi
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-	-

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
	Pengelolaan Keamanan Informasi Milik Pemerintah atau Negara	-	-	-	-
	Penyelenggaraan e-government	-	-	-	-
	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-
	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo	-	-	-	-
	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-	-	-
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.2.10.01.28	Program Peringatan Hari-hari Besar	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.2.10.01.15	Pengembangan Data Informasi dan Statistik	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.496.125.000,-</b>	<b>1.426.905.036,-</b>	<b>95,37%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas) program. 9 (sembilan) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/ Renstra dan RKPD.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **95,37%** dengan realisasi anggaran **Rp.1.426.905.036,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dari RKPD 2019 ini adalah **65,38%** dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **95,03%**.

## 9. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

**Tabel 2.122**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Perindustrian**  
**Perdagangan, Koperasi dan UKM**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
<b>2.11.01</b>	<b>Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM</b>				
2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	626.479.100,-	622.491.194,-	99,36%	Sangat tinggi
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	149.824.900,-	148.981.600,-	99,44%	Sangat tinggi
2.07.2.07.01.03	Program Peningkatan Disiplin	-	-	-	-

	Aparatur				
2.07.2.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
2.11.2.11.01.15	Program Peningkatan Iklim Usaha UKM yang Kondusif	1.445.050.000,-	1.431.399.000,-	99,06%	Sangat tinggi
2.11.2.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	43.650.000,-	42.855.000,-	98,18%	Sangat tinggi
2.11.2.11.01.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	-	-
2.11.2.11.01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	55.600.000,-	53.698.000,-	96,58%	Sangat tinggi
2.11.2.11.01.01.xx	Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi UKM	-	-	-	-
<b>3.06.</b>	<b>Urusan Perdagangan</b>				
2.06.2.07.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	37.760.000,-	33.525.000,-	88,78%	Tinggi
3.06.2.11.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.905.823.000,-	5.449.131.535,-	92,27%	Sangat tinggi
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>				
3.07.2.11.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	12.769.040.000,-	10.973.781.504,-	85,94%	Tinggi
2.07.2.07.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>21.033.227.000,-</b>	<b>18.755.862.833,-</b>	<b>89,17%</b>	<b>Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga belas) program. Dari 13 program tersebut terdapat 2 (dua) program hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan tidak dilanjutkan, 1 (satu) program hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPD Tahun 2019 yaitu Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan menengah.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **tinggi** yaitu **89,17%** dengan realisasi anggaran **Rp.18.755.862.833,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **56,90%** dan **94,74%**.

## 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Tabel 2.123**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
<b>2.12.01</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>				
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	355.077.600,-	354.377.000,-	99,80%	Sangat tinggi
2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana &	77.410.000,-	77.406.950,-	99,99%	Sangat

	Prasarana Aparatur				Tinggi
2.12.2.12.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,-	14.530.766,-	72,65%	Sedang
2.12.2.12.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	35.000.000,-	0,-	0%	Sangat Rendah
2.12.2.12.01.xx	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	-
2.12.2.12.01.16	Program Pelayanan, Pelaporan dan Pengaduan	-	-	-	-
2.12.2.12.01.34	Program Pembinaan, Pengawasan, Pelatihan dan Penataan Perizinan	148.542.400,-	143.829.700,-	96,83%	Sangat Tinggi
	<b>JUMLAH</b>	<b>636.030.000,-</b>	<b>590.144.416,-</b>	<b>92,79%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa DPMPSTP Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan) program. Dari 8 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPK yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RKPK dan langsung dilaksanakan dalam DPA Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Pembinaan, Pengawasan, Pelatihan dan Penataan Perizinan Tertentu.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **92,79%** dengan realisasi anggaran **Rp.590.144.416,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **42,86%** dan **73,42%**.

## 11. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

**Tabel 2.124**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Pemuda dan Olah Raga**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
2.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga				
2.13.2.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	547.286.000,-	537.914.413,-	98,29%	Sangat tinggi
2.13.2.13.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	38.150.000,-	36.495.300,-	95,66%	Sangat tinggi
2.13.2.13.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.000.000,-	15.000.000,-	100%	Sangat tinggi
2.13.2.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
2.13.2.13.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	-	-	-	-

2.13.2.13.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	-	-	-
2.13.2.13.01.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	123.924.000,-	123.924.000,-	100%	Sangat tinggi
2.13.2.13.01.18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	-	-	-	-
2.13.2.13.01.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	-	-	-	-
2.13.2.13.01.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	745.990.000,-	754.646.000,-	99,95%	Sangat tinggi
2.13.2.13.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.167.650.000,-	4.670.187.646,-	90,37%	Tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>6.638.000.000,-</b>	<b>6.129.167.359,-</b>	<b>92,33%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 11 (sebelas) program. Dari 11 program tersebut terdapat 4 (empat) program yang hanya direncanakan dalam Renstra, 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Peran Serta kepemudanan, dan 1(satu) program yang langsung dilaksanakan dalam DPA-P Tahun 2019 tanpa direncanakan dalam Renstra dan RKPD tahun 2019 terlebih dahulu yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur (disebut juga sebagai **PENUMPANG GELAP**).

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **92,33%** dengan realisasi anggaran **Rp.6.129.167.359,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **68,06%** dan **98,57%**.

## 12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Tabel 2.125**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>				
<b>2.17.01</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>				
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	598.832.600,-	574.225.671,-	95,89%	Sangat tinggi
2.17.2.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83.367.400,-	81.949.300,-	98,30%	Sangat tinggi
2.17.2.17.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.17.2.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
<b>2.18</b>	<b>Kearsipan</b>				
1.24.1.26.01.16	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	-	-	-	-
1.24.1.26.01.17	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip	-	-	-	-

1.24.1.26.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>700.000.000,-</b>	<b>637.326.887,-</b>	<b>96,19%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 7 (tujuh) program. Dari 7 program tersebut terdapat 3 (tujuh) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra, dan 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD namun tidak dilanjutkan di tahun 2019 ini.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **96,19%** dengan realisasi anggaran **Rp. 656.174.971,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **35,94%** dan **97,77%**.

#### D. URUSAN PILIHAN

##### 1. Dinas Kelautan dan Perikanan

**Tabel 2.126**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>3.01</b>	<b>Kelautan</b>				
<b>3.01.01</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>				
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	935.658.000,-	888.031.250,-	94,91%	Sangat tinggi
3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190.499.000,-	188.329.250,-	98,86%	Sangat tinggi
2.05.2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
3.01.3.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
3.01.3.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	82.102.000,-	82.065.000,-	99,95%	Sangat tinggi
3.01.3.01.01.15	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	-	-	-	-
3.01.3.01.01.16	Prog.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	137.400.000,-	137.400.000,-	100%	Sangat tinggi
3.01.3.01.01.20	Program Pengembangan Budaya Perikanan	3.832.150.000,-	3.741.266.900,-	97,63%	Sangat tinggi
3.01.3.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	17.710.401.000,-	17.423.699.700,-	98,38%	Sangat tinggi
3.01.3.01.01.22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	93.500.000,-	93.229.000,-	99,71%	Sangat tinggi
3.01.3.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	418.115.000,-	235.581.500,-	97,80%	Sangat tinggi
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>				

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
2.02.3.01.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	14.850.000,-	14.725.000,-	99,16%	Sangat Tinggi
<b>2.14</b>	<b>Statistik</b>				
2.14.3.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	93.525.000,-	57.074.000,-	99,92%	Sangat tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>23.508.200.000,-</b>	<b>23.071.836.130,-</b>	<b>98,14%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga belas) program. Dari 13 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam RKPD dan DPA 2019 dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD namun tidak dilanjutkan dalam DPA Tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **98,14%** dengan realisasi anggaran **Rp.23.071.096.200,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **57,69%** dan **89,44%**.

## 2. Dinas Pertanian

**Tabel 2.127**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Pertanian**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>				
<b>3.03.01</b>	<b>Dinas Pertanian</b>				
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.680.752.530,-	1.494.044.054,-	88,89%	Tinggi
3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.730.000,-	163.778.350,-	82,41%	Tinggi
3.01.3.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
3.01.3.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
3.01.3.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	50.000.000,-	49.295.000,-	98,59%	Sangat Tinggi
3.01.3.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	4.119.663.000,-	2.711.531.000,-	65,82%	Rendah
3.01.3.01.01.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	6.080.600.000,-	5.761.070.900,-	94,75%	Sangat tinggi
3.01.3.01.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	8.645.375.000,-	8.337.600.120,-	96,44%	Sangat tinggi
3.01.3.01.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	839.619.000,-	829.080.000,-	98,74%	Sangat tinggi

Lapangan					
3.01.3.01.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	899.665.000,-	880.560.000,-	97,88%	Sangat tinggi
3.01.3.01.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.686.580.000,-	2.660.842.350,-	99,04%	Sangat Tinggi
3.01.3.01.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	44.671.000,-	44.671.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.3.01.01.15	Program Pengembangan Data/ Informasi	130.467.470,-	119.519.000,-	91,61%	Sangat tinggi
4.03.3.01.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	36.199.000,-	36.126.000,-	99,80%	Sangat Tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>23.412.322.000,-</b>	<b>23.088.117.774,-</b>	<b>90,85%</b>	<b>Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 13 (tiga belas) program. Dari 13 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD namun tidak dilanjutkan dalam DPA 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **Tinggi** yaitu **90,85%** dengan realisasi anggaran **Rp.23.088.117.774,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **66,92%** dan **92,17%**.

### 3. Dinas Pariwisata

**Tabel 2.128**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Pariwisata**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>3.02</b>	<b>Pariwisata</b>				
<b>3.02.01</b>	<b>Dinas Pariwisata</b>				
3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	558.496.000,-	538.763.332,-	96,47%	Sangat tinggi
3.02.3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	87.999.000,-	79.824.688,-	90,71%	tinggi
3.02.3.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
3.02.3.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
3.02.3.02.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Parawisata	228.000.000,-	225.181.900,-	98,76%	Sangat tinggi
3.02.3.02.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.631.575.000,-	4.204.393.750,-	90,78%	Tinggi
3.02.3.02.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	605.000.000,-	590.576.970,-	97,62%	Sangat tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>8.320.595.000,-</b>	<b>8.059.414.063,-</b>	<b>96,86%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 7 (tujuh) program. Dari ke 7 program tersebut

terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **92,27%** dengan realisasi anggaran **Rp.5.638.740.630,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **83.29%** dan **89,95%**.

#### 4. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

**Tabel 2.129**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>3.08</b>	<b>Transmigrasi</b>				
<b>3.08.01</b>	<b>Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</b>				
3.08.3.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	438.000.000,-	419.190.580,-	95,71%	Sangat tinggi
3.08.3.08.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70.000.000,-	68.621.500,-	98,03%	Sangat tinggi
3.08.3.08.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
3.08.3.08.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
3.08.3.08.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	85.000.000,-	84.332.700,-	99,21%	Sangat tinggi
3.08.3.08.01.18	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT)	80.000.000,-	78.084.000,-	97,61%	Sangat tinggi
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
2.01.3.08.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	250.200.000,-	250.085.750,-	99,95%	Sangat tinggi
2.01.3.08.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	40.200.000,-	38.331.500,-	95,35%	Sangat tinggi
2.01.3.08.01.xx	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.3.08.01.15	Program Pengembangan Data Informasi	15.000.000,-	14.990.000,-	99,93%	Sangat Tinggi
4.03.3.08.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>978.400.000,-</b>	<b>953.636.030,-</b>	<b>97,47%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 11 (sebelas) program. Dari 11 program tersebut terdapat 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam RKPD dan DPA 2019, dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPD.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **97,47%** dengan realisasi anggaran **Rp.953.636.030,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **82,85%** dan **97,72%**.

## E. PERANGKAT DAERAH LAINNYA

### 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

**Tabel 2.130**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada BPBD dan PMK**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>1.03</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>				
1.03.1.13.02.17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	-	-	-	-
<b>1.13</b>	<b>Urusan Sosial</b>				
1.13.1.13.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.068.240.000,-	1.029.272.688,-	96,35%	Sangat tinggi
1.13.1.13.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	948.297.250,-	936.583.650,-	98,76%	Sangat tinggi
1.13.1.13.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
1.13.1.13.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
1.13.1.13.02.19	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.319.485.000,-	1.305.973.300,-	98,98%	Sangat tinggi
1.13.1.13.02.22	Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	1.631.030.000,-	1.591.700.118,-	97,59%	Sangat tinggi
1.13.1.13.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	14.400.000,-	11.842.229,-	82,24%	tinggi
1.13.1.13.02.30	Program Perencanaan/Pengawasan Penanggulangan Bencana	775.276.000,-	772.660.337,-	99,66%	Sangat tinggi
1.13.1.13.02.31	Program Pemberdayaan Masyarakat Kesiapan Menghadapi Bencana	60.485.750,-	60.063.750,-	99,30%	Sangat tinggi
1.13.1.13.02.33	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	64.400.000,-	61.743.000,-	95,87%	Sangat tinggi
1.19.1.13.02.34	Program Penanggulangan Pasca Bencana	1.659.500.000,-	1.598.778.500,-	96,34%	Sangat tinggi
1.19.1.13.02.xx	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	-	-	-	-
<b>1.06</b>	<b>Urusan Perencanaan Pembangunan</b>				
1.06.1.13.02.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
<b>1.20</b>	<b>Urusan Otonomi Daerah</b>				
1.20.1.13.02.35	Program Peringatan Hari-hari Besar	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.111.313.293,-</b>	<b>3.733.001.405,-</b>	<b>73,03%</b>	<b>Sedang</b>

Berdasarkan lampiran matrik evaluasi Semester II Tahun 2019 terlihat bahwa BPBD Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas)

program. Dari 15 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam RKPD dan DPA 2019, 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD, dan 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RKPD.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **97,71%** dengan realisasi anggaran hanya **Rp.7.368.616.572,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **51,18%** dan **95.57%**.

## 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

**Tabel 2.131**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>				
<b>1.05.02.01</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	414.569.500,-	412.293.737,-	99,45%	Sangat tinggi
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.755.000,-	97.001.900,-	99,23%	Sangat tinggi
1.19.1.19.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
1.19.1.19.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
1.05.1.05.02.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	124.586.000,-	124.586.000,-	100%	Sangat tinggi
1.05.1.05.02.17	Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	120.809.500,-	119.392.000,-	98,83%	Sangat Tinggi
1.19.1.19.01.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	-	-	-	-
1.05.1.05.02.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	182.710.000,-	182.533.000,-	99,90%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>940.430.000,-</b>	<b>935.806.637,-</b>	<b>99,15%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Badan KESBANGPOL Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 8 (delapan) program. Dari 8 program tersebut terdapat 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam RKPD dan DPA 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,51%** dengan realisasi anggaran **Rp.935.806.637,-**.

Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **69.33%** dan **99,45%**.

### 3. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

**Tabel 2.132**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Sekretariat KORPRI**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>4.05</b>	<b>Kepegawaian</b>				
<b>4.05.02</b>	<b>Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI</b>				
<b>4.05.02.01</b>	<b>Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI</b>				
4.05.4.05.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	216.354.000,-	214.757.223,-	99,26%	Sangat tinggi
4.05.4.05.02.01.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur.	42.250.000,-	42.250.000,-	100%	Sangat tinggi
4.05.4.05.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	-	-	-	-
4.05.4.05.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	-	-	-	-
4.05.4.05.02.01.07	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga PNS/ Anggota KORPRI	-	-	-	-
4.05.4.05.02.01.09	Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota KORPRI.	-	-	-	-
4.05.4.05.02.01.08	Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Syariat Islam bagi ASN	15.000.000,-	15.000.000,-	100%	Sangat tinggi
4.05.4.05.02.01.10	Program Kelembagaan/ Kesejahteraan Sosial Anggota KORPRI	-	-	-	-
4.05.4.05.02.01.xx	Program Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI	-	-	-	-
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Perkantoran</b>				
4.01.4.05.02.01.28	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah.	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.05.02.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>373.604.000,-</b>	<b>372.007.223,-</b>	<b>99,57%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Dinas Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 11 (sebelas) program. Dari 11 program tersebut terdapat 4 (empat) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD namun tidak dilanjutkan dalam DPA 2019, dan 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RKPD 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,57%** dengan realisasi anggaran **Rp.372.007.223,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **25,00%** dan **79.69%**.

## F. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

### 1. Sekretariat Daerah Kabupaten

**Tabel 2.133**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Setdakab Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>1.20</b>	<b>Kesehatan</b>				
1.20.1.20.03.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	200.000.000,-	155.000.000,-	77,50%	Sedang
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
<b>4.01.03</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan</b>				
<b>4.01.03.01</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan</b>				
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.436.883.357,-	7.297.560.286,-	98,13%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	10.098.775.000,-	9.969.277.335,-	98,72%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	263.809.000,-	256.145.000,-	97,09%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.04	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	127.180.000,-	111.680.000,-	87,81%	Tinggi
4.01.4.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	699.400.000,-	696.989.600,-	99,66%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	133.195.000,-	132.585.000,-	99,54%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.08	Program Peningkatan Evaluasi dan Administrasi Pembangunan	762.275.000,-	758.303.700,-	99,48%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah	5.154.490.933,-	4.996.959.162,-	96,94%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	430.275.000,-	428.688.400,-	99,63%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	394.975.000,-	357.135.000,-	90,42%	Tinggi
4.01.4.01.03.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	436.420.000,-	430.279.000,-	98,59%	Sangat tinggi
1.20.1.20.03.28	Program Pelaksanaan Hari-hari Besar, Keagamaan Nasional dan Daerah	1.790.247.000,-	1.784.011.100,-	99,65%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.33	Program Peningkatan Sumberdaya dan Peran Ulama	1.399.160.000,-	1.392.743.500,-	99,54%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.35	Program Pengembangan IPTEK	458.005.000,-	457.745.000,-	99,95%	Sangat tinggi
4.01.4.01.03.74	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	-
4.01.4.01.03.78	Program Pemberdayaan Sumberdaya Manusia	-	-	-	-
4.01.4.01.03.79	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-
4.01.4.01.03.88	Program Pembakuan Nama Rupabumi	-	-	-	-
4.01.4.01.03.89	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	-	-	-	-
4.01.4.01.03.93	Program Penegasan Batas Daerah	-	-	-	-
1.20.4.01.03.41	Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin	162.640.000,-	151.640.000,-	93,24%	Sangat Tinggi
<b>2.01</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>				
2.01.4.01.03.15	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	-	-	-	-

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.04</b>	<b>Pertanahan</b>				
2.04.4.01.03.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	196.000.000,-	196.000.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>2.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
2.07.4.01.03.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	223.396.400,-	227.146.400,-	99,45%	Sangat Tinggi
2.07.4.01.03.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	212.300.000,-	212.300.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
2.10.4.01.03.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	943.400.000,-	953.395.887,-	100%	Sangat tinggi
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
2.12.4.01.03.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	365.600.000,-	365.600.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>2.18</b>	<b>Kearsipan</b>				
2.18.4.01.03.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	546.200.000,-	545.647.000,-	99,90%	Sangat tinggi
3.05.4.01.03.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	11.157.964.000,-	110.959.441.397,-	98,22%	Sangat Tinggi
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>				
3.06.4.01.03.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	58.168.000,-	58.168.000,-	100%	Sangat tinggi
3.06.4.01.03.20	Peningkatan Sistem dan Pengelolaan Informasi Perdagangan	137.070.000,-	131.370.000,-	95,84%	Sangat tinggi
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.03.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	181.310.000,-	180.716.000,-	99,67%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>37.8595.076.000,-</b>	<b>37.034.997.502,-</b>	<b>97,82%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa SETDAKAB Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) program. Dari 33 program tersebut terdapat 6 (enam) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam RKPD dan DPA 2019, 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD 2019, dan 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan langsung dilaksanakan dalam DPA Tahun 2019 tanpa direncanakan dalam RKPD Tahun 2019 (**PENUMPANG GELAP**) yaitu Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **97,82%** dengan realisasi anggaran **Rp.37.034.997.502,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **51,82%** dan **96,69%**.

Banyak program-program yang dijalankan oleh Setdakab Aceh Selatan mendukung SKPD lain dalam memenuhi capaian IKD yang telah ditetapkan contohnya Program Peningkatan dan Pemberdayaan Fakir Miskin bekerjasama dan membantu Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mengurangi angka kemiskinan di Aceh Selatan dengan memberikan bantuan Beras Miskin kepada masyarakat yang kurang mampu. Lalu Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Syariat Islam dan Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama membantu meningkatkan pencapaian IKD di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan dan Kantor Pendidikan dan Pembinaan Dayah Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah membantu Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam mengelola arsip daerah yang dianggap penting.

Hal ini dilakukan karena kurangnya anggaran di SKPK-SKPK terkait sehingga dirasa perlu dibantu sehingga pencapaian target Kinerja Daerah dapat dipenuhi dan yang terpenting masyarakat Aceh Selatan dapat terbantu perekonomiannya menjadi lebih baik.

## 2. Sekretariat DPRK

**Tabel 2.134**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Sekretariat DPRK Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
<b>4.01.04</b>	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten</b>				
<b>4.01.04.01</b>	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten</b>				
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.363.406.660,-	7.113.912.291,-	96,61%	Sangat tinggi
4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	559.660.740,-	541.858.900,-	96,82%	Sangat rendah
4.01.4.01.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	316.595.000,-	307.002.000,-	96,97%	Sangat rendah
4.01.4.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	545.000.000,-	534.000.000,-	97,98%	Sangat tinggi
4.01.4.01.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	4.187.538.600,-	2.817.574.850,-	67,28%	Sedang
4.01.4.01.04.28	Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah	-	-	-	-
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
2.10.4.01.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	-	-	-	-
1.20.1.20.04.23	Program Optimalisasi	-	-	-	-

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
	Pemanfaatan Teknologi Informasi				
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.04.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRK	855.000.000,-	631.244.000,-	73,83%	Rendah
4.03.4.01.04.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.827.201.000,-</b>	<b>11.945.592.041,-</b>	<b>86,39%</b>	<b>Tinggi</b>

Berdasarkan lampiran matrik evaluasi Semester II Tahun 2019 terlihat bahwa Sekretariat DPRK Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 10 (sepuluh) program. Dari 10 program tersebut terdapat 2 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD namun tidak dilanjutkan dalam DPA 2019 dan 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RKPD 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **tinggi** yaitu **86,39%** dengan realisasi anggaran **Rp.11.945.592.041,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja RKPD Tahun 2019 masih rendah karena terlalu banyaknya program yang direncanakan dalam Renja/RKPD namun tidak dilanjutkan dalam DPA Tahun 2019 yaitu sebesar **53,02%** dan capaian keuangan **84,69%**.

### 3. Inspektorat

**Tabel 2.135**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Inspektorat**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.02</b>	<b>Pengawasan</b>				
<b>4.02.01</b>	<b>Inspektorat</b>				
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	704.400.000,-	690.444.173,-	98,02%	Sangat tinggi
4.02.4.02.01.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	223.650.000,-	218.498.000,-	97,70%	Sangat tinggi
4.02.4.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.02.4.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
4.02.4.02.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	1.635.995.000,-	1.557.688.000,-	95,21%	Sangat tinggi
4.02.4.02.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	134.355.000,-	132.101.500,-	98,32%	Sangat tinggi
4.02.4.02.01.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan	32.000.000,-	32.000.000,-	100%	Sangat Tinggi
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.730.400.000,-</b>	<b>2.630.731.673,-</b>	<b>96,35%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 7 (tujuh) program. Dari 7 program tersebut terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD namun tidak dilanjutkan dalam DPA 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **96,35%** dengan realisasi anggaran **Rp.2.630.731.673,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **62,82%** dan **97,32%**

#### 4. BAPPEDA

**Tabel 2.136**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>				
1.02.4.03.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	30.000.000,-	28.862.500,-	96,21%	Sangat tinggi
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>				
4.03.4.03.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.116.952.824,-	1.075.287.789,-	96,27%	Sangat Tinggi
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	628.667.500,-	582.950.388,-	92,73%	Sangat Tinggi
4.03.4.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.03.4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
4.03.4.03.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	128.270.000,-	123.157.000,-	96,01%	Sangat tinggi
4.03.4.03.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	100.000.000,-	94.772.377,-	94,77%	Sangat Tinggi
4.03.4.03.01.18	Program Peningkatan Produksi Pertanian	-	-	-	-
4.03.4.03.01.19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	11.215.000,-	11.215.000,-	100%	Sangat tinggi
4.03.4.03.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,-	40.650.000,-	81,30%	Tingg
4.03.4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.387.720.000,-	1.324.274.361,-	95,43%	Sangat Tinggi
4.03.4.03.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	348.785.000,-	343.264.000,-	98,42%	Sangat tinggi
4.03.4.03.01.23	Program Perencanaan Sosial Budaya	259.000.000,-	253.022.400,-	97,69%	Sangat tinggi
1.06.1.06.01.25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	-	-	-	-
4.03.4.03.01.26	Program pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4.060.610.324,-</b>	<b>3.877.455.815,-</b>	<b>95,49%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan lampiran matrik evaluasi Semester II Tahun 2019 terlihat bahwa BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 15 (lima belas) program. Dari ke 15 program tersebut terdapat 2 (dua) program

yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam RKPD dan DPA 2019, 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD, dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPD tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPK tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **95,49%** dengan realisasi anggaran **Rp.3.877.455.815,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **52,75%** dan **93,16%**.

## 5. Badan Pengelola Keuangan Daerah

**Tabel 2.137**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada Badan Pengelola Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.04</b>	<b>Keuangan</b>				
<b>4.04.05</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan Daerah</b>				
<b>4.04.05.01</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan Daerah</b>				
4.04.4.04.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.934.580.000,-	2.763.887.232,-	94,18%	Sangat tinggi
4.04.4.04.05.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	3.155.308.300,-	2.859.491.755,-	90,62%	Tinggi
4.04.4.04.05.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.04.4.04.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,-	92.138.000,-	92,14%	Sangat tinggi
4.04.4.04.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	475.225.000,-	468.275.445,-	98,54%	Sangat tinggi
4.04.4.04.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.652.129.000,-	5.407.000.853,-	95,66%	Sangat Tinggi
4.04.4.04.05.19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Gampong	197.700.000,-	194.202.550,-	98,23%	Sangat Tinggi
<b>2.04</b>	<b>Pertanahan</b>				
2.04.4.04.05.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5.652.129.000,-	5.407.000.853,-	95,66%	Sangat tinggi
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
2.10.4.04.05.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	398.900.000,-	374.157.000,-	93,80%	Sangat tinggi
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.013.842.300,-</b>	<b>12.257.155.756,-</b>	<b>94,19%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa BPKD Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 9 (sembilan) program. Dari 9 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **94,19%** dengan realisasi anggaran **Rp.12.257.155.756,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **82,62%** dan **93,88%**.

## 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

**Tabel 2.138**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**pada BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.05</b>	<b>Kepegawaian</b>				
<b>4.05.01</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>				
4.05.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	848.217.600,-	815.474.815,-	96,14%	Sangat tinggi
4.05.4.05.01.02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	189.155.500,-	187.275.000,-	99,01%	Sangat tinggi
4.05.4.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.05.4.05.01.04	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas	117.400.000,-	116.712.400,-	99,41%	Sangat tinggi
4.05.4.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.858.636.000,-	3.687.650.000,-	95,57%	Sangat tinggi
4.05.4.05.01.08	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.542.347.500,-	1.480.462.000,-	95,99%	Sangat tinggi
4.05.4.05.01.xx	Program Pendidikan Kedinasan	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.555.756.000,-</b>	<b>6.287.574.981,-</b>	<b>95,91%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa BKPSDM Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 7 (tujuh) program. Dari 7 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra, dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD tahun 2019 namun tidak dilanjutkan dalam DPA 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **95,91%** dengan realisasi anggaran **Rp.6.287.574.981,-**. Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **80,57%** dan **94,69%**.

## G. PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

### 1. BLUD RSUD dr. H. Yulidin Away

**Tabel 2.139**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada BLUD RSUD Dr. H. Yulidin Away**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>				
<b>1.02.02</b>	<b>BLUD RSUD dr.H. Yulidin Away Tapaktuan</b>				
1.02.1.02.02.01	Program Administrasi Perkantoran	549.400.000,-	515.718.722,-	93,87%	Sangat tinggi
1.02.1.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.409.480.975,-	4.305.453.700,-	97,64%	Sangat tinggi
1.02.1.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
1.02.1.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
1.02.1.02.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	103.600.000,-	103.563.800,-	99,97%	Sangat tinggi
1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	60.746.430.944,-	57.730.786.707,-	95,04%	Sangat tinggi
1.02.1.02.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	-	-	-	-
1.02.1.02.02.36	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada BLUD	87.618.560.000,-	76.782.152.631,-	87,63%	Tinggi
<b>2.04</b>	<b>Pertanahan</b>				
2.04.1.02.02.xx	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.1.02.02.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
4.01.1.02.01.35	Program Hari-hari Besar	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>153.427.471.919,-</b>	<b>139.437.675.560,-</b>	<b>90,88%</b>	<b>Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa BLUD RSUD dr. H. Yulidin Away Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 11 (sebelas) program. Dari 11 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam RKPD dan DPA 2019, 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra dan RKPD Tahun 2019, dan 3 (tiga) program yang hanya direncanakan dalam RKPD Tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada dinas tersebut sudah **tinggi** yaitu **90,88%** dengan realisasi anggaran **Rp.139.437.675.560,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **26,50%** dan **82,56%**.

## H. KECAMATAN

### 1. Labuhanhaji Barat

**Tabel 2.140**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Labuhanhaji Barat**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.06</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Labuhanhaji Barat</b>				
4.01.4.01.06.01	Program Administrasi Perkantoran	266.696.000,-	266.684.000,-	99,99%	Sangat tinggi
4.01.4.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	79.650.000,-	79.650.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.500.000,-	13.500.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	16.414.000,-	16.414.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.06.28	Program Hari-hari Besar	15.480.000,-	15.480.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>391.740.000,-</b>	<b>391.728.000,-</b>	<b>99,99%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program. Dari 6 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam RKPD dan DPA 2019, dan 1 (satu) program yang langsung dilaksanakan dalam DPA-P tahun 2019 tanpa direncanakan terlebih dahulu dalam Renstra dan RKPD Tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,99%** dengan realisasi anggaran **Rp.391.740.000,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **65,00%** dan **100%**.

### 2. Labuhanhaji

**Tabel 2.141**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Labuhanhaji**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.07</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Labuhanhaji</b>				
4.01.4.01.07.01	Program Administrasi Perkantoran	293.365.000,-	293.355.400,-	99,99%	Sangat tinggi
4.01.4.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasnana Aparatur	63.600.000,-	63.590.000,-	99,98%	Sangat tinggi
4.01.4.01.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.100.000,-	11.100.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.07.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.525.000,-	11.524.900,-	99,99%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.07.28	Program Hari-hari Besar	9.600.000,-	9.600.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>389.190.000,-</b>	<b>389.180.300,-</b>	<b>99,99%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 5 (enam) program dan semua program tersebut telah direncanakan dengan baik dari Renstra hingga DPA-P tahun 2019 ini.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,99%** dengan realisasi anggaran **Rp.389.170.300,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPDP Tahun 2019 adalah sebesar **92%** dan **99,99%**.

### 3. Labuhanhaji Timur

**Tabel 2.142**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Labuhanhaji Timur**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.08</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Labuhanhaji Timur</b>				
4.01.4.01.08.01	Program Administrasi Perkantoran	252.680.000,-	252.677.400,-	99,99%	Sangat tinggi
4.01.4.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasnana Aparatur	170.200.000,-	168.997.450,-	99,29%	Sangat tinggi
4.01.4.01.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.800.000,-	22.800.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.200.000,-	15.200.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.08.28	Program Hari-hari Besar	13.000.000,-	13.000.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>473.880.000,-</b>	<b>472.674.850,-</b>	<b>99,75%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program. Dari 6 program tersebut terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam RKPD dan DPA 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,97%** dengan realisasi anggaran **Rp.472.674.850,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **80%** dan **99,96%**.

#### 4. Meukek

**Tabel 2.143**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Meukek**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.09</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Meukek</b>				
4.01.4.01.09.01	Program Administrasi Perkantoran	305.035.000,-	301.469.007,-	98,83%	Sangat tinggi
4.01.4.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	122.120.000,-	122.030.000,-	99,93%	Sangat tinggi
4.01.4.01.09.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.000.000,-	14.000.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.09.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.050.000,-	15.050.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.09.28	Program Hari-hari Besar	24.275.000,-	24.275.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>480.480.000,-</b>	<b>476.824.007,-</b>	<b>99,24%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Meukek Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 5 (enam) program dan terdapat 1 (satu) program yang langsung dikerjakan dalam DPA-P tahun 2019 tanpa direncanakan terlebih dahulu dalam Renstra dan RKPD Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,24%** dengan realisasi anggaran **Rp.476.824.007,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **95.83%** dan **99,46%**.

## 5. Sawang

**Tabel 2.144**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Sawang**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>				
2.02.4.01.10.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	5.060.000,-	5.060.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.10</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Administrasi Perkantoran Setcam Sawang</b>				
4.01.4.01.10.01	Program Administrasi Perkantoran	305.667.700,-	303.011.740,-	99,13%	Sangat tinggi
4.01.4.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.887.300,-	31.475.300,-	98,71%	Sangat tinggi
4.01.4.01.10.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	18.000.000,-	18.000.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.10.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	18.000.000,-	18.000.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.10.28	Program Hari-hari Besar	7.675.000,-	7.675.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>386.290.000,-</b>	<b>383.222.040,-</b>	<b>99,21%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Sawang Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 7 (tujuh) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,21%** dengan realisasi anggaran **Rp.383.222.040,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **94,44%** dan **99,77%**.

## 6. Samadua

**Tabel 2.145**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Samadua**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.11</b>	<b>Pemerintahan Penunjang</b>				

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
	<b>Adminstrasi Perkantoran Setcam Samadua</b>				
4.01.4.01.11.01	Program Administrasi Perkantoran	342.841.400,-	338.375.273,-	98,70%	Sangat tinggi
4.01.4.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	97.658.600,-	96.946.437,-	99,27%	Sangat tinggi
4.01.4.01.11.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.11.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	18.270.000,-	18.270.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.11.28	Program Hari-hari Besar	11.780.000,-	11.780.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>470.550.000,-</b>	<b>465.371.710,-</b>	<b>98,90%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Samadua Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program, terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **98.90%** dengan realisasi anggaran **Rp.470.550.000,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **53.33%** dan **99,09%**.

## 7. Tapaktuan

**Tabel 2.146**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Tapaktuan**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.12</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Samadua</b>				
4.01.4.01.12.01	Program Administrasi Perkantoran	383.330.000,-	379.636.135,-	99,04%	Sangat tinggi
4.01.4.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	140.050.000,-	139.755.050,-	99,79%	Sangat tinggi
4.01.4.01.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.12.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	17.000.000,-	17.000.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.12.28	Program Hari-hari Besar	5.000.000,-	5.000.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>545.380.000,-</b>	<b>541.391.185,-</b>	<b>99,27%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program, terdapat 2 (dua) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99.27%** dengan realisasi anggaran **Rp.541.391.185,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **95%** dan **99,52%**.

## 8. Pasie Raja

**Tabel 2.147**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Pasie Raja**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.13</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Pasie Raja</b>				
4.01.4.01.13.01	Program Administrasi Perkantoran	277.030.000,-	277.030.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	202.900.000,-	202.327.000,-	99,72%	Sangat tinggi
4.01.4.01.13.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.250.000,-	36.250.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.13.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.100.000,-	15.100.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.13.28	Program Hari-hari Besar	14.500.000,-	14.500.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>545.780.000,-</b>	<b>545.207.000,-</b>	<b>99,90%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program, terdapat 1 (dua) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99.90%** dengan realisasi anggaran **Rp.545.207.000,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **100%** dan **99,98%**.

## 9. Kluet Utara

**Tabel 2.148**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Kluet Utara**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>				
2.02.4.01.15.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	31.000.000,-	31.000.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.15</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Administrasi Perkantoran Setcam Kluet Utara</b>				
4.01.4.01.15.01	Program Administrasi Perkantoran	296.750.000,-	296.116.000,-	99,79%	Sangat tinggi
4.01.4.01.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.500.000,-	60.270.000,-	99,62%	Sangat tinggi
4.01.4.01.15.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
2.06.4.01.15.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	15.100.000,-	15.100.000,-	100%	Sangat tinggi
2.05.4.01.15.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.600.000,-	14.600.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.15.15	Program Penataan Daerah Otonomi Daru	20.500.000,-	20.500.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.15.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.500.000,-	20.500.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.15.28	Program Hari-hari Besar	86.350.000,-	86.350.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>545.780.000,-</b>	<b>545.207.000,-</b>	<b>99,90%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 9 (Sembilan) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPD Tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,85 %** dengan realisasi anggaran **Rp.588.336.000,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **81,53%** dan **99,94%**.

## 10. Kluet Timur

**Tabel 2.149**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Kluet Timur**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.14</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Kluet Timur</b>				
4.01.4.01.14.01	Program Administrasi Perkantoran	273.006.000,-	272.506.000,-	99,82%	Sangat tinggi
4.01.4.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	169.034.000,-	169.034.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.14.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.200.000,-	11.200.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.14.03	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.14.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.900.000,-	7.900.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.14.28	Program Hari-hari Besar	50.000.000,-	50.000.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>511.140.000,-</b>	<b>510.640.000,-</b>	<b>99,90%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 7 (tujuh) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPD Tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,90 %** dengan realisasi anggaran **Rp.510.640.000,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **25,60%** dan **99,96%**.

## 11. Kluet Tengah

**Tabel 2.150**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Kluet Tengah**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.16</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Kluet Tengah</b>				
4.01.4.01.16.01	Program Administrasi Perkantoran	267.663.000,-	265.073.636,-	99,03%	Sangat tinggi
4.01.4.01.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.457.000,-	98.456.400,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.16.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.000.000,-	12.000.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.16.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.16.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	17.580.000,-	17.580.000,-	100%	Sangat tinggi

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.16.28	Program Hari-hari Besar	14.300.000,-	14.300.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>410.000.000,-</b>	<b>407.410.036,-</b>	<b>99,37%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan 1 (satu) program yang hanya langsung dikerjakan dalam DPA-P Tahun 2019 tanpa direncanakan terlebih dahulu dalam Renstra dan RKPD Tahun 2019 yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,37%** dengan realisasi anggaran **Rp.407.410.036,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **41%** dan **83,07%**.

## 12. Kluet Selatan

**Tabel 2.151**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Kluet Selatan**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.17</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Kluet Selatan</b>				
4.01.4.01.17.01	Program Administrasi Perkantoran	327.094.000,-	325.636.979,-	99,55%	Sangat tinggi
4.01.4.01.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	67.250.000,-	66.653.200,-	99,11%	Sangat tinggi
4.01.4.01.17.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.17.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	14.776.000,-	14.776.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.17.28	Program Hari-hari Besar	20.300.000,-	20.300.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>429.420.000,-</b>	<b>427.366.179,-</b>	<b>99,52%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RPKP Tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,52%** dengan realisasi anggaran **Rp.427.366.179,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPKD Tahun 2019 adalah sebesar **58%** dan **99,51%**.

### 13. Bakongan

**Tabel 2.152**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Bakongan**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Katagori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.18</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Bakongan</b>				
4.01.4.01.18.01	Program Administrasi Perkantoran	297.483.000,-	295.204.000,-	99,23%	Sangat tinggi
4.01.4.01.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	50.900.000,-	50.750.000,-	99,71%	Sangat tinggi
4.01.4.01.18.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.500.000,-	23.500.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.18.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.077.000,-	11.077.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.18.28	Program Hari-hari Besar	12.080.000,-	12.080.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>396.840.000,-</b>	<b>394.411.000,-</b>	<b>99,39%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Bakongan Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,39%** dengan realisasi anggaran **Rp.394.411.000,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **70,83%** dan **83,24%**.

#### 14. Kota Bahagia

**Tabel 2.153**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Kota Bahagia**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.19</b>	<b>Pemerintahan Adminstrasi Penunjang Perkantoran Setcam Kota Bahagia</b>				
4.01.4.01.19.01	Program Administrasi Perkantoran	293.900.000,-	292.386.750,-	99,49%	Sangat tinggi
4.01.4.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	161.900.000,-	161.396.500,-	99,69%	Sangat tinggi
4.01.4.01.19.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.700.000,-	36.700.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.19.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.19.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.400.000,-	10.400.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.19.28	Program Hari-hari Besar	13.500.000,-	13.500.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>516.400.000,-</b>	<b>514.383.250,-</b>	<b>99,61%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,61%** dengan realisasi anggaran **Rp.514.383.250,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **75%** dan **99,92%**.

#### 15. Bakongan Timur

**Tabel 2.154**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Bakongan Timur**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.20</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Bakongan Timur</b>				
4.01.4.01.20.01	Program Administrasi Perkantoran	278.620.000,-	276.383.000,-	99,20%	Sangat tinggi
4.01.4.01.20.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62.880.000,-	62.880.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.20.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.500.000,-	11.500.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.20.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.700.000,-	10.700.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.20.28	Program Hari-hari Besar	10.500.000,-	10.500.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>374.200.000,-</b>	<b>371.963.000,-</b>	<b>99,40%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa Setcam Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,40%** dengan realisasi anggaran **Rp.371.963.000,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **76,67%** dan **82,73%**.

## 16. Trumon

**Tabel 2.155**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Trumon**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.21</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Trumon</b>				
4.01.4.01.21.01	Program Administrasi Perkantoran	308.565.000,-	305.564.000,-	99,03%	Sangat tinggi
4.01.4.01.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	229.850.000,-	229.203.700,-	99,72%	Sangat tinggi
4.01.4.01.21.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.300.000,-	15.300.000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
4.01.4.01.21.53	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
4.03.4.01.21.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	17.235.000,-	17.235.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.21.28	Program Hari-hari Besar	21.870.000,-	21.870.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>592.820.000,-</b>	<b>589.172.700,-</b>	<b>99,38%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Trumon Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 7 (tujuh) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra dan RKPD yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam RKPD Tahun 2019.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,38%** dengan realisasi anggaran **Rp.589.172.700,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **44.05%** dan **99,88%**.

## 17. Trumon Timur

**Tabel 2.156**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Trumon Timur**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.22</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Trumon Timur</b>				
4.01.4.01.22.01	Program Administrasi Perkantoran	269.814.000,-	269.657.876,-	99,94%	Sangat tinggi
4.01.4.01.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	78.190.000,-	77346.000,-	98,92%	Sangat tinggi
4.01.4.01.22.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	41.750.000,-	41.337.500,-	99,01%	Sangat tinggi
4.01.4.01.22.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.22.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.806.000,-	8.806.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.22.28	Program Hari-hari Besar	15.440.000,-	15.440.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>414.000.000,-</b>	<b>412.587.376,-</b>	<b>99,66%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan 1 (satu) program yang langsung dilaksanakan dalam DPA-P Tahun 2019 tanpa direncanakan dalam Renstra dan RKPD Tahun 2019 yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,66%** dengan realisasi anggaran **Rp.412.587.376,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **48,33%** dan **99,58%**.

## 18. Trumon Tengah

**Tabel 2.157**  
**Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan**  
**Pada Kecamatan Trumon Tengah**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

Kode	Urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
			SPJ	%	Kategori
<b>4.01</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>				
<b>4.01.23</b>	<b>Pemerintahan Penunjang Adminstrasi Perkantoran Setcam Trumon Tengah</b>				
4.01.4.01.23.01	Program Administrasi Perkantoran	279.023.000,-	278.948.000,-	99,97%	Sangat tinggi
4.01.4.01.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasnana Aparatur	92.580.000,-	90.617.900,-	97,88%	Sangat tinggi
4.01.4.01.23.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.000.0000,-	13.000.0000,-	100%	Sangat tinggi
4.01.4.01.23.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	-	-
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>				
4.03.4.01.23.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12.465.000,-	12.465.000,-	100%	Sangat tinggi
<b>1.02</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				
1.02.4.01.23.28	Program Hari-hari Besar	22.952.000,-	22.952.000,-	100%	Sangat tinggi
	<b>Jumlah</b>	<b>420.020.000,-</b>	<b>417.982.900,-</b>	<b>99,51%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Setcam Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan program pembangunan sebanyak 6 (enam) program dan terdapat 1 (satu) program yang hanya direncanakan dalam Renstra yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD tersebut sudah **sangat tinggi** yaitu **99,51%** dengan realisasi anggaran **Rp.417.982.900,-** Sedangkan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebesar **84,33%** dan **99,72%**.

## 2.6.2. Pengukuran Konsistensi Antar Dokumen

Dari hasil evaluasi yang telah disebutkan di atas, didapati hasil konsistensi antara Renstra dengan RKPD Tahun 2019 dan APBK Tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 2.158**  
**Hasil Konsistensi Renstra – RKPD – APBK**

No	Uraian Konsistensi	Jumlah	Kode
1.	Direncanakan dalam Renstra, RKPD dan APBK - Program	364	Hitam
2.	Hanya direncanakan dalam Renstra - Program	81	Hijau
2.	Direncanakan dalam Renstra dan RKPD, namun tidak direncanakan dalam APBK - Program	58	Orange
3.	Direncanakan dalam RKPD dan APBK, namun tidak direncanakan dalam Renstra - Program	3	Coklat
5.	Hanya direncanakan dalam RKPD - Program	36	Biru
6.	Hanya direncanakan dalam APBK - Program	9	Merah

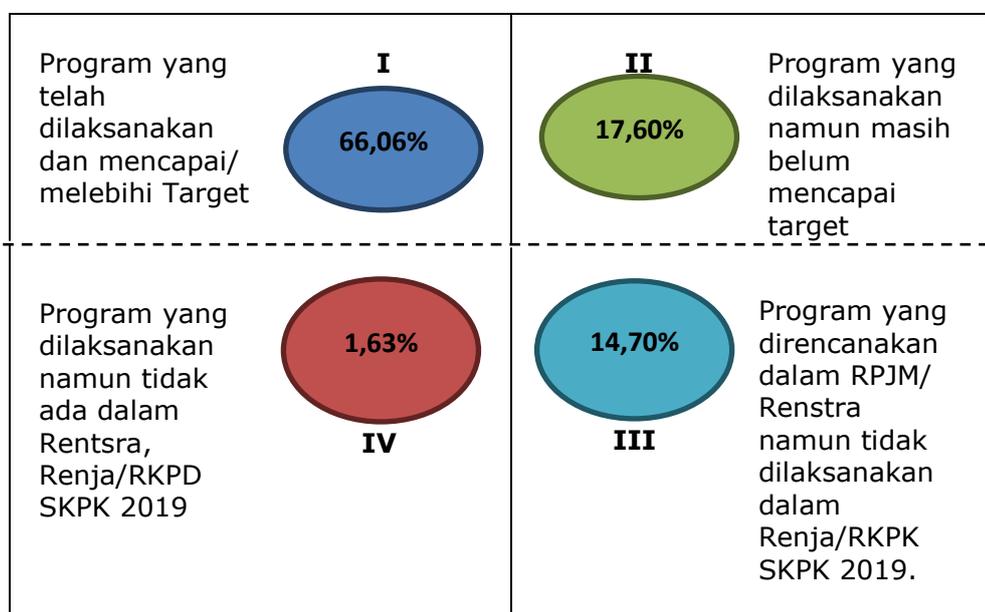
Secara keseluruhan total program dari seluruh SKPK dalam Kabupaten Aceh Selatan adalah sebanyak **551** program. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan dan telah mencapai/ melebihi target (terdapat dalam Renstra, Renja, RKPK dan DPA Tahun 2019, **kode Hitam**) berjumlah **364** program (**66,06%**)
2. Program yang dilaksanakan namun belum mencapai target (**penjumlahan kode Orange, Coklat dan Biru**) berjumlah **97** program (**17,60%**)

3. Program yang rencanakan dalam RPJM/Renstra namun tidak dilanjutkan dalam Renja/RKPD 2019 dan DPA 2019 (**kode Hijau**) berjumlah **81** program (**14,70%**)
4. Program yang dilaksanakan namun tidak ada dalam Renstra, Renja, dan RKPD (**Kode Merah**) berjumlah **9** program (**1,63%**)

Gambaran hasil evaluasi RKPD secara makro dapat dilihat pada gambar 3.1.

**Gambar 2.159**  
**Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2019**



Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terlihat pada kuadran I program yang dilaksanakan dan mencapai/melebihi target mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran OPD dalam merencanakan program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan OPD dalam mendukung dan mewujudkan VISI dan MISI BUPATI ACEH SELATAN terpilih periode 2018-2023.

Sementara itu di kuadran II terlihat program yang dilaksanakan namun masih belum mencapai target terlihat meningkat dari tahun sebelumnya. Persentase yang besar menjadi cerminan bahwa program yang direncanakan dalam RKPK di tahun 2019 ini sangat banyak (36 program) namun karena keterbatasan anggaran tidak dapat dilaksanakan dalam

DPA tahun 2019. Diharapkan kepada SKPK kedepannya agar dapat melihat program-program yang penting dalam meningkatkan kinerja dan merencanakan sesuai dengan pagu anggaran yang telah dibagikan oleh BAPPEDA dalam KUA-PPAS.

Begitu pula dengan program yang dilaksanakan namun tidak ada dalam Renstra RKPD SKPK atau terencana dalam Renstra dan dilaksanakan dalam DPA Tahun 2019 ini namun tidak direncanakan dalam RKPD tahun 2019 ini terdapat 9 (Sembilan) program, dan diharapkan agar kedepannya program "PENUMPANG GELAP" ini berkurang dari tahun ke tahunnya.

Adapun rata-rata capaian kinerja dan anggaran RKPD dari seluruh program di tahun 2019 adalah sebesar **63,20%** untuk kinerja dan dikategorikan masih **rendah**, untuk **capaian anggaran sebesar 94,88%** dan dikategorikan **Sangat Tinggi**. Sedangkan Rata-rata capaian keuangan di Semester II ini sebesar **95.38%** dengan total capaian anggaran sebesar **Rp.1.481.192.744.904,78.-**

### **2.6.3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **2.6.3.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukannya evaluasi RKPD untuk Semester II tahun 2019 ini diperoleh hasil sebagai berikut:

#### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

##### **a. Faktor Pendukung**

Penetapan APBK Tahun 2019 yang tepat waktu dapat menjadi faktor pendukung dalam kegiatan evaluasi RKPD ini.

##### **b. Faktor Penghambat**

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan evaluasi RKPD ini adalah:

1. Pembentukan SOTK baru dan pembagian bidang urusan baru menyebabkan keterlambatan pengisian karena harus mengulang pengisian dari yang baru.
2. Ada beberapa SKPK baru yang tidak memiliki dokumen lengkap seperti Renstra dan Renja yang belum disampaikan sehingga menyulitkan kami untuk merekap program dan kegiatan dari SKPK.
3. Terlambatnya proses tender juga mempengaruhi capaian realisasi anggaran untuk Kabupaten Aceh Selatan.

4. Kurangnya kerjasama beberapa SKPK di Kabupaten Aceh Selatan dalam mengisi form evaluasi menyebabkan lambatnya pelaporan evaluasi RKPD ini.
5. Pergantian operator pengisian di SKPK, sehingga harus melatih operator baru.

### **2.6.3.2. Tindak Lanjut/Rekomendasi**

Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan atas kegiatan evaluasi RKPD ini diantaranya adalah:

1. Masih banyak kesalahan dalam pembuatan Renstra Perubahan oleh beberapa SKPK seperti satuan dari target kinerja yang salah atau tidak relevan dengan program dan kegiatan yang dicantumkan sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang dan revisi kembali.
2. Masih ada program dan kegiatan yang muncul di DPA tapi tidak dimasukkan ke dalam RKPD-P dan Renja-P.
3. Masih banyaknya inkonsistensi antar dokumen
4. Bertambahnya program dan kegiatan “penumpang gelap” di beberapa SKPK.
5. Masih banyak ditemukan Pengisian Kode Rekening Program dan Kegiatan yang salah dan tidak sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka hendaknya SKPK dapat berkoordinasi dengan Bappeda dan BPKD dalam memberikan kode rekening terutama untuk program/kegiatan yang baru.
6. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar Bidang di Bappeda dan dengan SKPK sangat dibutuhkan dalam proses evaluasi ini agar terjalannya komunikasi yang baik untuk menciptakan dokumen perencanaan yang terencana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2.7. Permasalahan Pembangunan**

Berdasarkan capaian realisasi baik itu data yang dikumpulkan dari OPD maupun data yang dipublikasikan oleh Statistik Kabupaten Aceh Selatan, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Selatan yang harus diselesaikan pada Tahun 2021. Adapun permasalahan disajikan sebagai berikut:

### 2.7.1. Aspek Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan Tahun 2018 (4,68) masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional (5.17)
- persentase penduduk miskin Aceh Selatan Tahun 2018 (13,96) berada diatas persentase kemiskinan nasional (9.66)
- IPM Aceh Selatan pada tahun 2018 adalah (65.92 ) dibawah IPM nasional (71.39)
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh Selatan Tahun 2018 (6.08 ) masih di atas nasional (5,34)

### 2.7.2. Aspek Pelayanan Umum

- kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
- kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan yang belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah serta sebaran guru pada satuan pendidikan yang belum merata ;
- kurikulum pendidikan, hingga saat ini implementasi kurikulum 2013 belum berjalan optimal di sekolah-sekolah;
- pengelolaan semua jenis dan satuan pendidikan belum terkoordinir;
- belum diterapkannya Instructional leadership pada semua jenis dan satuan pendidikan yang masih "kurang";
- belum terpenuhinya semua Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada semua jenis dan satuan pendidikan (rata-rata masih dibawah 60 %);
- belum meratanya guru yang "top" kualitasnya pada semua satuan pendidikan yang masih sangat "bermasalah";
- belum tepatnya penempatan kepala sekolah yang "tepat";
- masih kurang kebijakan yang "berkeadilan" pada sekolah unggul yang dikelola Pemerintah;
- masih lemahnya koordinasi antar lembaga kependidikan;
- masih "tumpang tindih"nya pelaksanaan tugas antara lembaga-lembaga think tank, LPTK, penjamin mutu dan pelaksanaan pendidikan untuk satuan pendidikan;
- Perlu adanya fasilitas pendukung pembinaan guru dan tenaga kependidikan.
- kekurangan gizi pada anak balita dan prevalensi malnutrisi anak usia kurang dari 5 (lima) tahun menurun drastis namun serta stunting pada baduta dan balita justru meningkat signifikan ;
- bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan masih ada yang belum mendapatkan asi eksklusif;

- Masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- Minimnya sarana dan prasarana kesehatan dimana pemerintah Aceh Selatan;
- minimnya SDM kesehatan seperti jumlah dokter spesialis, dokter umum dan; jumlah tenaga medis
- masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik;
- jaringan irigasi yang tersedia belum memadai;
- cakupan rumah layak huni masih cukup rendah;
- cakupan rumah layak huni masih cukup rendah;
- minimnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sasitasi layak;
- masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- kasus pelecehan seksual, pencabulan anak, kasus kekerasan pada anak masih terjadi;
- penataan aset-aset tanah terutama milik Pemerintah Daerah;
- Belum optimalnya SADARI;
- Masih perlunya mengembangkan kualitas objek wisata dan Promosi wisata;
- masih kurangnya sarana dan prasarana, belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan dan lahan budidaya perikanan serta pertanian;
- Produktivitas sektor pertanian kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah;
- minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian;
- Hasil penelitian Bappeda Provinsi Aceh Tahun 2018 tentang Zona Agroekologi menyatakan Wilayah di Kabupaten Aceh Selatan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan Pertanian/Perkebunan berbasis agroindustri dengan perkebunan unggulan seperti kelapa, cengkeh, pala, pinang, kapuk/randu, sagu, kayu manis dan nilam. Tanaman palawija unggulan adalah jagung dan kacang tanah. Sedangkan Tanaman buah-buahan unggulan di Kabupaten Aceh Selatan adalah mangga dan durian.
- Skenario pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Aceh Selatan pada masa yang akan datang dengan misalnya alternatif A1 dan pilihan 1 dengan skenario 3 yaitu komoditas Ubi Kayu, Jagung, Kacang Tanah, Kelapa Sawit , Pala, Nilam. Pilihan 2 skenario 2 yaitu dengan Kedelai, Kacang Tanah, Jagung, Kelapa, Pinang, Nilam serta pilihan 3 dengan skenario 1 yaitu Padi, jagung, Ubi Kayu Kelapa Sawit, Cengkeh, Pala. Apabila dipilih alternatif A3 dengan skenario 1

maka komoditas unggulan yang dikembangkan adalah Padi, Jagung, Ubi Kayu, Kelapa Sawit, Cengkeh, Pala. Rekomendasi dari penelitian Bappeda Aceh ini, pada satu point kesimpulan juga menyertakan bahwa Kabupaten Aceh Selatan pada masa yang akan datang dapat menjadikan ubi kayu dan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan.

- Belum adanya Masterplan Pariwisata
- Belum adanya Masterplan Perikanan

### **2.7.3. Aspek Daya Saing**

1. Kondisi panjang jalan dengan kondisi baik yang terus meningkat namun belum mencakup seluruh panjang jalan di Aceh Selatan mencerminkan relatif kurangnya kualitas infrastruktur. Aceh Selatan juga membutuhkan dukungan peningkatan daya listrik dan berbagai infrastruktur lainnya agar daya saing daerah meningkat.
2. luas wilayah banjir Tahun 2019 mencapai 3,39 persen dari luas wilayah budidaya Kabupaten Aceh Selatan, rusaknya hutan di hulu DAS, terjadinya pengalihan fungsi lahan, dan berkurangnya daerah serapan air serta kurangnya drainase membuat potensi banjir. Sejalan dengan potensi banjir, ketersediaan air bersih juga masih jadi kendala yang harus segera dituntaskan. Daerah potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan sebagian besar terdapat pada daerah aliran sungai dan daerah pengaruh muara sungai besar serta dorongan air laut pasang. Banjir di Kabupaten Aceh Selatan juga dapat terjadi akibat hujan di hulu sungai soraya (Aceh Singkil) dan atau di kabupaten Aceh Tenggara sungai Alas (berupa banjir kiriman) yang terjadi setiap tahun hingga sampai saat ini yang menimpa 3 Kecamatan yaitu Trumon Timur, Trumon Tengah dan Trumon.

### **2.7.4. Dinul Islam, Keistimewaan Aceh, Sosial dan Kebudayaan**

1. Belum maksimalnya pengawasan penerapan syariat islam.
2. Belum optimalnya pengelolaan dan penerimaan ZIS dari Muzakki.
3. Kurangnya tenaga-tenaga profesional dalam menjaga keutuhan aqidah masyarakat terutama dalam rangka mendeteksi adanya dugaan kesesatan umat dalam pelaksanaan pengamalan syariat islam.

4. Minimnya kader ulama yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pembinaan umat serta mengawasi jalannya syariat islam.
5. Belum terstandarisasi pendidikan dayah (Tipe Dayah) secara menyeluruh.
6. Memudarnya nilai-nilai seni dan budaya tradisional akan berdampak pada generasi penerus bangsa dari budaya sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkannya secara kontekstual.
7. Kurangnya pemahaman tentang peranan adat yang dilakukan oleh pemangku adat dalam gampong.
8. Belum terealisasi secara maksimal peradilan adat (perselisihan adat).
9. Kurangnya koordinasi antara pihak aparat kepolisian dan perangkat adat yang ada di tingkat gampong dan mukim tentang pelimpahan kewenangan lembaga adat dalam hal kasus persengketaan/ perselisihan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013.
10. Belum tersedianya peta kawasan kemiskinan.
11. Belum terlibatnya peran serta dunia usaha dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (CSR).

### BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SELATAN

Bab ini memaparkan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah berupa proyeksi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kedua subbab ini saling berkaitan dimana arah kebijakan ekonomi yang bersumber dari kebijakan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten juga memberi kontribusi terhadap aspek pendanaan daerah.

Selanjutnya kerangka pendanaan pembangunan yang dituangkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 memberikan gambaran kebutuhan anggaran pembangunan yang diperlukan pada Tahun 2021, guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan serta tantangan pembangunan daerah melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan.

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2019, Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Maka, RKPD 2021 mengusung tema **"Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju," jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat membuka rapat yang dihadiri seluruh Sekjen/Sesmen/Sestama Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga, Dirjen/Deputi terkait di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan BKPM, seluruh Kepala Bappeda Provinsi, dan para pejabat di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Agar RKPD 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Beberapa Major Projects yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan diprioritaskan, antara lain: (i) 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai; (ii) 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (iii) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi; (iv) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan (v) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. "Pelaksanaan Major Project dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek. Selanjutnya, dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga mendapat amanat dari Bapak Presiden sebagai Clearing House," tegas Menteri Suharso.

Dengan mengemban tugas tersebut, Kementerian PPN/Bappenas harus: (1) memastikan seluruh rencana pembangunan sesuai dengan RPJMN dan RKPD, dengan mengoordinasikan dan mensinergikan program pembangunan K/L, BUMN, dan Daerah; (2) memastikan rencana pembangunan konsisten dengan penganggarnya, untuk itu Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan bersama-sama mengalokasikan anggaran sesuai RKPD; serta (3) mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan melalui integrasi sistem data yang ada. "Dalam rangkaian penyusunan RKPD 2021 ini, kami akan memperkuat sinergi Pusat-Daerah melalui Rakor Gubernur dan koordinasi pusat dan dunia usaha. Pendanaan Major Projects yang cukup besar tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan dukungan dan kontribusi dari BUMN dan Swasta dalam mendorong investasi," ujar Menteri Suharso.

RPJMN 2020-2024 dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya

saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (Paris Agreement).

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2020 dan 2021 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2018 dan 2019. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. "Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, terutama yang berasal dari penyebaran Coronavirus. Ketidakpastian lainnya berasal dari Amerika Serikat. Pada akhir 2020, Amerika Serikat akan menghadapi Pemilihan Presiden. Apakah Trump akan melanjutkan kepemimpinan pada 2021, akan menjadi kunci bagi kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Di luar itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah," tutur Menteri Suharso.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 ditargetkan 5,3–5,7 persen. Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2021 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2020. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada 2020. Akan tetapi, berdasarkan penilaian awal Kementerian PPN/Bappenas, merebaknya Coronavirus berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen poin.

Dihadapkan tantangan tersebut, pencapaian sasaran pertumbuhan 5,3-5,7 persen pada 2021 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2021 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi SDA untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata. Ke depan, pemerintah akan mengembangkan berbagai destinasi pariwisata sekelas dengan Bali.

Selain tumbuh kuat, stabilitas makro ekonomi juga akan dijaga dengan mempertahankan inflasi pada tingkat di bawah 4,0 persen melalui koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya melalui perbaikan infrastruktur konektivitas.

### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun 2021.**

Kondisi ekonomi Kabupaten Aceh Selatan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari perkembangan berbagai indikator ekonomi makro daerah, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), struktur perekonomian, pendapatan perkapita, serapan investasi, inflasi serta ketenagakerjaan, dimana indikator ini akan menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan pembangunannya, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan Tahun 2021.

#### **3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam satu priode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dihitung dengan cara produksi, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dapat dihasilkan (nilai barang dan jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) dari kegiatan ekonomi penduduk dalam satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 17 (tujuh belas) lapangan usaha yaitu: (1) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan

gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;(6) Bangunan/konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran,dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;(8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;(10) Informasi dan Komunikasi;(11) Jasa Keuangan dan Asuransi;(12) Real Estat; (13) Jasa perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib;(15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosialserta (17) Jasa lainnya.

PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (Current price) dan harga konstan (constant price). Pada umumnya untuk kepentingan berbagai analisa ekonomi secara makro digunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Hasil perhitungan PDRB Kabupaten Aceh Selatan selama 7 Tahun terakhir baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan, menunjukkan adanya peningkatan dari Tahun ke Tahun.

Pada Tahun 2013 PDRB ADHB tersebut adalah sebesar Rp.3.651.140,68 diperkirakan meningkat menjadi Rp. 5.491.002,70 pada Tahun 2019. Selanjutnya untuk PDRB ADHK meningkat dari Rp.3.281.364,18 pada Tahun 2013 adanya peningkatan Rp. 4.237.547,90 pada Tahun 2019. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan terjadi Laju Pertumbuhan Ekonomi selama periode tersebut dan diharapkan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang terus membaik sampai Tahun 2017 dan Tahun 2018 dapat dilanjutkan pada Tahun 2019, namun dalam perjalanan Tahun 2020 dikarenakan adanya covid-19 yang menjadi wabah dunia, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan maka di Prediksi akan menurun pertumbuhannya, namun demikian pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat melakukan support terhadap program dan kegiatan yang dapat mengangkat kembali perekonomian baik itu bidang Produksi dan Jasa.

**Tabel 3.1**  
**PDRB Kabupaten Aceh Selatan 2013-2019**

No	Tahun	ADHB (Rp.Juta)	ADHK (Rp.Juta)
1.	2013	3.651.140,68	3.281.364,18
2.	2014	3.942.066,41	3.432.178,66
3.	2015	4.227.300,40	3.577.877,65

No	Tahun	ADHB (Rp.Juta)	ADHk (Rp.Juta)
4.	2016	4.553.857,70	3,743,403.80
5.	2017r	4.855.005,70	3.887.220,20
6.	2018*	5.210.086,40	4.068.952,20
7.	2019**	5.491.002,70	4.237.547,90

**Sumber : Publikasi BPS Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020.**

r) Angka Revisi

\*) Angka sementara

\*\*\*) Angka sangat sementara

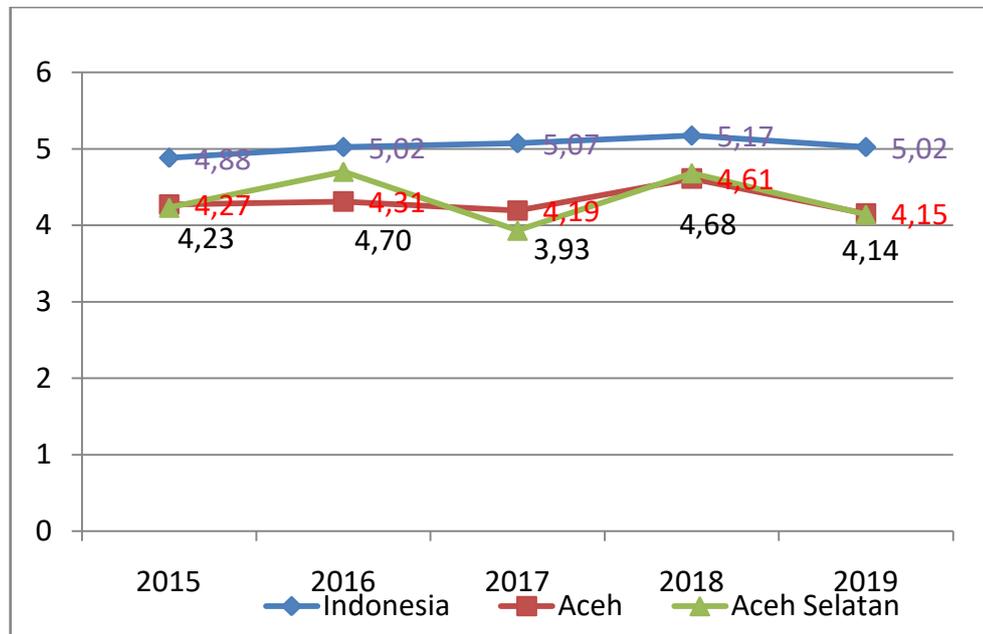
### 3.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Perekonomian daerah Kabupaten Aceh Selatan masih menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. Pandangan ini didapat dengan memperhatikan laju perkembangan PDRB Kabupaten Aceh Selatan atas dasar harga konstan 2010 sejak Tahun 2015 hingga Tahun 2019 serta memperhatikan perkiraan capaian Tahun 2020 dan Target Tahun 2021.

Pada Tahun 2015, Laju Petumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar 4,23 persen, meningkat sebesar 4,70 persen pada Tahun 2016 kemudian menurun sebesar 3,93 persen pada Tahun 2017 dan meningkat kembali sebesar 4,68 persen pada Tahun 2018 serta menurun kembali pada Tahun 2019 sebesar 4,14 persen.

Sedangkan pada Tahun 2020 LPE Aceh Selatan semula ditargetkan mencapai 4,34 persen namun karena terjadinya wabah covid-19 yang mendunia kemudian berdampak di Kabupaten Aceh Selatan, dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I sebesar 2,97 persen sehingga target LPE Aceh Selatan semula 4,34 di asumsikan menurun menjadi 2-3,5 persen sampai pada akhir tahun dan pada Tahun 2021 di proyeksikan 4.48.

**Grafik 3.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Provinsi Aceh dan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015-2019**



Sumber: Aceh Selatan Dalam Angka 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan begitu terasa pada sektor sekunder dan sektor tersier. Lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities tumbuh sebesar 9,51 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security tumbuh sebesar 7,85 persen merupakan pemberi kontribusi pertumbuhan yang terbesar pada Tahun 2019. Kendati demikian Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities tetap memberikan kontribusi pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 6,31. Perkembangan kondisi perekonomian Nasional dan Internasional tentunya ikut mempengaruhi capaian angka perkiraan pertumbuhan ekonomi Aceh Selatan pada Tahun 2021.

## ANALISIS MAKRO EKONOMI



Kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM dan secara bertahap menaikkan tarif dasar listrik membawa dampak secara langsung terhadap kenaikan harga produksi dan harga barang. Fluktuasi harga-harga barang secara umum ditingkat Nasional masih signifikan pengaruhnya terhadap harga-harga barang ditingkat daerah sehingga diperlukan langkah konkrit dalam mengatasinya. Pemerintah Daerah menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi terhadap sektor-sektor produktif yang terkena imbas terhadap kenaikan harga tersebut dengan memperkuat ketahanan ekonomi kecil dan menengah mempengaruhi kondisi ekonomi regional termasuk Kabupaten Aceh Selatan. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menjadi lebih baik pada Tahun 2021, maka yang paling utama adalah melihat sektor-sektor yang memberikan pertumbuhan ekonomi tertinggi, hal ini penting untuk mengetahui sektor-sektor yang berpotensi menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan.

**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2013-2016**

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2015	2016	2017 r	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	3,96	3,56	3,12	3,95	4,69
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	-9,71	-6,75	-8,35	-0,46	1,61

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2015	2016	2017 r	2018*	2019**
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	2,79	0,66	0,99	3,85	2,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	5,34	8,03	4,98	6,49	2,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste, Management & Remediation Activities	5,34	5,88	4,65	5,58	9,51
F	Konstruksi/Construction	5,89	8,84	4,55	5,05	2,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	5,38	4,67	5,60	5,59	4,71
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	4,05	0,79	5,04	3,17	4,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service Activities	3,87	4,95	5,65	5,06	2,45
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	5,53	4,04	3,92	4,55	2,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	6,19	6,63	5,17	5,76	3,82
L	Real Estat/Real Estate Activities	4,07	5,59	4,55	4,70	1,83
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	6,78	7,63	5,91	6,23	4,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	5,99	7,35	5,99	6,42	7,85
P	Jasa Pendidikan/Education	5,50	5,69	6,25	5,99	5,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	4,68	5,13	4,36	4,62	6,31
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	6,19	6,63	5,17	5,76	3,82
Produk Do Product	Product Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic	4,23	4,64	3,93	4,68	4,14

**Sumber : Publikasi BPS Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020**

Berdasarkan trend pertumbuhan ekonomi tersebut selama lima tahun terakhir, diprediksikan untuk Tahun 2021 perekonomian Kabupaten Aceh Selatan tumbuh sebesar 4,48 persen dengan PDRB (ADHK). Meningkatnya prediksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 didasarkan Realisasi pertumbuhan ekonomi dari 2015-2019 serta prediksi berdasarkan target RPJMK 2018-2023. Selanjutnya Pembangunan Sektor Pertanian sebagai salah satu dari sektor primer diisinerjiskan pula dengan Sektor Sekunder dalam hal ini sektor Bangunan dan Konstruksi, utamanya untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pertanian itu sendiri serta sektor Industri Pengolahan yang menjadi daya dukung sektor pertanian tersebut, dengan demikian diharapkan terjadinya transformasi perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang berimbang dimana sektor pertanian yang maju mendukung sektor perindustrian yang tangguh.

### **3.1.1.3. Struktur Ekonomi**

Secara faktual, struktur ekonomi Kabupaten Aceh Selatan memang masih bertumpu pada sektor pertanian dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Namun, sampai saat ini pembangunan sektor pertanian yang telah dilakukan belum mampu menjadikan sektor yang berbasis pada agrobisnis dan agroindustri. Pemerintah Daerah sangat menyadari hal tersebut, untuk itu perlu dilakukan revitalisasi pembangunan pada sektor pertanian melalui perencanaan yang terintegrasi dengan melibatkan SKPK terkait dalam pelaksanaannya, seperti pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berbasis agribisnis, pengembangan sentra peternakan dan pembibitan ternak yang ditetapkan dalam RTRWK Aceh Selatan 2016-2036 berupa pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan. Selain sektor primer, pertumbuhan ekonomi daerah juga didorong oleh sektor sekunder yang terdiri dari sektor bangunan/konstruksi dan industri pengolahan serta sektor tersier.

Sektor pertanian yang menjadi basis ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, kontribusinya pada tahun 2013 sebesar 26,11 persen akan tetapi terus mengalami penurunan dimana kontribusi pada tahun 2019 hanya sebesar 24,45 persen.

Pertumbuhan sektor konstruksi pada Tahun 2013 sebesar 15,32 persen dan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,06 persen. Sektor informasi dan komunikasi Tahun 2013 sebesar 5,07 persen dan Tahun 2019 sedikit menurun menjadi sebesar 5,24 persen. Sektor keuangan dan asuransi pertumbuhannya sebesar 2,39 persen pada Tahun 2013 dan menurun 1,96 persen pada Tahun 2019. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib pertumbuhannya sebesar 11,91 persen pada Tahun 2013 dan meningkat menjadi sebesar 13,82 persen pada Tahun 2019. Selanjutnya sektor jasa pendidikan pertumbuhannya sebesar 2,61 persen pada Tahun 2013 dan sedikit menurun menjadi sebesar 3,18 persen pada Tahun 2019. Walaupun menurun pertumbuhannya namun keempat sektor tersebut secara analisis makro tipologi klassen adalah sektor yang maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Aceh Selatan.

**Tabel 3.3**  
**BESARAN NILAI KONTRIBUSI TIAP SEKTOR**  
**TERHADAP PDRB KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2013 - 2019**  
**(Dalam Jutaan Rupiah dan %)**

LAPANGAN USAHA		JUTAAN RUPIAH		PERSENTASE	
		2013	2019	2013	2019
1	PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	952.253,43	1.036.026,50	26,11	24,45
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	189.539,26	149.596,60	5,09	3,53
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	127.997,51	137.478,50	3,51	3,24
4	PENGADAAN LISTRIK DAN GAS	2.744,43	4.252,40	0,08	0,10
5	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	698,93	886,7	0,02	0,02
6	KONSTRUKSI	558.704,45	680.575,20	15,32	16,06
7	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL	525.709,38	628.716,40	14,41	14,84
8	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	209.852,66	227.260,60	5,27	5,36
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	16.652,39	19.688,30	0,46	0,46

LAPANGAN USAHA		JUTAAN RUPIAH		PERSENTASE	
		2013	2019	2013	2019
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	184.982,75	221.976,90	5,07	5,24
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	87.272,84	82.961,30	2,39	1,96
12	REAL ESTATE	127.737,77	155.715,60	3,5	3,67
13	JASA PERUSAHAAN	21.938,57	27.225,30	0,6	0,64
14	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN	434.194,75	585.684,20	11,91	13,82
15	JASA PENDIDIKAN	95.237,26	134.954,80	2,61	3,18
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	26.424,67	80.345,30	1,71	1,90
17	JASA LAINNYA	53.199,63	64.203,40	1,46	1,52
<b>JUMLAH</b>		<b>3.651.140,68</b>	<b>4.237.548,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Aceh selatan Tahun 2020*

#### 3.1.1.4. PDRB Perkapita

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak dengan trend positif, maka PDRB perkapita masyarakat juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, selama 5 (Lima) tahun terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan. Untuk Tahun 2015 income perkapita masyarakat (ADHK) Kabupaten Aceh Selatan adalah sebesar Rp.15,89 juta pada Tahun 2016 meningkat sebesar Rp.16,36 juta dan pada Tahun 2017 meningkat sebesar Rp.16,76 juta dan pada Tahun 2018 diperkirakan terus meningkat sebesar Rp. 17,31 Juta serta meningkat hingga pada Tahun 2019 sebesar Rp. 17,80 Juta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2013-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	4.227,30	4.553,86	4.855,00	5.210,09	5.491,00
- ADHK 2010	3.574,59	3.740,29	3.887,22	4.068,95	4.237,55

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	18,80	19,92	20,94	22,16	23,06
- ADHK 2010	15,89	16,36	16,76	17,31	17,80
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	2,41	2,94	2,45	3,24	2,85
Jumlah penduduk (000 org)					
Pertumbuhan	224,90	228,60	231,89	235,12	238,08

**Sumber: Publikasi BPS Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020**

### 3.1.1.5. Investasi Daerah

Penyerapan Investasi merupakan indikator ekonomi makro daerah yang sangat esensial dalam pembangunan daerah, karena investasi menentukan daya dukung ekonomi untuk menciptakan kesempatan kerja. Investasi di Kabupaten Aceh Selatan dapat bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Untuk pendanaan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat berasal dari modal swasta, kredit perbankan maupun Pemerintah. Besarnya investasi yang dilakukan sektor swasta perlu terus didorong pelaksanaannya, mengingat dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan tersebut relatif sangat terbatas. Selama ini kendala yang ada adalah masih sulitnya sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengakses modal pengembangan usahanya berupa skema kredit perbankan. Pada hal UMKM merupakan bentuk usaha yang mendukung peningkatan perekonomian daerah dan pengentasan kemiskinan.

Disisi lain untuk membiayai pembangunan tersebut Pemerintah Daerah juga melakukan pembiayaan melalui mekanisme pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure), berupa belanja dan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pengeluaran Pemerintah daerah tersebut lebih banyak

terserap untuk keperluan pembiayaan belanja aparatur dibandingkan untuk keperluan pembangunan.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan**  
**Tahun 2013- 2019, target 2020 dan Proyeksi Tahun 2021**

Tahun	Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah	Belanja Pemerintah	Jumlah
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2013	3.700.209.072,00	737.659.975.006,00	741.360.184.078,00
2014	12.628.911.219,39	964.025.755.931,00	976.654.667.150,39
2015	6.800.000.000,00	1.124.550.151.005,00	1.131.350.151.005,00
2016	18.697.793.000,00	1.481.286.881.579,00	1.499.984.674.579,00
2017	0	1.551.869.740.688,23	1.551.869.740.688,23
2018	6.000.000.000,00	1.353.297.346.416,43	1.359.297.346.416,43
2019	0,00	1.533.208.674.523,00	1.533.208.674.523,00
2020	5.000.000.000,00	1.671.197.455.230,07	1.676.197.455.230,07
2021	5.450.000.000,00	1.821.605.226.200,78	1.827.055.226.200,78

**Sumber: BPKD dan RPJM Kab. Aceh Selatan 2013-2018.**

Oleh karena itu arah pembiayaan investasi kedepan, memerlukan sinergisitas antara Investasi Pemerintah daerah dengan investasi swasta terutama Dunia Usaha untuk menangani program dan kegiatan yang mendorong; (1) pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah, (2) menciptakan kegiatan yang mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, (3) menggunakan sumber daya ekonomi daerah yang ada utamanya sektor-sektor ekonomi yang merupakan potensi daerah Kabupaten Aceh Selatan (sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan pariwisata) serta (4) dapat memberi nilai tambah yang besar bagi perekonomian daerah.

### **3.1.1.6. Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas. Karena untuk melihat Tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai capain dari kegiatan pembangunan yang telah dilakukan, disamping menggunakan indikator pendapatan

perkapita dan pertumbuhan ekonomi daerah, indikator penting lainnya yang dijadikan ukuran adalah dengan melihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan daerah merupakan proses integral dari berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan, dimana pembangunan daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penduduknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta basis akhirnya adalah meningkat kesejahteraan masyarakat.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kemajuan dibidang pendidikan, Kesehatan dan Kemampuan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi angka indeks ini maka hal tersebut bermakna pula semakin membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat, IPM Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Indek Pembangunan Manusia**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2019**

<b>Tahun</b>	<b>IPM A.Selatan</b>	<b>IPM Aceh</b>	<b>IPM Nasional</b>
2013	62,27	68,30	68,31
2014	62,35	68,81	68,90
2015	63,28	69,45	69,55
2016	64,13	70,00	70,18
2017	65,03	70,60	70,81
2018	65,92	71,19	71,39
2019	66,90	71,90	71,92

**Sumber : Publikasi BPS Kab. Aceh Selatan Tahun 2020**

Berdasarkan data IPM Kabupaten Aceh Selatan dari Tabel diatas diketahui bahwa angka IPM Kabupaten Aceh Selatan relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 62,27 pada Tahun 2013, menjadi 66,90 pada Tahun 2019. Capaian IPM Kabupaten Aceh Selatan tersebut memang belum menggembirakan karena masih di bawah capaian rata-rata nilai IPM Aceh dan Nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus berupaya untuk meningkatkan capaian IPM tersebut.

### 3.1.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2019 sebesar 6,58 persen, namun demikian sedikit meningkat sebesar 6,08 persen dari Tahun 2018 dan lebih baik dari angka capaian pada tahun 2017 sebesar 7,24. Jika dibandingkan dengan angka TPT dengan Kabupaten Kota tetangga dan Provinsi Aceh Pada Tahun 2019, data capaian Kabupaten Aceh Selatan berada dibawah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 4,30 persen dan Provinsi Aceh sebesar 6,20 persen masih lebih baik dari data capaian TPT Kota Subullussalam sebesar 7,25 dan Kabupaten Aceh Singkil sebesar 8,60 persen. Untuk lebih jelasnya data perkembangan TPT dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut.

**Tabel 3.8**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Tetangga dan**  
**Provinsi Aceh Tahun 2017-2019**

No	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Kabupaten Aceh Selatan	7,24	6,08	6,58
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	3,16	3,95	4,30
3	Kota Subulussalam	4,91	6,49	7,25
4	Kabupaten Aceh Singkil	7,14	8,04	8,60
5	Provinsi Aceh	6,57	6,36	6,20

Sumber: ASDA 2020

Pada Tahun 2020 capaian TPT Proyeksi RPJM Kabupaten Aceh Selatan sebesar 6,59 persen dan tetap optimis diperkirakan dapat di tekan sebesar 6-6,70 persen hal ini mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil diakibatkan covid-19.

### 3.1.1.8. Inflasi

Berdasarkan pada kondisi yang mempengaruhi kondusivitas perekonomian Kabupaten Aceh Selatan, maka inflasi Kabupaten Aceh Selatan hingga akhir 2020 diprediksikan

pada kisaran antara 2-2,3 persen, dengan memperhatikan Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2020 (Juni 2020 terhadap Desember 2019) untuk Kota Meulaboh 1,92 persen, Kota Banda Aceh sebesar 1,97 persen, Kota Lhokseumawe 0,89 persen dan Provinsi Aceh 1,66 persen (Publikasi BPS Juni 2020) dengan tekanan inflasi isu ketersediaan dan distribusi bahan pokok utama, pelemahan rupiah, jumlah uang beredar; adanya fluktuasi harga pada jenis komoditas volatile foods dan kemungkinan meningkatnya harga bahan baku produksi.

### 3.1.1.9. Tingkat Kemiskinan

Realisasi angka kemiskinan kabupaten Aceh Selatan yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Aceh dimana Persentase Penduduk Miskin pada Tahun 2019 sebesar 13,09 dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 369.107 dan Jumlah penduduk miskin sebesar 31,060 Jiwa. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Aceh angka kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan sangat baik, dimana angka kemiskinan Provinsi Aceh tahun 2019 sebesar 15,32 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 464.626 serta jumlah penduduk miskin 819.440 jiwa.

**Tabel 3.9**  
**Tingkat Kemiskinan**  
**Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Tetangga dan**  
**Provinsi Aceh Tahun 2018-2019**

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	<i>Poverty Line</i> (Rupiah/capita/month)		<i>Number of Poor People</i> (thousand)		<i>Percentage of Poor People</i>	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh Singkil	427 804	450 217	25,74	25,66	21,25	20,78
Aceh Selatan	351 288	369 107	32,82	31,06	14,01	13,09
Aceh Barat Daya	340 903	358 059	25,23	24,36	17,10	16,26
Subulussalam	315 453	351 093	14,78	14,56	18,51	17,95
<b>Aceh</b>	<b>464 626</b>	<b>486 935</b>	<b>839,49</b>	<b>819,44</b>	<b>15,97</b>	<b>15,32</b>

Sumber: Provinsi Aceh dalam Angka 2020

Pada Tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Aceh Selatan ditargetkan sebesar rentang 12,80-13,30 persen. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tetap berupaya menekan angka kemiskinan demi mewujudkan masyarakat Aceh Selatan sejahtera secara sosial dan ekonomi.

### **3.1.1.10. Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2021**

Penyusunan APBK Aceh Selatan Tahun 2021 pada prinsipnya memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian daerah pada tahun-tahun yang lalu dan target ekonomi makro yang direncanakan dicapai pada Tahun 2019. Berdasarkan data yang tersedia dan hasil perhitungan dengan menggunakan metode double exponential smoothing, serta memperhatikan daya dukung faktor lingkungan strategis baik nasional, regional serta global maka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 di asumsikan mencapai pada kisaran angka 3-4.48 persen, perkiraan ini tidak terlepas dari pantauan pertumbuhan ekonomi Nasional Triwulan I sebesar 2,97 persen sehingga target LPE Aceh Selatan semula 4,34 di asumsikan menurun menjadi 2-3,5 persen sampai pada akhir Tahun 2020 penurunan LPE di Kabupaten Aceh Selatan ini merupakan dampak terjadinya covid-19 yang telah mewabah ke seluruh dunia yang dimulai dari Akhir bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2020.

Untuk memulihkan kondisi LPE Kabupaten Aceh Selatan pasca terjadinya covid-19, pembiayaan pembangunan melalui mekanisme Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (PAD).

Stabilitas ekonomi yang diharapkan lahir dari berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Disisi lain untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, pendapatan perkapita juga diupayakan meningkat. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga pertumbuhan penduduk serta mengendalikan laju inflasi daerah, dalam rangka menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Untuk itu perlu segera melakukan langkah kebijakan terhadap beberapa pos penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD, sehingga kemandirian keuangan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dapat berjalan

sebagaimana yang diharapkan. Untuk melihat pertumbuhan sosial ekonomi Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut.

**Tabel 3.10**  
**Realisasi, Target dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

<b>No</b>	<b>Indikator Makro Ekonomi</b>	<b>Realisasi Tahun 2018</b>	<b>Angka sementara Tahun 2019</b>	<b>Target Tahun 2020</b>	<b>Proyeksi Tahun 2021</b>
1	2	4	3	5	6
1	PDRB ADHK (dlm juta)	4.068.952,20	4.237.547,90	4.407.049,82	4.583.331,81
2	PDRB ADHB (dlm juta)	5.210.086,40	5.491.002,70	5.600.822,75	5.712.839,21
3	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	4,68	4,14	4,34	4,48
4	Jumlah penduduk	233.756	236.359	238.722,59	241.109,82
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.34	9.07	6.59	6.24

**Sumber : Pengolahan Data Bappeda Tahun 2018**

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021.**

Selain didasarkan pada kondisi ekonomi Tahun 2018 dan Tahun 2019, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk Tahun 2021 akan sangat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal yang berupa tantangan dan prospek kedepannya. Tantangan dan prospek perekonomian daerah ini dapat berupa kebijakan pemerintah baik kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sendiri maupun wilayah di atasnya ataupun berupa fenomena-fenomena lainnya baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global.

#### **1. Lingkungan Internal dan Eksternal**

Beberapa faktor dapat menyebabkan kondisi Perekonomian berubah baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, berbagai asumsi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perlu diidentifikasi melalui lingkungan Eksternal dan lingkungan Internal. Lingkungan Eksternal dalam perspektif

kedepan masih cukup berat mengingat daya saing produk Nasional belum begitu kuat dipasar global, lebih husus daya saing dan kemampuan ekspor produk Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Selatan khususnya relatif rendah, sementara disisilain kebutuhan akan impor (sebagai pengurang laju Pertumbuhan PDRB) semakin meningkat. Selain pengaruh dari lingkungan eksternal, lingkungan internal tidak kalah pentingnya untuk dicermati. Lingkungan internal ini menjadi penting karena ruang lingkupnya dalam jangkauan dan kendali Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPK yang terkait, yang pada akhirnya akan dievaluasi atau dilakukan penilaian seberapa baik kinerjanya. Dengan menjadikan dokumen perencanaan sebagai landasan untuk pelaksanaan program-program dan penyusunan anggaran upaya untuk melakukan revitalisasi bidang-bidang pembangunan sehingga menjadi lebih produktif, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sebagainya.

## 2. Tantangan Pokok

- a. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan berkeadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.  
Tantangan yang dihadapi adalah berupaya menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Dengan jumlah angkatan kerja terus bertambah, kualitas pertumbuhan terus ditingkatkan. Menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
- b. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan.  
Tantangan yang dihadapi adalah menekan inflasi dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki dengan memberdayakan potensi yang ada sehingga menjadi nilai tambah untuk investasi yang sifatnya jangka panjang.
- c. Mendorong pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas.  
Tantangan untuk merumuskan strategi dalam upaya perbaikan dan menyiasati agar kinerja ekonomi memiliki daya saing yang kuat dari sektor tersier dalam struktur perekonomian Kabupaten Aceh Selatan yang ditopang oleh tiga sektor utama yakni sektor Pertanian, Perdagangan, dan jasa. Penguatan struktur yang dicirikan dengan makin menurunnya kontribusi sektor-sektor primer, sekunder dan meningkatnya kontribusi dari sektor tersier dalam pembentukan PDRB.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah yang tergambar pada struktur APBK Aceh Selatan terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah meliputi Dana Hibah dari pemerintah, Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Insentif Daerah, serta Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Selanjutnya pada Belanja Daerah diproyeksikan terdiri dari: (1) Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga; (2) Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.

Pada struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari: (1) Pembiayaan penerimaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (2) Pembiayaan pengeluaran meliputi Penyertaan modal (investasi) daerah, dan pembentukan dana cadangan.

### **3.2.1. Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD**

#### **3.2.1.1. Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun Rencana**

Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pemahaman yang baik terhadap hasil analisis kondisi ekonomi daerah, sangat penting digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Mendasari hal tersebut di atas, acuan proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah tahun 2021 menggunakan beberapa asumsi dasar, di antaranya:

- Realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya;
- Kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Adapun target kapasitas keuangan daerah yang telah disusun dan direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah**  
**RKPD Tahun 2021 Berdasarkan Proyeksi RPJMK**

NO	URAIAN	PROYEKSI RPJMD TAHUN RENCANA (RP) TAHUN 2021	CATATAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DAERAH	1.791.412.226.200,78	
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	182.024.589.493,58	akan meningkat dengan optimalisasi potensi-potensi yang ada
1.1.1	Pajak Daerah	12.809.083.585,51	
1.1.2	Retribusi Daerah	11.287.707.188,01	
1.1.3	Hasil Pengelolaankekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.722.650.000,00	
1.1.4	Zakat	9.027.183.800,00	
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	141.177.964.920,06	
1,2	DANA PERIMBANGAN	1.154.259.935.809,50	Meningkat seiring dengan bertambahnya penerimaan Negara dan Meningkatkan sesuai dengan prioritas nasional
1.2.1	Transfer umum	804.033.551.247,40	
1.2.4	Tranfer Khusus	350.226.384.562,10	
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	455.127.700.897,70	Meningkat sesuai dengan penerimaan pajak provinsi dari berbagai sektor dan Meningkatnya transfer dana desa setiap tahunnya serta Dipengaruhi oleh transfer dana Otsus
1.3.1	Pendapatan Hibah	30.155.688.864,00	
1.3.2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.	37.803.392.365,92	
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	241.961.200.966,20	
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	145.207.418.701,58	

**Sumber : BPKD Tahun 2020**

### 3.2.1.2. Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang berbagai komponen pembentuk kapasitas keuangan daerah dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi maka beberapa langkah perhitungan berikut perlu dilakukan. Komponen dimaksud adalah Menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung, pembiayaan, dan neraca daerah:

#### A. Rata-rata pertumbuhan pendapatan

Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN			RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>909.012.238.325,65</b>	<b>1.362.327.831.916,78</b>	<b>1.503.208.674.523,00</b>	<b>18,25</b>
1,1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>140.875.267.831,74</b>	<b>151.908.734.830,97</b>	<b>148.619.299.296,00</b>	<b>1,80</b>
1.1.1	Pajak Daerah	14.160.145.206,81	11.543.658.342,93	10.781.149.386,00	-8,69
1.1.2	Retribusi Daerah	9.327.679.236,00	9.144.844.675,00	9.500.637.310,00	0,61
1.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.395.995.915,96	6.213.503.535,00	6.500.000.000,00	6,40
1.1.4	Zakat	6.362.661.461,97	5.956.214.494,00	7.598.000.000,00	6,09
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	105.628.786.011,00	119.050.513.784,04	114.239.512.600,00	2,65
1,2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>313.061.078.078,00</b>	<b>965.371.745.516,00</b>	<b>971.517.495.000,00</b>	<b>45,86</b>
1.2.1	Transfer umum	16.223.010.228,00	650.086.365.767,00	676.738.954.000,00	246,81
1.2.4	Transfer Khusus	296.838.067.850,00	315.285.379.749,00	294.778.541.000,00	-0,23
1,3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>455.075.892.415,91</b>	<b>245.047.351.569,81</b>	<b>383.071.880.227,00</b>	<b>-5,58</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	750.000,00	0,00	25.381.440.000,00	3134,58

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN			RATA- RATA PERTU- MBU- HAN (%)
		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6
1.3.2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.	29.476.861.203,91	28.810.475.574,81	31.818.359.032,00	2,58
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	248.677.924.000,00	216.236.875.995,00	203.653.902.000,00	-6,44
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	176.920.357.212,00	-	122.218.179.195,00	-11,60

**Sumber : DPKD dan Pengolahan Data 2020.**

## B. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran Perangkat daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja yang penganggarannya didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah.

Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja yang didanai dari APBK dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi Aceh.

Arah kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

- a. Memenuhi belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung;

- b. Memenuhi kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas;
- c. Mendukung program/kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah guna menyelesaikan permasalahan pokok daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan;
- d. Mendukung sinergi program dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- e. Memenuhi kebutuhan belanja yang diwajibkan berdasarkan sumber penerimaannya (antara lain: DAK, DBHCHT, DBH Pajak Rokok, Dana Kapitasi JKN, BLUD RSUD, Bantuan Keuangan Provinsi).
- f. Melanjutkan dukungan terhadap program Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- g. Memenuhi kewajiban belanja dana transfer ke desa dalam bentuk bantuan keuangan maupun dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa.
- h. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait penataan kewenangan pemerintah, dan penyesuaian regulasi daerah.
- i. Merencanakan alokasi belanja tidak langsung untuk hibah dan belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang, belanja bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga, berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta disesuaikan dengan ketersediaan dana dan pemenuhan prioritas kebutuhan belanja langsung.
- j. Merencanakan belanja langsung yang dapat memiliki daya ungkit untuk menggerakkan perekonomian daerah seperti belanja modal infrastruktur serta belanja barang dan jasa.
- k. Meningkatkan konsistensi tahapan perencanaan dari awal disusunnya prioritas program dalam RKPK.
- l. Meningkatkan kualitas belanja baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan dengan menekan belanja:
  - 1) Honorarium kepanitiaan kegiatan, pembentukan Tim yang bersifat kepanitiaan hanya untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas sektoral, atau dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Sewa gedung dan kendaraan, dengan memanfaatkan aset yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan kemanfaatan dan prioritas kebutuhan, sewa hanya boleh dilakukan apabila gedung pemerintah daerah dan

- kendaraan yang tersedia tidak mampu memenuhi kriteria yang dibutuhkan;
- 3) Perjalanan dinas ke luar daerah, kegiatan perjalanan dinas luar daerah ditekankan untuk menghasilkan masukan bagi rumusan kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dengan tetap membatasi volume dan jumlah peserta;
  - 4) Belanja modal untuk pengadaan peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor, pengadaan barang modal dimaksud harus memperhatikan rencana kebutuhan barang unit kerja, dan ketersediaan barang tersebut di Perangkat Daerah. Dihindari penganggaran belanja modal yang tidak memberikan kontribusi optimal untuk penyelesaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

**Tabel 3.12**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

NO	URAIAN	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>2</b>	<b>BELA JA DAERAH</b>	<b>1.551.869.740.688,23</b>	<b>1.353.297.346.416,43</b>	<b>1.533.208.674.523,00</b>	<b>-0,40</b>
<b>2,1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>828.609.529.489,00</b>	<b>824.517.292.464,00</b>	<b>870.802.215.693,00</b>	<b>1,67</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	533.435.179.893,00	523.936.973.598,00	562.444.808.097,00	1,78
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	857.162.000,00	82.500.000,00	675.000.000,00	-7,65
2.1.3	Belanja Hibah	17.465.392.188,00	39.830.941.397,00	10.045.400.000,00	-16,84
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	9.852.670.000,00	10.282.082.000,00	21.451.500.000,00	29,61
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.024.093.234,00	1.194.966.217,00	2.028.178.669,00	0,07
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	262.950.011.719,00	247.202.060.252,00	271.657.328.927,00	1,09
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	2.025.020.455,00	1.987.769.000,00	2.500.000.000,00	7,28
<b>2,2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>723.260.211.199,23</b>	<b>528.780.053.952,43</b>	<b>662.406.458.830,00</b>	<b>-2,89</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	41.172.117.837,00	38.594.670.022,00	45.221.136.250,00	3,18

NO	URAIAN	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292.136.278.874,23	260.353.357.118,43	344.100.407.783,00	5,61
2.2.3	Belanja Modal	389.951.814.488,00	229.832.026.812,00	273.084.914.797,00	-11,20

### C. Rata-rata Pertumbuhan Harta dan Kewajiban Daerah

Untuk mengetahui Pertumbuhan Harta dan Kewajiban Daerah dapat dilihat pada tabel Tabel 3.11 sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah**

Uraian	TA 2017	TA 2018	TA 2019	Rat-rata Pertumbuhan
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di kas Daerah	985.200.355,79	15.217.869.798,84	2.296.325.144,37	0,326
Kas di BLUD	10.374.288,48	20.854.079,48	4.164.948.787,10	6,377
Kas di FKTP	211.414.706,47	417.252.592,26	98.589.410,26	-0,225
Kas di Bendahara BOS	-	3.502.547.065,65	372.922.947,65	-0,674
Kas di Bendahara pengeluaran	-	114.967.000,00	-	0,100
kas di Bendahara Penerimaan	23.800.000,00	12.906.500,00	13.544.000,00	-0,171
Kas lainnya di bendahara Pengeluaran	170.110.963,00	-	645.060.950,00	0,559
Setara kas	37.000.000.000,00	25.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-0,353
Investasi Jangka Pendek	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,357
Piutang pajak	3.998.290.460,00	4.207.349.227,00	4.960.980.301,00	0,075
Penyisihan Piutang Pajak	(3.048.957.949,83)	(3.345.242.332,44)	(3.617.250.312,26)	0,059
Piutang Pajak Netto	949.332.510,17	862.106.894,56	1.343.729.988,74	0,123
Piutang Retribusi	3.208.021.241,86	3.347.727.880,43	3.428.743.650,06	0,022
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.232.084.990,94)	(1.960.967.076,73)	(2.366.179.710,58)	0,243
Piutang Retribusi Netto	1.975.936.250,92	1.386.760.803,70	1.062.563.939,48	-0,187
Piutang Lain-lain PAD yang sah	31.529.900.520,01	27.613.721.213,20	9.769.229.067,12	-0,323
Penyisihan piutang Lain-lain yang sah	(13.980.500,00)	(13.777.640,00)	(14.063.680,00)	0,002
Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto	31.515.920.020,01	27.599.943.573,20	9.755.165.387,12	-0,324
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak	3.958.339.931,55	11.206.745.211,99	9.527.652.922,00	0,340

Uraian		TA 2017	TA 2018	TA 2019	Rat-rata Pertum- buan
	Daerah				
	Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	0,000
	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Netto	3.958.339.931,55	11.206.745.211,99	9.527.652.922,00	0,340
	Belanja dibayar dimuka	95.814.596,94	147.074.781,08	116.457.828,63	0,067
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	10.520.000,00	10.520.000,00	10.520.000,00	0,000
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	14.959.375,39	14.959.375,39	13.459.375,39	-0,035
	Piutang pendapatan bagi hasil dari provinsi	-	-	-	0,000
	Piutang Lainnya	-	-	-	0,000
	Penyisihan Piutang lainnya	-	-	-	0,000
	Piutang Lainnya Netto	25.479.375,39	25.479.375,39	23.979.375,39	-0,020
	Persediaan	15.426.452.464,00	16.369.487.232,00	16.840.242.112,00	0,030
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>94.348.175.462,72</b>	<b>106.883.994.999,15</b>	<b>61.261.182.792,74</b>	<b>-0,134</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
	Investasi Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000	25.000.000.000	0,000
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>Jumlah Investasi jangka panjang</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>ASET TETAP</b>					
	Tanah	463.814.108.503,76	458.198.899.385,76	459.734.488.685,76	-0,003
	Peralatan dan Mesin	330.550.589.421,00	348.171.471.233,00	443.560.818.467,00	0,103
	Gedung dan Bangunan	797.082.609.912,99	917.439.613.493,99	1.001.956.470.897,00	0,079
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.382.846.334.200,06	1.503.794.043.287,06	1.621.178.334.856,06	0,054
	Aset Tetap Lainnya	30.010.593.591,00	32.083.463.930,00	42.224.287.769,00	0,121
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	117.126.941.034,00	47.215.422.700,00	52.141.434.406,00	-0,236
	Akumulasi Penyusutan	(875.412.656.648,40)	(988.259.040.068,00)	(1.113.756.003.286,00)	0,084
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>2.246.018.520.014,41</b>	<b>2.318.643.873.961,81</b>	<b>2.507.039.831.794,82</b>	<b>0,037</b>
<b>ASET LAINNYA</b>					
	Tagihan Penjualan Angsuran	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,000
	Tuntutan Perbendaharaan			-	
	Tuntutan Ganti Rugi	20.296.300,00	15.296.300,00	11.796.300,00	-0,165
	Aset Tak Berwujud	1.162.959.900,00	1.162.959.900,00	1.572.999.900,00	0,106
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(388.948.170,00)	(490.595.090,00)	(613.038.110,00)	0,164

Uraian		TA 2017	TA 2018	TA 2019	Rat-rata Pertum- buhan
	Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto				
	Aset Tak Berwujud Netto	774.011.730,00	672.364.810,00	959.961.790,00	0,074
	Aset Lain-lainya	191.306.066.316,13	207.258.328.103,13	33.814.903.375,00	-0,439
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(35.947.730.784,00)	(4.685.068.117,00)	#DIV/0!
	Aset Lain-lainya Netto		171.310.597.319,13	29.129.835.258,00	#DIV/0!
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>192.102.374.346,13</b>	<b>172.000.258.429,13</b>	<b>30.103.593.348,00</b>	<b>-0,461</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.557.469.069.823,26</b>	<b>2.622.528.127.390,09</b>	<b>2.623.404.607.935,56</b>	<b>0,009</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0	5.183.750,00	0,100
	Utang kepada Pihak Ketiga		0	0	0,000
	Kewajiban pada Pihak Lain		0	0	0,000
	Pendapatan Diterima Dimuka	300.471.360,00	284.128.601,97	258.655.523,78	-0,049
	Utang Belanja		0	0	0,000
	Utang Beban	29.962.583.416,00	20.437.570.811,00	15.043.647.849,00	-0,205
	Utang jangka Pendek lainnya	15.507.453.013,06	9.742.678.932,06	1.395.205.293,06	-0,552
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>45.770.507.789,06</b>	<b>30.464.378.345,03</b>	<b>16.702.692.415,84</b>	<b>-0,285</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
	Utang Dalam Negeri	-	-	-	0,000
	Utang jangka panjang lainnya	-	-	-	0,000
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>45.770.507.789,06</b>	<b>30.464.378.345,03</b>	<b>16.702.692.415,84</b>	<b>-0,285</b>
<b>EKUITAS DANA</b>					
<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>					
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-
	Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-
	Cadangan Piutang	-	-	-	-
	Cadangan Persediaan	-	-	-	-
	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-

Uraian		TA 2017	TA 2018	TA 2019	Rat-rata Pertum buan
	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran utang Jangka Pendek	-	-	-	-
	Diinvestasikan dalam investasi jangka pendek	-	-	-	-
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	-	-	-	-
	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>				
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	-	-	-	-
	Diinvestasikan dalam aset tetap	-	-	-	-
	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	-	-	-
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	-	-	-	-
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	-	-	-	-
	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>				
	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-	-	-
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2.511.698.562.034,20</b>	<b>2.592.063.749.045,06</b>	<b>2.606.701.915.519,72</b>	<b>0,012</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>2.557.469.069.823,26</b>	<b>2.622.528.127.390,09</b>	<b>2.623.404.607.935,56</b>	<b>0,009</b>

**Sumber: Pengolahan Data Keuangan Tahun 2020**

### 3.2.1.3. Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun Rencana

Sumber pendapatan daerah mencakup: pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Metode perhitungan pendapatan (PAD) dalam RKPD pada prinsipnya sama dengan perhitungan yang ada di RPJMD, namun disesuaikan dengan kondisi riil daerah dengan mempertimbangkan indikator makro ekonomi daerah tahun rencana sebagaimana yang telah dianalisis sebelumnya.

Analisis pendapatan daerah dilakukan melalui tahapan:

1) Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Akan tetapi, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, daerah harus dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan anggaran pendapatan dan belanjanya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama mendominasi unsur Pendapatan Asli Daerah.

Agar ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah berlangsung wajar dan tidak mengakibatkan distorsi terhadap sektor-sektor ekonomi daerah, maka proporsi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pertumbuhan laba Badan Usaha Milik Daerah dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah, tetapi akan dilakukan dengan sangat cermat dan melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

- a. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
- b. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan dukungan data dalam rangka optimalisasi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
- c. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah;
- d. Optimalisasi sumber-sumber PAD melalui pendataan, analisis dan perhitungan;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;
- f. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan, dan sosialisasi kepada wajib pajak;
- g. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan dan penatausahaan pendapatan daerah;
- h. Melaksanakan kajian potensi pendapatan daerah dan melakukan peninjauan kembali berbagai kebijakan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;
- i. Meningkatkan dukungan operasional pemungutan pajak dan retribusi, dengan menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Untuk mengetahui kebijakan keuangan daerah perlu dilakukan analisis sumber pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan, sesuai tabel dibawah ini:

**Tabel 3.14**  
**Presentase Sumber Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Aceh Selatan**

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN DAERAH			

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
<b>1,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>15,50</b>	<b>11,15</b>	<b>9,89</b>
1.1.1	Pajak Daerah	10,05	7,60	7,25
1.1.2	Retribusi Daerah	6,62	6,02	6,39
1.1.3	Hasil Pengelolaankekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,83	4,09	4,37
1.1.4	Zakat	4,52	3,92	5,11
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	74,98	78,37	76,87
<b>1,2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>34,44</b>	<b>70,86</b>	<b>64,63</b>
1.2.1	Transfer umum	5,18	67,34	69,66
1.2.4	Tranfer Khusus	94,82	32,66	30,34
<b>1,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>50,06</b>	<b>17,99</b>	<b>25,48</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,0002	-	6,63
1.3.2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.	6,48	11,76	8,31
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54,65	88,24	53,16
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38,88	-	31,90

Sumber : **BPKD Tahun 2020**

## 2) Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Selanjutnya dilakukan analisis kinerja pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Analisis dilakukan dengan mengisi tabel kinerja realisasi pendapatan dibawah ini.

**Tabel 3.15**  
**Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 s.d 2019**

Uraian		2017	2018	2019
<b>PENDAPATAN</b>		<b>98,32 UT</b>	<b>98,06 UT</b>	<b>96,69 UT</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>93,41 UT</b>	<b>91,69 UT</b>	<b>94,18 UT</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	110,69 OT	109,21 OT	109,27 OT
	Hasil Retribusi Daerah	125,24 OT	98,55 UT	97,87 UT
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100,00 E	119,49 UT	100,00 UT
	Zakat	96,43 UT	90,27 UT	89,71 UT
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89,07 UT	88,82 UT	92,21 UT
<b>DANA PERIMBANGAN</b>		<b>98,09 UT</b>	<b>98,85 UT</b>	<b>95,90 UT</b>
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			
	Dana Alokasi Umum (Transfer Umum )	99,79 UT	99,65 UT	98,52 UT
	Dana Alokasi Khusus (Transfer Khusus)	94,55 UT	97,25 UT	89,87 UT
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>100,43 OT</b>	<b>99,21 UT</b>	<b>99,67 UT</b>
	Pendapatan Hibah	7,50 UT	-	95,48 UT
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107,04 OT	95,59 UT	99,68 UT
	Dana Penyesuaian	100,00 E	100,00 E	100,00 E
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	100,00 E		100,00 E

Sumber : **BPKD Tahun 2020**

### 3) Analisis proyeksi pendapatan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan perhitungan kapasitas pendapatan daerah tahun rencana. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
- Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain)

- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, khususnya untuk masing-masing komponen PAD.
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Proyeksi Pendapatan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021**

NO	URAIAN	TAHUN
		Proyeksi 2021
<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.537.357.290.000,00</b>
<b>1,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>133.284.159.000,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	12.379.695.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	10.362.069.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaankekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.825.000.000,00
1.1.4	Zakat	7.350.000.000,00
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	96.367.395.000,00
<b>1,2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>970.233.302.000,00</b>
1.2.1	Transfer umum	735.855.629.000,00
1.2.4	Tranfer Khusus	234.377.673.000,00
<b>1,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>433.839.829.000,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	26.650.512.000,00
1.3.2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.	37.241.134.000,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	229.464.025.000,00
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	140.484.158.000,00

**Sumber : Pengolahan Data Tahun 2020.**

## 4) Analisis proyeksi Belanja daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah belanja daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasarnya sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen belanja daerah mencakup sebagaimana tersajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.17**  
**Proyeksi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021**

NO	URAIAN	TAHUN
		Proyeksi 2021
1	2	
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,557,057,290,000.00</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>927,628,058,500.00</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	593,145,147,000.00
2.1.2	Belanja Bunga	
2.1.3	Belanja Subsidi	
2.1.3	Belanja Hibah	16,732,612,500.00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	20,140,225,000.00
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,220,030,000.00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	290,470,044,000.00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	4,920,000,000.00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>629,429,231,500.00</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	50,300,000,000.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	348,000,000,000.00
2.2.3	Belanja Modal	231,129,231,500.00

## 5) Analisis penerimaan pembiayaan daerah

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan pembiayaan daerah tahun rencana. Metode perhitungan yang digunakan pada dasarnya sama dengan yang di RPJMD. Yang perlu dilakukan adalah menghitung kembali dan melakukan penyesuaian dengan kondisi tahun rencana. Komponen penerimaan pembiayaan daerah mencakup sebagaimana tersajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.18**  
**Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi Tahun 2021 (Rp)</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25,000,000,000.00
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	
2	Pencairan Dana Cadangan	
2.1	Pencairan Dana Cadangan	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
3.1	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
4.1	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
4.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
4.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
5.1	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	
6	Penerimaan Piutang Daerah	
6.1	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.2	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.3	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.4	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	
6.5	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	

**Sumber : Pengolahan Data Tahun 2020.**

Hasil analisis proyeksi pendapatan RKPD tahun rencana secara keseluruhan kemudian dibandingkan dengan proyeksi pendapatan tahun rencana di RPJMD. Dari perbandingan tersebut akan diketahui selisihnya, apakah terjadi penambahan/pengurangan. Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.19**

## Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kabupaten Aceh Selatan

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana 2021 (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
-1	-2	-3	-4	-6	-7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.791.412.226.200,78</b>	<b>1.537.357.290.000,00</b>	<b>(70.028.302.391,28)</b>	<b>Berkurang</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>182.024.589.493,58</b>	<b>133.284.159.000,00</b>	<b>(48.740.430.493,58)</b>	<b>Bertambah</b>
	Pajak Daerah	12.809.083.585,51	12.379.695.000,00	(429.388.585,51)	Bertambah
	Retribusi Daerah	11.287.707.188,01	10.362.069.000,00	(925.638.188,01)	Bertambah
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	7.722.650.000,00	6.825.000.000,00	(897.650.000,00)	Berkurang
	Zakat	9.027.183.800,00	7.350.000.000,00	(1.677.183.800,00)	Bertambah
	Lain-Lain PAD yang sah	141.177.964.920,06	96.367.395.000,00	(44.810.569.920,06)	Bertambah
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.154.259.935.809,50</b>	<b>970.233.302.000,00</b>		<b>Berkurang</b>
	Transfer umum	804.033.551.247,40	735.855.629.000,00	(68.177.922.247,40)	Berkurang
	Transfer Khusus	350.226.384.562,10	234.377.673.000,00	(115.848.711.562,10)	Berkurang
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>455.127.700.897,70</b>	<b>433.839.829.000,00</b>	<b>(21.287.871.897,70)</b>	<b>Berkurang</b>
	Hibah	30.155.688.864,00	26.650.512.000,00	(3.505.176.864,00)	Berkurang
	Dana Darurat				
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	37.803.392.365,92	37.241.134.000,00	(562.258.365,92)	Berkurang
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	241.961.200.966,20	229.464.025.000,00	(12.497.175.966,20)	Berkurang
	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	145.207.418.701,58	140.484.158.000,00	(4.723.260.701,58)	Berkurang
	Total Pendapatan (a)				
<b>2</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
	Pencairan Dana Cadangan				
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan				
	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	Pengembalian Utang				
	Penerimaan Piutang				
	Jumlah (b)				
<b>3</b>	<b>Proyeksi Silpa Riil</b>	<b>35.643.000.000,00</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>(10.643.000.000,00)</b>	<b>Berkurang</b>
	Saldo kas neraca daerah				
	Dikurangi:				

No	Uraian	Proyeksi RPJMD tahun rencana 2021 (Rp)	Proyeksi RKPD tahun rencana (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan				
	Kegiatan lanjutan				
	Jumlah (c)				
	<b>Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (1) + (2) + (3)</b>	<b>1.827.055.226.200,78</b>	<b>1.562.357.290.000,00</b>	<b>(80.671.302.391,28)</b>	<b>Berkurang-</b>

**Sumber : Pengolahan Data 2020**

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini secara substantif akan mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMK, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Selanjutnya, pembahasannya akan dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu: (1) tujuan dan sasaran pembangunan; (2) Prioritas dan sasaran pembangunan; (3) Pembangunan kewilayahan; dan (4) Pokok-pokok pikiran DPRD.

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **4.1.1. Visi RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023**

RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023, untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

#### **“TERWUJUDNYA ACEH SELATAN YANG BERKEADILAN SECARA SOSIAL DAN EKONOMI”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Aceh Selatan yang berkeadilan secara sosial** menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Aceh Selatan dalam berbagai sendi kehidupan.

**Aceh Selatan yang berkeadilan secara ekonomi** bermakna rakyat Aceh Selatan memiliki akses yang sangat mudah terhadap pengembangan sumber-sumber produksi masyarakat dalam rangka menjadikan rakyat Aceh Selatan berdaya secara ekonomi.

#### **4.1.2. Misi RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023**

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan 2018-2023 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

##### ***Misi 1 : Mewujudkan nilai-nilai Syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat***

Misi ini diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan khususnya aspek Keagamaan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rohani masyarakat sehingga mampu membentuk SDM yang sehat secara psikologi dan akal budi. Pembangunan yang dilakukan mampu untuk menguatkan jati diri dan karakter masyarakat Aceh Selatan melalui kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, sosial budaya yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dan memiliki kebanggaan sebagai warga Aceh Selatan dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan daerah berlandaskan Syariat Islam.

##### ***Misi 2 : Membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional***

Adalah upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk membangun sumber daya manusia khususnya Generasi Muda yang berkualitas dan berdaya saing disegala bidang melalui human investment sebagai pilar pokok pembangunan daerah. Upaya tersebut sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan generasi muda Kabupaten Aceh Selatan dan masyarakat Aceh Selatan seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan manusia. Sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia.

**Misi 3 : Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan sosial secara terintegrasi**

Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan dapat ditingkatkan.

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pemberian beasiswa, Asuransi dan kemandirian masyarakat untuk berusaha, pensertifikatan lahan pekarangan dan pertanian masyarakat kurang mampu.

**Misi 4 : Penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien**

Misi ini untuk meningkatkan Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang baik senantiasa menggunakan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang profesional.

**Misi 5 : Penyederhanaan system pelayanan birokrasi pemerintahan**

Misi untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang profesional dijelaskan secara lebih rinci adalah meningkatkan kualitas aparatur daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk perwujudan *good governance*, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan pelaksanaan kerjasama ekonomi antar daerah dan investasi bagi pembangunan di daerah.

**Misi 6 : Penyediaan infrastruktur dan penunjang secara merata dan berkeadilan**

Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung pembangunan berbagai sektor di daerah, sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Aceh Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang adil dan merata juga sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.

**Misi 7 : Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa**

Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa sektor, seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, industri, pariwisata, koperasi dan UKM serta investasi dan modal.

Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan diarahkan untuk mendorong potensi perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Pada kondisi eksisting, perdagangan dan jasa merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Selatan. Meskipun demikian pada kondisi eksisting pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal.

Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi di suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan mengenai stabilitas harga barang perlu dilakukan. Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, regulasi terkait perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.

Untuk sektor industri, pengembangan diarahkan pada optimalisasi pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata eksisting. Upaya- upaya

yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan competitive advantage sektor ekonomi Kabupaten Aceh Selatan antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi pemasaran objek wisata.

**Misi 8 : Penguatan basis produksi masyarakat dan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan**

Adalah meningkatnya pembangunan sektor pertanian; perikanan dan kelautan; peternakan; perkebunan rakyat termasuk peningkatan kerjasama antara perkebunan inti dan plasma; berkurangnya lahan kritis; terbangunnya hutan kota serta terpeliharanya terumbu karang dan keanekaragaman hayati, flora dan fauna, serta termanfaatkannya sumberdaya kelautan dan sumberdaya alam yang terbaharukan secara bijaksana dan berkelanjutan; meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pertanian dalam arti luas, menata dan membangun sarana dan prasarana pengolahan pasca produksi pertanian dan kelautan.

**Misi 9 : Mewujudkan terbangunnya sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif dan produktif**

Adalah meningkatnya pembangunan sektor pertanian; perikanan dan kelautan; peternakan; perkebunan rakyat termasuk peningkatan kerjasama antara perkebunan inti dan plasma; berkurangnya lahan kritis; terbangunnya hutan kota serta terpeliharanya terumbu karang dan keanekaragaman hayati, flora dan fauna, serta termanfaatkannya sumberdaya kelautan dan sumberdaya alam yang terbaharukan secara bijaksana dan berkelanjutan; meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pertanian dalam arti luas, menata dan membangun sarana dan prasarana pengolahan pasca produksi pertanian dan kelautan.

**Misi 10 : Pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan

berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Aceh Selatan. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Aceh Selatan dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

#### **4.1.3. Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023**

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) Tahun. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sehingga, dalam rangka pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 harus didukung oleh tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan hingga sasaran (beserta indikatornya) tersebut saling terhubung secara hirarkis sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.1. Sedangkan keterkaitan keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD ditunjukkan pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**  
**Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 pada**  
**Perencanaan Tahun 2021**

Kode	Visi & Misi	Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMK	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMK
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Visi : Terwujudnya Aceh Selatan yang Bekeadilan Secara Sosial dan Ekonomi</b>											
<b>Misi 1 : Mewujudkan Nilai-Nilai Syari'at Islam dan Budaya Dalam Sendi-Sendi Kehidupan Bermasyarakat</b>											
1.1.		Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	Indek Pembangunan Syariat Islam	Indek	N/A	45	50	55	60	75	75
1.1.1.		Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al- Qur'an dan Al-Hadist	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	81	101	121	141	161	181	705

1.1.2.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dayah dan Kesejahteraan Dayah	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi Dayah	%	20	30	40	50	60	70	70
		Persentase Dayah dengan Program Tahfiz Alqur'an	%	0	2.33	6.98	11.63	16.28	20.93	20.93
1.1.3.	Menguatnya penegakan Dinul Islam dalam bermasyarakat	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang	180	22	36	36	36	36	166
		Persentase mesjid yang melaksanakan shalat lima waktu	%	60	65	67	70	72	75	75
		Jumlah ASN yang berprestasi dalam MTQ Korpri tingkat Kabupaten	Orang	16	16	18	18	20	20	92

			Jumlah ASN yang berprestasi dalam MTQ Korpri Tingkat Provinsi	Orang	4	4	6	6	8	8	8
			Jumlah ASN yang berprestasi dalam MTQ Korpri Tingkat Nasional	Orang	1	1	3	3	5	5	5
			Status BLUD Rumah Sakit Syariah	Jumlah	0	0	1	1	1	1	1
1.1.4		Meningkatnya prasarana dan sarana keagamaan dan budaya berbasis Islami	Rasio Jumlah Masjid per jumlah penduduk	%	1.177	1.1339	1.1561	1.1412	1.1388	1.1485	1.1485
			Rasio Jumlah Mushola per jumlah penduduk	%	2.2671	2.1841	2.1966	2.1682	2.1005	2.0745	2.0745

1.1.5		Menguatnya tatanan adat istiadat dan seni budaya yang Islami	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	30.15	34.92	39.68	42.86	47.62	50.79	51
<b>Misi 2 : Membangun Generasi Muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat Nasional</b>											
2.1.		Meningkatkan SDM Aceh Selatan yang memiliki daya saing	Angka melek huruf	Persen	98.37	98.64	99.18	99.45	99.72	99.72	99.72
			Angka Rata-rata lama Sekolah	Persen	8.18	8.2	8.22	8.24	8.26	8.28	8.28
2.1.1.		Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI	Persen	103.24	102.7	102.16	101.62	101.08	100	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs	Persen	92.93	94.12	94.41	94.56	94.94	95.21	95.21
			Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) SD/ MI	Persen	31.14	32.95	34.76	36.57	38.38	40.19	40.19

			Angka Pendidikan yang diamati (APT) SLTP/ MTs	Persen	17.66	19.47	21.28	23.09	24.9	26.71	26.71
			Angka Partisipasi Murni (APM)SD/ MI	Persen	97.96	98.19	98.4	98.55	98.72	98.86	98.86
			Angka Partisipasi Murni (APM)SLTP/ MTs	Persen	78	78.23	78.44	78.59	78.76	78.9	78.9
			Angka Anak Usia Dini (PAUD)	%	53.37	69.73	71.65	73.52	75.35	77.14	77.14
2.1.2		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	74.32	79.97	85.62	100	100	100	100
			Jenjang TK/ Paud	Persen	74.32	79.97	85.62	100	100	100	100
			Jenjang SD/ MI	Persen	87.64	93.29	98.94	100	100	100	100
			Jenjang SMP/ MTs	Persen	92.12	97.77	100	100	100	100	100

			Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) jenjang SD/MI	Persen		51.23	55.23	59.23	63.23	67.23	67.23
			Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) jenjang SMP/MTs	Persen		53.12	57.12	61.12	65.12	69.12	69.12
2.1.3		Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	7,031	7,695	7,849	8,634	8,893	9,160	34,535
			Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Eks	26,815	26,815	27,619	28,448	29,301	30,181	115,549
			Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	7,278	7,278	7,496	7,721	7,953	8,191	31,362

2.2		Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat Provinsi dan nasional									
2.2.1		Terwujudnya pemuda dan mahasiswa yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga	Jumlah data pemuda umur (16-30)	Orang	63,000	64,260	65,545	66,856	68,193	69,557	70,948
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	9.9	18.09	26.28	34.47	42.66	50.85	
			Persentase wirausaha muda	Orang	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Kasus Narkoba	Kasus	17	16	14	12	9	7	7
			Cakupan pembinaan Wasit	%	50		60	65	70	75	75

			Cakupan pembinaan pelatih	%	90.91		90.91	100	100	100	100
			Jumlah lapangan olahraga	Unit	377	377	377	387	387	397	397
			Jumlah gedung olahraga	Unit	1	1	1	2	2	3	3
			Jumlah Gelanggaang balai remaja	Unit	1	1	1	2	2	3	3
			Jumlah atlet berprestasi	%	24	24	26	28	30	32	32
			Cakupan pembinaan atlet muda	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Misi 3 : Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan sosial secara terintegrasi</b>											
3.1.		Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Angka Harapan Hidup	Tahun	63,89	64.04	64.18	64.33	64.48	64.63	64.63

3.1.1.		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	12,9/1000 KH	12/1000 KH	11,5/1000 KH	11/1000 KH	10,5/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH
			Angka Kelangsungan Hidup Bayi	1 – AKB	987,1	988	988,5	989	989,5	990	990
			Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	12,5/100 KH	12/1000 KH	11,5/1000 KH	11/1000 KH	10,5/1000 KH	10/1000 KH	9,5/1000 KH
			Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	6,4/1000 KH	6,2/1000 KH	6/1000 KH	5,7/1000 KH	5,6/1000 KH	5,3/1000 KH	5/1000 KH
			Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup	Per 100,000 Kelahiran Hidup	76,7/100,000 KH	76/100,000 KH	70/100,000 KH	67/100,000 KH	65/100,000 KH	62/100,000 KH	60/100,000 KH

3.1.2	Mengoptimalkan Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta Pengkajian Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga Sehat	Rasio Posyandu Persatuan Balita	Per 1000 Balita	0,017	0,018	0,019	0,019	0,019	0,02	0,02
3.1.3	Meningkatnya upaya pengendalian dan pencegahan penyakit menular Prioritas (eradikasi, eliminasi)	Cakupan desa/Gampong/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	70,16	72	74	76	78	80	80
		Presentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	3042	3050	3060	3080	3090	3100	3100

			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
			Penderita Diare yang Ditangani	%	42,9	60	75	85	90	100	100
3.1.4		Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan Puskesmas	%	0.1112	11,12%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%
			Cakupan Puskesmas Pembantu	%	2,4	4	6	8	9	10	10
			Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	%	6,8	7,5	8	9	10	11	11

3.2		Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan Rujukan	Rasio RS persatuan penduduk	%	0.00434	0.00418	0.00413	0.00408	0.00402	0.00397	0.00397
3.2.1		Terwujudnya pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away yang bermutu, Islami dan terjangkau kepada Masyarakat	Cakupan Pelayanan Islami	%		80	80	80	80	80	80
			Tingkat Kepuasan	%	80	85	86.5	88	89.5	90	90
			BOR (Persentase pemakaian tempat tidur)	%	71	73	75	77	80	80	80
			ALOS (Jumlah hari lama rawat)	Hari	3	4	4	4	4	4	4
			BTO (Angka perputaran tempat tidur)	Kali	64	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50
			TOI (Jumlah tempat tidak ditempati)	Hari	1.6	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3

			NDR (Angka kematian 48 Jam)	Per 1000	56	20	18	16	15	10	10
			GDR (Angka kematian umum)	Per 1000	134	45	40	35	30	25	25
3.2.2		Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Fungsionalnya RS Regional BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan	Jumlah RS		1	1	1	1	1	1
3.3		Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Kabupaten Layak Anak	Belum KLA/KLA	Belum KLA	Belum KLA	KLA	KLA	KLA	KLA	KLA

3.3.1		Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan anak	Cakupan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan public	%	5.9	20,0	17.6	20,0	20,0	20,0	30
3.3.2		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase perempuan dalam bidang politik yang di latih	%		60	60	60	60	60	60
3.4		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Indek Kualitas Hidup PKMS	Indeks	N/A	0.44	0.47	0.57	0.62	0.65	0.65
3.4.1		Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	%	34.68	37.63					

3.4.2		Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	%	5	5	20	40	60	80	80
			Persentase Peningkatan Kesadaran Sosial Masyarakat	%	0.5	1	10	20	35	50	50
3.4.3		Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	%	65	100	100	100	100	100	100
3.4.4		Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Orang	230.254	238997	242196	245361	248507	251630	251630
<b>Misi 4 : Penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien</b>											

4.1.		Penguatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)									
4.1.1		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan public	Ketersediaan dokumen-dokumen penelitian	Ada/Tidak	Ada						
4.2.		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Stake Holders dalam Perencanaan Pembangunan									

4.2.1.		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RPKP	%	60	70	80	85	90	100	100
4.2.2.		Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Persentase hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBK	%	15	18	20	25	30	35	35
<b>Misi 5 : Penyederhanaan sistem pelayanan birokrasi pemerintahan</b>											
5.1.		Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas									
5.1.1.		Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Temuan BPK	Rekomendasi BPK	196	183	170	157	144	131	131
			Opini Audit BPK Atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP						

			Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan internal Pemerintah	Level	2	3	3	3	3	4	4
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Cc	Cc	CC	B	B	B	B
			Tingkat maturitas SPIP	Level	2	2	3	3	3	4	4
			Nilai SAKIP		C	B	B	B	B	BB	BB
			Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRK	Ada/ Tidak	Ada						

			Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen lima tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak	Ada						
--	--	--	--	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

			Terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRK	Ada/Tidak	Ada						
5.1.2		Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	48.19	60.74	62.34	63.99	65.69	67.44	67.44
			Jumlah ASN								
5.1.3		Meningkatnya akses pelayanan administrasi kependudukan	Rasio Penduduk yang ber-KTP per satuan penduduk	%	0.09	0.93	0.96	0.98	0.99	0.99	0.99

			Rasio bayi berakte kelahiran	%	8.5	85	87	88	95	95	95
			Raio pasangan yang berakte nikah	%	0.3	32	34	36	38	38	38
			Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	Ada						
			Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	86	92	96	99	99	99	99
			Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)	%	90	93	96	98	99	99	99
			Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	65	70	75	80	85	85	85
			Kartu Identitas Anak (KIA)	%		20	60	80	90	90	90

5.2		Mewujudkan anggota Korpri yang berkualitas	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
5.2.1		Terwujudnya kualitas SDM anggota Kopri yang bersih dan berwibawa	Terlaksananya Pendidikan Tenaga Kader Anggota Korpri	%	100		100	100	100	100	100
<b>Misi 6 : Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan</b>											
6.1.		Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	62.5	4.4					35.7
6.1.1.		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Pesentase Panjang Jalan Terbangun	%	89.22	0.15	1.59	1.91	2.29	2.75	8.69
			Pesentase Panjang Jembatan Terbangun	%	59.65	1.19	8.14	8.95	9.85	10.83	38.96

6.1.2.	Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	62.5	4.4	5.5	7.2	8.6	10	35.7
6.1.3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan sanitasi	Persentase Rumah Layak Huni Terbangun	%	56.43	0.65	0.71	0.78	0.86	0.94	60.37
		Persentase Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Terbangun	%	45.45	60	66	72.6	79.86	87.85	73.26
		Persentase Rumah Tersambung Jaringan Listrik	%	88.89	3.4	3.74	4.11	4.52	4.98	93.04
		Persentase Masyarakat yang belum memiliki Sarana Air Bersih	%	46.67	11.75	12.93	14.22	15.64	17.21	61.02

			Persentase Masyarakat yang belum memiliki Sarana Sanitasi	%	34.11	1.99	2.19	2.41	2.65	2.92	36.54
			Persentase Panjang Saluran Terbangun	%	49.78	33.48	36.83	40.51	44.56	49.02	83.96
			Persentase Masyarakat Miskin yang belum memiliki Sarana Sanitasi	%	40	45	60	66	72.6	79.86	64.69
6.1.4.		Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air	Persentase Masyarakat yang belum memiliki Sarana Air Bersih	%	46.67	11.75	12.93	14.22	15.64	17.21	61.02
			Persentase Masyarakat yang belum memiliki Sarana Sanitasi	%	34.11	1.99	2.19	2.41	2.65	2.92	36.54

6.2.		Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim yang handal dan tangguh									
6.2.1.		Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	indeks risiko bencana	Parameter	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
6.3.		Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan									
6.3.1.		Meningkatnya tingkat keselamatan, keamanan dan ketertiban transportasi	jumlah rambu lalu lintas	Unit	-	625	688	757	833	917	1.009
			jumlah kendaraan yang melakukan uji kelayakan	Unit	368	405	446	491	541	506	557

6.3.2.		Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi di bidang perhubungan	persentase kendaraan umum yang memiliki trayek	%	49,02	54,02	60,02	66,02	73,02	81,02	90,02
6.4		Meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup									
6.4.1		Meningkatnya layanan persampahan	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	7.36	7.66	7.96	8.26	8.56	8.86	8.86
6.4.2		Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Nilai kualitas baku mutu Air	Parameter	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik	Baik	Baik	Baik
			Nilai kualitas baku mutu Udara	Parameter	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik	Baik	Baik	Baik
			Persentase Luas Kawasan yang di konservasi	%	0	10	15	20	25	20	20
6.4.3		Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	7.5	8.25	9.08	9.98	10.98	12.08	12.08

<b>Misi 7 : Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa</b>											
7.1.		Menurunkan Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	14,07	13,70	13.2	12,60	12	11	11
7.1.1.		Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan (konsumsi)	%	76	78	79	80	81	82	82
7.2		Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.24	6.9	6.59	6.24	5.86	5.53	5.53
7.2.1		Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	59.7	59.88	59.96	60.04	60.11	60.17	60.17
<b>Misi 8 : Penguatan Basis Produksi Masyarakat Dalam Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan</b>											
8.1		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	3,95	3,97	4	4,2	4,5	4,5
8.1.1		Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	18,39	18,41	18.42	18,43	18,44	18,45	18,45

8.1.2		Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	%	6,58	6,58	6,58	6,60	6,62	6,64	6,64
<b>Misi 9 : Mewujudkan Terbangunya Sentra-Sentra Produksi, Industri Dan Industri Kreatif yang Kompetitif</b>											
9.1		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	3,95	3,97	4	4,2	4,5	4,5
9.1.1		Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	1.210.714.950,83	1.259.627.000	1.284.820.000	1.310.516.000	1.336.727.000	1.363.461.000	1.363.461.000
9.1.2		Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	PAD sektor pariwisata	%	0,0275	0,0275	0,0284	0,0292	0,0301	0,310	0,310
9.1.3		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	3,25	3,36	3,40	3,65	3,87	4,08	4,08
9.1.4		Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan	%	14.9	15,1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.5

9.1.5		Terbentuk dan berkembangnya kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan (transmigrasi)	Kawasan	1	-	-	1	-	-	2
9.2		Membangun Kawasan Sentra Produksi dan Industri Kreatif Berbasis Potensi Lokal									
9.2.1		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah, Masyarakat Gampong dan Dayah	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	4	6	6	4	4	6	26
<b>Misi 10 : Pembangunan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan</b>											
10.1		Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berkelanjutan									

10.1. 1		Terwujudnya kawasan ekonomi cepat tumbuh	Meningkatnya Jumlah Pasar Sehat	Jumlah Pasar	2	1	1	1	1	1	1
10.1. 2		Tumbuhnya kawasan ekonomi yang telah ada	Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan	3	3	4	4	6	7	7

**Tabel 4.2.**  
**Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023**

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	<b>MISI PERTAMA: "Mewujudkan Nilai-Nilai Syari'at Islam dan Budaya Dalam Sendi-Sendi Kehidupan Bermasyarakat"</b>				
1.1	Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat	1.1.1.	Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an dan Al-Hadist	Peningkatan kualitas masyarakat berbasis Al- Qur'an dan Al-Hadist	Penguatan pengamalan Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam kehidupan bermasyarakat (Kajian - kajian Islam)
					Penguatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)
					Pembinaan Qori dan Qoriah
					Penyelenggaraan Pendidikan Tahfizh Al Quran dan Hadist
					Pemberian Penghargaan kepada Hafiz Al-Quran
					Penyaluran Al Qur'an Waqaf
		1.1.2.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dayah dan Kesejahteraan Dayah	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah dan Kesejahteraan Dayah	Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan standarisasi pendidikan dayah

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Peningkatan Kapasitas Guru Dayah dan Life Skill Santri Dayah
					Peningkatan sarana dan prasarana Dayah dan Balai Pengajian termasuk Dayah Jamaah Sulok dengan melibatkan partisipasi masyarakat
					Meningkatkan Seni dan Budaya Santri sesuai Syariah
					Penguatan kelompok pelaku usaha Dayah
		1.1.3.	Menguatnya penegakan Dinul Islam dalam bermasyarakat	Peningkatan Dinul Islam dalam bermasyarakat	Pelaksanaan dan pembinaan hukum Syariat Islam
					Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Syariat Islam
					Menghidupkan Majelis Taklim dan pengajian selesai shalat berjamaah
					Penyelenggaraan pelayanan Isbat Nikah
					Meningkatkan aktifitas masyarakat dalam rangka baca tulis Alquran

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Pengkajian penerapan kurikulum madrasah / muatan lokal pada Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar
					Peningkatan Kualitas Keagamaan pada Anak
					Penguatan lembaga dakwah dan Majelis Pemusyawaratan Ulama
		1.1.4.	Meningkatnya prasarana dan sarana keagamaan dan berbudaya berbasis islami	Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan	Pembangunan / Rehabilitasi infrastruktur Mesjid/ Mushala pendukung budaya dan pariwisata yang islami
		1.1.5.	Menguatnya tatanan adat istiadat dan seni budaya yang Islami	Penguatan tatanan adat istiadat dan seni budaya yang Islami	Pelaksanaan kegiatan seni budaya dan adat istiadat
					Event Seni dan Budaya di Provinsi dan Nasional
					Penguatan dokumen Pokok pikiran Kebudayaan Daerah
					Inventarisir dan revitalisasi karya

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					budaya (MAA/MPU)
					Peningkatan pengelolaan cagar budaya secara terpadu dan partisipasi masyarakat
<b>MISI KEDUA: "Membangun Generasi Muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat Nasional"</b>					
2.1	Meningkatkan SDM Aceh Selatan yang memiliki daya saing	2.1.1.	Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini
					Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dasar
					Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kesetaraan / Pendidikan Non Formal
					Penyelenggaraan Program biaya siswa bagi anak berprestasi / anak kurang mampu
		2.1.2.	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
					Pendistribusian guru ke wilayah

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					perbatasan, terpencil, dan terisolir (Guru Kontrak)
					Pengkajian komprehensif Re-grouping sekolah yang minim siswa
					Penguatan manajemen pengelolaan sekolah (Monitoring Ujian Nasional -MPD)
					Fasilitasi Forum Koordinasi Pendidikan Daerah, dan Fasilitasi Kemitraan Komite Sekolah, Sekolah, Dunia Usaha dan Masyarakat
		2.1.3.	Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca	Peningkatan Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca	Peningkatan pengelolaan perpustakaan
					Promosi gemar membaca, Penyelenggaraan lomba menulis karya ilmiah atau fiksi
2.2	Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan ditingkat Provinsi dan nasional	2.2.1.	Terwujudnya pemuda dan mahasiswa yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi	Mewujudkan pemuda dan mahasiswa yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga	Peningkatan pembinaan Organisasi Kepemudaan yang profesional dan mandiri

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			olah raga		
					Peningkatan pembinaan kreatifitas dan inovasi sesuai kondisi perkembangan zaman
					Peningkatan pembinaan olah raga prestasi
					Peningkatan pembinaan calon atlet olah raga prestasi
					Peningkatan Pendidikan Short Course Kewirausahaan (informal)
					Peningkatan akses beasiswa bagi mahasiswa berprestasi
<b>MISI KETIGA: "Memastikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta santunan sosial secara terintegrasi"</b>					
3.1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	3.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir, serta kunjungan dokter spesialis
					Optimalisasi Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Balita

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Optimalisasi layanan kesehatan pada penduduk usia pendidikan dasar
					Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan usia Produktif (15 s.d 59 tahun)
					Penurunan jumlah penduduk yang tergolong dalam kelompok orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
					Optimalisasi Penyelenggaraan pelayanan kesehatan orang dengan penyakit menular
					Pemenuhan kebutuhan obat untuk menunjang pelayanan kesehatan
					Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program Kesehatan
		3.1.2.	Mengoptimaliasi Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta Pengkajian, Intervensi, Monev Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga Sehat	Mengoptimalkan Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta Pengkajian, Intervensi, Monev Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga Sehat	Optimalisasi dampak promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Pengembangan lingkungan sehat
					Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
					Pelaksanaan kesehatan tradisional, kesehatan kerja dan olah raga, perawatan kesehatan masyarakat, serta Pengkajian, Intervensi, Monev Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga Sehat
					Kemitraan dengan Tim Penggerak PKK dalam rangka pembinaan posyandu dan posbindu
					Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan usia lanjut (60 tahun)
		3.1.3.	Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dilevel Pukesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan upaya akreditasi Fasilitas kesehatan	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dilevel Pukesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan upaya akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah	Peningkatan sumber daya kesehatan dan standarisasi pelayanan kesehatan

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			tingkat pertama pemerintah daerah		
		3.1.4.	Meningkat upaya pengendalian dan pencegahan penyakit menular Prioritas (eradikasi, eliminasi)	Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit menular Prioritas (eradikasi, eliminasi)	Peningkatan imunisasi, penanggulangan penyakit kusta, Penanggulangan penyakit DBD, penanggulangan penyakit malaria dan penanggulangan penyakit kecacangan dan Penanggulangan penyakit sesuai kebutuhan daerah
		3.1.5.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
3.2	Meningkatkan akses dan mutu layanan Kesehatan Rujukan	3.2.1.	Terwujudnya pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away yang bermutu, Islami dan terjangkau kepada Masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away yang bermutu, Islami dan terjangkau kepada Masyarakat	Melaksanakan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Penyediaan makanan dan minuman pasien rawat inap
					Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan, Non kesehatan serta penguatan pelayanan islami
					Melaksanakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					kesehatan, dan non kesehatan sesuai pertumbuhan dan perkembangan Rumah Sakit dengan Rekrutmen dan atau Pendidikan Lanjutan
					Manajemen mutu dengan Akreditasi, survey kepuasan, observasi perilaku petugas terhadap pelayanan islami
					Menyesuaian SOTK RSUDYA sesuai pertumbuhan dan perkembangan rumah sakit
					Pelaksanaan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat ke Unit Rawat Inap dan Rawat Jalan oleh Petugas Kesehatan dan Non Kesehatan
		3.2.2	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Fungsionalnya RS Regional BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan
3.3	Meningkatkan	3.3.1	Menurunnya kesenjangan laki-	Meningkatkan Pelaksanaan dan	Pelaksanaan sosialiasi yang terkait

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pengarusutamaan gender dalam pembangunan		laki dan perempuan dalam pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan anak	Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
					Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak, Pembentukan Kelompok Kerja PUG dan Focal Point PUG, Serta Monev PUG
		3.3.2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, Penyediaan data terpilah, sistem informasi gender
3.4	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	3.4.1	Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana.	Meningkatkan kesejahteraan PMKS dan korban bencana	Pemenuhan kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti
					Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
		3.4.2	Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS	Meningkatkan keberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran	Peningkatan Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	sosial masyarakat	(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
					Peningkatan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
					Penyaluran santunan kematian serta Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqoh
		3.4.3	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penignkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
					Penyelenggaraan Pendidikan Politik Masyarakat
					Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Penyelenggaraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
					Meningkatkan Perlindungan dan pengembangan lembaga Ketenaga kerjaan
		3.4.4	Mengoptimalkannya pengendalian	Mengoptimalkan pengendalian	Penyelenggaraan Pengaturan fertilitas melalui program keluarga

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			jumlah penduduk	jumlah penduduk	berencana, Generasi berencana
<b>MISI KEEMPAT: "Penguatan sistem perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien"</b>					
4.1	Penguatan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4.1.1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan public	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan layanan public	Meningkatkan Pengembangan Iptek Dan Inovasi Daerah
					Pengembangan Sistem Data dan Informasi Satu Data yang terintegrasi (SADARI)
4.2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Stake Holders dalam Perencanaan Pembangunan	4.2.1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program.	Meningkatkan kualitas Musrenbang Gampong, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.
		4.2.2.	Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Peningkatan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Peningkatan Kerjasama Pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>MISI KELIMA: "Penyederhanaan sistem pelayanan birokrasi pemerintahan"</b>					
5.1	Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas	5.1.1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan Kapasitas APIP serta Pengendalian Dokumen
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Daerah
					Penguatan tatakelola pemerintahan yang efisien dan cepat berbasis teknologi Informasi
		5.1.2.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas
		5.1.3	Meningkatnya akses pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan	pelayanan administrasi kependudukan dan Penyediaan Data Agregat Kependudukan
5.2	Mewujudkan anggota Korpri yang berkualitas	5.2.1	Terwujudnya kualitas SDM anggota Korpri yang bersih dan berwibawa	Meningkatkan kualitas SDM anggota Korpri yang bersih dan berwibawa	Peningkatan kualitas SDM anggota Korpri yang bersih dan berwibawa
<b>MISI KEENAM: "Penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang secara merata dan berkeadilan"</b>					
6.1	Penataan Ruang Wilayah yang Selaras	6.1.1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dan Terintegrasi				
		6.1.2.	Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Meningkatkan Meningkatkan Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Pendataan dan Inventarisasi Bangunan Ber IMB
		6.1.3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan sanitasi	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan sanitasi	Meningkatkan kualitas pemukiman layak huni dan meningkatkan aliran jaringan listrik dan sanitasi pada rumah masyarakat yang belum memiliki listrik dan sanitasi
		6.1.4.	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air	Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air	Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih
6.2	Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap Perubahan Iklim yang handal dan tangguh	6.2.1.	Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana
					Penyediaan infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
6.3	Meningkatkan pelayanan transportasi dan	6.3.1.	Meningkatnya tingkat keselamatan, keamanan dan ketertiban transportasi	Meningkatkan tingkat keselamatan, keamanan dan ketertiban transportasi	Meningkatnya kelaikan prasarana fasilitas keselamatan transportasi darat

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	perhubungan				
					Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor
					meningkatkan ketertiban umum berlalu lintas
		6.3.2.	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi di bidang perhubungan	Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum sebagai moda utama pergerakan masyarakat
					Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan laut dan udara terhadap masyarakat
6.4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup	6.4.1	Meningkatnya layanan persampahan	Meningkatkan layanan persampahan	Pelayanan Operasi Persampahan dan Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Kebersihan terhadap Sampah
		6.4.2	Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Meningkatkan kualitas baku mutu lingkungan	Pelaksanaan Pengujian Baku Mutu Lingkungan
		6.4.3	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
<b>MISI KETUJUH: "Peningkatan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa"</b>					

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
7.1	Menurunkan Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan	7.1.1.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi Pangan
					Menjamin ketersediaan pangan utama
					Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan
					Penanganan dan mutu pangan segar
7.2	Menurunkan Tingkat Pengangguran	7.1.2.	Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sector	Meningkatkan partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Peningkatan kesempatan kerja
					Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
					Peningkatan perlindungan lembaga ketenagakerjaan
<b>MISI KEDELAPAN: "Penguatan Basis Produksi Masyarakat Dalam Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan"</b>					
8.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Peningkatan indeks yang diterima petani sekaligus pengendalian indeks yang dibayar petani

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian hama penyakit, dan pemanfaatan teknologi tepat guna peningkatan SDM petani
					Peningkatan kualitas SDM petani
					Peningkatan kualitas sarana dan prasarana produksi komoditi unggulan masyarakat
					Peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi komoditi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan
					Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, peternakan, perkebunan
		8.1.2.	Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan	Peningkatan indeks yang diterima nelayan sekaligus pengendalian indeks yang dibayar petani
					Revitalisasi sektor perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan yang modern

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Peningkatan kualitas SDM Nelayan
<b>MISI KESEMBILAN: "Membangun kawasan sentra produksi dan industri kreatif berbasis potensi lokal"</b>					
9.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	9.1.1.	Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Meningkatkan jumlah dan nilai Investasi	Peningkatan promosi potensi investasi dan iklim investasi yang kondusif
					Pembinaan, pengawasan, pelatihan dan penataan perizinan tertentu
		9.1.2.	Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Meningkatkan Pendapatan di Sektor Pariwisata	Revitalisasi dan optimalisasi objek destinasi tujuan wisata
					Menciptakan event dalam menunjang pariwisata daerah
					Peningkatan pendapatan PAD sektor pariwisata
		9.1.3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Menumbuhkembangkan industri kecil menengah dan produk unggulan daerah
		9.1.4.	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan	Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Mengembangkan rantai sistem pemasaran produk unggulan daerah

No	Misi/Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		9.1.5.	Terbentuk dan berkembangnya kawasan transmigrasi	Pembentukan dan Pengembangan kawasan transmigrasi	Meningkatkan kontribusi kawasan transmigrasi terhadap perekonomian daerah
9.2	Membangun Kawasan Sentra Produksi dan Industri Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9.2.1.	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Daerah, Masyarakat Gampong dan Dayah	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah, Masyarakat Gampong	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah, Masyarakat Gampong
<b>MISI KESEPULUH: "Pembangunan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"</b>					
10.1.	Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan berkelanjutan	10.1.1.	Terwujudnya kawasan ekonomi cepat tumbuh	Mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh	Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh
		10.1.2.	Tumbuhnya kawasan ekonomi yang telah ada	Menumbuhkan kembangkan kawasan ekonomi yang telah ada	Membangun pusat-pusat perdagangan dan jaminan kestabilan harga

Sumber : RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023



## **4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021**

### **4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021**

Isu strategis Pembangunan Aceh tahun 2021 meliputi:

- a. Kemiskinan, Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan;
- b. Akses dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- c. Infrastruktur yang terintegrasi;
- d. Tata kelola pemerintahan;
- e. Penguatan Pemerintah Gampong;
- f. Pangan;
- g. Bencana Alam;
- h. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
- i. Penegakan syariat islam.

### **4.2.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021**

Sasaran makro pembangunan Aceh Selatan tahun 2021 yaitu:

- a. Pertumbuhan ekonomi antara 4,48-4,70%
- b. Kemiskinan turun menjadi 12.50%.
- c. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 6.24 -6.00%.
- d. Indeks pembangunan manusia sebesar 68,33%
- e. Indeks Gini sebesar 0.317

### **4.2.3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2021**

- a. Prioritas Pembangunan Nasional:

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah Keberhasila dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, maka focus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi sistem ketahanan bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7 persen; IPM menjadi 72,7872,90; gini rasio pada kisaran 0,377-0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4-7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen.

Adapun Prioritas pembangunan Nasional 2021 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
4. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
6. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
7. Membangun Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
8. Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

#### b. Prioritas Pembangunan Aceh

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2021 sebagaimana yang tertuang didalam RPJMA Tahun 2017-2022, serta mengingata arahan pemerintah pusat terkait dengan penanganan Covid-19, maka Tema RKPA Tahun2021 adalah:

**“Pemulihan ketahanan ekonomi dengan focus pengembangan agroindustri, pemberdayaan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan”**. Tema tersebut masih disesuaikan dengan Unggulan Aceh Hebat yang terkait tema tersebut di atas adalah Sebagai berikut:1) Aceh Meudadab, 2) Aceh Pemulia, 3) Aceh Seujahtra, 4) Aceh Kreatif, 5) Aceh Carong, 6) Aceh Teuga, 7) Aceh Meugoe dan Meulaot, dan 8) Aceh Kaya.

Adapun Prioritas pembangunan Aceh 2021 adalah:

1. Mendorong Pemulihan Agro Industri dan Pemberdayaan UMKM
2. Penguatan dan Kemandirian Ketahanan Pangan
3. Peningkatan Sumber daya Manusia yang berdayasaing
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

#### **4.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023**

Tema Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023 adalah **“Mengembangkan industri pengolahan produk unggulan pertanian didukung oleh peningkatan kualitas daya saing SDM dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkualitas”**. Pelaksanaan ini merupakan bagian dari proses yang berkesinambungan dengan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023 serta dapat mendukung prioritas pembangunan Nasional dan prioritas

pembangunan Aceh. Pada tahap ini, pembangunan diarahkan pada:

**a. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan**, melalui upaya :

- 1) meningkatkan produktivitas pertanian melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pemberian bibit, benih, pupuk; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna dibidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*);
- 2) meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan, penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal, TPI), penyediaan benih dan pakan ikan, dan penyediaan lahan budidaya perikanan;
- 3) mendorong pariwisata berbasis komunitas/masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata, meningkatkan promosi wisata, meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata, meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga Miskin dan masyarakat difabel.

**b. Memacu tumbuhnya industri usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi**, melalui upaya :

- 1) meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil, mikro, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah diversifikasi produk;
- 2) menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan), perbaikan sistem dan layanan perijinan, kebijakan investasi padat karya, serta pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan daerah.

**c. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan**, dilakukan melalui upaya :

- 1) menyediakan akses kebutuhan dasar untuk penduduk miskin, akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik, penanganan kawasan permukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan, dan pangan, perlindungan sosial bagi masyarakat, dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
- 2) meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) memperkuat basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang intens dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan.

**d. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan**, dilakukan melalui upaya-upaya :

- 1) memperbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan, serta peningkatan pengembangan pendidikan inklusi;
- 2) meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan, di samping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan serta peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan);

**e. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas**, dilakukan melalui upaya:

- 1) Meningkatkan konektivitas infrastruktur melalui peningkatan kehandalanan keselamatan jalan jembatan;

- 2) meningkatkan pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.

**f. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga**, dilakukan melalui upaya:

- i. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga prestasi;

**g. Mempertahankan nilai-nilai budaya Ke-Acehan yang Islami**, dilakukan melalui upaya :

- 1) Penegakan Syariat Islam;
- 2) Pelestarian seni dan budaya daerah yang berbasis islami sebagai identitas daerah;

**h. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**, dilakukan melalui upaya :

- 1) meningkatkan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
- 2) mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP, meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda, meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
- 3) Perwujudan kelembagaan birokrasi yang professional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *clean and clear* government.

Selanjutnya Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan dijabarkan kedalam program prioritas yang tertuang pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Program Prioritas Pembangunan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021</b>	<b>OPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN SOSIAL SECARA BERKELANJUTAN</b>	
	1) MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
	RPOGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN
	PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PANGAN
	2) MENINGKATKAN PRODUKSI DAN KUALITAS HASIL PERIKANAN	

NO		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
1		2	3
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3) MENDORONG PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS/MASYARAKAT	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA
		4). MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN DAN MASYARAKAT DIFABEL	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
2		<b>MEMACU TUMBUHNYA INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA KEMUDAHAN INVESTASI</b>	
		1) MENINGKATKAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI KECIL, MIKRO, DAN MENENGAH	

<b>NO</b>		<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021</b>	<b>OPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
1		2	3
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN	DPMPTSP

NO		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
1		2	3
		PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
<b>3</b>		<b>PEMANTAPAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN BERBASIS PEMBANGUNAN PERDESAAN</b>	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

<b>NO</b>		<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021</b>	<b>OPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
			PERMUKIMAN
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA
<b>4</b>		<b>PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN MUTU KESEHATAN</b>	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH *****)	DINAS PENDIDIKAN DAYAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH *****) KDA	MAJELIS PENDIDIKAN ACEH
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN/RSUD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN/RSUD
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
<b>5</b>		<b>PEMANTAPAN DAYA SAING DAERAH DIDUKUNG DENGAN</b>	

NO		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
1		2	3
		<b>PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS</b>	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

<b>NO</b>		<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021</b>	<b>OPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

NO		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021	OPD PENANGGUNG JAWAB
1		2	3
		REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERMUKIMAN
<b>6</b>		<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
<b>7</b>		<b>MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI BUDAYA KE-ACEHAN YANG ISLAMI</b>	
		PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH *****)	DINAS SYARIAT ISLAM
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATPOL PP DAN WH
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN
<b>8</b>		<b>PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH</b>	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

<b>NO</b>		<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021</b>	<b>OPD PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

Untuk melihat sinergitas antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Sinergi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021**

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Aceh	Prioritas Aceh Selatan
-----	--------------------	----------------	------------------------

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Aceh	Prioritas Aceh Selatan
1	PN1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PN2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. PN5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PN6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Mendorong Pemulihan Agroindustri dan pemberdayaan UMKM	PAS2: Memacu tumbuhnya industri usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi
2	PN3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PN4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PN7: Memprkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	PAS 4: Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan PAS 5: Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas PAS 6: Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Aceh	Prioritas Aceh Selatan
3	PN1,: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PN2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan	PAS3: Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan PAS1: Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan
4	PN2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. PN4: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PN7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	PAS 4: Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan PAS7: Mempertahankan nilai-nilai budaya Ke-Acehan yang Islami PAS 8: Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

### 4.3. Data Kondisi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan

Data update revisi covid 19 Kabupaten Aceh Selatan per tanggal 20 juli 2020 :

- 4.1. Suspek = 29 orang
- Suspek dirawat = 1 orang
  - Suspek masih isolasi = 6 orang
  - Suspek selesai isolasi = 22 orang

- 4.2. Kasus terkonfirmasi = 3 orang
- Kasus terkonfirmasi dirawat = 2 orang
  - Kasus terkonfirmasi sembuh = 1 orang
- 4.3. Traveler = 5.081 orang
- Traveler masih isolasi = 209 orang
  - Traveler yang selesai isolasi = 4.872 orang

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, untuk itu percepatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan daerah yang sampai saat ini masih terus mengalami peningkatan kasus positif Corona.

Sampai dengan tanggal 30 juni 2020 realisasi Dana BTT (Penanganan Wabah Virus Covid-19 TA 2020) Kabupaten Aceh Selatan telah mencapai Rp. 11.605.924.700,- dengan rincian Dinas Kesehatan sebesar Rp. 307.500.000,- RSUD sebesar Rp. 2.118.880.000,- Dinas Pangan 1.054.300.000,- DISPERINDAGKOP sebesar Rp. 809.770.000,- DPMG sebesar Rp. 390.000.000,- dan Dinas Sosial sebesar Rp. 4.499.514.000,-.

Berikut daftar rincian penanganan dampak virus Corona Disease (COVID-19) di Kabupaten Aceh Selatan :

**Tabel 2.101.**  
**LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU**  
**PENANGANAN COVID-19 BULAN JUNI TAHUN 2020**  
**KABUPATEN ACEH SELATAN**

<b>NO</b>	<b>SKPK</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
1	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1.500.000.000,-	809.770.000

<b>NO</b>	<b>SKPK</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
		<b>JUMLAH 1</b>	<b>1.500.000.000,-</b>	<b>809.770.000,-</b>
2	DINAS SOSIAL	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	4.500.000.000,-	4.499.514.000,-
		<b>JUMLAH 2</b>	<b>4.500.000.000,-</b>	<b>4.499.514.000,-</b>
3	DINAS PANGAN	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	1.200.000.000,-	1.054.300.000,-
		<b>JUMLAH 3</b>	<b>1.200.000.000,-</b>	<b>1.054.300.000,-</b>
4	DPMG	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	403.000.000,-	390.000.000,-
		<b>JUMLAH 4</b>	<b>403.000.000,-</b>	<b>390.000.000,-</b>
5	RSUD	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	3.000.000.000,-	2.118.880.000
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	458.245.290,-	0
		<b>JUMLAH 5</b>	<b>3.458.245.290,-</b>	<b>2.118.880.000,-</b>
6	Dinas Kesehatan	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Penyakit Menular	682.500.000,-	0
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	304.520.000,-	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	316.500.000,-	0
		Biaya Operasional Kesehatan Sekunder (DAK Non Fisik)	303.751.300,-	0

NO	SKPK	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	
		Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK Non Fisik)	633.868.481,-	0
		Dukungan BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik)	32.640.000,-	0
		Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	9.500.000,-	0
		<b>JUMLAH 6</b>	<b>2.283.279.781,-</b>	<b>0</b>
7	BPKD	Belanja Tidak Terduga (BTT)	4.690.906.025	2.733.460.700
		<b>JUMLAH 7</b>	<b>4.690.906.025,-</b>	<b>2.733.460.700</b> r-

*Sumber : BPKD Kabupaten Aceh Selatan tahun 2020*

#### 4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRK Aceh Selatan Tahun 2021

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
1	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	kurangnya sarana dan prasarana olah raga di daerah setempat
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	kurang baiknya prasarana peribadatan di desa setempat
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	lanjutan pembangunan mesjid ie alem
4	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Adanya kelompok masyarakat yang membutuhkan bibit sawit untuk perkebunan mereka
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya jembatan penghubung dan banyaknya jembatan dalam kondisi rusak	adanya jembatan desa yang kurang layak dan harus di perbaiki
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	lanjutan pembagunan mesjid dan MCK mesjid desa Titi Pobon
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	adannya pembukaan jalan baru untuk desa kapa sesak yang sangat di butuhkan

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
8	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Lanjutan perbaikan tempat ibadah mesjid di senubok pusaka
9	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	Pengerasan badan jalan Gampong Gelumbuk
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Normalisasi parit Gampong indradamai
11	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya bagi masyarakat miskin	Pembangunan Kolam budi daya ikan Gampong Indra Damai
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Normalisasi Saluran Gampong Ujung Padang
13	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Pembangunan Kandang Ternak Sapi kelompok Paya Pasi Gampong Pasi Lembang
14	Kesehatan	Minimnya sarana dan prasarana kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	Penimbunan lokasi Puskesmas Kluet Selatan
15	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	Optimasi Lahan Perkebunan Kelompok Gunong Kemenyan
16	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Pembangunan pagar Mesjid Gampong Naca dibutuhkan karena untuk menghindari masuknya binatang tenak yang membuat kenyamanan beribadah dapat terganggu
17	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Perlunya Normalisasi Parit Suak Telong Gampong Ladang Rimba karena parit yang ada sudah dangkal
18	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Perlunya baju seragam Majelis Taklim/yasin dalam Kecamatan trumon Tengah
19	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Perlunya bantuan bibit sapi Kelompok Lubuk Makmur untuk meningkatkan Produksi Peternakan
20	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Perlunya pembangunan jalan Produksi Cot Makmu bagi masyarakat Petani untuk meningkatkan Produksi Pertanian
21	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Masyarakat Nelayan membutuhkan mesin robin untuk meningkatkan hasil perikanan tangkap pada Bakongan Raya

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
22	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Perlunya dibangun Kubah Mesjid agar mesjid terlihat Indah dan nyaman
23	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Masih Perlunya Pembangunan Pagar Mesjid agar menghindari dari hewan liar guna kenyamanan dalam masyarakat beribadah
24	Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Perlunya Pembangunan Pagar TK Darmawanita Ladang Rimba
25	Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Perlunya Penimbunan Halaman SMP No 1 Ladang Rimba agar tidak terjadi genangan air
26	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	Perlunya Peningkatan jalan Desa Ujoeng Tanoh untuk kemudahan Tansportasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
27	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Masih Perlunya Steking Lahan Pertanian kelapa sawit perkebunan masyarakat kelompok cot makmu
28	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Masih perlunya pembangunan pagar mushala Despot Trumon
29	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya rehab bale seumeubeut gampong gunung Kapo 6x7 meter
30	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	masih diperlukan pembangunan bale seumeubut gampong lhok jamin (6x12) meter
31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	masih diperlukan bale seumeubeut ujong pulo rayek (6x12) meter
32	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	Perlunya bantuan 1 ( Satu ) Unit Hand Traktor untuk Kelompok Tani Usaha Tani Desa Kampung Padang Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
33	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	Perlunya bantuan 1 ( Satu ) unit Hand Traktor untuk Kelompok Tani Sejahtera Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
34	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	petani sangat mengeluhkan kurangnya mesin pemanen padi (combine ) yang selamanya jika waktu panen mesin alat pemanen tersebut selalu didatangkan dari luar kabupaten aceh selatan. maka melihat keadaan tersebut pemerintah perlu kiranya memberikan bantuan 1 ( Satu ) Unit mesin pemanen padi ( combine ) merk kubota dc 70 untuk kelompok tani saudara tani ketua Muthalib.
35	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	terbatasnya bibit sawit bagi masyarakat kurang mampu dan mereka sudah memiliki lahan yang baik
36	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	kurangnya sarana olah raga di desa krueng luas
37	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	kurang baiknya kondisi jalan produksi pertanian didesa jambo dalem
38	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	kurangnya peternakan kambing di desa pinto rimba bagi masyarakat kurang mampu
39	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	kurang baik nya jalan pertanian didesa pulo paya
40	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya bagi masyarakat miskin	masih sedikit keseterdiaanya tambak / kolom ikan air tawar di trumon raya
41	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	adanya masyarakat kurangmampu dan tempat ibadah yang memerlukan semen untuk pembangunan rumah dan tempat ibadah
42	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	adanya warga masyarakat yang memiliki rumah belum layak huni di kecamatan kluet utara
43	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	lanjutan perbaikan atau rehap musalla Darul Rahmah desa krueng luas
44	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	adanya permohonan masyarakat pembuatan tempat ibadah atau perbaikan pagar di desa krueng luas di lokasi kuburan

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
45	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	tidak adanya drainase menyebabkan terjadinya genangan air karena tidak lancarnya aliran air baik yang berasal dari air hujan maupun dari air limbah rumah tangga untuk itu perlu pembangunan Drainase.
46	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Akibat pembangunan jalan maka tinggi dinding drainase sudah lebih rendah dari badan jalan, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi drainase (menambah/meninggikan dinding) agar badan jalan tidak mengalami abrasi.
47	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan irigasi sekunder yang tersedia belum memadai	Saluran air sawah sudah dalam kondisi rusak
48	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	Tidak adanya akses jalan menjadi hambatan bagi masyarakat, untuk itu diperlukan pembukaan jalan baru sehingga dapat memperlancar arus transportasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat
49	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	Perlunya membangun tribun mini tertutup sebagai sarana pendukung, sehingga akan meningkatkan motivasi masyarakat terutama kaum muda untuk berolah raga.
50	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	untuk menjadi modal usaha untuk kelompok Ingin Jaya, maka perlu diberikan bibit sapi lokal agar dapat dikembangkan menjadi usaha bersama/kelompok.
51	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Guna membantu masyarakat penyandang disabilitas perlu dibantu dengan alat bantu kesehatan berupa Tongkat sebanyak 14 unit dengan rincian tongkat biasa 6 (enam) unit, Tongkat Kaki Tiga 4 sebanyak 4 (empat) unit dan Tongkat Kaki empat sebanyak 4 (empat) unit.
52	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Guna membantu masyarakat penyandang disabilitas perlu dibantu dengan alat bantu kesehatan berupa Alat Bantu Pendengaran.

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
53	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Seringnya terjadi Banjir/genangan air pada areal perkebunan masyarakat sehingga perlunya pembangunan drainase pada lahan perkebunan masyarakat tersebut agar tidak merusak lahan perkebunan masyarakat.
54	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Untuk meningkatkan sarana dan prasarana Mesjid Baitul Karim, maka perlu segera di bangun pagar mesjid untuk keamanan alat/bahan-bahan bangunan yang ada.
55	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	Jalan gampong yang sudah ada belum dalam kondisi baik untuk itu perlu dilakukan pembangunan jalan rabat beton.
56	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Dalam rangka menciptakan usaha kelompok masyarakat, diberikan bibit lembu untuk dapat dikembangkan oleh kelompok masyarakat.
57	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	Adanya warga masyarakat yang masih tinggal di rumah yang sangat tidak layak huni, maka perlu memberikan bantuan rumah yang layak huni bagi masyarakat.
58	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	Adanya warga masyarakat yang masih tinggal di rumah yang sangat tidak layak huni, maka perlu memberikan bantuan rumah yang layak huni bagi masyarakat.
59	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Adanya jalan perkebunan masyarakat dalam keadaan rusak, berlumpur dan digenangi air, sehingga diperlukan untuk dilakukannya penimbunan dan pengerasan jalan tersebut.
60	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Lokasi/lingkungan tanah mesjid masih belum rata dan seringnya digenangi air, untuk itu perlu penimbunan untuk peningkatan sarana dan prasarana mesjid kedepannya.
61	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	adanya lingkungan bangunan mesjid yang belum memiliki pagar, maka perlu di bangun pagar untuk keindahan dan keamanan lingkungan mesjid.

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
62	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Jalan perkebunan masyarakat dalam kondisi yang tidak memadai sehingga perlu dilakukan penimbunan agar jalan perkebunan yang ada menjadi baik.
63	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Bantuan Bibit Ternak Kambing untuk kelompok Masyarakat.
64	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Pembangunan WC Balai Pengajian Hidayatussalam Dusun Simpang Lhe Gp. Bukit Gadeng.
65	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	perlunya bantuan handsprayer elektrik agar lebih mudah dalam bekerja kecamatan kluet timur desa sapik/mangga madu ( N 3°04'58" E 97°22'13" ) durian kawan/tani muda ( N 3°05'10" E 97°22'27" ) durian kawan/batu metongge ( N 3°05'10" E 97°22'27" ) alai/pakat rut-rut ( N 3°05'17" E 97°22'43" ) paya dapur/serkat tani ( N 3°05'44" E 97°23'02" ) pucuk lembang/tani maju ( N 3°06'09" E 97°27'18" ) lawe sawah/tani makmur ( N 3°08'44" E 97°24'31" )
66	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	perlunya bantuan herbisida agar lebih mudah dalam bekerja kecamatan kluet timur desa sapik/mangga madu ( N 3°04'58" E 97°22'13" ) durian kawan/tani muda ( N 3°05'10" E 97°22'27" ) durian kawan/batu metongge ( N 3°05'10" E 97°22'27" ) alai/pakat rut-rut ( N 3°05'17" E 97°22'43" ) paya dapur/serkat tani ( N 3°05'44" E 97°23'02" ) pucuk lembang/tani maju ( N 3°06'09" E 97°27'18" ) lawe sawah/tani makmur ( N 3°08'44" E 97°24'31" )
67	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	perlunya bantuan sound system agar bisa menjadi sarana usaha untuk penyewaan ke tempat2 pesta dan lain2 di desa alai ( N 3°05'17" E 97°22'43" )
68	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya relief mesjid agar tampak indah di kecamatan kluet selatan desa ujung pasie

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
69	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya bantuan rehab mesjid agar tampak indah dan kokoh di kecamatan tapaktuan desa lhok bengkung
70	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	perlunya bantuan agar lebih mudah dalam bekerja di kecamatan kluet timur, di antaranya : desa sapik/mangga madu ( N 3°04'58" E 97°22'13" ) durian kawan/tani muda ( N 3°05'10" E 97°22'27" ) durian kawan/batu metongge ( N 3°05'10" E 97°22'27" ) alai/pakat rut-rut ( N 3°05'17" E 97°22'43" ) paya dapur/serkat tani ( N 3°05'44" E 97°23'02" ) pucuk lembang/tani maju ( N 3°06'09" E 97°27'18" ) lawe sawah/tani makmur ( N 3°08'44" E 97°24'31" )
71	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	perlunya bantuan bedah rumah/kamar
72	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	perlunya bantuan pupuk pelengkap cair di kecamatan kluet timur
73	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Plapon Mesjid Baitul Ramamah yang belum ada dan perlu dibuat
74	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Kondisi MCK Mesjid Baitul Reza sudah tidak layak dan perlu direhap
75	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	MCK Mesjid Baitul Makmur belum ada/belum tersedia
76	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Menunjang Usaha Masyarakat dalam bidang usaha kecil untuk pengadaan kursi plastik
77	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Masih banyak peternak lembu yang membutuhkan bibit lembu
78	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Banyak masyarakat Nelayan yang membutuhkan Jaring
79	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Masih banyak Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang harus mendapatkan bantuan Kualifikasi

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
80	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Perlu adanya bangunan Pagar Mushalla
81	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Menunjang Usaha Masyarakat yaitu pengadaan Fiber untuk Kelompk Hikmah
82	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	Masih kurangnya rumah layak huni dan perlu untuk pembangunan lagi
83	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	Perlu adanya optimalisasi lahan pertanian untuk Kelompok Tani Linggong Giri An. Darussalim
84	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Sarana penunjang untuk mesin jahit sangat dibutuhkan oleh Kelompok Jahit Wareh Utama Tailor yaitu Mesin Jahit Biasa 3 unit, mesin bordir 1 unit, mesin sersak 1 unit, mesin pinggir 1 unit, mesin serba guna 1 unit dll
85	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	banyaknya masyarakat kurang mampu di kecamatan kluet selatan yang memerlukan atap rumah
86	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	banyaknya kelompok tani yang belum memiliki alat pada untuk pengolahan lahan yaitu hand traktor di desa jambo manyang
87	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	adanya kelompok masyarakat kurang mampu membutuhkan bantuan bibit sapi untuk di kembangbiakan
88	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	didaerah desa suak bakong ada jalan usaha tani yang butuh untuk perbaikan atau peningkatan agar tidak terkendala masyarakat dalam melakukan aktifitas ke lahan mereka
89	Pertanian	Belum adanya jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tersier yang ada dalam kondisi rusak	adanya parit yang sudah rusak dan perlu di bersihkan di daerah pulo ie agar tidak tergenangnya air di areal lahan masyarakat bila hujan
90	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	adanya permohonan masyarakat untuk pembuatan gudang mesjid didesa Kedai Kandang

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
91	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	ada kelompok tani yang sangat membutuhkan bantuan bibit sawit
92	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	adanya permohonan masyarakat untuk pembangunan parkir mesjid demi kenyamanan dalam melaksanakan ibadah
93	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya bagi masyarakat miskin	adanya sebagian kelompok masyarakat yang berpropesi sebagai nelayan memerlukan bantuan boat 5 gt
94	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	masih banyaknya para peternak kerbau yang membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan usaha peternakannya Kelompok Tani Mekar
95	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Banyak Nelayan yang membutuhkan Kapal Motor 5 GT Untuk menunjang usaha untuk kelompok Nelayan Jasa Bahari dan Kelompok Nelayan Jaya Abadi
96	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	untuk menunjang usaha rumah tangga
97	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	masih kurangnya peralatan perbengkelan (Bengkel Muhammad Musad)
98	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	Masih Banyak Masyarakat yang belum mempunyai rumah Layah Huni
99	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	Jalan setapak di gampong Air Berudang belum memadai
100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan irigasi sekunder yang tersedia belum memadai	Normalisasi Saluran Indra Damai II
101	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Masyarakat memerlukan dukungan usaha untuk sektor peternakan unggas berupa bibit ayam dan pakan ayam, untuk meningkatkan motivasi masyarakat khususnya ayam petelur untuk kemandirian protein Aceh Selatan
102	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	Pembangunan Gerbang Masjid Gampong Alurpinang
103	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Peningkatan Jalan usaha tani. mempermudah akses masyarakat dalam pendistribusian hasil pertanian

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	Peningkatan Jalan Menuju Lapangan Gema
105	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Pengadaan Perahu Kapal untuk penunjang aktifitas nelayan
106	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya bagi masyarakat miskin	Pengembangan kolam Bioflok
107	Pertanian	Belum adanya jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tersier yang ada dalam kondisi rusak	Pembangunan jaringan irigasi Alur Pinang Samadua untuk penunjang perairan persawahan
108	Pertanian	Belum adanya jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tersier yang ada dalam kondisi rusak	Lanjutan Pembangunan Saluran Irigasi untuk perairan persawahan
109	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Pengadaan Bebek Petelur untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam berternak
110	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Pengadaan Bibit Jagung dan Pestisida luasnya lahan masyarakat yang memerlukan bibit jagung untuk pengembangan salah satu komoditi andalan daerah
111	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Pembangunan Balai Seumeubeut. banyaknya generasi muda yang kurang mampu membaca al-quran
112	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	Perencanaan Stadion Gema Samadua sarana lapangan olah raga masih minim
113	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Bantuan Alat Masak untuk Kelompok Hulu Makmur Gampong Hulu. industri rumah tangga memerlukan dukungan perlengkapan usaha
114	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Pengadaan Alat Pertukangan. pelaku usaha pertukangan terkendala untuk melengkapi perlengkapan
115	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	pengadaan becak barang untuk mendukung usaha masyarakat
116	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pengadaan perlengkapan sekolah untuk siswa kurang mampu dan anak yatim
117	Pariwisata	Masih perlunya mengembangkan kualitas objek wisata dan promosi wisata	perlunya visualisasi potensi ekowisata

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
118	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Pengadaan Bibit Ayam untuk mendukung usaha peternakan rakyat
119	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Rehab Saluran Lingkungan
120	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya rehap mushalla untuk masyarakat
121	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	perlunya pembersihan dan pengorokan sungai yang mulai tertutupi oleh rumput dan mulai dangkalnya sungai
122	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	perlunya pembukaan jalan di area perkebunan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat
123	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya pengocoran kubah masjid Masyarakat di gampong tutong
124	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya pembuatan pagar masjid Masyarakat dikarenakan sudah tidak layak untuk dipakai
125	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	perlunya pembuatan tribun lapangan Volly untuk meningkatkan sara olahraga
126	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	perlu adanya jalan rabat beton untuk memudahkan transportasi masyarakat anatr gampong
127	Pertanian	Belum adanya jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tersier yang ada dalam kondisi rusak	masih perlunya pembangunan irigasi yang mengakibatkan melupnya air disaat cuaca hujan
128	Pertanian	Belum adanya jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tersier yang ada dalam kondisi rusak	Perlu adanya Saluran Irigasi Pertanian untuk memudahkan pengairan di persawahan masyarakat
129	Pertanian	Belum adanya jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tersier yang ada dalam kondisi rusak	Perlu Adanya Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian di Gampong Kemumu Seberang Untuk Memudahkan para petani dalam pengairan persawahan
130	Pertanian	Belum adanya jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tersier yang ada dalam kondisi rusak	Perlu Adanya Pembangunan Saluran Irigasi untuk memudahkan para Petani dalam mengairi persawahan

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
131	Pertanian	Belum adanya jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi tersier yang ada dalam kondisi rusak	Perlu adanya Saluran Irigasi untuk memudahkan para petani dalam mengairi persawahan para petani di Gampong Tersebut
132	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Perlu adanya pembangunan Mck Gampong Dalam Untuk meningkatkan kebersihan dalam lingkungan tersebut
133	Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Perlu adanya Penambahan Mobiler Sekolah Smp Neg. 1 Kec. Labuhanhahji Dikarenakan Mobiler Dewan Guru yg lama sudah banyak yang tidak layak pakai lagi
134	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Perlu Adanya bantuan mesin Robin 6,5 PK Untuk Memudahkan Para Nelayan
135	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	Perlu Adanya pengadaan Hand Sprayer Untuk memudahkan para petani dalam mengolah pertanian
136	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Pengadaan Bibit Kambing Lokal untuk meningkatkan Ekonomi Masyarakat Gampong Paya Peulumat Ketua Amiruddin
137	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	Perlu Adanya Pengadaan Hand Traktor Untuk Petani agar memudahkan Para Petani dalam Mengolah Persawahan Mereka
138	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Perlu Adanya Bantuan Cool Box dan Keranjang Untuk Para Nelayan Untuk Memudahkan Tempat Penyimpanan Ikan
139	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	belum ada nya pembangunan lanjutan tempat musalla di pondok pasantren bustanul qurra maka perlu lanjutan pembangunannya
140	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	adanya permohonan kelompok pengadaan alat -alat kelengkapan acara pesta perkawinan atau acara pesta lainnya
141	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	belum maksimalnya pembangunan lapangan Voly bakau hulu maka perlu bantuan jaring dan lainnya
142	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	adanya sebagian peternak kambing di kecamatan labuhan hajiyang perlu bantuan bibit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu setempat

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
143	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	danya beberapa masyarakat labuhan haji tempat tinggal yang perlu di rehab adatu di perbaiki agar menjadi tempat tinggal yang layak
144	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	adanya permohonan masyarakat dalam membantu peningkatan perekonomian yaitu permohonan mesin dan perlengkapan air isi ulang untuk minum.
145	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	belum adanya balai pengajian di desa padang baru maka dengan ini kami perlu untuk membangun demi meningkatkan ilmu agama di masyarakat setempat
146	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	adanya mesjid yang perlu lanjutan pembangunannya atau perbaikan
147	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	belum adanya saluran yang memadai di desa ujung batu
148	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	adanya permohonan masyarakat samadua untuk bibit ternak ayam dan pakan serta rehap kandang
149	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	Pembangunan Pagar Mesjid untuk Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peribadatan
150	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	terbengkalainya Pembangunan Mesjid yang belum sanggup dilanjutkan oleh Masyarakat.
151	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	Lapangan Bola Kaki yang masih Rendah sehingga sering tergenang air jika hujan lebat, Perlu Peningkatan atau Peninggian Lapangan
152	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	Rendahnya Halaman Mesjid sehingga terjadi Genangan air yang mengakibatkan Becek, perlu di timbun dan pemasangan Paving Blok
153	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	Keadaan Jalan dari Pemukiman Penduduk masih belum ada peningkatan badan jalan atau belum di Rabat Beton
154	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	Belum tersedia Tempat Wudhuk atau MCK pada Mesjid Al HIKMAH

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
155	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	Lapangan Bola Kaki sering dimasuki binatang Ternak, sehingga dibutuhkan pembangunan Pagar
156	Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Lingkungan Pendidikan Belum Aman karna belum ada Pagar
157	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	terjadi genangan air yang dialirkan dari Rumah - rumah Penduduk di sekitar pemukiman yang perlu diarahkan alirannya
158	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Peningkatan ekonomi untuk kelompok Ingin Maju yang di Ketuai oleh Rusdi dalam hal peternakan kambing/kibas.
159	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Perlunya sarana dan prasarana pagar untuk lokasi ternak kambing/kibas untuk kelompok ingin jaya yang di ketuai oleh Rusdi
160	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Kondisi perkarangan mesjid yang belum begitu sempurna maka Perlu adanya Pembangunan Pagar dan Timbunan Mesjid Nurul Falah Gampong kedai Runding Kec. Kluet Selatan
161	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Perlunya Pembangunan Jalan Produksi Gampong Indra Damai Kec. Kluet Selatan Kelompok Tani Ingin Jaya Ketua Musli Afandi
162	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Untuk Peningkatan Ekonomi untuk Kelompok Tani Hutta yang di Ketuai oleh Firman Saldatul dalam hal peternakan Sapi
163	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya masjid dalam kondisi kurang baik/rusak	kondisi mushalla jambur kapuk gampong kedai runding yang tidak layak yang harus di rehab
164	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Masih Perlunya Peningkatan Jalan Usaha Tani guna Meningkatkan Produksi Pertanian masyarakat
165	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Masih Perlunya Jalan Usaha tani gampong Rantau Binuang
166	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Masih Perlunya Jalan Usaha Produksi

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
167	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Perlunya Pembangunan Jalan Produksi untuk meningkatkan produksi hasil pertanian
168	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Perlunya Bantuan Bibit Jagung dan Pupuk untuk kelompok makmud beu sare guna Meningkatkan Produksi Pertanian tanaman pangan
169	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	masih kurangnya hand player bagi petani dalam menunjang produksi pertanian masyarakat kluet raya
170	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	masih belum adanya pagar dalam pekarangan masjid sehingga masih banyaknya keluar masuk binatang ternak dalam pekarangan masjid
171	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Masih perlunya Pembuatan Body/Kosko Kapal Motor 20 GT untuk kelompok Nelayan Bintang Makmur guna meningkatkan hasil perikanan tangkap
172	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Perlunya Masyarakat Rumpun Besar Kelompok Karang
173	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Masih Perlunya Pembuatan perahu Motor untuk kelompok Bintang Timur
174	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Perlunya Dukungan Modal pengadaan mesin Jahit untuk kelompok maju jaya guna meningkatkan ekonomi usaha masyarakat
175	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	Masih diperlukannya Hand Traktor Kelompok Ingin Jaya Sejahtera
176	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Perlunya Pengadaan Perlengkapan Pelaminan untuk usaha Pelaminan kelompok Bunda
177	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Masih Perlunya Bibit Pala untuk petani untuk meningkatkan produksi Pertanian untuk kelompok
178	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	Masih Perlunya Peningkatan Jalan Rabat Beton dan Parit Pinggir jalan rabat beton kecamatan Sawang

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
179	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	Masih perlunya masyarakat miskin untuk bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni di Blang Blahdeh Meukek
180	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pengadaan Alat-alat Pertukangan kelompok kuta Baru
181	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Kondisi Mesjid Baitul Rahmi belum memadai dan Perlu Pembangunan
182	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Kondisi Mesjid Al- Ijtihat Sangat Membutuhkan Pembangunan
183	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Kondisi Mesjid Baitul Falah Sudah Perlu di Bangun Untuk Kenyamanan Beribadah
184	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Petani di Kecamatan Labuhanhaji Barat membutuhkan bantuan Bibit Jengkol (Kelompok Tani Maju Bersama)
185	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Petani di Labuhanhaji Barat sangat membutuhkan bantuan Bibit Pinang (Kelompok Tani Maju Bersama)
186	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Kondisi TPA Darul Muizzah Membutuhkan Pembangunan
187	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani, Perlu Pengadaan Bibit Kopi
188	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Pengadaan Alat mesi Boat 5 GT
189	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	Bantuan 1 Unit Hand Traktor dan 1 Unit Mesin Perontok Padi kepada Klp Tani Sriwijaya.
190	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Bantuan 4 Rumpon/Unjam Laut kepada klp Nelayan Bintang Laut.
191	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan air bersih yang masih menjadi kendala yang harus segera dituntaskan	Pemasangan Sumur Bor dan Pipa Saluran Air Gp. Sawang I.
192	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Bantuan Bibit Kerbau kepada Klp Sepakat Raya Gp. Krueng Batee
193	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Pengadaan bantuan jaring Pukat klp. Bintang Purnama Sawang Bau.

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
194	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Pengadaan mesin jahit Biasa sebanyak 6 unit dan mesin jahit pinggir sebanyak 3 unit untuk klp. Menjahit Putri Kuala.
195	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Bantuan Bibit Bebek Seudati Kelompok Jerat Nek Gp. Ujung Padang.
196	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	Pembangunan Rumah Layak Huni kepada Masyarakat tidak mampu an. Dahlan Gp Ujung Padang
197	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat miskin atas nama Dede Safrianto Gp. Sawang I
198	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Pembangunan Jalan Tani Gp. Panto Luas
199	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	perlunya bantuan alat industri rumah tangga untuk desa kuta blang, ujung tanah dan jilatang kecamatan samadua
200	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	perlunya bantuan pengadaan mesin jahit masyarakat miskin desa batee tunggai kecamatan samadua
201	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	perlunya bantuan alat industri rumah tangga untuk kampung hilir dan lhok bengkung kecamatan tapaktuan
202	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	perlunya bantuan bibit bebek untuk desa alur pinang dan desa luar kecamatan samadua
203	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	perlunya bantuan bibit kambing untuk desa jilatang kecamatan samadua
204	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	perlunya bantuan bibit ayam untuk desa tampang kecamatan samadua
205	Pertanian	Perlunya pakan ternak untuk warga miskin	perlunya bantuan pakan bebek dan ayam untuk desa alur pinang, desa luar dan desa tampang kecamatan samadua
206	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	perlunya bantuan perahu motor untuk desa baru dan desa kuta blang kecamatan samadua
207	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	perlunya bantuan tong sampah untuk desa air berudang

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
208	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	perlunya bantuan mesin pertamini kelompok panjupian di desa panjupian kecamatan tapaktuan dan kelompok mita bacut desa kuta blang kecamatan samadua
209	Sosial	Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	perlunya pengadaan perlengkapan warung kopi desa batee tunggai kecamatan samadua
210	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	perlunya bantuan perlengkapan pertanian desa kuta blang kecamatan samadua
211	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	perlunya peningkatan jalan pertanian dan perkebunan desa kuta blang kecamatan samadua
212	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	perlunya drainase dengan kondisi baik di desa gunung cut kecamatan samadua
213	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya pembuatan pagar TPA Al Makmur desa kuta blang kecamatan samadua
214	Pertanian	Minimnya sarana pengolahan pasca panen hasil pertanian	belum ada ketel serei wangi di desa kuta blang kecamatan samadua
215	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	perlunya bantuan bibit serei wangi, jahe dan jengkol di desa kuta blang kecamatan samadua
216	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	masih kurangnya tempat wudhu dan MCK dibalai pengajian
217	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	jalan lingkar desa masih belum bisa digunakan oleh masyarakat setempat
218	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	masih dibutuhkannya peralatan usaha Batako oleh Masyarakat
219	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	belum adanya pagar di mushalla di desa pulo kambing
220	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	belum adanya jembatan pertanian untuk melintasi area
221	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan irigasi sekunder yang tersedia belum memadai	masih perlunya penyambungan pembangunan saluran sekunder irigasi

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
222	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	masih perlunya peningkatan badan jalan di desa koto indarung
223	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	belum adanya pondok tempat berdoa bagi para penziarah di kuburan massal
224	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	masih perlunya perbaikan pagar karna sering keluar masuknya hewan ternak dalam pagar masjid
225	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan irigasi sekunder yang tersedia belum memadai	perlunya saluran pembuangan limbah rumah tangga
226	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	perlunya alat mesin jahit untuk menunjang perekonomian masyarakat
227	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	perlu adanya tratak untuk acara masyarakat gampong
228	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	perlunya peningkatan jalan produksi di area lahan perkebunan
229	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	perlu adanya alat semprot untuk meningkat hasil tani
230	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	perlunya peningkatan jalan rabat beton keliling didalam gampong
231	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya ada pagar pada tempat pemakaman umum di dua tempat di desa krueng batu
232	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	masih perlunya pagar dalam wilayah balai pengajian/ TPA wulidar Huda
233	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	perlunya bantuan bibit sapi pada masyarakat kelompok semangat usaha
234	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	perlunya pengerasan dan pembangunan jembatan tani untuk memudahkan alat transportasi kelompok Tani Bantimoh
235	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	perlunya peningkatan jalan produksi tani Masyarakat kelompok Meukar Ban Timoh

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
236	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya pembangunan mushalla dan MCK di pelabuhan jambo TK
237	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	perlunya bantuan bibit cabe beserta pupuk kelompok semangat usaha
238	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya lanjutan pembangunan tempat wudhu masjid
239	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Paving Block mesjid belum tersedia
240	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Nelayan membutuhkan Fiber untuk perlengkapan
241	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	perlunya pembukaan jalan area pertanian untuk memudahkan para petani mengangkut hasil pertanian
242	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	masih kurangnya alat jahit menjahit untuk masyarakat dalam menunjang perekonomian
243	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	perlunya normalisasi saluran pembuangan
244	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	masih dibutuhkannya alat mesin genset dan traktor, untuk memudahkan usaha UKM dalam rangka mewujudkan nilai tambah (Edit Value).
245	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	usaha UKM perlu di bantu modal usaha untuk menunjang nilai tambah (edit Value)
246	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	perlunya pembersihan lahan untuk produksi lahan pertanian masyarakat semakin meningkat (Edit Value) Nilai tambah
247	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	perlunya saluran pembuangan air
248	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	perlunya pelatihan jahit menjahit untuk perempuan yang belum mendapatkan pekerjaan

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
249	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya pembangunan tempat parkir masjid
250	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	perlunya alat tangkap bagi para nelayan
251	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	perlunya tambahan modal usaha bagi usaha micro
252	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	pembuatan saluran
253	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	perlunya pembuatan tribun futsal
254	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	pembangunan pagar kuburan
255	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	budidaya bawang merah vertikutur
256	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	perlunya bantuan alat penunjang ekonomi perempuan
257	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	perlunya normalisasi sungai
258	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	perlunya jalan produksi perkebunan
259	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	perlunya pembangunan jalan produksi perkebunan
260	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya pembangunan pagar kuburan
261	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	normalisasi saluran
262	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Pengadaan bibit pinang untuk kecamatan tapaktuan
263	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Pengadaan bibit pinang kecamatan kluet selatan

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
264	Kesehatan	Minimnya sarana dan prasarana kesehatan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	Penimbunan lahan puskesmas sedar kecamatan samadua
265	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Perlunya Pengadaan bibit jengkol untuk masyarakat
266	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Lanjutan Pembukaan Jalan Tani, Desa Tanjung Harapan
267	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Perlu adanya pembangunan pagar mesjid Labuhan Tarok II
268	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Tempat Wudhu Mushalla Gampong Keude Meukek perlu Pembangunan Baru
269	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Perlu adanya pembangunan Rabat Beton Jalan Tani Gampong Labuhan Tarok II
270	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya bagi masyarakat miskin	Masih banyak masyarakat nelayan yang membutuhkan rumpun laut/Unjam Desa Labuhan Tarok
271	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	peningkatan jalan lingkaran memperlancar akses transportasi perekonomian masyarakat.
272	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	peningkatan jalan lingkaran memperlancar transportasi perekonomian masyarakat
273	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya bagi masyarakat miskin	bantuan alat tangkap jaring lengkap
274	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	bantuan mesin dan peralatan bengkel yaitu mesin bukaan ban, mesin pengisi nitrogen, dongkrak buaya kapasitas 10 TON, general tools lengkap, hidrolik portable otomatis alat ganti ban, shark 1 HP LVMP-6501 kompresor.
275	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	bantuan sarana perikanan piber dan timbangan
276	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	perlunya bantuan mesin jahit

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
277	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	perlunya alat perlengkapan latihan karate yaitu sabuk, baju, sepatu, tas, bendera, gumshield, body protektor, hand protektor, face mask, fencing bad, stop watch, matras, shin guard lengkap, handycam, scoring board.
278	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	perlunya balai pengajian yang bagus
279	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	bantuan alat tangkap perikanan mesin perahu motor lengkap dan GPS
280	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	bantuan pengadaan induk sapi produktif untuk usaha ternak sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat
281	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jalan dengan kondisi baik	peningkatan jalan lingkar akan memperlancar transportasi perekonomian masyarakat
282	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	pentingnya kelancaran saluran pembuangan air untuk kenyamanan lingkungan permukiman masyarakat
283	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	pentingnya kelancaran saluran pembuangan air untuk kenyamanan lingkungan permukiman masyarakat
284	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	bantuan pengadaan alat masak memasak kue untuk mendongkrak perekonomian usaha kerajinan rumah tangga bakongan-trumon
285	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	bantuan dana tunai untuk keperluan perlengkapan majelis BARZANZI perempuan sawah tingkeum
286	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	bantuan pengadaan mesin jahit untuk wilayah bakongan raya
287	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	bantuan pengadaan alat tangkap jaring ikan lengkap wilayah bakongan raya
288	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	untuk menjaga area pemakaman diperlukan pagar area pemakaman

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
289	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Belum adanya akses jalan ke lahan perkebunan masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian
290	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jaringan irigasi sekunder yang tersedia belum memadai	masih adanya kondisi saluran irigasi yang rusak pada Desa Kota Palak (DI. Banda Gadang)
291	Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Perlunya penimbunan halaman belakang/samping gedung SKB Desa Apha Kecamatan Labuhanhaji
292	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Parit di gampong Panton Rubek Perlu dinormalisasi untuk menghindari Abrasi dan berdampak ke sawah masyarakat
293	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Belum tersedianya jalan Produksi untuk akses masyarakat mengangkut hasil panen
294	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Parit di Gampong Padang Baru sudah rusak dan perlu perbaikan dan pengerukan
295	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih adanya sarana dan prasarana peribadatan dalam kondisi kurang baik/rusak	Belum adanya Mushalla di SKB dan Perlu di bangun (Semi Permanen)
296	Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Untuk Persiapan Pembangunan PAUD Gampong Ujung Batu perlu dilakukan penimbunan lokasi
297	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Masyarakat sangat membutuhkan Kapal Nelayan, sehingga perlu dibantu dan diperhatikan.
298	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Kelompok ternak sangat membutuhkan bantuan berupa ternak Kerbau/Sapi
299	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Keberadaan industri rumah tangga di desa mempunyai arti yang penting dalam kerangka pembangunan nasional. Karena keberadaan industri rumah tangga tersebut menjadi solusi bagi tenaga kerja yang belum tertampung dan perbaikan ekonomi masyarakat desa sehingga perlu dibantu dan diperhatikan oleh pemerintah

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
300	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni masih cukup rendah	Di wilayah kami kondisi saat ini masih banyak warga masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Adapun masyarakat ini tergolong pada keluarga Fakir miskin dan tidak mempunyai penghasilan tetap.
301	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	Petani saat ini sangat membutuhkan Jaring Burung untuk Perlindungan Padi Sawah
302	Kepemudaan dan Olahraga	Minimnya sarana dan prasarana olahraga	Kebutuhan sarana dan prasarana olahraga dikalangan pemuda masih kurang, sehingga perlu dibantu dan diperhatikan.
303	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Banyak masyarakat yang membutuhkan Modal Usaha Kios
304	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Di Desa Trieng Meuduro Tunong Kondisi Sungai saat ini saat sedang hujan menyebabkan banjir, sehingga masih perlu dilakukan Normalisasi
305	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	drainase dalam keadaan kurang memadai, sehingga di perlunya perbaikan drainase dengan cara membuat tanggul pada bagian yang belum dibuat pembatas/tanggul permanen.
306	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Pentingnya kebutuhan fiber sebagai wadah penampungan dan pengawetan hasil tangkap dan budidaya ikan bagi masyarakat miskin.
307	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	Untuk pengembangan UKM di Kec. Tapaktuan dan Samadua maka perlu diberikan bantuan sarana penunjang bagi kelompok masyarakat berupa paket alat industri rumah tangga.
308	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih diperlukannya tambahan modal usaha dan sarana penunjang untuk pengembangan UKM	untuk menunjang program pengembangan UKM di Kec. Tapaktuan dan Samadua maka perlu diberikan Paket bantuan alat pertukangan bagi UKM.

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
309	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	untuk meningkatkan hasil perkebunan perlu diberikan bantuan berupa Bibit Pinang Batara kepada Klp Pantan Salak Desa Pantan Luas di Kec. Tapaktuan.
310	Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Pengadaan Baju Seragam Sekolah baik tingkat Sekolah Dasar, Lanjutan dan Menengah dalam kecamatan Tapaktuan-Samadua.
311	Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Pemberian Bantuan Jilbab Bagi siswi kurang mampu baik tingkat Sekolah dasar, Lanjutan Maupun Menengah dalam Kecamatan Samadua
312	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Untuk meningkatkan hasil tangkap kelompok nelayan maka perlu dibantu Boat/Kapal Motor kepada Kelompok Usaha Bersama Gp. Labuhan Tarok II.
313	Pertanian	Masih adanya area pertanian yang belum memiliki jalan usaha tani dan adanya jalan usaha tani dalam kondisi rusak	Pembangunan jalan produksi hasil pertanian untuk kelompok Tani Bungaku dengan ketua kelompok Arahas. MS agar memudahkan kelompok dimaksud mengolah dan memasarkan hasil pertanian.
314	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Pemberian Bibit Sapi Lokal sebagai modal usaha bagi kelompok Udep Sare untuk dapat dikembangkan dengan tujuan akan meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok Udep Saree.
315	Pertanian	Perlunya bantuan bibit tanaman perkebunan untuk warga miskin	Pengadaan Bibit Jagung dan Pupuk untuk kelompok Tani Mutiara Sakti dengan Ketuanya Cut Fauzi Gp. Ujong Pulo Cut.
316	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Saluran pembuangan sudah dalam kondisi menyempit, dangkal sehingga perlu normalisasi kembali saluran.
317	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Pengadaan Bibit Kerbau untuk kelompok Sareena Jaya
318	Pertanian	Produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan saat ini masih cukup rendah	Pengadaan Pupuk NPK.16.16.16 untuk kelompok Tani Tamohon.

No	Urusan	Usulan	Permasalahan
319	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Pengadaan bibit sapi kepada kelompok Rajin Tamita dengan ketua kelompok Khairunnas.
320	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi masyarakat miskin	Bantuan fiber untuk nelayan dengan ukuran kapasitas 100 sebanyak 150 dan Ukuran 50 sebanyak 50 buah.
321	Pertanian	Perlunya bantuan bibit peternakan untuk modal usaha warga miskin	Bantuan bibit Kambing kepada kelompok Tani Yakin Ternak Kambing desa Aron Tunggai.
322	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum adanya drainase dan banyaknya drainase dalam kondisi rusak	Pembersihan parit/saluran pengendalian banjir.
323	Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Penimbunan halaman/lingkungan SDN Sawang I
324	Kelautan dan Perikanan	Perlunya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya bagi masyarakat miskin	Bantuan Bibit Ikan Kakap Putih Kelompok Muloh Meutuah Gp. Teupin Gajah

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2021 harus konsisten dan selaras dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMK Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023. Program pembangunan daerah RPJMK oleh Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, masing-masing program dijabarkan ke dalam kegiatan disertai pagunya. Program yang mendukung pembangunan secara menyeluruh akan dikelompokkan menjadi 2 urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, serta 1 fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan wajib terbagi menjadi 2 yaitu urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri dari 6 bidang urusan dan urusan wajib non pelayanan dasar yang terdiri dari 17 bidang urusan, sedangkan urusan pilihan terbagi menjadi 6 bidang urusan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>01</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						<b>367,369,083,995</b>	<b>422,474,446,594</b>					
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>323,215,443,313</b>	<b>371,697,759,810</b>					
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>250,000,000</b>	<b>287,500,000</b>					
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	250,000,000	287,500,000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>320,436,972,000</b>	<b>368,502,517,800</b>					
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	320,436,972,000	368,502,517,800	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>2,489,971,313</b>	<b>2,863,467,010</b>					
1	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersediannya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	22,000,000	25,300,000	
1	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	227,700,000	261,855,000	
1	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	22,000,000	25,300,000	
1	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	506,979,000	583,025,850	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	40,524,000	46,602,600	
1.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	90,200,000	103,730,000	
1.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	48,000,000	55,200,000	
1.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	16,500,000	18,975,000	
1.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	Tersedianya Komputer/Laptop/Printer Tersedinya perlengkapan Audio Visual/Alat Rekam	10 Unit 1 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	350,000,000	402,500,000	
1.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	terlaksananya Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Kegiatan 1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	246,780,000	283,797,000	
1.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	279,906,313	321,892,260	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	400,000,000	460,000,000	
1.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersedianya meubelair	1 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	25,000,000	28,750,000	
1.01.01.2.03.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	1 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	10,000,000	11,500,000	
1.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	27,000,000	31,050,000	
1.01.01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	32,000,000	36,800,000	
1.01.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	16,000,000	18,400,000	
1.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	22,000,000	25,300,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.01.2.03.37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	terlaksananyaRehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	1 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	107,382,000	123,489,300	
<b>1.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>38,500,000</b>	<b>44,275,000</b>	
1.01.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Paket	Tersedianya Pakaian Dinas ASN dan Operasional Kantor	100 %	38,500,000	44,275,000	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										<b>43,973,640,682</b>	<b>50,569,686,784</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										<b>29,776,240,682</b>	<b>34,242,676,784</b>	
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Gedung yang dibangun	4 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	8,800,000,000	10,120,000,000	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Ruang guru yang Dibangun	4 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	2,500,000,000	2,875,000,000	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Ruang UKS Sekolah yang di bangun	14 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang di bangun	1 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	375,035,000	431,290,250	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah sarana dan prasarana Sekolah yang di bangun	3019 Meter	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	7,854,305,682	9,032,451,534	
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	terbangunnya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sek	5 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Sanitasi Air Bersih yang direhab	4 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Perpustakaan yang direhab	5 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Jamban yang direhab	10 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Rumah Dinas yang direhab	3 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Mobiler yang disediakan	50 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	875,000,000	1,006,250,000	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Tersedianya Komputer dan Printer	20 Set	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	200,000,000	230,000,000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Buku yang disediakan	50 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	2,800,000,000	3,220,000,000	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Tersedianya Biaya Operasional Sekolah	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Alat Praktikum yang disediakan	60 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Terlaksananya Ujian Nasional dan Daerah	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	130,000,000	149,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Terlaksananya Pembinaan Perlombaan Siswa dan try Out	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	280,000,000	322,000,000	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar	1 Tahun	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	5,526,900,000	6,355,935,000	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	100 %	Jumlah Lembaga Pendidikan yang terbina	2 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	435,000,000	500,250,000	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>										<b>2,939,000,000</b>	<b>3,379,850,000</b>	
1.01.02.2.02.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)	100 %	Jumlah Tempat Parkir yang terbangun	1 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	440,000,000	506,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)	100 %	Tersediannya Tempat Ibadah Tersediannya Jamban Sekolah	1 Unit 1 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	240,000,000	276,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)	100 %	Jumlah Ruang kelas yang di rehab	50 Ruang	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)	100 %	Jumlah Ruang Guru yang di rehab	12 Ruang	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium yang di rehab	5 Ruang	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1.01.02.2.02.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)	100 %	Jumlah Fasilitas Parkir yang di rehab	5 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	375,000,000	431,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)	100 %	Bertambahnya Jumlah Meubelair	8 Ruang	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	300,000,000	345,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah (SMP)	100 %	Terlaksananya Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP	18 Kali	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	1,584,000,000	1,821,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>										<b>10,686,400,000</b>	<b>12,289,360,000</b>	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Terbangunnya Gedung PAUD	13 Unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	6,600,000,000	7,590,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Terbangunnya Arena Bermain Siswa Tersedianya Pagar PAUD	4 Paket 1 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	530,000,000	609,500,000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Jumlah Rehabilitasi Runag Kelas Paud	12 Ruang	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebeluer PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Jumlah Mobiler yang disediakan	10 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	286,000,000	328,900,000	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Jumlah Buku dan alat tulis yang disediakan	20 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Jumlah alat praktik yang disediakan	20 Paket	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	797,000,000	916,550,000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan PAUD	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	93,600,000	107,640,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi PAUD	3 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	285,000,000	327,750,000	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Tersedianya Pendidik dan tenaga Kependidikan	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	1,106,800,000	1,272,820,000	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	592,000,000	680,800,000	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Terlaksananya Pembinaan Kelmbagaan PAUD	5 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	396,000,000	455,400,000	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>						<b>572,000,000</b>	<b>657,800,000</b>					
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Jumlah Bangunan SKB	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	0	0	
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Tersedianya Biaya Personil SKB	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	417,000,000	479,550,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Terlaksananya Kegiatan Paket B	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	20,000,000	23,000,000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.1 Pemenuhan Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah, biaya operasional sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan siswa pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	135,000,000	155,250,000	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>										<b>180,000,000</b>	<b>207,000,000</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>										<b>180,000,000</b>	<b>207,000,000</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	2.1.2 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya pendistribusian, pemetaan, pemerataan kuantitas dan kualitas serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	100 %	Tersedianya Dokumen	2 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	180,000,000	207,000,000	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>										<b>329,550,000</b>	<b>378,982,500</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>										<b>29,550,000</b>	<b>33,982,500</b>	
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>29,550,000</b>	<b>33,982,500</b>	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	1.1.5 Menguatnya tatanan adat istiadat dan seni budaya yang Islami	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Cagar budaya yang dikelola secara terpadu	12 situs	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan Lembaga	100 %	29,550,000	33,982,500	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>										<b>210,000,000</b>	<b>241,500,000</b>	
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>210,000,000</b>	<b>241,500,000</b>	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	1.1.5 Menguatnya tatanan adat istiadat dan seni budaya yang Islami	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Partisipasi dalam festival seni dan budaya daerah	1 Even	Terlaksananya Pengembangan kesenian dan Festival kebudayaan daerah	2 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan Lembaga/Sangar	100 %	210,000,000	241,500,000	
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>										<b>90,000,000</b>	<b>103,500,000</b>	
<b>2.22.05.2.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>										<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>	
2.22.05.2.01.02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	1.1.5 Menguatnya tatanan adat istiadat dan seni budaya yang Islami	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	42.86 %	tersedianya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	100 %	60,000,000	69,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2.22.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>										<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2	22	05	2.02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	1.1.5 Menguatnya tatanan adat istiadat dan seni budaya yang Islami	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	42.86 %	terlaksananya Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan anatar daerah	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan Lembaga	100 %	30,000,000	34,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>02</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>96,975,185,865</b>	<b>111,521,463,745</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>56,819,134,694</b>	<b>65,342,004,898</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>54,617,609,694</b>	<b>62,810,251,148</b>					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terbayar Gaji dan Tunjangan ASN	99 %	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	80 %	54,617,609,694	62,810,251,148	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>2,088,025,000</b>	<b>2,401,228,750</b>					
1	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya jasa Surat Menyurat	85 %	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	3,025,000	3,478,750	
1	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana pengurusan telepon, air dan listrik	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	242,000,000	278,300,000	
1	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	22,000,000	25,300,000	
1	02	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Kemitraan Penyediaan Jasa Asuransi Jaminan Kesehatan Jiwa / Tenaga Kerja	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	11,000,000	12,650,000	
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	55,000,000	63,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana pengelolaan administrasi keuangan	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	220,000,000	253,000,000	
1.02.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana penataan kebersihan kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	294,000,000	338,100,000	
1.02.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	16,500,000	18,975,000	
1.02.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana penyediaan ATK	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	49,500,000	56,925,000	
1.02.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana pencetakan dan fotocopy	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	33,000,000	37,950,000	
1.02.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana pengadaan alat listrik/penerangan bangunan kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	60,500,000	69,575,000	
1.02.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana pengadaan alat-alat Perlengkapan Gedung Kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	22,000,000	25,300,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana penyediaan koran	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	16,500,000	18,975,000	
1	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana penyediaan makanan/minuman	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	385,000,000	442,750,000	
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksana perjalanan dinas untuk rapat dan konsultasi/koordinasi	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	200,000,000	230,000,000	
1	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Tersedia Kendaraan dinas/operasional sesuai fungsi	1 unit	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	0	0	
1	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	50,000,000	57,500,000	
1	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	0	0	
1	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	25,000,000	28,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	200,000,000	230,000,000	
1	02	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	33,000,000	37,950,000	
1	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	150,000,000	172,500,000	
1	02	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Rehabilitasi Ringan/Sedang Kendaraan Dinas Operasional dan Ambulance Puskesmas	1 Kegiatan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	85 %	0	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>113,500,000</b>	<b>130,525,000</b>					
1	02	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	1 Kegiatan	Kontribusi Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	56,000,000	64,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk aparatur	1 Kegiatan	Kontribusi Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	30,000,000	34,500,000	
1	02	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya pendidikan dan Peningkatan Pemahaman ASN terhadap kebijakan pembangunan pelatihan formal untuk aparatur	144 orang	Kontribusi Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	0	0	
1	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur (Dinkes)	85 %	Terlaksananya Kegiatan Bimtek	1 Kegiatan	Kontribusi Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah meliputi perencanaan program dan kegiatan yang terorganisir, kelancaran proses administrasi dan tingkat kedisiplinan aparatur	85 %	27,500,000	31,625,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>38,994,901,171</b>	<b>44,844,136,347</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>						<b>1,195,076,171</b>	<b>1,374,337,597</b>					
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %	Terlaksananya pembangunan gedung Griya Sehat pelayanan kesehatan tradisional	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	0	0	
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %	Tersedianya Perencanaan Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Rumah Sakit Kelas D	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	300,000,000	345,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %	Terlaksananya Pembangunan/ Revitalisasi Puskesmas	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	895,076,171	1,029,337,597	
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	0	0	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %	Terlaksananya Pengadaan Ambulance perairan Terlaksananya Pengadaan Ambulans pusling Tersedianya Alat Transportasi distribusi obat Tersedianya mobiler puskesmas Tersedianya mobil Fogging Tersedianya Pusling Surveilans Roda 2	1 paket 1 paket 5 unit 1 paket 1 paket 27 puskesmas	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	0	0	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %	Tersedia Instalasi Air Bersih, Pengelohan Limbah, Generator Set di puskesmas dan prasarana puskesmas pembantu	4 paket	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	0	0	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	0	0	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %	Tersedianya Obat dan vaksin di Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	0	0	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %	Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) di Puskesmas Tersedianya Bahan Habis Pakai di Dinas Kesehatan dan Puskesmas	27 puskesmas 1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.5 Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan/terpeliharanya sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, fasilitas layanan kesehatan lainnya serta tersedianya obat, vaksin dan BHPM	80 %		Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan fasilitas kesehatan	90 %	0	0	
<b>1.02.02.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>37,555,825,000</b>	<b>43,189,198,750</b>		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %		Terlaksana Pembinaan Kesehatan Ibu hamil	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	46,750,000	53,762,500	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %		Terlaksananya pelayanan Jaminan Persalinan Terlaksana Pembinaan Kesehatan ibu Melahirkan Terlaksana pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin tingkat kabupaten Tersosialisasi Darah (Quick Quins)	1 tahun 1 kegiatan 1 tahun 27 puskesmas	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	44,000,000	50,600,000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %		Terlaksananya Pembinaan kesehatan bayi baru lahir Terlaksana pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir tingkat kabupaten	1 Kegiatan 1 tahun	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	44,000,000	50,600,000	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %		Terlaksananya Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Terlaksananya Pemantauan kesehatan anak balita Terlaksana pengelolaan pelayanan kesehatan Balita di kabupaten	1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	26,125,000	30,043,750	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %		Terlaksananya Usaha Kesehatan Sekolah Terlaksana pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1 Kegiatan 1 kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	33,000,000	37,950,000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %		Terlaksananya Kesehatan usia sekolah dan remaja Terlaksananya Pembinaan POSBINDU Terlaksana pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	1 Kegiatan 1 kegiatan 1 tahun	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	83,000,000	95,450,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	2 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	50,000,000	57,500,000	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Presentase Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan (SPM 2018)Presentase Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan (SPM 2018)	100 %	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	0	0	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	0	0	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	0	0	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Pelayanan dan pencegahan penyakit menular seksual (PMS) Terlaksana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga HIV	1 Kegiatan 1 tahun	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	55,000,000	63,250,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Terlaksana Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin dan penanggulangan KEP, AGB, GAKY, KVA dan zat gizi mikro lainnya Terlaksana Pembinaan pencegahan stunting (Presentase Stunting) Tersedianya Operasional pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Terselenggaranya Seminar ASI Eksklusif (Cakupan ASI Eksklusif) Terselenggaranya Sosialisasi Ruang Laktasi Tersusunnya peta informasi Masyarakat Kurang Gizi	1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 Tahun 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	324,500,000	373,175,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksana Kemitraan Pengolahan Limbah - limbah Puskesmas (pengolahan limbah-limbah puskesmas sesuai standar) Terlaksananya Gerakan TTU Sehat Terlaksananya Lomba sekolah dan Kantor Sehat Terlaksananya pemusnahan obat dan bahan medis habis pakai yang kadaluarsa Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Workshop prasarana pengelolaan limbah B3 Tersosialisasi kebijakan lingkungan sehat	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	421,500,000	484,725,000	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Terlaksana Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Kegiatan 1 tahun	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	66,000,000	75,900,000	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Jumlah Toga yang dibina	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	50,000,000	57,500,000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Penemuan dan tatalaksana penderita pada penyakit menular Terlaksananya Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah Terlaksana Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 kegiatan 1 Kegiatan 1 tahun	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	100,000,000	115,000,000	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Peningkatan dan Koordinasi Tim Pengelolaan Kesehatan Jiwa Terlaksana Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Terlaksana Penyuluhan/ Sosialisasi/ pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 kegiatan 1 tahun 1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	66,000,000	75,900,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan sunatan massal Terlaksananya kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya Pelayanan Spesialistik Terlaksana Pelayanan Kesehatan Rujukan (Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan ) Terselenggara UKGMD/UKGS (Jumlah yang melakukan pemeriksaan gigi)	167 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 10000 orang	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	390,450,000	449,017,500	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya pelayanan public safety center (PSC)	1 Kegiatan	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	500,000,000	575,000,000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Terlaksananya Pengadaan alat fogging dan bahan bahan fogging serta penyemprotan sarang nyamuk Terlaksananya Penyemprotan /fogging sarang nyamuk Terlaksana Peningkatan Imunisasi (Cakupan desa/kelurahan universal child immunization/UCI )	1 Tahun 1 kegiatan 27 puskesmas 92 %	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	160,000,000	184,000,000	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Dinas kesehatan terhadap JKN Terlaksana Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Adm manajemen tenaga pelaksana kabupaten, Jaspel dan penunjang OP untuk pelayanan peserta JKN)	1 kegiatan 95 %	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	35,062,500,000	40,321,875,000	
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Pembinaan PIS - PK dengan 12 Indikator	1 Tahun	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Tersedia Operasional Pelayanan Puskesmas luar gedung	24 puskesmas	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	0	0	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Distribusi Obat dan E-Logistik	1 tahun	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	0	0	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Akreditasi Puskesmas	95 %	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	0	0	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP level FKTP, dan tersedianya biaya operasional puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya	100 %	Terlaksana Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Adm manajemen tenaga pelaksana Penyelidikan Epidemiologi-PE, bahan / alat PE)	85 %	Tersedianya operasional penyediaan layanan kesehatan	95 %	33,000,000	37,950,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>						<b>150,000,000</b>	<b>172,500,000</b>					
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Dinkes)	85 %	Terlaksananya monitoring dan evaluasi melalui laporan dan informasi Kesehatan Terlaksana Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Adm manajemen tenaga pelaksana, Bahan / alat pengumpulan data, pengolahan dan analisa data menjadi informasi dan laporan)	1 paket 4 dokumen	Terbangunnya suatu data base kesehatan Aceh Selatan yang komprehensif	80 %	150,000,000	172,500,000	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Dinkes)	85 %	Terlaksana Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Keuangan melalui Platform App SIKDA Generik dan SIMDA	1 paket	Terbangunnya suatu data base kesehatan Aceh Selatan yang komprehensif	80 %	0	0	
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Dinkes)	85 %	Tersedia Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	10 puskesmas	Terbangunnya suatu data base kesehatan Aceh Selatan yang komprehensif	80 %	0	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota</b>						<b>94,000,000</b>	<b>108,100,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.3 Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dilevel Pukesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan upaya akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkendalnya mutu pelayanan kesehatan melalui penataan perizinan fasilitas kesehatan	80 %	Teregistrasinya fasilitas kesehatan	1 kegiatan	Tersedianya operasional tata kelola dan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	90 %	50,000,000	57,500,000	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.3 Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dilevel Pukesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan upaya akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkendalnya mutu pelayanan kesehatan melalui penataan perizinan fasilitas kesehatan	80 %	Terlaksananya Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Terlaksananya Penyusunan standar kesehatan	1 kegiatan 1 kegiatan	Tersedianya operasional tata kelola dan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	90 %	44,000,000	50,600,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>						<b>738,052,600</b>	<b>848,760,490</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	2.02		<b>Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>						<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>					
1	02	03	2.02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.3 Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dilevel Pukesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan upaya akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar melalui perencanaan kebutuhan/pendayagunaan SDM kesehatan secara merata, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis, serta pembinaan teknis dan pengawasan praktik	75 %	Terlaksana Registrasi dan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusiain Kesehatan	1 paket	Tersedianya operasional peningkatan kapasitas SDM kesehatan	75 %	30,000,000	34,500,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	2.03		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</b>						<b>460,000,000</b>	<b>529,000,000</b>					
1	02	03	2.03	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.3 Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dilevel Pukesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan upaya akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar melalui perencanaan kebutuhan/pendayagunaan SDM kesehatan secara merata, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis, serta pembinaan teknis dan pengawasan praktik	75 %	Terdistribusinya/ Pemerataan SDM Kesehatan melalui Perencanaan, Pendayagunaan dan Penempatan Tenaga Kesehatan standar Tersedianya profil dan pemetaan tenaga kesehatan	85 % 1 dokumen	Tersedianya operasional peningkatan kapasitas SDM kesehatan	90 %	60,000,000	69,000,000	
1	02	03	2.03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.3 Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dilevel Pukesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan upaya akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar melalui perencanaan kebutuhan/pendayagunaan SDM kesehatan secara merata, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis, serta pembinaan teknis dan pengawasan praktik	75 %	Terpenuhinya kebutuhan dokter umum dan dokter gigi melalui perjanjian kerjasama	8 orang	Tersedianya operasional peningkatan kapasitas SDM kesehatan	90 %	400,000,000	460,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	2.04		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>248,052,600</b>	<b>285,260,490</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.02.03.2.04.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.3 Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dilevel Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat serta Meningkatkan upaya akreditasi Fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar melalui perencanaan kebutuhan/pendayagunaan SDM kesehatan secara merata, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis, serta pembinaan teknis dan pengawasan praktik	75 %	Terlaksananya Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Terlaksananya Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme tenaga kesehatan Terlaksananya Workshop Management Fasilitator dan Keselamatan (MFK Peralatan Medis dan Utilitas) Terlaksananya Peningkatan tenaga penyuluh kesehatan Tersosialisasinya Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Puskesmas yang Baik dan Tertata Sesuai Peraturan	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	Meningkatnya Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	85 %	248,052,600	285,260,490	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>										<b>75,000,000</b>	<b>86,250,000</b>	
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>										<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.2 Mengoptimalkan Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta Pengkajian Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga Sehat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkendali dan terawasinya produksi pangan industri rumah tangga dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang laik higiene sanitasi, serta terlaksananya Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	80 %	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Kesehatan Makanan Produksi RT Terlaksananya Pengawasan keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industriaktif	1 kegiatan 1 kegiatan	Tersedianya operasional pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	90 %	50,000,000	57,500,000	
<b>1.02.04.2.04</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>										<b>25,000,000</b>	<b>28,750,000</b>	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.2 Mengoptimalkan Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta Pengkajian Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga Sehat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkendali dan terawasinya produksi pangan industri rumah tangga dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang laik higiene sanitasi, serta terlaksananya Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	80 %	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian keamanan dan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan (Restoran) TPM yang yang memenuhi syarat higiene sanitasi	40 usaha 80 %	Tersedianya operasional pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	85 %	25,000,000	28,750,000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>										<b>348,097,400</b>	<b>400,312,010</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>										<b>161,000,000</b>	<b>185,150,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	02 05 2.01 01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.2 Mengoptimaliasi Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta Pengkajian Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga Sehat	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Berkembang dan terlaksananya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dalam pelaksana sehat melalui peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan peran serta/pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor	90 %	Terbentuknya/terbinanya Pos Gizi oleh Tim Penggerak PKK Kab Terlaksananya Pembinaan/pemicuan desa siaga aktif Terlaksananya peringatan Hari Kesehatan Nasional Terlaksana Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kabupaten Terselenggaranya peringatan Hari Besar Daerah	1 kegiatan 1 kegiatan 1 event 1 tahun 1 event	Tersedia Operasional Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	90 %	161,000,000	185,150,000	
<b>1</b>	<b>02 05 2.02</b>		<b>Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>187,097,400</b>	<b>215,162,010</b>				
1	02 05 2.02 01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.1.2 Mengoptimaliasi Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta Pengkajian Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga Sehat	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Berkembang dan terlaksananya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dalam pelaksana sehat melalui peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan peran serta/pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor	90 %	Terlaksananya Gerakan Masyarakat Sehat Terlaksananya Kampanye Smoke Free Generation Terlaksananya kegiatan gerakan Layanan Mobil Curhat Terlaksananya Sosialisasi Perda KTR	1 kegiatan 1 tahun 1 kegiatan 1 event	Kontribusi Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota terhadap Berkembang dan terlaksananya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dalam pelaksana sehat melalui peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan peran serta/pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor	85 %	187,097,400	215,162,010	
<b>7</b>			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
<b>7</b>	<b>01</b>		<b>KECAMATAN</b>										<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	
<b>7</b>	<b>01 02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	
<b>7</b>	<b>01 02 2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	
7	01 02 2.01 01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkoordinasi/ bersinerginya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemda	90 %	Terlaksana Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah (Adm Manajemen Petugas Pelaksana)	12 bulan	Tersedianya Operasional OPD dan ASN	90 %	100,000,000	115,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>02</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>262,588,683,600</b>	<b>301,976,986,140</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>32,164,353,600</b>	<b>36,989,006,640</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>26,390,423,600</b>	<b>30,348,987,140</b>					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terpenuhi gaji dan tunjangan ASN	100 %	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %	26,390,423,600	30,348,987,140	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>3,858,080,000</b>	<b>4,436,792,000</b>					
1	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terpenuhinya layanan jasa surat menyurat	100 %	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	12,000,000	13,800,000	
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terpenuhinya jasa Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100 %	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	32,000,000	36,800,000	
1	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	100 %	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	664,980,000	764,727,000	
1	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor (Gedung Manajemen)	100 %	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	13,200,000	15,180,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor	120 Pcs	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	250,000,000	287,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan	80 Pcs	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	300,000,000	345,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Tersedianya bahan bacaan	9 Media	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	8,400,000	9,660,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Tersedia makan minum Harian/Rapat ASN dan Tamu	100 %	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	717,500,000	825,125,000	
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terlaksananya rapat dan konsultasi keluar daerah	80 OK	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	500,000,000	575,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	12 UT	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	13 UT	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	160,000,000	184,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Tersedianya meubeler rumah sakit	1 PT	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	200,000,000	230,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Tersedianya kebutuhan peralatan untuk pemeliharaan rutin dan berkala peralatan kantor dan penunjang lainnya	1 PT	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	200,000,000	230,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeler	1 PT	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	1 PT	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	17 %	500,000,000	575,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>1,915,850,000</b>	<b>2,203,227,500</b>					
1	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Tersedianya pakaian dinas lengkap	700 Org	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	3 %	292,950,000	336,892,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	02	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Tersedianya pakaian kerja ruang rawat inap dan rawat jalan	300 Org	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	3 %	62,500,000	71,875,000	
1	02	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Tersedianya pakaian Batik	750 Org	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	3 %	260,400,000	299,460,000	
1	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Tersedianya biaya untuk pendidikan dan pelatihan bagi manajemen RS dan tenaga kesehatan	50 50	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	3 %	300,000,000	345,000,000	
1	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	77 %	Tersedianya biaya kontribusi untuk manajemen dan tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/workshop	120 OK	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (RSUDYA)	3 %	1,000,000,000	1,150,000,000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>						<b>230,074,330,000</b>	<b>264,585,479,500</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>						<b>150,820,000,000</b>	<b>173,443,000,000</b>					
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya kebutuhan / terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional Sesuai Tipe RS, serta tersedianya obat, vaksin dan bahan habis pakai	75 %	Terlaksananya pembangunan lanjutan rs rujukan regional/ peningkatan sarana & prasarana kesehatan	6000 M2	Capaian pemenuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional sesuai target Renstra Tahun ke-3	75 %	88,620,000,000	101,913,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya kebutuhan / terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional Sesuai Tipe RS, serta tersedianya obat, vaksin dan bahan habis pakai	75 %	Tersedianya biaya rehabilitasi bangunan rs	100 %	Capaian pemenuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional sesuai target Renstra Tahun ke-3	75 %	1,000,000,000	1,150,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya kebutuhan / terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional Sesuai Tipe RS, serta tersedianya obat, vaksin dan bahan habis pakai	75 %	Tersedianya alat kesehatan yang sesuai standar	70 %	Capaian pemenuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional sesuai target Renstra Tahun ke-3	75 %	35,000,000,000	40,250,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya kebutuhan / terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional Sesuai Tipe RS, serta tersedianya obat, vaksin dan bahan habis pakai	75 %	Tersedia dan terpeliharanya alat kalibrasi	100 %	Capaian pemenuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional sesuai target Renstra Tahun ke-3	75 %	500,000,000	575,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya kebutuhan / terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional Sesuai Tipe RS, serta tersedianya obat, vaksin dan bahan habis pakai	75 %	Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan obat - obatan bagi pasien dan pengguna jasa rs	100 %	Capaian pemenuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional sesuai target Renstra Tahun ke-3	75 %	15,000,000,000	17,250,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya kebutuhan / terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional Sesuai Tipe RS, serta tersedianya obat, vaksin dan bahan habis pakai	75 %	Tersedia bahan habis pakai	100 %	Capaian pemenuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional sesuai target Renstra Tahun ke-3	75 %	10,000,000,000	11,500,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya kebutuhan / terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional Sesuai Tipe RS, serta tersedianya obat, vaksin dan bahan habis pakai	75 %	Terpeliharanya Prasarana dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	100 %	Capaian pemenuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional sesuai target Renstra Tahun ke-3	75 %	500,000,000	575,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.2 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai perkembangan Tipe rumah sakit dan standar pelayanan akreditasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya kebutuhan / terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional Sesuai Tipe RS, serta tersedianya obat, vaksin dan bahan habis pakai	75 %	Terpeliharanya Alkes / Alat Penunjang Medik	100 %	Capaian pemenuhan dan terpeliharanya sarana dan prasarana RS Regional sesuai target Renstra Tahun ke-3	75 %	200,000,000	230,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>79,254,330,000</b>	<b>91,142,479,500</b>					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.1 Terwujudnya pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dr H Yuliddin Away yang bermutu, Islami dan terjangkau kepada Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya Biaya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	Frekuensi penyuluhan/sosialisasi	100 Kali	Defisit	0 %	150,000,000	172,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.1 Terwujudnya pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dr H Yuliddin Away yang bermutu, Islami dan terjangkau kepada Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Terpenuhinya Biaya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 %	Tersedianya operasional pelayanan rumah sakit	100 %	Defisit	0 %	79,104,330,000	90,969,979,500	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>						<b>350,000,000</b>	<b>402,500,000</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>						<b>350,000,000</b>	<b>402,500,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	03	2.02	03		Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.2.1 Terwujudnya pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dr H Yuliddin Away yang bermutu, Islami dan terjangkau kepada Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Gunung Kerambil	Peningkatan Kapasitas / Penyegaran SDM Kesehatan dan Non Kesehatan sesuai dengan Unit Layanan dan Type RS	80 %	Presentase peningkatan kapasitas/penyegaran SDM kesehatan sesuai dengan unit layanan dan tipe RS	100 %	Capaian Peningkatan Kapasitas / Penyegaran SDM Kesehatan sesuai dengan Unit Layanan dan Type RS Kumulatif Tahun ke 1 dan 2 Renstra	80 %	350,000,000	402,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>03</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>65,341,655,697</b>	<b>75,142,904,052</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>7,821,191,697</b>	<b>8,994,370,452</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>165,000,000</b>	<b>189,750,000</b>					
1	03	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Dokumen Monitoring Perencanaan Pembangunan Daerah	Ada Doc	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	1 Tahun	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1 Dok	165,000,000	189,750,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>5,314,692,607</b>	<b>6,111,896,498</b>					
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas PUPR Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN Dinas PUPR	1 Tahun 1 Tahun	Tersedianya Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN Dinas PUPR	1 Tahun	5,314,692,607	6,111,896,498	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>2,236,499,090</b>	<b>2,571,973,954</b>					
1	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	4,000,000	4,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Air, Listrik, Internet dan TV Berlangganan Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	130,509,225	150,085,609	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	03	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	41,695,500	47,949,825	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	506,570,900	582,556,535	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Jasa Kebersihan Kantor Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.03.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	36,000,000	41,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.03.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.03.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	27,723,465	31,881,985	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.03.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	44,000,000	50,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.03.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Dinas PUPR	11 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	231,000,000	265,650,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.03.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Pegawai Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	250,000,000	287,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.03.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Dinas PUPR	23 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.03.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas PUPR	20 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	200,000,000	230,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.03.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Dinas PUPR	25 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	200,000,000	230,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	03	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas PUPR	1 Tahun	250,000,000	287,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>105,000,000</b>	<b>120,750,000</b>					
1	03	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Tersedianya Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pegawai Dinas PUPR	120 Stell	Terciptanya Disiplin ASN Dinas PUPR	1 Tahun	80,000,000	92,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	03	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Tersedianya Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai Dinas PUPR	1 Tahun	Terciptanya Disiplin ASN Dinas PUPR	1 Tahun	25,000,000	28,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>						<b>10,013,184,000</b>	<b>11,515,161,600</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>2,357,400,000</b>	<b>2,711,010,000</b>					
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	5.43 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Lingkungan Hidup	4 Dok.	Terlaksananya Pemngelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada WS Kewenangan Kabupaten	1 Keg	428,000,000	492,200,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	5.43 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Lingkungan Hidup	4 Dok.	Terlaksananya Pemngelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada WS Kewenangan Kabupaten	1 Keg	428,000,000	492,200,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Kotafajar Kab. Aceh Selatan, Meukek, Lhok Aman	Persentase bangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	5.43 %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Terbangun	300 M	Terlaksananya Pemngelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada WS Kewenangan Kabupaten	1 Keg	288,900,000	332,235,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Krueng Batee Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Gunung Puding Kab. Aceh Selatan, Trumon, Pantan Bilie Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Ie Jeureuneh	Persentase bangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	5.43 %	Panjang Pelaksanaan Normalisasi/ Restorasi/ Pemeliharaan Sungai	4300 M	Terlaksananya Pemngelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada WS Kewenangan Kabupaten	1 Keg	581,500,000	668,725,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	5.43 %	Tersedianya Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	1 Tahun	Terlaksananya Pemngelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada WS Kewenangan Kabupaten	1 Keg	321,000,000	369,150,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	02	2.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	5.43 %	Tersedianya Biaya Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/ Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai	1 Tahun	Terlaksananya Pemngelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada WS Kewenangan Kabupaten	1 Keg	310,000,000	356,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>7,655,784,000</b>	<b>8,804,151,600</b>				
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	9.65 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Lingkungan Hidup	4 Dok.	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	1 Keg	214,000,000	246,100,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Alur Mas Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Meukek, Blang Teungoh Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Sawang, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Keumumu Seberang Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Sawah Tingkeum	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	9.65 %	Panjang Irigasi Permukaan Kabupaten Terbangun	6181 M	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	1 Keg	5,933,784,000	6,823,851,600	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.03.02.2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Kuta Trieng	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	9.65 %	jumlah panjang bendung Irigasi Terbangun	200 M	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	1 Keg	428,000,000	492,200,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	9.65 %	Jumlah Panjang Irigasi yang ditingkatkan	0 M	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	1 Keg	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	9.65 %	Panjang Irigasi Permukaan Kabupaten Terehab	0 M	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	1 Keg	250,000,000	287,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	9.65 %	Panjang Bendung Irigasi Terehab	0 M	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	1 Keg	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	9.65 %	Tersedianya Biaya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1 Tahun	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	1 Keg	415,000,000	477,250,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	9.65 %	Tersedianya Biaya Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1 Tahun	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten	1 Keg	415,000,000	477,250,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						<b>749,000,000</b>	<b>861,350,000</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>						<b>749,000,000</b>	<b>861,350,000</b>					
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik	8.33 %	Jumlah Gedung Workshop PUPR Terbangun	1 Unit	Terbangunnya Bangunan Gedung Daerah	1 Unit	749,000,000	861,350,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>						<b>45,099,280,000</b>	<b>51,864,172,000</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>10</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>45,099,280,000</b>	<b>51,864,172,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis dan Lingkungan Hidup Pengembangan Jalan	11 Dok.	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	2,548,000,000	2,930,200,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Terlaksananya Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten	2 Dok.	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	750,000,000	862,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Ujong Pulo Rayeuk	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Panjang Jalan Kabupaten Terbangun	4.5 KM	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	1,500,000,000	1,725,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Simpang	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Panjang Pelebaran Jalan Kabupaten Menuju Standar	1.9 KM	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Trumon, Kuta Baro Kab. Aceh Selatan, Trumon, Pantan Bilie Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Pucuk Lembang Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Kapa Sesak Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	18.45 KM	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	26,259,000,000	30,197,850,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	1 Tahun	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	840,000,000	966,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Pasie Lembang Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Apha Kab. Aceh Selatan, Meukek, Alue Baro Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Pucuk Lembang Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Cot Bayu	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Panjang Jembatan Kabupaten Terbangun	254 M	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	10,589,880,000	12,178,362,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Kampung Sawah	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Panjang Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	14 M	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	360,500,000	414,575,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.03.10.2.01.17	Pelebaran Jembatan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Jumlah Panjang Jembatan yang dilebarkan	0 M	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Jumlah Panjang Jembatan Terehab	0 M	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	50,000,000	57,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten	1 Tahun	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	420,000,000	483,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	9 %	Jumlah Pengadaan Alat-alat Berat Tersedianya Biaya Rehab/ Pemeliharaan Alat-alat Berat	1 Unit 11 Unit	Terciptanya Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1 Keg	1,781,900,000	2,049,185,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>						<b>1,659,000,000</b>	<b>1,907,850,000</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</b>						<b>1,128,750,000</b>	<b>1,298,062,500</b>					
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.2 Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi Perijinan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRW	1 Doc	Jumlah Dokumen	1 Dok.	Tersedianya Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR Kab.Aceh Selatan	1 Keg	315,000,000	362,250,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.2 Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi Perijinan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRW	1 Doc	Jumlah Dokumen	1 Dok.	Tersedianya Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR Kab.Aceh Selatan	1 Keg	787,500,000	905,625,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.2 Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi Perijinan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRW	1 Doc	Jumlah Dokumen	1 Dok.	Tersedianya Dokumen Penetapan RTRW dan RRTR Kab.Aceh Selatan	1 Keg	26,250,000	30,187,500	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>267,750,000</b>	<b>307,912,500</b>					
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.2 Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah di tetapkan dengan QANUN	1 Doc	Jumlah Dokumen	300 Dok.	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	1 Keg	267,750,000	307,912,500	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>12</b>	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>262,500,000</b>	<b>301,875,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.2 Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan/Regulasi Perijinan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRW	1 Doc	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Tahun	Tersedianya Dokumen Kebijakan/Regulasi Perijinan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRW	1 Keg	262,500,000	301,875,000	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>												
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>												
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pegawai Dinas PUPR	1 Tahun	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Tahun	60,000,000	69,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1	03				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						29,451,951,000	33,869,743,650					
1	03	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>						1,900,000,000	2,185,000,000					
1	03	03	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>						1,900,000,000	2,185,000,000					
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Masyarakat yang sudah memiliki Sarana Air Bersih	14.22 Persen	Tersedianya Data Rispam dan Jakstrada	2 Dokumen	Terbangunnya Sarana Air Bersih	1 Tahun	950,000,000	1,092,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber air	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Masyarakat yang sudah memiliki Sarana Air Bersih	14.22 Persen	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih Masyarakat	5 Unit	Terbangunnya Sarana Air Bersih	1 Tahun	950,000,000	1,092,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>						0	0					
1	03	05	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						0	0					
1	03	05	2.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan sanitasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Masyarakat yang sudah memiliki Sarana Sanitasi	24.10 %	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat	28 Unit	Terbangunnya Sanitasi Masyarakat	1 Tahun	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>						6,871,951,000	7,902,743,650					
1	03	06	2.01		<b>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						6,871,951,000	7,902,743,650					
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan sanitasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Panjang Saluran Terbangun	40.51 %	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-Gorong	8500 Meter	Terbangunnya Saluran / Drainase	1 Tahun	6,871,951,000	7,902,743,650	
1	03	07			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>						20,680,000,000	23,782,000,000					
1	03	07	2.01		<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota</b>						20,680,000,000	23,782,000,000					
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Meningkatnya Kualitas dan Jumlah Infrastruktur Terbangun	38.50 %	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman	11350 Meter	Jumlah Peningkatan Kualitas dan Jumlah Infrastruktur Terbangun	192 Unit	20,680,000,000	23,782,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	04				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						7,290,095,636	8,383,609,981					
1	04	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						4,308,595,636	4,954,884,981					
1	04	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,756,346,636	3,169,798,631					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terbayarnya Gaji ASN Terbayarnya Tunjangan ASN	1 Tahun 1 Tahun	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2,756,346,636	3,169,798,631	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1.04.01.2.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>										<b>1,508,049,000</b>	<b>1,734,256,350</b>	
1.04.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tingkat Pelayanan dan jumlah surat menyurat	600 Lembar	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4,200,000	4,830,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Berfungsinya alat komunikasi, air dan listrik Rekening telp air dan listrik	1 Tahun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	67,300,000	77,395,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	51,000,000	58,650,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Tenaga Kontrak yang mendapat Jaminan Asuransi Jiwa	1 Tahun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	6,000,000	6,900,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jasa Pengaman Gudang/Kantor	1 Tahun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	28,800,000	33,120,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah penerima jasa administrasi keuangan	15 Orang	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	427,840,000	492,016,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Bersihnya Areal Kantor	1 Tahun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	37,800,000	43,470,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kegiatan administrasi perkantoran	136 Kegiatan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	85,000,000	97,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.04.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	39,000,000	44,850,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah titik instalasi listrik	50 Titik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	11,000,000	12,650,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Media cetak/Surat Kabar	11 Media	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	14,000,000	16,100,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah makan dan minum kantor	11 Bulan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	205,974,000	236,870,100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	300,000,000	345,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Perlengkapan gedung kantor	4 Unit	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4,000,000	4,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Peralatan gedung kantor	15 Unit	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	42,050,000	48,357,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Mebeleur	10 Unit	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	18,900,000	21,735,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.04.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional	15 Unit	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	93,195,000	107,174,250	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	04 01 2.03 34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	40 Unit	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	26,990,000	31,038,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	04 01 2.03 38		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab	1 Unit	Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	45,000,000	51,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1</b>	<b>04 01</b>	<b>2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									<b>44,200,000</b>	<b>50,830,000</b>		
1	04 01 2.04 05		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Jumlah Pakaian Khusus	73 Lembar	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100 %	29,200,000	33,580,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	04 01 2.04 09		Pendidikan dan Pelatihan Formal	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	73 Lembar	Tingkat Kedisiplinan Aparatur	100 %	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1</b>	<b>04 02</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>									<b>400,000,000</b>	<b>460,000,000</b>		
<b>1</b>	<b>04 02</b>	<b>2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>									<b>400,000,000</b>	<b>460,000,000</b>		
1	04 02 2.01 03		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	6.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan sanitasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedia dan termutakhirnya Dokumen Informasi/ Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Dokumen	Terdatanya Rumah Korban Bencana	1 Dokumen	Tersedianya Data Rumah Masyarakat yg terkena Bencana	1 Dokumen	400,000,000	460,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>04 03</b>		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH</b>									<b>1,461,500,000</b>	<b>1,680,725,000</b>		
<b>1</b>	<b>04 03</b>	<b>2.02</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>									<b>300,000,000</b>	<b>345,000,000</b>		
1	04 03 2.02 01		Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya kawasan ekonomi cepat tumbuh	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Revitalisasi Kawasan Kota dan Tertatanya Kawasan Kumuh Perkotaan	5.14 Persen	Terupdatenya Lokasi Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Terupdate nya Data Kawasan Kumuh	100 %	300,000,000	345,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
<b>1</b>	<b>04 03</b>	<b>2.03</b>	<b>Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>									<b>1,161,500,000</b>	<b>1,335,725,000</b>		
1	04 03 2.03 02		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan sanitasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Persentase Rumah Layak Huni Terbangun	0.78 %	Terehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	0 Unit	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1000 Unit	1,161,500,000	1,335,725,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>04 04</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>									<b>1,120,000,000</b>	<b>1,288,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	2.01	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>							<b>1,120,000,000</b>	<b>1,288,000,000</b>					
1	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak huni dan sanitasi	Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Padang Beurahan	Tersedia dan termutakhirnya Dokumen Informasi/ Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 %	Tersedianya PSU di Kawasan Permukiman	1000 Meter	Terbangunnya PSU di Permukiman	1 Tahun	1,120,000,000	1,288,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>7</b>				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
<b>7</b>	<b>01</b>			<b>KECAMATAN</b>							<b>90,000,000</b>	<b>103,500,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							<b>90,000,000</b>	<b>103,500,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>90,000,000</b>	<b>103,500,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksana Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 18 Kecamatan)	100 %	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	Administrasi Perkantoran	100 %	90,000,000	103,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>05</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>7,399,064,469</b>	<b>8,508,924,139</b>					
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>6,631,894,469</b>	<b>7,626,678,639</b>					
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>4,103,064,469</b>	<b>4,718,524,139</b>					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Sejahteranya ASN Satpol PP, WH dan Linmas	1 Tahun	4,103,064,469	4,718,524,139	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>2,467,430,000</b>	<b>2,837,544,500</b>					
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 Tahun			2,800,000	3,220,000	
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun			33,120,000	38,088,000	
1	05	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lancarnya administrasi keuangan	1 Tahun			718,590,000	826,378,500	
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kebersihan kantor	1 Tahun			18,550,000	21,332,500	
1	05	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	1 Tahun			9,620,000	11,063,000	
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun			28,500,000	32,775,000	
1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			11,120,000	12,788,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.05.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen listrik kantor	1 Tahun			7,000,000	8,050,000	
1.05.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen listrik dan perawatannya peralatan dan perlengkapan kantortor	1 Tahun			12,350,000	14,202,500	
1.05.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 Koran			8,400,000	9,660,000	
1.05.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya makanan dan minuman pegawai	1 Tahun			114,910,000	132,146,500	
1.05.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanya kegiatan rapat kerja, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun			129,400,000	148,810,000	
1.05.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang			Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun			900,000,000	1,035,000,000	
1.05.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya perlengkapan kantor yang telah rusak untuk kenyamanan kerja	1 Tahun			310,420,000	356,983,000	
1.05.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya perlengkapan Tersedianya Laptop, Printer dll untuk penunjang kerja	1 Tahun			32,000,000	36,800,000	
1.05.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dan terpenuhinya kekurangan meja dan kursi kerja	1 Tahun			20,850,000	23,977,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	05	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan gedung	1 Tahun			14,800,000	17,020,000	
1	05	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun			95,000,000	109,250,000	
1	05	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya rehab pagar dan pintu gerbang kantor	1 Tahun			0	0	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>61,400,000</b>	<b>70,610,000</b>				
1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya pakaian dinas untuk Pegawai Satpol PP, WH dan Linmas	1 Tahun			35,000,000	40,250,000	
1	05	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal keperluan kantor	1 Tahun			26,400,000	30,360,000	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>						<b>767,170,000</b>	<b>882,245,500</b>				
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>44,860,000</b>	<b>51,589,000</b>				
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	1 tahun			44,860,000	51,589,000	
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan pelatihan-pelatihan untuk petugas Satpol PP, WH dan Linmas dengan TNI/Polri	1 kegiatan			0	0	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>						<b>722,310,000</b>	<b>830,656,500</b>				
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Pengawasan, Pengamanan, Pengawasan dan Penegakan Perda/Qanun oleh Sartpol PP Terlaksananya operasional penegakan, pembinaan dan pengawasan Qanun Syari"at Islam	168 kegiatan 73 kegiatan			722,310,000	830,656,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						39,000,000	44,850,000					
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						39,000,000	44,850,000					
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						39,000,000	44,850,000					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi, evaluasi dan monitoring ke kecamatan	1 Tahun			39,000,000	44,850,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>03</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>10,000,000</b>	<b>11,500,000</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						<b>10,000,000</b>	<b>11,500,000</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>						<b>10,000,000</b>	<b>11,500,000</b>					
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Dokumen Perencanaan /Pengawasan Penanggulangan Bencana	Dok 1	Tersedianya Dokumen Perencanaan untuk Kegiatan OTSUS, APBA dan APBN serta DED Pengendalian	1 Dokumen	Dokumen Pengendalian Banjir serta Dokumen Perencanaan OTSUS, APBA dan APBN	100 %	10,000,000	11,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1</b>	<b>05</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>10,978,144,684</b>	<b>12,624,866,387</b>					
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>5,272,723,684</b>	<b>6,063,632,237</b>					
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>3,293,144,684</b>	<b>3,787,116,387</b>					
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	1 Tahun 1 Tahun	Tercapainya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3,293,144,684	3,787,116,387	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>1,979,579,000</b>	<b>2,276,515,850</b>					
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	1240 Surat	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	82,830,000	95,254,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terlaksananya Pembayaran jasa Komunikasi listrik, air, telp, internet dan Tv Kabel yang memadai	12 Bulan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	142,680,000	164,082,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	05	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Kali	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terjaminnya Keselamatan Kerja Bagi Pegawai Non PNS	120 Orang	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	17,280,000	19,872,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	05	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terlaksananya Pembayaran jasa administrasi keuangan	19 Orang	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	177,775,000	204,441,250	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.05.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terjaganya Kebersihan Kantor	12000 m2	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	27,600,000	31,740,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.05.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	36 Kegiatan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	31,132,000	35,801,800	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.05.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Tersedianya bahan cetakan dan pengadaan kebutuhan kantor	30 Kegiatan	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	7,000,000	8,050,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.05.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Tersedianya surat kabar dan peraturan Perundang-undangan	16 Media	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	14,280,000	16,422,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.05.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Tersedianya makan dan minuman harian pegawai dan Non pegawai BPBD, tamu serta acara-acara rapat Dinas	37800 Kali	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	365,000,000	419,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.05.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	128 Kali	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	237,000,000	272,550,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.05.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk PNS Aceh Selatan	5 Unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.05.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2 Unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	29,000,000	33,350,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.05.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	8 Unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	80,000,000	92,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 05 01 2.03 25	Pengadaan Mebeleur	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Tersedianya Pengadaan Meubeleur	9 Unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1 05 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terawatnya Gedung Kantor, Pos Damkar dalam Kabas	100 %	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1 05 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Tersedianya operasional dan perawatan Kendaraan Dinas BPBD	20 Unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	541,202,000	622,382,300	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1 05 01 2.03 32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor	7 Unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	4,800,000	5,520,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1 05 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	20 Unit	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Masyarakat	90 %	27,000,000	31,050,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1 05 01 2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	
1 05 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	% 100	Tersedianya Pakaian Dinas Untuk Penunjang Disiplin Aparatur Untuk Penunjang Disiplin Aparatur	50 Orang	Kelancaran Pelayanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1 05 01 2.04 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	% 100	Terlaksananya BIMTEK untuk Penunjang Aparatur	2 Orang	Kelancaran Pelayanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1 05 03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>										<b>3,368,411,000</b>	<b>3,873,672,650</b>	
<b>1 05 03 2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>										<b>194,200,000</b>	<b>223,330,000</b>	
1 05 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Presentase Peningkatan Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana	0.02 %	Tersedianya Kajian Risiko Bencana Kabupaten Aceh Selatan	1 Dokumen	Pengurangan Resiko Bencana	50 %	150,000,000	172,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Presentase Peningkatan Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana	0,02 %	Terwujudnya Pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi rawan bencana	60 Kali	Pengurangan Resiko Bencana	50 %	44,200,000	50,830,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>										<b>3,154,211,000</b>	<b>3,627,342,650</b>	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	95 %	Terjaminnya keselamatan kerja bagi pegawai PB	219 Orang	Terlaksananya Penanganan dan Pengelolaan Kejadian Bencana	100 %	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	95 %	Terlaksananya penginputan data dan kejadian bencana	146 Kali	Terlaksananya Penanganan dan Pengelolaan Kejadian Bencana	100 %	131,550,000	151,282,500	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	95 %	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penggulangan Bencana	16 Unit	Terlaksananya Penanganan dan Pengelolaan Kejadian Bencana	100 %	2,305,000,000	2,650,750,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	95 %	Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	1 Desa	Terlaksananya Penanganan dan Pengelolaan Kejadian Bencana	100 %	150,000,000	172,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	95 %	terlaksananya rekonstruksi prasarana fisik, penilaian kerugian dan rehabilitasi ekonomi pasca bencana	6 Lokasi	Terlaksananya Penanganan dan Pengelolaan Kejadian Bencana	100 %	93,847,000	107,924,050	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	95 %	Terlaksananya penanganan Reaksi Cepat PB	54 Kali	Terlaksananya Penanganan dan Pengelolaan Kejadian Bencana	100 %	473,814,000	544,886,100	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>										<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Presentase Peningkatan Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana	0.02 %	Persentase Respon Cepat Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penyakit/Wabah	1 Tahun	Kebutuhan logistik dan Obat-obatan bagi korban bencana	1 Tahun	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Presentase Peningkatan Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana	0.02 %	Jumlah Penyaluran bahan logistik kebutuhan dasar dan obat-obatan bagi korban bencana	1 Tahun	Kebutuhan logistik dan Obat-obatan bagi korban bencana	1 Tahun	20,000,000	23,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1.05.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Dokumen Perencanaan /Pengawasan Penanggulangan Bencana	1 Dok	Peningkatan kualitas dan Kapasitas Pengelola Penanganan Penanggulangan Bencana	2 Kali	Terarahnya Penanganan Kejadian Penanggulangan Bencana	100 %	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>										<b>2,337,010,000</b>	<b>2,687,561,500</b>	
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>2,337,010,000</b>	<b>2,687,561,500</b>	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Jumlah Rumah Terdampak kebakaran	156 Unit	Terlaksananya Pengendalian dan Penanganan kejadian Kebakaran dalam standar Response Time	100 %	Tertanganinya penanganan Bahaya kebakaran secara baik dan maksimal	90 %	2,087,010,000	2,400,061,500	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.2.1 Meningkatnya mitigasi dan adaptasi terhadap resiko bencana	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Jumlah Rumah Terdampak kebakaran	156 Unit	Tertanganinya Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	90 Kali	Tertanganinya penanganan Bahaya kebakaran secara baik dan maksimal	90 %	250,000,000	287,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>										<b>110,000,000</b>	<b>126,500,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>110,000,000</b>	<b>126,500,000</b>					
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>110,000,000</b>	<b>126,500,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	% 100	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	1262 Kali	Terwujudnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten Aceh Selatan/Antar Kecamatan	100 %	110,000,000	126,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>06</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>8,072,270,770</b>	<b>9,283,111,385</b>					
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>3,967,270,770</b>	<b>4,562,361,385</b>					
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,834,690,770</b>	<b>3,259,894,385</b>					
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Gaji dan Tunjangan PNS	40 Orang	Terpenuhinya hak PNS Dinas Sosial	1 Tahun	2,834,690,770	3,259,894,385	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>1,102,580,000</b>	<b>1,267,967,000</b>					
1	06	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	3,000,000	3,450,000	
1	06	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	60,000,000	69,000,000	
1	06	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	21,000,000	24,150,000	
1	06	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	10 Unit	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	25,000,000	28,750,000	
1	06	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	172,000,000	197,800,000	
1	06	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	22,000,000	25,300,000	
1	06	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	30,000,000	34,500,000	
1	06	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	27,500,000	31,625,000	
1	06	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	7,000,000	8,050,000	
1	06	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 Media Massa	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	18,080,000	20,792,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.06.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman	11 Bulan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	57,000,000	65,550,000	
1.06.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	250,000,000	287,500,000	
1.06.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15 Unit	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	25,000,000	28,750,000	
1.06.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10 Unit	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	75,000,000	86,250,000	
1.06.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Pengadaan Mebeleur	30 Unit	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	50,000,000	57,500,000	
1.06.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	150,000,000	172,500,000	
1.06.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25 Unit	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	20,000,000	23,000,000	
1.06.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	20 Unit	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	30,000,000	34,500,000	
1.06.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	20 Unit	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	10,000,000	11,500,000	
1.06.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Penataan Ruang Kerja dan Pengecetan Gedung Kantor Perluasan Ruang Kerja dan Aula Rapat	1 Paket 1 Paket	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Dinas Sosial	100 Persen	50,000,000	57,500,000	
<b>1.06.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>	
1.06.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Pakaian PDH ASN OPD	47 Stel	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Sosial	100 Persen	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial  
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	06	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Bimtek	4 Kali	Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Sosial	100 Persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>						<b>1,170,000,000</b>	<b>1,345,500,000</b>					
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>1,170,000,000</b>	<b>1,345,500,000</b>					
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.2 Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan kesadaran sosial masyarakat dalam mengatasi persoalan sosial	100 Persen	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	18 Orang	Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	80,000,000	92,000,000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.2 Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan kesadaran sosial masyarakat dalam mengatasi persoalan sosial	100 Persen	Sarana Pendukung Kerja TKSK Aceh Selatan	18 Orang	Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	0	0	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.2 Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan kesadaran sosial masyarakat dalam mengatasi persoalan sosial	100 Persen	Bantuan UEP Home Industri Bantuan UEP Perdagangan Bantuan UEP Pertanian	31 Paket 35 Paket 34 Paket	Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	990,000,000	1,138,500,000	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.2 Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan kesadaran sosial masyarakat dalam mengatasi persoalan sosial	100 Persen	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	1 Tahun	Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.2 Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan kesadaran sosial masyarakat dalam mengatasi persoalan sosial	100 Persen	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Tahun	Terpenuhinya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	0	0	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>						<b>1,025,000,000</b>	<b>1,178,750,000</b>					
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>						<b>1,025,000,000</b>	<b>1,178,750,000</b>					
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Permakanan	20 Orang	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Tahun	100,000,000	115,000,000	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Sandang	20 Orang	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Tahun	100,000,000	115,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Alat Pendengaran Kaca Mata Low Vision Kursi Roda Biasa Kursi Roda Serebral Palsy Tersedianya Alat bantu Tongkat	35 Unit 35 Unit 35 Unit 20 Unit 45 Unit	100 Tahun	600,000,000	690,000,000		
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 Orang	100 Tahun	20,000,000	23,000,000		
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	18 Kali	100 Tahun	25,000,000	28,750,000		
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	18 Kali	100 Tahun	25,000,000	28,750,000		
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	72 Orang	100 Tahun	15,000,000	17,250,000		
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25 Orang	100 Tahun	50,000,000	57,500,000		
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1 Tahun	100 Tahun	20,000,000	23,000,000		
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Pemberian Layanan Kedaruratan	1 Tahun	100 Tahun	25,000,000	28,750,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Tahun	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Tahun	25,000,000	28,750,000	
1.06.04.2.01.13	Pemberian Layanan Rujukan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan dan Pengemis diluar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	Tersedianya Pemberian Layanan Rujukan	1 Tahun	Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 Tahun	20,000,000	23,000,000	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Layanan Bagi PMKS	100 %	Terlaksanannya rehabilitasi sosial bagi PMKS Lainnya	1 Tahun	Terlaksanannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	1 Tahun	0	0	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Layanan Bagi PMKS	100 %	Terlaksanannya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya	1 Tahun	Terlaksanannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	1 Tahun	0	0	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>										<b>1,315,000,000</b>	<b>1,512,250,000</b>	
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>										<b>700,000,000</b>	<b>805,000,000</b>	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Jambo Manyang	Persentase Layanan Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS)	100 %	Terlaksanannya Operasional dan Pelayanan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Terlaksanannya Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	1 Tahun 1 Paket	Terpenuhinya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1 Tahun	700,000,000	805,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>615,000,000</b>	<b>707,250,000</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Data Bidang Sosial	1 Dokumen	Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pelaksanaan Verivali DTKS Pemasangan Stiker Identitas Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemasangan Stiker Identitas Penerima PKH	17250 RT 13930 KPM 40000 RT 17250 RT 800 KPM	Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	550,000,000	632,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Data Bidang Sosial	1 Dokumen	Bantuan KUBE dan UEP bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Terlaksananya Rehab Rumah Tidak Layak Huni Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	150 Kelompok 100 Unit	Terpenuhinya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	65,000,000	74,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>										<b>450,000,000</b>	<b>517,500,000</b>	
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>										<b>450,000,000</b>	<b>517,500,000</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	Tersedianya Makanan bagi Korba Bencana	50 Kasus	Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	Tersedianya Sandang bagi Korba Bencana	50 Kasus	Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	Bahan Bangunan Rumah Bagi Korban Bencana	1 Tahun	Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Tahun	50,000,000	57,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	Tersedianya Kebutuhan khusu bagi Korba Bencana	50 Kasus	Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.1 Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	Terlaksananya dukungan psikotik bagi Korba Bencana	50 Kasus	Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Tahun	50,000,000	57,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>										<b>145,000,000</b>	<b>166,750,000</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>										<b>145,000,000</b>	<b>166,750,000</b>	
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.2 Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Internalisasi Nilai-nilai Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	1 Kegiatan	Rehab Makam Pahlawan Daerah	3 Lokasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Tahun	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.2 Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Internalisasi Nilai-nilai Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	1 Kegiatan	Pemeliharaan Makam Pahlawan Daerah Peringatan Hari Pahlawan Nasional	3 Lokasi 1 Event	Terpenuhinya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Tahun	145,000,000	166,750,000	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	3.4.2 Mewujudkan peningkatan keterberdayaan sosial PMKS serta peningkatan kesadaran sosial masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Internalisasi Nilai-nilai Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	1 Kegiatan	Pengamanan Makam Pahlawan Daerah	3 Lokasi	Terpenuhinya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Tahun	0	0	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7.01	<b>KECAMATAN</b>												
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>												
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Waktu Pelaksanaan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	1 Tahun	Terpenuhinya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	25,000,000	28,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	08				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						6,059,495,364	6,968,419,668					
2	08	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						5,025,299,495	5,779,094,419					
2	08	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						4,293,563,747	4,937,598,309					
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Meningkatkan kinerja pegawai	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Layanan	90 %	4,293,563,747	4,937,598,309	
2	08	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						731,735,748	841,496,110					
2	08	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Tersedianya Materai,perangko dan benda lainnya	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	7,200,000	8,280,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Terlayani Kebutuhan Jasa listrik dan air kantor	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	65,800,000	75,670,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Terlayani Kebutuhan kantor	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	8,750,000	10,062,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Terlayani kebutuhan administrasi kantor	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	145,500,000	167,325,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih kantor	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	50,100,000	57,615,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	48,400,000	55,660,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	13,200,000	15,180,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	08	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Tersedianya fasilitas penerangan kantor	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	2,750,000	3,162,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Tersedianya Sarana Informasi dan Iptek	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	9,700,000	11,155,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Tersedianya makan dan minum pegawai	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	119,280,000	137,172,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Tersedianya biaya konsultasi luar daerah	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	131,142,954	150,814,397	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	99,912,794	114,899,713	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (DP3AKB)	80 %	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	Meningkatnya Operasional Kerja ASN	90 %	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>										<b>392,214,369</b>	<b>451,046,524</b>	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>170,000,000</b>	<b>195,500,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan SKPD yang melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender	30 %	Persentase SKPD yang melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender	6 Bulan	Kontribusi Kegiatan (Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota) terhadap Peningkatan SKPD yang melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender	3 OPD	50,000,000	57,500,000	
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan SKPD yang melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender	30 %	Persentase SKPD yang melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender	6 Bulan	Kontribusi Kegiatan (Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota) terhadap Peningkatan SKPD yang melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender	3 OPD	50,000,000	57,500,000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan SKPD yang melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender	30 %	Persentase perempuan dalam perencanaan Responsif Gender	12 Bulan	Kontribusi Kegiatan (Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota) terhadap Peningkatan SKPD yang melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender	3 OPD	20,000,000	23,000,000	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan SKPD yang melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender	30 %	Persentase perempuan mengikuti sosialisasi kesetaraan gender	6 Bulan	Kontribusi Kegiatan (Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota) terhadap Peningkatan SKPD yang melaksanakan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender	3 OPD	50,000,000	57,500,000	
<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>52,214,369</b>	<b>60,046,524</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya keberadaan Ormas perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3 Organisasi	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	6 Bulan	Meningkatnya Peran Perempuan dilembaga pemerintah dan lembaga swasta	3 Jumlah Organisasi	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya keberadaan Ormas perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3 Organisasi	Persentase SKPD yang melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender	12 Bulan	Meningkatnya Peran Perempuan dilembaga pemerintah dan lembaga swasta	3 Jumlah Organisasi	37,214,369	42,796,524	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2.08.02.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>170,000,000</b>	<b>195,500,000</b>	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya keberadaan Ormas perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3 Organisasi	Tersedianya fasilitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan di P2TP2A	12 Bulan	Kontribusi Kegiatan (Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota) terhadap Terbina dan berkembangnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	90 %	60,000,000	69,000,000	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya keberadaan Ormas perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3 Organisasi	Persentase SDM perempuan yang mendapat pelatihan kesetaraan gender	12 Bulan	Kontribusi Kegiatan (Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota) terhadap Terbina dan berkembangnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	90 %	60,000,000	69,000,000	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya keberadaan Ormas perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3 Organisasi	Persentase SKPD yang melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender	12 Bulan	Kontribusi Kegiatan (Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota) terhadap Terbina dan berkembangnya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	90 %	50,000,000	57,500,000	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>										<b>296,630,000</b>	<b>341,124,500</b>	
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>126,630,000</b>	<b>145,624,500</b>	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tergalang Komitmen menjalankan Peraturan Perundangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Pertemuan berkala Forum/Focal Point para Pihak	Cukup Baik Kualitatif	Tersedianya Fasilitas di P2TP2A	12 Bulan	Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan	90 %	66,630,000	76,624,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tergalang Komitmen menjalankan Peraturan Perundangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Pertemuan berkala Forum/Focal Point para Pihak	Cukup Baik Kualitatif	Jumlah kebijakan upaya perlindungan kekerasan terhadap perempuan	12 Bulan	Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan	90 %	60,000,000	69,000,000	
2.08.03.2.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasi dan tersedianya operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	60 %	Tersedianya fasilitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan di P2TP2A	12 Bulan	Terlayannya perempuan korban kekerasan	80 %	60,000,000	69,000,000	
2.08.03.2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>110,000,000</b>	<b>126,500,000</b>	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tergalang Komitmen menjalankan Peraturan Perundangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Pertemuan berkala Forum/Focal Point para Pihak	Cukup Baik Kualitatif	Persentase SDM perempuan yang mendapat pelatihan kesetaraan gender	12 Bulan	Terkoordinasi pelayanan pengaduan masyarakat	90 %	60,000,000	69,000,000	
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tergalang Komitmen menjalankan Peraturan Perundangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Pertemuan berkala Forum/Focal Point para Pihak	Cukup Baik Kualitatif	Persentase sumber daya manusia yang mendapat pelatihan tentang kekerasan terhadap perempuan	12 Bulan	Terkoordinasi pelayanan pengaduan masyarakat	90 %	50,000,000	57,500,000	
2.08.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>										<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	
2.08.05.2.01	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>										<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedia data dan informasi Gender dan Anak untuk mendukung perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender dan PHA	1 Dokumen SIGA Lengkap Terisi	Tersedianya profil gender dan anak	12 Bulan	Terwujudnya data Informasi dan Gender dan anak	90 %	50,000,000	57,500,000	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedia data dan informasi Gender dan Anak untuk mendukung perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender dan PHA	1 Dokumen SIGA Lengkap Terisi	Tersedianya profil gender dan anak	12 Bulan	Terwujudnya data Informasi dan Gender dan anak	90 %	50,000,000	57,500,000	
2.08.06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>										<b>145,351,500</b>	<b>167,154,225</b>	
2.08.06.2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										<b>145,351,500</b>	<b>167,154,225</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster 1,2,3 dan 4 (Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)	Cukup Baik Kualitatif	Kreativitas anak bangsa dalam satu forum	6 Bulan	Terwujudnya pemenuhan hak anak	90 %	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster 1,2,3 dan 4 (Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)	Cukup Baik Kualitatif	Terbentuknya Kreativitas Anak	6 Bulan	Terwujudnya pemenuhan hak anak	90 %	25,351,500	29,154,225	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster 1,2,3 dan 4 (Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)	Cukup Baik Kualitatif	Tersedianya Pemenuhan Hak Anak	6 Bulan	Terwujudnya pemenuhan hak anak	90 %	70,000,000	80,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.08.07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>										<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	
2.08.07.2.02	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster 5 (Perlindungan Khusus)	Cukup Baik Kualitatif	Tersedianya Fasilitas Pelayanan kekerasan terhadap anak di P2TP2A	12 Bulan	Terwujudnya Pencegahan Kekerasan terhadap anak	80 %	50,000,000	57,500,000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.3.1 Menurunnya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster 5 (Perlindungan Khusus)	Cukup Baik Kualitatif	Tersedianya Fasilitas Pelayanan kekerasan terhadap anak di P2TP2A	12 Bulan	Terwujudnya Pencegahan Kekerasan terhadap anak	80 %	50,000,000	57,500,000	
2.14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										<b>7,675,082,069</b>	<b>8,826,344,379</b>	
2.14.02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>										<b>601,725,126</b>	<b>691,983,895</b>	
2.14.02.2.02	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>										<b>601,725,126</b>	<b>691,983,895</b>	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cukup Baik Kualitatif	Terlaksna Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	12 Bulan	Terdatanya pengendalian Penduduk	80 %	601,725,126	691,983,895	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>						<b>2,901,401,915</b>	<b>3,336,612,202</b>						
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	2.01	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>						<b>1,970,371,315</b>	<b>2,265,927,012</b>						
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penyediaan Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Cukup Baik Kualitatif	Tersedia dan terdistribusinya Sarana KIE Program KKBPK	12 Bulan	Terwujudnya Pendistribusian sarana KIE	100 %	440,000,000	506,000,000	
2	14	03	2.01	08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penyediaan Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Cukup Baik Kualitatif	Tersedia Operasional dan Sarana dibalai Penyuluh KKBPK	12 Bulan	Terwujudnya Pendistribusian sarana KIE	100 %	1,530,371,315	1,759,927,012	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	2.02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>						<b>289,900,000</b>	<b>333,385,000</b>					
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan PKB/PLKB ASN non ASN aktif Persatuan Keluarga	1,85 Per 1000 KK	Cakupan PKB/PLKB ASN non ASN aktif Persatuan Keluarga	12 Bulan	Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB	90 %	274,900,000	316,135,000	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan PKB/PLKB ASN non ASN aktif Persatuan Keluarga	1,85 Per 1000 KK	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1 Kegiatan	Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB	90 %	15,000,000	17,250,000	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	2.03		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>641,130,600</b>	<b>737,300,190</b>					
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penurunan angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	15 ? %	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 Persen	Terlayani peserta KB	80 %	50,000,000	57,500,000	
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penurunan angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	15 ? %	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100 Persen	Terlayani peserta KB	80 %	491,130,600	564,800,190	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penurunan angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	15 ? %	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	100 Persen	Terlayani peserta KB	80 %	100,000,000	115,000,000	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>						<b>4,171,955,028</b>	<b>4,797,748,282</b>					
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>04</b>	2.01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>						<b>4,171,955,028</b>	<b>4,797,748,282</b>					
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Peran Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 Mitra Kerja/Ormas	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100 Persen	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	3 Ormas	2,200,000,000	2,530,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Peran Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 Mitra Kerja/Ormas	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100 Persen	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	3 Ormas	1,942,252,528	2,233,590,407		
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Peran Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 Mitra Kerja/Ormas	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB/ Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB/ Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB/ Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100 Persen	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	3 Ormas	29,702,500	34,157,875		
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
7	01				<b>KECAMATAN</b>											<b>80,750,000</b>	<b>92,862,500</b>	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											<b>80,750,000</b>	<b>92,862,500</b>	
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>											<b>80,750,000</b>	<b>92,862,500</b>	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkoordinasi/ bersinerginya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemda (DP3AKB)	60 Kali Pertemuan/ Rapat / Event	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintahan	12 Bulan	Terwujudnya Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah	90 %	80,750,000	92,862,500		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	09				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						<b>4,191,742,147</b>	<b>4,820,503,469</b>					
2	09	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>2,931,742,147</b>	<b>3,371,503,469</b>					
2	09	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>5,000,000</b>	<b>5,750,000</b>					
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100 %	Tersusunnya Dokumen kinerja SKPD	2 Dokumen	Tersusunnya Renstra dan Renja SKPK	12 Bulan	5,000,000	5,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	09	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,192,402,147</b>	<b>2,521,262,469</b>					
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Terpenuhinya tambahan penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	2,187,402,147	2,515,512,469	
2	09	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersusunnya laporan realisasi fisik dan keuangan SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	2,500,000	2,875,000	
2	09	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersusunnya laporan akhir SKPD	1 Dokumen	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	2,500,000	2,875,000	
2	09	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>734,340,000</b>	<b>844,491,000</b>					
2	09	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah surat	320 Surat	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	2,000,000	2,300,000	
2	09	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah bulan	12 Bulan	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	45,000,000	51,750,000	
2	09	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah administrasi keuangan	22 orang	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	206,840,000	237,866,000	
2	09	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Luas bangunan kantor	675 M2	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	10,000,000	11,500,000	
2	09	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kegiatan administrasi	27 Kegiatan	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	25,000,000	28,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.09.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	27 Kegiatan	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	35,000,000	40,250,000	
2.09.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah titik instalasi listrik	46 Titik	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	5,000,000	5,750,000	
2.09.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah surat kabar	5 Media	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	6,000,000	6,900,000	
2.09.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kali makan/minum	242 kali	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	55,000,000	63,250,000	
2.09.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kali koordinasi dan konsultasi	44 kali	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	200,000,000	230,000,000	
2.09.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	10,000,000	11,500,000	
2.09.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	3 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	25,000,000	28,750,000	
2.09.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah pengadaan Mebeleur	2 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	30,000,000	34,500,000	
2.09.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	52,000,000	59,800,000	
2.09.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Perlengkapan yang terpelihara	10 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	10,000,000	11,500,000	
2.09.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Peralatan yang terpelihara	25 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	17,500,000	20,125,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.09.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	0	0	
<b>2.09.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	
2.09.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	37 Stel	Tercapainya Kinerja yang optimal	12 Bulan	0	0	
2.09.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %	Jumlah orang yang mengikuti bimtek	3 orang	Tercapainya Kinerja yang optimal	12 Bulan	0	0	
<b>2.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>										<b>875,000,000</b>	<b>1,006,250,000</b>	
<b>2.09.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>875,000,000</b>	<b>1,006,250,000</b>	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Krueng Batu	Meningkatnya Skor PPH	89 %	Peningkatan jumlah lumbung pangan masyarakat	1 unit	Meningkatnya ketersediaan pangan utama dan cadangan pangan masyarakat	12 Bulan	65,000,000	74,750,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Krueng Batu	Meningkatnya Skor PPH	89 %	Peningkatan jumlah lantai jemur pangan masyarakat	1 unit	Meningkatnya ketersediaan pangan utama dan cadangan pangan masyarakat	12 Bulan	25,000,000	28,750,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan  
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Trumon, Keude Trumon Kab. Aceh Selatan, Trumon, Ujong Tanoh Kab. Aceh Selatan, Trumon, Sigleng Kab. Aceh Selatan, Trumon, Ie Meudama Kab. Aceh Selatan, Trumon, Tuepin Tinggi Kab. Aceh Selatan, Trumon, Kuta Baro Kab. Aceh Selatan, Trumon, Pantan Bilie Kab. Aceh Selatan, Trumon, Kuta Padang Kab. Aceh Selatan, Trumon, Raket Kab. Aceh Selatan, Trumon, Gampong Teungoh	Meningkatnya Skor PPH	89 %	Peningkatan kemandirian pangan masyarakat	2 Kawasan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama dan cadangan pangan masyarakat	12 Bulan	785,000,000	902,750,000	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>						<b>315,000,000</b>	<b>362,250,000</b>					
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>						<b>185,000,000</b>	<b>212,750,000</b>					
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Skor PPH	89 %	Tersedianya informasi harga pangan, energi, protein dan lemak	2 Dokumen	Terpantaunya analisis harga pangan pokok dan ketersediaan pangan	12 Bulan	50,000,000	57,500,000	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Skor PPH	89 %	Terlaksananya lomba penyelenggaraan cipta menu makanan	1 Kegiatan	Terpantaunya analisis harga pangan pokok dan ketersediaan pangan	12 Bulan	135,000,000	155,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	2.02	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>						<b>0</b>	<b>0</b>						
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Skor PPH	89 %	Terpeliharanya cadangan pangan	100 Ton	Meningkatnya cadangan pangan daerah	12 Bulan	0	0	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>						<b>130,000,000</b>	<b>149,500,000</b>						
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Skor PPH	89 %	Jumlah hasil produksi pekarangan kelompok tani masyarakat	3 Kelompok	Peningkatan konsumsi pangan	12 Bulan	130,000,000	149,500,000	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>						<b>45,000,000</b>	<b>51,750,000</b>						
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>04</b>	2.02	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>45,000,000</b>	<b>51,750,000</b>						
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Skor PPH	89 %	Penurunan daerah rawan pangan	1 %	Meningkatnya cadangan pangan daerah	12 Bulan	45,000,000	51,750,000	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>05</b>		<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>						<b>25,000,000</b>	<b>28,750,000</b>						
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>05</b>	2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>25,000,000</b>	<b>28,750,000</b>						
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Pangan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Skor PPH	89 %	Meningkatnya jumlah sampel pangan yang diuji keamanannya	5 Sampel	Peningkatan Keamanan pangan	12 Bulan	25,000,000	28,750,000	
<b>7</b>				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
<b>7</b>	<b>01</b>			<b>KECAMATAN</b>						<b>40,000,000</b>	<b>46,000,000</b>						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>40,000,000</b>	<b>46,000,000</b>						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>40,000,000</b>	<b>46,000,000</b>						
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kali koordinasi pelaksanaan kegiatan	95 Kali	Terlaksananya urusan/tugas dinas	12 Bulan	40,000,000	46,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	10				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						16,506,189,600	17,004,368,040					
2	10	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,496,189,600	2,870,618,040					
2	10	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						1,871,189,600	2,151,868,040					
2	10	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Terpenuhinya tambahan penghasilan ASN	1 Tahun 1 Tahun	Tersedianya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN	1 Tahun	1,871,189,600	2,151,868,040	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	10	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						591,500,000	680,225,000					
2	10	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	terlaksananya penyediaan materai dan pengiriman surat-surat dinas sampai tujuan	390 lembar	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	44,900,000	51,635,000	
2	10	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	terlayannya kebutuhan Internet, air dan rekening Listrik gedung kantor	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	23,100,000	26,565,000	
2	10	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Terpeliharanya peralatan kantor	13 Unit	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	8,500,000	9,775,000	
2	10	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	peningkatan kinerja Aparatur dinas	15 Orang	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	109,965,000	126,459,750	
2	10	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Terciptanya kebersihan kantor	300 m2	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	18,215,000	20,947,250	
2	10	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Kelancaran pelayanan Administrasi perkantoran	22 Kegiatan	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	27,000,000	31,050,000	
2	10	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor	22 Kegiatan	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	16,500,000	18,975,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian  
Sub Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	10	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	tersedianya penerangan bangunan kantor	30 titik	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	5,000,000	5,750,000	
2	10	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Kelancaran pelaksanaan pelayanan	25 buah	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	13,000,000	14,950,000	
2	10	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Meningkatnya SDM dan wawasan pegawai	1 media	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	1,440,000	1,656,000	
2	10	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	terpenuhinya makanan dan minuman aparatur dinas, honorarium serta tamu	24200 Gelas/buah	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	85,880,000	98,762,000	
2	10	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30 Kali	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	119,800,000	137,770,000	
2	10	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	tersedianya kendaraan dinas roda dua	2 Unit	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	36,000,000	41,400,000	
2	10	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Tersedianya jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	1 Unit	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	9,100,000	10,465,000	
2	10	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	kelancaran pelaksanaan tugas	4 Unit	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	24,500,000	28,175,000	
2	10	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Tersedianya jumlah meja, kursi kantor	15 Unit	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 10 01 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	terpeliharanya dengan baik gedung kantor	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000	17,250,000	
2 10 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 dan 2 yang optimal sebagai penunjang kegiatan kedinasan	3 unit	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	33,600,000	38,640,000	
<b>2 10 01 2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>33,500,000</b>	<b>38,525,000</b>	
2 10 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	tersedianya pakaian dinas harian PDH aparatur	29 Stel	Meningkatnya kualitas SDM pegawai dinas pertanahan	1 Tahun	18,500,000	21,275,000	
2 10 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu aparatur	29 Stel	Meningkatnya kualitas SDM pegawai dinas pertanahan	1 Tahun	0	0	
2 10 01 2.04 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi tentang pertanahan	2 Orang	Meningkatnya kualitas SDM pegawai dinas pertanahan	1 Tahun	15,000,000	17,250,000	
<b>2 10 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>										<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>	
<b>2 10 02 2.01</b>	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>	
2 10 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tanah Pemerintah yang terinventarisir	84.34 %	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin antara dinas/instansi	1 Dokumen	Terlaksananya penerbitan Izin lokasi sesuai dengan ketentuan perundangan	1 Dok	30,000,000	34,500,000	
<b>2 10 04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>										<b>130,000,000</b>	<b>149,500,000</b>	
<b>2 10 04 2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.</b>										<b>130,000,000</b>	<b>149,500,000</b>	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sengketa Tanah yang terselesaikan	57.14 %	terlaksananya Inventarisasi sengketa konflik dan perkara pertanahan	1 Kegiatan	terlaksananya pengumpulan dokumen wilayah tanah sengketa	1 Keg	85,000,000	97,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sengketa Tanah yang terselesaikan	57.14 %	terlaksananya mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan	1 Kegiatan	terlaksananya pengumpulan dokumen wilayah tanah sengketa	1 Keg	45,000,000	51,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2 10 05</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>										<b>13,260,000,000</b>	<b>13,271,250,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>05</b>	2.01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>13,260,000,000</b>	<b>13,271,250,000</b>						
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sengketa Tanah yang terselesaikan	57.14 %	Terdatanya kepemilikan hak atas tanah masyarakat	1 Kegiatan	terlaksananya pendataan kepemilikan hak atas tanah masyarakat	6 Lokasi	75,000,000	86,250,000	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sengketa Tanah yang terselesaikan	57.14 %	tersusunnya SOP untuk pembayaran ganti rugi tanah dengan peraturanyang berlaku	6 Lokasi	terlaksananya pendataan kepemilikan hak atas tanah masyarakat	6 Lokasi	13,185,000,000	13,185,000,000	
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>06</b>		<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>						<b>225,000,000</b>	<b>258,750,000</b>						
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>06</b>	2.01	<b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>225,000,000</b>	<b>258,750,000</b>						
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tanah Pemerintah Yang Terinventarisir	84.34 %	Terlaksananya inventarisasi subyek dan rekomendasi subyek dan obyek redistribusi tanah	1 Dokumen	Tersedianya tanah untuk didistribusikan kepada masyarakat	3 Keg	75,000,000	86,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tanah Pemerintah Yang Terinventarisir	84.34 %	Inventarisasi subyek dan Obyek redistribusi tanah	1 Dokumen	Tersedianya tanah untuk didistribusikan kepada masyarakat	3 Keg	75,000,000	86,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tanah Pemerintah Yang Terinventarisir	84.34 %	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan redistribusi TORA dalam 1 (satu) Kab/kota	1 Kegiatan	Tersedianya tanah untuk didistribusikan kepada masyarakat	3 Keg	75,000,000	86,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>08</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>						<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>08</b>	2.01	<b>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>						<b>0</b>	<b>0</b>						
2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Gampong yang memahami Hukum Pertanahan	62.82 %	Adanya koordinasi dan sinkronisasi dan penyelesaian tanah antara dinas/instansi dan pihak terkait dalam 1 (satu) Kab/kota	1 Kegiatan	terselesainya kasus-kasus tanah kosong	2 Keg	0	0	
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>08</b>	2.02	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>						<b>0</b>	<b>0</b>						
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Gampong yang memahami Hukum Pertanahan	62.82 %	Tersedianya data tanah kosong	3 Kecamatan	adanya koordinasi dan sinkronisasi instansi terkait pemberian izin pemanfaatan tanah negara	2 Keg	0	0	
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Gampong yang memahami Hukum Pertanahan	62.82 %	Termanfaatannya Tanah kosong	3 Kecamatan	adanya koordinasi dan sinkronisasi instansi terkait pemberian izin pemanfaatan tanah negara	2 Keg	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanahan  
Sub Unit Organisasi : 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	10	09			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>						0	0					
2	10	09	2.01		<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>						0	0					
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sengketa tanah yang terselesaikan	57.14 %	Adanya koordinasi dan sinkronisasi instansi terkait pemberian izin membuka	1 kegiatan	adanya Penerapan peraturan tentang pemanfaatan tanah negara	1 Kegiatan	0	0	
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sengketa tanah yang terselesaikan	57.14 %	penerapan peraturan tentang pemanfaatan tanah negara	1 Kegiatan	adanya Penerapan peraturan tentang pemanfaatan tanah negara	1 Kegiatan	0	0	
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>						365,000,000	419,750,000					
2	10	10	2.01		<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>						365,000,000	419,750,000					
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tanah Pemerintah Yang Terinventarisir	84.34 %	Adanya koordinasi dan sinkronisasi tentang perencanaan penggunaan tanah	1 Kegiatan	Adanya koordinasi dan sinkronisasi tentang perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kab/kota	2 Keg	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	10	10	2.01	02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tanah Pemerintah Yang Terinventarisir	84.34 %	Adanya Pemetaan zona nilai Tanah kewenangan kab/kota	4 Kecamatan	Adanya koordinasi dan sinkronisasi tentang perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kab/kota	2 Keg	300,000,000	345,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tanah Pemerintah Yang Terinventarisir	84.34 %	Terpenuhinya data tanah secara akurat	1 kegiatan	Adanya koordinasi dan sinkronisasi tentang perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) Kab/kota	2 Keg	65,000,000	74,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>03</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>650,000,000</b>	<b>747,500,000</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>						<b>650,000,000</b>	<b>747,500,000</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	2.01		<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>650,000,000</b>	<b>747,500,000</b>					
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.1 Meningkatnya layanan persampahan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	8.26 %	Tersedianya Pengadaan Mobil Penyedot Tinja Mini	2 Unit	Peningkatan Pelayanan Penanganan Sampah dalam Kabupaten Aceh Selatan	100 %	650,000,000	747,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>2</b>	<b>11</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>7,622,420,725</b>	<b>8,765,783,834</b>					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>4,289,820,725</b>	<b>4,933,293,834</b>					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup	2 Dokumen	Dokumen Perencanaan Dinas	1 Dok	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>3,244,812,471</b>	<b>3,731,534,342</b>					
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Terpenuhinya tambahan penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya admistrasi keuangan	1 Tahun	3,244,812,471	3,731,534,342	
2	11	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Dokumen LPPD, LAKIP Dinas Lingkungan Hidup	3 Dokumen	Terlaksananya admistrasi keuangan	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>979,758,254</b>	<b>1,126,721,992</b>					
2	11	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	868 Surat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	3,300,000	3,795,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	11	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah rekening pembayaran Internet/Wifi Dinas LH.	12 Bualan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	80,000,000	92,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	11	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	45 Unit	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	45,000,000	51,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	11	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah pegawai kontrak dan petugas lapangan yang tersedia biaya BPJS kesehatan Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak	80 Orang 12 Bulan 13 Orang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	266,238,254	306,173,992	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	11	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Honorarium Petugas Cleaning Service Kantor Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor	1 Orang 10 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	20,400,000	23,460,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	11	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	39,000,000	44,850,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	11	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah barang cetakan yang disediakan	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	14,520,000	16,698,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	11	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik Dinas Lingkungan Hidup	8 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	11	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	20,000,000	23,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	11	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah makan dan minum harian pegawai, dan Pegawai Kontrak Dinas Lingkungan Hidup	55 Orang	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	56,300,000	64,745,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	11	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah koordinasi dan penugasan dinas ke luar daerah	1 Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000	115,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																			Capaian Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2	11	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Filing Kabinet, Lemari Arsip, AC	3 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	45,000,000	51,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing										
2	11	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Komputer PC, Laptop dan Printer	3 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	80,000,000	92,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing										
2	11	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Meja dan Kursi Kantor	4 Set	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing										
2	11	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Sebanyak 16 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) BL 70 T, BL 8059 TB, BL 8010 TB, BL 8089 TB	16 Unit 20 Unit	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	115,000,000	132,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing										
2	11	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Filing Kabinet, Lemari Arsip, AC)	25 Unit	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing										
2	11	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor (Komputer PC, Laptop dan Printer)	13 Unit	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing										
2	11	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Perbaikan sedang/berat kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	1 Unit	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing										
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>											<b>65,250,000</b>	<b>75,037,500</b>										
2	11	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang disediakan	55 Set	Meningkatnya disiplin dan kapasitas layanan pemerintah	100 %	30,250,000	34,787,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing										

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	11	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 Orang	Meningkatnya disiplin dan kapasitas layanan pemerintah	100 %	35,000,000	40,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>190,000,000</b>	<b>218,500,000</b>					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						<b>130,000,000</b>	<b>149,500,000</b>					
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Parameter Yang Memenuhi Kualitas Baku Mutu Air	96.00 %	Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan (Tanah, Air, Udara, Laut) dan Tersedianya Data Indeks Kualitas Lingkungan	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas lingkungan	100 %	80,000,000	92,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Parameter Yang Memenuhi Kualitas Baku Mutu Air	96.00 %	Terlaksananya Pembinaan Kampung Proklam	20 Desa	Meningkatnya kualitas lingkungan	100 %	50,000,000	57,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>					
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Persentase Parameter Yang Memenuhi Kualitas Baku Mutu Air	96.00 %	Tersedianya Dokumen Data Dasar dan Dokumen IKPLHD Lingkungan dan	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas lingkungan	100 %	60,000,000	69,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>03</b>	2.03		<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Parameter Yang Memenuhi Kualitas Baku Mutu Air	96.00 %	Terlaksananya Koordinasi untuk penghentian kegiatan pencemaran lingkungan	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas lingkungan	100 %	0	0	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>						<b>797,600,000</b>	<b>917,240,000</b>					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>04</b>	2.01		<b>Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>						<b>797,600,000</b>	<b>917,240,000</b>					
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Presentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	9.98 %	Terpeliharanya Taman Kota Tapaktuan Tersedianya Honor Petugas Taman sebanyak Sopir Mobil Penyiram 1 orang, Petugas Mobil Penyiram 1 orang dan Petugas Taman 8 orang	3 Ha 9 Orang	Meningkatnya kualitas lingkungan	100 %	297,600,000	342,240,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	11 04 2.01 06		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Naca	Presentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	9.98 %	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Lanjutan Rencana TAHURA	100 %	Meningkatnya kualitas lingkungan	100 %	500,000,000	575,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11 06		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>									<b>75,000,000</b>	<b>86,250,000</b>		
2	11 06 2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>75,000,000</b>	<b>86,250,000</b>		
2	11 06 2.01 01		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Persentase Parameter Yang Memenuhi Kualitas Baku Mutu Air	96.00 %	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Produk Izin Lingkungan yg di Keluarkan oleh Pemda Asel Tersedianya Perbub Perizinan Lingkungan Hidup	1 Dokumen 1 Dokumen	Terciptanya kepatuhan terhadap izin dokumen lingkungan	100 %	75,000,000	86,250,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11 08		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>									<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>		
2	11 08 2.01		<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>		
2	11 08 2.01 01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	8.26 %	Terlaksananya Kegiatan Duta Lingkungan	1 Kegiatan	Meningkatnya SDM	100 %	25,000,000	28,750,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11 08 2.01 02		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	8.26 %	Terlaksananya Hari Lingkungan Hidup Sedunia	1 Kegiatan	Meningkatnya SDM	100 %	35,000,000	40,250,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11 09		<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>									<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>		
2	11 09 2.01		<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>		
2	11 09 2.01 01		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.2 Meningkatnya kualitas baku mutu lingkungan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Parameter Yang Memenuhi Kualitas Baku Mutu Air	96.00 %	Terlaksananya Kegiatan Adiwiyata di Kabupaten Aceh Selatan	1 Kegiatan	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	10 Sekolah	60,000,000	69,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11 11		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>									<b>2,150,000,000</b>	<b>2,472,500,000</b>		
2	11 11 2.01		<b>Pengelolaan Sampah</b>									<b>2,115,000,000</b>	<b>2,432,250,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.1 Meningkatnya layanan persampahan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	8.26 %	Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman Harian Petugas Lapangan Persampahan Tersedianya biaya operasional IPLT Tersedianya Honorarium Tim Pembersihan Sampah Hari-Hari Besar dan Kegiatan Khusus Tersedianya Honor Petugas Lapangan Bidang Persampahan dan Limbah Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih Untuk Petugas Lapangan Tersedianya Rehab Sedang/Berat Bak Kontainer Sampah Tersedianya Rehab Sedang/Berat Mobil Truck Sampah dan Mobil Kontainer Tersedianya Suku Cadang , BBM / Oli Pelumas dan Service Mobil Operasional Sampah 5 unit , Mobil Tinja 1 unit, Mobil Amrol Kontainer 3 unit, Mobil Penyiram 1 unit , Becak Pengangkut Sampah 8 unit dan Alat Berat Beko dan Buldozer Tersedianya Tanah Urug Penutup Sel Membran TPA Pasie Raja Tersedianya Tong Sampah untuk Gampong Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Tersedianya Tong Sampah untuk Kecamatan Kluet utara dan Kluet Selatan	57 Orang 1 Kegiatan 40 Orang Kerja 57 Kegiatan 1 Tahun 2 Unit 2 Unit 19 Unit 1 Kegiatan 1 Paket 1 Paket	Peningkatan kualitas lingkungan	100 %	2,040,000,000	2,346,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.1 Meningkatnya layanan persampahan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	8.26 %	Terlaksananya Penyesuaian Regulasi Pengelolaan Persampahan dan Limbah, Penyusunan Perbup Penyesuaian Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus, Penyusunan Perbup Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan sistem WCP	3 Dokumen	Peningkatan kualitas lingkungan	100 %	75,000,000	86,250,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2.03</b>		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>									<b>35,000,000</b>	<b>40,250,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.4.1 Meningkatnya layanan persampahan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	8.26 %	Terlaksana Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan di Kab. Aceh Selatan	1 Dokumen	Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	100 %	35,000,000	40,250,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	12				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						6,503,562,013	7,479,096,313					
2	12	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						4,725,239,529	5,434,025,457					
2	12	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						3,386,118,819	3,894,036,642					
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Terbayarnya Gaji ASN	100 %	3,386,118,819	3,894,036,642	
2	12	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						1,339,120,710	1,539,988,815					
2	12	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya kebutuhan jasa surat menyurat	100 %				7,348,950	8,451,292		
2	12	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	telaksananya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik	100 %				110,561,522	127,145,750		
2	12	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya jasa pengelola administrasi keuangan	100 %				126,910,308	145,946,854		
2	12	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya lingkungan kantor yang bersih	100 %				39,301,500	45,196,725		
2	12	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	terlaksananya kegiatan perkantoran	100 %				53,088,521	61,051,799		
2	12	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan	100 %				94,600,254	108,790,292		
2	12	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Kantor	100 %				10,500,000	12,075,000		
2	12	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan minat baca bagi pegawai kantor dan masyarakat	100 %				11,113,200	12,780,180		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	12	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai Disdukcapil	100 %			212,913,750	244,850,812	
2	12	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan instansi terkait	100 %			115,977,397	133,374,007	
2	12	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhnya ,kebutuhan pegawai akan peralatan gedung kantor yang memadai	100 %			211,560,000	243,294,000	
2	12	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung yang nyaman dan layak huni	100 %			22,050,000	25,357,500	
2	12	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang memadai	100 %			80,445,750	92,512,612	
2	12	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya peralatan gedung kantor Disdukcapil dan alat-alat	100 %			23,100,000	26,565,000	
2	12	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung yang nyaman dan layak huni	100 %			219,649,558	252,596,992	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>						<b>930,869,184</b>	<b>1,070,499,562</b>					
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>						<b>930,869,184</b>	<b>1,070,499,562</b>					
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.3 Meningkatnya akses pelayanan administrasi kependudukan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	Meningkatkan Pelayanan Publik pada Disdukcapil	100 %	Terlaksananya Pendataan Administrasi Kependudukan	100 Persen	576,704,184	663,209,812	
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.3 Meningkatnya akses pelayanan administrasi kependudukan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98 %	meningkatnya jumlah masyarakat yang tertib administrasi kependudukan	100 %	Terlaksananya Pendataan Administrasi Kependudukan	100 Persen	354,165,000	407,289,750	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>						<b>48,510,000</b>	<b>55,786,500</b>					
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>						<b>48,510,000</b>	<b>55,786,500</b>					
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.3 Meningkatnya akses pelayanan administrasi kependudukan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio penduduk yang ber-KTP per satuan penduduk	098 %	Terpeliharanya server SIAK pada Disdukcapil	100 %	Terpenuhnya data Pencatatan Sipil	100 Persen	48,510,000	55,786,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>						<b>768,183,550</b>	<b>883,411,082</b>						
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	2.03	<b>Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan</b>						<b>738,350,550</b>	<b>849,103,132</b>						
2	12	04	2.03	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	99 %	adanya pelayanan secara optimal	100 %	terpenuhinya Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan yang baik	100 persen	541,181,550	622,358,782	
2	12	04	2.03	08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	99 %	Tercapainya Pemahaman masyarakat Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	terpenuhinya Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan yang baik	100 persen	197,169,000	226,744,350	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	2.04	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</b>						<b>29,833,000</b>	<b>34,307,950</b>						
2	12	04	2.04	05	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tercapainya pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100 %			29,833,000	34,307,950	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>05</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>						<b>30,759,750</b>	<b>35,373,712</b>						
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>05</b>	2.01	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>						<b>30,759,750</b>	<b>35,373,712</b>						
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Provinsi	Ada Doc	tersusunnya laporan informasi	100 %	Tersedianya Database Kependudukan	100 Persen	30,759,750	35,373,712	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>02</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						<b>85,000,000</b>	<b>97,750,000</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>						<b>85,000,000</b>	<b>97,750,000</b>					
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>05</b>	2.03		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>85,000,000</b>	<b>97,750,000</b>					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.1.2 Mengoptimalkan Pembinaan dan Dukungan Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) serta Pengkajian Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan Keluarga Sehat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peran Perempuan Dalam Pembangunan Gampong	50 %	Terlaksananya Pemberdayaan Posyandu	1 tahun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	1 Tahun	85,000,000	97,750,000	
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>2</b>	<b>13</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						<b>7,616,972,763</b>	<b>8,759,518,677</b>					
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>4,042,372,763</b>	<b>4,648,728,677</b>					
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>297,796,000</b>	<b>342,465,400</b>					
2	13	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Persentase Swadaya Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan	60 %	Tersusunnya program kerja dan sistem pelaporan yang akuntabel	10 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang akuntabel	1 Tahun	197,796,000	227,465,400	
2	13	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Persentase Swadaya Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan	60 %	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi	1 tahun	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan yang akuntabel	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,701,972,763</b>	<b>3,107,268,677</b>					
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2,701,972,763	3,107,268,677	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>963,354,000</b>	<b>1,107,857,100</b>					
2	13	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya jasa surat menyurat	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	3,468,503	3,988,778	
2	13	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	60,600,000	69,690,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	13	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	30,600,000	35,190,000	
2	13	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya jasa pengelolaan keuangan	12 bulan	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	218,134,000	250,854,100	
2	13	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa petugas kebersihan	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	87,570,000	100,705,500	
2	13	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	20,250,000	23,287,500	
2	13	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	10,431,497	11,996,222	
2	13	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya instalasi dan penerangan kantor	8 jenis	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	5,000,000	5,750,000	
2	13	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	70,000,000	80,500,000	
2	13	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Bertambahnya wawasan aparatur	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	6,000,000	6,900,000	
2	13	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya makanan dan minuman kantor	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	76,800,000	88,320,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	13	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	180,000,000	207,000,000	
2	13	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	124,500,000	143,175,000	
2	13	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Pemerintah	1 Tahun	70,000,000	80,500,000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>79,250,000</b>	<b>91,137,500</b>					
2	13	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya pakaian dinas	45 stel	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur	1 Tahun	18,000,000	20,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya pakaian khusus	45 lembar	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur	1 Tahun	11,250,000	12,937,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Timur	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Meningkatnya pengetahuan pegawai	1 tahun	Meningkatnya kedisiplinan Aparatur	1 Tahun	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>						<b>1,754,600,000</b>	<b>2,017,790,000</b>					
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>						<b>1,754,600,000</b>	<b>2,017,790,000</b>					
2	13	02	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Gampong Yang Cepat Berkembang	60 %	Tersedianya kantor keuchik	35 unit	Meningkatnya pelestarian budaya dan adat istiadat	1 Tahun	1,000,000,000	1,150,000,000	
2	13	02	2.01	07	Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Gampong Yang Cepat Berkembang	60 %	Tersedianya honorarium perangkat pemerintahan desa	50 orang	Meningkatnya pelestarian budaya dan adat istiadat	1 Tahun	754,600,000	867,790,000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>						<b>150,000,000</b>	<b>172,500,000</b>					
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>						<b>150,000,000</b>	<b>172,500,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga dan Usaha Ekonomi Gampong Yang Aktif	25 %	Terselenggaranya pembinaan kinerja UPK	18 kecamatan	Terciptanya Kemandirian Gampong	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>						<b>750,000,000</b>	<b>862,500,000</b>					
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>04</b>	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>						<b>750,000,000</b>	<b>862,500,000</b>					
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Swadaya Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan	60 %	Tersusunnya Perbup	6 perbup	Terpenuhinya juklak bagi pemerintah gampong dalam penyusunan qanun	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Swadaya Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan	60 %	Terciptanya fasilitas keuangan gampong	260 gampong	Terpenuhinya juklak bagi pemerintah gampong dalam penyusunan qanun	1 Tahun	120,000,000	138,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Swadaya Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan	60 %	Rapat koordinasi tim evaluasi percepatan dana desa	3 kegiatan	Terpenuhinya juklak bagi pemerintah gampong dalam penyusunan qanun	1 Tahun	120,000,000	138,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Swadaya Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan	60 %	Meningkatnya masyarakat dalam membangun gampong	260 gampong	Terpenuhinya juklak bagi pemerintah gampong dalam penyusunan qanun	1 Tahun	200,000,000	230,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Swadaya Masyarakat Gampong Dalam Pembangunan	60 %	Meningkatnya masyarakat dalam membangun gampong	260 gampong	Terpenuhinya juklak bagi pemerintah gampong dalam penyusunan qanun	1 Tahun	160,000,000	184,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>						<b>920,000,000</b>	<b>1,058,000,000</b>					
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>05</b>	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>920,000,000</b>	<b>1,058,000,000</b>					
2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga dan Usaha Ekonomi Gampong Yang Aktif	25 %	Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga PKK	1 tahun	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	300,000,000	345,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong  
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga dan Usaha Ekonomi Gampong Yang Aktif	25 %	Peningkatan kapasitas lembaga PKK	1 tahun	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	220,000,000	253,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga dan Usaha Ekonomi Gampong Yang Aktif	25 %	Meningkatnya ekonomi masyarakat kawasan	3 kawasan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	200,000,000	230,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga dan Usaha Ekonomi Gampong Yang Aktif	25 %	Ikut serta dalam event TTG	1 even	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1 Tahun	200,000,000	230,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	10				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>						650,000,000	747,500,000					
2	10	05			<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>						650,000,000	747,500,000					
2	10	05	2.01		<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						650,000,000	747,500,000					
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Teupin Gajah	Luas Tanah	0 M2	Penilaian Harga Tanah	1 Tahun	Adanya Pembebasan Tanah	1464 Meter	650,000,000	747,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	15				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						12,199,274,652	14,029,165,850					
2	15	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						4,746,979,652	5,459,026,600					
2	15	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						3,249,274,652	3,736,665,850					
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya Gaji Dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Terbayarnya Gaji Tunjangan Dan Tambahan Penghasilan ASN	100 %	3,249,274,652	3,736,665,850	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						1,405,705,000	1,616,560,750					
2	15	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat	2475 Lembar	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	3,000,000	3,450,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	128,988,189	148,336,417	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	235,234,400	270,519,560	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Lokasi Bangunan Kantor	2100 Meter	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	80,800,000	92,920,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan Administrasi Kantor	185 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	35,000,000	40,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	15	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Barang Cetakan Dan Penggandaan	185 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Titik Instalasi Listrik	140 Titik	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	10,500,000	12,075,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat Kabar	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Makan Dan Minum	1315 Kali	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	137,848,000	158,525,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	164 Kali	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	200,000,000	230,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas	6 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	0	0	
2	15	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	22 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	48,000,000	55,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Fasilitas Personel Di Kantor	90 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	15	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	419,500,000	482,425,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	200 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	12,000,000	13,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	22 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	24,834,411	28,559,573	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Rehab Gedung Kantor	1 Unit	Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	100 %	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>92,000,000</b>	<b>105,800,000</b>					
2	15	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	74 Pasang	Adanya Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %	Meningkatkan Kinerja Aparatur Pengadaan Pakaian Olahraga Lengkap	74 Pasang 74 Pasang	Adanya Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	52,000,000	59,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %	Tersedianya Pendidikan Untuk Pelatihan Untuk Pegawai	2 Orang	Adanya Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	40,000,000	46,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>						<b>7,290,348,000</b>	<b>8,383,900,200</b>					
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>6,725,000,000</b>	<b>7,733,750,000</b>					
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.1 Meningkatnya tingkat keselamatan, keamanan dan ketertiban transportasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Jalan	482 %	Tersedianya Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	5 Unit	Tersedianya Kelengkapan Jalan	100 %	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.1 Meningkatnya tingkat keselamatan, keamanan dan ketertiban transportasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Jalan	482 %	Tersedianya Perlengkapan Jalan Yang Memadai	204 Unit	Tersedianya Kelengkapan Jalan	100 %	25,000,000	28,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.1 Meningkatnya tingkat keselamatan, keamanan dan ketertiban transportasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Jalan	482 %	Terpeliharanya perlengkapan Jalan	1 Tahun	Tersedianya Kelengkapan Jalan	100 %	6,700,000,000	7,705,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>						<b>176,148,000</b>	<b>202,570,200</b>					
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.2 Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi di bidang perhubungan	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	62.23 %	Jumlah Terminal Dalam Keadaan Baik	4 Terminal	Adanya Peningkatan Jumlah Terminal Angkutan Darat Yang Terkelola	100 %	176,148,000	202,570,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>						<b>20,200,000</b>	<b>23,230,000</b>					
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.2 Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi di bidang perhubungan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase layanan angkutan darat, laut dan udara	63 %	Lokasi Tempat Parkir Kendaraan	6 Unit	Terlaksananya Pembangunan Parkir	100 %	20,200,000	23,230,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>						<b>99,000,000</b>	<b>113,850,000</b>					
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.1 Meningkatnya tingkat keselamatan, keamanan dan ketertiban transportasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Panjupian	Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Uji Kelaikan	491 Unit	Persentase Kelengkapan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Adanya Kendaraan Yang Melakukan Uji Kelaikan	100 %	99,000,000	113,850,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>270,000,000</b>	<b>310,500,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.1 Meningkatnya tingkat keselamatan, keamanan dan ketertiban transportasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80.33 %	Jumlah Pelaksanaan Razia Angkutan Umum Jumlah Pengaman Lalu Lintas Hari-hari Besar Koordinasi Dan Konsultasi Dengan Instansi Terkait	2 Kali 8 Kali 4 Kali	Adanya Manajemen Dan Rekayasa lalu Lintas Di Jalan	100 %	270,000,000	310,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.07</b>		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		6.3.2 Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi di bidang perhubungan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase Kendaraan Umum yang Memiliki Trayek	66.02 %	Jumlah Data	1 Unit	Terlaksananya Andalalin Di Jalan Kabupaten /Kota	100 %	0	0	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	<b>2.10</b>		<b>Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
2	15	02	2.10	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.2 Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi di bidang perhubungan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase Kendaraan Umum yang Memiliki Trayek	66.02 %	Pengadaan Bus Angkutan Umum	1 Unit	Adanya Penetapan Kawasan Layanan angkutan Perkotaan	100 %	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>						<b>161,947,000</b>	<b>186,239,050</b>					
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>03</b>	<b>2.12</b>		<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>						<b>161,947,000</b>	<b>186,239,050</b>					
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.2 Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi di bidang perhubungan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	62.23 %	Persentase Pelabuhan Penyeberangan Dalam Kondisi Baik	1 Tahun	Terlaksananya Pembangunan, Perizinan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 %	161,947,000	186,239,050	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>03</b>	<b>2.13</b>		<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	6.3.2 Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi di bidang perhubungan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	62.23 %	Pembangunan Pelabuhan	1 Paket	Adanya Peningkatan Pelayanan Pelabuhan	100 %	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>KECAMATAN</b>						<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5. Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	690 Kali	Adanya Koordinasi Di Tingkat Kecamatan	100 %	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						3,703,603,774	4,259,144,340					
2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						3,100,653,774	3,565,751,840					
2	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,324,218,024	2,672,850,728					
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Terpenuhinya tambahan penghasilan ASN	1 Tahun 1 Tahun	Terpenuhinya gaji tunjangan dan tambahan penghasilan	1 Tahun	2,324,218,024	2,672,850,728	
2	16	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						739,635,750	850,581,112					
2	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Materai, Perangko dan Paket Pengiriman	1000 Lembar	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	40,000,000	46,000,000	
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya biaya rek telepon, air, listrik dan internet	12 bulan	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	163,260,900	187,750,035	
2	16	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Honor Pelaksana Administrasi Keuangan	13 Org	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	97,100,000	111,665,000	
2	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya uang jasa dan alat kebersihan kantor	250 m2	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	25,000,000	28,750,000	
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya ATK untuk Kegiatan	44 kegiatan	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya biaya cetak dan penggandaan	44 kegiatan	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	6,000,000	6,900,000	
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya komponen listrik dan penerangan	18 titik	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	6,000,000	6,900,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	16	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 media	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	2,160,000	2,484,000	
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah bulan makan-minum pegawai, tamu dan rapat	11 bulan	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	80,000,000	92,000,000	
2	16	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kegiatan rapat/konsultasi ke luar daerah	15 kali	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	148,075,350	170,286,652	
2	16	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2	6 unit	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	0	0	
2	16	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 unit	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	21,593,400	24,832,410	
2	16	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	6 unit	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	40,000,000	46,000,000	
2	16	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah pengadaan meubeler untuk kantor	11 unit	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	0	0	
2	16	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Luasan gedung kantor yang dipelihara	250 m2	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	10,000,000	11,500,000	
2	16	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 unit	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	40,000,000	46,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	16	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah perengkapan gedung kantor yang dipelihara	8 unit	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	24,446,100	28,113,015	
2	16	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	3,000,000	3,450,000	
2	16	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	jumlah meubeler kantor yang dipelihara	83 unit	Berjalannya Kegiatan Operasional Perkantoran	1 Tahun	3,000,000	3,450,000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>36,800,000</b>	<b>42,320,000</b>					
2	16	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	jumlah pengadaan pakaian dinas aparatur	35 stel	Terciptanya Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	15,000,000	17,250,000	
2	16	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	jumlah bimbingan teknis yang diselenggarakan	2 bimtek	Terciptanya Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	21,800,000	25,070,000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>						<b>116,500,000</b>	<b>133,975,000</b>					
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>116,500,000</b>	<b>133,975,000</b>					
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyebarluasan Informasi melalui Pendayagunaan Informasi	100 %	Terkelolanya media komunikasi publik milik pemerintah	1 Tahun	Persentase PPID SKPD yang aktif dan Permohonan Informasi yang dilayani	100 %	100,000,000	115,000,000	
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyebarluasan Informasi melalui Pendayagunaan Informasi	100 %	Jumlah aparatur pemerintah dengan kompetensi TIK	1 Paket	Persentase PPID SKPD yang aktif dan Permohonan Informasi yang dilayani	100 %	0	0	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyebarluasan Informasi melalui Pendayagunaan Informasi	100 %	Jumlah PPID yang aktif	1 Paket	Persentase PPID SKPD yang aktif dan Permohonan Informasi yang dilayani	100 %	16,500,000	18,975,000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>						<b>486,450,000</b>	<b>559,417,500</b>					
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Infrastruktur, TIK pemerintahan dan layanan publik yang terpusat	10 %	Tersedianya infrastruktur Jaringan Intra	1 Paket	Terbangunnya sistem jaringan intra pemerintah daerah	1 Tahun	0	0	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>486,450,000</b>	<b>559,417,500</b>					
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan pemerintah dan layanan publik	100 %	Terbangunnya pusat data yang standar	1 Paket	Persentase penyelenggaraan Pusat data, Sinkronisasi data, aplikasi, proses bisnis, sistem penghubung dan SDM Egov	100 %	100,000,000	115,000,000	
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan pemerintah dan layanan publik	100 %	Terciptanya komunikasi data dan informasi elektronik	1 Paket	Persentase penyelenggaraan Pusat data, Sinkronisasi data, aplikasi, proses bisnis, sistem penghubung dan SDM Egov	100 %	210,000,000	241,500,000	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan pemerintah dan layanan publik	100 %	Tersedianya aplikasi generik dengan proses bisnis SPBE	1 Paket	Persentase penyelenggaraan Pusat data, Sinkronisasi data, aplikasi, proses bisnis, sistem penghubung dan SDM Egov	100 %	100,000,000	115,000,000	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan pemerintah dan layanan publik	100 %	Terbangunnya sistem penghubung integrasi aplikasi layanan pemerintah	1 Paket	Persentase penyelenggaraan Pusat data, Sinkronisasi data, aplikasi, proses bisnis, sistem penghubung dan SDM Egov	100 %	0	0	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan pemerintah dan layanan publik	100 %	Pengoptimalan sumber daya TIK Pemda	1 Paket	Persentase penyelenggaraan Pusat data, Sinkronisasi data, aplikasi, proses bisnis, sistem penghubung dan SDM Egov	100 %	33,000,000	37,950,000	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan pemerintah dan layanan publik	100 %	Jumlah ASN dengan Kompetensi GCIO	3 org	Persentase penyelenggaraan Pusat data, Sinkronisasi data, aplikasi, proses bisnis, sistem penghubung dan SDM Egov	100 %	43,450,000	49,967,500	
<b>2</b>	<b>21</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>16,500,000</b>	<b>18,975,000</b>					
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>						<b>16,500,000</b>	<b>18,975,000</b>					
<b>2</b>	<b>21</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>16,500,000</b>	<b>18,975,000</b>					
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Dokumen dan sarana komunikasi daerah yang diamankan	25 %	Jumlah Informasi elektronik/non elektronik yg diamankan	1 Tahun	Tersedianya biaya untuk pengamanan informasi berklasifikasi	100 %	16,500,000	18,975,000	
<b>5</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
<b>5</b>	<b>05</b>				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>75,550,000</b>	<b>86,882,500</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.0.00.01.00 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>						<b>75,550,000</b>	<b>86,882,500</b>					
5	05	02	2.03		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>						<b>75,550,000</b>	<b>86,882,500</b>					
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika		4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika	1 Doc	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Tahun	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	75,550,000	86,882,500	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						<b>55,000,000</b>	<b>63,250,000</b>					
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>55,000,000</b>	<b>63,250,000</b>					
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>55,000,000</b>	<b>63,250,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Biaya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	120 kali	Tersedianya biaya koordinasi/sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah level kecamatan	1 Tahun	55,000,000	63,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	18				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						3,252,416,249	3,740,278,686					
2	18	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,927,416,249	3,366,528,686					
2	18	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						10,000,000	11,500,000					
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersusunnya Renstra dan Renja OPD	2 Dokumen	Terpenuhinya Hasil Laporan OPD	1 Tahun	5,000,000	5,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersusunnya Laporan OPD	5 Dokumen	Terpenuhinya Hasil Laporan OPD	1 Tahun	5,000,000	5,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,272,416,249	2,613,278,686					
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	2,272,416,249	2,613,278,686	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						570,000,000	655,500,000					
2	18	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat	720 Surat	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	3,200,000	3,680,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	27,600,000	31,740,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 Orang	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	158,440,000	182,206,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Luas Bangunan Kantor	192 M2	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	2,730,000	3,139,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan Administrasi	19 Kegiatan	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	22,000,000	25,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2.18.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan	19 Kegiatan	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	24,500,000	28,175,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.18.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Titik Instalasi Listrik	13 Titik	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	3,630,000	4,174,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.18.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	370 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	4,000,000	4,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.18.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat Kabar	1 Surat Kabar	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	1,200,000	1,380,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.18.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Makan dan Minum	242 Kali	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	55,000,000	63,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.18.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Koordinasi dan Konsultasi	48 Kali	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	110,000,000	126,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.18.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.18.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	32,000,000	36,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2.18.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	13 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	13,200,000	15,180,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	18	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	40,000,000	46,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	6 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	7,000,000	8,050,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	5,500,000	6,325,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Belanja Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	0 Tahun	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>75,000,000</b>	<b>86,250,000</b>					
2	18	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	29 Stell	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1 Tahun	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0 Stell	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	2 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1 Tahun	40,000,000	46,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	18	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	2 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1 Tahun	20,000,000	23,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>						<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>						
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>	2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>						<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>						
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Meningkatnya Minat Investasi	12 Investor	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	Tersampainya Informasi dan Komunikasi Antar Pelaku Usaha dan Pemerintah	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Meningkatnya Minat Investasi	12 Investor	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Usaha	1 Dokumen	Tersampainya Informasi dan Komunikasi Antar Pelaku Usaha dan Pemerintah	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>						<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>						
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>03</b>	2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>						
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Meningkatnya Minat Investasi	12 Investor	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Kegiatan	Tersampainya Informasi Kepada Masyarakat/Pelaku Usaha	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>						<b>90,000,000</b>	<b>103,500,000</b>						
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>04</b>	2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>90,000,000</b>	<b>103,500,000</b>						
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	8. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	22 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1 Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat/Pelaku Usaha	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	22 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Komitmen	1 Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat/Pelaku Usaha	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	8. Pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	22 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Terlaksananya Kegiatan Pemenuhan Komitmen	1 Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat/Pelaku Usaha	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>05</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>						<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>						
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>05</b>	2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>						
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	2 %	Jumlah Kali Koordinasi Pemantauan	25 Kali	Meningkatnya Minat Investasi Para Pelaku Usaha	1 Tahun	20,000,000	23,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	2 %	Jumlah Kali Koordinasi Pembinaan	10 Kali	Meningkatnya Minat Investasi Para Pelaku Usaha	1 Tahun	15,000,000	17,250,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	2 %	Jumlah Kali Koordinasi Pengawasan	10 Kali	Meningkatnya Minat Investasi Para Pelaku Usaha	1 Tahun	15,000,000	17,250,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>06</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>						<b>25,000,000</b>	<b>28,750,000</b>						
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>06</b>	2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>25,000,000</b>	<b>28,750,000</b>						
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	9.1.1 Meningkatnya jumlah dan nilai Investasi	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Persentase Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Masyarakat Tentang Perijinan	100 %	Terlaksananya Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data	1 Kegiatan	Terpenuhinya Data dan Laporan Perizinan dan Nonperizinan	1 Tahun	25,000,000	28,750,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
<b>7</b>				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
<b>7</b>	<b>01</b>			<b>KECAMATAN</b>						<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>						
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Dinas	1 Tahun	20,000,000	23,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																
<b>2</b>	<b>19</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						<b>11,970,881,678</b>	<b>13,766,513,929</b>					
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>3,176,457,678</b>	<b>3,652,926,329</b>					
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,223,499,443</b>	<b>2,557,024,359</b>					
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib	100 %	Tersedianya belanja gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	2,212,499,443	2,544,374,359	
2	19	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib	100 %	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	11,000,000	12,650,000	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>885,858,235</b>	<b>1,018,736,970</b>					
2	19	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya jasa surat menyurat	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	108,000,000	124,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya pengadaan jasa komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	42,000,000	48,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	45,000,000	51,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	120,000,000	138,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya keindahan dan kebersihan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	35,000,000	40,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	8,800,000	10,120,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	19	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	56,412,675	64,874,576	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	15,730,000	18,089,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya alat komponen listrik/penerangan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	2,427,260	2,791,349	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan lainnya	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	9,600,000	11,040,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya makanan dan minuman karyawan/ti	11 Bulan	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	90,288,300	103,831,545	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	99,000,000	113,850,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	55,000,000	63,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	50,500,000	58,075,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	19	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	0	0	
2	19	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	38,500,000	44,275,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	39,600,000	45,540,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya dana pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya dana pemeliharaan peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>67,100,000</b>	<b>77,165,000</b>					
2	19	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Tersedianya pakaian dinas PNS dan non PNS beserta perlengkapannya	50 Pasang	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	0	0	
2	19	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS dan non PNS	50 Pasang	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	27,500,000	31,625,000	
2	19	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Tahun	39,600,000	45,540,000	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>						<b>607,924,000</b>	<b>699,112,600</b>					
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>						<b>457,924,000</b>	<b>526,612,600</b>					
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2.2.1 Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Persentase Wirausaha Muda	100 %	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemudaan dibidang olahraga dan kesenian	1 Tahun	Meningkatnya kapasitas daya saing wirausaha muda	1 Tahun	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2.2.1 Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausaha Muda	100 %	Terlaksananya pelatihan wirausaha pemula bagi pemuda	1 Tahun	Meningkatnya kapasitas daya saing wirausaha muda	1 Tahun	90,000,000	103,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2.2.1 Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausaha Muda	100 %	Terlaksananya pendataan potensi kepemudaan	1 Tahun	Meningkatnya kapasitas daya saing wirausaha muda	1 Tahun	65,000,000	74,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2.2.1 Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausaha Muda	100 %	Terlaksananya kegiatan pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	1 Tahun	Meningkatnya kapasitas daya saing wirausaha muda	1 Tahun	179,000,000	205,850,000	
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2.2.1 Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Wirausaha Muda	100 %	Terlaksananya pembinaan dan pengiriman paskibraka Terlaksananya peringatan hari sumpah pemuda	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Meningkatnya kapasitas daya saing wirausaha muda	1 Tahun	123,924,000	142,512,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>150,000,000</b>	<b>172,500,000</b>					
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya pemuda dan mahasiswa yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olah raga	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	34,47 persen	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan	1 Kegiatan	Meningkatnya kapasitas dan prestasi pemuda dalam pembangunan daerah	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>						<b>8,186,500,000</b>	<b>9,414,475,000</b>					
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>6,760,000,000</b>	<b>7,774,000,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	6. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	2.2.1 Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Simpang Empat Kab. Aceh Selatan, Meukek, Kuta Buloh I Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Jumlah Lapangan Olahraga	387 Unit	erwujudnya pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga (TSC Lanjutan, lap. futsal indoor dan lapangan bola kaki kubosa tahap I	4 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	1 Tahun	6,760,000,000	7,774,000,000	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>700,000,000</b>	<b>805,000,000</b>					
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2.2.1 Terwujudnya pemuda yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pembinaan Olahraga	100 %	Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke XV	1 Kegiatan	Meningkatnya prestasi atlet muda di bidang olahraga	1 Tahun	700,000,000	805,000,000	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>663,500,000</b>	<b>763,025,000</b>					
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terciptanya instruktur senam dan wasit olahraga	20 Orang			30,000,000	34,500,000	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pembinaan atlet dan turnamen cabang olahraga	5 Kegiatan			578,500,000	665,275,000	
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pendataan potensi sarana dan prasarana olahraga	1 Tahun			55,000,000	63,250,000	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>	<b>2.05</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>						<b>63,000,000</b>	<b>72,450,000</b>					
2	19	03	2.05	04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya pemuda dan mahasiswa yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang	Cakupan pembinaan olahraga	100 persen	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga Lapangan Naga Tapaktuan	1 Tahun	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1 Tahun	25,000,000	28,750,000	
2	19	03	2.05	06	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Terwujudnya pemuda dan mahasiswa yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan olahraga	100 persen	Tersedianya dana pelaksanaan liga danone	1 Kegiatan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1 Tahun	38,000,000	43,700,000	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga  
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya kompetensi bagi kamabigus dan pembina gugus depan se Aceh Selatan	1 Kegiatan			0	0	
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbentuknya karakter peserta pramuka yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Terbentuknya karakter pramuka penegak dan pandega se Aceh Selatan	1 Kegiatan 2 Kegiatan			0	0	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>												
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>												
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	59,169,000	68,044,350	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	23				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						<b>3,904,851,779</b>	<b>4,490,579,546</b>					
2	23	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>3,747,002,879</b>	<b>4,309,053,311</b>					
2	23	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,564,951,779</b>	<b>2,949,694,546</b>					
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2,564,951,779	2,949,694,546	
2	23	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>1,152,051,100</b>	<b>1,324,858,765</b>					
2	23	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Materai dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	51,000,000	58,650,000	
2	23	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Rekening air, listrik dan internet	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	76,800,000	88,320,000	
2	23	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Meningkatkan efektivitas dan kinerja	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	164,815,000	189,537,250	
2	23	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	39,960,000	45,954,000	
2	23	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	20,800,000	23,920,000	
2	23	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	16,144,340	18,565,991	
2	23	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	6,000,000	6,900,000	
2	23	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Meningkatkan efektivitas dan kinerja	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	7,975,000	9,171,250	
2	23	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	5,280,000	6,072,000	
2	23	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya makan dan minum harian pegawai	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	52,174,000	60,000,100	
2	23	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	31 Kali	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	145,000,000	166,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	23	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Transportasi Kendaraan Dinas Roda Dua	2 Unit	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	50,000,000	57,500,000	
2	23	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan kantor	7 Unit	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	19,021,100	21,874,265	
2	23	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Peralatan Gedung kantor	2 Unit	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	16,400,000	18,860,000	
2	23	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	14,211,660	16,343,409	
2	23	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya sarana kerja aparatur	7 Unit	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	46,370,000	53,325,500	
2	23	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya kerja aparatur	22 Unit	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	20,100,000	23,115,000	
2	23	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	400,000,000	460,000,000	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>					
2	23	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	42 Stel	Tersedianya pakaian dinas ASN	42 Stel	30,000,000	34,500,000	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>						<b>157,848,900</b>	<b>181,526,235</b>					
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>126,900,300</b>	<b>145,935,345</b>					
2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	8633,79 Orang	Tersedianya Bahan bacaan pada perpustakaan umum	1 Tahun	Jumlah Perpustakaan	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	8633,79 Orang	Terselenggaranya pelatihan petugas pelayanan perpustakaan, khusus, gampong, mesjid, sekolah / pesantren	1 Tahun	Jumlah Perpustakaan	1 Tahun	26,900,300	30,935,345	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>30,948,600</b>	<b>35,590,890</b>					
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	8633,79 Orang	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan sosialisasi Budaya Baca	1 Tahun	Termotivasi minat baca pelajar dan masyarakat	1 Tahun	30,948,600	35,590,890	
<b>2</b>	<b>24</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>80,000,000</b>	<b>92,000,000</b>					
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>						<b>57,000,000</b>	<b>65,550,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	2.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>27,000,000</b>	<b>31,050,000</b>					
2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Terwujudnya Data Base Sistem Administrasi Kearsipan	100 %	Tersedianya sarana Pengumpulan dan penyimpanan Arsip	1 Kegiatan	Tersedianya sarana Pengelolaan kearsipan	1 Tahun	27,000,000	31,050,000	
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>02</b>	2.03	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>							<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>					
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Terwujudnya Data Base Sistem Administrasi Kearsipan	100 %	Tersedianya informasi, akses dan layanan kearsipan	1 App	Terwujudnya data base informasi Kearsipan	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>							<b>23,000,000</b>	<b>26,450,000</b>						
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>03</b>	2.03	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>							<b>23,000,000</b>	<b>26,450,000</b>					
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	99 %	Tertata dokumen	1 Tahun	Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian dokumen	1 Tahun	23,000,000	26,450,000	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>KECAMATAN</b>									<b>80,100,000</b>	<b>92,115,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									<b>80,100,000</b>	<b>92,115,000</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>							<b>80,100,000</b>	<b>92,115,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Tepi Air			Tersedianya Biaya Koordinasi / Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam daerah	1 Tahun		80,100,000	92,115,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												
<b>3</b>	<b>25</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>10,818,261,815</b>	<b>12,441,001,087</b>					
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>4,213,285,815</b>	<b>4,845,278,687</b>					
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>35,000,000</b>	<b>40,250,000</b>					
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	100 %	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja Dinas Kelautan dan perikanan	2 Dokumen	Meningkatnya kualitas penyusunan program dan kegiatan	100 %	35,000,000	40,250,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,885,285,815</b>	<b>3,318,078,687</b>					
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	2,785,285,815	3,203,078,687	
3	25	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersusunnya CALK dan LRA	2 Dokumen	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	100,000,000	115,000,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>1,253,000,000</b>	<b>1,440,950,000</b>					
3	25	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah surat	1257 surat	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	6,000,000	6,900,000	
3	25	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah bulan	12 bulan	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	63,000,000	72,450,000	
3	25	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	29 orang	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	373,200,000	429,180,000	
3	25	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Luas bangunan kantor	1500 M2	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	5,000,000	5,750,000	
3	25	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kegiatan administrasi	32 kegiatan	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	35,000,000	40,250,000	
3	25	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah barang cetak dan penggandaan	30 kegiatan	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	29,300,000	33,695,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	25	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah instalasi listrik	59 titik	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	6,000,000	6,900,000	
3	25	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 unit	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	48,000,000	55,200,000	
3	25	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah surat kabar	5 media	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	6,000,000	6,900,000	
3	25	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kali makan minum	242 kali	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	80,000,000	92,000,000	
3	25	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kali konsultasi dan koordinasi	107 kali	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	300,000,000	345,000,000	
3	25	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 unit	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	50,000,000	57,500,000	
3	25	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kendaraan dinas	24 unit	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	133,000,000	152,950,000	
3	25	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah perlengkapan gedung kantor	21 unit	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	6,000,000	6,900,000	
3	25	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor	34 unit	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	12,500,000	14,375,000	
3	25	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya rehap gedung/kantor	1 tahun	Terlaksananya Kelancaran Kegiatan Dinas	12 Bulan	100,000,000	115,000,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>40,000,000</b>	<b>46,000,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	25	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	jumlah bimtek yang diikuti	1 tahun	Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	100 %	40,000,000	46,000,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>						<b>2,931,000,000</b>	<b>3,370,650,000</b>					
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>2,631,000,000</b>	<b>3,025,650,000</b>					
3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.2 Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Keude Bakongan Kab. Aceh Selatan, Meukek, Keude Meukek Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Bengkuang Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Rukam Kab. Aceh Selatan, Trumon, Tuepin Tinggi Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Pasie Seubadeh Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Ujong Pulo Rayeuk Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Sawah Tingkeum Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Ujong Pulo Cut Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Seuleukat	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	34373 Ton/Tahun	Tersedianya prasarana perikanan tangkap	149 unit	Meningkatnya pembinaan dan hasil tangkapan nelayan	50 %	841,000,000	967,150,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	25	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.2 Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Sawang, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Trumon, Kuta Baro Kab. Aceh Selatan, Trumon, Kuta Padang Kab. Aceh Selatan, Trumon, Gampong Teungoh Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Sawang Indah Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Koto Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Semua Kelurahan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	34373 Ton/Tahun	Jumlah ketersediaan sarana perikanan tangkap	155 unit	Meningkatnya pembinaan dan hasil tangkapan nelayan	50 %	1,790,000,000	2,058,500,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>						<b>300,000,000</b>	<b>345,000,000</b>					
3	25	02	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.2 Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Kab. Aceh Selatan, Meukek, Keude Meukek	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	34373 Ton/Tahun	Terlaksananya pembangunan/rehab TPI	2 unit	Tersedianya fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang memadai	1 Unit	300,000,000	345,000,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>						<b>2,872,976,000</b>	<b>3,303,922,400</b>					
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>						<b>972,976,000</b>	<b>1,118,922,400</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.2 Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Produksi Perikanan Budidaya	277,91 Ton/Tahun	Tersedianya sarana pembudidaya ikan Tersedianya sarana prasarana budidaya udang Vaname	1 unit 16 unit	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	20 %	972,976,000	1,118,922,400	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>						<b>1,900,000,000</b>	<b>2,185,000,000</b>					
3	25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.2 Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Pasi Kuala Ba'u Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Ujung Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Jua Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Ujung Pasir Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Geulumbuk Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Padang Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Apha Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Pawoh Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Padang Baru Kab. Aceh Selatan, Meukek, Blang Kuala Kab. Aceh Selatan, Samadua, Air Sialang Hilir. Kab. Aceh Selatan, Sawang, Lhok Pawoh Kab. Aceh	Produksi Perikanan Budidaya	277,91 Ton/Tahun	Tersedianya sarana pembudidaya ikan	1 Kegiatan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	20 %	1,500,000,000	1,725,000,000	





**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan  
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.2 Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Produksi Perikanan Budidaya	277,91 Ton/Tahun	Tersedianya dokumen perencanaan budidaya perikanan	1 Dokumen	Peningkatan produksi perikanan budidaya	20 %	400,000,000	460,000,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>180,000,000</b>	<b>207,000,000</b>					
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>04</b>	2.01		<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>						<b>180,000,000</b>	<b>207,000,000</b>					
3	25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.2 Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya pembinaan kepada Pokmaswas dan Panglima laot	19 Kelompok	Tersedianya honorarium panglima laot	12 Bulan	Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	100 %	180,000,000	207,000,000	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>						<b>621,000,000</b>	<b>714,150,000</b>					
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>05</b>	2.03		<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>621,000,000</b>	<b>714,150,000</b>					
3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.2 Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Sawang, Ujung Padang	Jumlah Masyarakat Pengolah Ikan	239 Orang	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan jumlah sarana pengolahan yang direhab	455 unit 1 unit	Meningkatnya produksi pengolahan ikan	100 %	621,000,000	714,150,000	
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>KECAMATAN</b>						<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Monev Program dan Kegiatan	18 kecamatan	Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan	100 %	50,000,000	57,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												
<b>3</b>	<b>26</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						<b>8,754,145,330</b>	<b>10,067,267,130</b>					
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>2,789,645,330</b>	<b>3,208,092,130</b>					
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>2,000,000</b>	<b>2,300,000</b>					
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Tersedia Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	2,000,000	2,300,000	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>1,876,645,330</b>	<b>2,158,142,130</b>					
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	1,874,645,330	2,155,842,130	
3	26	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	2,000,000	2,300,000	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>853,000,000</b>	<b>980,950,000</b>					
3	26	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat	820 Surat	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	4,000,000	4,600,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Bulan	12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	45,000,000	51,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	6 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	3,000,000	3,450,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Orang	23 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	210,700,000	242,305,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Luas Kantor	754 M2	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	4,500,000	5,175,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	26	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan	18 Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	40,000,000	46,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan	17 Kegiatan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	20,000,000	23,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Titik Instalasi Listrik	47 Titi	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	15,000,000	17,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat kabar	5 Surat Kabar	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	6,500,000	7,475,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Makan	242 Kali	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	55,000,000	63,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	75 Kali	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	4 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	7 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	107,000,000	123,050,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	26	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Mebeuler	1 Paket	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Perawatan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	132,300,000	152,145,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas	6 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	17 Unit	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Pariwisata	1 Tahun	20,000,000	23,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>58,000,000</b>	<b>66,700,000</b>					
3	26	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	32 Stell	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	18,000,000	20,700,000	
3	26	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	4 Orang	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	40,000,000	46,000,000	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>						<b>4,634,500,000</b>	<b>5,329,675,000</b>					
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>						<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>					
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya PAD sektor pariwisata	3 %	Jumlah Destinasi	15 Destinasi	Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata Aceh Selatan	1 Tahun	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya PAD sektor pariwisata	3 %	Jumlah Destinasi	1 Destinasi	Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata Aceh Selatan	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>						<b>4,534,500,000</b>	<b>5,214,675,000</b>					
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya PAD sektor pariwisata	3 %	Jumlah Perencanaan Tahun Berjalan	1 Tahun	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata Daerah	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya PAD sektor pariwisata	3 %	Jumlah Destinasi Jumlah Destinasi	1 Kegiatan 3 Kegiatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata Daerah	1 Tahun	4,374,500,000	5,030,675,000	
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya PAD sektor pariwisata	3 %	Jumlah Destinasi	1 Tahun	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata Daerah	1 Tahun	10,000,000	11,500,000	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>						<b>250,000,000</b>	<b>287,500,000</b>					
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>						<b>250,000,000</b>	<b>287,500,000</b>					
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	524283 Jiwa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata Aceh Selatan	1 Tahun	250,000,000	287,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	524283 Jiwa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Pariwisata Aceh Selatan	1 Tahun	0	0	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>						<b>1,080,000,000</b>	<b>1,242,000,000</b>					
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>						<b>1,080,000,000</b>	<b>1,242,000,000</b>					
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lama kunjungan Wisata	3 Hari	Jumlah Orang	2 Orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Tahun	140,000,000	161,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata  
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lama kunjungan Wisata	3 Hari	Jumlah Kelompok	3 Kelompok	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Tahun	120,000,000	138,000,000	
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lama kunjungan Wisata	3 Hari	Jumlah Orang	30 Orang	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Tahun	120,000,000	138,000,000	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.2 Meningkatnya Pendapatan di Sektor Pariwisata	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lama kunjungan Wisata	3 Hari	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Tahun	700,000,000	805,000,000	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>												
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>												
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tahun	1 Tahun	Tersedianya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dalam Kabupaten	12 Bulan	25,000,000	28,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												
<b>3</b>	<b>27</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>41,662,118,202</b>	<b>47,911,435,932</b>					
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>19,425,666,202</b>	<b>22,339,516,132</b>					
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>158,441,500</b>	<b>182,207,725</b>					
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Data Statistik Pertanian	5 Doc	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	4 Dokumen	Dokumen Perencanaan	12 Bulan	500,000	575,000	
3	27	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Data Statistik Pertanian	5 Doc	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	Dokumen Perencanaan	12 Bulan	137,941,500	158,632,725	
3	27	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Data Statistik Pertanian	5 Doc	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	Dokumen Perencanaan	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>16,872,868,202</b>	<b>19,403,798,432</b>					
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	16,872,868,202	19,403,798,432	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>2,347,856,500</b>	<b>2,700,034,975</b>					
3	27	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Padang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat	12 Bulan	Terlaksannnya Urusan Dinas	12 Bulan	4,500,000	5,175,000	
3	27	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Padang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Bulan	12 Bulan	Terlaksannnya Urusan Dinas	12 Bulan	124,600,000	143,290,000	
3	27	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Padang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	12 Bulan	Terlaksannnya Urusan Dinas	12 Bulan	724,000,000	832,600,000	
3	27	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Luas Bangunan Kantor	1.575 m <sup>2</sup>	Terlaksannnya Urusan Dinas	12 Bulan	5,500,000	6,325,000	
3	27	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan Administrasi	45 Kegiatan	Terlaksannnya Urusan Dinas	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	
3	27	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	35 Kegiatan	Terlaksannnya Urusan Dinas	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Instalasi Listrik	162 Titik	Terlaksannya Urusan Dinas	12 Bulan	5,300,000	6,095,000	
3	27	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Sarana Pendukung untuk Kegiatan Daerah	0 Unit	Terlaksannya Urusan Dinas	12 Bulan	4,000,000	4,600,000	
3	27	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat Kabar	6 Media	Terlaksannya Urusan Dinas	12 Bulan	6,500,000	7,475,000	
3	27	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Makan dan Minum	242 Kali	Terlaksannya Urusan Dinas	12 Bulan	791,460,000	910,179,000	
3	27	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	47 Kali	Terlaksannya Urusan Dinas	12 Bulan	300,000,000	345,000,000	
3	27	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	16 Unit	Terlaksannya Urusan Dinas	12 Bulan	92,736,500	106,646,975	
3	27	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Meubeleur	33 Unit	Terlaksannya Urusan Dinas	12 Bulan	49,260,000	56,649,000	
3	27	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Tahun	Terlaksannya Urusan Dinas	12 Bulan	180,000,000	207,000,000	
3	27	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	1 Tahun	Terlaksannya Urusan Dinas	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>46,500,000</b>	<b>53,475,000</b>					
3	27	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik	100 Stell	Meningkatnya Disiplin Aparatur	12 Bulan	31,500,000	36,225,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti BimTek	8 Orang	Meningkatnya Disiplin Aparatur	12 Bulan	15,000,000	17,250,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>						<b>10,035,552,000</b>	<b>11,540,884,800</b>					
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>						<b>2,637,052,000</b>	<b>3,032,609,800</b>					
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Jambo Manyang Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Ruak Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Kedai Runding Kab. Aceh Selatan, Samadua, Ladang Pantan Luas Kab. Aceh Selatan, Samadua, Kuta Blang Kab. Aceh Selatan, Samadua, Payonan Gadang Kab. Aceh Selatan, Sawang, Sikulat Kab. Aceh Selatan, Sawang, Trieng Meuduro Baroh Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Tutong Kab. Aceh	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Pengadaan Alsintan Pengadaan Herbisida Pengadaan Pupuk Pengadaan Sarana Pertanian Pengadaan Tanah	28 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Kegiatan 1 Paket	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	100 %	2,637,052,000	3,032,609,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021																	
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan						
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target				
				Selatan, Labuhan Haji Barat, Iku Lhueng Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Pantan Pawoh Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Jambo Papan Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Kampung Padang Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Lawe Sawah Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Lawe Cimanok													
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>329,500,000</b>	<b>378,925,000</b>					
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Jumlah Pengadaan Benih Kacang Tanah Jumlah Pengadaan Bibit Pinang Batara Jumlah Ternak Yang di Inseminasi Buatan Pelepasan Pala Premium Pengembangan Tanaman Buah-Buahan Pengujian Calon Pohon Induk tanaman Hortikultura	21 Ha 3 Ha 100 Ekor 1 Paket 1 Kegiatan 1 Komoditi	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	100 %	329,500,000	378,925,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain</b>							<b>7,069,000,000</b>	<b>8,129,350,000</b>					
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Tersedianya Benih/Bibit Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Peternakann	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	100 %	6,994,000,000	8,043,100,000	



Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021												
Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
								Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Ladang Teungoh Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Silolo Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Mata Ie Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Pasie Rasian Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Krueng Kalee Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Ujung Padang Asahan Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Pante Raja Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Beutong Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Pulo Air Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan									
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton			Meningkatnya Produksi Sektor Pertanian	100 %	75,000,000	86,250,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>										<b>9,912,750,000</b>	<b>11,399,662,500</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>										<b>100,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Tersedianya biaya penetapan dan Sosialisasi Lahan Pertanian Berkelanjutan/ LP2B	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	100 %	100,000,000	115,000,000	
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Semua Kelurahan	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Jumlah Dokumen Master Plan Pengembangan Padi Sawah	1 Paket	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	100 %	0	0	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>												
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Pasi Kuala Asahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Pulo Ie I Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Pulo Kambing Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Alur Mas Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Pasi Kuala Ba'u Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Jumlah Saluran Irigasi yang dibuat	8430 Meter	Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian	100 %	3,445,550,000	3,962,382,500	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian					Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021												
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Keude Bakongan Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Krueng Batu Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Pasie Lembang Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Trumon,	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Jumlah Jalan Pertanian/Perkebunan yang dibangun	7660 Meter	Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian	100 %	4,862,200,000	5,591,530,000	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Semua Kelurahan Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Jumlah Bangunan dan Peralatan Ketel Multifungsi Jumlah Biaya Pemeliharaan Gedung Alsintan dan Pengadaan Peralatan Perbengkelan Jumlah Optimasi Lahan Sawah Jumlah Pembangunan Saung Tani Jumlah Renovasi Puskesmas Terlaksananya Pembangunan/Renovasi Prasarana Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 Unit 1 Tahun 5 Ha 1 Paket 3 Paket 6 Paket	Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian	100 %	1,370,000,000	1,575,500,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>135,000,000</b>	<b>155,250,000</b>					
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Pasi Rasian	Produksi daging	2653 Ton/Thn	Tersedianya Operasional Kawasan dan Rehab HMT	1 Kawasan	Meningkatnya Kinerja Paramedik	100 %	135,000,000	155,250,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>						<b>1,013,000,000</b>	<b>1,164,950,000</b>					
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>610,000,000</b>	<b>701,500,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tertanganinya Kasus Penyakit Hewan Ternak Yang dilaporkan	100 %	Jumlah Hewan yang ditangani Jumlah Obat-obatan, vaksin, alat dan bahan kesehatan hewan Jumlah Obat Yang di Distribusikan	3500 Ekor 1 Paket 3000 Liter	Pengendalian Wabah Penyakit Burung	100 %	610,000,000	701,500,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>208,000,000</b>	<b>239,200,000</b>					
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Jambo Manyang Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Padang Bakau Kab. Aceh Selatan, Meukek, Tanjung Harapan Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Jambo Papeun	Tertanganinya Kasus Penyakit Hewan Ternak Yang dilaporkan	100 %	Jumlah Honorarium Puskesmas Jumlah Puskesmas	14 Orang 4 Puskesmas	Meningkatnya Kinerja Petugas Puskesmas	100 %	208,000,000	239,200,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>						<b>195,000,000</b>	<b>224,250,000</b>					
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keikutsertaan Dalam Expo Ternak	1 Jumlah Expo	Jumlah Kegiatan Expo Ternak yang diikuti	1 Event	Peningkatan Pemasaran Produk Peternakan	100 %	155,000,000	178,250,000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keikutsertaan Dalam Expo Ternak	1 Jumlah Expo	Jumlah Honorarium Petugas Paramedik	160 OK	Peningkatan Pemasaran Produk Peternakan	100 %	40,000,000	46,000,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>						<b>353,500,000</b>	<b>406,525,000</b>					
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>						<b>353,500,000</b>	<b>406,525,000</b>					
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Jumlah pengadaan Pestisida Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pala Terlaksananya Sekolah Lapang	1 Paket 1 Kegiatan 1 Paket	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100 %	353,500,000	406,525,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>						<b>80,650,000</b>	<b>92,747,500</b>					
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>80,650,000</b>	<b>92,747,500</b>					
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Produksi sektor pertanian Tanaman Pangan	153920 Ton	Terlaksananya Pendampingan, Sosialisasi AUP dan KUR	1 Kegiatan	Pemanfaatan Fasilitas KUR	1 Tahun	80,650,000	92,747,500	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>						<b>841,000,000</b>	<b>967,150,000</b>					
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>						<b>841,000,000</b>	<b>967,150,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bina kelompok tani	56 %	Terlaksananya Expo Penyuluhan, Penas, Jambore Penyuluhan Terlaksananya Penilaian Kinerja Penyuluh	3 Kegiatan 1 Kegiatan	Meningkatnya Kinerja dan Wawasan Penyuluh	100 %	500,000,000	575,000,000	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bina kelompok tani	56 %	Terlaksananya Temu Teknis Penyuluhan	2 Kali	Meningkatnya Kinerja dan Wawasan Penyuluh	100 %	275,000,000	316,250,000	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	8.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan bina kelompok tani	56 %	Terlaksananya Kegiatan Prasarana Penyuluhan Pertanian Terlaksananya Pembersihan Lahan (Land Clearing) BPP	18 BPP 3 BPP	Meningkatnya Kinerja dan Wawasan Penyuluh	100 %	66,000,000	75,900,000	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>												
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>												
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 Tahun	Tertib dan Lancarnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Dalam Kabupaten Aceh Selatan	100 %	20,000,000	23,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	17				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>						6,520,000,000	7,498,000,000					
2	17	03			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>						2,625,000,000	3,018,750,000					
2	17	03	2.01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>						2,625,000,000	3,018,750,000					
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi aktif	75,5 %	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	45 unit	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	200 Unit	225,000,000	258,750,000	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi aktif	75,5 %	Jumlah Koperasi yang dibina	50 unit	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	200 Unit	2,400,000,000	2,760,000,000	
2	17	04			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>						80,000,000	92,000,000					
2	17	04	2.01		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						80,000,000	92,000,000					
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi aktif	75,5 %	Jumlah Koperasi yang dinilai	20 unit	Peningkatan Persentase Koperasi Sehat	45 %	30,000,000	34,500,000	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi aktif	75,5 %	Jumlah Koperasi sehat	20 unit	Peningkatan Persentase Koperasi Sehat	45 %	50,000,000	57,500,000	
2	17	05			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>						575,000,000	661,250,000					
2	17	05	2.01		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>						575,000,000	661,250,000					
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Persentase koperasi mandiri dan tangguh	55 %	Jumlah Orang yang dilatih	150 Orang	Peningkatan Pemahaman tentang Perkoperasian	60 %	575,000,000	661,250,000	
2	17	07			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>						2,940,000,000	3,381,000,000					
2	17	07	2.01		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>						2,940,000,000	3,381,000,000					
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pertumbuhan Sektor Industri	4 %	Jumlah Sarana Usaha Mikro yang tersedia	150 Unit	Peningkatan Skala Usaha	60 %	540,000,000	621,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Pertumbuhan Sektor Industri	4 %	Jumlah Kelompok Industri Kecil yang dibina	3 Kelompok	Peningkatan Skala Usaha	60 %	400,000,000	460,000,000	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Meukek, Arun Tunggai Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Pertumbuhan Sektor Industri	4 %	Jumlah Sentra Industri Jumlah Unit Usaha Mikro yang dibina	1 Sentra 150 Unit	Peningkatan Skala Usaha	60 %	2,000,000,000	2,300,000,000	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>08</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>						<b>300,000,000</b>	<b>345,000,000</b>					
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>08</b>	2.01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>						<b>300,000,000</b>	<b>345,000,000</b>					
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	7,2 %	Meningkat Jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	150 Unit	Adanya Sertifikasi Label, Merek , Halal , SNI,	15 Produk	300,000,000	345,000,000	
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												
<b>3</b>	<b>30</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						<b>7,812,363,133</b>	<b>8,984,217,603</b>					
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>3,975,564,018</b>	<b>4,571,898,621</b>					
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>3,195,835,018</b>	<b>3,675,210,271</b>					
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	3,195,835,018	3,675,210,271	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>729,229,000</b>	<b>838,613,350</b>					
3	30	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat	1600 Surat	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	3,000,000	3,450,000	
3	30	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	40,000,000	46,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	30	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jasa Pengamanan Gedung Kantor	2 Orang	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	20,400,000	23,460,000	
3	30	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	14 Orang	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	190,806,000	219,426,900	
3	30	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Luas Bangunan Kantor	546 M2	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	2,000,000	2,300,000	
3	30	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan Administrasi Kantor	35 Keg	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	
3	30	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	35 Keg	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	9,720,000	11,178,000	
3	30	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Titik Instalasi Listrik	65 Titik	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	5,000,000	5,750,000	
3	30	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Media Surat Kabar	8 Media	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	8,700,000	10,005,000	
3	30	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Makanan dan Minuman	242 Kali	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	80,000,000	92,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	30	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	72 Kali	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	179,100,000	205,965,000	
3	30	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana Gedung Kantor	2 Unit	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	9,000,000	10,350,000	
3	30	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	10,000,000	11,500,000	
3	30	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Mebeleur Gedung Kantor	50 Unit	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	25,500,000	29,325,000	
3	30	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Fasilitas Gedung Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	30,500,000	35,075,000	
3	30	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	13 Unit	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	79,503,000	91,428,450	
3	30	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	16 Unit	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	5,000,000	5,750,000	
3	30	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	19 Unit	Terlaksananya Urusan dan Pelayanan Dinas	12 Bulan	11,000,000	12,650,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	2.04	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>50,500,000</b>	<b>58,075,000</b>						
3	30	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Jambo Apha	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	52 Stel	Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	25,500,000	29,325,000	
3	30	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	5 Orang	Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	25,000,000	28,750,000	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>						<b>2,716,799,115</b>	<b>3,124,318,982</b>						
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>03</b>	2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>						<b>2,716,799,115</b>	<b>3,124,318,982</b>						
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.4 Meningkatnya Kontribusi sector perdagangan	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Simpang Empat	Meningkatnya Jumlah Pasar Sehat	1 Jumlah pasar	Jumlah Pasar Sehat yang dikembangkan	4 Unit	Pasar Bersih dan Sehat	2 Unit	2,716,799,115	3,124,318,982	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>04</b>		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>						<b>920,000,000</b>	<b>1,058,000,000</b>						
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>04</b>	2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>						<b>920,000,000</b>	<b>1,058,000,000</b>						
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.4 Meningkatnya Kontribusi sector perdagangan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	45 %	Dokumen Informasi Harga Barang	104 Dokumen	Informasi Harga dan Pelaksanaan Pasar Murah	124 Kali	120,000,000	138,000,000	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.4 Meningkatnya Kontribusi sector perdagangan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang	45 %	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	24 Lokasi	Informasi Harga dan Pelaksanaan Pasar Murah	124 Kali	800,000,000	920,000,000	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>06</b>		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>						<b>200,000,000</b>	<b>230,000,000</b>						
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>06</b>	2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>						<b>200,000,000</b>	<b>230,000,000</b>						
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.4 Meningkatnya Kontribusi sector perdagangan	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Hilir Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Panjupian	Alat UTTP yang memenuhi standar	150 Unit	Jumlah Alat UTTP yang ditera dan ditera ulang	100 Unit	Alat UTTP yang memenuhi Standar	18 Kec	50,000,000	57,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	06	2.01	02		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	9.1.4 Meningkatnya Kontribusi sector perdagangan	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alat UTTP yang memenuhi standar	150 Unit	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penyuluhan	5 Kali	Alat UTTP yang memenuhi Standar	18 Kec	150,000,000	172,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	07				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						1,053,090,000	1,211,053,500					
2	07	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>						40,000,000	46,000,000					
2	07	02	2.01		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>						40,000,000	46,000,000					
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	7.2.1 Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65 %	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Data Base Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	40,000,000	46,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	03			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>						953,090,000	1,096,053,500					
2	07	03	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>						953,090,000	1,096,053,500					
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	7.2.1 Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Jambo Manyang	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65 %	Jumlah pencari kerja yang dilatih	112 Orang	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Berkompetensi dan Produktif	144 Orang	723,090,000	831,553,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	7.2.1 Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Jambo Manyang	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65 %	Jumlah Sarana dan Prasarana BLK Terlaksananya kegiatan pelatihan dan Sapras Lemabaga Pelatihan Kerja Terlaksananya Operasional BLK	2 Unit 6 Paket 1 Tahun	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Berkompetensi dan Produktif	144 Orang	230,000,000	264,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	03	2.04		<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>						0	0					
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	7.2.1 Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	65 %	Terlaksananya Konsultasi pada Perusahaan	1 Tahun	Terwujudnya Produktivitas Pelaku Perusahaan Kecil	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	04			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>						30,000,000	34,500,000					
2	07	04	2.02		<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						0	0					
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2. Memacu tumbuhnya industry usaha mikro, kecil dan menengah serta kemudahan investasi	7.2.1 Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	55 %	Terlaksananya Pengawasan LPTKS	1 Tahun	Tertib dan Terdatanya Izin LPTKS	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	04	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>						30,000,000	34,500,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	7.2.1 Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	55 %	Terlaksananya Kegiatan Informasi Pasar Kerja Online	1 Tahun	Mudahnya Para Pencari Kerja Mendapatkan Informasi Pasar Kerja	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>						<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>					
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	7.2.1 Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100 %	Jumlah Kasus yang diselesaikan	100 %	Terdapatnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Perusahaan	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	2.02		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>					
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	7.2.1 Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja di berbagai sektor	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100 %	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	1 Tahun	Terbantunya Tenaga Kerja Daerah yang Mempunyai Masalah Kerja	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>												
<b>3</b>	<b>32</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>						<b>3,994,935,785</b>	<b>4,594,176,153</b>					
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>3,683,435,785</b>	<b>4,235,951,153</b>					
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,978,045,785</b>	<b>3,424,752,653</b>					
3	32	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	2,978,045,785	3,424,752,653	
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>705,390,000</b>	<b>811,198,500</b>					
3	32	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat	300 Surat	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	3,000,000	3,450,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	32	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Jambo Manyang Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Bulan	12 Bulan	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	60,000,000	69,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	22 Orang	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	175,590,000	201,928,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	700 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	5,600,000	6,440,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran	15 Kegiatan	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	12,000,000	13,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15 Kegiatan	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Instalasi Listrik	56 Titik	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	8,000,000	9,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Surat Kabar	4 Surat Kabar	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	7,200,000	8,280,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Makan Minum	242 Kali	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	32	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kali Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	27 Kali	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	110,000,000	126,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	170,000,000	195,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	22,000,000	25,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas	9 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah perlengkapan gedung kantor	8 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	5,000,000	5,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	32	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Lhok Keutapang	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	28 Unit	Terlaksananya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	7,000,000	8,050,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
3	32	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	3 Orang	Meningkatnya Kinerja Aparatur	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>						<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>					
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>						<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 3.32.2.07.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	32	02	2.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	9.1.5 Terbentuk dan berkembangnya kawasan transmigrasi	Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan	Peningkatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Permukiman	Terlaksananya Pendataan Cadangan Lahan dan Legalitas Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Satuan Permukiman	Terciptanya Dokumen Pencadangan Lahan dan Legalitas Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 SP	30,000,000	34,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>						<b>200,000,000</b>	<b>230,000,000</b>					
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>03</b>	2.01		<b>Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>200,000,000</b>	<b>230,000,000</b>					
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	9.1.5 Terbentuk dan berkembangnya kawasan transmigrasi	Kab. Aceh Selatan, Trumon, Ujong Tanah	Peningkatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 Permukiman	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Lokasi Transmigrasi	1 Kegiatan	Pengamanan Fasilitas Fasum Transmigrasi	1 Paket	200,000,000	230,000,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>						<b>81,500,000</b>	<b>93,725,000</b>					
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>04</b>	2.01		<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian</b>						<b>81,500,000</b>	<b>93,725,000</b>					
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	9.1.5 Terbentuk dan berkembangnya kawasan transmigrasi	Kab. Aceh Selatan, Trumon, Ujong Tanah	Terbinanya warga transmigrasi	160 Jumlah KK	Terlaksananya Musyawarah Rembuk Desa Transmigrasi	1 Kegiatan	Siapnya Warga Transmigrasi Ke Tahap Kemandirian	90 KK	50,000,000	57,500,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	3. Pemantapan Upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	9.1.5 Terbentuk dan berkembangnya kawasan transmigrasi	Kab. Aceh Selatan, Trumon, Ujong Tanah	Terbinanya warga transmigrasi	160 Jumlah KK	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	1 Kegiatan	Siapnya Warga Transmigrasi Ke Tahap Kemandirian	90 KK	31,500,000	36,225,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>KECAMATAN</b>						<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Jumlah kali koordinasi dan konsultasi	100 Kali	Terlaksananya Koordinasi Aparatur di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	20,000,000	23,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1	03				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						1,600,000,000	1,840,000,000					
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						1,600,000,000	1,840,000,000					
1	03	08	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>						1,600,000,000	1,840,000,000					
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	6.1.2 Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terbangunnya Kantor Camat Trumon Tengah Tahap II	100 %	Terangunnya Gedung Kantor Camat Trumon Tengah	1 Tahun	1,600,000,000	1,840,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	13				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						200,000,000	230,000,000					
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>						200,000,000	230,000,000					
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						200,000,000	230,000,000					
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ormas Perdesaan	15 Jumlah	Menambah pengetahuan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	1 Tahun	Meningkatkan SDM Masyarakat Perdesaan	1 Tahun	200,000,000	230,000,000	
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
4	01				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						40,785,831,006	46,903,705,657					
4	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						26,959,129,006	31,002,998,357					
4	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						14,147,129,006	16,269,198,357					
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terbayar Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Pembangunan Kabupaten	1 Tahun	14,147,129,006	16,269,198,357	
4	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						12,532,000,000	14,411,800,000					
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Jasa Administrasi Surat Menyurat	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	532,000,000	611,800,000	
4	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	650,000,000	747,500,000	
4	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	70,000,000	80,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan  Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4.01.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya jasa adm keuangan	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	350,000,000	402,500,000	
4.01.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terjaganya kebersihan dan kenyamanan kantor	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	450,000,000	517,500,000	
4.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	
4.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	
4.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Alat-alat listrik dan elektronik	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	250,000,000	287,500,000	
4.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	200,000,000	230,000,000	
4.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	80,000,000	92,000,000	
4.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	750,000,000	862,500,000	
4.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	3,500,000,000	4,025,000,000	
4.01.01.2.03.21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	320,000,000	368,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	350,000,000	402,500,000	
4	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	
4	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	400,000,000	460,000,000	
4	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Meubeleur gedung kantor	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	350,000,000	402,500,000	
4	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Alat-Alat Listrik Rumah Jabatan	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	650,000,000	747,500,000	
4	01	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya rumah dinas	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	
4	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	190,000,000	218,500,000	
4	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya mobil jabatan	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	450,000,000	517,500,000	
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	800,000,000	920,000,000	
4	01	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Meningkatnya masa manfaat rumah jabatan	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	120,000,000	138,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	01 01 2.03 37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Meningkatnya masa manfaat rumah dinas	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	140,000,000	161,000,000	
4	01 01 2.03 38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Meningkatnya masa manfaat Gedung Kantor Pemerintah	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	950,000,000	1,092,500,000	
4	01 01 2.03 40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Meningkatnya masa manfaat Kendaraan Dinas	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Aparatur Pemerintah	1 Tahun	430,000,000	494,500,000	
<b>4</b>	<b>01 01 2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>280,000,000</b>	<b>322,000,000</b>	
4	01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Pakaian Dinas	1 Tahun	Meningkatnya Disiplin dan Kompetensi Aparatur Pemerintah	1 Tahun	180,000,000	207,000,000	
4	01 01 2.04 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai	1 Tahun	Meningkatnya Disiplin dan Kompetensi Aparatur Pemerintah	1 Tahun	100,000,000	115,000,000	
<b>4</b>	<b>01 02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>										<b>4,051,802,000</b>	<b>4,659,572,300</b>	
<b>4</b>	<b>01 02 2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>										<b>963,637,000</b>	<b>1,108,182,550</b>	
4	01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Yang Diarsipkan	100 Doc	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	1 Tahun	Terciptanya Data dan Validasi Tata Batas Wilayah	1 Tahun	532,637,000	612,532,550	
4	01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Yang Diarsipkan	100 Doc	Tersedianya Data Administrasi Kewilayahan Kabupaten, Kecamatan, dan Gampong	1 Paket	Terciptanya Data dan Validasi Tata Batas Wilayah	1 Tahun	431,000,000	495,650,000	
<b>4</b>	<b>01 02 2.02</b>	<b>Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>										<b>2,816,000,000</b>	<b>3,238,400,000</b>	
4	01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peran Ulama dalam Pelaksanaan Syariat Islam	100 %	Terlaksananya Pelaksanaan Muzakarah, dan dukungan Pelaksanaan Ibadah Haji	1 Tahun	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 Tahun	1,550,000,000	1,782,500,000	
4	01 02 2.02 02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peran Ulama dalam Pelaksanaan Syariat Islam	100 %	Terlaksananya Verifikasi Data Santunan Kematian dan Beasiswa	1 Tahun	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 Tahun	1,200,000,000	1,380,000,000	
4	01 02 2.02 03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peran Ulama dalam Pelaksanaan Syariat Islam	100 %	Terwujudnya Kebijakan Kepala Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang undangan	1 Tahun	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan	1 Tahun	66,000,000	75,900,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
											Capaian Program		Keluaran Kegiatan					Hasil Kegiatan	
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
4	01	02	2.03		<b>Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah</b>											<b>272,165,000</b>	<b>312,989,750</b>		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Yang Diarsipkan	100 Doc	Qanun,Perbup dan Proleg	1 Tahun	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	1 Tahun	105,600,000	121,440,000			
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Yang Diarsipkan	100 Doc	Terselesaikannya Sangketa Hukum	1 Tahun	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	1 Tahun	48,400,000	55,660,000			
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Yang Diarsipkan	100 Doc	Tersedianya Dokumen dan Informasi Produk Hukum, Keluarga Sadar Hukum di Gampong - Gampong dan Pelaksanaan RAN-HAM di Kabupaten Aceh Selatan	1 Tahun	Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	1 Tahun	118,165,000	135,889,750			
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>											<b>1,858,000,000</b>	<b>2,136,700,000</b>		
4	01	03	2.01		<b>Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>											<b>218,000,000</b>	<b>250,700,000</b>		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Perekonomian Daerah	100 %	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dalam Kab. Aceh Selatan	1 Tahun	Terlaksananya stabilitas harga bahan pokok	1 Tahun	98,000,000	112,700,000			
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Perekonomian Daerah	100 %	Terlaksananya Pengendalian Perekonomian dalam Kabupaten Aceh Selatan	1 Tahun	Terlaksananya stabilitas harga bahan pokok	1 Tahun	120,000,000	138,000,000			
4	01	03	2.02		<b>Administrasi Pembangunan</b>											<b>1,100,000,000</b>	<b>1,265,000,000</b>		
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data Pembangunan Daerah	100 %	Terlaksananya Data Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1 Tahun	Tersedianya Data Pembangunan Daerah	1 Tahun	600,000,000	690,000,000			
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data Pembangunan Daerah	100 %	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Kabupaten	1 Tahun	Tersedianya Data Pembangunan Daerah	1 Tahun	500,000,000	575,000,000			
4	01	03	2.03		<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>											<b>540,000,000</b>	<b>621,000,000</b>		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kompetensi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	Terlaksananya pelelangan secara terpadu secara Elektronik	1 Tahun	Terlaksananya pelelangan secara terpadu secara Elektronik	1 Tahun	170,000,000	195,500,000			
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kompetensi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	Tersedianya Aplikasi dan sistem penunjang SPSE yang dikelola oleh Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1 Tahun	Terlaksananya pelelangan secara terpadu secara Elektronik	1 Tahun	250,000,000	287,500,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4	01 03 2.03 03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kompetensi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Tahun	Terlaksananya pelelangan secara terpadu secara Elektronik	1 Tahun	120,000,000	138,000,000	
<b>4</b>	<b>01 04</b>		<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM</b>									<b>7,916,900,000</b>	<b>9,104,435,000</b>		
<b>4</b>	<b>01 04</b>	2.01	<b>Pelaksanaan Administrasi Umum</b>									<b>301,700,000</b>	<b>346,955,000</b>		
4	01 04 2.01 01		Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRK	100 %	Terlaksananya Penatausahaan Persuratan dan Arsip Pimpinan, Staf Ahli serta Kepegawaian	1 Tahun	Terlaksananya Penatausahaan Administrasi	1 Tahun	301,700,000	346,955,000	
<b>4</b>	<b>01 04</b>	2.02	<b>Penataan Organisasi</b>									<b>3,850,000,000</b>	<b>4,427,500,000</b>		
4	01 04 2.02 01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Qanun, Perbup SOTK Pemkab Aceh Selatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan	1 Tahun	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Tahun	1,350,000,000	1,552,500,000	
4	01 04 2.02 02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Peta Proses Bisnis, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),Tata Naskah Dinas,Tata Pakaian Dinas,Forum Konsultasi Publik (FKP), Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik, Layanan aspirasi pengaduan online rakyat - SP4N	1 Tahun	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Tahun	1,500,000,000	1,725,000,000	
4	01 04 2.02 03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi	100 %	LAKIP Kabupaten Aceh Selatan,Penerapan E-Manajemen Kinerja, Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PEMDA ( PPRB-PEMDA)	1 Tahun	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Tahun	1,000,000,000	1,150,000,000	
<b>4</b>	<b>01 04</b>	2.03	<b>Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>									<b>3,365,200,000</b>	<b>3,869,980,000</b>		
4	01 04 2.03 01		Fasilitasi Keprotokolan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRK	100 %	Terlaksananya Seremonial Keprotokolan, HUT Republik Indonesia, HUT Aceh Selatan, HUT Dharmawanita / PKK dan Hari Ibu dan Anak	1 Tahun	Terlaksananya Keprotokolan Pemerintah Daerah	1 Tahun	2,017,000,000	2,319,550,000	
4	01 04 2.03 02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRK	100 %	Terlaksananya Rapat FORKOPIMDA, Rapat Asistensi SKPD dan Laporan Kegiatan Pimpinan Kabupaten Aceh Selatan	1 Tahun	Terlaksananya Keprotokolan Pemerintah Daerah	1 Tahun	448,200,000	515,430,000	
4	01 04 2.03 03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRK	100 %	Terlaksananya Layanan Keprotokolan dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Terlaksananya Keprotokolan Pemerintah Daerah	1 Tahun	900,000,000	1,035,000,000	
<b>4</b>	<b>01 04</b>	2.04	<b>Perencanaan dan Keuangan</b>									<b>400,000,000</b>	<b>460,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
4	01 04 2.04 03	Penatausahaan Pelaporan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100 %	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pelayanan Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Pelayanan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tersusunnya Laporan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	1 Tahun	400,000,000	460,000,000			
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01		<b>KECAMATAN</b>										350,000,000	402,500,000	
7	01 02		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										350,000,000	402,500,000	
7	01 02	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										350,000,000	402,500,000	
7	01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksana Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 38 SKPD)	100 %	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah	1 Tahun	Terlaksananya koordinasi, Sinergi dan konsultansi	1 Tahun	350,000,000	402,500,000			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRK

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
4	02				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>						26,545,229,427	30,527,013,840					
4	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						22,719,895,277	26,127,879,568					
4	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						14,247,090,927	16,384,154,566					
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			14,247,090,927	16,384,154,566			
4	02	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						7,629,691,850	8,774,145,627					
4	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa surat menyurat	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	95,235,000	109,520,250	
4	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Pembayaran Rekening Listrik, telepon dan air	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	244,985,448	281,733,265	
4	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Meningkatkan Pelayanan ADM Perkantoran	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	239,790,000	275,758,500	
4	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Petugas kebersihan dan alat pembersih	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	174,379,540	200,536,471	
4	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	171,660,572	197,409,658	
4	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	28,820,660	33,143,759	
4	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terciptanya Penerangan bangunan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	97,606,300	112,247,245	
4	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	222,915,000	256,352,250	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRK

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	71,016,000	81,668,400	
4	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	213,296,050	245,290,457	
4	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	5,523,915,900	6,352,503,285	
4	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Kendaraan Dinas	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	24,667,386	28,367,494	
4	02	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya perlengkapan rumah pimpinan DPRK	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	110,423,500	126,987,025	
4	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Perlengkapan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	0	0	
4	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	126,742,494	145,753,868	
4	02	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Rumah Pimpinan DPRK	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	0	0	
4	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	0	0	
4	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Kendaraan dinas	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	261,008,000	300,159,200	
4	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	23,230,000	26,714,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRK

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 02 01 2.03 38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Perehapan gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	0	0	
<b>4 02 01 2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>843,112,500</b>	<b>969,579,375</b>	
4 02 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Pakaian Dinas Anggota DPRK dan staf	1 Tahun	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 Tahun	214,802,500	247,022,875	
4 02 01 2.04 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Pakaian berciri khas daerah/ Laka dan pakaian batik	1 Tahun	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 Tahun	49,500,000	56,925,000	
4 02 01 2.04 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Meningkatkan SDM Aparatur	1 Tahun	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 Tahun	578,810,000	665,631,500	
<b>4 02 02</b>	<b>PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN</b>										<b>1,827,034,150</b>	<b>2,101,089,272</b>	
<b>4 02 02 2.01</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>										<b>1,827,034,150</b>	<b>2,101,089,272</b>	
4 02 02 2.01 02	Fasilitasi Rapat DPRD	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terintegrasinya Program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen anggaran Sekretariat DPRK	0 ada	Terlaksananya Rapat-rapat Kedewanan	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Anggota DPRK	1 Tahun	975,034,150	1,121,289,272	
4 02 02 2.01 04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD		5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terintegrasinya Program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen anggaran Sekretariat DPRK	0 ada	Tersedianya Bahan sandang/pangan rumah Pimpinan DPRK	1 Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Rapat Anggota DPRK	1 Tahun	852,000,000	979,800,000	
<b>4 02 03</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>										<b>1,998,300,000</b>	<b>2,298,045,000</b>	
<b>4 02 03 2.01</b>	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>										<b>75,000,000</b>	<b>86,250,000</b>	
4 02 03 2.01 02	Pembahasan Rancangan Perda		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRK	100 %	Pengesahan Rancangan Qanun	1 Tahun	Terciptanya Peraturan Daerah	1 Tahun	75,000,000	86,250,000	
<b>4 02 03 2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>										<b>86,400,000</b>	<b>99,360,000</b>	
4 02 03 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi DPRK	1 Tahun			86,400,000	99,360,000	
<b>4 02 03 2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>										<b>1,836,900,000</b>	<b>2,112,435,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRK

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4.02.03.2.05.03	Pelaksanaan Reses			Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Adanya Bahan dan Referensi bagi Anggota DPRK	1 Tahun			1,836,900,000	2,112,435,000	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7.01	<b>KECAMATAN</b>												
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>												
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>												
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan	1 Tahun	Kontribusi kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	251,861,500	289,640,725	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	11				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						150,000,000	172,500,000					
2	11	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>						150,000,000	172,500,000					
2	11	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>						150,000,000	172,500,000					
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedia Dokumen Pendukung RPJPD / RPJMD (Lingkungan Hidup)	2 Dok	Dokumen Perubahan KLHS RPJMD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perubahan KLHS RPJMD Pendukung RPJPD/RPJMD	1 Dokumen	150,000,000	172,500,000	
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						37,250,000	42,837,500					
2	14	02			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>						37,250,000	42,837,500					
2	14	02	2.01		<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>						37,250,000	42,837,500					
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedia Dokumen Pendukung RPJPD / RPJMD (Pengendalian Penduduk)	1 Dok	Dokumen GDPK	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen GDPK	1 Dokumen	37,250,000	42,837,500	
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
5	01				<b>PERENCANAAN</b>						10,811,539,004	12,433,269,855					
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						7,556,536,704	8,690,017,210					
5	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						80,000,000	92,000,000					
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Dokumen Renja dan Renstra	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	10,000,000	11,500,000	
5	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Tersinkronisasinya Perencanaan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	Tersedianya Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	30,000,000	34,500,000	
5	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	
5	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						4,194,408,798	4,823,570,118					
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	4,084,408,798	4,697,070,118	
5	01	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Dokumen Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 Dokumen	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik	12 Bulan	10,000,000	11,500,000	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Kegiatan Administrasi	36 Kegiatan	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	45,000,000	51,750,000	
5.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	36 Kegiatan	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	55,000,000	63,250,000	
5.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Instalasi Listrik	320 Titik	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	
5.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Tersedianya Sarana Pendukung Kegiatan OPD	1 Tahun	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	40,000,000	46,000,000	
5.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Surat Kabar	10 Media	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	25,000,000	28,750,000	
5.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Kali Makan dan Minum	242 Kali	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	138,900,000	159,735,000	
5.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Kali Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	105 Kali	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	450,000,000	517,500,000	
5.01.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	450,000,000	517,500,000	
5.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13 Unit	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	150,000,000	172,500,000	
5.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 Unit	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	100,000,000	115,000,000	
5.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Pengadaan Mebeleur	45 Unit	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	120,648,800	138,746,120	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	650,000,000	747,500,000	
5	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	15 Unit	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	155,877,206	179,258,787	
5	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	51 Unit	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	24,805,000	28,525,750	
5	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	61 Unit	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	50,928,900	58,568,235	
5	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Terpeliharanya mobileur	1 Tahun	Terpenuhinya Urusan/Tugas Dinas	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>310,968,000</b>	<b>357,613,200</b>					
5	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 Stel	Meningkatnya Kemampuan Kinerja dan Disiplin Aparatur	12 Bulan	42,700,000	49,105,000	
5	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Dokumen Peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	Meningkatnya Kemampuan Kinerja dan Disiplin Aparatur	12 Bulan	60,000,000	69,000,000	
5	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Bappeda)	100 %	Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek Perencanaan Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek Perencanaan	56 OPD 10 Orang	Meningkatnya Kemampuan Kinerja dan Disiplin Aparatur	12 Bulan	208,268,000	239,508,200	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						<b>2,645,002,300</b>	<b>3,041,752,645</b>					
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						<b>2,047,905,000</b>	<b>2,355,090,750</b>					
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPJMD/RKPK dan Perubahannya dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, usulan politis yang selaras dengan rumusan permasalahan teknokratik	100 %	Dokumen Perubahan RPJMD Dokumen RKPD Dokumen RKPD Perubahan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Beserta Perubahannya	12 Bulan	540,000,000	621,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPMD/RKPK dan Perubahannya dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, usulan politik yang selaras dengan rumusan permasalahan teknokratik	100 %	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Beserta Perubahannya	12 Bulan	150,000,000	172,500,000	
5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPMD/RKPK dan Perubahannya dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, usulan politik yang selaras dengan rumusan permasalahan teknokratik	100 %	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Terlaksananya Musrenbang Perubahan RPJM Terlaksananya Musrenbang RKPD	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Beserta Perubahannya	12 Bulan	200,000,000	230,000,000	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPMD/RKPK dan Perubahannya dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, usulan politik yang selaras dengan rumusan permasalahan teknokratik	100 %	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	1 Kegiatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Beserta Perubahannya	12 Bulan	100,000,000	115,000,000	
5	01	02	2.01	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPMD/RKPK dan Perubahannya dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, usulan politik yang selaras dengan rumusan permasalahan teknokratik	100 %	Terintegrasinya Rencana Pembangunan Daerah Program dan Kegiatan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik	56 SKPK 1 k	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Beserta Perubahannya	12 Bulan	354,000,000	407,100,000	
5	01	02	2.01	06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPMD/RKPK dan Perubahannya dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, usulan politik yang selaras dengan rumusan permasalahan teknokratik	100 %	Terlaksananya Forum Koordinasi Penyelesaian Pembangunan Daerah Terlaksananya Forum TKPKD	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Beserta Perubahannya	12 Bulan	140,000,000	161,000,000	
5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPMD/RKPK dan Perubahannya dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, usulan politik yang selaras dengan rumusan permasalahan teknokratik	100 %	Dokumen Bagan Struktur BAPPEDA Dokumen COR IKOR Dokumen Profil Investasi Aceh Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Beserta Perubahannya	12 Bulan	470,000,000	540,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.01.02.2.01.09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan RPJPD/RPJM/RKPK dan Perubahannya dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, usulan politis yang selaras dengan rumusan permasalahan teknokratik	100 %	Tersedianya data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Beserta Perubahannya	12 Bulan	93,905,000	107,990,750	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah</b>										<b>160,000,000</b>	<b>184,000,000</b>	
5.01.02.2.02.03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Kerangka Pendanaan yang responsif terhadap permasalahan pembangunan	100 %	Dokumen Perencanaan Dumber Dana DAK Dokumen Perencanaan Dumber Dana DOKA	1 Dokumen 1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kerangka Pendanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Bulan	160,000,000	184,000,000	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah</b>										<b>437,097,300</b>	<b>502,661,895</b>	
5.01.02.2.03.01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Selarasnya Sasaran Program/Kegiatan Perangkat Daerah dengan Prioritas RPKK dan tersusunnya laporan capaian Program/Kegiatan SPM dan Non SPM serta capaian pembangunan daerah.	100 %	Ju,lah Gampong Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Terlaksananya Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	10 Gampong 18 Kecamatan	Terkendalnya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	12 Bulan	327,147,300	376,219,395	
5.01.02.2.03.03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Selarasnya Sasaran Program/Kegiatan Perangkat Daerah dengan Prioritas RPKK dan tersusunnya laporan capaian Program/Kegiatan SPM dan Non SPM serta capaian pembangunan daerah.	100 %	Telaksananya Kegiatan Percepatan dan Pencegaha Stunting Terlaksananya Forum Pendidikan Daerah Terlaksananya Kegiatan Germas	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terkendalnya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	12 Bulan	109,950,000	126,442,500	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>										<b>210,000,000</b>	<b>241,500,000</b>	
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan</b>										<b>210,000,000</b>	<b>241,500,000</b>	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan		4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedia Bahan / terkendalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perubahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta Kesejahteraan Masyarakat	20 Bid. Urusan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM	1 Dokumen	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	12 Bulan	210,000,000	241,500,000	
<b>5.01.04</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>										<b>200,000,000</b>	<b>230,000,000</b>	
<b>5.01.04.2.01</b>	<b>Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian</b>										<b>200,000,000</b>	<b>230,000,000</b>	
5.01.04.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedia Bahan / terkendalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perubahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian, Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Alam	12 Bid. Urusan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	12 Bulan	200,000,000	230,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	01	05			<b>PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>						<b>200,000,000</b>	<b>230,000,000</b>					
5	01	05	2.01		<b>Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup</b>						<b>200,000,000</b>	<b>230,000,000</b>					
5	01	05	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedia Bahan / Terkendalinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perubahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Kebinamargaan dan Perhubungan, Keciptakarya dan Kewilayahan	7 Bid. Urusan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	12 Bulan	200,000,000	230,000,000	
5	05				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>1,965,154,000</b>	<b>2,259,927,100</b>					
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>						<b>1,965,154,000</b>	<b>2,259,927,100</b>					
5	05	02	2.01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>						<b>115,154,000</b>	<b>132,427,100</b>					
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan dokumen-dokumen penelitian	2 Dok	Dokumen AD-PPK	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	12 Bulan	65,154,000	74,927,100	
5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Ketersediaan dokumen-dokumen penelitian	2 Dok	Dokumen RAD-API PRD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	12 Bulan	50,000,000	57,500,000	
5	05	02	2.02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>						<b>150,000,000</b>	<b>172,500,000</b>					
5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan dokumen-dokumen penelitian	2 Dok	Dokumen Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan	12 Bulan	150,000,000	172,500,000	
5	05	02	2.03		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>						<b>1,640,000,000</b>	<b>1,886,000,000</b>					
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan dokumen-dokumen penelitian	2 Dok	Dokumen Kelayakan Pembangunan Kawasan Industri Aceh Selatan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Industri	1 Dokumen 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	12 Bulan	290,000,000	333,500,000	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan dokumen-dokumen penelitian	2 Dok	Dokumen Kelayakan Pembangunan Kawasan Peternakan Kabupaten Aceh Selatan Dokumen Profil Komoditi Unggulan Kabupaten Aceh Selatan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	12 Bulan	400,000,000	460,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan dokumen-dokumen penelitian	2 Dok	Dokumen Kelayakan Pabrik Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Dokumen Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Dokumen Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (JWP3K)	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	12 Bulan	700,000,000	805,000,000	
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	4. Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan	4.2.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan dokumen-dokumen penelitian	2 Dok	Dokumen Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan	12 Bulan	250,000,000	287,500,000	
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>						<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>					
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan publik	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah inovasi murni/modifikasi yang diterapkan di daerah	100 %	Jumlah Kegiatan Inovasi	1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Kegiatan	60,000,000	69,000,000	
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>KECAMATAN</b>						<b>274,000,000</b>	<b>315,100,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>64,000,000</b>	<b>73,600,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>64,000,000</b>	<b>73,600,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terkoordinasi/ bersinerginya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemda (Opd Bappeda)	100 %	Jumlah Kali Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	120 Kali	Terkoordinirnya Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	64,000,000	73,600,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>						<b>210,000,000</b>	<b>241,500,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>						<b>210,000,000</b>	<b>241,500,000</b>					
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	10.1.2 Tumbuhnya kawasan ekonomi yang telah ada	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa serta terkonsolidasinya Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan / Pedesaan	260/3 Gampong/kec	Tersinkronisasinya Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Desa	260 Gampong	Terselarasnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pemerintahan Desa	12 Bulan	60,000,000	69,000,000	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	10.1.2 Tumbuhnya kawasan ekonomi yang telah ada	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa serta terkonsolidasinya Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan / Pedesaan	260/3 Gampong/kec	Dokumen Pengembangan Kawasan Agropolitan	1 Dokumen	Terselarasnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pemerintahan Desa	12 Bulan	150,000,000	172,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
5	02				<b>KEUANGAN</b>						54,237,891,852	62,373,575,630					
5	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						47,767,891,852	54,933,075,630					
5	02	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						750,000	862,500					
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersusunnya Renstra dan Renja BPKD	2 dokumen	Meningkatnya Kinerja Aparatur BPKD	1 Tahun	750,000	862,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						39,460,451,852	45,379,519,630					
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Hilir	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Tambahan Penghasilan ASN	12 Bulan 12 Bulan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik 1	12 Bulan	39,304,451,852	45,200,119,630	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Laporan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik 1	12 Bulan	1,000,000	1,150,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik 1	12 Bulan	5,000,000	5,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersusunnya Laporan Prognosis	1 Laporan	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik 1	12 Bulan	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						7,844,190,000	9,020,818,500					
5	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Belanja Paket/pengiriman surat, Tersedianya Honorarium Tenaga agendaris, dan Tenaga Caraka	12600 Surat	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya fasilitas Telpon, Speedy, Air dan Listrik	12 bulan	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	310,000,000	356,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terjaganya kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200 unit	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	115,240,000	132,526,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.02.01.2.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Pengamanan Gedung Kantor/ Aset Daerah	12 bulan	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	105,150,000	120,922,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Perpanjangan PKB, Perpanjangan dan Pergantian STNK, Biaya BBNKB	40 Unit	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 bulan	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	934,800,000	1,075,020,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Honorarium Petugas Kebersihan	3754 meter2	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	60,000,000	69,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	103,000,000	118,450,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan	12 bulan	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	130,000,000	149,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Bola Lampu Listrik, Kabel, NCB dan lain-lain	125 titik	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	60,000,000	69,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Belanja Umbul-umbul, Spanduk dan Papan Nama	12 bulan	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	185,000,000	212,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16 media massa	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	20,000,000	23,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.02.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai, Tersedianya Makan dan Minum Tamu Pemda	242 kali	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	350,000,000	402,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas ke luar Daerah	12 bulan	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	450,000,000	517,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	9 unit	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	2,000,000,000	2,300,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Alat Pendingin Ruangan (AC), Tersedianya Meja Kerja	10 unit	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Komputer(PC), dan Laptop, Tersedianya Printer, UPS	8 unit	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	173,000,000	198,950,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Mebeleur Kantor	4 Unit	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	85,500,000	98,325,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3754 meter <sup>2</sup>	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	152,500,000	175,375,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	54 Unit	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	310,000,000	356,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5.02.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	500,000,000	575,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	02	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	3 Unit/lokasi	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	1,500,000,000	1,725,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Rehab Kendaraan Dinas Roda 4 dan roda 2 Pemda	56 SKPK	Tercapainya Urusan Dinas	12 Bulan	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>462,500,000</b>	<b>531,875,000</b>					
5	02	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	2 Unit	Peningkatan kualitas aparatur BPKD	1 Tahun	60,000,000	69,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Pakaian PDH	150 stel	Peningkatan kualitas aparatur BPKD	1 Tahun	75,000,000	86,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Pakaian khas Aceh dan olahraga pegawai BPKD	300 stel	Peningkatan kualitas aparatur BPKD	1 Tahun	187,500,000	215,625,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya Biaya Bimbingan Teknis	12 bulan	Peningkatan kualitas aparatur BPKD	1 Tahun	140,000,000	161,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>						<b>3,938,000,000</b>	<b>4,528,700,000</b>					
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>						<b>1,918,000,000</b>	<b>2,205,700,000</b>					
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan KUA TA. 2022	2 Dokumen	Tersedianya APBK Aceh Selatan	1 Tahun	190,000,000	218,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Kegiatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA. 2021	2 Dokumen	Tersedianya APBK Aceh Selatan	1 Tahun	163,000,000	187,450,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBK dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK Kabupaten Aceh Selatan TA. 2022	2 Dokumen	Tersedianya APBK Aceh Selatan	1 Tahun	583,000,000	670,450,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBK dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBK Kabupaten Aceh Selatan TA. 2021	2 Dokumen	Tersedianya APBK Aceh Selatan	1 Tahun	450,000,000	517,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	1 Dokumen	Tersedianya APBK Aceh Selatan	1 Tahun	382,000,000	439,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Penyusunan Regulasi Anggaran	3 Dokumen	Tersedianya APBK Aceh Selatan	1 Tahun	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>						<b>1,170,000,000</b>	<b>1,345,500,000</b>					
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah	56 SKPK	Terselenggaranya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang baik	1 Tahun	300,000,000	345,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Tersusunnya laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, Kelancaran Penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	52 Dokumen	Terselenggaranya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang baik	1 Tahun	180,000,000	207,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D, Terlaksananya Verifikasi Kelengkapan SPM	13000 Dokumen	Terselenggaranya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang baik	1 Tahun	350,000,000	402,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya, Tersedianya SKPP	1188 Dokumen	Terselenggaranya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang baik	1 Tahun	160,000,000	184,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	02	02	2.02	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terekonsiliasinya data penerimaan di SKPK, Terekonsiliasinya data Pengeluaran di SKPK, dan Kelancaran Penerbitan SP2B SP2B	1300 Dokumen	Terselenggaranya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang baik	1 Tahun	180,000,000	207,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>						<b>700,000,000</b>	<b>805,000,000</b>					
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Tersusunnya Qanun Kabupaten tentang Pertanggungjawaban APBD	1 Qanun	Tersedianya Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	500,000,000	575,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	56 SKPK	Tersedianya Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	200,000,000	230,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Kegiatan Penunjang Urusan</b>						<b>150,000,000</b>	<b>172,500,000</b>					
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Kelancaran Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD, Kelancaran Penyaluran Belanja Hibah dan Bansos	280 Desa	Terlaksananya Penyaluran Dana/ Bantuan Keuangan	100 %	150,000,000	172,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>						<b>1,135,000,000</b>	<b>1,305,250,000</b>					
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>						<b>1,135,000,000</b>	<b>1,305,250,000</b>					
5	02	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Buku Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	1 Buku	Tertib dan Terjaminnya Legalitas Barang Milik Daerah	100 %	85,000,000	97,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Adanya Prioritisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah	56 skpk	Tertib dan Terjaminnya Legalitas Barang Milik Daerah	100 %	50,000,000	57,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah	56 SKPK	Tertib dan Terjaminnya Legalitas Barang Milik Daerah	100 %	500,000,000	575,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	56 SKPK	Tertib dan Terjaminnya Legalitas Barang Milik Daerah	100 %	500,000,000	575,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>						<b>1,397,000,000</b>	<b>1,606,550,000</b>					
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>04</b>	2.02		<b>Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah</b>						<b>1,397,000,000</b>	<b>1,606,550,000</b>					
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Dokumen	Terwujudnya Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang baik	100 %	450,000,000	517,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi	2 Dokumen	Terwujudnya Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang baik	100 %	482,000,000	554,300,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK	WTP WTP/WDP	Terlaksananya Monitoring dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Dokumen	Terwujudnya Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang baik	100 %	465,000,000	534,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>KECAMATAN</b>						<b>35,000,000</b>	<b>40,250,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>35,000,000</b>	<b>40,250,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>35,000,000</b>	<b>40,250,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 kabupaten	Lancarnya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	35,000,000	40,250,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>1</b>	<b>03</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>300,000,000</b>	<b>345,000,000</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>						<b>300,000,000</b>	<b>345,000,000</b>					
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>08</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>						<b>300,000,000</b>	<b>345,000,000</b>					
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubaahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	6.1.2 Meningkatnya Penataan Ruang Wilayah yang Selaras dan Terintegrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tertatanya halaman kantor BKPSDM Aceh Selatan	1 paket	Terbangunnya pagar gedung kantor dan paving block halaman belakang kantor BKPSDM	1 paket	300,000,000	345,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>4</b>					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
<b>4</b>	<b>01</b>				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						<b>22,793,400</b>	<b>26,212,410</b>					
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM</b>						<b>22,793,400</b>	<b>26,212,410</b>					
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	2.02		<b>Penataan Organisasi</b>						<b>22,793,400</b>	<b>26,212,410</b>					
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2807848 %	Tersedianya dokumen standart pelayanan, instrumen analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	1 tahun	tersedianya dokumen standart pelayanan, instrumen analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	1 dokumen	22,793,400	26,212,410	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
<b>5</b>	<b>03</b>				<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>5,989,037,917</b>	<b>6,887,393,605</b>					
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>3,738,577,947</b>	<b>4,299,364,640</b>					
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,541,701,317</b>	<b>2,922,956,515</b>					
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	2,541,701,317	2,922,956,515	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>1,101,676,630</b>	<b>1,266,928,125</b>					
5	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Kelancaran pelayanan surat menyurat	4500 surat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	53,000,000	60,950,000	
5	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya jasa komunikasi, telepon, air listrik dan speedy indihome optik	1 tahun	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	68,500,000	78,775,000	
5	03	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya papan bunga, baliho dan ucapan selamat	1 tahun	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	12,500,000	14,375,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5.03.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya kegiatan operasional kantor	17 unit	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	6,825,000	7,848,750	
5.03.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tertibnya administrasi keuangan	33 orang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	137,740,000	158,401,000	
5.03.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terciptanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor	5 orang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	30,751,666	35,364,416	
5.03.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	12 bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	62,309,964	71,656,459	
5.03.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	12 bulan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	41,775,000	48,041,250	
5.03.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	1 tahun	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	8,450,000	9,717,500	
5.03.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Bertambahnya peralatan rumah tangga	1 paket	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	7,500,000	8,625,000	
5.03.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhinya kebutuhan informasi yang terbaru	6 media	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	6,000,000	6,900,000	
5.03.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Meningkatnya semangat kerja	1 tahun	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	96,340,000	110,791,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Selesai tugas kedinasan keluar daerah	1 tahun	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	285,340,000	328,141,000	
5	03	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya tugas kedinasan operasional kantor	2 unit	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	41,000,000	47,150,000	
5	03	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terciptanya kenyamanan ruangan kerja	1 paket	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	78,000,000	89,700,000	
5	03	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terselenggaranya kegiatan operasional kantor dengan baik	5 unit	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	52,000,000	59,800,000	
5	03	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tertatanya arsip PNS Aceh Selatan	4 unit	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	12,000,000	13,800,000	
5	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	1 gedung	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	31,460,000	36,179,000	
5	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya kegiatan operasional kantor	19 unit	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	43,995,000	50,594,250	
5	03	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran	20 unit	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	10,890,000	12,523,500	
5	03	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancarnya pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran	28 unit	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	15,300,000	17,595,000	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							<b>95,200,000</b>	<b>109,480,000</b>				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	03	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Meningkatnya kedisiplinan pegawai	0 unit	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	1 tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	03	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Meningkatnya kedisiplinan dan kerapian pegawai	60 pasang	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	1 tahun	36,400,000	41,860,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	03	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Meningkatnya kedisiplinan dan kerapian pegawai	0 lembar	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	1 tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	03	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Meningkatnya kedisiplinan dan kerapian pegawai	60 pasang	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	1 tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	03	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	6 orang	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	1 tahun	58,800,000	67,620,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						<b>2,250,459,970</b>	<b>2,588,028,965</b>					
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	2.01		<b>Pengelolaan Data dan Informasi ASN</b>						<b>385,284,700</b>	<b>443,077,405</b>					
5	03	02	2.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2807848 %	Terpenuhinya informasi data kepegawaian secara akurat dengan e-keurani	5912 PNS	Terpenuhinya data informasi PNSD secara akurat	5855 orang	385,284,700	443,077,405	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	2.02		<b>Administrasi Kepegawaian</b>						<b>803,189,770</b>	<b>923,668,235</b>					
5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2807848 %	Terisinya formasi umum dan khusus untuk PNS Aceh Selatan sesuai kebutuhan	56 Formasi	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1 tahun	205,223,550	236,007,082	
5	03	02	2.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2807848 %	Terlaksananya pengurusan SK terhadap PNS yang pensiun (purna tugas)	212 orang	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1 tahun	146,829,200	168,853,580	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	03	02	2.02	08	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2807848 %	Tertatanya penempatan sesuai dengan ANFORJAB	3 kali	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1 tahun	183,737,020	211,297,573	
5	03	02	2.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2807848 %	Kenaikan pangkat PNS tepat waktu	1200 orang	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	1 tahun	267,400,000	307,510,000	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Peningkatan Kapasitas ASN</b>						<b>925,556,000</b>	<b>1,064,389,400</b>					
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi	100 %	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas pendidikan PNSD	25 orang	Peningkatan kompetensi dan pengembangan kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM aparatur	100 persen	526,165,000	605,089,750	
5	03	02	2.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi	100 %	Terisnya jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong	1 kegiatan	Peningkatan kompetensi dan pengembangan kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM aparatur	100 persen	115,000,000	132,250,000	
5	03	02	2.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya pejabat struktural/eselon yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan	29 orang	Peningkatan kompetensi dan pengembangan kuantitas, kualitas dan kapasitas SDM aparatur	100 persen	284,391,000	327,049,650	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>		<b>Pembinaan ASN</b>						<b>136,429,500</b>	<b>156,893,925</b>					
5	03	02	2.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2807848 %	Tegaknya disiplin PNSD	6 kasus	Meningkatnya disiplin aparatur dan semangat kerja PNS	1 tahun	114,600,000	131,790,000	
5	03	02	2.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	2807848 %	Meningkatnya semangat kerja dan penghargaan bagi PNS	185 orang	Meningkatnya disiplin aparatur dan semangat kerja PNS	1 tahun	21,829,500	25,103,925	
<b>5</b>	<b>04</b>				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>971,500,000</b>	<b>1,117,225,000</b>					
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						<b>971,500,000</b>	<b>1,117,225,000</b>					
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>						<b>971,500,000</b>	<b>1,117,225,000</b>					
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	3593381 %	Terpenuhinya syarat usulan CPNSD menjadi PNSD	67 orang	Terpenuhinya syarat usulan CPNSD menjadi PNSD	67 orang	971,500,000	1,117,225,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						29,870,000	34,350,500					
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						29,870,000	34,350,500					
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						29,870,000	34,350,500					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Selesainya tugas kedinasan kedalam daerah	1 tahun	Terlaksananya tugas kedinasan dalam daerah	1 tahun	29,870,000	34,350,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.7.01.2.19.2..00 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI  
Sub Unit Organisasi : 5.03.7.01.2.19.2..00 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	19				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>						103,147,800	118,619,970					
2	19	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>						103,147,800	118,619,970					
2	19	03	2.02		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						103,147,800	118,619,970					
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya PORDA KORPRI	1 Tahun			103,147,800	118,619,970			
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
5	03				<b>KEPEGAWAIAN</b>						1,272,055,820	1,462,864,193					
5	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						1,272,055,820	1,462,864,193					
5	03	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						1,017,563,820	1,170,198,393					
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1,017,563,820	1,170,198,393	
5	03	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						254,492,000	292,665,800					
5	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Alat/Bahan/Barang Jasa/Biaya	100 %					17,750,000	20,412,500	
5	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	100 %					11,460,000	13,179,000	
5	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %					70,040,000	80,546,000	
5	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100 %					18,165,000	20,889,750	
5	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %					11,800,000	13,570,000	
5	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	100 %					3,680,000	4,232,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.7.01.2.19.2..00 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI  
Sub Unit Organisasi : 5.03.7.01.2.19.2..00 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedia Barang Komponen Instalasi Listrik	100 %			1,803,000	2,073,450	
5	03	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Media Informasi	100 %			2,400,000	2,760,000	
5	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	100 %			31,734,000	36,494,100	
5	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Koordinasi Program dan Kegiatan Dinas	100 %			50,260,000	57,799,000	
5	03	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Kerja	100 %			17,700,000	20,355,000	
5	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	100 %			13,000,000	14,950,000	
5	03	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Komputer, Laptop dan Printer	100 %			4,700,000	5,405,000	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	2.03		<b>Peningkatan Kapasitas ASN</b>						<b>0</b>	<b>0</b>					
5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya HUT KORPRI, PORTA dan MTQ KORPRI	100 %			0	0	
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>KECAMATAN</b>						<b>92,360,200</b>	<b>106,214,230</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>65,000,000</b>	<b>74,750,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						<b>65,000,000</b>	<b>74,750,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.7.01.2.19.2..00 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI  
Sub Unit Organisasi : 5.03.7.01.2.19.2..00 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7	01 05 2.01 01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya HUT KORPRI	1 Tahun			65,000,000	74,750,000	
<b>7</b>	<b>01 06</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>									<b>27,360,200</b>	<b>31,464,230</b>	
<b>7</b>	<b>01 06</b>	2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>									<b>27,360,200</b>	<b>31,464,230</b>	
7	01 06 2.01 09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Koordinasi Program dan Kegiatan Dinas	100 %			27,360,200	31,464,230	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>6</b>					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
<b>6</b>	<b>01</b>				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>7,994,798,565</b>	<b>9,194,018,350</b>					
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>5,752,106,793</b>	<b>6,614,922,812</b>					
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>4,833,998,565</b>	<b>5,559,098,350</b>					
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	4,833,998,565	5,559,098,350	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>892,908,228</b>	<b>1,026,844,462</b>					
6	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terlaksananya pelayanan surat menyurat	3200 Surat	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	6,000,000	6,900,000	
6	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 Rekening	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	59,305,000	68,200,750	
6	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terwujudnya peralatan kantor yang baik	36 Papan Bunga	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	15,000,000	17,250,000	
6	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasioanal	14 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	8,750,000	10,062,500	
6	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya jasa administrasi keuangan	20 Orang	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	174,640,000	200,836,000	
6	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	34,040,000	39,146,000	
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	36,337,225	41,787,809	
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	25,413,503	29,225,528	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	1 Paket	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	15,000,000	17,250,000	
6	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Surat Kabar	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	2,400,000	2,760,000	
6	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya makan dan minum	60 Orang	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	74,632,500	85,827,375	
6	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 Kali	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	170,000,000	195,500,000	
6	01	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya transportasi kedinasan	2 Unit Roda Dua	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	0	0	
6	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	0	0	
6	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya peralatan gedung kantor	6 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	85,640,000	98,486,000	
6	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya meubelur kantor	6 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	30,000,000	34,500,000	
6	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	15,000,000	17,250,000	
6	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	15 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	115,000,000	132,250,000	
6	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	21 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	5,450,000	6,267,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	26 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	20,300,000	23,345,000	
6	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	0	0	
6	01	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Unit	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	0	0	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>25,200,000</b>	<b>28,980,000</b>					
6	01	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya mesin absensi	2 Unit	Meningkatnya Disiplin Atribut dan Kehadiran Pegawai	100 %	0	0	
6	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya pakaian dinas personil	60 Stel	Meningkatnya Disiplin Atribut dan Kehadiran Pegawai	100 %	0	0	
6	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya pakaian kerja lapangan	50 Stel	Meningkatnya Disiplin Atribut dan Kehadiran Pegawai	100 %	0	0	
6	01	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya pakaian kerja lapangan	45 Stel	Meningkatnya Disiplin Atribut dan Kehadiran Pegawai	100 %	0	0	
6	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian batik daerah)	60 Stel	Meningkatnya Disiplin Atribut dan Kehadiran Pegawai	100 %	25,200,000	28,980,000	
6	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	6 Diklat	Meningkatnya Disiplin Atribut dan Kehadiran Pegawai	100 %	0	0	
6	01	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	Terlaksananya sosialisasi penyuluhan peraturan perundang-undangan	2 Kegiatan	Meningkatnya Disiplin Atribut dan Kehadiran Pegawai	100 %	0	0	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6.01.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Inspektorat)	100 %	2 Kegiatan	Meningkatnya Disiplin Atribut dan Kehadiran Pegawai	100 %	0	0		
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>									<b>1,197,165,000</b>	<b>1,376,739,750</b>		
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>									<b>939,885,000</b>	<b>1,080,867,750</b>		
6.01.02.2.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut temuan yang telah diselesaikan	75 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	175 LHP	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	98 %	534,885,000	615,117,750	
6.01.02.2.01.02	Review Kinerja dan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut temuan yang telah diselesaikan	75 %	Terlaksananya Reviu DAK Fisik Terlaksananya Reviu Doka Terlaksananya Reviu Dokumen Renja Terlaksananya Reviu LAKIP Kabupaten Terlaksananya Reviu LPPD/LKPJ/i-LPPD Terlaksananya reviu pelaksanaan anggaran Tersajinya keandalan informasi Laporan Keuangan Pemda Yang Sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Tersajinya Laporan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan Tersajinya Laporan Reviu Tender Pra DIPA, PBJ Realisasi Anggaran Per Triwulan APBK dan Dana Desa Tersedianya RKA OPD sesuai standar dan ketentuan	10 LHR 10 LHR 39 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR 1 Laporan 1 LHR 4 Laporan 56 OPD	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	98 %	255,000,000	293,250,000	
6.01.02.2.01.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut temuan yang telah diselesaikan	75 %	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona WBK/WBBM	4 Unit Kerja 15 Unit Kerja	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	98 %	30,000,000	34,500,000	
6.01.02.2.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut temuan yang telah diselesaikan	75 %	Laporan Hasil Reformasi Birokrasi Meningkatnya Implementasi SAKIP OPD Meningkatnya Level Maturitas SPIP Meningkatnya Persentase index Reformasi Birokrasi	1 Laporan 56 OPD 3 Level 40 %	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	98 %	120,000,000	138,000,000	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>									<b>257,280,000</b>	<b>295,872,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
6	01 02 2.02 01		Audit Kinerja dan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut temuan yang telah diselesaikan	75 %	Terlaksananya pengawasan atas permintaan pimpinan Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik	7 LHP 9 LHP	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	95 %	125,000,000	143,750,000	
6	01 02 2.02 02		Review Kinerja dan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut temuan yang telah diselesaikan	75 %	Terlaksananya revidu dokumen atas permintaan pimpinan	9 LHP	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	95 %	0	0	
6	01 02 2.02 03		Pemantauan Kinerja dan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut temuan yang telah diselesaikan	75 %	Terlaksananya rapat koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan OPD/Desa Tersedianya database temuan pengawasan	1 Kali 316 Unit Kerja	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	95 %	59,700,000	68,655,000	
6	01 02 2.02 04		Evaluasi Kinerja dan Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase tindak lanjut temuan yang telah diselesaikan	75 %	Terlaksananya evaluasi atas permintaan pimpinan Terlaksananya gelar pengawasan Terlaksananya sidang TP-TGR	4 Laporan 2 kali 2 kali	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	95 %	72,580,000	83,467,000	
<b>6</b>	<b>01 03</b>		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>									<b>1,045,526,772</b>	<b>1,202,355,788</b>		
<b>6</b>	<b>01 03</b>	2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>									<b>617,126,772</b>	<b>709,695,788</b>		
6	01 03 2.01 01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kerja / organisasi yang didampingi dan diasistensi	97 Unit Kerja/Org	Hasil penilaian kapabilitas APIP Jumlah auditor yang mengikuti diklat/bimtek Jumlah regulasi pengawasan yang diterbitkan Terlaksananya jasa advisory Terlaksananya penilaian angka kredit Tersedianya program pengawasan Tahunan	3 Level 15 Orang 2 Perbub 2 Semester 2 Periode 2 Dokumen	Persentase Unit Kerja yang didampingi dan diasistensi	96 %	501,400,000	576,610,000	
6	01 03 2.01 02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kerja / organisasi yang didampingi dan diasistensi	97 Unit Kerja/Org	Hasil penilaian intergritas oleh KPK Indeks kepuasan masyarakat Jumlah PNS golongan III keatas yang menyampaikan LP2P	1 Kegiatan 60 IKM 3700 orang	Persentase Unit Kerja yang didampingi dan diasistensi	96 %	115,726,772	133,085,788	
<b>6</b>	<b>01 03</b>	2.02	<b>Asistensi dan Pendampingan</b>									<b>428,400,000</b>	<b>492,660,000</b>		
6	01 03 2.02 01		Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kerja / organisasi yang didampingi dan diasistensi	97 Unit Kerja/Org	jumlah kasus pengaduan dilingkungan Pemda yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus dan/atau kualifikasi	10 LHP	Persentase Unit Kerja yang didampingi dan diasistensi	100 %	22,000,000	25,300,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
6	01 03 2.02 02	Asistensi dan Pendampingan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kerja / organisasi yang didampingi dan diasistensi	97 Unit Kerja/Org	Terlaksananya pelatihan bagi pegawai di dalam kantor Terlaksananya pendampingan pemeriksaan BPK-RI dan penyusunan Rencana Aksi hasil pemeriksaan BPK-RI Terlaksananya pengawalan Pemerintah dan pembangunan Terlaksananya Pengawasan Gratifikasi dalam Wilayah Kabupaten Aceh Selatan Terpenuhinya Operasional Satgas Pengawasan Pungli dalam Wilayah Kabupaten Aceh Selatan	10 Kali 6 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kali 1 Kegiatan	Persentase Unit Kerja yang didampingi dan diasistensi	100 %	406,400,000	467,360,000				
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7	01		<b>KECAMATAN</b>										39,200,000	45,080,000			
7	01	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										39,200,000	45,080,000			
7	01	02	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										39,200,000	45,080,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Inspektorat)	75 %	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	20 Kali	Terlaksananya Koordinasi dalam Daerah	1 Tahun	39,200,000	45,080,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Labuhanhaji Barat  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Labuhanhaji Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						5,000,000	5,750,000					
2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>						5,000,000	5,750,000					
2	14	04	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>						5,000,000	5,750,000					
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Peningkatan Peran Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK 18 Kecamatan)	100 %	Tersedianya dana Penyelenggaraan di Kecamatan	1 Tahun	Lancarnya Kegiatan PKK kecamatan	1 Tahun	5,000,000	5,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						3,145,539,396	3,617,370,305					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						3,077,539,396	3,539,170,305					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						16,000,000	18,400,000					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Musrenbang	1 Tahun			16,000,000	18,400,000	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,695,239,396	3,099,525,305					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			2,695,239,396	3,099,525,305	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						351,300,000	403,995,000					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Kualitas Pelayanan admistrasi Perkantoran	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	22,230,000	25,564,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tebayarnya Biaya Rekening Telepon, listrik dan internet	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	14,082,000	16,194,300	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Lancar Administtrasi Keuangan	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	77,590,000	89,228,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Bersihnya Lingkungan Kantor	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	16,000,000	18,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Labuhanhaji Barat  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Labuhanhaji Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhi alat tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	17,968,894	20,664,228	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpenuhi alat tulis Kantor	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terciptanya Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	3,200,000	3,680,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Peningkatan SDM Aparaur	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	1,080,000	1,242,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Biaya Makan Minum Pegawai	1 1	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	42,218,000	48,550,700	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedia Dana Transportasi melaksana tugas Dinas	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedia Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	10,000,000	11,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpiharanya Gedung Kantor	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	33,931,106	39,020,772	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpelihara Kendaraan Dinas	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	28,000,000	32,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Labuhanhaji Barat  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Labuhanhaji Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	5,000,000	5,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	Tersedianya dana Surat Menyurat dan Benda Pos Lainnya	1 Tahun	40,000,000	46,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>15,000,000</b>	<b>17,250,000</b>					
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100 %	Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi	1 Tahun	Terciptanya Aparatur yang berkualitas	1 Tahun	15,000,000	17,250,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Terlaksana Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 18 Kecamatan)	100 %	Tersedia Dana Transportasi melaksana tugas Dinas	1 Tahun	Tersediannya Dana Transfortasi Aparatur	1 Tahun	60,000,000	69,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>8,000,000</b>	<b>9,200,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						<b>8,000,000</b>	<b>9,200,000</b>					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Barat, Semua Kelurahan	Terlaksananya Hari-hari Besar , Keagamaan, Nasional dan Daerah (18 Kecamatan)	100 %	Tersediannya dana Penyelenggaraan di Kecamatan	1 Tahun	Tersediannya dana Penyelenggaraan hari-hari besar	1 Tahun	8,000,000	9,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Labuhanhaji  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Labuhanhaji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						3,253,777,546	3,255,277,546					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						3,183,777,546	3,183,777,546					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						11,200,000	11,200,000					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Persentase Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat melalui musyawarah masyarakat	1 Tahun			11,200,000	11,200,000	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,787,925,461	2,787,925,461					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			2,787,925,461	2,787,925,461	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						384,652,085	384,652,085					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa surat-menysurat dan Honor dan Tenaga ?honorer	1 Tahun			27,300,000	27,300,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Tersediaanya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun			12,000,000	12,000,000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa honor PNS	1 Tahun			80,790,000	80,790,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan pembersih dan honor tenaga kebersihan	1 Tahun			17,000,000	17,000,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Adm. Kantor	1 Tahun			14,920,979	14,920,979	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun			14,000,000	14,000,000	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah titik instalasi listrik	1 Tahun			5,000,000	5,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Labuhanhaji  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Labuhanhaji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah media surat kabar	1 Tahun			960,000	960,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah kali makan dan minum	1 Tahun			42,727,000	42,727,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan konsultasi	1 Tahun			45,000,000	45,000,000	
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan	1 Tahun			18,403,000	18,403,000	
7.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100 %			0	0	
7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah Rumah Dinas terpelihara	100 %			0	0	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor terpelihara	1 Tahun			73,931,106	73,931,106	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas terpelihara	1 Tahun			27,120,000	27,120,000	
7.01.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Kantor terpelihara	1 Tahun			2,500,000	2,500,000	
7.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Dinas Terpelihara	1 Tahun			3,000,000	3,000,000	
<b>7.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Labuhanhaji  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Labuhanhaji

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
7	01 01 2.04 02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			J Tersedianya Pakaian Dinas	100 %			0	0	
7	01 01 2.04 05		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Tersedianya Pakaian Khusus hari hari tertentu	100 %			0	0	
<b>7</b>	<b>01 02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	
<b>7</b>	<b>01 02</b>	2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	
7	01 02 2.01 01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan konsultasi	1 Tahun			60,000,000	60,000,000	
<b>7</b>	<b>01 05</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									<b>10,000,000</b>	<b>11,500,000</b>	
<b>7</b>	<b>01 05</b>	2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>									<b>10,000,000</b>	<b>11,500,000</b>	
7	01 05 2.01 01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji, Semua Kelurahan			Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	100 %			10,000,000	11,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuhanhaji Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuhanhaji Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
5	01				<b>PERENCANAAN</b>						15,500,000	15,500,000					
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						15,500,000	15,500,000					
5	01	02	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						15,500,000	15,500,000					
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan	Terlaksana Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan (Fasilitasi Musrenbang di 18 Kecamatan)	18 Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 tahun	Tersedianya dana untuk musrenbang	1 tahun	15,500,000	15,500,000	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						2,496,590,506	2,804,924,416					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,434,490,506	2,742,824,416					
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,040,590,506	2,346,679,082					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun		2,040,590,506	2,346,679,082		
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						393,900,000	396,145,334					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Honor tenaga pegawai honorer Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dan materai	1 tahun 1 tahun		46,100,000	46,100,000		
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun		3,440,000	3,440,000		
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	1 tahun		60,000,000	60,000,000		
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun		16,400,000	16,400,000		
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	1 tahun		14,968,894	17,214,228		
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun		7,000,000	7,000,000		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuhanhaji Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuhanhaji Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 tahun			1,500,000	1,500,000	
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 tahun			1,080,000	1,080,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat	1 tahun			48,250,000	48,250,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya belanja perjalanan dinas ke luar daerah	1 tahun			50,000,000	50,000,000	
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Terpenuhinya perlengkapan ruang rapat/aula kantor camat	1 tahun			73,931,106	73,931,106	
7.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Terpenuhinya peralatan kantor	1 tahun			15,000,000	15,000,000	
7.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Terpenuhinya mebeleur ruang rapat/aula kantor camat Terpenuhinya meubelair kantor	1 tahun 1 tahun			15,000,000	15,000,000	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 tahun			5,000,000	5,000,000	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	1 tahun			31,230,000	31,230,000	
7.01.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun			1,800,000	1,800,000	
7.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	1 tahun			3,200,000	3,200,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuhanhaji Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuhanhaji Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>					
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 tahun			50,000,000	50,000,000	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>12,100,000</b>	<b>12,100,000</b>					
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						<b>12,100,000</b>	<b>12,100,000</b>					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Labuhan Haji Timur, Semua Kelurahan			Terlaksananya Perayaan Hari - Hari Besar Daerah	1 tahun			12,100,000	12,100,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Meukek  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Meukek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						10,675,000	12,276,250					
2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>						10,675,000	12,276,250					
2	14	04	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>						10,675,000	12,276,250					
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan	1 Tahun			10,675,000	12,276,250			
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
5	01				<b>PERENCANAAN</b>						15,050,000	17,307,500					
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						15,050,000	17,307,500					
5	01	02	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						15,050,000	17,307,500					
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Musyawarah Pembangunan (Fasilitas Musrenbang di 18 Kecamatan)	100 %	Terlaksananya Musrenbang	1 Tahun	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Tahun	15,050,000	17,307,500	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						2,834,473,209	3,259,644,190					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,785,873,209	3,203,754,190					
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,279,018,209	2,620,870,940					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			2,279,018,209	2,620,870,940			
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						506,855,000	582,883,250					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan	Tersedianya Biaya Paket Pengiriman Surat	1 Tahun			63,375,000	72,881,250			
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan	Terbayarnya Rekening Listrik Telepon dan Air	1 Tahun			6,740,000	7,751,000			
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun			83,740,000	96,301,000			
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan	Tersedianya Honorium Non PNS	1 Tahun			14,725,000	16,933,750			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Meukek  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Meukek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun			22,314,000	25,661,100	
7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Tersedianya Barang Cetak dan Foto Copy	1 Tahun			25,200,000	28,980,000	
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Tersedianya Fasilitas Penerangan	1 Tahun			3,000,000	3,450,000	
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun			1,200,000	1,380,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1 Tahun			45,500,000	52,325,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	1 Tahun			30,000,000	34,500,000	
7.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Kantor	1 Tahun			79,581,000	91,518,150	
7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Rumah Dinas Camat	1 Tahun			3,000,000	3,450,000	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun			15,200,000	17,480,000	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Tahun			30,000,000	34,500,000	
7.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun			9,400,000	10,810,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Meukek  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Meukek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Kualitas Gedung Kantor	1 Tahun			73,880,000	84,962,000	
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>35,000,000</b>	<b>40,250,000</b>	
7.01.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>35,000,000</b>	<b>40,250,000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan	Terlaksana Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 18 Kecamatan)	100 %	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	1 Tahun	Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Daerah	1 Tahun	35,000,000	40,250,000	
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>13,600,000</b>	<b>15,640,000</b>	
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>13,600,000</b>	<b>15,640,000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Meukek, Semua Kelurahan			Terlaksananya Hari-hari Besar Nasional	1 Tahun			13,600,000	15,640,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Sawang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Sawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
5	01				<b>PERENCANAAN</b>						18,000,000	20,700,000					
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						18,000,000	20,700,000					
5	01	02	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						18,000,000	20,700,000					
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Melalui Musyawarah Pembangunan (Fasilitasi Musrenbang di 18 Kecamatan)	100 %	tersedianya biaya musrenbang kecamatan	1 tahun	Terlaksananya Musrenbang	1 Tahun	18,000,000	20,700,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						3,218,328,245	3,701,077,482					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						3,072,652,139	3,533,549,960					
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,635,928,245	3,031,317,482					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun			2,635,928,245	3,031,317,482	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						424,523,894	488,202,478					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya surat menyurat kantor	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	2,880,000	3,312,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	13,000,000	14,950,000	
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	4,550,000	5,232,500	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya pengelola administrasi keuangan	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	125,200,000	143,980,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	5,400,000	6,210,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Sawang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Sawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	33,623,894	38,667,478	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	6,300,000	7,245,000	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya komponen instalasi listrik dan pnerangan kantor	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	3,000,000	3,450,000	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya bahan bacaan kantor	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	900,000	1,035,000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya makanan dan minuman pegawai	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	115,770,000	133,135,500	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya perjalanan dinas luar daerah	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya biaya peralatan gedung kantor	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	20,700,000	23,805,000	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya biaya perawatan gedung kantor	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	33,500,000	38,525,000	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya biaya perawatan kendaraan dinas	1 tahun	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	29,700,000	34,155,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>12,200,000</b>	<b>14,030,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Sawang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Sawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 tahun	Meningkatnya disiplin Aparatur	1 Tahun	12,200,000	14,030,000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>43,400,000</b>	<b>49,910,000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>43,400,000</b>	<b>49,910,000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 tahun			43,400,000	49,910,000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>5,600,000</b>	<b>6,440,000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>5,600,000</b>	<b>6,440,000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya anggaran peningkatan hari-hari besar nasional	1 tahun			5,600,000	6,440,000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>96,676,106</b>	<b>111,177,522</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>										<b>96,676,106</b>	<b>111,177,522</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB, retribusi, restoran dan sumber lainnya	1 tahun			73,931,106	85,020,772	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program bidang peningkatan anak dan perempuan	1 tahun			22,745,000	26,156,750	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Samadua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Samadua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						<b>3,040,762,250</b>	<b>3,496,876,588</b>					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>2,986,982,250</b>	<b>3,435,029,588</b>					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>18,270,000</b>	<b>21,010,500</b>					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan	100 %	Terselenggaranya Musrenbang	1 Tahun	18,270,000	21,010,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,557,662,250</b>	<b>2,941,311,588</b>					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Ladang Kasik Putih	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	2,557,662,250	2,941,311,588	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>392,600,000</b>	<b>451,490,000</b>					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Pengiriman surat menyurat dan Materai	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	63,288,000	72,781,200	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	6,000,000	6,900,000	
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	4,280,000	4,922,000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	82,240,000	94,576,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	49,272,800	56,663,720	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	6,750,000	7,762,500	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	4,341,200	4,992,380	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Samadua  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Samadua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7	01 01 2.03 15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	2,400,000	2,760,000	
7	01 01 2.03 17		Penyediaan Makanan dan Minuman		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	61,528,000	70,757,200	
7	01 01 2.03 18		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	52,000,000	59,800,000	
7	01 01 2.03 22		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	16,000,000	18,400,000	
7	01 01 2.03 24		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan gedung kantor	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	11,000,000	12,650,000	
7	01 01 2.03 28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	10,000,000	11,500,000	
7	01 01 2.03 30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	17,000,000	19,550,000	
7	01 01 2.03 34		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100 %	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantor	1 Tahun	6,500,000	7,475,000	
<b>7</b>	<b>01 01 2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									<b>18,450,000</b>	<b>21,217,500</b>		
7	01 01 2.04 05		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terpenuhinya Pakaian Dinas/ Batik daerah pegawai	100 %	Tersedianya Pakaian Dinas/Batik PNS	1 Tahun	18,450,000	21,217,500	
<b>7</b>	<b>01 02</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>									<b>42,000,000</b>	<b>48,300,000</b>		
<b>7</b>	<b>01 02 2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>									<b>42,000,000</b>	<b>48,300,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Samadua

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Samadua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Terlaksana Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 18 Kecamatan)	100 %	Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 %	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun	42,000,000	48,300,000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>11,780,000</b>	<b>13,547,000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>11,780,000</b>	<b>13,547,000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Samadua, Semua Kelurahan	Terlaksananya Hari-hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah (18 Kecamatan)	100 %	Terlaksanya hari besar nasional	100 %	Terciptanya semangat Kemerdekaan	1 Tahun	11,780,000	13,547,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Tapaktuan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Tapaktuan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						<b>2,954,294,508</b>	<b>3,046,124,508</b>					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>2,875,363,402</b>	<b>2,955,353,736</b>					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>17,000,000</b>	<b>19,550,000</b>					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	terlaksananya musrenbang tingkat Kecamatan	100 persen	terlaksananya kegiatan musrenbang	100 persen	17,000,000	19,550,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,342,094,508</b>	<b>2,342,094,508</b>					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa administrasi keuangan	100 persen			2,342,094,508	2,342,094,508	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>516,268,894</b>	<b>593,709,228</b>					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dan materai	100 persen	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	60,810,000	69,931,500	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	100 %	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	18,000,000	20,700,000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa administrasi keuangan	100 persen	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	63,950,000	73,542,500	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa service peralatan kantor	100 persen	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	25,840,000	29,716,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya alat tulis kantor	100 persen	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	24,000,000	27,600,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya barang cetak dan penggandaan	100 persen	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	26,968,894	31,014,228	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya komponen instalasi listrik	100 persen	Terlaksananya urusan Dinas	1 Tahun	4,000,000	4,600,000	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Tapaktuan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Tapaktuan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						5,000,000	5,750,000					
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						5,000,000	5,750,000					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya program Darma Wanita/PKK	100 persen			5,000,000	5,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Pasie Raja

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Pasie Raja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						<b>3,379,333,864</b>	<b>3,886,233,944</b>					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>3,338,633,864</b>	<b>3,839,428,944</b>					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>15,850,000</b>	<b>18,227,500</b>					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Musrembang Desa dan Kecamatan	100 Persen			15,850,000	18,227,500	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>2,918,333,864</b>	<b>3,356,083,944</b>					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			2,918,333,864	3,356,083,944	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>387,050,000</b>	<b>445,107,500</b>					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			tersedianya materai dan honorium petugas administrasi	100 Persen			13,500,000	15,525,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			tersedianya penerangan kantor	1 Tahun			11,400,000	13,110,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya jasa perizinan kendaraan dinas	1 Tahun			1,250,000	1,437,500	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel	1 Tahun			74,040,000	85,146,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Terwujudnya suasana kantor yang nyaman	1 Tahun			12,000,000	13,800,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun			12,000,000	13,800,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan Foto copy	1 Tahun			6,102,894	7,018,328	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya Fasilitas Penerangan	1 Tahun			6,000,000	6,900,000	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan	1 Tahun			1,200,000	1,380,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Pasie Raja  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Pasie Raja

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
																		Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
																		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai	1 Tahun									59,126,000	67,994,900				
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya perjalanan Dinas	1 Tahun									38,000,000	43,700,000				
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Kantor	100 Persen									30,000,000	34,500,000				
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya Meubeler Kantor	100 Persen									22,000,000	25,300,000				
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya Pemeliharaan gedung Kantor	100 Persen									6,000,000	6,900,000				
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan Dinas	100 Persen									18,000,000	20,700,000				
7	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya perlengkapan Kantor	100 Persen									0	0				
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	100 Persen									2,500,000	2,875,000				
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya Rehabilitasi gedung Kantor	100 Persen									73,931,106	85,020,772				
7	01	01	2.04		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>											<b>17,400,000</b>	<b>20,010,000</b>									
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	100 Persen									17,400,000	20,010,000				
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>											<b>25,000,000</b>	<b>28,750,000</b>									
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>											<b>25,000,000</b>	<b>28,750,000</b>									
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			tersedianya biaya perjalanan Dinas	100 Persen									25,000,000	28,750,000				
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>											<b>15,700,000</b>	<b>18,055,000</b>									
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>											<b>15,700,000</b>	<b>18,055,000</b>									

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Pasie Raja  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Pasie Raja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Pasi Raja, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional	100 Persen			15,700,000	18,055,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Kluet Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Kluet Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						33,790,000	38,858,500					
2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>						33,790,000	38,858,500					
2	14	04	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>						33,790,000	38,858,500					
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.4 Mengoptimalkan pengendalian jumlah penduduk	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Peran Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK 18 Kecamatan)	100 %	meningkatnya kualitas perempuan dibidang ekonomi dan sosial	100 %	meningkatnya kualitas anak dan perempuan	1 tahun	33,790,000	38,858,500	
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						16,459,000	18,927,850					
2	16	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>						16,459,000	18,927,850					
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						16,459,000	18,927,850					
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan	100 %			16,459,000	18,927,850	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						3,758,661,495	4,322,460,719					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						3,573,370,495	4,109,376,069					
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						3,101,210,495	3,566,392,069					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			Tercapainya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun			3,101,210,495	3,566,392,069	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						434,160,000	499,284,000					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			tersedianya jasa surat menyurat	100 %			4,452,000	5,119,800	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %			24,768,000	28,483,200	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			tersedianya jasa administrasi keuangan	100 %			164,140,000	188,761,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			terciptanya kebersihan lingkungan kantor	100 %			35,000,000	40,250,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			tersedianya alat tulis kantor	100 %			24,000,000	27,600,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			tersedianya dokumen cetakan dan pengadaan	100 %			16,000,000	18,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Kluet Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Kluet Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			tersedianya alat listrik	100 %			2,000,000	2,300,000	
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %			2,400,000	2,760,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			tersedianya makanan dan minuman	100 %			73,900,000	84,985,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			terlaksananya koordinasi dan konsultasi pembangunan	100 %			40,000,000	46,000,000	
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			tersedianya lettop dan printer kantor	100 %			24,000,000	27,600,000	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			terpelihiranya kendaraan Dinas/operasional	100 %			23,500,000	27,025,000	
<b>7.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>38,000,000</b>	<b>43,700,000</b>	
7.01.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			meningkatnya kerapihan pegawai	100 %			38,000,000	43,700,000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>142,541,000</b>	<b>163,922,150</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>50,000,000</b>	<b>57,500,000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya koordinasi dan konsultasi pembangunan	100 %			50,000,000	57,500,000	
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>										<b>22,345,000</b>	<b>25,696,750</b>	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan	100 %			22,345,000	25,696,750	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>										<b>70,196,000</b>	<b>80,725,400</b>	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terciptanya kebersihan lingkungan	100 %			70,196,000	80,725,400	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Kluet Utara  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Kluet Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Utara, Semua Kelurahan			terlaksananya pengajuan pembangunan	100 %			20,000,000	23,000,000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>22,750,000</b>	<b>26,162,500</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>22,750,000</b>	<b>26,162,500</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya hari ulang tahun nasional dan keagamaan	100 %			22,750,000	26,162,500	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Kluet Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Kluet Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						<b>2,052,338,294</b>	<b>2,360,189,038</b>					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>1,987,038,294</b>	<b>2,285,094,038</b>					
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						<b>1,592,728,294</b>	<b>1,831,637,538</b>					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			1,592,728,294	1,831,637,538	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						<b>366,310,000</b>	<b>421,256,500</b>					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun			27,300,000	31,395,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya rekening listrik, telepon dan internet	1 Tahun			10,000,000	11,500,000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya honorarium panitia kegiatan	1 Tahun			84,550,000	97,232,500	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya jasa kenersihan kantor	1 Tahun			15,000,000	17,250,000	
7	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya perbaikan peralatan kerja	1 Tahun			5,000,000	5,750,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun			24,978,894	28,725,728	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya biaya cetak, penggandaan, spanduk dan dokumen	1 Tahun			15,000,000	17,250,000	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya alat listrik	1 Tahun			5,000,000	5,750,000	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya surat kabar	1 Tahun			1,500,000	1,725,000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya snack, minum harian pegawai	11 Bulan			31,092,000	35,755,800	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya biaya perjalanan dinas	1 Tahun			30,000,000	34,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Kluet Tengah  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Kluet Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun			12,458,000	14,326,700	
7.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya peralatan kantor	1 Tahun			10,000,000	11,500,000	
7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya biaya sewa rumah dinas	1 Tahun			5,500,000	6,325,000	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1 Tahun			15,000,000	17,250,000	
7.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Perbaikan/pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun			73,931,106	85,020,772	
<b>7.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>28,000,000</b>	<b>32,200,000</b>	
7.01.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya seragam dinas pegawai	1 Paket			13,000,000	14,950,000	
7.01.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Peningkatan pengetahuan pegawai	1 Kegiatan			15,000,000	17,250,000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	1 Tahun			30,000,000	34,500,000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>18,000,000</b>	<b>20,700,000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										<b>18,000,000</b>	<b>20,700,000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Terlaksananya kegiatan musrenbang	1 Tahun			18,000,000	20,700,000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>17,300,000</b>	<b>19,895,000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>17,300,000</b>	<b>19,895,000</b>	
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Tengah, Malaka			Terlaksananya kegiatan musrenbang	1 Tahun			17,300,000	19,895,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kluet Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kluet Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						3,007,592,030	3,458,730,834					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,949,592,030	3,392,030,834					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						16,000,000	18,400,000					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	100 %	Terlaksananya pembangunan	95 %	16,000,000	18,400,000	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,521,292,030	2,899,485,834					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			2,521,292,030	2,899,485,834	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						402,300,000	462,645,000					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya materai dan biaya pengiriman surat	100 %	Terpeliharanya aset daerah	95 %	1,000,000	1,150,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Suaq Bakung	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya penerangan kantor	95 %	Terpeliharanya aset daerah	95 %	8,400,000	9,660,000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel	1 Tahun	Terpeliharanya aset daerah	95 %	120,000,000	138,000,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Terciptanya suasana kantor yg nyaman	1 Tahun	Terpeliharanya aset daerah	95 %	15,000,000	17,250,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Suaq Bakung	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Alat tulis kantor	1 Paket	Terpeliharanya aset daerah	95 %	11,440,000	13,156,000	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	tersedianya barang cetakan dan fotocopy	100 %	Terpeliharanya aset daerah	95 %	2,920,000	3,358,000	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Suaq Bakung	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya penerangan kantor	1 Paket	Terpeliharanya aset daerah	95 %	3,960,000	4,554,000	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Suaq Bakung	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	tersedianya bahan bacaan	1 jenis	Terpeliharanya aset daerah	95 %	1,080,000	1,242,000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Suaq Bakung	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	tersedianya makanan minuman kantor	11 Bulan	Terpeliharanya aset daerah	95 %	65,000,000	74,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kluet Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kluet Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	1 Tahun	Terpeliharanya aset daerah	95 %	50,000,000	57,500,000	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	tersedianya perlengkapan kantor	1 Paket	Terpeliharanya aset daerah	95 %	3,500,000	4,025,000	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya peralatan kantor	2 Unit	Terpeliharanya aset daerah	95 %	20,000,000	23,000,000	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Suaq Bakung	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	tersedianya mebeuler kantor	5 Unit	Terpeliharanya aset daerah	95 %	20,000,000	23,000,000	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Suaq Bakung	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Terpeliharanya aset daerah	1 Unit	Terpeliharanya aset daerah	95 %	20,000,000	23,000,000	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Terpeliharanya aset daerah	4 Unit	Terpeliharanya aset daerah	95 %	30,000,000	34,500,000	
7	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Terpeliharanya aset daerah	5 Unit	Terpeliharanya aset daerah	95 %	1,800,000	2,070,000	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Terpeliharanya aset daerah	5 Unit	Terpeliharanya aset daerah	95 %	3,200,000	3,680,000	
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Suaq Bakung	Tingkat Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	Terpeliharanya bangunan kantor kecamatan	95 %	Terpeliharanya aset daerah	95 %	25,000,000	28,750,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>10,000,000</b>	<b>11,500,000</b>					
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	100 %	tersedianya pakaian dinas	33 lembar	Meningkatnya disiplin aparatur	33 Orang	10,000,000	11,500,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>38,000,000</b>	<b>43,700,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>38,000,000</b>	<b>43,700,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah kecamatan	100 %			38,000,000	43,700,000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kluet Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Kluet Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Selatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya perayaan HUT RI	1 kegiatan			20,000,000	23,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kluet Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kluet Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	14				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>						20,000,000	23,000,000					
2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>						20,000,000	23,000,000					
2	14	04	2.02		<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>						20,000,000	23,000,000					
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya PKK Kecamatan Kluet Timur	1 Tahun		20,000,000	23,000,000				
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
5	01				<b>PERENCANAAN</b>						22,629,700	26,024,155					
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						22,629,700	26,024,155					
5	01	02	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						22,629,700	26,024,155					
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur	Terlaksana Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan (Fasilitasi Musrenbang di 18 Kecamatan)	18 Kecamatan	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	1 Tahun	Tersedianya Anggaran Musrenbang Tingkat Kecamatan Kluet Timur	1 Tahun	22,629,700	26,024,155	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						2,870,341,740	3,300,893,000					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,811,839,240	3,233,615,125					
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,414,571,440	2,776,757,156					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Semua Kelurahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	1 Tahun		2,414,571,440	2,776,757,156				
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						382,267,800	439,607,969					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur	lancarnya kegiatan surat menyurat	1 Tahun		3,029,600	3,484,040				
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur	lancarnya komunikasi, sumber air dan penerangan	1 Tahun		10,407,700	11,968,855				
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	tersedianya jasa atau upah bulanan adm keuangan	1 Tahun		92,695,550	106,599,882				
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur	tercapainya keindahan dan kebersihan kantor	1 Tahun		13,027,000	14,981,050				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kluet Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kluet Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			terpeliharanya peralatan kerja	1 Tahun			1,782,150	2,049,472	
7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun			40,675,800	46,777,170	
7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			7,722,000	8,880,300	
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			teredianya alat penerangan kantor	1 Tahun			7,128,000	8,197,200	
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun			3,550,000	4,082,500	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			tersedianya makanan dan minuman pegawai	1 Tahun			65,500,000	75,325,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			terlaksananya rapat dan konsultasi pejabat keluar dan dalam daerah	1 Tahun			31,000,000	35,650,000	
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya kebutuhan peralatan gedung/kantor	1 Tahun			38,000,000	43,700,000	
7.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			tersedianya kebutuhan mebeleur	1 Tahun			0	0	
7.01.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Rumah Dinas Pejabat	1 Tahun			4,750,000	5,462,500	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			terpeliharanya gedung /kantor	1 Tahun			27,000,000	31,050,000	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun			36,000,000	41,400,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kluet Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Kluet Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpeliharanya gedung /kantor	1 Tahun			0	0	
<b>7.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>15,000,000</b>	<b>17,250,000</b>	
7.01.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			tersedianya pakaian PDH untuk pegawai	1 Tahun			0	0	
7.01.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			tersedianya pakaian batik untuk hari-hari tertentu	1 Tahun			0	0	
7.01.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Semua Kelurahan			terlaksananya bimbingan teknis aparatur	1 Tahun			15,000,000	17,250,000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>25,502,500</b>	<b>29,327,875</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>25,502,500</b>	<b>29,327,875</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kluet Timur, Paya Dapur			Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pejabat	1 Tahun			25,502,500	29,327,875	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>33,000,000</b>	<b>37,950,000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>33,000,000</b>	<b>37,950,000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	1 Tahun			33,000,000	37,950,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Bakongan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Bakongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						2,091,565,340	2,160,280,340					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,005,565,340	2,061,380,340					
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						1,633,465,340	1,633,465,340					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			1,633,465,340	1,633,465,340	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						339,100,000	389,965,000					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya materai	100 persen			1,000,000	1,150,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	100 persen			12,000,000	13,800,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Terbayarnya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas	100 Persen			2,500,000	2,875,000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya Honorarium PNS	100 Persen			73,940,000	85,031,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya Hunorarium Petugas Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih	100 Persen			15,000,000	17,250,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 Persen			9,968,894	11,464,228	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 Persen			11,191,106	12,869,772	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Bacaan	100 Persen			3,000,000	3,450,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Bakongan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Bakongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 Persen			2,000,000	2,300,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai	100 Persen			73,500,000	84,525,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	100 Persen			60,000,000	69,000,000	
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	100 Persen			20,000,000	23,000,000	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor	100 Persen			30,000,000	34,500,000	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	100 Persen			25,000,000	28,750,000	
<b>7.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>33,000,000</b>	<b>37,950,000</b>	
7.01.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya pakaian dinas	100 Persen			18,000,000	20,700,000	
7.01.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	100 Persen			15,000,000	17,250,000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>60,000,000</b>	<b>69,000,000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas	100 Persen			60,000,000	69,000,000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>11,000,000</b>	<b>12,650,000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										<b>11,000,000</b>	<b>12,650,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Bakongan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Bakongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya musrenbang desa dan Kecamatan	100 persen			11,000,000	12,650,000	
7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>15,000,000</b>	<b>17,250,000</b>	
7.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>15,000,000</b>	<b>17,250,000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Bakongan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya perayaan HUT RI	100 Persen			15,000,000	17,250,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Bakongan Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Bakongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
5	01				<b>PERENCANAAN</b>						14,000,000	16,100,000					
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>						14,000,000	16,100,000					
5	01	02	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						14,000,000	16,100,000					
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	4.2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksana Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan (Fasilitasi Musrenbang di 18 Kecamatan)	18 Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Tahun	14,000,000	16,100,000	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						2,014,860,517	2,317,089,595					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						1,947,860,517	2,240,039,595					
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						1,463,860,517	1,683,439,595					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Bakongan Timur, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	1,463,860,517	1,683,439,595	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						469,000,000	539,350,000					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya materai	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	2,800,000	3,220,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	7,000,000	8,050,000	
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	5,741,100	6,602,265	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya honorarium PNS	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	84,800,000	97,520,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya honorarium Petugas Kebersihan Kantor	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	9,600,000	11,040,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Bakongan Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Bakongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	25,417,394	29,230,003	
7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	4,500,000	5,175,000	
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Peralatan Listrik	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	7,500,000	8,625,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya makanan dan minuman Harian Pegawai	11 bulan	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	63,210,400	72,691,960	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya biaya perjalanan dinas	1 Tahun	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	67,000,000	77,050,000	
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Terlaksananya Pemasangan Paving blok	1 Paket	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	73,931,106	85,020,772	
7.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan kantor	2 unit	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	16,000,000	18,400,000	
7.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya peralatan kantor	1 Paket	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	18,000,000	20,700,000	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya biaya pemeliharaan gedung Kantor	1 unit	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	30,000,000	34,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Bakongan Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Bakongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 01 01 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan Dinas	1 unit	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	27,500,000	31,625,000	
7 01 01 2.03 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	1 paket	Terlaksananya urusan dinas	1 Tahun	26,000,000	29,900,000	
<b>7 01 01 2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>15,000,000</b>	<b>17,250,000</b>	
7 01 01 2.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	Tersedianya Pakaian Dinas	25 org	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 Tahun	15,000,000	17,250,000	
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>47,000,000</b>	<b>54,050,000</b>	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>47,000,000</b>	<b>54,050,000</b>	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksana Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 18 Kecamatan)	100 %	Tersedianya biaya perjalanan dinas	1 Tahun	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 Tahun	47,000,000	54,050,000	
<b>7 01 05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	
<b>7 01 05 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>20,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Perayaan HUT RI	1 Kegiatan			20,000,000	23,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Trumon

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Trumon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						2,500,244,999	2,875,281,749					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,406,813,893	2,767,835,977					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						14,250,000	16,387,500					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			terlaksana kegiatan Musrenbang Kecamatan	100 persen			14,250,000	16,387,500	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						2,002,524,999	2,302,903,749					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			2,002,524,999	2,302,903,749	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						360,438,894	414,504,728					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			Tersedianya paket pengiriman	100 persen			1,450,000	1,667,500	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			Terbayarnya rekening listrik telepon dan air	100 persen			4,800,000	5,520,000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			lancarnya administrasi keuangan	100 persen			83,650,000	96,197,500	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			tersedianya jasa petugas kebersihan dan alat pembersih	100 persen			10,750,000	12,362,500	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			tersedianya alat tulis kantor	100 persen			20,488,894	23,562,228	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			tersedia barang cetakan dan penggandaan	100 persen			8,650,000	9,947,500	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			terciptanya penerangan bangunan kantor				2,500,000	2,875,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Trumon

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Trumon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			tersedianya bahan bacaan	100 Persen			1,100,000	1,265,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			tersedianya makanan dan minuman				82,500,000	94,875,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			terlaksananya koordinasi dan pembinaan				72,000,000	82,800,000	
7.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			tersedianya peralatan kantor				31,100,000	35,765,000	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpeliharanya gedung kantor				9,550,000	10,982,500	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			terpeliharanya kendaraan operasional				29,700,000	34,155,000	
7.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			terpeliharanya peralatan gedung kantor				2,200,000	2,530,000	
<b>7.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>29,600,000</b>	<b>34,040,000</b>	
7.01.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			Tersedianya pakaian cirikhas aceh Selatan	100 Persen			12,000,000	13,800,000	
7.01.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			tersedianya pakaian olah raga setcam trumon				17,600,000	20,240,000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>73,931,106</b>	<b>85,020,772</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>73,931,106</b>	<b>85,020,772</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan			terlaksananya koordinasi dan pembinaan				73,931,106	85,020,772	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Trumon

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Trumon

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>19,500,000</b>	<b>22,425,000</b>					
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						<b>19,500,000</b>	<b>22,425,000</b>					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab. Aceh Selatan, Trumon, Semua Kelurahan						terlaksananya hari-hari besar nasional	19,500,000	22,425,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Trumon Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Trumon Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						2,062,774,053	2,372,190,160					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						1,976,470,289	2,272,940,831					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						14,427,861	16,592,040					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terlaksananya kegiatan Musrenbang	1 Tahun	Terlaksananya Musrenbang	1 Tahun	14,427,861	16,592,040	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						1,612,374,053	1,854,230,161					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Terbayarnya Gaji Dan Tunjangan	1 Tahun	1,612,374,053	1,854,230,161	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						294,703,150	338,908,622					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	9,765,000	11,229,750	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	5,800,000	6,670,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terlaksananya perbaikan peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	6,480,000	7,452,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Lancarnya administrasi keuangan	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	70,540,000	81,121,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	10,930,000	12,569,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	12,678,000	14,579,700	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Trumon Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Trumon Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	12,698,900	14,603,735	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya komponen listrik kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	4,072,950	4,683,892	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1,260,000	1,449,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya makanan dan minuman	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	51,876,300	59,657,745	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terlaksananya kegiatan rapat dan koordinasi luar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	52,000,000	59,800,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya perlengkapan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya kebutuhan peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	18,000,000	20,700,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Tersedianya gordyn kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	13,500,000	15,525,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Trumon Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Trumon Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	25,102,000	28,867,300	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>		<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>						<b>54,965,225</b>	<b>63,210,008</b>					
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya pakaian PDH untuk pegawai	1 Tahun	Terlaksananya Kedisiplinan Pegawai	1 Tahun	12,899,250	14,834,137	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya pakaian olah raga	1 Tahun	Terlaksananya Kedisiplinan Pegawai	1 Tahun	14,223,425	16,356,939	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya pakaian batik, khusus hari-hari tertentu	1 Tahun	Terlaksananya Kedisiplinan Pegawai	1 Tahun	12,842,550	14,768,932	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Terlaksananya pendidikan formal dan pelatihan untuk aparatur	1 Tahun	Terlaksananya Kedisiplinan Pegawai	1 Tahun	8,000,000	9,200,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Meningkatkan sumber daya aparatur	1 Tahun	Terlaksananya Kedisiplinan Pegawai	1 Tahun	7,000,000	8,050,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>73,900,000</b>	<b>84,985,000</b>					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						<b>73,900,000</b>	<b>84,985,000</b>					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Terlaksana Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 18 Kecamatan)	100 %	Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Tahun	73,900,000	84,985,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Trumon Timur  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Trumon Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						12,403,764	14,264,329					
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						12,403,764	14,264,329					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Krueng Luas	Terlaksananya Hari-hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah (18 Kecamatan)	100 %	Terciptanya semangat kemerdekaan	1 Tahun	Terciptanya semangat kemerdekaan	1 Tahun	12,403,764	14,264,329	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Trumon Tengah  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Trumon Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						2,150,812,900	2,473,434,835					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,002,812,900	2,303,234,835					
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						1,577,512,900	1,814,139,835					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			1,577,512,900	1,814,139,835	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						414,300,000	476,445,000					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dan materai	100 Persen			30,300,000	34,845,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen			10,000,000	11,500,000	
7	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perengkapankantor	100 Persen			0	0	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	100 Persen			0	0	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan	100 Persen			80,040,000	92,046,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa kebersihan kantor	100 Persen			18,000,000	20,700,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor	100 Persen			17,868,894	20,549,228	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 Persen			10,000,000	11,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Trumon Tengah  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Trumon Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 Persen			10,000,000	11,500,000	
7.01.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Timur, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen			0	0	
7.01.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan rumah tangga	100 Persen			0	0	
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100 Persen			2,160,000	2,484,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya makan minum pegawai	100 Persen			73,931,106	85,020,772	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya belanja perjalanan dinas keluar daerah	100 Persen			95,000,000	109,250,000	
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100 Persen			0	0	
7.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan gedung kantor	100 Persen			16,000,000	18,400,000	
7.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya mebeleur kantor	100 Persen			0	0	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	100 Persen			23,000,000	26,450,000	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	100 Persen			28,000,000	32,200,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Trumon Tengah  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Trumon Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Terselenggaranya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	100 Persen			0	0	
7.01.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana gedung kantor	100 Persen			0	0	
<b>7.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>11,000,000</b>	<b>12,650,000</b>	
7.01.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan seragam pegawai	100 Persen			0	0	
7.01.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhan seragam khusus pegawai	100 Persen			11,000,000	12,650,000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>45,000,000</b>	<b>51,750,000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>45,000,000</b>	<b>51,750,000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah	100 Persen			45,000,000	51,750,000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>18,000,000</b>	<b>20,700,000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										<b>18,000,000</b>	<b>20,700,000</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan musrenbang desa dan kecamatan	100 Persen			18,000,000	20,700,000	
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>										<b>55,000,000</b>	<b>63,250,000</b>	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										<b>55,000,000</b>	<b>63,250,000</b>	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan	100 Persen			55,000,000	63,250,000	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>										<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Trumon Tengah  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Trumon Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>						<b>30,000,000</b>	<b>34,500,000</b>						
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Trumon Tengah, Semua Kelurahan			Terlaksananya pembinaan kegiatan PKK	100 Persen			30,000,000	34,500,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Kota Bahagia

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Kota Bahagia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						2,103,128,659	2,418,597,958					
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,040,628,659	2,346,722,958					
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						10,400,000	11,960,000					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa dan Kecamatan	100 Persen			10,400,000	11,960,000	
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						1,633,128,659	1,878,097,958					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Terbayarnya Gaji Pokok ASN	100 %			1,633,128,659	1,878,097,958	
7	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						364,100,000	418,715,000					
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Tersedianya materai	100 Persen			900,000	1,035,000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	100 Persen			12,000,000	13,800,000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	100 Persen			2,000,000	2,300,000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	100 Persen			85,940,000	98,831,000	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Tersedianya honorarium Petugas Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih	100 Persen			15,000,000	17,250,000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Tersedianya alat tulis kantor	100 Persen			9,350,000	10,752,500	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	100 Persen			11,068,894	12,729,228	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Kota Bahagia

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Kota Bahagia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Listrik	100 Persen			580,000	667,000	
7.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan	100 Persen			1,080,000	1,242,000	
7.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Tersedianya makanan dan minuman Harian Pegawai	100 Persen			73,500,000	84,525,000	
7.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya perjalanan dinas luar Daerah	100 Persen			73,931,106	85,020,772	
7.01.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Tersedianya peralatan kantor	100 Persen			45,000,000	51,750,000	
7.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Tersedianya biaya pemeliharaan gedung Kantor	100 Persen			8,750,000	10,062,500	
7.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan Dinas	100 Persen			25,000,000	28,750,000	
<b>7.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>33,000,000</b>	<b>37,950,000</b>	
7.01.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	100 Persen			18,000,000	20,700,000	
7.01.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Tersedianya Pakaian Olah raga	100 Persen			15,000,000	17,250,000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										<b>45,000,000</b>	<b>51,750,000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>45,000,000</b>	<b>51,750,000</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100 Persen			45,000,000	51,750,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Kota Bahagia

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Kota Bahagia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>17,500,000</b>	<b>20,125,000</b>					
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						<b>17,500,000</b>	<b>20,125,000</b>					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Kab. Aceh Selatan, Kota Bahagia, Semua Kelurahan			Terselenggaranya Perayaan HUT RI	100 Persen			17,500,000	20,125,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>												
7	01				<b>KECAMATAN</b>						33,820,000	38,893,000					
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						33,820,000	38,893,000					
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						33,820,000	38,893,000					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 Tahun	mendapatkan informasi	1 Tahun	33,820,000	38,893,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
8					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>												
8	01				<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>						2,570,991,570	2,956,640,305					
8	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						2,206,195,570	2,537,124,905					
8	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan</b>						1,704,811,570	1,960,533,305					
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100 %	Tersedianya belanja gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1,704,811,570	1,960,533,305	
8	01	01	2.03		<b>Administrasi Umum</b>						501,384,000	576,591,600					
8	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	lancar proses surat menyurat	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	20,200,000	23,230,000	
8	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa sumber daya dan listrik	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	21,200,000	24,380,000	
8	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	7,000,000	8,050,000	
8	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa administrasi keuangan	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	70,873,700	81,504,755	
8	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	11,682,000	13,434,300	
8	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya Alat Tulis kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	20,884,000	24,016,600	
8	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya barang cetak dan pengadaan	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	10,682,300	12,284,645	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8.01.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya alat-alat listrik elektronik	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	4,280,000	4,922,000	
8.01.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya bahan bacaan bagi aparatur	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	4,800,000	5,520,000	
8.01.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya makan minum untuk aparatur	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	69,696,000	80,150,400	
8.01.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	161,409,000	185,620,350	
8.01.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	untuk mencapai efektifitas pelaksanaan tugas	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	0	0	
8.01.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	40,000,000	46,000,000	
8.01.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	meningkatnya motifasi kerja bagi pegawai	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	0	0	
8.01.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	14,000,000	16,100,000	
8.01.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	37,977,000	43,673,550	
8.01.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Kab. Aceh Selatan, Tapaktuan, Pasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun	Terlaksananya Urusan Dinas	1 Tahun	6,700,000	7,705,000	
<b>8.01.01.2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	
8.01.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	5.1.2 Birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100 %	meningkatnya sdm dan kinerja aparatur	1 Tahun	lancarnya kegiatan dinas	1 Tahun	0	0	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>										<b>95,352,000</b>	<b>109,654,800</b>	
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>										<b>95,352,000</b>	<b>109,654,800</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Gampong yang Memperoleh Pendidikan/ Pembinaan/ Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	62 %	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 Tahun	Meningkatnya Rasa Cinta Terhadap tanah air	1 Tahun	36,175,000	41,601,250	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Gampong yang Memperoleh Pendidikan/ Pembinaan/ Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	62 %	Event Penyelenggaraan	1 Tahun	Meningkatnya Rasa Cinta Terhadap tanah air	1 Tahun	59,177,000	68,053,550	
8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>										<b>53,340,000</b>	<b>61,341,000</b>	
8.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>										<b>53,340,000</b>	<b>61,341,000</b>	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	75 %	Terlaksananya Bimtek kepada pengurus partai politik	1 Tahun	Terlaksananya Pembinaan Kepada Partai politik	1 Tahun	53,340,000	61,341,000	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	75 %	mengetahui perkembangan/situasi dalam daerah	1 Tahun	Terlaksananya Pembinaan Kepada Partai politik	1 Tahun	0	0	
8.01.04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>										<b>41,518,000</b>	<b>47,745,700</b>	
8.01.04.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>										<b>41,518,000</b>	<b>47,745,700</b>	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Jumlah Lembaga yang Terdaftar serta Memahami Peraturan Perundang-undangan Tentang Keabsahan Suatu Organisasi	75 %	Pertemuan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Terlaksana Pembinaan	1 Tahun	41,518,000	47,745,700	
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>										<b>40,000,000</b>	<b>46,000,000</b>	
8.01.05.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>										<b>40,000,000</b>	<b>46,000,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama	625 %	Terlaksananya Penyuluhan	1 Tahun	terciptanya toleransi kerukunan umat beragama	1 Tahun	33,000,000	37,950,000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama	625 %	Terlaksananya Penyuluhan	1 Tahun	terciptanya toleransi kerukunan umat beragama	1 Tahun	0	0	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama	625 %	kunjungan Monev ke kecamatan mengegah penimbunan sembako dan lancarnya distribusi barang	1 Tahun	terciptanya toleransi kerukunan umat beragama	1 Tahun	7,000,000	8,050,000	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>										<b>134,586,000</b>	<b>154,773,900</b>	
<b>8.01.06.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>										<b>134,586,000</b>	<b>154,773,900</b>	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	66 %	terlaksananya rapat koordinasi tim penganan konflik	1 Tahun	Tertangani kasus-kasus konflik	1 Tahun	55,348,000	63,650,200	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	3.4.3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Aceh Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ancaman/Deteksi Dini Konflik yang Tertangani	66 %	terlaksananya sosialisasi kewaspadaan dini daerah	1 Tahun	Tertangani kasus-kasus konflik	1 Tahun	79,238,000	91,123,700	

## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pencapaian IKU dihitung dari indikator tujuan dan sasaran, sedangkan untuk IKK dihitung dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019 - 2023**

Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Indeks Pembangunan Manusia	%	65,03	66,17	67,24	68,33	69,43	70,03	70,03
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,93	4,20	4,34	4,48	4,63	4,78	4,78
PDRB Perkapita	Rp	21,090,000	20,930,000	21,270,000	21,620,000	21,990,000	22,370,000	22,370,000
Persentase Penduduk Miskin	%	14.07	14.02	13.30	12.50	12.10	11.80	11.80
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.24	6.90	6.59	6.24	5.86	5.53	5.53
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	48.19	60.74	62.34	63.99	65.69	67.44	67.44
Jumlah Hafizh Alquran	Orang	81	101	121	141	161	181	705
Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi Dayah	%	20	30	40	50	60	70	70
Persentase Dayah dengan Program Tahfiz Alqur'an	%	0	2.33	6.98	11.63	16.28	20.93	20.93
Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang	180	22	36	36	36	36	166
Persentase mesjid yang melaksanakan shalat lima waktu	%	60	65	67	70	72	75	75
Status BLUD Rumah Sakit Syariah	Jumlah	-	-	1	1	1	1	1
Jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan	Sertifikat	N/A	-	20	20	20	20	80

Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	%	70	70	75	80	85	90	90
Rasio Jumlah Masjid per jumlah penduduk	%	1.1770	1.1339	1.1561	1.1412	1.1388	1.1485	1.1485
Rasio Jumlah Mushola per jumlah penduduk	%	2.2671	2.1841	2.1966	2.1682	2.1005	2.0745	2.0745
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	30.15	34.92	39.68	42.86	47.62	50.79	51
Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	4	4	4	4	4	5	5
Angka melek huruf	Persen	98.37	98.64	99.18	99.45	99.72	99.72	99.72
Angka Rata-rata lama Sekolah	Persen	8.18	8.20	8.22	8.24	8.26	8.28	8.28
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI	Persen	103.24	102.70	102.16	101.62	101.08	100.00	100.00
Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs	Persen	92.93	94.12	94.41	94.56	94.94	95.21	95.21
Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) SD/ MI	Persen	31.14	32.95	34.76	36.57	38.38	40.19	40.19
Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT) SLTP/ MTs	Persen	17.66	19.47	21.28	23.09	24.90	26.71	26.71
Angka Partisipasi Murni (APM)SD/ MI	Persen	97.96	98.19	98.40	98.55	98.72	98.86	98.86
Angka Partisipasi Murni (APM)SLTP/ MTs	Persen	78	78.23	78.44	78.59	78.76	78.90	78.90
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	53.37	69.73	71.65	73.52	75.35	77.14	77.14
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jenjang TK/PAUD	Persen	74.32	79.97	85.62	100.00	100.00	100.00	100.00
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI	Persen	87.64	93.29	98.94	100.00	100.00	100.00	100.00
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	92.12	97.77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Jenjang SMP/MTs								
Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) jenjang SD/MI	Persen		51.23	55.23	59.23	63.23	67.23	67.23
Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) jenjang SMP/MTs	Persen		53.12	57.12	61.12	65.12	69.12	69.12
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	7,031	7,695	7,849	8,634	8,893	9,160	34,535
Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Eks	26,815	26,815	27,619	28,448	29,301	30,181	115,549
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	7,278	7,278	7,496	7,721	7,953	8,191	31,362
Jumlah atlet berprestasi	orang	24	24	26	28	30	32	32
Persentase wirausaha muda	Orang	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah data pemuda umur (16-30)	Orang	63,000	64,260	65,545	66,856	68,193	69,557	70,948
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	9.90	18.09	26.28	34.47	42.66	50.85	50.85
Persentase wirausaha muda	Orang	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Kasus Narkoba	Kasus	17	16	14	12	9	7	7
Cakupan pembinaan Wasit	%	50.00		60.00	65.00	70.00	75.00	75.00
Cakupan pembinaan pelatih	%	90.91		90.91	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah lapangan olahraga	unit	377	377	377	387	387	397	397
Jumlah gedung olahraga	unit	1	1	1	2	2	3	3
Jumlah Gelanggang balai remaja	unit	1	1	1	2	2	3	3

Jumlah atlet berprestasi	orang	24	24	26	28	30	32	32
Cakupan pembinaan atlet muda	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Angka Harapan Hidup	Tahun	63,89	64.04	64.18	64.33	64.48	64.63	64.63
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	12,9/1000 KH	12/1000 KH	11,5/1000 KH	11/1000 KH	10,5/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	1 - AKB	987,1	988	988,5	989	989,5	990	990
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	12,5/100 KH	12/1000 KH	11,5/1000KH	11/1000 KH	10,5/1000 KH	10/1000 KH	9,5/1000 KH
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	6,4/1000 KH	6,2/1000 KH	6/1000 KH	5,7/1000 KH	5,6/1000 KH	5,3/1000 KH	5/1000 KH
Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup	Per 100,000 Kelahiran Hidup	76,7/100,000 KH	76/100,000 KH	70/100,000 KH	67/100,000 KH	65/100,000 KH	62/100,000 KH	60/100,000 KH
Rasio Posyandu Persatuan Balita	Per 1000 Balita	0,017	0,018	0,019	0,019	0,019	0,02	0,02
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 1000 Satuan Penduduk	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28	0.29	0.29
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Per 1000 Satuan Penduduk	2,3	2,6	3,0	3,5	3,5	4,0	4,0
Cakupan desa/Gampong/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	70,16	72	74	76	78	80	80
Presentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	3042	3050	3060	3080	3090	3100	3,100

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
Penderita Diare yang Ditangani	%	42,9	60	75	85	90	100	100
Cakupan desa/Gampong/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	70,16	72	74	76	78	80	80
Cakupan Puskesmas	%	11,12	11,12	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Cakupan Puskesmas Pembantu	%	2,4	4	6	8	9	10	10
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	%	6,8	7,5	8	9	10	11	11
Rasio RS persatuan penduduk	%	0.00434	0.00418	0.00413	0.00408	0.00402	0.00397	0.00397
Cakupan Pelayanan Islami	%		80	80	80	80	80	80
Tingkat Kepuasan	%	80	85	86.5	88.0	89.5	90	90
BOR (Persentase pemakaian tempat tidur)	%	71	73	75	77	80	80	80
ALOS (Jumlah hari lama rawat)	Hari	3	4	4	4	4	4	4
BTO (Angka perputaran tempat tidur)	Kali	64	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50	40 - 50
TOI (Jumlah tempat tidak ditempati)	Hari	1.6	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
NDR (Angka kematian 48 Jam)	Per 1000	56	20	18	16	15	10	10
GDR (Angka kematian umum)	Per 1000	134	45	40	35	30	25	25
Fungsionalnya RS Regional BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan	Jumlah RS		1	1	1	1	1	1
Non Folio AFP Rate per 100.000 Penduduk < 15 Tahun	%	0						

Cakupan Desa/Kelurahan yang Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase laporan W2 mingguan tetap waktu	%		80	80	83	86	90	90
Kabupaten Layak Anak	Belum KLA/KLA	Belum KLA	Belum KLA	KLA	KLA	KLA	KLA	KLA
Cakupan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan public	%	5.9	20,0	17.6	20,0	20,0	20,0	30
Persentase perempuan dalam bidang politik yang di latih	%		60	60	60	60	60	60
Indek Kualitas Hidup PKMS	Indeks	N/A	0.44	0.47	0.57	0.62	0.65	0.65
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan social	%	34.68	37.63	37.63	48.00	60.00	75.00	75.00
Persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial	%	5.00	5.00	20.00	40.00	60.00	80.00	80.00
Persentase Peningkatan Kesadaran Sosial Masyarakat	%	0.50	1.00	10.00	20.00	35.00	50.00	50.00
Rasio KDRT	Rasio	0,0038	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0031
Tingkat Penyelesaian Komflik Sosial	%	65	100	100	100	100	100	100
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Orang	230.254	238,997	242,196	245,361	248,507	251,630	251,630
Persentase Fasilitas Umum yang Ramah Perempuan, Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
Presentase penyaluran santunan kematian	%	100	100	100	100	100	100	100
Aplikasi E-Planning yang terintegrasi dengan perencanaan nasional	Aplikasi	1	1	1	2	2	2	2

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Sistem Elektronik	%		32.26	48.39	64.52	80.65	100	100
Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	%	50	70	80	85	90	100	
Persentase hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBK	%	15	18	20	25	30	35	35
Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RPKK	%	60	70	80	85	90	100	100
Penjabaran Konsistensi Program RPKK kedalam APBK	%	69.56	70	80	85	90	100	100
Persentase hasil musrenbang yang diakomodir dalam APBK	%	15	18	20	25	30	35	35
Penjabaran Konsistensi RPJMG dengan RPJMK	%	20	30	50	70	80	100	100
Persentase implemantasi rencana kelitbangan	%	0	5	10	15	20	25	25
Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	%		20	25	30	35	40	40
Penerapan SIDA	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	%	0	10	10	15	15	20	20
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	0	5	5	10	10	15	15
Jumlah Temuan BPK	Rekomendasi BPK	196	183	170	157	144	131	131
Opini Audit BPK Atas laporan keuangan	WTP/WDP							
Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan internal Pemerintah	Level	2	3	3	3	3	4	4

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Cc	Cc	cc	B	B	B	B
Tingkat maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	3	4	4
Nilai SAKIP	C	B	B	B	B	B	BB	BB
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRK	Ada/Tidak	Ada						
Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen lima tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada						
Terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRK	Ada/Tidak	Ada						
Jumlah ASN	Orang	5.819	5,957	6,095	6,233	6,371	6,509	
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	N/A	75	80	85	90	95	95
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.28	0.28
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
Rasio Penduduk yang ber-KTP per satuan penduduk	%	0.09	0.93	0.96	0.98	0.99	0.99	0.99
Rasio bayi berakte kelahiran	%	8.50	85.00	87.00	88.00	95.00	95.00	95.00

Raio pasangan yang berakate nikah	%	0.30	32.00	34.00	36.00	38.00	38.00	38.00
Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penerapan KTP Nasional berfbasis NIK	%	86.00	92.00	96.00	99.00	99.00	99.00	99.00
Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)	%	90	93	96	98	99	99	99
Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	65	70	75	80	85	85	85
Kartu Identitas Anak (KIA)	%	20	20	40	60	80	90	90
Persentase aparatur yang memenuhikompetensi	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Anggota KORPRI yang berprestasi	%	0.73	0.76	0.80	0.80	0.84	0.84	0.84
Jumlah Bangunan ber IMB	IMB	177	243	335	460	633	870	870
Pesentase Panjang Jalan Terbangun	%	89.22	0.15	1.59	1.91	2.29	2.75	8.69
Pesentase Panjang Jembatan Terbangun	%	59.65	1.19	8.14	8.95	9.85	10.83	38.96
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	62.50	4.40	5.50	7.20	8.60	10.00	35.70
panjang jalan dengan kondisi baik	Km	827.41	862.91	900.91	942.51	986.31	1,032.31	1,032.31
jumlah jembatan dengan kondisi baik	M	2141.76	2,313.10	2,509.71	2,785.78	3,106.15	3,432.29	3,432.29
panjang DAS yang ditangann dengan baik	Km	91.20	104.88	121.66	142.34	167.96	199.88	199.88
Persentase Rumah Layak Huni Terbangun	%	56.43	0.65	0.71	0.78	0.86	0.94	60.37
Persentase Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Terbangun	%	45.45	60.00	66.00	72.60	79.86	87.85	73.26

Persentase Rumah Tersambung Jaringan Listrik	%	88.89	3.40	3.74	4.11	4.52	4.98	93.04
Persentase Masyarakat yang belum memiliki Sarana Air Bersih	%	46.67	11.75	12.93	14.22	15.64	17.21	61.02
Persentase Masyarakat yang belum memiliki Sarana Sanitasi	%	34.11	1.99	2.19	2.41	2.65	2.92	36.54
Persentase Panjang Saluran Terbangun	%	49.78	33.48	36.83	40.51	44.56	49.02	83.96
Persentase Masyarakat Miskin yang belum memiliki Sarana Sanitasi	%	40.00	45.00	60.00	66.00	72.60	79.86	64.69
Persentase Masyarakat yang belum memiliki Sarana Air Bersih	%	46.67	11.75	12.93	14.22	15.64	17.21	61.02
Persentase Masyarakat yang belum memiliki Sarana Sanitasi	%	34.11	1.99	2.19	2.41	2.65	2.92	36.54
indeks risiko bencana	Parameter	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
jumlah rambu lalu lintas	unit	-	625	688	757	833	917	1.009
jumlah kendaraan yang melakukan uji kelayakan	unit	368	405	446	491	541	506	557
persentase kendaraan umum yang memiliki trayek	%	49,02	54,02	60,02	66,02	73,02	81,02	90,02
Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	7.50						12.08
Persentase Jumlah sampah yang tertangani	%	7.36	7.66	7.96	8.26	8.56	8.86	8.86
Nilai kualitas baku mutu Air	Parameter	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik	Baik	Baik	Baik
Nilai kualitas baku mutu Udara	Parameter	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik	Baik	Baik	Baik
Persentase Luas Kawasan yang di konservasi	%	0	10	15	20	25	20	20.00

Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	7.50	8.25	9.98	10.98	12.08	12.08	12.08
Persentase penduduk miskin	%	14,07	13,70	13.2	12,60	12	11	11
Pola Pangan Harapan (konsumsi)	%	76	79	80	81	82	82	82
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	59.70	59,88	59.96	60.04	60.11	60.17	60.17
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	18,39	18,41	1,842	18,43	18,44	18,45	18,45
Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	6,58	6,58	6,58	6,60	6,62	6,64	6,64
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	18.4	18.28	18.15	18.03	17.91	17.79	17.79
Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	6.54	6.56	6.56	6.56	6.58	6.58	6.58
Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	%	76	78	79	80	81	82	82
Persentase Koperasi aktif	%	68.4	71.5	73	75.5	77.5	80	80
Pertumbuhan Sektor Industri	%	3,25	3	3	3	3	3	15
Cakupan Bina Kelompok Industri	%	39	40	45	50	55	60	60
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14.9	15,1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.5
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	35	40	45	50	55	60	60
PAD sektor pariwisata	%	0,0275	0,0275	0.0284	0.0292	0.0301	0.0310	0.0310
Kunjungan wisata	Jiwa	475,540	475,540	499,317	524,283	550,497	578,022	578,022
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	%	4	6	6	4	4	6	26

(LPM)								
Meningkatnya Jumlah Pasar Sehat	Jumlah Pasar	2	1	1	1	1	1	7
Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan	3	3	4	4	6	7	7

**Tabel 6.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021**

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>1</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	3,93	4,2	4,34	4,48	4,63	4,78	4,78
1.2	PDRB per kapita	Rp	21,090,000	20,930,000	21,270,000	21,620,000	21,990,000	22,370,000	22,370,000
1.3	Persentase Penduduk Miskin	%	13,96	14,02	13,30	12,50	12,10	11,80	11,80
1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.24	6.90	6.59	6.24	5.86	5.53	5.53
1.5	Indeks Reformasi Birokrasi	%	48.19	60.74	62.34	63.99	65.69	67.44	67.44
1.6	Indeks Pembangunan Manusia	%	65,03	66,17	67,24	68,33	69,43	70,03	70,03
1.7	Persentase Penduduk Miskin	%	14.07	14.02	13.30	12.50	12.10	11.80	11.80
<b>2</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>								
<b>2,1</b>	<b>Pendidikan</b>								
2.1.1	Angka melek huruf	%	98.37	98.64	99.18	99.45	99.72	99.72	99.72
2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	%	8.18	8.20	8.22	8.24	8.26	8.28	8.28
2.1.3	Angka Partisipasi Kasar								

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
	(APK)								
	- SD/MI	%	103.24	102.70	102.16	101.62	101.08	100.00	100.00
	- SLTP/MTs	%	92.93	94.12	94.41	94.56	94.94	95.21	95.21
2.1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)								
	- SD/MI	%	31.14	32.95	34.76	36.57	38.38	40.19	40.19
	- SLTP/MTs	%	17.66	19.47	21.28	23.09	24.90	26.71	26.71
2.1.5	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	- SD/MI	%	97.96	98.19	98.40	98.55	98.72	98.86	98.86
	- SLTP/MTs	%	78	78.23	78.44	78.59	78.76	78.90	78.90
2.1.6	Angka Pembinaan								
	Persentase guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)								
	- jenjang SD/MI	%		51.23	55.23	59.23	63.23	67.23	67.23
	- jenjang SMP/MTs	%		53.12	57.12	61.12	65.12	69.12	69.12
2.1.7	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	53.37	69.73	71.65	73.52	75.35	77.14	77.14
<b>2,2</b>	<b>Kesehatan</b>								
2.2.1	Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)	1-AKB	987,1	988	988,5	989	989,5	990	990
2.2.2	Angka usia harapan hidup (UHH)	tahun	63,89	64.04	64.18	64.33	64.48	64.63	64.63
2.2.3	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
2.2.4	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	12,9/1000 KH	12/1000 KH	11,5/1000 KH	11/1000 KH	10,5/1000 KH	10/1000 KH	10/1000 KH
<b>2,3</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>								
2.3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	59,7	59,88	59,96	60,04	60,11	60,17	60,17
<b>3</b>	<b>Fokus Seni Budaya dan Olah Raga</b>								
<b>3,1</b>	<b>Kebudayaan</b>								
3.1.1	Jumlah Grup Kesenian	Grup	70	72	73	74	75	76	76
3.1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	1	1	1	1	1	1
<b>3,2</b>	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>								
3.2.1	Jumlah Klub Olahraga	Klub	345	347	349	351	353	355	355
3.2.2	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	2	2	2	3	3	3	3
<b>B</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>1</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>								
<b>1,1</b>	<b>Pendidikan</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>								
1.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)								

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
	- SD/MI	%	97,96	97,82	97,96	98,10	98,23	98,37	98,37
	- SMP/MTs	%	78,00	80,89	83,88	86,98	90,20	93,54	93,54
1.1.1.2	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah								
	- SD/MI	-	91,02	91,77	92,53	93,30	94,07	94,84	94,84
	- SMP/MTs	-	65,67	67,65	69,70	71,80	73,97	76,21	76,21
1.1.1.3	Rasio Guru Murid								
	- SD/MI	-	1537,72	1535,56	1533,41	1531,25	1529,10	1526,95	1526,95
	- SMP/MTs	-	1092,70	13274,90	13456,25	13640,08	13826,42	14015,30	14015,30
<b>1.1.3</b>	<b>Fasilitas Pendidikan</b>								
1.1.3.1	Gedung Sekolah Pendidikan SD/MI	Unit	256	261	265	270	275	280	280
1.1.3.2	Gedung Sekolah Pendidikan SMP/MTs	Unit	86	89	92	95	98	101	101
<b>1.1.4</b>	<b>PAUD</b>								
1.1.4.1	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA	Orang	8.566	8.566	8.891	9.216	9.541	9.866	9.866
<b>1.1.5</b>	<b>Angka Putus Sekolah</b>								
	- SD/MI	%	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,17	0,17
	- SMP/MTs	%	0,24	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18	0,18

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>1.1.7</b>	<b>Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV</b>								
	- TK/RA	%	74,32	78	86	100	100	100	100
	- SD/MI	%	87,64	93	99	100	100	100	100
	- SMP/MTs	%	92,12	98	100	100	100	100	100
	- SMA/SMK/MA	%							
<b>1,2</b>	<b>Kesehatan</b>								
1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	-	14,66	14,12	13,60	13,11	12,63	12,16	12,16
1.2.2	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	-	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1.2.3	Rasio Pustu per satuan penduduk	-	0,23	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21
1.2.4	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	-	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.2.5	Rasio Rumah Sakit per 100.000 pddk.	-	0.00434	0.00418	0.00413	0.00408	0.00402	0.00397	0.00397
1.2.6	Rasio dokter per satuan penduduk	-	0.26	0.26	0.27	0.27	0.28	0.29	0.29
1.2.7	Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	-	2,3	2,6	3	3,5	3,5	4	4
1.2.8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>1,3</b>	<b>Pekerjaan Umum</b>								
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,74	0,79	0,85	0,91	0,98	1,05	1,05
1.3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,0045	0,0046	0,0047	0,0047	0,0048	0,0049	0,0049
1.3.3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	%	73,68	78,94	84,58	90,63		104,04	104,04
1.3.4	Rasio jaringan irigasi	%	5,22	6,792	8,837	11,497	14,959	19,463	19,463
<b>1,4</b>	<b>Perumahan</b>								
1.4.1	Rasio Rumah layak Huni	%	0,270	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29
1.4.2	Jumlah Rumah Berakses Air Minum	unit	10.886	12.103	13.455	14.959	16.631	18.490	18.490
1.4.3	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi (Unit)	Unit	22.571	24.096	25.724	27.462	29.317	31.298	31.298
1.4.4	Jumlah Rumah Tinggal Tidak Berakses Listrik (Unit)	Unit	1.126	1.314	1.534	1.790	2.090	2.439	2.439
1.4.5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sanitasi layak (%)	%	34,11	36,19	38,40	40,74	43,22	45,86	45,86
<b>1,5</b>	<b>Penataan Ruang</b>								
1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau/luas wilayah ber	%	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
	HPL/HGB								
1.5.2	Jumlah bangunan berIMB per satuan Bangunan	Unit	177	243	335	460	633	870	870
<b>1,6</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>								
1.6.1	Tersedianya dokumen RPJPD Dengan Perda	Unit	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.2	Tersedianya dokumen RPJMD Dengan Perda/Perkada	Unit	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.3	Tersedianya dokumen RKPD Dengan Perkada	Unit	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.6.4	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>1,7</b>	<b>Perhubungan</b>								
1.7.1	Jumlah Arus Penumpang angkutan umum	Orang	68.040	73.284	78.931	85.014	91.566	98.623	98.623
1.7.2	Rasio Izin Trayek	%	44,02	49,18	54,95	61,39	68,58	76,62	76,62
1.7.5	Jumlah izin kir Angkutan umum		335	365	398	434	473	516	516
1.7.6	Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	8	9	10	11	12	13	13

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
1.7.7	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	65	69	72	76	80	85	85
1.7.8	Persentase kepemilikan Kir Angkutan umum	%	86,90	88,25	89,63	91,03	92,45	93,89	93,89
1.7.9	Pemasangan Rambu-Rambu	Unit	362	387	397	397	417	417	417
1.7.10	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	%	17,20	18,64	20,21	21,90	23,74	25,73	25,73
1.7.11	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang/b arang	20.400	21.694	23.070	24.533	26.089	27.744	27.744
1.7.12	Jlh orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal	Orang/b arang	1.045	1.405	1.888	2.537	3.410	2.237	2.237
<b>1,8</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>								
1.8.1	Persentase penanganan sampah (%)	%	7,36	7,51	7,65	7,80	7,95	8,10	8,10
1.8.2	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	%	4,76	4,86	4,95	5,05	5,14	5,24	5,24
1.8.3	Nilai kualitas baku mutu Air	Paramet er	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik	Baik	Baik	Baik
1.8.4	Nilai kualitas baku mutu Udara	Paramet er	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik	Baik	Baik	Baik
<b>1,9</b>	<b>Pertanahan</b>								
1.9.1	Persentase lahan bersertifikat per luas wilayah Kabupaten	%	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>1.10</b>	<b>Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>								
1.10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0,81	0,85	0,90	0,94	0,99	1,04	1,04
1.10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,79
1.10.3	Rasio Pasangan berakte nikah	%	0,36	0,38	0,40	0,43	0,45	0,48	0,48
1.10.4	Jumlah Penduduk berKTP(Orang)	Orang	143.496	153.435	164.062	175.424	187.574	200.566	200.566
1.10.5	Rasio penduduk berakte kelahiran/ kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	1000/Pd dk	553	621	698	784	881	990	990
1.10.6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Unit	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
<b>1,11</b>	<b>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</b>								
1.11.1	Jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintahan	Orang	3,72	3,56	3,72	3,88	4,05	4,22	4,22
1.11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	%							
1.11.3	Rasio KDRT	%	0,00380	0,00031	0,00029	0,00028	0,00027	0,00026	0,00026

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
1.11.4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Kasus	65	50	35	20	10	3	3
<b>1,15</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>								
1.15.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	1,72	1,65	1,68	1,71	1,74	1,77	1,77
1.15.2	Rasio Akseptor KB	-	70,53	79,70	81,80	83,96	86,17	88,44	88,44
1.15.3	Jumlah Peserta KB aktif	Orang	28.280	29.172	30.093	31.043	32.022	33.033	33.033
1.15.4	Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera	Orang	36.417	36.602	36.787	36.974	37.161	37.349	37.349
<b>1,16</b>	<b>Sosial</b>								
1.16.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	6	6	6	6	6	6	6
1.16.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	85,00	78,87	73,18	67,90	63,00	58,45	58,45
1.16.3	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>1,17</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>								
1.17.1	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	92,76	92,87	92,98	93,09	93,20	93,32	93,32

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
1.17.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	59,70	60	59,96	60,04	60,11	60,17	60,17
1.17.3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	7,24	6,9	6,59	6,24	5,86	5,53	5,53
<b>1,18</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>								
1.18.1	Persentase Koperasi aktif (%)	%	68,40	71,50	73,00	75,5	77,50	80,00	80,00
1.18.2	Jumlah UKM non BPR/LKM	Unit	2.701	2.755	2.810	2.866	2.924	2.982	2.982
1.18.3	Jumlah Usaha mikro dan kecil	Unit	4.169	4.252	4.337	4.424	4.513	4.603	4.603
<b>1,19</b>	<b>Penanaman Modal</b>								
1.19.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	6	8	10	12	14	16	16
1.19.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	1.210.714.951	1.259.627.000	1.284.820.000	1.310.516.000	1.336.727.000	1.363.461.000	1.363.461.000
<b>1.20</b>	<b>Kebudayaan</b>								
1.20.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Tahun	4	4	4	4	4	5	5
1.20.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1	1	1	1	1	1	1

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
1.20.3	Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	30.15	34.92	39.68	42.86	47.62	50.79	50.79
<b>1,21 Pemuda dan Olahraga</b>									
1.21.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Unit	9.90	18.09	26.28	34.47	42.66	50.85	50.85
1.21.2	Jumlah organisasi olahraga	Unit							
1.21.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	keg							
1.21.4	Jumlah kegiatan olahraga	keg							
1.21.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	1	1	1	2	2	3	3
1.21.6	Lapangan olahraga	unit	377	377	377	387	387	397	397
1.21.7	Rasio lapangan olah raga per 1.000 pddk	-	1,64	1,58	1,56	1,58	1,56	1,58	1,58
<b>1,22 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>									
1.22.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM Ormas dan OKP	%	1	1	2	2	2	2	2
1.22.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	%	1	1	1	2	2	2	2

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>1,23</b>	<b>Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian</b>								
1.23.1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk	-	3,29	3,00	3,03	3,07	3,10	3,14	3,14
1.23.2	Rasio jumlah Linmas per Jumlah 10000 penduduk	pddk		68,81	73,29	78,07	83,16	88,58	88,58
1.23.13	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>1,24</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>								
1.24.1	Pola Pangan Harapan	%	76	79	80	81	82	82	82
1.24.2	Ketersediaan Pangan utama (Kg/1.000 Penduduk)	Kg	198.438	200.422	202.427	200.402	202.406	200.382	200.382
<b>1,25</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong</b>								
1.25.1	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	%	4	6	6	4	4	6	6
1.25.2	Persentase Lembaga dan Usaha Ekonomi Gampong Yang Aktif	%	20	20	25	25	30	30	30
1.25.3	Posyandu aktif	Unit	260	260	260	260	260	260	260
1.25.4	Jumlah LSM yang aktif	Unit	33	38	43	49	56	64	64

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
1.25.5	Jumlah PKK aktif	Unit	18	18	18	18	18	18	18
1.25.6	Persentase desa berstatus swasembada	%		7,31	13,88	26,38	50,12	95,23	95,23
<b>1,26</b>	<b>Statistik</b>								
1.26.1	Buku "Aceh Selatan dalam angka"	Unit	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.26.2	Buku "PDRB " Aceh Selatan	Unit	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>1,27</b>	<b>Kearsipan</b>								
1.27.1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	%	98,7	98,87	99,03	99,20	99,37	99,54	99,54
1.27.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1	3	3	4	4	4	4
<b>1,28</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>								
1.28.1	Cakupan layanan Telekomunikasi		0,67	0,67	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68
1.28.2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		0,0107	0,0115	0,0116	0,0117	0,0118	0,0119	0,0119
<b>1,29</b>	<b>Perpustakaan</b>								
1.29.1	Jumlah perpustakaan	Unit	90	91	92	93	94	94	94
1.29.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	7.031	7.687	8.405	9.190	10.048	10.986	10.986

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
	(Orang)								
1.29.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	26,815	26,981	27,148	27,316	27,485	27,656	27,656
<b>C</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>								
<b>1</b>	<b>Pertanian</b>								
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)	Ton/Hektar	5,4	5,5	6	6	6	6	6
1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	18,39	18,41	18,42	18,43	18,44	18,45	18,45
1.6	Cakupan bina kelompok petani	%	49,14	52	54	56	58	60	60
<b>4</b>	<b>Pariwisata</b>								
4,1	Kunjungan Wisata	Orang	475,54	475,54	499,317	524,283	550,497	578,022	578,022
4,2	Jumlah objek wisata	Objek	99	100	110	115	115	115	115
4,3	Jumlah tenaga pengelola pariwisata yang terlatih	Orang	700	705	710	710	715	715	715
4,4	Jumlah event wisata budaya yang diikuti	Kali	2	2	2	2	2	2	2
<b>5</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>								
5.1	Produksi perikanan tangkap (Ton)	Ton	32.390	33.038	33.699	34.373	35.060	35.762	35.762

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
5.2	Produksi perikanan budidaya	Ton	261,90	267,12	272,46	277,91	283,47	289,14	289,14
5.3	Konsumsi ikan	Kg/thn	57	63	66	70	73	75	75
5.4	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	6,58	6,58	6,58	6,60	6,62	6,64	6,64
5.5	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	35,59	37,1	39,06	41,79	42,03	43,66	43,66
<b>6</b>	<b>Perdagangan</b>								
6,1	Kontribusi sektor perdagangan thd PDRB (%)	%	14,9	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5
6,2	Cakupan bina Kelompok pedagang Formal/ informal	Kelompok	30	35	40	45	50	55	55
<b>7</b>	<b>Perindustrian</b>								
7.1	Kontribusi Sektor Industri thd PDRB	%	3,25	3,36	3,40	3,65	3,87	4,08	4,08
7.2	Cakupan bina Kelompok Pengrajin (unit)	Kelompok	39	40	45	50	55	60	60
7.3	Pertumbuhan sektor Industri	%	3	4	4	4	4	4	4
7.4	Tenaga Kerja Sektor Industri (Orang)	Orang	3.025	3.165	3.318	3.485	3.667	3.865	3.865
<b>D</b>	<b>ASPEK DAYA SAING</b>								

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>								
<b>1,1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Rp)	Rp	630,583	632,830	633,957	635,085	636,216	637,348	637,348
1.1.2	Produktivitas total daerah	%		55,55	58,34	59,54	59,58	59,63	59,63
<b>2</b>	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>								
<b>2,1</b>	<b>Perhubungan</b>								
2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	0,0138	0,0133	0,0127	0,0121	0,0116	0,0111	0,0111
2.2	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	68.040	69.401	70.789	72.205	73.649	75.122	75.122
2.3	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum								
	-Dermaga	ton	22.845	23.302	23.768	24.243	24.728	25.223	25.223
	- Bandara	ton	7.082	7.224	7.368	7.515	7.666	7.819	7.819
	-Terminal	ton							

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
			132.678	135.332	138.038	140.799	143.615	146.487	146.487
<b>2,2</b>	<b>Penataan Ruang</b>								
2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	%	62.50	4.40	5.50	7.20	8.60	10.00	10.00
2.2.2	Luas wilayah produktif Aceh Selatan (Ha)	Ha							
2.2.3	Luas wilayah banjir Aceh Selatan (Ha)	Ha	1.400	1.288	1.185	1.090	1.003	923	849
<b>2,3</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
2.3.1	<b>Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang</b>								
	-Jumlah Bank	Unit	21	21	21	21	21	21	21
	-Konvensional	Unit	18	18	18	18	18	18	18
	-Syariah	Unit	3	3	3	3	3	3	3
<b>2,4</b>	<b>Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran</b>								
2.4.1	Restoran	Unit	2	2	2	2	2	2	2
2.4.2	Rumah Makan	Unit	26	31	36	43	50	59	59
2.4.3	Café/ Warkop	Unit	13	16	21	26	33	41	41

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>2,5</b>	<b>Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel</b>								
2.5.1	Hotel Melati	Unit	16	17	18	18	19	19	19
2.5.2	Hotel Berbintang	Unit	-	-	1	1	1	-	-
<b>2,7</b>	<b>Komunikasi dan informatika</b>								
2.7.1	Persentase RT pengguna Listrik	%							
<b>3</b>	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>								
<b>3,1</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>								
3.1.1	Angka Kriminalitas per 10.000 pddk	-	10,14	10	9,8	7,9	7,4	6,00	6,00
3.1.2	Jumlah Demo dalam 1 tahun	-	1	3	3	3	3	3	3
3.1.3	lama proses perijinan (hari)/(paling lama)								
	- SIUP	Hari	3	3	3	3	3	3	3
	- TDP	Hari	3	3	3	3	3	3	3
	- IUI	Hari	5	5	5	5	5	5	5

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
	- TDI	Hari	3	3	3	3	3	3	3
	- IMB	Hari	14	14	14	14	14	14	14
	- HO	Hari	15	15	15	15	15	15	15
3.1.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah								
	- Jumlah macam pajak daerah	item	9	9	9	9	9	9	9
	- Jumlah macam retribusi daerah	item	3	3	3	3	3	3	3
	- Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	-	-	1	1	1	1
<b>4</b>	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>								
4,1	Rasio kelulusan S1/S2/S3	%	0,0321	0,0329	0,0344	0,0360	0,0377	0,0395	0,0395
4,2	Tingkat Ketergantungan	%	42,92	42,67	42,36	42,05	41,75	41,44	41,44
<b>E</b>	<b>Aspek Agama dan Syariat Islam</b>								
<b>1</b>	<b>Fokus Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah</b>								
<b>1,1</b>	<b>Syariat Islam</b>								
1.1.1	Jumlah siswa Usia SD dan SLTP melalui kegiatan cerdas cermat islam bagi generasi muda	Orang	108	108	108	108	108	108	108

NO	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Aceh Selatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMK	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMK
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
1.1.2	Jumlah Kasus Pelanggaran Sayriat Islam	Kasus	143	120	100	80	60	40	40
<b>1,2</b>	<b>Dayah</b>								
1.2.1	Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Peribadatan	unit	953	956	1.188	1.195	1.202	1.209	1.209
1.2.2	Jumlah Santri Pondok Pasantren	unit	13,614	13,714	13,814	13,914	14,000	14,100	14,100
<b>1,3</b>	<b>Baitulmal</b>								
1.3.1	Tersalurnya ZIS Bagi Fakir Miskin (Mustahik)	Orang	16.250	16.260	16.270	16.280	16.290	16.300	16.300
1.3.2	Jumlah Pemberi ZIS (Muzakki)	Orang	2.045	2.065	2.085	2.095	2.100	2.110	2.110

## **BAB VII P E N U T U P**

Sejalan dengan prioritas pembangunan dan juga tahapan dalam RPJM Kabupaten Aceh Selatan 2018-2023 maka ditetapkan Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 adalah **“Mengembangkan industri pengolahan produk unggulan pertanian didukung oleh peningkatan kualitas daya saing SDM dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang berkualitas”** RKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk Tahun Anggaran 2021. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021.

Pedoman ini disusun agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan, serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) hingga tingkat Kabupaten

(Musrenbangkab) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antar pelaku pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI ACEH SELATAN



**Tgk. AMRAN**

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKALATUR
URUSAN	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	1.01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
FUNGSI	8					PENDIDIKAN
SUB FUNGSI	8.01					PENDIDIKAN
VARIAN KODE ORGANISASI	??	0-0	0-0	??		DINAS PENDIDIKAN DAYAH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.01	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
										1.01.07	1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH *****) Kekuhsusan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
										1.01.07.1.01	1	01	07	1.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah *****) KDA
1.1.2.68.1	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	68	1	4	4.1	1.01.07.1.01.01	1	01	07	1.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah *****) KDA
1.1.4.32.2	Pembangunan Balee Semeubeut, TPA dan Pesantren	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	4	32	2	4	4.1	1.01.07.1.01.01	1	01	07	1.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah									1.01.07.1.01.02	1	01	07	1.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah *****) KDA
1.1.1.31.6	Pemberdayaan pesantren terpadu	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	1	31	6	4	4.1	1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA
1.1.1.31.23	Biaya operasional dayah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	1	31	23	4	4.1	1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Biaya operasional Balee Seumeubuet									1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Daurah Al-Qur'an Besanad untuk santri dan Guru Dayah									1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Pelatihan PEDAGOGIK bagi Guru Dayah									1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Pelatihan cara cepat baca kitab kuning bagi guru dayah									1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA
1.1.1.31.24	Penguatan dayah tahfisz Al-Qur'an dan Al-Hadist	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	1	31	24	4	4.1	1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA
1.1.2.64.4	Kerjasama pembantuan guru dari dinas pendidikan dan kementerian agama ke dayah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	64	4	4	4.1	1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA
1.1.2.66.1	Pengembangan, peningkatan sumber daya manusia	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	66	1	4	4.1	1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA
1.1.2.64.5	Pemberdayaan santri	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	64	5	4	4.1	1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
1.1.2.64.6	Beasiswa pendidikan Lanjutan santri berprestasi ke timur tengah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	64	6	4	4.1	1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
1.1.2.64.7	Beasiswa pendidikan lanjutan santri berprestasi kurang mampu	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	64	7	4	4.1	1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Beasiswa pendidikan santri berprestasi Tingkat Tsanawiyah dan Aliyah									1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
1.1.2.65.1	Pelatihan Pembinaan Seni Budaya Gampus, Zikir, Selawat, Dalil Khairat dan Berzanzi	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	65	1	4	4.1	1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
1.1.2.67	Program Pemberdayaan Ekonomi Mandiri Dayah berbasis Syariah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	67		4	4.1	1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
1.1.2.67.1	Pengembangan Unit Usaha Mandiri Dayah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	67	1	4	4.1	1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
1.1.2.67.2	Pengembangan Usaha Dayah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	67	2	4	4.1	1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Pembinaan Life Skill Santri									1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Aceh Selatan									1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
4.1.1.48.5	Penyelenggaraan Hari Santri Dayah/Pesantren	Dinas Pendidikan Dayah	4	1	1	48	5	4	4.1	1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
1.1.2.63.1	Pelatihan Manajemen Dayah dan Manajemen Aset Dayah serta Pimpinan Balee Seumeubeut	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	63	1	4	4.1	1.01.07.1.01.05	1	01	07	1.01	05	Pembinaan Manajemen Dayah *****) KDA
1.1.2.63.3	Penilaian Dayah bersih, Rapi, Estetis, Hijau (BEREH)	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	63	3	4	4.1	1.01.07.1.01.05	1	01	07	1.01	05	Pembinaan Manajemen Dayah *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.63.2	Pendataan, Pembinaan serta Verifikasi Dayah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	63	2	4	4.1	1.01.07.1.01.06	1	01	07	1.01	06	Penelitian dan Pengembangan Dayah *****) KDA
1.1.2.64.1	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidikan Dayah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	64	1	4	4.1	1.01.07.1.01.07	1	01	07	1.01	07	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah *****) KDA
1.1.2.64.2	Penguatan Pembinaan dan Pengembangan kurikulum Dayah	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	64	2	4	4.1	1.01.07.1.01.07	1	01	07	1.01	07	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah *****) KDA
1.1.2.64.3	Kegiatan Pengadaan Kitab sesuai kurikulum dayah salafi	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2	64	3	4	4.1	1.01.07.1.01.08	1	01	07	1.01	08	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) <u>Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah</u>									1.01.07.1.01.09	1	01	07	1.01	09	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Studi Banding Tgk Dayah ke Luar Daerah									1.01.07.1.01.10	1	01	07	1.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Kegiatan silaturahmi Ulama dan Umara									1.01.07.1.01.10	1	01	07	1.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah *****) KDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Kegiatan Raker dengan Organisasi Agama Islam									1.01.07.1.01.10	1	01	07	1.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah *****) KDA
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) <u>Penyusunan Renstra dan renja Perangkat Daerah</u>									X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	12	4	4.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	2	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	2	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	2	22	4	4.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor									X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor									X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur									X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	2	42	4	4.1	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/Operasional	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	2	42	4	4.1	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.1.2.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Dinas Pendidikan Dayah	5	1	2	3	1	4	4.1	X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya									X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu									X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan									X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN (1)	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN (1)	1.01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
URUSAN (2)		2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN (2)		2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
FUNGSI (1) DAN (2)	8	7			PENDIDIKAN ; KEBUDAYAAN
SUB FUNGSI (1) DAN (2)	8.01	7.01			PENDIDIKAN ; PARIWISATA
VARIAN KODE ORGANISASI	1-1	2-22	0-0	02	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.01	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
										1.01.02	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
										1.01.02.2.01	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2.1.1.16.1	Pembangunan gedung sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	1	1	1.1	1.01.02.2.01.01	1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2.1.1.16.3	Penambahan ruang kelas sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	3	1	1.1	1.01.02.2.01.02	1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
2.1.1.16.4	Penambahan ruang guru sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	4	1	1.1	1.01.02.2.01.03	1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.1.1.16.10	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	10	1	1.1	1.01.02.2.01.04	1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
2.1.1.16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	12	1	1.1	1.01.02.2.01.05	1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
2.1.1.16.11	Pembangunan ruang ibadah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	11	1	1.1	1.01.02.2.01.06	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2.1.1.16.14	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	14	1	1.1	1.01.02.2.01.06	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2.1.1.16.79	Pembangunan Pagar Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	79	1	1.1	1.01.02.2.01.06	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
2.1.1.16.81	Pembangunan Asrama Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	81	1	1.1	1.01.02.2.01.06	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2.1.1.16.82	Pembangunan Jamban Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	82	1	1.1	1.01.02.2.01.06	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2.1.1.16.2	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	2	1	1.1	1.01.02.2.01.07	1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
										1.01.02.2.01.08	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
										1.01.02.2.01.09	1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.1.1.16.52	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	52	1	1.1	1.01.02.2.01.10	1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
2.1.1.16.56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	56	1	1.1	1.01.02.2.01.10	1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
2.1.1.16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	54	1	1.1	1.01.02.2.01.11	1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
2.1.1.16.83	Rehabilitasi Sedang/Berat jamban Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	83	1	1.1	1.01.02.2.01.12	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2.1.1.16.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	42	1	1.1	1.01.02.2.01.13	1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
2.1.1.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	19	1	1.1	1.01.02.2.01.14	1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah
										1.01.02.2.01.15	1	01	02	2.01	15	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
										1.01.02.2.01.16	1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
2.1.1.16.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	15	1	1.1	1.01.02.2.01.17	1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa
										1.01.02.2.01.18	1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
										1.01.02.2.01.19	1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
										1.01.02.2.01.20	1	01	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
										1.01.02.2.01.21	1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
2.1.1.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	18	1	1.1	1.01.02.2.01.22	1	01	02	2.01	22	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
2.1.2.22.12	Pelaksanaan Ujian Nasional dan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	22	12	1	1.1	1.01.02.2.01.23	1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
										1.01.02.2.01.24	1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
2.1.1.16.58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	58	1	1.1	1.01.02.2.01.25	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.1.1.16.84	Try Out UN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	84	1	1.1	1.01.02.2.01.25	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
										1.01.02.2.01.26	1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
2.1.2.20.2	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	20	2	1	1.1	1.01.02.2.01.27	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
2.1.2.20.3	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	20	3	1	1.1	1.01.02.2.01.27	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
2.1.2.20.8	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	20	8	1	1.1	1.01.02.2.01.27	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
2.1.1.16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	76	1	1.1	1.01.02.2.01.28	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
2.1.1.16.78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	78	1	1.1	1.01.02.2.01.28	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
2.1.2.20.4	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	20	4	1	1.1	1.01.02.2.01.28	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
										1.01.02.2.02	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
										1.01.02.2.02.01	1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
										1.01.02.2.02.02	1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
										1.01.02.2.02.03	1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
										1.01.02.2.02.04	1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
										1.01.02.2.02.05	1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
2.1.1.16.5	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	5	1	1.1	1.01.02.2.02.06	1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium
2.1.1.16.8	Pembangunan ruang serba guna/aula	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	8	1	1.1	1.01.02.2.02.07	1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
										1.01.02.2.02.08	1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah
										1.01.02.2.02.09	1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
2.1.1.16.9	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	9	1	1.1	1.01.02.2.02.10	1	01	02	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir
										1.01.02.2.02.11	1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.01.02.2.02.12	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
										1.01.02.2.02.13	1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
2.1.1.16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	44	1	1.1	1.01.02.2.02.14	1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2.1.1.16.45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	45	1	1.1	1.01.02.2.02.15	1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
										1.01.02.2.02.16	1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
										1.01.02.2.02.17	1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
2.1.1.16.46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	46	1	1.1	1.01.02.2.02.18	1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
										1.01.02.2.02.19	1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
										1.01.02.2.02.20	1	01	02	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang/Berat Asrama
										1.01.02.2.02.21	1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
2.1.1.16.51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	51	1	1.1	1.01.02.2.02.22	1	01	02	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
										1.01.02.2.02.23	1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
										1.01.02.2.02.24	1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
										1.01.02.2.02.25	1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah
										1.01.02.2.02.26	1	01	02	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
										1.01.02.2.02.27	1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
										1.01.02.2.02.28	1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa
										1.01.02.2.02.29	1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
										1.01.02.2.02.30	1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
										1.01.02.2.02.31	1	01	02	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
										1.01.02.2.02.32	1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.01.02.2.02.33	1	01	02	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
										1.01.02.2.02.34	1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik
										1.01.02.2.02.35	1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
										1.01.02.2.02.36	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
										1.01.02.2.02.37	1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.1.1.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	70	1	1.1	1.01.02.2.02.38	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
										1.01.02.2.02.39	1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
										1.01.02.2.02.40	1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
										1.01.02.2.02.41	1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
										1.01.02.2.03	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2.1.1.15.1	Pembangunan gedung sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	1	1	1.1	1.01.02.2.03.01	1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2.1.1.15.3	Penambahan ruang kelas sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	3	1	1.1	1.01.02.2.03.01	1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2.1.1.15.4	Penambahan ruang guru sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	4	1	1.1	1.01.02.2.03.01	1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2.1.1.15.7	pembangunan sarana dan Prasarana bermain	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	7	1	1.1	1.01.02.2.03.02	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2.1.1.15.69	Pembangunan Jamban Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	69	1	1.1	1.01.02.2.03.02	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2.1.1.15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	42	1	1.1	1.01.02.2.03.03	1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2.1.1.15.70	Rehabilitasi sedang/berat jamban sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	70	1	1.1	1.01.02.2.03.04	1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
										1.01.02.2.03.04	1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
										1.01.02.2.03.05	1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
										1.01.02.2.03.06	1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
										1.01.02.2.03.07	1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebeluer PAUD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.01.02.2.03.08	1	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
2.1.1.15.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	19	1	1.1	1.01.02.2.03.09	1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD
2.1.1.15.15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	15	1	1.1	1.01.02.2.03.10	1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
										1.01.02.2.03.11	1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
2.1.1.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	18	1	1.1	1.01.02.2.03.12	1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
2.1.1.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	59	1	1.1	1.01.02.2.03.13	1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
2.1.1.15.66	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	66	1	1.1	1.01.02.2.03.14	1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
2.1.1.15.67	Pembinaan dan pengawasan Lembaga/Organisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	67	1	1.1	1.01.02.2.03.14	1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
2.1.2.22.1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	22	1	1	1.1	1.01.02.2.03.14	1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
2.1.2.20.13	Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	20	13	1	1.1	1.01.02.2.03.15	1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
2.1.2.20.14	Peningkatan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	20	14	1	1.1	1.01.02.2.03.16	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
2.1.1.15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	58	1	1.1	1.01.02.2.03.17	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
2.1.1.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	63	1	1.1	1.01.02.2.03.17	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
2.1.1.15.65	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	65	1	1.1	1.01.02.2.03.17	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
2.1.1.15.68	Pengembangan Kreatifitas melalui Perlombaan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	15	68	1	1.1	1.01.02.2.03.17	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
2.1.2.22.2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	22	2	1	1.1	1.01.02.2.03.17	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
										1.01.02.2.04	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.01	1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
2.1.1.18.14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	18	14	1	1.1	1.01.02.2.04.02	1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.03	1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.04	1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.01.02.2.04.05	1	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.06	1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.07	1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.08	1	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.09	1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.1.1.18.2	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	18	2	1	1.1	1.01.02.2.04.10	1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
2.1.2.22.10	Penyediaan Biaya Administrasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	22	10	1	1.1	1.01.02.2.04.10	1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.11	1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
2.1.1.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	16	68	1	1.1	1.01.02.2.04.12	1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.13	1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.14	1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
										1.01.02.2.04.15	1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.1.1.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	18	4	1	1.1	1.01.02.2.04.16	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
2.1.1.18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	1	18	12	1	1.1	1.01.02.2.04.16	1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
										1.01.04	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
										1.01.04.2.01	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.1.2.20.9	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	20	9	1	1.1	1.01.04.2.01.01	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.1.2.22.11	Penyusunan Profil Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	22	11	1	1.1	1.01.04.2.01.01	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5.1.2.5.5	Penilaian angka kredit fungsional Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	5	5	1	1.1	1.01.04.2.01.01	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.1.2.2.1	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	1	1	1.1	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										2.22	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
										2.22.02	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
										2.22.02.2.01	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.22.02.2.01.01	2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
										2.22.02.2.01.02	2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
										2.22.02.2.02	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.22.02.2.02.01	2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
1.1.5.16.3	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2.16)	1	1	5	16	3	2	2.16	2.22.02.2.02.02	2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
										2.22.02.2.02.03	2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
										2.22.02.2.03	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.22.02.2.03.01	2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
1.1.5.16.4	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2.16)	1	1	5	16	4	2	2.16	2.22.02.2.03.02	2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
										2.22.02.2.03.03	2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
										2.22.03	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
										2.22.03.2.01	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.1.5.17.1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2.16)	1	1	5	17	1	2	2.16	2.22.03.2.01.01	2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
1.1.5.17.5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2.16)	1	1	5	17	5	2	2.16	2.22.03.2.01.01	2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
										2.22.03.2.01.02	2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
										2.22.03.2.01.03	2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.22.04	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
										2.22.04.2.01	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.22.04.2.01.01	2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
										2.22.04.2.01.02	2	22	04	2.01	02	penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
										2.22.04.2.01.03	2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
										2.22.05	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
										2.22.05.2.01	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
										2.22.05.2.01.01	2	22	05	2.01	01	Register Cagar Budaya
1.1.5.16.5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2.16)	1	1	5	16	5	2	2.16	2.22.05.2.01.02	2	22	05	2.01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
1.1.5.16.10	Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2.16)	1	1	5	16	10	2	2.16	2.22.05.2.01.02	2	22	05	2.01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
										2.22.05.2.01.03	2	22	05	2.01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
										2.22.05.2.01.04	2	22	05	2.01	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
										2.22.05.2.01.05	2	22	05	2.01	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
										2.22.05.2.02	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
										2.22.05.2.02.01	2	22	05	2.02	01	Register Cagar Budaya
										2.22.05.2.02.02	2	22	05	2.02	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
1.1.5.18.3	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan anatar daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (2.16)	1	1	5	18	3	2	2.16	2.22.05.2.02.03	2	22	05	2.02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
										2.22.05.2.02.04	2	22	05	2.02	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
										2.22.05.2.02.05	2	22	05	2.02	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
										2.22.05.2.03	2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.22.05.2.03.01	2	22	05	2.03	01	Register Cagar Budaya

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.22.05.2.03.02	2	22	05	2.03	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
										2.22.05.2.03.03	2	22	05	2.03	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
										2.22.05.2.03.04	2	22	05	2.03	04	Pendayagunaan Cagar Budaya
										2.22.05.2.03.05	2	22	05	2.03	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
										2.22.06	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
										2.22.06.2.01	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
										2.22.06.2.01.01	2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
										2.22.06.2.01.02	2	22	06	2.01	02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
										2.22.06.2.01.03	2	22	06	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
										2.22.06.2.01.04	2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
										2.22.06.2.01.05	2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	19	1	1.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	1	1	1.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	2	1	1.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5.1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	6	1	1.1	X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	7	1	1.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	8	1	1.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	10	1	1.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	11	1	1.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	12	1	1.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.1.2.22.4	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	2	1	2	22	4	1	1.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	15	1	1.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	17	1	1.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	1	18	1	1.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	7	1	1.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	9	1	1.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	10	1	1.1	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
5.1.2.2.45	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	45	1	1.1	X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.46	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	46	1	1.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.47	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	47	1	1.1	X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	26	1	1.1	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	28	1	1.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
5.1.2.2.49	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	2	49	1	1.1	X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	3	2	1	1.1	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.1)	5	1	2	3	3	1	1.1	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	1.01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
FUNGSI	8				PENDIDIKAN
SUB FUNGSI	8.01				PENDIDIKAN
VARIAN KODE ORGANISASI	??	0-0	0-0	??	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.01	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2.1.2.62	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	2	1	2	62		4	4.1	1.01.08	1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH *****) KDA
										1.01.08.1.01	1	01	08	1.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh *****) KDA
										1.01.08.1.01.01	1	01	08	1.01	01	Penetapan Standar Pendidikan Aceh *****) KDA
2.1.2.62.1	Pelayanan Majelis Pendidikan Daerah	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	2	1	2	62	1	4	4.1	1.01.08.1.01.02	1	01	08	1.01	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh *****) KDA
										1.01.08.1.01.03	1	01	08	1.01	03	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Sekolah Tinggi/ Ma'had 'Aly, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh *****) KDA
										1.01.08.1.01.04	1	01	08	1.01	04	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian *****) KDA
										1.01.08.1.01.05	1	01	08	1.01	05	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama Dengan Majelis Pendidikan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan *****) KDA
										1.01.08.1.02	1	01	08	1.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh *****) KDA
										1.01.08.1.02.01	1	01	08	1.02	01	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.01.08.1.02.02	1	01	08	1.02	02	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh ***** KDA
										1.01.08.1.02.03	1	01	08	1.02	03	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal Bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh ***** KDA
										1.01.08.1.02.04	1	01	08	1.02	04	Pemberian Bantuan Pembiayaan Untuk Madrasah, Dayah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ***** KDA
										1.01.08.1.03	1	01	08	1.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh ***** KDA
										1.01.08.1.03.01	1	01	08	1.03	01	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ***** KDA
										1.01.08.1.03.02	1	01	08	1.03	02	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah ***** KDA
										1.01.08.1.03.03	1	01	08	1.03	03	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah ***** KDA
										1.01.08.1.03.04	1	01	08	1.03	04	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami ***** KDA
										1.01.08.1.04	1	01	08	1.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh ***** KDA
										1.01.08.1.04.01	1	01	08	1.04	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah ***** KDA
										1.01.08.1.04.02	1	01	08	1.04	02	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan ***** KDA
										1.01.08.1.05	1	01	08	1.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh ***** KDA
										1.01.08.1.05.01	1	01	08	1.05	01	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten***** KDA
2.1.2.62.2	Pemberdayaan Komite Sekolah (dari Program Peningkatan Mutu Pendidikan)	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	2	1	2	62	2	4	4.1	1.01.08.1.05.02	1	01	08	1.05	02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Aliyah dan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh ***** KDA
										1.01.08.1.05.03	1	01	08	1.05	03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh ***** KDA
										1.01.08.1.05.04	1	01	08	1.05	04	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ***** KDA
										1.01.08.1.05.05	1	01	08	1.05	05	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren ***** KDA
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1		4	4.1	X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
										X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	2	28	4	4.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
										X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	3	5	4	4.1	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
										X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5.1.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	5	1	2	5	3	4	4.1	X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	1.02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
FUNGSI	6				KESEHATAN
SUB FUNGSI	6.01				KESEHATAN
VARIAN KODE ORGANISASI	1-2	0-0	0-0	01	DINAS KESEHATAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.02	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
										1.02.02	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
										1.02.02.2.01	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
										1.02.02.2.01.01	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
										1.02.02.2.01.02	1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas
3.1.5.25.2	Pembangunan puskesmas pembantu	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	2	1	1.2	1.02.02.2.01.03	1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3.1.5.25.28	Pembangunan PSC 119	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	28	1	1.2	1.02.02.2.01.03	1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
										1.02.02.2.01.04	1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
										1.02.02.2.01.05	1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit
3.1.5.25.26	Peningkatan puskesmas rawat inap menjadi Rumah Sakit Tipe D	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	26	1	1.2	1.02.02.2.01.06	1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.02.2.01.07	1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
										1.02.02.2.01.08	1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
3.1.5.25.1	Pembangunan/revitalisasi puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	1	1	1.2	1.02.02.2.01.09	1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
3.1.5.25.24	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	24	1	1.2	1.02.02.2.01.09	1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
3.1.5.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	21	1	1.2	1.02.02.2.01.10	1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3.1.5.25.25	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAU)	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	25	1	1.2	1.02.02.2.01.10	1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
										1.02.02.2.01.11	1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
3.1.5.25.7	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	7	1	1.2	1.02.02.2.01.12	1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.39.1	Pengadaan tanah puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	5	39	1	1	1.2	1.02.02.2.01.12	1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.4	Pengadaan puskesmas keliling	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	4	1	1.2	1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.8	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	8	1	1.2	1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.29	Pengadaan ambulance transport	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	29	1	1.2	1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.30	Pengadaan mobiler puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	30	1	1.2	1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.31	Penyediaan instalasi air bersih	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	31	1	1.2	1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.32	Pengadaan instalasi pengolahan limbah	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	32	1	1.2	1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.34	Pengadaan Generator Set	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	34	1	1.2	1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.35	Pengadaan transportasi pendistribusian obat	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	35	1	1.2	1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.27	Pengadaan alat kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	27	1	1.2	1.02.02.2.01.14	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
										1.02.02.2.01.15	1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
3.1.1.15.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	1	15	1	1	1.2	1.02.02.2.01.16	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin
3.1.1.15.1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	1	15	1	1	1.2	1.02.02.2.01.17	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
										1.02.02.2.01.18	1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
										1.02.02.2.01.19	1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.01.20	1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.1.5.25.14	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	14	1	1.2	1.02.02.2.01.20	1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
										1.02.02.2.02	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1.32.4	Penyuluhan/Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan	3	1	1	32	4	1	1.2	1.02.02.2.02.01	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
3.1.2.16.17	Pembinaan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	17	1	1.2	1.02.02.2.02.01	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.01	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
3.1.2.33.6	Sosialisasi pelayanan darah Quick Quins	Dinas Kesehatan	3	1	2	33	6	1	1.2	1.02.02.2.02.01	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
3.1.1.32.5	Pembinaan kesehatan ibu melahirkan	Dinas Kesehatan	3	1	1	32	5	1	1.2	1.02.02.2.02.02	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.02	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.1.2.16.25	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	25	1	1.2	1.02.02.2.02.02	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1.32.6	Pembinaan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	3	1	1	32	6	1	1.2	1.02.02.2.02.03	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.03	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
3.1.1.29.4	Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita	Dinas Kesehatan	3	1	1	29	4	1	1.2	1.02.02.2.02.04	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
3.1.1.29.8	Pemantauan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan	3	1	1	29	8	1	1.2	1.02.02.2.02.04	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.04	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.05	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
3.1.2.16.26	Usaha kesehatan sekolah	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	26	1	1.2	1.02.02.2.02.05	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
3.1.2.16.18	Kesehatan usia sekolah dan remaja	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	18	1	1.2	1.02.02.2.02.06	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.06	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
3.1.2.38.1	Pembinaan posbindu	Dinas Kesehatan	3	1	2	38	1	1	1.2	1.02.02.2.02.06	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
3.1.1.30.1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	1	30	1	1	1.2	1.02.02.2.02.07	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.07	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
3.1.2.16.27	Pelayanan kesehatan usia lanjut	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	27	1	1.2	1.02.02.2.02.07	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.08	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.09	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
										1.02.02.2.02.10	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.11	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.4.22.13	Penanggulangan penyakit TBC	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	13	1	1.2	1.02.02.2.02.11	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.12	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
3.1.4.22.18	Pelayanan dan pencegahan penyakit menular seksual (PMS)	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	18	1	1.2	1.02.02.2.02.12	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
3.1.2.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	12	1	1.2	1.02.02.2.02.13	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
3.1.2.16.11	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	11	1	1.2	1.02.02.2.02.14	1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
3.1.1.20.1	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Dinas Kesehatan	3	1	1	20	1	1	1.2	1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.1.1.20.2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Dinas Kesehatan	3	1	1	20	2	1	1.2	1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.1.1.20.3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Dinas Kesehatan	3	1	1	20	3	1	1.2	1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.1.1.20.4	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Dinas Kesehatan	3	1	1	20	4	1	1.2	1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.1.1.20.7	Seminar ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan	3	1	1	20	7	1	1.2	1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.1.1.20.8	Sosialisasi ruang laktasi	Dinas Kesehatan	3	1	1	20	8	1	1.2	1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.1.1.24.8	Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar	Dinas Kesehatan	3	1	1	24	8	1	1.2	1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.1.2.16.19	Pembinaan pencegahan stunting	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	19	1	1.2	1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.1.2.16.31	Kesehatan kerja dan olah raga	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	31	1	1.2	1.02.02.2.02.16	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.17	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3.1.2.21.3	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Dinas Kesehatan	3	1	2	21	3	1	1.2	1.02.02.2.02.17	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.2.21.5	Deklarasi desa ODF (open devocation free)	Dinas Kesehatan	3	1	2	21	5	1	1.2	1.02.02.2.02.17	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3.1.2.21.6	Lomba sekolah dan kantor sehat	Dinas Kesehatan	3	1	2	21	6	1	1.2	1.02.02.2.02.17	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3.1.2.21.7	Gerakan TTU sehat	Dinas Kesehatan	3	1	2	21	7	1	1.2	1.02.02.2.02.17	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3.1.2.21.8	Workshop prasarana pengelolaan limbah B3 dalam rangka akreditasi puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	2	21	8	1	1.2	1.02.02.2.02.17	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3.1.2.28.10	Kemitraan pengolahan limbah-limbah puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	2	28	10	1	1.2	1.02.02.2.02.17	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Pemusnahan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (Cadangan Sub Keg apabila Usulan Kemendagri Tidak disetujui)									1.02.02.2.02.17	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.18	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
3.1.2.19.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Dinas Kesehatan	3	1	2	19	1	1	1.2	1.02.02.2.02.18	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
3.1.2.19.10	Pendataan / Pembinaan PIS-PK dengan 12 Indikator	Dinas Kesehatan	3	1	2	19	10	1	1.2	1.02.02.2.02.18	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
3.1.2.16.29	Pelayanan kesehatan tradisional	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	29	1	1.2	1.02.02.2.02.19	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
3.1.2.33.4	Pelayanan kesehatan tradisional	Dinas Kesehatan	3	1	2	33	4	1	1.2	1.02.02.2.02.19	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.20	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
3.1.4.22.9	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	9	1	1.2	1.02.02.2.02.20	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
3.1.4.22.12	Penemuan dan tata laksana penderita pada penyakit menular	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	12	1	1.2	1.02.02.2.02.20	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.21	1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
3.1.2.16.23	Penyuluhan/sosialisasi/ pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	23	1	1.2	1.02.02.2.02.21	1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
3.1.2.38.2	Penyuluhan/Sosialisasi/Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Dinas Kesehatan	3	1	2	38	2	1	1.2	1.02.02.2.02.21	1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.2.38.3	Peningkatan dan Koordinasi Tim Pengelolaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)	Dinas Kesehatan	3	1	2	38	3	1	1.2	1.02.02.2.02.21	1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
										1.02.02.2.02.22	1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
3.1.1.24.4	Pelayanan sunatan masal	Dinas Kesehatan	3	1	1	24	4	1	1.2	1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.1.2.16.9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	9	1	1.2	1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.1.2.16.16	Penyelenggaraan UKGMD/UKGS	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	16	1	1.2	1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.1.2.16.24	Penyuluhan/sosialisasi/ pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	24	1	1.2	1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.1.2.16.30	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	30	1	1.2	1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.1.2.16.32	Perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	32	1	1.2	1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.1.2.16.34	Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	34	1	1.2	1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.1.2.33.2	Kesehatan rujukan	Dinas Kesehatan	3	1	2	33	2	1	1.2	1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.1.2.33.3	Pelayanan spesialistik	Dinas Kesehatan	3	1	2	33	3	1	1.2	1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
3.1.2.16.35	Public Safety Center	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	35	1	1.2	1.02.02.2.02.24	1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
3.1.2.33.9	Pelayanan Public safety center	Dinas Kesehatan	3	1	2	33	9	1	1.2	1.02.02.2.02.24	1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
3.1.2.16.21	Operasional kesehatan sekunder (BOK-DINKES)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	21	1	1.2	1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.1.4.22.1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	1	1	1.2	1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.1.4.22.2	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	2	1	1.2	1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.1.4.22.8	Peningkatan imunisasi	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	8	1	1.2	1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.4.22.14	Penanggulangan penyakit Kusta	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	14	1	1.2	1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.1.4.22.15	Penanggulangan penyakit DBD	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	15	1	1.2	1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.1.4.22.16	Penanggulangan penyakit malaria	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	16	1	1.2	1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.1.4.22.17	Penanggulangan penyakit kecacingan	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	17	1	1.2	1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.1.4.22.20	Pelaksanaan tatalaksana penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	20	1	1.2	1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
3.1.1.24.11	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	3	1	1	24	11	1	1.2	1.02.02.2.02.26	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
3.1.1.24.12	Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Kapitasi	Dinas Kesehatan	3	1	1	24	12	1	1.2	1.02.02.2.02.26	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
3.1.1.24.13	Pelayanan Jaminan Kesehatan Non Kapitasi	Dinas Kesehatan	3	1	1	24	13	1	1.2	1.02.02.2.02.26	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
										1.02.02.2.02.27	1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
										1.02.02.2.02.28	1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
										1.02.02.2.02.29	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
										1.02.02.2.02.30	1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
										1.02.02.2.02.31	1	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
										1.02.02.2.02.32	1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
3.1.2.16.22	Upaya kesehatan masyarakat puskesmas (BOK Puskesmas)	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	22	1	1.2	1.02.02.2.02.33	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas
3.1.1.15.7	Pelayanan Kesehatan Distribusi Obat dan E-Logistik	Dinas Kesehatan	3	1	1	15	7	1	1.2	1.02.02.2.02.34	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3.1.2.16.33	Pelayanan kesehatan distribusi obat dan e-logistik	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	33	1	1.2	1.02.02.2.02.34	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.3.36.2	Akreditasi Puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	2	1	1.2	1.02.02.2.02.35	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
										1.02.02.2.02.36	1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
3.1.4.22.19	Layanan kewaspadaan dini dan respon penyakit potensi KLB	Dinas Kesehatan	3	1	4	22	19	1	1.2	1.02.02.2.02.37	1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
										1.02.02.2.03	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
3.1.2.16.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	15	1	1.2	1.02.02.2.03.01	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
3.1.2.37.1	Monitoring dan evaluasi	Dinas Kesehatan	3	1	2	37	1	1	1.2	1.02.02.2.03.01	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
3.1.2.37.1	Monitoring dan evaluasi	Dinas Kesehatan	3	1	2	37	1	1	1.2	1.02.02.2.03.02	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
3.1.5.25.33	Pengadaan alat sistem informasi kesehatan (SIK)	Dinas Kesehatan	3	1	5	25	33	1	1.2	1.02.02.2.03.03	1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
										1.02.02.2.04	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
										1.02.02.2.04.01	1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
3.1.2.33.1	Registrasi fasilitas kesehatabn	Dinas Kesehatan	3	1	2	33	1	1	1.2	1.02.02.2.04.02	1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1.15.4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Dinas Kesehatan	3	1	1	15	4	1	1.2	1.02.02.2.04.03	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3.1.2.33.5	Peningkatan mutu dan akreditasi puskesmas	Dinas Kesehatan	3	1	2	33	5	1	1.2	1.02.02.2.04.03	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3.1.3.23.1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	3	23	1	1	1.2	1.02.02.2.04.03	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
3.1.3.23.2	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	3	23	2	1	1.2	1.02.02.2.04.03	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
										1.02.02.2.04.04	1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
										1.02.03	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.03.2.01	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
3.1.3.36.3	Registrasi dan akreditasi fasilitas tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	3	1	1.2	1.02.03.2.01.01	1	02	03	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
										1.02.03.2.02	1	02	03	2.02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
										1.02.03.2.02.01	1	02	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.3.36.5	Registrasi dan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	5	1	1.2	1.02.03.2.02.02	1	02	03	2.02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
										1.02.03.2.02.03	1	02	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.02.03.2.03	1	02	03	2.03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
3.1.3.36.4	Perencanaan, pendayagunaan dan penempatan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	4	1	1.2	1.02.03.2.03.01	1	02	03	2.03	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.2.28.11	Kemitraan dengan dokter umum dan dokter gigi (PTT Daerah)	Dinas Kesehatan	3	1	2	28	11	1	1.2	1.02.03.2.03.02	1	02	03	2.03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
3.1.3.36.4	Perencanaan, pendayagunaan dan penempatan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	4	1	1.2	1.02.03.2.03.02	1	02	03	2.03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
										1.02.03.2.04	1	02	03	2.04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.1.2.19.4	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	2	19	4	1	1.2	1.02.03.2.04.01	1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.2.33.7	Workshop management fasilitator dan keselamatan (MFK peralatan medis dan utilitas)	Dinas Kesehatan	3	1	2	33	7	1	1.2	1.02.03.2.04.01	1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.2.33.8	Pembinaan puskesmas yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar	Dinas Kesehatan	3	1	2	33	8	1	1.2	1.02.03.2.04.01	1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.3.36.1	Peningkatan keterampilan profesionalisme tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	1	1	1.2	1.02.03.2.04.01	1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.3.36.5	Registrasi dan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	5	1	1.2	1.02.03.2.04.01	1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.1.3.36.5	Registrasi dan uji kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	5	1	1.2	1.02.03.2.04.02	1	02	03	2.04	02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.03.2.05	1	02	03	2.05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										1.02.03.2.05.01	1	02	03	2.05	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.02.03.2.05.02	1	02	03	2.05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.02.04	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
										1.02.04.2.01	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian									1.02.04.2.01.01	1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
										1.02.04.2.01.02	1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
										1.02.04.2.01.03	1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
										1.02.04.2.02	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
										1.02.04.2.02.01	1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
										1.02.04.2.02.02	1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
										1.02.04.2.03	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3.1.2.31.1	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	Dinas Kesehatan	3	1	2	31	1	1	1.2	1.02.04.2.03.01	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3.1.2.31.2	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Dinas Kesehatan	3	1	2	31	2	1	1.2	1.02.04.2.03.01	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
										1.02.04.2.04	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.2.31.3	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant	Dinas Kesehatan	3	1	2	31	3	1	1.2	1.02.04.2.04.01	1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
										1.02.04.2.05	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
										1.02.04.2.05.01	1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
										1.02.04.2.06	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
										1.02.04.2.06.01	1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
										1.02.04.2.06.02	1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
										1.02.04.2.07	1	02	04	2.07		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Kadaluaarsa Kabupaten / Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Pemsuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai	Dinas Kesehatan								1.02.04.2.07??	1	02	04	2.07	??	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Kadaluaarsa Kabupaten / Kota
										1.02.05	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
										1.02.05.2.01	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3.1.2.19.11	Pembinaan pemucuan desa siaga aktif	Dinas Kesehatan	3	1	2	19	11	1	1.2	1.02.05.2.01.01	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.1.2.35.1	Pembentukan/pembinaan pos gizi/dapur sehat (Tim Penggerak PKK)	Dinas Kesehatan	3	1	2	35	1	1	1.2	1.02.05.2.01.01	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.1.3.36.6	Peringatan Hari-hari besar Nasional	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	6	1	1.2	1.02.05.2.01.01	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.1.3.36.7	Peringatan Hari-hari besar daerah	Dinas Kesehatan	3	1	3	36	7	1	1.2	1.02.05.2.01.01	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.1.1.40.1	Penyelenggaraan hari-hari besar nasional	Dinas Kesehatan	5	1	1	40	1	1	1.2	1.02.05.2.01.01	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
										1.02.05.2.02	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3.1.2.19.2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Dinas Kesehatan	3	1	2	19	2	1	1.2	1.02.05.2.02.01	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.2.19.6	Gerakan masyarakat sehat (GERMAS)	Dinas Kesehatan	3	1	2	19	6	1	1.2	1.02.05.2.02.01	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3.1.2.19.7	Gerakan Layanan Mobil curhat	Dinas Kesehatan	3	1	2	19	7	1	1.2	1.02.05.2.02.01	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3.1.2.19.8	Sosialisasi perda KTR	Dinas Kesehatan	3	1	2	19	8	1	1.2	1.02.05.2.02.01	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3.1.2.19.9	Kampanye Smoke Free Generation	Dinas Kesehatan	3	1	2	19	9	1	1.2	1.02.05.2.02.01	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
										1.02.05.2.03	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										1.02.05.2.03.01	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	19	1	1.2	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB_KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	2	1	1.2	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	3	1	1.2	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5.1.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	6	1	1.2	X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.2.16.20	Dukungan manajemen BOK, JAMPERSAL dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	20	1	1.2	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	7	1	1.2	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	8	1	1.2	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.1.1.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	9	1	1.2	X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.1.2.16.20	Dukungan manajemen BOK, JAMPERSAL dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	20	1	1.2	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	10	1	1.2	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.1.2.16.20	Dukungan manajemen BOK, JAMPERSAL dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Dinas Kesehatan	3	1	2	16	20	1	1.2	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	11	1	1.2	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	12	1	1.2	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	13	1	1.2	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	15	1	1.2	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	17	1	1.2	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	18	1	1.2	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.1.1.2.4	Pengadaan mobil jabatan	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	4	1	1.2	X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	5	1	1.2	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	7	1	1.2	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	9	1	1.2	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.1.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	22	1	1.2	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	24	1	1.2	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	28	1	1.2	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.1.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	42	1	1.2	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.1.1.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	44	1	1.2	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.1.2.45	Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Transportasi Ambulance Puskesmas	Dinas Kesehatan	5	1	1	2	45	1	1.2	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
3.1.2.28.9	Kemitraan penyediaan jasa asuransi jaminan kesehatan jiwa/tenaga kerja	Dinas Kesehatan	3	1	2	28	9	1	1.2	X.XX.01.2.03.??	X	XX	01	2.03	??	Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap Daerah
5.1.1.1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS /Bunyi sebenarnya di renstra (DPA 2019) yaitu "Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Jiwa"	Dinas Kesehatan	5	1	1	1	4	1	1.2	X.XX.01.2.03.??	X	XX	01	2.03	??	Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap Daerah
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
										X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Kesehatan	5	1	1	3	5	1	1.2	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	1.02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
FUNGSI	6				KESEHATAN
SUB FUNGSI	6.01				KESEHATAN
VARIAN KODE ORGANISASI	1-2	0-0	0-0	02	BLUD RSUD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.02	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
										1.02.02	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
										1.02.02.2.01	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.2.2.26.1	Pembangunan rumah sakit	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	1	1	1.2	1.02.02.2.01.01	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
3.2.2.26.16	Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	16	1	1.2	1.02.02.2.01.01	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
3.2.2.26.27	Pembangunan Rumah Sakit (DBH)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	27	1	1.2	1.02.02.2.01.01	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
3.2.2.26.28	Pembangunan Rumah Sakit (DAK)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	28	1	1.2	1.02.02.2.01.01	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
3.2.2.26.30	Pembangunan Rumah Sakit (OTSUS)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	30	1	1.2	1.02.02.2.01.01	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
3.2.2.26.31	Pembuatan Tempat Bermain Anak	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	31	1	1.2	1.02.02.2.01.01	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
3.2.2.26.32	Penataan Landscape	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	32	1	1.2	1.02.02.2.01.01	1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
										1.02.02.2.01.02	1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas
										1.02.02.2.01.03	1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.02.2.01.04	1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
										1.02.02.2.01.05	1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit
										1.02.02.2.01.06	1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas
										1.02.02.2.01.07	1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	1.02.02.2.01.08	1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
										1.02.02.2.01.09	1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
										1.02.02.2.01.10	1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
										1.02.02.2.01.11	1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
										1.02.02.2.01.12	1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.2.2.26.20	Pengadaan ambulance/mobil jenazah	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	20	1	1.2	1.02.02.2.01.13	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.2.2.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	18	1	1.2	1.02.02.2.01.14	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.2.2.26.29	Pengadaan Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit (OTSUS)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	29	1	1.2	1.02.02.2.01.14	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	1.02.02.2.01.14	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	1.02.02.2.01.15	1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pengadaan Obat, Vaksin)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	1.02.02.2.01.16	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pengadaan Bahan Habis Pakai)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	1.02.02.2.01.17	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai
										1.02.02.2.01.18	1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	1.02.02.2.01.19	1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	1.02.02.2.01.20	1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
										1.02.02.2.02	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.02.2.02.01	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
										1.02.02.2.02.02	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
										1.02.02.2.02.03	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
										1.02.02.2.02.04	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
										1.02.02.2.02.05	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
										1.02.02.2.02.06	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
										1.02.02.2.02.07	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
										1.02.02.2.02.08	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
										1.02.02.2.02.09	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
										1.02.02.2.02.10	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
										1.02.02.2.02.11	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
										1.02.02.2.02.12	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
										1.02.02.2.02.13	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
										1.02.02.2.02.14	1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
										1.02.02.2.02.15	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
										1.02.02.2.02.16	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
										1.02.02.2.02.17	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3.2.1.16.27	Penyuluhan/sosialisasi/ pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	16	27	1	1.2	1.02.02.2.02.18	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
										1.02.02.2.02.19	1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
										1.02.02.2.02.20	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
										1.02.02.2.02.21	1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.02.2.02.22	1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
										1.02.02.2.02.23	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
										1.02.02.2.02.24	1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
										1.02.02.2.02.25	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
										1.02.02.2.02.26	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
										1.02.02.2.02.27	1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
										1.02.02.2.02.28	1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
										1.02.02.2.02.29	1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
										1.02.02.2.02.30	1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
										1.02.02.2.02.31	1	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Operasional Pelayanan Rumah Sakit)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	1.02.02.2.02.32	1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
										1.02.02.2.02.33	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas
										1.02.02.2.02.34	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
										1.02.02.2.02.35	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
										1.02.02.2.02.36	1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
										1.02.02.2.02.37	1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
										1.02.02.2.03	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
										1.02.02.2.03.01	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
										1.02.02.2.03.02	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
										1.02.02.2.03.03	1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
										1.02.02.2.04	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.02.2.04.01	1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D
										1.02.02.2.04.02	1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										1.02.02.2.04.03	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
										1.02.02.2.04.04	1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
										1.02.03	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
										1.02.03.2.01	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
										1.02.03.2.01.01	1	02	03	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
										1.02.03.2.02	1	02	03	2.02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
										1.02.03.2.02.01	1	02	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.02.03.2.02.02	1	02	03	2.02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	1.02.03.2.02.03	1	02	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.02.03.2.03	1	02	03	2.03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
										1.02.03.2.03.01	1	02	03	2.03	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.02.03.2.03.02	1	02	03	2.03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
										1.02.03.2.04	1	02	03	2.04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										1.02.03.2.04.01	1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.02.03.2.04.02	1	02	03	2.04	02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan
										1.02.03.2.05	1	02	03	2.05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										1.02.03.2.05.01	1	02	03	2.05	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
										1.02.03.2.05.02	1	02	03	2.05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.04	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
										1.02.04.2.01	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
										1.02.04.2.01.01	1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
										1.02.04.2.01.02	1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
										1.02.04.2.01.03	1	02	04	2.01	03	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
										1.02.04.2.02	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
										1.02.04.2.02.01	1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
										1.02.04.2.02.02	1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
										1.02.04.2.03	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
										1.02.04.2.03.01	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
										1.02.04.2.04	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
										1.02.04.2.04.01	1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
										1.02.04.2.05	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
										1.02.04.2.05.01	1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan
										1.02.04.2.06	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
										1.02.04.2.06.01	1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
										1.02.04.2.06.02	1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
										1.02.05	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.02.05.2.01	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
										1.02.05.2.01.01	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
										1.02.05.2.02	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
										1.02.05.2.02.01	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
										1.02.05.2.03	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										1.02.05.2.03.01	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
										2.10.05	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
										2.10.05.2.01	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.2.1.16.8	Pengadaan Tanah	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	16	8	1	1.2	2.10.05.2.01.01	2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengadaan Tanah	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	16	8	1	1.2	2.10.05.2.01.02	2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	5	1	2	1	19	1	1.2	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	5	1	2	1	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.2.1.36.1	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Penyediaan Alat Tulis Kantor)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Beban Cetak dan Penggandaan)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	5	1	2	1	15	1	1.2	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Beban Makanan dan Minuman)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	5	1	2	1	18	1	1.2	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	5	1	2	2	7	1	1.2	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pengadaan Peralatan Gedung Kantor)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	5	1	2	2	9	1	1.2	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pengadaan Mebeleur)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
3.2.2.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	2	26	21	1	1.2	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MSI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4(empat) )	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
	Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BLUD (Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional)	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	3	2	1	36	1	1	1.2	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	BLUD RSUD dr. H.Yuliddin Away	5	1	2	3	2	1	1.2	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
										X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	1.03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
FUNGSI (1); (2)	5	4				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM; PERLIDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB FUNGSI (1); (2)	5.01	4.01				PEKERJAAN UMUM; PENATAAN RUANG
VARIAN KODE ORGANISASI	1-3	0-0	0-0	01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.03	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										1.03.02	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
										1.03.02.2.01	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1.28.13	Perencanaan Normalisasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	13	1	1.3	1.03.02.2.01.03	1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
6.1.1.28.14	Perencanaan Prasarana Pengaman Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	14	1	1.3	1.03.02.2.01.03	1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
6.1.1.24.29	Perencanaan Prasarana Pengaman Pantai (dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	29	1	1.3	1.03.02.2.01.03	1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
6.1.1.28.12	Perencanaan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai (dari Program Pengendalian Banjir)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	12	1	1.3	1.03.02.2.01.03	1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
6.1.1.34.2	Penyusunan Sistem Informasi/ Database Irigasi dan Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	34	2	1	1.3	1.03.02.2.01.04	1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
6.1.1.34.3	Penyusunan Sistem Informasi/ Database Sungai, Rawa dan Waduk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	34	3	1	1.3	1.03.02.2.01.04	1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
6.1.1.24.24	Penyusunan Sistem Informasi/ Database Irigasi (dari Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	24	1	1.3	1.03.02.2.01.04	1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	20	1	1.3	1.03.02.2.01.06	1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	6	1	1.3	1.03.02.2.01.09	1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai
	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	6	1	1.3	1.03.02.2.01.10	1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
6.1.1.28.6	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	6	1	1.3	1.03.02.2.01.11	1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	6	1	1.3	1.03.02.2.01.12	1	03	02	2.01	12	Pembangunan Kanal Banjir
	Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	6	1	1.3	1.03.02.2.01.14	1	03	02	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	9	1	1.3	1.03.02.2.01.17	1	03	02	2.01	17	Pembangunan Breakwater
6.1.1.28.9	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	9	1	1.3	1.03.02.2.01.18	1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.01.21	1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.01.29	1	03	02	2.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	9	1	1.3	1.03.02.2.01.32	1	03	02	2.01	32	Rehabilitasi Breakwater
6.1.1.28.15	Normalisasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	28	15	1	1.3	1.03.02.2.01.46	1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.01.49	1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.01.56	1	03	02	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
6.1.1.24.1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	1	1	1.3	1.03.02.2.02.01	1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
6.1.1.24.18	Perencanaan Peningkatan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	18	1	1.3	1.03.02.2.02.01	1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
6.1.1.24.19	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	19	1	1.3	1.03.02.2.02.01	1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
6.1.1.24.20	Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	20	1	1.3	1.03.02.2.02.02	1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
	Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	20	1	1.3	1.03.02.2.02.03	1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	20	1	1.3	1.03.02.2.02.04	1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
	Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	20	1	1.3	1.03.02.2.02.05	1	03	02	2.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
	Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	20	1	1.3	1.03.02.2.02.06	1	03	02	2.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
	Pembangunan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	20	1	1.3	1.03.02.2.02.07	1	03	02	2.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
6.1.1.24.21	Peningkatan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	21	1	1.3	1.03.02.2.02.08	1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
	Peningkatan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	21	1	1.3	1.03.02.2.02.09	1	03	02	2.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi
	Peningkatan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	21	1	1.3	1.03.02.2.02.10	1	03	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
	Peningkatan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	21	1	1.3	1.03.02.2.02.11	1	03	02	2.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
	Peningkatan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	21	1	1.3	1.03.02.2.02.12	1	03	02	2.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
	Peningkatan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	21	1	1.3	1.03.02.2.02.13	1	03	02	2.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
6.1.1.24.10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.14	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.15	1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.16	1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.17	1	03	02	2.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.18	1	03	02	2.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.19	1	03	02	2.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.21	1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.22	1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.23	1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.24	1	03	02	2.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.25	1	03	02	2.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	24	10	1	1.3	1.03.02.2.02.26	1	03	02	2.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
										1.03.03	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
										1.03.03.2.01	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.03.2.01.01	1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
										1.03.03.2.01.02	1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
										1.03.03.2.01.03	1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan
										1.03.03.2.01.04	1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan
										1.03.03.2.01.05	1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
										1.03.03.2.01.06	1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
										1.03.03.2.01.07	1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan
										1.03.03.2.01.08	1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan
										1.03.03.2.01.09	1	03	03	2.01	09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum
										1.03.03.2.01.10	1	03	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
										1.03.03.2.01.11	1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
										1.03.03.2.01.12	1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
										1.03.03.2.01.13	1	03	03	2.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
										1.03.03.2.01.14	1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
										1.03.03.2.01.15	1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
										1.03.03.2.01.16	1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.04	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
										1.03.04.2.01	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.04.2.01.01	1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
										1.03.04.2.01.02	1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
										1.03.04.2.01.03	1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
										1.03.04.2.01.04	1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
										1.03.04.2.01.05	1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
										1.03.04.2.01.06	1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan
										1.03.04.2.01.07	1	03	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
										1.03.04.2.01.08	1	03	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
										1.03.05	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
										1.03.05.2.01	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.05.2.01.01	1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.05.2.01.02	1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.03	1	03	05	2.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.04	1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.05	1	03	05	2.01	05	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.06	1	03	05	2.01	06	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.07	1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.08	1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB_KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.05.2.01.09	1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.10	1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.06	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
										1.03.06.2.01	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.06.2.01.01	1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
										1.03.06.2.01.02	1	03	06	2.01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
										1.03.06.2.01.03	1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
										1.03.06.2.01.04	1	03	06	2.01	04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
										1.03.06.2.01.05	1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
										1.03.06.2.01.06	1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
										1.03.06.2.01.07	1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
										1.03.06.2.01.08	1	03	06	2.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
										1.03.06.2.01.09	1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
										1.03.07	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
										1.03.07.2.01	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.07.2.01.01	1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.03.07.2.01.02	1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.03.07.2.01.03	1	03	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.03.07.2.01.04	1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
										1.03.08.2.01.01	1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
6.1.1.23.2	Pembangunan gedung workshop	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	23	2	1	1.3	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1.23.3	Pembangunan laboratorium kebinamargaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	23	3	1	1.3	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1.23.8	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	23	8	1	1.3	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.08.2.01.03	1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
										1.03.08.2.01.04	1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.08.2.01.05	1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota
										1.03.08.2.01.06	1	03	08	2.01	06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
										1.03.08.2.01.07	1	03	08	2.01	07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan tingkat Kabupaten/Kota
										1.03.08.2.01.08	1	03	08	2.01	08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.08.2.01.09	1	03	08	2.01	09	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
										1.03.08.2.01.10	1	03	08	2.01	10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
										1.03.08.2.01.11	1	03	08	2.01	11	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
										1.03.09	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
										1.03.09.2.01	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
6.1.2.31.7	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	7	1	1.3	1.03.09.2.01.01	1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
										1.03.09.2.01.02	1	03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
										1.03.09.2.01.03	1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.09.2.01.04	1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
										1.03.09.2.01.05	1	03	09	2.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
										1.03.09.2.01.06	1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
										1.03.10	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
										1.03.10.2.01	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
6.1.1.15.1	Perencanaan Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	15	1	1	1.3	1.03.10.2.01.01	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
6.1.1.15.2	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	15	2	1	1.3	1.03.10.2.01.01	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
6.1.1.18.1	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	18	1	1	1.3	1.03.10.2.01.01	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
6.1.1.18.2	Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	18	2	1	1.3	1.03.10.2.01.01	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
6.1.1.7.1	Perencanaan Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	7	1	1	1.3	1.03.10.2.01.01	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
6.1.1.7.2	Perencanaan Peningkatan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	7	2	1	1.3	1.03.10.2.01.01	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
										1.03.10.2.01.02	1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan
	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	7	3	1	1.3	1.03.10.2.01.03	1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan
6.1.1.34.1	Penyusunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	34	1	1	1.3	1.03.10.2.01.04	1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
6.1.1.15.3	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	15	3	1	1.3	1.03.10.2.01.05	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan
6.1.1.7.3	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	7	3	1	1.3	1.03.10.2.01.06	1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar
	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	7	3	1	1.3	1.03.10.2.01.07	1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	7	3	1	1.3	1.03.10.2.01.08	1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan
6.1.1.18.3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	18	3	1	1.3	1.03.10.2.01.09	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	18	3	1	1.3	1.03.10.2.01.10	1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	18	3	1	1.3	1.03.10.2.01.11	1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
6.1.1.15.4	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	15	4	1	1.3	1.03.10.2.01.12	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan
										1.03.10.2.01.13	1	03	10	2.01	13	Pembangunan Flyover
										1.03.10.2.01.14	1	03	10	2.01	14	Pembangunan Underpass
										1.03.10.2.01.15	1	03	10	2.01	15	Pembangunan Terowongan/Tunnel
	Peningkatan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	7	4	1	1.3	1.03.10.2.01.16	1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan
6.1.1.7.4	Peningkatan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	7	4	1	1.3	1.03.10.2.01.17	1	03	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan
6.1.1.18.4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	18	4	1	1.3	1.03.10.2.01.18	1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan
	Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	18	4	1	1.3	1.03.10.2.01.19	1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
	Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	18	4	1	1.3	1.03.10.2.01.20	1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
										1.03.10.2.01.21	1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
										1.03.11	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
										1.03.11.2.01	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
										1.03.11.2.01.01	1	03	11	2.01	01	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi
										1.03.11.2.01.02	1	03	11	2.01	02	Penyiapan Intstruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
										1.03.11.2.01.03	1	03	11	2.01	03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
										1.03.11.2.01.04	1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
										1.03.11.2.01.05	1	03	11	2.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
										1.03.11.2.01.06	1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
										1.03.11.2.01.07	1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB_KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.11.2.01.08	1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
										1.03.11.2.02	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.11.2.02.01	1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
										1.03.11.2.02.02	1	03	11	2.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
										1.03.11.2.02.03	1	03	11	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
										1.03.11.2.02.04	1	03	11	2.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU
										1.03.11.2.02.05	1	03	11	2.02	05	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur
										1.03.11.2.02.06	1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha
										1.03.11.2.02.07	1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
										1.03.11.2.02.08	1	03	11	2.02	08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi
										1.03.11.2.02.09	1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
										1.03.11.2.02.10	1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
										1.03.11.2.02.11	1	03	11	2.02	11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
										1.03.11.2.03	1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
										1.03.11.2.03.01	1	03	11	2.03	01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota
										1.03.11.2.03.02	1	03	11	2.03	02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
										1.03.11.2.03.03	1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
										1.03.11.2.03.04	1	03	11	2.03	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional
										1.03.11.2.03.05	1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan
										1.03.11.2.04	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.11.2.04.01	1	03	11	2.04	01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
										1.03.11.2.04.02	1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
										1.03.11.2.04.03	1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
										1.03.12	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
										1.03.12.2.01	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
6.1.2.31.11	Revisi Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	11	1	1.3	1.03.12.2.01.01	1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
6.1.2.32.1	Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	32	1	1	1.3	1.03.12.2.01.01	1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
6.1.2.33.8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	33	8	1	1.3	1.03.12.2.01.01	1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
	Revisi Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	11	1	1.3	1.03.12.2.01.02	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
	Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	32	1	1	1.3	1.03.12.2.01.02	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	33	8	1	1.3	1.03.12.2.01.02	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
6.1.2.31.2	Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	2	1	1.3	1.03.12.2.01.03	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
6.1.2.31.5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	5	1	1.3	1.03.12.2.01.03	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
6.1.2.31.8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	8	1	1.3	1.03.12.2.01.03	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
6.1.2.32.11	Penyusunan Neraca dan Analisis Perubahan Penggunaan Lahan (dari Program Pemanfaatan Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	32	11	1	1.3	1.03.12.2.01.03	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
6.1.2.33.1	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ( dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	33	1	1	1.3	1.03.12.2.01.03	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
6.1.2.33.5	Pengawasan Pemanfaatan Ruang (dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	33	5	1	1.3	1.03.12.2.01.03	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
6.1.2.33.7	Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (dari Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	33	7	1	1.3	1.03.12.2.01.03	1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
6.1.2.31.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	3	1	1.3	1.03.12.2.01.04	1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
										1.03.12.2.02	1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
6.1.2.31.10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	10	1	1.3	1.03.12.2.02.01	1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
										1.03.12.2.02.02	1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
										1.03.12.2.02.03	1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
										1.03.12.2.03	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	10	1	1.3	1.03.12.2.03.01	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
6.1.2.31.16	Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Publik (dari Program Perencanaan Tata Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	16	1	1.3	1.03.12.2.03.01	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
6.1.2.32.10	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	32	10	1	1.3	1.03.12.2.03.02	1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang
6.1.2.32.5	Survey dan Pemetaan ( dari Program Pemanfaatan Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	32	5	1	1.3	1.03.12.2.03.02	1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang
										1.03.12.2.04	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	10	1	1.3	1.03.12.2.04.01	1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	31	10	1	1.3	1.03.12.2.04.02	1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang
6.1.2.33.10	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	33	10	1	1.3	1.03.12.2.04.03	1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang
6.1.2.33.11	Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	2	33	11	1	1.3	1.03.12.2.04.04	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
6.1.1.2.3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	23		1	1.3	1.03.??	1	03	??			PROGRAM KEBINAMARGAAN
										1.03.??2.??	1	03	??	??		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
6.1.1.2.3.4	Pengadaan alat-alat berat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	23	4	1	1.3	1.03.??2.????	1	03	??	??	??	Pengadaan alat-alat berat
6.1.1.2.3.6	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	23	6	1	1.3	1.03.??2.????	1	03	??	??	??	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
6.1.1.2.3.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	23	10	1	1.3	1.03.??2.????	1	03	??	??	??	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	19	1	1.3	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.2.1.37.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (dari Program Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	2	1	37	1	1	1.3	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.1.1.34.4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (dari Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	1	1	34	4	1	1.3	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	1	1	1.3	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	2	1	1.3	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	3	1	1.3	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	7	1	1.3	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.20	Penyediaan jasa Pengaman Gudang/ Kantor/ Rumah Jabatan (dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	20	1	1.3	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Administrasi Keuangan-Rekening Belanja 5.1.2.2.1.13 Jasa tenaga pengamanan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	8	1	1.3	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	10	1	1.3	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	11	1	1.3	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	12	1	1.3	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	15	1	1.3	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	17	1	1.3	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	1	18	1	1.3	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	2	7	1	1.3	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	2	9	1	1.3	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	2	10	1	1.3	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	1	2	2	24	1	1.3	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	1.04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
FUNGSI	5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
SUB FUNGSI	5.02				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
VARIAN KODE ORGANISASI	1-4	0-0	0-0	01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.03.03	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
										1.03.03.2.01	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.03.03.2.01.01	1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
										1.03.03.2.01.02	1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
6.1.3.23.2	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	2	1	1.4	1.03.03.2.01.03	1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan
6.1.4.24.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	4	24	3	1	1.4	1.03.03.2.01.04	1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	2	1	1.4	1.03.03.2.01.04	1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	2	1	1.4	1.03.03.2.01.05	1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	2	1	1.4	1.03.03.2.01.06	1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	2	1	1.4	1.03.03.2.01.07	1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan
	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	2	1	1.4	1.03.03.2.01.08	1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan
										1.03.03.2.01.09	1	03	03	2.01	09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum
										1.03.03.2.01.10	1	03	03	2.01	10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
6.1.4.24.8	Penunjang Program Pamsimas	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	4	24	8	1	1.4	1.03.03.2.01.11	1	03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.03.2.01.12	1	03	03	2.01	12	Fasilitas Penyiapan Kerja Sama SPAM
										1.03.03.2.01.13	1	03	03	2.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM
										1.03.03.2.01.14	1	03	03	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
										1.03.03.2.01.15	1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
										1.03.03.2.01.16	1	03	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
										1.03.05	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
										1.03.05.2.01	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.03.05.2.01.01	1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.05.2.01.02	1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
6.1.3.23.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	1	1	1.4	1.03.05.2.01.03	1	03	05	2.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	1	1	1.4	1.03.05.2.01.04	1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	1	1	1.4	1.03.05.2.01.05	1	03	05	2.01	05	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
6.1.1.16.2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	16	2	1	1.4	1.03.05.2.01.06	1	03	05	2.01	06	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	1	1	1.4	1.03.05.2.01.06	1	03	05	2.01	06	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.07	1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.08	1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
6.1.4.24.5	Penunjang Program Sanimas dan Selaras	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	4	24	5	1	1.4	1.03.05.2.01.09	1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.10	1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.06	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
										1.03.06.2.01	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.06.2.01.01	1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
										1.03.06.2.01.02	1	03	06	2.01	02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
										1.03.06.2.01.03	1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.06.2.01.04	1	03	06	2.01	04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
6.1.1.21.1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	21	1	1	1.4	1.03.06.2.01.05	1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	21	1	1	1.4	1.03.06.2.01.06	1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	21	1	1	1.4	1.03.06.2.01.07	1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	21	1	1	1.4	1.03.06.2.01.08	1	03	06	2.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
										1.03.06.2.01.09	1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
										1.03.07	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
										1.03.07.2.01	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota
10.1.1.26.1	Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	1	1	26	1	1	1.4	1.03.07.2.01.01	1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
6.1.4.24.1	Penetaan Lingkungan Pemukiman Pendudukk Perdesaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	4	24	1	1	1.4	1.03.07.2.01.01	1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
6.1.4.24.2	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	4	24	2	1	1.4	1.03.07.2.01.01	1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
10.1.1.26.2	Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur (OTSUS)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	1	1	26	2	1	1.4	1.03.07.2.01.02	1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
	Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur (OTSUS)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	1	1	26	2	1	1.4	1.03.07.2.01.03	1	03	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.03.07.2.01.04	1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.04	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
										1.04.02	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
										1.04.02.2.01	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
										1.04.02.2.01.01	1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
										1.04.02.2.01.02	1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
										1.04.02.2.01.03	1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.02.2.01.04	1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
6.1.1.25.2	Pengembangan Data Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	25	2	1	1.4	1.04.02.2.01.05	1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
										1.04.02.2.01.06	1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.04.02.2.02	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
										1.04.02.2.02.01	1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
										1.04.02.2.02.02	1	04	02	2.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
										1.04.02.2.02.03	1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.02.2.02.04	1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
										1.04.02.2.02.05	1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
										1.04.02.2.02.06	1	04	02	2.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
										1.04.02.2.03	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.02.2.03.01	1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.02.2.03.02	1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.02.2.03.03	1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.02.2.03.04	1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.02.2.03.05	1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
										1.04.02.2.03.06	1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
										1.04.02.2.04	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
										1.04.02.2.04.01	1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
										1.04.02.2.04.02	1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
										1.04.02.2.05	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
										1.04.02.2.05.01	1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
										1.04.02.2.05.02	1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
										1.04.02.2.06	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
										1.04.02.2.06.01	1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
										1.04.02.2.06.02	1	04	02	2.06	02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.04.02.2.06.03	1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
										1.04.02.2.06.04	1	04	02	2.06	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
										1.04.02.2.07	1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
										1.04.02.2.07.01	1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
										1.04.03	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH
										1.04.03.2.01	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
										1.04.03.2.01.01	1	04	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik
										1.04.03.2.01.02	1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
6.1.1.15.10	Penunjang Program Nasional BSPS	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	15	10	1	1.4	1.04.03.2.01.03	1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
6.1.4.24.4	Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (P2KP)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	4	24	4	1	1.4	1.04.03.2.01.03	1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
										1.04.03.2.02	1	04	03	2.02		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.03.2.02.01	1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
	Penyediaan Sistem Informasi/Data (Dari program Penyediaan Systeem informasi/Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	25	1	1	1.4	1.04.03.2.02.01	1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
										1.04.03.2.02.02	1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
										1.04.03.2.02.03	1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
										1.04.03.2.02.04	1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.03.2.02.05	1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.03.2.02.05	1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
										1.04.03.2.02.06	1	04	03	2.02	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
										1.04.03.2.02.07	1	04	03	2.02	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
										1.04.03.2.03	1	04	03	2.03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.03.2.03.01	1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
6.1.1.15.7	Pengembangan Rumah Sehat Sederhana (DAK)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	15	7	1	1.4	1.04.03.2.03.02	1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
										1.04.03.2.03.03	1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
										1.04.03.2.03.04	1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
										1.04.03.2.03.05	1	04	03	2.03	05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
										1.04.04	1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
										1.04.04.2.01	1	04	04	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
										1.04.04.2.01.01	1	04	04	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.04.2.01.02	1	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.04.2.01.03	1	04	04	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
6.1.1.25.1	Penyediaan Sistem Informasi/Data (Dari program Penyediaan Systeem Informasi/Data Base Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	25	1	1	1.4	1.04.04.2.01.03	1	04	04	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
										1.04.05	1	04	05	0	0	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
										1.04.05.2.01	1	04	05	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.04.05.2.01.01	1	04	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	19	1	1.4	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
6.1.3.23.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK) (Dari Program Pengembangan Kinerja Pegelolaan Air Minum dan Air Limbah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	3	23	3	1	1.4	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.1.1.15.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Dari Program Pengembangan Perumahan)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	1	1	15	8	1	1.4	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	1	1	1.4	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	2	1	1.4	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	3	1	1.4	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
5.1.1.1.20	Penyediaan Jasa Pengaman Gudang/Kantor Rumah Jabatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	20	1	1.4	X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	7	1	1.4	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.1.1.22	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (DBH Pajak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	22	1	1.4	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	8	1	1.4	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	10	1	1.4	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	11	1	1.4	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	12	1	1.4	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	15	1	1.4	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	17	1	1.4	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	18	1	1.4	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	2	5	1	1.4	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	2	7	1	1.4	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	2	9	1	1.4	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	2	10	1	1.4	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	2	24	1	1.4	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	2	28	1	1.4	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.1.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	2	42	1	1.4	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.1.1.21	Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Jiwa (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	1	21	1	1.4	X.XX.01.2.03.??	X	XX	01	2.03	??	Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap Daerah
5.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	5		1	1.4	X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	3	2	1	1.4	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	3	5	1	1.4	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
										X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.1.1.5.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	1	5	2	1	1.4	X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

BPJS Tenaga kerja bagi Pegawai tidak tetap



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	1.05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
FUNGSI (1); (2)	9	2			PERLINDUNGAN SOSIAL; KETERTIBAN DAN KEAMANAN
SUB FUNGSI (1);(2)	9.06	2.02			PANGGULANGAN BENCANA; KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
VARIAN KODE ORGANISASI	1-5	0-0	0-0	04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.03	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
6.2.1.29.9	Perencanaan/pengawasan kegiatan OTSUS/APBA (dari Program perencanaan/pengawasan penanggulangan bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	29	9	1	1.5	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
6.2.1.29.10	DED pengendalian banjir kecamatan Pasie Raja ((dari Program perencanaan/ pengawasan penanggulangan bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	29	10	1	1.5	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										1.05	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
										1.05.03	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
										1.05.03.2.01	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
										1.05.03.2.01.01	1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
6.2.1.25.1	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	25	1	1	1.5	1.05.03.2.01.02	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.05.03.2.02	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
6.2.1.29.8	Pembentukan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	29	8	1	1.5	1.05.03.2.02.01	1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
6.2.1.26.1	Pelatihan/training dan simulasi pencegahan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	26	1	1	1.5	1.05.03.2.02.02	1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
6.2.1.23.5	Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	23	5	1	1.5	1.05.03.2.02.03	1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
6.2.1.23.1	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	23	1	1	1.5	1.05.03.2.02.04	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
										1.05.03.2.02.05	1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
6.2.1.26.5	Pembentukan desa tangguh bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	26	5	1	1.5	1.05.03.2.02.06	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6.2.1.28.3	Rekonstruksi prasarana fisik wilayah pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	28	3	1	1.5	1.05.03.2.02.07	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
6.2.1.28.4	Rehabilitasi sosial ekonomi pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	28	4	1	1.5	1.05.03.2.02.07	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
6.2.1.29.3	Penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	29	3	1	1.5	1.05.03.2.02.07	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
6.2.1.29.7	Tim Reaksi Cepat penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	29	7	1	1.5	1.05.03.2.02.08	1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
										1.05.03.2.03	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
										1.05.03.2.03.01	1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
										1.05.03.2.03.02	1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
										1.05.03.2.03.03	1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
6.2.1.25.6	Pengadaan logistik kebutuhan dasar dan obat-obatan bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	25	6	1	1.5	1.05.03.2.03.04	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
										1.05.03.2.04	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
										1.05.03.2.04.01	1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
6.2.1.29.4	Rapat koordinasi penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	29	4	1	1.5	1.05.03.2.04.02	1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
										1.05.03.2.04.03	1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.05.04	1	05	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN
										1.05.04.2.01	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.2.1.24.7	Pencegahan dan penanggulangan bencana bahaya kebakaran hutan dan lahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	24	7	1	1.5	1.05.04.2.01.01	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									1.05.04.2.01.01	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.2.1.22.14	Pengendalian dan penanganan kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	22	14	1	1.5	1.05.04.2.01.02	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.05.04.2.01.03	1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
										1.05.04.2.01.04	1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.05.04.2.02	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
										1.05.04.2.02.01	1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
										1.05.04.2.02.02	1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
										1.05.04.2.03	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran
										1.05.04.2.03.01	1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
										1.05.04.2.04	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
										1.05.04.2.04.01	1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	19	1	1.5	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	1	1	1.5	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	2	1	1.5	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	3	1	1.5	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	7	1	1.5	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.21	Penyediaan jasa pengamanan gudang/kantor/rumah jabatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	21	1	1.5	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Administrasi Keuangan-Rekening Belanja 5.1.2.2.1.13 Jasa tenaga pengamanan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	8	1	1.5	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	10	1	1.5	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	11	1	1.5	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
										X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	15	1	1.5	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	17	1	1.5	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	1	18	1	1.5	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	2	5	1	1.5	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	2	7	1	1.5	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	2	9	1	1.5	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.45	Pengadaan peralatan gedung kantor (DBH Pajak)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	2	45	1	1.5	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	2	10	1	1.5	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	2	22	1	1.5	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	2	24	1	1.5	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	2	26	1	1.5	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	1	2	2	28	1	1.5	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
6.2.1.27.13	Pelayanan kemitraan kesehatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2	1	27	13	1	1.5	X.XX.01.2.03.??	X	XX	01	2.03	??	Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap Daerah





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

	URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
	URUSAN	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	BIDANG URUSAN	1.05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	FUNGSI	2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN
	SUB FUNGSI	2.02				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
<b>WH KEKHUSUSAN</b>	VARIAN KODE ORGANISASI	1-5	0-0	0-0	??	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.05	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
										1.05.02	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										1.05.02.2.01	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										1.05.02.2.01.01	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
										1.05.02.2.01.02	1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
										1.05.02.2.01.03	1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
										1.05.02.2.01.04	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
										1.05.02.2.01.05	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
										1.05.02.2.01.06	1	05	02	2.01	06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja
3.4.4.16.3	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	3	4	4	16	3	1	1.5	1.05.02.2.01.07	1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.05.02.2.01.08	1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
										1.05.02.2.02	1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
										1.05.02.2.02.01	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3.4.4.16.1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	3	4	4	16	1	1	1.5	1.05.02.2.02.02	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
										1.05.02.2.02.03	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
										1.05.02.2.03	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
										1.05.02.2.03.01	1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
										1.05.02.1.04	1	05	02	1.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayahul Hisbah Aceh *****) KDA
										1.05.02.1.04.01	1	05	02	1.04	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****) KDA
1.1.1.30.1	Pengawasan dan Sosialisasi Syariat Islam	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	1	1	1	30	1	1	1.5	1.05.02.1.04.02	1	05	02	1.04	02	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****) KDA
										1.05.02.1.04.03	1	05	02	1.04	03	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam *****) KDA
										1.05.02.1.04.04	1	05	02	1.04	04	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam *****) KDA
										1.05.02.1.04.05	1	05	02	1.04	05	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota *****) KDA
										1.05.02.1.04.06	1	05	02	1.04	06	Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota *****) KDA
										1.05.02.1.04.07	1	05	02	1.04	07	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku *****) KDA
										1.05.02.1.04.08	1	05	02	1.04	08	Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****) KDA
										1.05.02.1.04.09	1	05	02	1.04	09	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim *****) KDA
										1.05.02.1.04.10	1	05	02	1.04	10	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.05.02.1.04.11	1	05	02	1.04	11	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariah Islam *****) KDA
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	1	19	1	1.5	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
3.4.4.15.6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	3	4	4	15	6	1	1.5	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	1	1	1	1.5	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	1	2	1	1.5	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	1	7	1	1.5	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.21	Penyediaan jasa pengamanan gudang/kantor/rumah jabatan (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	1	21	1	1.5	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Administrasi Keuangan-Rekening Belanja 5.1.2.2.1.13 Jasa tenaga pengamanan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	1	8	1	1.5	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.1.2.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	1	9	1	1.5	X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	1	10	1	1.5	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	1	11	1	1.5	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	1	12	1	1.5	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	1	13	1	1.5	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	1	15	1	1.5	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	1	17	1	1.5	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	1	18	1	1.5	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	2	7	1	1.5	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	2	9	1	1.5	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	2	10	1	1.5	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	5	1	2	2	22	1	1.5	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	2	24	1	1.5	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	2	42	1	1.5	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	5	1	2	3	2	1	1.5	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
										X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	1.06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
FUNGSI	9					PERLINDUNGAN SOSIAL
SUB FUNGSI	9.04					SOSIAL
VARIAN KODE ORGANISASI	1-6	0-0	0-0	01		DINAS SOSIAL

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.06	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
										1.06.02	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
										1.06.02.2.01	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3.4.2.15.11	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial	3	4	2	15	11	1	1.6	1.06.02.2.01.01	1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
3.4.2.15.11	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial	3	4	2	15	11	1	1.6	1.06.02.2.01.02	1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
										1.06.02.2.02	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.06.02.2.02.01	1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
										1.06.02.2.03	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3.4.2.21.6	Pembinaan dan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial	3	4	2	21	6	1	1.6	1.06.02.2.03.01	1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3.4.2.21.7	Penyuluhan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial	Dinas Sosial	3	4	2	21	7	1	1.6	1.06.02.2.03.02	1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.4.2.15.2	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	3	4	2	15	2	1	1.6	1.06.02.2.03.03	1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.4.2.15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	3	4	2	15	3	1	1.6	1.06.02.2.03.03	1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3.4.2.15.4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Dinas Sosial	3	4	2	15	4	1	1.6	1.06.02.2.03.03	1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3.4.2.21.1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Dinas Sosial	3	4	2	21	1	1	1.6	1.06.02.2.03.04	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3.4.2.21.5	Pemberdayaan Organisasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat / Kepemudaan	Dinas Sosial	3	4	2	21	5	1	1.6	1.06.02.2.03.04	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3.4.2.21.3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Dinas Sosial	3	4	2	21	3	1	1.6	1.06.02.2.03.05	1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
										1.06.03	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
										1.06.03.2.01	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
										1.06.03.2.01.01	1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
										1.06.04	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
										1.06.04.2.01	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.01	1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.02	1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.03	1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.04	1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.05	1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.06	1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.07	1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.08	1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.09	1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.10	1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.11	1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.12	1	06	04	2.01	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.01.13	1	06	04	2.01	13	Pemberian Layanan Rujukan
3.4.1.16.12	Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum bagi PMKS	Dinas Sosial	3	4	1	16	12	1	1.6	1.06.04.2.01.13	1	06	04	2.01	13	Pemberian Layanan Rujukan
										1.06.04.2.02	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.01	1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.02	1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.03	1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.04	1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.05	1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.06	1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.07	1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.08	1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.09	1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.10	1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.11	1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.12	1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.13	1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan
3.4.2.15.5	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial	3	4	2	15	5	1	1.6	1.06.04.2.02.14	1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
3.4.1.22.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	Dinas Sosial	3	4	1	22	1	1	1.6	1.06.04.2.02.14	1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
										1.06.05	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
										1.06.05.2.01	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
										1.06.05.2.01.01	1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.06.05.2.01.02	1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar
3.4.1.16.13	Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Dinas Sosial	3	4	1	16	13	1	1.6	1.06.05.2.01.03	1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
3.4.1.16.14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Dinas Sosial	3	4	1	16	14	1	1.6	1.06.05.2.01.03	1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
3.4.1.16.15	Operasional dan Pelayanan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Dinas Sosial	3	4	1	16	15	1	1.6	1.06.05.2.01.03	1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
3.4.1.16.16	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Kerja Tenaga Pelatih dan Pendidik LPKS	Dinas Sosial	3	4	1	16	16	1	1.6	1.06.05.2.01.03	1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
										1.06.05.2.02	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3.4.2.25.1	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Dinas Sosial	3	4	2	25	1	1	1.6	1.06.05.2.02.01	1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3.4.2.15.10	Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinas Sosial	3	4	2	15	10	1	1.6	1.06.05.2.02.01	1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1.26.1	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Basic Data Terpadu (BDT)	Dinas Sosial	4	1	1	26	1	1	1.6	1.06.05.2.02.01	1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3.4.2.15.7	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Ekonomi Fakir Miskin (KUBE FM)	Dinas Sosial	3	4	2	15	7	1	1.6	1.06.05.2.02.02	1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3.4.2.15.6	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Warga Miskin	Dinas Sosial	3	4	2	15	6	1	1.6	1.06.05.2.02.02	1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1.26.1	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Basic Data Terpadu (BDT)	Dinas Sosial	4	1	1	26	1	1	1.6	1.06.05.2.02.02	1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
										1.06.06	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
										1.06.06.2.01	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
3.4.1.23.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Dinas Sosial	3	4	1	23	1	1	1.6	1.06.06.2.01.01	1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan
3.4.1.23.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Dinas Sosial	3	4	1	23	1	1	1.6	1.06.06.2.01.02	1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang
3.4.1.23.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Dinas Sosial	3	4	1	23	1	1	1.6	1.06.06.2.01.03	1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
3.4.1.23.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Dinas Sosial	3	4	1	23	1	1	1.6	1.06.06.2.01.04	1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
3.4.1.23.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Dinas Sosial	3	4	1	23	1	1	1.6	1.06.06.2.01.05	1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.23.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Dinas Sosial	3	4	1	23	1	1	1.6	1.06.06.2.02	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
3.4.1.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Dinas Sosial	3	4	1	16	10	1	1.6	1.06.06.2.02.01	1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
3.4.1.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Dinas Sosial	3	4	1	16	10	1	1.6	1.06.06.2.02.02	1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
										1.06.07	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
										1.06.07.2.01	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
3.4.2.15.8	Peningkatan Kesadaran Nilai-Nilai Kepahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Dinas Sosial	3	4	2	15	8	1	1.6	1.06.07.2.01.01	1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
3.4.2.15.12	Peringatan Hari Pahlawan Nasional	Dinas Sosial	3	4	2	15	12	1	1.6	1.06.07.2.01.01	1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
4.1.1.28.1	Peringatan Hari Pahlawan Nasional	Dinas Sosial	4	1	1	28	1	1	1.6	1.06.07.2.01.01	1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
3.4.2.15.9	Fasilitasi dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya	Dinas Sosial	3	4	2	15	9	1	1.6	1.06.07.2.01.02	1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Sosial	5	1	2	1	19	1	1.6	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
4.2.1.23.1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ( dari Program Perencanaan Sosial dan Budaya)	Dinas Sosial	4	2	1	23	1	1	1.6	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Sosial	5	1	2	1	1	1	1.6	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	5	1	2	1	2	1	1.6	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	5	1	2	1	3	1	1.6	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5.1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	5	1	2	1	6	1	1.6	X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Sosial	5	1	2	1	7	1	1.6	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Sosial	5	1	2	1	8	1	1.6	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Sosial	5	1	2	1	10	1	1.6	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial	5	1	2	1	11	1	1.6	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Sosial	5	1	2	1	12	1	1.6	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	5	1	2	1	15	1	1.6	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Sosial	5	1	2	1	17	1	1.6	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Sosial	5	1	2	1	18	1	1.6	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	5	1	2	2	7	1	1.6	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Sosial	5	1	2	2	9	1	1.6	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Sosial	5	1	2	2	10	1	1.6	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Sosial	5	1	2	2	22	1	1.6	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	5	1	2	2	24	1	1.6	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial	5	1	2	2	26	1	1.6	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Sosial	5	1	2	2	28	1	1.6	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Sosial	5	1	2	2	29	1	1.6	X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Dinas Sosial	5	1	2	2	42	1	1.6	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.1.2.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial	5	1	2	2	44	1	1.6	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Sosial	5	1	2	3	2	1	1.6	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN (1)	2.08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG URUSAN (2)	2.14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
FUNGSI (1) DAN (2)	9	6			PERLINDUNGAN SOSIAL; KESEHATAN
SUB FUNGSI (1) DAN (2)	9.0	6.02			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
VARIAN KODE ORGANISASI	2-8	2-1	0-0	02	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

SEBELUM PEMETAAN				TAHUN					HASIL PEMETAAN														
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT	DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							2019	2020	2021	2022	2023	PERANGKAT DAERAH	KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
				MSI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN								URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
															DP3AKB	2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
															DP3AKB	2.08	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
																2.08.02	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
																2.08.02.2.01	2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.3.1.16.5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	5	2	2.2		30.000.000	50.000.000	70.000.000	80.000.000	DP3AKB	2.08.02.2.01.01	2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan										50.000.000					2.08.02.2.01.01	2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
																2.08.02.2.01.02	2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.3.2.18.7	Pembinaan/pengawasan peranan perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	2	18	7	2	2.2	20.000.000	20.000.000	20.000.000	35.000.000	35.000.000	DP3AKB	2.08.02.2.01.03	2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	
3.3.1.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	15	3	2	2.2		20.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	DP3AKB	2.08.02.2.01.04	2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	
																2.08.02.2.02	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.3.2.18.1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	2	18	1	2	2.2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	DP3AKB	2.08.02.2.02.01	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
3.3.2.18.4	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	2	18	4	2	2.2		28.407.678	37.214.369	32.263.662	32.263.662	DP3AKB	2.08.02.2.02.01	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
																2.08.02.2.02.02	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
																2.08.02.2.03	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
																2.08.02.2.03.01	2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.3.2.18.2	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	2	18	2	2	2.2	100.000.000	70.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	DP3AKB	2.08.02.2.03.02	2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	

SEBELUM PEMETAAN										TAHUN					PERANGKAT DAERAH	HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT	DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA						2019	2020	2021	2022	2023		KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
				MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN								BID. URUSAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																2.08.02.2.03.03	2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.03	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
																2.08.03.2.01	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2	100.000.000	77.000.000	66.630.000	57.126.700	58.568.103	DP3AKB	2.08.03.2.01.01	2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan															2.08.03.2.01.02	2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.03.2.01.02	2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.03.2.02	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.03.2.02.01	2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.03.2.02.02	2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.03.2.03	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.03.2.03.01	2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.03.2.03.02	2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.03.2.03.03	2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) .....															2.08.03.2.03.04	2	08	03	2.03	04	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.04	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
																2.08.04.2.01	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pola Asuh Anak										150.000.000					2.08.04.2.01.01	2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.04.2.01.02	2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.04.2.01.03	2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.04.2.02	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.04.2.02.01	2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.3.2.18.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	2	18	3	2	2.2		20.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	DP3AKB	2.08.04.2.02.01	2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.04.2.02.02	2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.04.2.02.03	2	08	04	2.02	03	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										TAHUN					PERANGKAT DAERAH	HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT	DAERAH	KODE EKSTISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA						2019	2020	2021	2022	2023		KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
				MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN								BID. URUSAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																2.08.04.2.03	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.04.2.03.01	2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.05	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
																2.08.05.2.01	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
																2.08.05.2.01.01	2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.05.2.01.02	2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.06	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
																2.08.06.2.01	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.06.2.01.01	2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Peringatan hari anak nasional															2.08.06.2.01.02	2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3.1.15.6	Pemilihan Bakat Anak Berprestasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	15	6	2	2.2	127.000.000	63.350.000	25.351.500	23.433.135	22.692.117	DP3AKB	2.08.06.2.01.02	2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.06.2.02	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.06.2.02.01	2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.06.2.02.02	2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.06.2.02.03	2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.3.1.15.5	Penerapan Kebijakan Kabupaten Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	15	5	2	2.2		50.000.000	70.000.000	80.000.000	90.000.000	DP3AKB	2.08.06.2.02.04	2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Sosialisasi Menuju Kota Layak Anak															2.08.06.2.02.04	2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.07	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
																2.08.07.2.01	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.07.2.01.01	2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.07.2.01.02	2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.07.2.02	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.07.2.02.01	2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.3.1.16.2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	3	3	1	16	2	2	2.2							2.08.07.2.02.02	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										TAHUN					PERANGKAT DAERAH	HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT	DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA						2019	2020	2021	2022	2023		KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
				MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN								BID. URUSAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																2.08.07.2.02.03	2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.07.2.02.04	2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
																2.08.07.2.03	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.07.2.03.01	2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.07.2.03.02	2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
																2.08.07.2.03.03	2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
																2.14	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
																2.14.02	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
																2.14.02.2.01	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
																2.14.02.2.01.01	2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
																2.14.02.2.01.02	2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
																2.14.02.2.01.03	2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
																2.14.02.2.01.04	2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
																2.14.02.2.01.05	2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
																2.14.02.2.01.06	2	14	02	2.01	06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
																2.14.02.2.01.07	2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
																2.14.02.2.01.08	2	14	02	2.01	08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
	Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja															2.14.02.2.01.09	2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
																2.14.02.2.01.10	2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
																2.14.02.2.01.11	2	14	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
																2.14.02.2.01.12	2	14	02	2.01	12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
																2.14.02.2.01.13	2	14	02	2.01	13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
																2.14.02.2.01.14	2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

SEBELUM PEMETAAN										TAHUN					PERANGKAT DAERAH	HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT	DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA						2019	2020	2021	2022	2023		KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
				MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN								BID. URUSAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																2.14.02.2.01.15	2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
																2.14.02.2.02	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
																2.14.02.2.02.01	2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan
																2.14.02.2.02.02	2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
																2.14.02.2.02.03	2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
																2.14.02.2.02.04	2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan
																2.14.02.2.02.05	2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
																2.14.02.2.02.06	2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
																2.14.02.2.02.07	2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
																2.14.02.2.02.08	2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
																2.14.02.2.02.09	2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
																2.14.02.2.02.10	2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
3.2.2.22.1	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	22	1	2	2.8	506.460.000	552.041.400	601.725.126	630.880.387	630.880.387	DP3AKB	2.14.02.2.02.11	2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
																2.14.02.2.02.12	2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
																2.14.02.2.02.13	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
																2.14.02.2.02.14	2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
																2.14.03	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELIARGA BERENCANA(KB)
																2.14.03.2.01	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
																2.14.03.2.01.01	2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
																2.14.03.2.01.02	2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
3.2.2.15.2	Pelayanan KIE	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	15	2	2	2.8	383.283.920	400.000.000	440.000.000	500.000.000	550.000.000	DP3AKB	2.14.03.2.01.03	2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
																2.14.03.2.01.04	2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
																2.14.03.2.01.05	2	14	03	2.01	05	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
																2.14.03.2.01.06	2	14	03	2.01	06	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK

SEBELUM PEMETAAN										TAHUN					PERANGKAT DAERAH	HASIL PEMETAAN								
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT	DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA						2019	2020	2021	2022	2023		KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA		
				MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN								BID. URUSAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
																2.14.03.2.01.07	2	14	03	2.01	07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		
3.2.2.15.8	Operasional balai Penyuluh KB Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	15	8	2	2.8	1.304.100.000	1.263.505.794	1.530.371.315	1.901.545.734	2.119.084.850	DP3AKB	2.14.03.2.01.08	2	14	03	2.01	08	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK		
																2.14.03.2.01.09	2	14	03	2.01	09	Pengendalian Program KKBPK		
																2.14.03.2.02	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
																2.14.03.2.02.01	2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB		
3.2.2.15.9	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	15	9	2	2.8	300.000.000	274.900.000	100.000.000	230.000.000	DP3AKB	2.14.03.2.02.02	2	14	03	2.02	02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		
																2.14.03.2.02.03	2	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		
3.2.2.18.1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	18	1	2	2.8	12.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	DP3AKB	2.14.03.2.02.04	2	14	03	2.02	04	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
																2.14.03.2.03	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		
3.2.2.15.7	Operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	15	7	2	2.8	42.000.000	45.000.000	50.000.000	60.000.000	70.000.000	DP3AKB	2.14.03.2.03.01	2	14	03	2.03	01	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	
3.2.2.15.10	Penyediaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	15	10	2	2.8	255.000.000	230.000.000	200.000.000	150.000.000	DP3AKB	2.14.03.2.03.01	2	14	03	2.03	01	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya		
3.2.2.18.2	Peningkatan kualitas kerja petugas pendukung pelaksana pencatatan bina KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	18	2	2	2.8	414.000.000	449.340.000	491.130.600	506.682.354	506.682.354	DP3AKB	2.14.03.2.03.02	2	14	03	2.03	02	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	
																2.14.03.2.03.03	2	14	03	2.03	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
																2.14.03.2.03.04	2	14	03	2.03	04	04	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
																2.14.03.2.03.05	2	14	03	2.03	05	05	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
3.2.2.15.6	Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	15	6	2	2.8	479.500.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DP3AKB	2.14.03.2.03.06	2	14	03	2.03	06	06	06	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
																2.14.03.2.03.07	2	14	03	2.03	07	07	07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
																2.14.03.2.03.09	2	14	03	2.03	09	09	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
																2.14.03.2.03.10	2	14	03	2.03	10	10	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
																2.14.03.2.03.11	2	14	03	2.03	11	11	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
																2.14.03.2.03.12	2	14	03	2.03	12	12	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
																2.14.03.2.03.13	2	14	03	2.03	13	13	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria
																2.14.03.2.04	2	14	03	2.04		2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	

SEBELUM PEMETAAN										TAHUN					PERANGKAT DAERAH	HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							2019	2020	2021	2022	2023		KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN								URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Usulan revisi renstra (dari Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	18		2	2.8							2.14.03.2.04.01	2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB
																2.14.03.2.04.02	2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
																2.14.03.2.04.03	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
																2.14.03.2.04.04	2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB
																2.14.04	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
																2.14.04.2.01	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
																2.14.04.2.01.01	2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Soseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan
																2.14.04.2.01.02	2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3.2.2.23.2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	23	2	2	2.8	1.926.451.080	2.099.831.677	2.200.000.000	2.500.000.000	1.900.000.000	DP3AKB	2.14.04.2.01.03	2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3.2.2.23.3	Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat (PPKBD dan Sub PPKBD)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	23	3	2	2.8	1.560.000.000	1.700.400.000	1.942.252.528	2.015.055.255	1.021.410.228	DP3AKB	2.14.04.2.01.04	2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
																2.14.04.2.01.05	2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
																2.14.04.2.01.06	2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3.2.2.24.1	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.8)	3	2	2	24	1	2	2.8	25.000.000	27.250.000	29.702.500	32.375.725	89.789.541	DP3AKB	2.14.04.2.01.07	2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
																2.14.04.2.01.08	2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
																2.14.04.2.01.09	2	14	04	2.01	09	Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
																2.14.04.2.01.10	2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
																2.14.04.2.01.11	2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK
																2.14.04.2.01.12	2	14	04	2.01	12	Sosialisasi IPK
																2.14.04.2.01.13	2	14	04	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
																2.14.04.2.02	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
																2.14.04.2.02.01	2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
																2.14.04.2.02.02	2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerak Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

SEBELUM PEMETAAN										TAHUN					PERANGKAT DAERAH	HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT	DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA						2019	2020	2021	2022	2023		KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
				MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN								BID. URUSAN	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																2.14.04.2.02.03	2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UFPKS)
																2.14.04.2.02.04	2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
																7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
																7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (2.2)	5	1	1	1	19	2	2.2	62.074.500	72.050.000	80.750.000	88.000.000	91.418.000	DP3AKB	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
																7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
																XXX01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
																XXX01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
																XXX01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
																XXX01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
																XXX01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
																XXX01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
																XXX01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
																XXX01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
																XXX01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
																XXX01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
																XXX01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
																XXX01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
																XXX01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
																XXX01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
																XXX01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
																XXX01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
																XXX01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
FUNGSI	9				PERLINDUNGAN SOSIAL
SUB FUNGSI	9.05				PANGAN
VARIAN KODE ORGANISASI	2-9	0-0	0-0	01	DINAS KETAHANAN PANGAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										2.09	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
										2.09.02	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
										2.09.02.2.01	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
7.1.1.15.18	Pengembangan lumbung pangan desa	Dinas Pangan	7	1	1	15	18	2	2.3	2.09.02.2.01.01	2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.02.2.01.02	2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
7.1.1.15.14	Pengembangan desa mandiri pangan	Dinas Pangan	7	1	1	15	14	2	2.3	2.09.02.2.01.03	2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
										2.09.02.2.01.04	2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
										2.09.02.2.01.05	2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
										2.09.03	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
										2.09.03.2.01	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
7.1.1.15.2	Penyusunan database potensi produksi pangan	Dinas Pangan	7	1	1	15	2	2	2.3	2.09.03.2.01.01	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
7.1.1.15.5	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah (Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan)	Dinas Pangan	7	1	1	15	5	2	2.3	2.09.03.2.01.01	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
7.1.1.15.32	Penyelenggaraan cipta menu makanan	Dinas Pangan	7	1	1	15	32	2	2.3	2.09.03.2.01.02	2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
7.1.1.15.50	Pengisian lumbung pangan (Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan)	Dinas Pangan	7	1	1	15	50	2	2.3	2.09.03.2.01.02	2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
7.1.1.15.3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan (Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan)	Dinas Pangan	7	1	1	15	3	2	2.3	2.09.03.2.01.03	2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
7.1.1.15.11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok (Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan)	Dinas Pangan	7	1	1	15	11	2	2.3	2.09.03.2.01.04	2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.03.2.01.05	2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.03.2.01.06	2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
										2.09.03.2.02	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
										2.09.03.2.02.01	2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.03.2.02.02	2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
7.1.1.15.13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Dinas Pangan	7	1	1	15	13	2	2.3	2.09.03.2.02.03	2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.03.2.02.04	2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
										2.09.03.2.03	2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
										2.09.03.2.03.01	2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
										2.09.03.2.04	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.03.2.04.01	2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
7.1.1.15.9	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Dinas Pangan	7	1	1	15	9	2	2.3	2.09.03.2.04.02	2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.03.2.04.03	2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
										2.09.04	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
										2.09.04.2.01	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.04.2.01.01	2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
										2.09.04.2.02	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.04.2.02.01	2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
7.1.1.15.1	Penanganan daerah rawan pangan	Dinas Pangan	7	1	1	15	1	2	2.3	2.09.04.2.02.02	2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.09.05	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
										2.09.05.2.01	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
7.1.1.15.22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Dinas Pangan	7	1	1	15	22	2	2.3	2.09.05.2.01.01	2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.05.2.01.02	2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.05.2.01.03	2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.05.2.01.04	2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.09.05.2.01.05	2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pangan	5	1	2	1	19	2	2.3	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.6.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan)	Dinas Pangan	5	1	2	6	5	2	2.3	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pangan	5	1	2	1	1	2	2.3	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pangan	5	1	2	1	2	2	2.3	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pangan	5	1	2	1	7	2	2.3	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pangan	5	1	2	1	8	2	2.3	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pangan	5	1	2	1	10	2	2.3	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pangan	5	1	2	1	11	2	2.3	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pangan	5	1	2	1	12	2	2.3	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pangan	5	1	2	1	15	2	2.3	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pangan	5	1	2	1	17	2	2.3	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pangan	5	1	2	1	18	2	2.3	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Pangan	5	1	2	2	5	2	2.3	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pangan	5	1	2	2	7	2	2.3	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pangan	5	1	2	2	9	2	2.3	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Pangan	5	1	2	2	10	2	2.3	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pangan	5	1	2	2	24	2	2.3	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Pangan	5	1	2	2	26	2	2.3	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pangan	5	1	2	2	28	2	2.3	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pangan	5	1	2	2	42	2	2.3	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.1.2.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Dinas Pangan	5	1	2	2	44	2	2.3	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Pangan	5	1	2	3	2	2	2.3	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Pangan	5	1	2	3	5	2	2.3	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
										X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
FUNGSI	4					PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB FUNGSI	4.03					PERTANAHAN
VARIAN KODE ORGANISASI	2-10	0-0	0-0	01		DINAS PERTANAHAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										2.10	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
										2.10.02	2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
										2.10.02.2.01	2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.02.2.01.01	2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
										2.10.04	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
										2.10.04.2.01	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5.1.1.17.2	Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	1	17	2	2	2.4	2.10.04.2.01.01	2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
	Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan									2.10.04.2.01.02	2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
										2.10.05	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
										2.10.05.2.01	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.05.2.01.01	2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.05.2.01.02	2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.06	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
										2.10.06.2.01	2	10	06	2.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.06.2.01.01	2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.06.2.01.02	2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.06.2.01.03	2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota
										2.10.06.2.01.04	2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota
										2.10.07	2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
										2.10.07.2.01	2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.07.2.01.01	2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.07.2.01.02	2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.07.2.01.03	2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
										2.10.08	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
										2.10.08.2.01	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
5.1.1.16.3	Sosialisasi Tentang kewenangan urusan pertanahan di Pemerintah Kabupaten/kota	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	1	16	3	2	2.4	2.10.08.2.01.01	2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
5.1.1.17.3	Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Tanah Tumbuh	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	1	17	3	2	2.4	2.10.08.2.01.01	2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
										2.10.08.2.02	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.16.1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Di E-Planing tidak muncul)	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	1	16	1	2	2.4	2.10.08.2.02.01	2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Di E-Planing tidak muncul)									2.10.08.2.02.02	2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong
										2.10.09	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
										2.10.09.2.01	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.09.2.01.01	2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.09.2.01.02	2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
										2.10.10	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
										2.10.10.2.01	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.10.2.01.01	2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.10.2.01.02	2	10	10	2.01	02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
5.1.1.15.3	Inventarisir data tanah Aset Daerah	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	1	15	3	2	2.4	2.10.10.2.01.03	2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
5.1.1.15.4	Pengembangan Sistem Informasi pertanahan - SIMTANAH	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	1	15	4	2	2.4	2.10.10.2.01.03	2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.10.10.2.01.03	2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	19	2	2.4	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	1	2	2.4	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	2	2	2.4	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	3	2	2.4	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	7	2	2.4	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	8	2	2.4	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	10	2	2.4	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	11	2	2.4	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	12	2	2.4	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	13	2	2.4	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	15	2	2.4	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	17	2	2.4	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	1	18	2	2.4	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	2	5	2	2.4	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	2	7	2	2.4	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	2	9	2	2.4	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	2	10	2	2.4	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	2	22	2	2.4	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	2	24	2	2.4	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Pertanahan Kabupaten	5	1	2	3	2	2	2.4	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
FUNGSI	4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB FUNGSI	4.02				LINGKUNGAN HIDUP
VARIAN KODE ORGANISASI	2-11	0-0	0-0	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.03.04	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
										1.03.04.2.01	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.04.2.01.01	1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
										1.03.04.2.01.02	1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
6.4.1.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	2	2	2.5	1.03.04.2.01.03	1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	2	1	2.5	1.03.04.2.01.04	1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	2	1	2.5	1.03.04.2.01.05	1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	2	1	2.5	1.03.04.2.01.06	1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan
										1.03.04.2.01.07	1	03	04	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan
										1.03.04.2.01.08	1	03	04	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.03.05	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
										1.03.05.2.01	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.05.2.01.01	1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
										1.03.05.2.01.02	1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.03	1	03	05	2.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.04	1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
6.4.3.25.1	Peningkatan Pengelolaan IPLT	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	3	25	1	2	2.5	1.03.05.2.01.05	1	03	05	2.01	05	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.06	1	03	05	2.01	06	Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.07	1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.08	1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.09	1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
										1.03.05.2.01.10	1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
										2.11	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
										2.11.02	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
										2.11.02.2.01	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
										2.11.02.2.01.01	2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
										2.11.02.2.01.02	2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
										2.11.02.2.02	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.11.02.2.02.01	2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
										2.11.02.2.02.02	2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
										2.11.02.2.02.03	2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
										2.11.03	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
										2.11.03.2.01	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6.4.2.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	16	3	2	2.5	2.11.03.2.01.01	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
										2.11.03.2.01.02	2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
										2.11.03.2.02	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6.4.2.19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	19	2	2	2.5	2.11.03.2.02.01	2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
										2.11.03.2.02.02	2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6.4.2.16.5	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	16	5	2	2.5	2.11.03.2.02.03	2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
										2.11.03.2.03	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
										2.11.03.2.03.01	2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
										2.11.03.2.03.02	2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
										2.11.03.2.03.03	2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi
6.4.2.17.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	17	1	2	2.5	2.11.03.2.03.04	2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
6.4.2.17.7	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	17	7	2	2.5	2.11.03.2.03.04	2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
										2.11.03.2.03.05	2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.11.04	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
										2.11.04.2.01	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
										2.11.04.2.01.01	2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
										2.11.04.2.01.02	2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
										2.11.04.2.01.03	2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya
6.4.3.24.5	Penataan RTH	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	3	24	5	2	2.5	2.11.04.2.01.04	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6.4.3.24.6	Pemeliharaan RTH	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	3	24	6	2	2.5	2.11.04.2.01.04	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6.4.3.24.9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	3	24	9	2	2.5	2.11.04.2.01.04	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
										2.11.04.2.01.05	2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya
6.4.3.24.7	Pengembangan taman rekreasi	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	3	24	7	2	2.5	2.11.04.2.01.05	2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya
										2.11.04.2.01.06	2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
										2.11.04.2.01.07	2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragam Hayati
										2.11.05	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
										2.11.05.2.01	2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3
										2.11.05.2.01.01	2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.11.05.2.01.02	2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
										2.11.05.2.02	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.11.05.2.02.01	2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.11.05.2.02.02	2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
										2.11.06	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
										2.11.06.2.01	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6.4.2.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	16	13	2	2.5	2.11.06.2.01.01	2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
										2.11.06.2.01.02	2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
6.4.2.16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	16	4	2	2.5	2.11.06.2.01.03	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6.4.2.16.12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	16	12	2	2.5	2.11.06.2.01.03	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.11.06.2.01.04	2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
										2.11.07	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
										2.11.07.2.01	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
										2.11.07.2.01.01	2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
										2.11.07.2.02	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
										2.11.07.2.02.01	2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
										2.11.08	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
										2.11.08.2.01	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.4.2.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	16	14	2	2.5	2.11.08.2.01.01	2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
6.4.1.15.13	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan (dari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan)	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	13	2	2.5	2.11.08.2.01.01	2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.11.08.2.01.02	2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
										2.11.09	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
										2.11.09.2.01	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.4.2.16.1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	2	16	1	2	2.5	2.11.09.2.01.01	2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
										2.11.10	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
										2.11.10.2.01	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
										2.11.10.2.01.01	2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
										2.11.10.2.01.02	2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
										2.11.11	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
										2.11.11.2.01	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah
6.4.1.15.1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	1	2	2.5	2.11.11.2.01.01	2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
										2.11.11.2.01.02	2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
6.4.1.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	4	2	2.5	2.11.11.2.01.03	2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
6.4.1.15.10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	10	2	2.5	2.11.11.2.01.04	2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
6.4.1.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	11	2	2.5	2.11.11.2.01.04	2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.11.11.2.01.05	2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
										2.11.11.2.01.06	2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.11.11.2.02	2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta
										2.11.11.2.02.01	2	11	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
										2.11.11.2.03	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
										2.11.11.2.03.01	2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
										2.11.11.2.03.02	2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
6.4.1.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas Lingkungan Hidup	6	4	1	15	12	2	2.5	2.11.11.2.03.03	2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
										3.28	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
										3.28.04	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
										3.28.04.2.01	3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.28.04.2.01.01	3	28	04	2.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.28.04.2.01.02	3	28	04	2.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.28.04.2.01.03	3	28	04	2.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.28.04.2.01.04	3	28	04	2.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.28.04.2.01.05	3	28	04	2.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.28.04.2.01.06	3	28	04	2.01	06	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota
										3.28.04.2.01.07	3	28	04	2.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota
										3.28.04.2.01.08	3	28	04	2.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota
										3.28.04.2.01.09	3	28	04	2.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	19	2	2.5	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	1	2	2.5	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	2	2	2.5	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5.1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	6	2	2.5	X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	7	2	2.5	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	10	2	2.5	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	11	2	2.5	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	12	2	2.5	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	13	2	2.5	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	15	2	2.5	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	17	2	2.5	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	18	2	2.5	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	2	7	2	2.5	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	2	9	2	2.5	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	2	10	2	2.5	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	2	22	2	2.5	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	2	24	2	2.5	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	2	26	2	2.5	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.45	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	2	45	2	2.5	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.1.2.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	2	44	2	2.5	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.20	Penyediaan Jaminan Asuransi Jiwa	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	1	20	2	2.5	X.XX.01.2.03.??	X	XX	01	2.03	??	Penyediaan Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap Daerah
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	3	2	2	2.5	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
										X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
5.1.2.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Lingkungan Hidup	5	1	2	5	1	2	2.5	X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
										X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
FUNGSI	9				PERLINDUNGAN SOSIAL
SUB FUNGSI	9.01				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
VARIAN KODE ORGANISASI	2-12	0-0	0-0	01	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										2.12	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
										2.12.02	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
										2.12.02.2.01	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.02.2.01.01	2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.02.2.01.02	2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) (aktivitas/layanan kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.02.2.01.02	2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.02.2.01.03	2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
5.1.3.15.7	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	3	15	7	2	2.6	2.12.02.2.01.04	2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.02.2.01.05	2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.02.2.01.06	2	12	02	2.01	06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.02.2.01.07	2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.12.03	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL
										2.12.03.2.01	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil
5.1.3.15.3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) (aktivitas/layanan catatan sipil)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	3	15	3	2	2.6	2.12.03.2.01.01	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
	Pengembangan data base kependudukan (DAK Non Fisik) (aktivitas/layanan pemeliharaan perangkat SIAK)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.03.2.01.01	2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
										2.12.04	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
										2.12.04.2.01	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
										2.12.04.2.01.01	2	12	04	2.01	01	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk
										2.12.04.2.01.02	2	12	04	2.01	02	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
										2.12.04.2.01.03	2	12	04	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk
5.1.3.15.8	Pengembangan data base kependudukan (DAK Non Fisik) (aktivitas/layanan buku agregat kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	3	15	8	2	2.6	2.12.04.2.01.04	2	12	04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
										2.12.04.2.01.05	2	12	04	2.01	05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
										2.12.04.2.01.06	2	12	04	2.01	06	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
										2.12.04.2.02	2	12	04	2.02		Penataan Administrasi Kependudukan
										2.12.04.2.02.01	2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota
5.1.3.15.17	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	3	15	17	2	2.6	2.12.04.2.02.02	2	12	04	2.02	02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
5.1.3.15.14	Pelayanan Kartu Identitas Anak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	3	15	14	2	2.6	2.12.04.2.02.02	2	12	04	2.02	02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
										2.12.04.2.02.02	2	12	04	2.02	02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
										2.12.04.2.03	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.3.15.5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	3	15	5	2	2.6	2.12.04.2.03.01	2	12	04	2.03	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.04.2.03.02	2	12	04	2.03	02	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								2.12.04.2.03.03	2	12	04	2.03	03	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan
5.1.3.15.16	Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	3	15	16	2	2.6	2.12.04.2.03.04	2	12	04	2.03	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting
										2.12.04.2.03.05	2	12	04	2.03	05	Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri
										2.12.04.2.03.06	2	12	04	2.03	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
										2.12.04.2.03.07	2	12	04	2.03	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
5.1.3.15.11	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK Non Fisik)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	3	15	11	2	2.6	2.12.04.2.03.08	2	12	04	2.03	08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
										2.12.04.2.03.09	2	12	04	2.03	09	Kerja Sama Dengan Organisasi Masyarakat Dan Perguruan Tinggi
										2.12.04.2.03.10	2	12	04	2.03	10	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat
										2.12.04.2.03.11	2	12	04	2.03	11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan
										2.12.04.2.04	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
										2.12.04.2.04.01	2	12	04	2.04	01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
										2.12.04.2.04.02	2	12	04	2.04	02	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil
										2.12.04.2.04.03	2	12	04	2.04	03	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.12.04.2.04.04	2	12	04	2.04	04	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
										2.12.04.2.04.05	2	12	04	2.04	05	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
										2.12.05	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
										2.12.05.2.01	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan
										2.12.05.2.01.01	2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
5.1.3.15.6	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	3	15	6	2	2.6	2.12.05.2.01.02	2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Usulan Revisi Renstra 2019-2023 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah									7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	1	2	2.6	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	2	2	2.6	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	7	2	2.6	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	8	2	2.6	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	10	2	2.6	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	11	2	2.6	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	12	2	2.6	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	15	2	2.6	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	17	2	2.6	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	1	18	2	2.6	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	2	9	2	2.6	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	2	10	2	2.6	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	2	22	2	2.6	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	1	2	2	24	2	2.6	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
FUNGSI	3					EKONOMI
SUB FUNGSI	3.05					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
VARIAN KODE ORGANISASI	2-13	0-0	0-0	01		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.02.05	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
										1.02.05.2.01	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
										1.02.05.2.01.01	1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
										1.02.05.2.02	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
										1.02.05.2.02.01	1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
										1.02.05.2.03	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.1.2.22.1	Pembinaan Program Kelembagaan Posyandu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	22	1	2	2.7	1.02.05.2.03.01	1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
										1.03	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	2	3	2	2.7	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										2.08	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
										2.08.02	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
										2.08.02.2.02	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	3	3	2	21	1	2	2.7	2.08.02.2.02.01	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	3	3	2	21	1	2	2.7	2.08.02.2.02.02	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
										2.08.02.2.03	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten									2.08.02.2.03.01	2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten									2.08.02.2.03.02	2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3.3.2.21.1	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	3	3	2	21	1	2	2.7	2.08.02.2.03.03	2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.13	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
										2.13.02	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA
										2.13.02.2.01	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa
										2.13.02.2.01.01	2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
										2.13.02.2.01.04	2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
										2.13.02.2.01.05	2	13	02	2.01	05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah
5.1.2.2.01	Pembangunan Kantor Keuchik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	20	1	2	2.7	2.13.02.2.01.06	2	13	02	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
5.1.2.2.02	Pembangunan Kantor Mukim	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	20	2	2	2.7	2.13.02.2.01.06	2	13	02	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
5.1.2.2.03	Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Mukim/Keuchik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	20	3	2	2.7	2.13.02.2.01.06	2	13	02	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
5.1.2.2.04	Pengadaan Mebeleur Kantor Mukim/Keuchik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	20	4	2	2.7	2.13.02.2.01.06	2	13	02	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.15.8	Pemberdayaan Lembaga Mukim dan Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	15	8	2	2.7	2.13.02.2.01.07	2	13	02	2.01	07	Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa
										2.13.03	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
										2.13.03.2.01	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa
9.2.1.16.10	Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan UPK Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	9	2	1	16	10	2	2.7	2.13.03.2.01.01	2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa
										2.13.03.2.01.02	2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga
										2.13.04	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
										2.13.04.2.01	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
										2.13.04.2.01.01	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5.1.2.18.6	Sosialisasi dan Penyerahan Perbup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	18	6	2	2.7	2.13.04.2.01.02	2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
5.1.2.18.8	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	18	8	2	2.7	2.13.04.2.01.02	2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
										2.13.04.2.01.03	2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
5.1.2.18.5	Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan APBG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	18	5	2	2.7	2.13.04.2.01.04	2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
5.1.2.15.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	15	2	2	2.7	2.13.04.2.01.05	2	13	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD
5.1.2.18.1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	18	1	2	2.7	2.13.04.2.01.05	2	13	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD
5.1.2.17.6	Rapat Koordinasi Stackholder Percepatan Pembangunan Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	17	6	2	2.7	2.13.04.2.01.06	2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
										2.13.04.2.01.07	2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
5.1.2.17.5	Pembinaan Kelompok Masyarakat Kerjasama Antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	17	5	2	2.7	2.13.04.2.01.08	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
9.2.1.16.11	Peningkatan dan Penguatan BUMG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	9	2	1	16	11	2	2.7	2.13.04.2.01.08	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
										2.13.04.2.01.10	2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5.1.2.15.3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	15	3	2	2.7	2.13.04.2.01.11	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.15.6	Pembinaan dan Pendataan Profil Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	15	6	2	2.7	2.13.04.2.01.11	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
										2.13.04.2.01.12	2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
										2.13.05	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
										2.13.05.2.01	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.13.05.2.01.01	2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
										2.13.05.2.01.02	2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
										2.13.05.2.01.03	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
										2.13.05.2.01.04	2	13	05	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
9.2.1.16.8	Pengembangan Kawasan Ekonomi Pemerintah Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	9	2	1	16	8	2	2.7	2.13.05.2.01.05	2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9.2.1.16.9	Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	9	2	1	16	9	2	2.7	2.13.05.2.01.05	2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9.2.1.16.12	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kawasan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	9	2	1	16	12	2	2.7	2.13.05.2.01.05	2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
5.1.2.15.4	Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	15	4	2	2.7	2.13.05.2.01.06	2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5.1.2.15.5	Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Gelar TTG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	15	5	2	2.7	2.13.05.2.01.06	2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	19	2	2.7	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										XXX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										XXX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
5.1.2.15.7	Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	15	7	2	2.7	X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
5.1.2.15.9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Perberdayaan Masyakat Pedesaan)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	15	9	2	2.7	X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5.1.2.17.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pembinaan Klp masyarakt bangun desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	17	4	2	2.7	X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5.1.2.18.4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Peningkatan masyarakat bangun desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	18	4	2	2.7	X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5.1.2.20.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	20	5	2	2.7	X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
5.1.2.22.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	22	3	2	2.7	X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
9.2.1.16.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Ekonomi pedesaan)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	9	2	1	16	7	2	2.7	X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.1.2.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	6	1	2	2.7	X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	1	2	2.7	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	2	2	2.7	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	3	2	2.7	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	7	2	2.7	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	8	2	2.7	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	10	2	2.7	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	11	2	2.7	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	12	2	2.7	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	15	2	2.7	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	17	2	2.7	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	1	18	2	2.7	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	2	7	2	2.7	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	2	9	2	2.7	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	2	10	2	2.7	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	2	22	2	2.7	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	2	24	2	2.7	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	1	2	2	42	2	2.7	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
FUNGSI	3				EKONOMI
SUB FUNGSI	3.01				PERHUBUNGAN
VARIAN KODE ORGANISASI	2-15	0-0	0-0	01	DINAS PERHUBUNGAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										2.10.05	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
										2.10.05.2.01	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.05.2.01.01	2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1.21.1	Pengadaan Tanah	Dinas Perhubungan	5	1	1	21	1	2	2.9	2.10.05.2.01.02	2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.15	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
										2.15.02	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
										2.15.02.2.01	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
6.3.2.15.1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Dinas Perhubungan	6	3	2	15	1	2	2.9	2.15.02.2.01.01	2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.01.02	2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.01.03	2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.02	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
6.3.2.17.20	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Dinas Perhubungan	6	3	2	17	20	2	2.9	2.15.02.2.02.01	2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
6.3.1.19.1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Dinas Perhubungan	6	3	1	19	1	2	2.9	2.15.02.2.02.02	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	Penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum									2.15.02.2.02.03	2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
										2.15.02.2.02.04	2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
										2.15.02.2.03	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
6.3.2.18.2	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	Dinas Perhubungan	6	3	2	18	2	2	2.9	2.15.02.2.03.01	2	15	02	2.03	01	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal									2.15.02.2.03.02	2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal
6.3.2.15.7	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Dinas Perhubungan	6	3	2	15	7	2	2.9	2.15.02.2.03.03	2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
6.3.2.15.9	Peningkatan fasilitas perhubungan	Dinas Perhubungan	6	3	2	15	9	2	2.9	2.15.02.2.03.03	2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
6.3.1.16.4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Dinas Perhubungan	6	3	1	16	4	2	2.9	2.15.02.2.03.04	2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
										2.15.02.2.03.05	2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
										2.15.02.2.04	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
6.3.2.18.4	Pembangunan lokasi parkir kendaraan	Dinas Perhubungan	6	3	2	18	4	2	2.9	2.15.02.2.04.01	2	15	02	2.04	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
										2.15.02.2.04.02	2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.05	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6.3.1.20.1	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	6	3	1	20	1	2	2.9	2.15.02.2.05.01	2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6.3.1.20.4	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung PKB	Dinas Perhubungan	6	3	1	20	4	2	2.9	2.15.02.2.05.01	2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
										2.15.02.2.05.02	2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
										2.15.02.2.05.03	2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
										2.15.02.2.05.04	2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.15.02.2.05.05	2	15	02	2.05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
										2.15.02.2.05.06	2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
										2.15.02.2.05.07	2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6.3.1.20.3	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	6	3	1	20	3	2	2.9	2.15.02.2.05.08	2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor									2.15.02.2.05.09	2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor									2.15.02.2.05.10	2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
										2.15.02.2.06	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.06.01	2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
										2.15.02.2.06.02	2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
										2.15.02.2.06.03	2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
										2.15.02.2.06.04	2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi
										2.15.02.2.07	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
6.3.2.17.19	Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan	Dinas Perhubungan	6	3	2	17	19	2	2.9	2.15.02.2.07.01	2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
	Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan									2.15.02.2.07.02	2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
	Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan									2.15.02.2.07.03	2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
	Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan									2.15.02.2.07.04	2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
										2.15.02.2.08	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
										2.15.02.2.08.01	2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
										2.15.02.2.08.02	2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
										2.15.02.2.08.03	2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.15.02.2.08.04	2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.08.05	2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
										2.15.02.2.09	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.09.01	2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.3.2.17.5	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Dinas Perhubungan	6	3	2	17	5	2	2.9	2.15.02.2.09.02	2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.10	2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.10.01	2	15	02	2.10	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.10.02	2	15	02	2.10	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.11	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.11.01	2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.11.02	2	15	02	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.11.03	2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.12	2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.12.01	2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
										2.15.02.2.12.02	2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.13	2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.13.01	2	15	02	2.13	01	Perumusan kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.13.02	2	15	02	2.13	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.15.02.2.14	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.14.01	2	15	02	2.14	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
										2.15.02.2.14.02	2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.15	2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.15.01	2	15	02	2.15	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
										2.15.02.2.15.02	2	15	02	2.15	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.16	2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.16.01	2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.16.02	2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
										2.15.02.2.16.03	2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
										2.15.03	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
										2.15.03.2.01	2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota
										2.15.03.2.01.01	2	15	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
										2.15.03.2.01.02	2	15	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.02	2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
										2.15.03.2.02.01	2	15	03	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
										2.15.03.2.02.02	2	15	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.03	2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.15.03.2.03.01	2	15	03	2.03	01	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.03.02	2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.04	2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.04.01	2	15	03	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.04.02	2	15	03	2.04	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.05	2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha
										2.15.03.2.05.01	2	15	03	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.05.02	2	15	03	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.06	2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.06.01	2	15	03	2.06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.06.02	2	15	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.07	2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.07.01	2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.07.02	2	15	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.08	2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.15.03.2.08.01	2	15	03	2.08	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.08.02	2	15	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
										2.15.03.2.09	2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.09.01	2	15	03	2.09	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.09.02	2	15	03	2.09	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.09.03	2	15	03	2.09	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.03.2.10	2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.10.01	2	15	03	2.10	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.10.02	2	15	03	2.10	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.10.03	2	15	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.11	2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
										2.15.03.2.11.01	2	15	03	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
										2.15.03.2.11.02	2	15	03	2.11	02	Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
										2.15.03.2.11.03	2	15	03	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
										2.15.03.2.12	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.12.01	2	15	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.12.02	2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.15.03.2.12.03	2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.12.04	2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.13	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
										2.15.03.2.13.01	2	15	03	2.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
										2.15.03.2.13.02	2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
6.3.2.15.6	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Dinas Perhubungan	6	3	2	15	6	2	2.9	2.15.03.2.13.03	2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
										2.15.03.2.13.04	2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
										2.15.03.2.14	2	15	03	2.14		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.14.01	2	15	03	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.14.02	2	15	03	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.15	2	15	03	2.15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.15.01	2	15	03	2.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.15.02	2	15	03	2.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.16	2	15	03	2.16		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.16.01	2	15	03	2.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.16.02	2	15	03	2.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.17	2	15	03	2.17		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.17.01	2	15	03	2.17	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.17.02	2	15	03	2.17	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.15.03.2.18	2	15	03	2.18		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah PerairanPelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.18.01	2	15	03	2.18	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.18.02	2	15	03	2.18	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.19	2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.03.2.19.01	2	15	03	2.19	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.03.2.19.02	2	15	03	2.19	02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
										2.15.04	2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
										2.15.04.2.01	2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
										2.15.04.2.01.01	2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
										2.15.04.2.02	2	15	04	2.02		Penyelenggaraan Kebandarudaraan
										2.15.04.2.02.01	2	15	04	2.02	01	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
										2.15.04.2.02.02	2	15	04	2.02	02	Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan
										2.15.04.2.02.03	2	15	04	2.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.15.04.2.02.04	2	15	04	2.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara
										2.15.04.2.02.05	2	15	04	2.02	05	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.05	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
										2.15.05.2.01	2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
										2.15.05.2.01.01	2	15	05	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
										2.15.05.2.01.02	2	15	05	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.15.05.2.01.03	2	15	05	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
										2.15.05.2.02	2	15	05	2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.02.01	2	15	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.05.2.02.02	2	15	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.03	2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.03.01	2	15	05	2.03	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.03.02	2	15	05	2.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.04	2	15	05	2.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.04.01	2	15	05	2.04	01	Perumusan kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.05	2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.05.01	2	15	05	2.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										2.15.05.2.05.02	2	15	05	2.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.06	2	15	05	2.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi
										2.15.05.2.06.01	2	15	05	2.06	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
										2.15.05.2.06.02	2	15	05	2.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi
										2.15.05.2.07	2	15	05	2.07		Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.15.05.2.07.01	2	15	05	2.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.15.05.2.07.02	2	15	05	2.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Laringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	19	2	2.9	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
6.3.2.17.17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (dari Pogram peningkatan pelayanan angkutan)	Dinas Perhubungan	6	3	2	17	17	2	2.9	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	1	2	2.9	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	2	2	2.9	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	7	2	2.9	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	8	2	2.9	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	10	2	2.9	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	11	2	2.9	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	12	2	2.9	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.1.20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DBH Pajak)	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	20	2	2.9	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	15	2	2.9	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	17	2	2.9	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perhubungan	5	1	2	1	18	2	2.9	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	5	1	2	2	5	2	2.9	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Perhubungan	5	1	2	2	7	2	2.9	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	5	1	2	2	9	2	2.9	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perhubungan	5	1	2	2	22	2	2.9	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perhubungan	5	1	2	2	24	2	2.9	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Perhubungan	5	1	2	2	26	2	2.9	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perhubungan	5	1	2	2	28	2	2.9	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
FUNGSI	1				PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI (1);(2)	1.03	1.04			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; PERSANDIAN
VARIAN KODE ORGANISASI	2-16	2-21	0-0	03	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.03	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.1.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	3	2	2.10	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Uahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										2.16	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
										2.16.02	2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
										2.16.02.2.01	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1.15.5	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	1	15	5	2	2.10	2.16.02.2.01.01	2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
5.1.1.15.6	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	1	15	6	2	2.10	2.16.02.2.01.01	2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
										2.16.02.2.01.02	2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
										2.16.02.2.01.03	2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
4.1.1.25.1	Kegiatan Penyelenggaraan Hari-hari Besar	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	4	1	1	25	1	2	2.10	2.16.02.2.01.04	2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
5.1.2.18.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	18	1	2	2.10	2.16.02.2.01.05	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
5.1.2.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	18	2	2	2.10	2.16.02.2.01.05	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
										2.16.02.2.01.06	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik
										2.16.02.2.01.07	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media
										2.16.02.2.01.08	2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
										2.16.02.2.01.09	2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis
5.1.2.17.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	17	1	2	2.10	2.16.02.2.01.10	2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
										2.16.02.2.01.11	2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
4.1.1.22.2	Kegiatan Fasilitasi Layanan informasi Masyarakat	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	4	1	1	22	2	2	2.10	2.16.02.2.01.12	2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
										2.16.03	2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
										2.16.03.2.01	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.16.03.2.01.01	2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
										2.16.03.2.01.02	2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
4.1.1.23.2	Kegiatan Pengelolaan Sistem komunikasi Intra Pemerintah	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	4	1	1	23	2	2	2.10	2.16.03.2.01.03	2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
										2.16.03.2.02	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.16.03.2.02.01	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
										2.16.03.2.02.02	2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.1.1.26.1	Kegiatan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	1	26	1	2	2.10	2.16.03.2.02.03	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.16.03.2.02.04	2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
										2.16.03.2.02.05	2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
4.1.1.21.1	Pengelolaan Sistem Informasi Elektronik	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	4	1	1	21	1	2	2.10	2.16.03.2.02.06	2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
5.1.2.20.1	Kegiatan fasilitasi pembangunan dan pengembangan aplikasi/sistem informasi pemerintah	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	20	1	2	2.10	2.16.03.2.02.07	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.1.2.20.2	Kegiatan Fasiliasi Pembangunan Pengembangan dan Integrasi aplikasi/sistem informasi layanan publik	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	20	2	2	2.10	2.16.03.2.02.07	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.1.1.15.2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	1	15	2	2	2.10	2.16.03.2.02.08	2	16	03	2.02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
										2.16.03.2.02.09	2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
5.1.1.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	1	15	3	2	2.10	2.16.03.2.02.10	2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
4.1.1.22.1	Kegiatan Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	4	1	1	22	1	2	2.10	2.16.03.2.02.11	2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
										2.21	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
										2.21.02	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
										2.21.02.2.01	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.21.02.2.01.01	2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.21.02.2.01.02	2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.1.1.23.1	Kegiatan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	4	1	1	23	1	2	2.10	2.21.02.2.01.03	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
										2.21.02.2.01.04	2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.21.02.2.02	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
										2.21.02.2.02.01	2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										5.05.02	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										5.05.02.2.03	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5.1.2.16.1	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	16	1	2	2.10	5.05.02.2.03.13	5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	1	19	2	2.10	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	1	1	2	2.10	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	1	2	2	2.10	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	1	7	2	2.10	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.21	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Gudang/Rumah Jabatan	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	1	21	2	2.10	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Administrasi Keuangan-Rekening Belanja 5.1.2.1.13 Jasa tenaga pengamanan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	1	8	2	2.10	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	1	10	2	2.10	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	1	11	2	2.10	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Komunikasi, Inforntatika dan Persandian	5	1	2	1	12	2	2.10	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	1	15	2	2.10	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	1	17	2	2.10	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	1	18	2	2.10	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	5	2	2.10	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	7	2	2.10	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.1.2.19.1	Kegiatan Pengadaan alat-alat studio	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	19	1	2	2.10	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	9	2	2.10	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	10	2	2.10	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	22	2	2.10	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	24	2	2.10	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	26	2	2.10	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	28	2	2.10	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	2	29	2	2.10	X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	3	2	2	2.10	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.6	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	3	6	2	2.10	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5.1.2.3.7	Pengadaan Batik Kedaerahan	Dinas Komunikasi, Inforrnatika dan Persandian	5	1	2	3	7	2	2.10	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
FUNGSI	3					EKONOMI
SUB FUNGSI	3.04					PENANAMAN MODAL
VARIAN KODE ORGANISASI	2-18	0-0	0-0	01		DINAS PENANAMAN MODAL

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										2.18	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
										2.18.02	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
										2.18.02.2.01	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
										2.18.02.2.01.01	2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
										2.18.02.2.01.02	2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
										2.18.02.2.02	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.18.02.2.02.01	2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
9.1.1.15.2	Pengembangan potensi unggulan daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	1	1	15	2	2	2.12	2.18.02.2.02.02	2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
										2.18.03	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.18.03.2.01	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
										2.18.03.2.01.01	2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
9.1.1.15.1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	1	1	15	1	2	2.12	2.18.03.2.01.02	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
										2.18.04	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
										2.18.04.2.01	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
										2.18.04.2.01.01	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
										2.18.04.2.01.02	2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
										2.18.04.2.01.03	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
										2.18.04.2.01.04	2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
										2.18.05	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
										2.18.05.2.01	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9.1.1.16.10	Peningkatan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	1	1	16	10	2	2.12	2.18.05.2.01.01	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
										2.18.05.2.01.02	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
										2.18.05.2.01.03	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
										2.18.06	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
										2.18.06.2.01	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.18.06.2.01.01	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	1	2	2.12	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	2	2	2.12	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	7	2	2.12	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	8	2	2.12	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	10	2	2.12	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	11	2	2.12	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	12	2	2.12	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	13	2	2.12	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	15	2	2.12	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	17	2	2.12	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	1	18	2	2.12	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	2	7	2	2.12	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	2	9	2	2.12	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	2	10	2	2.12	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	2	22	2	2.12	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	2	24	2	2.12	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	2	26	2	2.12	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	1	2	2	28	2	2.12	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
FUNGSI	8					PENDIDIKAN
SUB FUNGSI	8.02					KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
VARIAN KODE ORGANISASI	2-19	0-0	0-0	01		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.03	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
2.2.1.21.9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Tapaktuan Sport Censter)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	21	9	2	2.13	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										2.19	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
										2.19.02	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
										2.19.02.2.01	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.2.1.16.10	Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan dibidang Olahraga dan Kesenian	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	16	10	2	2.13	2.19.02.2.01.01	2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2.2.1.17.2	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	17	2	2	2.13	2.19.02.2.01.01	2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2.2.1.17.1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	17	1	2	2.13	2.19.02.2.01.02	2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
2.2.1.15.1	Pendataan potensi kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	15	1	2	2.13	2.19.02.2.01.03	2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
2.2.1.18.1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	18	1	2	2.13	2.19.02.2.01.04	2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2.2.1.18.2	Sosialisasi Dampak Narkoba Bagi Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	18	2	2	2.13	2.19.02.2.01.04	2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
										2.19.02.2.01.05	2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota
2.2.1.16.3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	16	3	2	2.13	2.19.02.2.01.06	2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
2.2.1.16.8	Pameran prestasi hasil karya pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	16	8	2	2.13	2.19.02.2.01.07	2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
2.2.1.17.3	Pembinaan Pengiriman Paskibraka	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	17	3	2	2.13	2.19.02.2.01.07	2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
2.2.1.16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	16	2	2	2.13	2.19.02.2.01.08	2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda
2.2.1.16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	16	1	2	2.13	2.19.02.2.02	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										2.19.02.2.02.01	2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
2.2.1.17.4	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	17	4	2	2.13	2.19.02.2.02.02	2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
										2.19.03	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
										2.19.03.2.01	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
										2.19.03.2.01.01	2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang <u>Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha</u>
										2.19.03.2.01.02	2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
2.2.1.21.3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	21	3	2	2.13	2.19.03.2.01.03	2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
										2.19.03.2.02	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.2.1.20.22	Event Maraton Naga Open	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	22	2	2.13	2.19.03.2.02.01	2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
										2.19.03.2.02.02	2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
2.2.1.20.17	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	17	2	2.13	2.19.03.2.02.03	2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
2.2.1.20.18	Pengiriman Atlet Mengikuti jurda atauurnas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	18	2	2.13	2.19.03.2.02.03	2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
										2.19.03.2.03	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2.2.1.20.2	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	2	2	2.13	2.19.03.2.03.01	2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah
2.2.1.20.4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	4	2	2.13	2.19.03.2.03.01	2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah
2.2.1.20.19	Pelatihan Instruktur Senam	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	19	2	2.13	2.19.03.2.03.02	2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
2.2.1.20.20	Pelatihan Wasit Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	20	2	2.13	2.19.03.2.03.02	2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
2.2.1.19.1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	19	1	2	2.13	2.19.03.2.03.03	2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
2.2.1.20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	5	2	2.13	2.19.03.2.03.03	2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota
										2.19.03.2.03.04	2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
2.2.1.21.8	Pendataan Potensi Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	21	8	2	2.13	2.19.03.2.03.05	2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
										2.19.03.2.04	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
										2.19.03.2.04.01	2	19	03	2.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
										2.19.03.2.04.02	2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
										2.19.03.2.04.03	2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
										2.19.03.2.04.04	2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
										2.19.03.2.05	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2.2.1.20.6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	6	2	2.13	2.19.03.2.05.01	2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
										2.19.03.2.05.02	2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
2.2.1.21.7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	21	7	2	2.13	2.19.03.2.05.04	2	19	03	2.05	04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
										2.19.03.2.05.05	2	19	03	2.05	05	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
2.2.1.20.14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2	2	1	20	14	2	2.13	2.19.03.2.05.06	2	19	03	2.05	06	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.19.04	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
										2.19.04.2.01	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
										2.19.04.2.01.01	2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
										2.19.04.2.01.02	2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
										2.19.04.2.01.03	2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
										2.19.04.2.01.04	2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
										2.19.04.2.01.05	2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
										2.19.04.2.01.06	2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
										2.19.04.2.01.07	2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
										2.19.04.2.01.08	2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.20	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	19	2	2.13	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.1.2.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	6	4	2	2.13	X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	1	2	2.13	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	2	2	2.13	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	3	2	2.13	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	7	2	2.13	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	8	2	2.13	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.1.2.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	9	2	2.13	X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	10	2	2.13	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	11	2	2.13	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	12	2	2.13	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	13	2	2.13	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	15	2	2.13	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	17	2	2.13	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	1	18	2	2.13	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	5	2	2.13	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	7	2	2.13	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	9	2	2.13	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	10	2	2.13	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	22	2	2.13	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	24	2	2.13	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	26	2	2.13	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	28	2	2.13	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	42	2	2.13	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.1.2.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	2	44	2	2.13	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	3	2	2	2.13	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5.1.2.3.6	Pengadaan Pakaian Olahraga Berlogo	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	3	6	2	2.13	X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	3	5	2	2.13	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
										X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5.1.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	1	2	5	3	2	2.13	X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKALATUR
URUSAN	9				UNSUR KEKHUSUSAN
BIDANG URUSAN	9.03				SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH *****) Kekhususan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
FUNGSI	7				PARIWISATA
SUB FUNGSI	7.01				KEBUDAYAAN
VARIAN KODE ORGANISASI	??	0-0	0-0	??	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										9	9					UNSUR KEKHUSUSAN
										9.03	9	03				SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH *****) Kekhususan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
										9.03.02	9	03	02			PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH (MAA) *****) KDA
										9.03.02.1.01	9	03	02	1.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat *****) KDA
1.1.5.72.3	Rekrutmen Pembacaan Narit maja/Seumapa	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	5	72	3	4	4.1	9.03.02.1.01.01	9	03	02	1.01	01	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan tarian tradisional *****) KDA
										9.03.02.1.01.02	9	03	02	1.01	02	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi *****) KDA
1.1.5.72.1	Sosialisasi Adat Istiadat	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	5	72	1	4	4.1	9.03.02.1.01.03	9	03	02	1.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat *****) KDA
5.1.2.73.1	Pelestarian Adat Istiadat Sapa Jamee	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	73	1	4	4.1	9.03.02.1.01.03	9	03	02	1.01	03	Sosialisasi Adat Istiadat *****) KDA
1.1.5.71.4	Prosesi Pelaksanaan Nikah Kawin Adat Aceh, Adat Jame dan Adat Kluet	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	5	71	4	4	4.1	9.03.02.1.01.04	9	03	02	1.01	04	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan *****) KDA
1.1.5.72.2	Pembinaan putroe phang tentang pelaksanaan ada perkawinan, tatanan ketrampilan dan sopan santun dalam masyarakat.	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	5	72	2	4	4.1	9.03.02.1.01.04	9	03	02	1.01	04	Pembinaan Keluarga Meudadab dan Adat Perkawinan *****) KDA
										9.03.02.1.01.05	9	03	02	1.01	05	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh *****) KDA
										9.03.02.1.01.06	9	03	02	1.01	06	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										9.03.02.1.02	9	03	02	1.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat *****) KDA
										9.03.02.1.02.01	9	03	02	1.02	01	Pelatihan Peradilan Adat *****) KDA
										9.03.02.1.02.02	9	03	02	1.02	02	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) *****) KDA
										9.03.02.1.02.03	9	03	02	1.02	03	Pembinaan Mediasi Adat *****) KDA
1.1.5.71.7	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	5	71	7	4	4.1	9.03.02.1.02.04	9	03	02	1.02	04	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat *****) KDA
1.1.5.71	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat Aceh	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	5	71		4	4.1	9.03.02.1.03	9	03	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat *****) KDA
1.1.5.71.1	Pembinaan Majelis Adat Kecamatan	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	5	71	1	4	4.1	9.03.02.1.03.01	9	03	02	1.03	01	Pembinaan kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan *****) KDA
1.1.5.71.5	Reward Kepada Pelaku Adat, Pemangku Adat dan Tokoh Adat	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	5	71	5	4	4.1	9.03.02.1.03.02	9	03	02	1.03	02	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat *****) KDA
										9.03.02.1.03.03	9	03	02	1.03	03	Rapat Kerja MAA *****) KDA
										9.03.02.1.03.04	9	03	02	1.03	04	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat *****) KDA
										9.03.02.1.03.05	9	03	02	1.03	05	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat *****) KDA
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB_KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1		4	4.1	X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB_KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
										X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB_KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	2	28	4	4.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	2	42	4	4.1	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.1.2.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	2	44	4	4.1	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	3		4	4.1	X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	3	2	4	4.1	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
5.1.2.3.4	Pengadaan pakaian KORPRI	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	3	4	4	4.1	X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat Majelis Adat Aceh	5	1	2	3	5	4	4.1	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.23	2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN; URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
FUNGSI	8	1			PENDIDIKAN; PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	8.03	1.02			PERPUSTAKAAN; KEARSIPAN
VARIAN KODE ORGANISASI	2-23	2-24	0-0	02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.2.12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	19	2	2.17	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										2.23	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
										2.23.02	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
										2.23.02.2.01	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										2.23.02.2.01.01	2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
										2.23.02.2.01.02	2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										2.23.02.2.01.03	2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.23.02.2.01.04	2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
										2.23.02.2.01.05	2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.23.02.2.01.06	2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										2.23.02.2.01.07	2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.23.02.2.01.08	2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka
										2.23.02.2.01.09	2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.23.02.2.01.10	2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										2.23.02.2.02	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.1.3.1.1	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	2	1	3	1	1	2	2.17	2.23.02.2.02.01	2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	2	1	3	1	1	2	2.17	2.23.02.2.02.02	2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
										2.23.02.2.02.03	2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
										2.23.02.2.02.04	2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
										2.23.02.2.02.05	2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi
										2.23.03	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
										2.23.03.2.01	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
										2.23.03.2.01.01	2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
										2.23.03.2.01.02	2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan
										2.23.03.2.02	2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.23.03.2.02.01	2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
										2.23.03.2.02.02	2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
										2.24	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
										2.24.02	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
										2.24.02.2.01	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
										2.24.02.2.01.01	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
										2.24.02.2.01.02	2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.18)	2	1	3	16	1	2	2.18	2.24.02.2.02	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2.1.3.16.1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.18)	2	1	3	16	1	2	2.18	2.24.02.2.02.01	2	24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI
	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.18)	2	1	3	16	1	2	2.18	2.24.02.2.02.02	2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
										2.24.02.2.03	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.1.3.15.1	Pembangunan data base informasi kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.18)	2	1	3	15	1	2	2.18	2.24.02.2.03.01	2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN
	Pembangunan data base informasi kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.18)	2	1	3	15	1	2	2.18	2.24.02.2.03.02	2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
										2.24.03	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
										2.24.03.2.01	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun
										2.24.03.2.01.01	2	24	03	2.01	01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
										2.24.03.2.01.02	2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
										2.24.03.2.02	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.24.03.2.02.01	2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
										2.24.03.2.02.02	2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
										2.24.03.2.03	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2.1.3.16.2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.18)	2	1	3	16	2	2	2.18	2.24.03.2.03.01	2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.1.3.16.3	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.18)	2	1	3	16	3	2	2.18	2.24.03.2.03.01	2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
										2.24.03.2.03.02	2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
										2.24.03.2.03.03	2	24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan
										2.24.03.2.03.04	2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
										2.24.03.2.04	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
										2.24.03.2.04.01	2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
										2.24.03.2.04.02	2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
										2.24.03.2.05	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
										2.24.03.2.05.01	2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang
										2.24.03.2.05.02	2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang
										2.24.03.2.05.03	2	24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
										2.24.04	2	24	04			PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP
										2.24.04.2.01	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
										2.24.04.2.01.01	2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.24.04.2.01.02	2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.2.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	1	2	2.17	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	2	2	2.17	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.2.3	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	3	2	2.17	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.2.4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	4	2	2.17	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.2.5	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	5	2	2.17	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.2.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	6	2	2.17	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.2.7	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	7	2	2.17	x.xx.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.2.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	8	2	2.17	x.xx.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.2.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	9	2	2.17	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.2.10	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	10	2	2.17	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	2	18	2	2.17	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.3.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	3	1	2	2.17	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.3.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	3	2	2	2.17	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.3.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	3	3	2	2.17	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.3.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	3	4	2	2.17	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.3.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.17)	5	1	2	3	5	2	2.17	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN	3.25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
FUNGSI	3					EKONOMI
SUB FUNGSI	3.09					KELAUTAN DAN PERIKANAN
VARIAN KODE ORGANISASI	3-25	0-0	0-0	01		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_ URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
										3.25	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
										3.25.02	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
										3.25.02.2.01	3	25	02	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
4.1.1.27.10	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah)	Dinas Kelautan dan Perikanan	4	1	1	27	10	3	3.1	3.25.02.2.01.01	3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.25.02.2.01.02	3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
										3.25.02.2.01.03	3	25	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
										3.25.02.2.02	3	25	02	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1.21.6	Penyedia Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan (Program pengembangan perikanan tangkap)	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	1	1	21	6	3	3.1	3.25.02.2.02.01	3	25	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
	Penyedia Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan									3.25.02.2.02.02	3	25	02	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
	Penyedia Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan									3.25.02.2.02.03	3	25	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.25.02.2.03	3	25	02	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.25.02.2.03.01	3	25	02	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
										3.25.02.2.03.02	3	25	02	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
										3.25.02.2.04	3	25	02	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
										3.25.02.2.04.01	3	25	02	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
										3.25.02.2.04.02	3	25	02	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT
										3.25.02.2.05	3	25	02	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
										3.25.02.2.05.01	3	25	02	2.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
										3.25.02.2.05.02	3	25	02	2.05	02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
										3.25.02.2.06	3	25	02	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										3.25.02.2.06.01	3	25	02	2.06	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.25.02.2.06.02	3	25	02	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
										3.25.03	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
										3.25.03.2.01	3	25	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										3.25.03.2.01.01	3	25	03	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
										3.25.03.2.01.02	3	25	03	2.01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.25.03.2.02	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
										3.25.03.2.02.01	3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
8.1.1.20.8	Pengembangan bibit ikan unggul	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	1	1	20	8	3	3.1	3.25.03.2.02.02	3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
										3.25.03.2.02.03	3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.25.03.2.02.04	3	25	03	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
										3.25.03.2.03	3	25	03	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
										3.25.03.2.03.01	3	25	03	2.03	01	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										3.25.03.2.03.02	3	25	03	2.03	02	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										3.25.03.2.04	3	25	03	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.25.03.2.04.01	3	25	03	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1.20.2	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (Program pengembangan budidaya perikanan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	1	1	20	2	3	3.1	3.25.03.2.04.02	3	25	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										3.25.03.2.04.03	3	25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										3.25.03.2.04.04	3	25	03	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1.20.3	Pembinaan dan pengembangan perikanan (Program pengembangan budidaya perikanan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	1	1	20	3	3	3.1	3.25.03.2.04.05	3	25	03	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
										3.25.03.2.04.06	3	25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.25.03.2.04.07	3	25	03	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
										3.25.04	3	25	04			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
										3.25.04.2.01	3	25	04	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
										3.25.04.2.01.01	3	25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.25.04.2.01.02	3	25	04	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
										3.25.05	3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
										3.25.05.2.01	3	25	05	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.25.05.2.01.01	3	25	05	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										3.25.05.2.02	3	25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
8.1.1.23.5	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan (Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	1	1	23	5	3	3.1	3.25.05.2.02.01	3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
										3.25.05.2.03	3	25	05	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
										3.25.05.2.03.01	3	25	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1.23.2	Pembangunan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan (Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	1	1	23	2	3	3.1	3.25.05.2.03.02	3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1.21.14	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap (Program pengembangan perikanan tangkap)	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	1	1	21	14	3	3.1	3.25.05.2.03.02	3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.1.1.25.1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan) aktivitas / layanan Fasilitas pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	1	1	25	1	3	3.1	3.25.05.2.03.02	3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1.23.3	Pembangunan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan (Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	1	1	23	3	3	3.1	3.25.05.2.03.02	3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8.1.1.20.11	Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	1	1	20	11	3	3.1	3.25.05.2.03.02	3	25	05	2.03	02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.20	Konsultasi Dalam Daerah (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran)	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	20	3	3.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
4.1.1.27.5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah)	Dinas Kelautan dan Perikanan	4	1	1	27	5	3	3.1	X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
5.1.2.6.6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	6	6	3	3.1	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	1	3	3.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	2	3	3.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
5.1.2.1.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor/Rumah Dinas (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran)	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	21	3	3.1	X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	7	3	3.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	8	3	3.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	10	3	3.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	11	3	3.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	12	3	3.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	15	3	3.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	17	3	3.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	1	18	3	3.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	2	5	3	3.1	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	2	7	3	3.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	2	9	3	3.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	2	10	3	3.1	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	2	22	3	3.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	2	24	3	3.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	2	26	3	3.1	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	2	28	3	3.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	1	2	2	42	3	3.1	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKALATUR
URUSAN	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN	3.26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
FUNGSI	7				PARIWISATA
SUB FUNGSI	7.02				PARIWISATA
VARIAN KODE ORGANISASI	3-26	0-0	0-0	01	DINAS PARIWISATA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
										3.26	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
										3.26.02	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
										3.26.02.2.01	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.02.2.01.01	3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.02.2.01.02	3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
9.1.2.16.2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Dinas Pariwisata	9	1	2	16	2	3	3.2	3.26.02.2.01.03	3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.02.2.01.04	3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.02	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.02.01	3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.02.02	3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.02.03	3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.26.02.2.02.04	3	26	02	2.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.02.05	3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.02.06	3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.02.07	3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.03	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.02.2.03.01	3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
9.1.2.16.6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Dinas Pariwisata	9	1	2	16	6	3	3.2	3.26.02.2.03.02	3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.02.2.03.03	3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.02.2.03.04	3	26	02	2.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.02.2.03.05	3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.02.2.03.06	3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.03.07	3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.04	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.04.01	3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.04.02	3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
										3.26.02.2.04.03	3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata
										3.26.03	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
										3.26.03.2.01	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
9.1.2.15.2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata	9	1	2	15	2	3	3.2	3.26.03.2.01.01	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
9.1.2.15.3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Dinas Pariwisata	9	1	2	15	3	3	3.2	3.26.03.2.01.02	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
9.1.2.17.11	Pelaksanaan Gebyar Wisata Nusantara	Dinas Pariwisata	9	1	2	17	11	3	3.2	3.26.03.2.01.02	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
9.1.2.15.6	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata	Dinas Pariwisata	9	1	2	15	6	3	3.2	3.26.03.2.01.03	3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
9.1.2.17.1	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Dinas Pariwisata	9	1	2	17	1	3	3.2	3.26.03.2.01.03	3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
9.1.2.15.5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Dinas Pariwisata	9	1	2	15	5	3	3.2	3.26.03.2.01.04	3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
										3.26.04	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
										3.26.04.2.01	3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
										3.26.04.2.01.01	3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
										3.26.05	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
										3.26.05.2.01	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
9.1.2.17.10	Pemilihan/Pengiriman Duta Wisata	Dinas Pariwisata	9	1	2	17	10	3	3.2	3.26.05.2.01.01	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
9.1.2.17.8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Dinas Pariwisata	9	1	2	17	8	3	3.2	3.26.05.2.01.02	3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.05.2.01.03	3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
9.1.2.15.8	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Dinas Pariwisata	9	1	2	15	8	3	3.2	3.26.05.2.01.04	3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
										3.26.05.2.01.05	3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									3.26.05.2.01.06	3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke dalam daerah	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	19	3	3.2	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	1	3	3.2	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	2	3	3.2	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	7	3	3.2	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	8	3	3.2	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	10	3	3.2	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	11	3	3.2	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	12	3	3.2	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	15	3	3.2	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	17	3	3.2	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pariwisata	5	1	2	1	18	3	3.2	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata	5	1	2	2	5	3	3.2	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pariwisata	5	1	2	2	7	3	3.2	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata	5	1	2	2	9	3	3.2	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Pariwisata	5	1	2	2	10	3	3.2	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pariwisata	5	1	2	2	22	3	3.2	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pariwisata	5	1	2	2	24	3	3.2	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Pariwisata	5	1	2	2	26	3	3.2	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pariwisata	5	1	2	2	28	3	3.2	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Pariwisata	5	1	2	3	2	3	3.2	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT D.  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALA**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				
URUSAN	3				
BIDANG URUSAN	3.27				
FUNGSI	3				
SUB FUNGSI	3.06				
VARIAN KODE ORGANISASI	3-27	0-0	0-0	01	

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
										3	3				
										3.27	3	27			
										3.27.02	3	27	02		
										3.27.02.2.01	3	27	02	2.01	
										3.27.02.2.01.01	3	27	02	2.01	01
8.1.1.19.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian	8	1	1	19	2	3	3.3	3.27.02.2.01.02	3	27	02	2.01	02
										3.27.02.2.02	3	27	02	2.02	
										3.27.02.2.02.01	3	27	02	2.02	01
	Pembibitan dan perawatan ternak	Dinas Pertanian	8	1	1	22	2	3	3.3	3.27.02.2.02.01	3	27	02	2.02	01

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
	Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	Dinas Pertanian	8	1	1	22	12	3	3.3	3.27.02.2.02.01	3	27	02	2.02	01
	Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah	Dinas Pertanian	8	1	1	19	18	3	3.3	3.27.02.2.02.01	3	27	02	2.02	01
8.1.1.22.10	Pengembangan Inseminasi Buatan dan Reproduksi	Dinas Pertanian	8	1	1	22	10	3	3.3	3.27.02.2.02.02	3	27	02	2.02	02
										3.27.02.2.02.03	3	27	02	2.02	03
										3.27.02.2.03	3	27	02	2.03	
8.1.1.22.4	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	Dinas Pertanian	8	1	1	22	4	3	3.3	3.27.02.2.03.01	3	27	02	2.03	01
										3.27.02.2.03.02	3	27	02	2.03	02
										3.27.02.2.04	3	27	02	2.04	
										3.27.02.2.04.01	3	27	02	2.04	01
										3.27.02.2.04.02	3	27	02	2.04	02
										3.27.02.2.05	3	27	02	2.05	
										3.27.02.2.05.01	3	27	02	2.05	01
										3.27.02.2.05.02	3	27	02	2.05	02
										3.27.02.2.05.03	3	27	02	2.05	03
8.1.1.19.27	Pemberdayaan BBU (Balai Benih Utama) Padi Kluet Timur	Dinas Pertanian	8	1	1	19	27	3	3.3	3.27.02.2.05.04	3	27	02	2.05	04
8.1.1.19.31	Pemberdayaan BBU Palawija (Trumon)	Dinas Pertanian	8	1	1	19	31	3	3.3	3.27.02.2.05.04	3	27	02	2.05	04
8.1.1.19.32	Pemberdayaan BBU Hortikultura (Labuhanhaji Barat)	Dinas Pertanian	8	1	1	19	32	3	3.3	3.27.02.2.05.04	3	27	02	2.05	04

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
8.1.1.19.29	Pengembangan Tanaman Pangan (aktivitas /layanan operasional BBU)	Dinas Pertanian	8	1	1	19	29	3	3.3	3.27.02.2.05.04	3	27	02	2.05	04
8.1.1.19.11	Pengembangan Tanaman Hortikultura (aktivitas / layanan operasional BBU Hortikultura)	Dinas Pertanian	8	1	1	19	11	3	3.3	3.27.02.2.05.04	3	27	02	2.05	04
8.1.1.19.28	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan (aktivitas/layanan ketersediaan benih)	Dinas Pertanian	8	1	1	19	28	3	3.3	3.27.02.2.05.04	3	27	02	2.05	04
8.1.1.19.3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian	8	1	1	19	3	3	3.3	3.27.02.2.05.04	3	27	02	2.05	04
										3.27.02.2.05.05	3	27	02	2.05	05
										3.27.02.2.05.06	3	27	02	2.05	06
										3.27.02.2.06	3	27	02	2.06	
8.1.1.22.2	Pembibitan dan perawatan ternak	Dinas Pertanian	8	1	1	22	2	3	3.3	3.27.02.2.06.01	3	27	02	2.06	01
8.1.1.22.12	Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia	Dinas Pertanian	8	1	1	22	12	3	3.3	3.27.02.2.06.01	3	27	02	2.06	01
8.1.1.19.18	Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Semusim dan Rempah	Dinas Pertanian	8	1	1	19	18	3	3.3	3.27.02.2.06.01	3	27	02	2.06	01
										3.27.02.2.06.02	3	27	02	2.06	02
										3.27.03	3	27	03		
										3.27.03.2.01	3	27	03	2.01	
8.1.1.19.10	Optimalisasi Lahan Pertanian (aktivitas /layanan pembersihan lahan)	Dinas Pertanian	8	1	1	19	10	3	3.3	3.27.03.2.01.01	3	27	03	2.01	01
8.1.1.18.8	Pemuktahiran Pemetaan Sawah Produktif	Dinas Pertanian	8	1	1	18	8	3	3.3	3.27.03.2.01.02	3	27	03	2.01	02
										3.27.03.2.01.03	3	27	03	2.01	03
										3.27.03.2.01.04	3	27	03	2.01	04

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
										3.27.03.2.02	3	27	03	2.02	
8.1.1.19.9	Pembangunan Saluran Irigasi	Dinas Pertanian	8	1	1	19	9	3	3.3	3.27.03.2.02.01	3	27	03	2.02	01
8.1.1.18.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Dinas Pertanian	8	1	1	18	2	3	3.3	3.27.03.2.02.02	3	27	03	2.02	02
8.1.1.19.8	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian	8	1	1	19	8	3	3.3	3.27.03.2.02.03	3	27	03	2.02	03
8.1.1.19.26	Peningkatan Prasarana Perkebunan	Dinas Pertanian	8	1	1	19	26	3	3.3	3.27.03.2.02.03	3	27	03	2.02	03
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									3.27.03.2.02.04	3	27	03	2.02	04
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									3.27.03.2.02.05	3	27	03	2.02	05
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									3.27.03.2.02.06	3	27	03	2.02	06
										3.27.03.2.02.07	3	27	03	2.02	07
8.1.1.20.4	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Dinas Pertanian	8	1	1	20	4	3	3.3	3.27.03.2.02.08	3	27	03	2.02	08
8.1.1.20.5	Penyediaan Prasarana Penunjang Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	Dinas Pertanian	8	1	1	20	5	3	3.3	3.27.03.2.02.08	3	27	03	2.02	08
	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna									3.27.03.2.02.09	3	27	03	2.02	09
8.1.1.18.14	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Dinas Pertanian	8	1	1	18	14	3	3.3	3.27.03.2.02.09	3	27	03	2.02	09
8.1.1.18.15	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Dinas Pertanian	8	1	1	18	15	3	3.3	3.27.03.2.02.09	3	27	03	2.02	09
8.1.1.19.25	Peningkatan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	8	1	1	19	25	3	3.3	3.27.03.2.02.09	3	27	03	2.02	09
8.1.1.22.1	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Dinas Pertanian	8	1	1	22	1	3	3.3	3.27.03.2.02.09	3	27	03	2.02	09
8.1.1.23.7	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat	Dinas Pertanian	8	1	1	23	7	3	3.3	3.27.03.2.02.09	3	27	03	2.02	09

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
8.1.1.22.14	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Peternakan	Dinas Pertanian	8	1	1	22	14	3	3.3	3.27.03.2.02.09	3	27	03	2.02	09
										3.27.03.2.03	3	27	03	2.03	
8.1.1.22.15	Pemberdayaan Kawasan Pembibitan Ternak	Dinas Pertanian	8	1	1	22	15	3	3.3	3.27.03.2.03.01	3	27	03	2.03	01
										3.27.03.2.03.02	3	27	03	2.03	02
										3.27.03.2.04	3	27	03	2.04	
										3.27.03.2.04.01	3	27	03	2.04	01
										3.27.03.2.04.02	3	27	03	2.04	02
										3.27.03.2.04.03	3	27	03	2.04	03
										3.27.04	3	27	04		
										3.27.04.2.01	3	27	04	2.01	
8.1.1.21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Dinas Pertanian	8	1	1	21	2	3	3.3	3.27.04.2.01.01	3	27	04	2.01	01
8.1.1.21.8	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Avian Influenza Pada Hewan	Dinas Pertanian	8	1	1	21	8	3	3.3	3.27.04.2.01.01	3	27	04	2.01	01
										3.27.04.2.01.02	3	27	04	2.01	02
										3.27.04.2.01.03	3	27	04	2.01	03
										3.27.04.2.02	3	27	04	2.02	
										3.27.04.2.02.01	3	27	04	2.02	01
										3.27.04.2.02.02	3	27	04	2.02	02

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
										3.27.04.2.02.03	3	27	04	2.02	03
										3.27.04.2.03	3	27	04	2.03	
										3.27.04.2.03.01	3	27	04	2.03	01
8.1.1.21.7	Kegiatan Peningkatan dan Pembeberdayaan Pusat Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian	8	1	1	21	7	3	3.3	3.27.04.2.03.02	3	27	04	2.03	02
										3.27.04.2.04	3	27	04	2.04	
8.1.1.23.5	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	Dinas Pertanian	8	1	1	23	5	3	3.3	3.27.04.2.04.01	3	27	04	2.04	01
										3.27.04.2.04.02	3	27	04	2.04	02
										3.27.04.2.04.03	3	27	04	2.04	03
										3.27.04.2.04.04	3	27	04	2.04	04
										3.27.04.2.05	3	27	04	2.05	
										3.27.04.2.05.01	3	27	04	2.05	01
										3.27.04.2.05.02	3	27	04	2.05	02
										3.27.05	3	27	05		
										3.27.05.2.01	3	27	05	2.01	
8.1.1.19.7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian	8	1	1	19	7	3	3.3	3.27.05.2.01.01	3	27	05	2.01	01
8.1.1.19.15	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian	8	1	1	19	15	3	3.3	3.27.05.2.01.01	3	27	05	2.01	01
8.1.1.19.23	Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat	Dinas Pertanian	8	1	1	19	23	3	3.3	3.27.05.2.01.01	3	27	05	2.01	01

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
										3.27.05.2.01.02	3	27	05	2.01	02
										3.27.05.2.01.03	3	27	05	2.01	03
										3.27.05.2.01.04	3	27	05	2.01	04
										3.27.05.2.01.05	3	27	05	2.01	05
										3.27.06	3	27	06		
										3.27.06.2.01	3	27	06	2.01	
										3.27.06.2.01.01	3	27	06	2.01	01
										3.27.06.2.01.02	3	27	06	2.01	02
										3.27.06.2.01.03	3	27	06	2.01	03
										3.27.06.2.02	3	27	06	2.02	
										3.27.06.2.02.01	3	27	06	2.02	01
										3.27.06.2.02.02	3	27	06	2.02	02
										3.27.06.2.02.03	3	27	06	2.02	03
										3.27.06.2.02.04	3	27	06	2.02	04
										3.27.06.2.02.05	3	27	06	2.02	05
										3.27.06.2.03	3	27	06	2.03	
										3.27.06.2.03.01	3	27	06	2.03	01

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
										3.27.06.2.03.02	3	27	06	2.03	02
										3.27.07	3	27	07		
										3.27.07.2.01	3	27	07	2.01	
8.1.1.15.1	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Dinas Pertanian	8	1	1	15	1	3	3.3	3.27.07.2.01.01	3	27	07	2.01	01
8.1.1.20.1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian	8	1	1	20	1	3	3.3	3.27.07.2.01.01	3	27	07	2.01	01
8.1.1.20.7	Peningkatan kemampuan Lembaga Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian	8	1	1	20	7	3	3.3	3.27.07.2.01.01	3	27	07	2.01	01
8.1.1.15.2	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Dinas Pertanian	8	1	1	15	2	3	3.3	3.27.07.2.01.02	3	27	07	2.01	02
8.1.1.15.3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Dinas Pertanian	8	1	1	15	3	3	3.3	3.27.07.2.01.02	3	27	07	2.01	02
8.1.1.15.4	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/keompok tani	Dinas Pertanian	8	1	1	15	4	3	3.3	3.27.07.2.01.02	3	27	07	2.01	02
										3.27.07.2.01.03	3	27	07	2.01	03
										3.27.07.2.01.04	3	27	07	2.01	04
										3.28	3	28			
										3.28.02	3	28	02		
										3.28.03	3	28	03		
										3.28.04	3	28	04		
										3.28.04.2.01	3	28	04	2.01	
										3.28.04.2.01.01	3	28	04	2.01	01

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
										3.28.04.2.01.02	3	28	04	2.01	02
										3.28.04.2.01.03	3	28	04	2.01	03
										3.28.04.2.01.04	3	28	04	2.01	04
										3.28.04.2.01.05	3	28	04	2.01	05
										3.28.04.2.01.06	3	28	04	2.01	06
										3.28.04.2.01.07	3	28	04	2.01	07
										3.28.04.2.01.08	3	28	04	2.01	08
										3.28.04.2.01.09	3	28	04	2.01	09
										7.01.02	7	01	02		
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01	
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Pertanian	5	1	2	1	19	3	3.3	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02
										X.XX.01	X	XX	01		
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01	
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01
4.1.1.25.2	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Program Pengembangan Data/Informasi)	Dinas Pertanian	4	1	1	25	2	3	3.3	X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
4.1.1.25.1	Pengumpulan Updating dan Analisis Data dan Informasi Capaian Target Kinerja Progran dan Kegiatan (Program Pengembangan Data/Informasi)	Dinas Pertanian	4	1	1	25	1	3	3.3	X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04
4.1.1.25.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Program Pengembangan Data/Informasi)	Dinas Pertanian	4	1	1	25	3	3	3.3	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02	
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03	
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Pertanian	5	1	2	1	1	3	3.3	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Pertanian	5	1	2	1	2	3	3.3	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Pertanian	5	1	2	1	7	3	3.3	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Pertanian	5	1	2	1	8	3	3.3	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Pertanian	5	1	2	1	10	3	3.3	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Pertanian	5	1	2	1	11	3	3.3	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Pertanian	5	1	2	1	12	3	3.3	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12
5.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Pertanian	5	1	2	1	13	3	3.3	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanian	5	1	2	1	15	3	3.3	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Pertanian	5	1	2	1	17	3	3.3	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Pertanian	5	1	2	1	18	3	3.3	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian	5	1	2	2	5	3	3.3	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Pertanian	5	1	2	2	7	3	3.3	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian	5	1	2	2	9	3	3.3	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24
5.1.2.2.10	Pengadaan meubeleur	Dinas Pertanian	5	1	2	2	10	3	3.3	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Pertanian	5	1	2	2	22	3	3.3	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian	5	1	2	2	24	3	3.3	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Pertanian	5	1	2	2	28	3	3.3	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pertanian	5	1	2	2	42	3	3.3	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39
5.1.2.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Dinas Pertanian	5	1	2	2	44	3	3.3	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04	
5.1.2.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Dinas Pertanian	5	1	2	3	1	3	3.3	X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Pertanian	5	1	2	3	2	3	3.3	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02
5.1.2.3.3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Dinas Pertanian	5	1	2	3	3	3	3.3	X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Pertanian	5	1	2	3	5	3	3.3	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08
5.1.2.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Pertanian	5	1	2	5	1	3	3.3	X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10
5.1.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanian	5	1	2	5	3	3	3.3	X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11
8.1.1.19.24	Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat (aktivitas / layanan pengadaan pupuk)	Dinas Pertanian	8	1	1	19	24	3	3.3	Kewenangan Provinsi	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
7.1.1.16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (Program Peningkatan Ketahanan Pangan (nertanian/perkebunan))	Dinas Pertanian	7	1	1	16	12	3	3.3	Tidak digunakan a/t Lihat Bid - Urusan Ketahanan Pangan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
7.1.1.16.15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija (Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan))	Dinas Pertanian	7	1	1	16	15	3	3.3	Tidak digunakan a/t Lihat Bid - Urusan Ketahanan Pangan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
7.1.1.16.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan (Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan))	Dinas Pertanian	7	1	1	16	20	3	3.3	Tidak digunakan a/t Lihat Bid - Urusan Ketahanan Pangan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
7.1.1.16.29	Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian (Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan))	Dinas Pertanian	7	1	1	16	29	3	3.3	Tidak digunakan a/t Lihat Bid - Urusan Ketahanan Pangan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
7.1.1.16.35	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan (Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan))	Dinas Pertanian	7	1	1	16	35	3	3.3	Tidak digunakan a/t Lihat Bid - Urusan Ketahanan Pangan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.2.1.26.1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pertanian	4	2	1	26	1	3	3.3	Tidak Digunakan Lagi	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
7.1.1.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Dinas Pertanian	7	1	1	16		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.1.1.25	Program Pengembangan Data/Informasi	Dinas Pertanian	4	1	1	25		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.2.1.26	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dinas Pertanian	4	2	1	26		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian	5	1	2	1		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pertanian	5	1	2	2		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Dinas Pertanian	5	1	2	3		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Pertanian	5	1	2	5		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
8.1.1.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian	8	1	1	15		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
8.1.1.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian	8	1	1	18		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
8.1.1.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian	8	1	1	19		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
8.1.1.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Dinas Pertanian	8	1	1	20		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
8.1.1.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dinas Pertanian	8	1	1	21		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PE					
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE				
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22
8.1.1.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Pertanian	8	1	1	22		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
8.1.1.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Pertanian	8	1	1	23		3	3.3	Tidak perlu dipetakan	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

**AERAH 2019 - 2023**  
**IM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

<b>NOMENKALATUR</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>
<b>EKONOMI</b>
<b>PERTANIAN</b>
<b>DINAS PERTANIAN</b>

<b>METAAN</b>
<b>NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA</b>
<b>23</b>
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan

Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak

Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain

Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

Pengembangan Prasarana Pertanian

Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Pembangunan Prasarana Pertanian

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum

Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum

Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum

**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

Penanganan atas Pelanggaran kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian

Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan

Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan

Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan

Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan

Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

## PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

## URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

## PROGRAM PERENCANAAN HUTAN

## PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN

## PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota

Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota

Pengawetan Koridor Hidupan Liar

Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota

Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota

Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Administrasi Umum

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pengadaan Mobil Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

**METAAN****NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA**

23

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Pengadaan Pakaian Korpri

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas

Pemindahan Tugas PNS

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

#N/A

#N/A

**METAAN**

NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA

23

#N/A

<b>METAAN</b>
---------------

<b>NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA</b>
--

23
----

#N/A
------

#N/A
------

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

	URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKALATUR
	URUSAN	2	3				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR; URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
BIDANG URUSAN	2.17	3.30	3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH; URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN; URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
FUNGSI	3					EKONOMI	
SUB FUNGSI (1;2;3)	3.03	3.10	3.11			KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH; PERDAGANGAN; PEREINDUSTRIAN	
<b>Di Asel Beda kombinasi</b>	VARIAN KODE ORGANISASI	2-17	3-31	3-30	07	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										3.31	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
										2.17	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
										2.17.02	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
										2.17.02.2.01	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.17.02.2.01.01	2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.17.02.2.02	2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.17.02.2.02.01	2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.17.03	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.17.03.2.01	2	17	03	2.01		Periksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
9.1.4.23.2	Pembinaan , Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	23	2	3	3.6	2.17.03.2.01.01	2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.17.03.2.01.02	2	17	03	2.01	02	Periksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.17.04	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
										2.17.04.2.01	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.17.04.2.01.01	2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.17.04.2.01.02	2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.17.05	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
9.1.4.23.1	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	23	1	3	3.6	2.17.05.2.01	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
9.1.4.20.2	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.7)	9	1	4	20	2	3	3.7	2.17.05.2.01.01	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
9.1.4.20.1	Pengembangan Usaha Bagi Koperasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	20	1	3	3.6	2.17.06.2.01	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
										2.17.06.2.01.01	2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi
										2.17.07	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
9.1.4.21.1	Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil Menengah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	21	1	3	3.6	2.17.07.2.01	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
9.1.1.16.2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.7)	9	1	1	16	2	3	3.7	2.17.07.2.01.01	2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
9.1.1.16.7	Pembinaan/Pengawasan Industri Kecil dan Menengah melalui kelompok/organisasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.7)	9	1	1	16	7	3	3.7	2.17.07.2.01.02	2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
										2.17.07.2.01.03	2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
9.1.4.20.1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.7)	9	1	4	20	1	3	3.7	2.17.07.2.01.04	2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.17.07.2.01.05	2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
										2.17.08	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
9.1.4.20.2	Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	20	2	3	3.6	2.17.08.2.01	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
9.1.4.21.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	21	2	3	3.6	2.17.08.2.01.01	2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
										3	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
										3.30	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
										3.30.02	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
										3.30.02.2.01	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
										3.30.02.2.01.01	3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										3.30.02.2.02	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang
										3.30.02.2.02.01	3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
										3.30.02.2.03	3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri
										3.30.02.2.03.01	3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
										3.30.02.2.03.02	3	30	02	2.03	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
										3.30.02.2.04	3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri
										3.30.02.2.04.01	3	30	02	2.04	01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.30.02.2.04.02	3	30	02	2.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
										3.30.02.2.05	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat
										3.30.02.2.05.01	3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
										3.30.02.2.06	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
										3.30.02.2.06.01	3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya
										3.30.02.2.06.02	3	30	02	2.06	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2
										3.30.02.2.06.03	3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)
										3.30.02.2.07	3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
										3.30.02.2.07.01	3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
										3.30.03	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
										3.30.03.2.01	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
9.1.4.18.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	18	3	3	3.6	3.30.03.2.01.01	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
										3.30.03.2.01.02	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
										3.30.03.2.02	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
										3.30.03.2.02.01	3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
										3.30.03.2.02.02	3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
										3.30.04	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.30.04.2.01	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
										3.30.04.2.01.01	3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
										3.30.04.2.01.02	3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
										3.30.04.2.01.03	3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
										3.30.04.2.02	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
										3.30.04.2.02.01	3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
9.1.4.15.3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	15	3	3	3.6	3.30.04.2.02.02	3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
										3.30.04.2.02.03	3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
										3.30.04.2.03	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										3.30.04.2.03.01	3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
										3.30.04.2.03.02	3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
										3.30.04.2.03.03	3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
										3.30.05	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
										3.30.05.2.01	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										3.30.05.2.01.01	3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
										3.30.05.2.01.02	3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional
										3.30.05.2.01.03	3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.30.05.2.01.04	3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
										3.30.05.2.01.05	3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor
										3.30.05.2.01.06	3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
										3.30.06	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
9.1.4.15.4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	15	4	3	3.6	3.30.06.2.01	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
										3.30.06.2.01.01	3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
										3.30.06.2.01.02	3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
										3.30.06.2.01.03	3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal
										3.30.07	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
										3.30.07.2.01	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
										3.30.07.2.01.01	3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
										3.30.07.2.01.02	3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
9.1.4.18.6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.6)	9	1	4	18	6	3	3.6	3.30.07.2.01.03	3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
										3.31	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
										3.31.02	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
										3.31.02.2.01	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
										3.31.02.2.01.01	3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.31.02.2.01.02	3	31	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
										3.31.02.2.01.03	3	31	02	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
										3.31.02.2.01.04	3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
										3.31.02.2.01.05	3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
										3.31.02.2.01.06	3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
										3.31.03	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
										3.31.03.2.01	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah
										3.31.03.2.01.01	3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
										3.31.03.2.01.02	3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan
										3.31.03.2.01.03	3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri
										3.31.04	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
										3.31.04.2.01	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
										3.31.04.2.01.01	3	31	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
										3.31.04.2.01.02	3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota
9.1.1.16.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.7)	9	1	1	16	1	3	3.7	3.31.04.2.01.??	3	31	04	2.01	??	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
9.1.1.16.8	Pengembangan Kawasan Industri Daerah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.7)	9	1	1	16	8	3	3.7	3.31.04.2.01.??	3	31	04	2.01	??	Pengembangan Kawasan Industri Daerah
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
9.1.4.20.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (3.7)	9	1	4	20	3	3	3.7	X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	1	2	2.11	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	2	2	2.11	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
5.1.2.1.21	Penyediaan Jasa Pengamanan Gudang/Kantor/Rumah Jabatan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	21	2	2.11	X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	7	2	2.11	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	8	2	2.11	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	10	2	2.11	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	11	2	2.11	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	12	2	2.11	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	15	2	2.11	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	17	2	2.11	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	1	18	2	2.11	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	2	7	2	2.11	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	2	9	2	2.11	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	2	10	2	2.11	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	2	22	2	2.11	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	2	24	2	2.11	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	2	26	2	2.11	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	2	28	2	2.11	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	3	2	2	2.11	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (2.11)	5	1	2	3	5	2	2.11	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	2	3				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	2.07	3.32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA; URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
FUNGSI	3					EKONOMI
SUB FUNGSI	3.02	3.12				TENAGA KERJA; TRANSMIGRASI
VARIAN KODE ORGANISASI	3-32	2-7	0-0	02		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										2.07	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
										2.07.02	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
										2.07.02.2.01	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
7.2.1.15.1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	15	1	2	2.1	2.07.02.2.01.01	2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
										2.07.02.2.01.02	2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
										2.07.03	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
										2.07.03.2.01	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
7.2.1.15.6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	15	6	2	2.1	2.07.03.2.01.01	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
7.2.1.15.2	Pembangunan balai latihan kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	15	2	2	2.1	2.07.03.2.01.02	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
7.2.1.15.3	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	15	3	2	2.1	2.07.03.2.01.02	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
7.2.1.15.4	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	15	4	2	2.1	2.07.03.2.01.02	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
7.2.1.15.7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	15	7	2	2.1	2.07.03.2.01.02	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
7.2.1.15.8	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	15	8	2	2.1	2.07.03.2.01.02	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
7.2.1.15.10	Peningkatan pelayanan dan operasional balai latihan kerja (BLK)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	15	10	2	2.1	2.07.03.2.01.02	2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
										2.07.03.2.02	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
										2.07.03.2.02.01	2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
										2.07.03.2.03	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
										2.07.03.2.03.01	2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
										2.07.03.2.04	2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
7.2.1.16.5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	16	5	2	2.1	2.07.03.2.04.01	2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
										2.07.03.2.05	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
										2.07.03.2.05.01	2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
										2.07.04	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
										2.07.04.2.01	2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
										2.07.04.2.01.01	2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
										2.07.04.2.01.02	2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja
										2.07.04.2.01.03	2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
										2.07.04.2.01.04	2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
										2.07.04.2.02	2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.07.04.2.02.01	2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
										2.07.04.2.02.02	2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
										2.07.04.2.03	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
										2.07.04.2.03.01	2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
7.2.1.16.1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	16	1	2	2.1	2.07.04.2.03.02	2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
										2.07.04.2.03.03	2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja
										2.07.04.2.04	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
										2.07.04.2.04.01	2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
										2.07.04.2.04.02	2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
										2.07.04.2.04.03	2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
										2.07.04.2.05	2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.07.04.2.05.01	2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.07.05	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
										2.07.05.2.01	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.07.05.2.01.01	2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
										2.07.05.2.01.02	2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
7.2.1.17.5	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	17	5	2	2.1	2.07.05.2.01.03	2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
										2.07.05.2.02	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
7.2.1.17.4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	17	4	2	2.1	2.07.05.2.02.01	2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
7.2.1.17.3	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	7	2	1	17	3	2	2.1	2.07.05.2.02.02	2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.07.05.2.02.03	2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									2.07.05.2.02.04	2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
										2.07.06	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
										3	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
										3.32	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
										3.32.02	3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
										3.32.02.2.01	3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
9.1.5.18.2	Penataan kembali lokasi transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (3.8)	9	1	5	18	2	3	3.8	3.32.02.2.01.01	3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
										3.32.02.2.01.02	3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
										3.32.02.2.01.03	3	32	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
										3.32.02.2.01.04	3	32	02	2.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
										3.32.03	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
										3.32.03.2.01	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
9.1.5.18.1	Pembangunan lokasi transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (3.8)	9	1	5	18	1	3	3.8	3.32.03.2.01.01	3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
										3.32.03.2.01.02	3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran
										3.32.03.2.01.03	3	32	03	2.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
										3.32.03.2.01.04	3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
										3.32.03.2.01.05	3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.32.03.2.01.06	3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi lokal
										3.32.03.2.01.07	3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi
										3.32.04	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
										3.32.04.2.01	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
9.1.5.15.1	Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (3.8)	9	1	5	15	1	3	3.8	3.32.04.2.01.01	3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
9.1.5.15.3	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (3.8)	9	1	5	15	3	3	3.8	3.32.04.2.01.02	3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	19	2	2.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
4.1.1.19.2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	4	1	1	19	2	2	2.1	X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	1	2	2.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	2	2	2.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	3	2	2.1	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5.1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	6	2	2.1	X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	7	2	2.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	8	2	2.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	10	2	2.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	11	2	2.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	12	2	2.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	15	2	2.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	17	2	2.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	1	18	2	2.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	2	7	2	2.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	2	9	2	2.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	2	22	2	2.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	2	24	2	2.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	2	26	2	2.1	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	2	28	2	2.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	3	2	2	2.1	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2.1)	5	1	2	3	5	2	2.1	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKALATUR
URUSAN	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	4.01					SEKRETARIAT DAERAH
FUNGSI	1					PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.10					SEKRETARIAT DAERAH
VARIAN KODE ORGANISASI	4-1	0-0	0-0	01		SEKRETARIAT DAERAH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										4	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
										1.03	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.1.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	3	4	4.1	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
5.1.2.2.2	Pembangunan rumah dinas	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	2	4	4.1	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
5.1.2.2.1	Pembangunan rumah jabatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	1	4	4.1	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										1.05.02	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										1.05.02.2.01	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										1.05.02.2.01.01	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
										1.05.02.2.01.02	1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.4.3.74.1	Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Sekretariat Daerah Kabupaten	3	4	3	74	1	4	4.1	1.05.02.2.01.03	1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
										1.05.02.2.01.04	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
										1.05.02.2.01.05	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
										1.05.02.2.01.06	1	05	02	2.01	06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja
										1.05.02.2.01.07	1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
										1.05.02.2.01.08	1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
										1.05.02.2.02	1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
										1.05.02.2.02.01	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
3.4.3.74.2	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Sekretariat Daerah Kabupaten	3	4	3	74	2	4	4.1	1.05.02.2.02.02	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
										1.05.02.2.02.03	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
										1.06.05	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
										1.06.05.2.01	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
										1.06.05.2.01.01	1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
										1.06.05.2.01.02	1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar
										1.06.05.2.01.03	1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
										1.06.05.2.02	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
										1.06.05.2.02.01	1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3.4.2.41.2	Verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial	Sekretariat Daerah Kabupaten	3	4	2	41	2	4	4.1	1.06.05.2.02.02	1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
										2.10	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
										2.10.02	2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.10.02.2.01	2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.02.2.01.01	2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
										2.10.03	2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
										2.10.04	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
										2.10.04.2.01	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Aktivitas/layanan Penyelesaian Konflik Batas dan Pertanahan)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	81	1	4	4.1	2.10.04.2.01.01	2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
										2.10.04.2.01.02	2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
										2.10.05	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
										2.10.05.2.01	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.05.2.01.01	2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.05.2.01.02	2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.06	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
										2.10.06.2.01	2	10	06	2.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.06.2.01.01	2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
										2.10.06.2.01.02	2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
										2.10.06.2.01.03	2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota
										2.10.06.2.01.04	2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota
										2.10.07	2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
										2.10.07.2.01	2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.10.07.2.01.01	2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.07.2.01.02	2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.07.2.01.03	2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
										2.10.08	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
										2.10.08.2.01	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
										2.10.08.2.01.01	2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
										2.10.08.2.02	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
										2.10.08.2.02.01	2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
										2.10.08.2.02.02	2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong
										2.10.09	2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
										2.10.09.2.01	2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah
										2.10.09.2.01.01	2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
										2.10.09.2.01.02	2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
										2.10.10	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
										2.10.10.2.01	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
										2.10.10.2.01.01	2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
										2.10.10.2.01.02	2	10	10	2.01	02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.10.10.2.01.03	2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
										2.13.02	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA
										2.13.02.2.01	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.13.02.2.01.01	2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
										2.13.02.2.01.02	2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
										2.13.02.2.01.03	2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
										2.13.02.2.01.04	2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
										2.13.02.2.01.05	2	13	02	2.01	05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah
										2.13.02.2.01.06	2	13	02	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
										2.13.02.2.01.07	2	13	02	2.01	07	Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa
										2.13.03	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
										2.13.03.2.01	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa
										2.13.03.2.01.01	2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa
										2.13.03.2.01.02	2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga
										2.13.04	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
										2.13.04.2.01	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5.1.2.60.4	Pembinaan Monitoring dan evaluasi pemerintahan Gampong tingkat kabupaten	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	60	4	4	4.1	2.13.04.2.01.01	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
5.1.2.60.3	Pendampingan pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong (LPPG)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	60	3	4	4.1	2.13.04.2.01.01	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
										2.13.04.2.01.02	2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
										2.13.04.2.01.03	2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
										2.13.04.2.01.04	2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
5.1.2.60.2	Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	60	2	4	4.1	2.13.04.2.01.05	2	13	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD
										2.13.04.2.01.06	2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.13.04.2.01.07	2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
										2.13.04.2.01.08	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
										2.13.04.2.01.09	2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
										2.13.04.2.01.10	2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
										2.13.04.2.01.11	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	83	1	4	4.1	2.13.04.2.01.12	2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
										2.13.05	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
										2.13.05.2.01	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
										2.13.05.2.01.01	2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
										2.13.05.2.01.02	2	13	05	2.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
5.1.2.83.1	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	83	1	4	4.1	2.13.05.2.01.03	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
										2.13.05.2.01.04	2	13	05	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
										2.13.05.2.01.05	2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
										2.15.02	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
										2.15.02.2.01	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.01.01	2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.01.02	2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.01.03	2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.02	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.02.01	2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.84.2	Pengadaan Lampu Jalan Nasional / Daerah / Desa dan Gampong	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	84	2	4	4.1	2.15.02.2.02.02	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
5.1.2.84.1	Penyediaan Instalasi / Jaringan dan Rekening Listrik Lampu Jalan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	84	1	4	4.1	2.15.02.2.02.02	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
										2.15.02.2.02.03	2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
5.1.2.84.3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lampu Jalan nasional/ daerah/desa dan gampong	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	84	3	4	4.1	2.15.02.2.02.04	2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	Tunggakan Rekening Lampu Jalan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	84	2	4	4.1	2.15.02.2.02.04	2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
										2.16.02	2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
										2.16.02.2.01	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.16.02.2.01.01	2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
										2.16.02.2.01.02	2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
										2.16.02.2.01.03	2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
										2.16.02.2.01.04	2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
										2.16.02.2.01.05	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
										2.16.02.2.01.06	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik
										2.16.02.2.01.07	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media
										2.16.02.2.01.08	2	16	02	2.01	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
										2.16.02.2.01.09	2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis
										2.16.02.2.01.10	2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
										2.16.02.2.01.11	2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
2.1.3.77.3	Peningkatan jalinan harmonisasi pemerintah daerah dengan media masa	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	77	3	4	4.1	2.16.02.2.01.12	2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
										2.16.03	2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.16.03.2.02	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										2.16.03.2.02.01	2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
										2.16.03.2.02.02	2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
										2.16.03.2.02.03	2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
										2.16.03.2.02.04	2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
										2.16.03.2.02.05	2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
										2.16.03.2.02.06	2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
										2.16.03.2.02.07	2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.1.2.5.10	Pengintegrasian Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	10	4	4.1	2.16.03.2.02.08	2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
										2.16.03.2.02.09	2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
										2.16.03.2.02.10	2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
										2.16.03.2.02.11	2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
										2.18.03	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
										2.18.03.2.01	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
										2.18.03.2.01.01	2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
9.1.1.92.1	Penyelenggaraan pameran investasi	Sekretariat Daerah Kabupaten	9	1	1	92	1	4	4.1	2.18.03.2.01.02	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
										3.30.03	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
										3.30.03.2.01	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
										3.30.03.2.01.01	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
										3.30.03.2.01.02	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										3.30.03.2.02	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
7.2.1.91.1	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima asongan	Sekretariat Daerah Kabupaten	7	2	1	91	1	4	4.1	3.30.03.2.02.01	3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
										3.30.03.2.02.02	3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
										4.01.02	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
										4.01.02.2.01	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan
	Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah (Aktivitas/Layanan Asistensi SKPD)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	76	1	4	4.1	4.01.02.2.01.01	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan
5.1.2.5.16	Penyusunan tata naskah dinas Kabupaten Aceh Selatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	16	4	4.1	4.01.02.2.01.01	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan
5.1.2.88.1	Inventarisasi dan verifikasi unsur rupabumi	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	88	1	4	4.1	4.01.02.2.01.02	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah
5.1.2.88.2	Kegiatan pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi rupabumi berbasis geospasial	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	88	2	4	4.1	4.01.02.2.01.02	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah
5.1.1.81.5	Monitoring dan evaluasi batas daerah antar kabupaten/kota, antar kecamatan, antar desa dan antar kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	81	5	4	4.1	4.01.02.2.01.02	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah
5.1.1.81.4	Pembangunan dan pemeliharaan pilar batas desa daerah antar kabupaten/kota, antar kecamatan, antar desa dan antar kelurahan dalam wilayah kabupaten kota	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	81	4	4	4.1	4.01.02.2.01.02	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah
5.1.2.60.1	Pembinaan, Monitoring, dan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Paten	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	60	1	4	4.1	4.01.02.2.01.02	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah
5.1.2.93.1	Penataan, penentuan/ penataan batas wilayah	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	93	1	4	4.1	4.01.02.2.01.02	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah
5.1.1.81.2	Penataan, penentuan/penataan batas wilayah	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	81	2	4	4.1	4.01.02.2.01.02	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah
5.1.1.81.3	Penegasan batas antar kecamatan, antar desa dan antar kelurahan dalam wilayah kabupaten kota	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	81	3	4	4.1	4.01.02.2.01.02	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Wilayah
5.1.1.80.3	Forum Konsultasi Publik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	80	3	4	4.1	4.01.02.2.01.03	4	01	02	2.01	03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
										4.01.02.2.02	4	01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
1.1.1.57.2	Muzakarah Ulama (OTSUSU)	Sekretariat Daerah Kabupaten	1	1	1	57	2	4	4.1	4.01.02.2.02.01	4	01	02	2.02	01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
1.1.1.57.9	Pelaksanaan Haji, umroh dan ibadah lainnya	Sekretariat Daerah Kabupaten	1	1	1	57	9	4	4.1	4.01.02.2.02.01	4	01	02	2.02	01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
5.1.2.85.1	Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	85	1	4	4.1	4.01.02.2.02.02	4	01	02	2.02	02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
9.1.1.92.2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Dari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi) Aktivitas /Layanan TPID (Tim pengendali inflasi daerah)	Sekretariat Daerah Kabupaten	9	1	1	92	2	4	4.1	4.01.02.2.02.03	4	01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
5.1.1.81.1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Aktivitas/layanan Pembinaan dan Pengawasan PPAT)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	81	1	4	4.1	4.01.02.2.02.03	4	01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
5.1.1.80.4	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	80	4	4	4.1	4.01.02.2.02.03	4	01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
5.1.2.5.15	Penyusunan survey kepuasan masyarakat	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	15	4	4.1	4.01.02.2.02.03	4	01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
										4.01.02.2.03	4	01	02	2.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
5.1.2.86.3	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	86	3	4	4.1	4.01.02.2.03.01	4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
5.1.2.86.2	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	86	2	4	4.1	4.01.02.2.03.01	4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
5.1.1.80.5	Bantuan Hukum Dan Konsultasi Hukum	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	80	5	4	4.1	4.01.02.2.03.02	4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum
3.4.3.75.1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Sekretariat Daerah Kabupaten	3	4	3	75	1	4	4.1	4.01.02.2.03.02	4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum
3.4.3.79.1	Pelaksanaan Kelom pencapir Sadar Hukum	Sekretariat Daerah Kabupaten	3	4	3	79	1	4	4.1	4.01.02.2.03.03	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
5.1.1.80.8	Pelaksanaan RAN HAM	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	80	8	4	4.1	4.01.02.2.03.03	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
5.1.2.86.4	Publikasi Peraturan Peundang-Undangan.	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	86	4	4	4.1	4.01.02.2.03.03	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
										4.01.02.2.04	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Dari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi) Aktivitas/Layanan Kerjasama Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	9	1	1	92	2	4	4.1	4.01.02.2.04.01	4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
										4.01.02.2.04.02	4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Dari Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi) Aktivitas/Layanan Kerjasama Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	9	1	1	92	2	4	4.1	4.01.02.2.04.03	4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
										4.01.03	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
										4.01.03.2.01	4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
										4.01.03.2.01.01	4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										4.01.03.2.01.02	4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
										4.01.03.2.01.03	4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
										4.01.03.2.02	4	01	03	2.02		Administrasi Pembangunan
										4.01.03.2.02.01	4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
										4.01.03.2.02.02	4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
5.1.2.82.2	Monitoring evaluasi pembangunan kabupaten ( Dari Program Peningkatan Evaluasi dan Administrasi Pembangunan) Aktivitas / Layanan ?????	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	82	2	4	4.1	4.01.03.2.02.03	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4.2.1.47.2	Penyusunan LAKIP	Sekretariat Daerah Kabupaten	4	2	1	47	2	4	4.1	4.01.03.2.02.03	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
5.1.2.82.3	Penyusunan laporan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	82	3	4	4.1	4.01.03.2.02.03	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
5.1.2.6.5	Sosialisasi tentang laporan realisasi fisik dan keuangan pembangunan kabupaten	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	6	5	4	4.1	4.01.03.2.02.03	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
										4.01.03.2.03	4	01	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa
5.1.2.87.2	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	87	2	4	4.1	4.01.03.2.03.01	4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
5.1.2.87.1	Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	87	1	4	4.1	4.01.03.2.03.02	4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
5.1.2.87.4	Bimtek Peningkatan dan Penguatan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Bagi pelaku Usaha	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	87	4	4	4.1	4.01.03.2.03.03	4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
5.1.2.87.3	Pengendalian dan Evaluasi Percepatan Pelelangan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	87	3	4	4.1	4.01.03.2.03.03	4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
										4.01.03.2.04	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam
										4.01.03.2.04.01	4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
										4.01.03.2.04.02	4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
										4.01.03.2.04.03	4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
										4.01.04	4	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM
										4.01.04.2.01	4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Pembinaan kesejahteraan dan disiplin aparatur (Layanan Administrasi Gaji berkala Aparatur Setdakab)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	3	7	4	4.1	4.01.04.2.01.01	4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
	Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah (Aktivitas/Layanan Informasi dan Tamu)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	76	1	4	4.1	4.01.04.2.01.01	4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
	Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah (Aktivitas/Layanan Manajemen Aplikasi E-Surat)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	76	1	4	4.1	4.01.04.2.01.01	4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
2.1.3.76.1	Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah (Aktivitas/Layanan Penataan Arsip)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	76	1	4	4.1	4.01.04.2.01.01	4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
										4.01.04.2.01.02	4	01	04	2.01	02	Pengelolaan Perlengkapan
5.1.2.2.47	Pengadaan alat listrik rumah jabatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	47	4	4.1	4.01.04.2.01.03	4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga
3.1.2.28.14	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	3	1	2	28	14	4	4.1	4.01.04.2.01.03	4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga
5.1.2.16.14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rumah Jabatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	16	14	4	4.1	4.01.04.2.01.03	4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga
5.1.2.16.13	Penyediaan Sandang / Pangan (Logistik) Rumah Jabatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	16	13	4	4.1	4.01.04.2.01.03	4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga
										4.01.04.2.02	4	01	04	2.02		Penataan Organisasi
5.1.2.5.11	Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) PNS Kabupaten Aceh Selatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	11	4	4.1	4.01.04.2.02.01	4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
5.1.2.5.18	Penyusunan peta proses bisnis instansi	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	18	4	4.1	4.01.04.2.02.01	4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3.4.3.78.1	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)	Sekretariat Daerah Kabupaten	3	4	3	78	1	4	4.1	4.01.04.2.02.02	4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5.1.2.5.9	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	9	4	4.1	4.01.04.2.02.02	4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5.1.2.89.1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	89	1	4	4.1	4.01.04.2.02.02	4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5.1.2.5.8	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	8	4	4.1	4.01.04.2.02.02	4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5.1.2.5.12	Penyusunan Standart Pelayanan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	12	4	4.1	4.01.04.2.02.02	4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5.1.2.5.14	Evaluasi jabatan Kabupaten Aceh Selatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	14	4	4.1	4.01.04.2.02.03	4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Pembinaan kesejahteraan dan disiplin aparatur (Layanan Administrasi kepegawaian aparatur)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	3	7	4	4.1	4.01.04.2.02.03	4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5.1.2.3.7	Pembinaan kesejahteraan dan disiplin aparatur (Layanan Pemeriksaan absensi PNS Kabupaten)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	3	7	4	4.1	4.01.04.2.02.03	4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.5.17	Penerapan E-Manajemen Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Seelatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	17	4	4.1	4.01.04.2.02.03	4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5.1.2.4.4	Pengurusan SK Pensiun PNS (Layanan administrasi usulan pensiun / pindah tugas)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	4	4	4	4.1	4.01.04.2.02.03	4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5.1.2.82.1	Penyusunan Road Map Kabupaten Aceh Selatan (Reformasi Birokrasi) DPA 2020	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	82	1	4	4.1	4.01.04.2.02.03	4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5.1.2.5.19	Penyusunan standart kompetensi jabatan ASN pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Kompetensi JPTP)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	19	4	4.1	4.01.04.2.02.03	4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
5.1.2.5.13	Sosialisasi/Bimtek Analisis Beban Kerja	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	13	4	4.1	4.01.04.2.02.03	4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
										4.01.04.2.03	4	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.1.1.48.2	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	4	1	1	48	2	4	4.1	4.01.04.2.03.01	4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolkan
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional / Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	4	1	1	48	1	4	4.1	4.01.04.2.03.01	4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolkan
4.1.1.48.4	Penyelenggaraan Hari Darmawanita/PKK dan hari Ibu dan Anak	Sekretariat Daerah Kabupaten	4	1	1	48	4	4	4.1	4.01.04.2.03.01	4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolkan
2.1.3.77.1	penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip (Aktivitas/Layanan penyusunan Pidato Bupati)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	77	1	4	4.1	4.01.04.2.03.01	4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolkan
2.1.3.77.2	Peyusunan protokoler acara serimonial Pemda	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	77	2	4	4.1	4.01.04.2.03.01	4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolkan
5.1.2.16.12	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	16	12	4	4.1	4.01.04.2.03.02	4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
5.1.2.16.11	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	16	11	4	4.1	4.01.04.2.03.02	4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah (Aktivitas/Layanan Koordinasi Kegiatan Pimpinan)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	76	1	4	4.1	4.01.04.2.03.02	4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah (Aktivitas/Layanan Rapat Forkopinda)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	76	1	4	4.1	4.01.04.2.03.02	4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
5.1.2.16.10	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	16	10	4	4.1	4.01.04.2.03.02	4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip (Aktivitas/Layanan Press Reliase/Jurnal)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	77	1	4	4.1	4.01.04.2.03.02	4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip (Aktivitas/Layanan Publikasi Informasi Daerah)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	77	1	4	4.1	4.01.04.2.03.02	4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
5.1.2.16.9	Rapat koordinasi pejabat pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	16	9	4	4.1	4.01.04.2.03.02	4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
5.1.2.16.8	Rapat koordinasi unsur muspida	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	16	8	4	4.1	4.01.04.2.03.02	4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip (Aktivitas/Layanan Penyusunan Buletin / Majalah)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	77	1	4	4.1	4.01.04.2.03.03	4	01	04	2.03	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
										4.01.04.2.04	4	01	04	2.04		Perencanaan dan Keuangan
5.1.2.82.4	Percepatan pembangunan daerah (TP2D)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	82	4	4	4.1	4.01.04.2.04.01	4	01	04	2.04	01	Pengelolaan Perencanaan
										4.01.04.2.04.02	4	01	04	2.04	02	Pengelolaan Keuangan
	Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah (Aktivitas/Layanan Penyusunan Laporan Kegiatan Pimpinan)	Sekretariat Daerah Kabupaten	2	1	3	76	1	4	4.1	4.01.04.2.04.03	4	01	04	2.04	03	Penatausahaan Pelaporan
5.1.2.5.6	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	6	4	4.1	4.01.04.2.04.03	4	01	04	2.04	03	Penatausahaan Pelaporan
5.1.2.5.7	Penyusunan LPPD dan LPOTDA	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	5	7	4	4.1	4.01.04.2.04.03	4	01	04	2.04	03	Penatausahaan Pelaporan
5.1.2.86.1	Kajian peraturan perundang - undangan daerah terhadap peraturan perundang - undangan yang baru / lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang - undangan daerah (Rancangan Revisi Qanun dan Peraturan Bupati tentang SOTK /UPTD) DPA 2020	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	86	1	4	4.1	4.02.03.2.01.03	4	02	03	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
										6.01	6	01				INSPEKTORAT DAERAH
										6.01.02	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
										6.01.02.2.01	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
										6.01.02.2.01.01	6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan
										6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
										6.01.02.2.01.03	6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
5.1.1.80.7	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	80	7	4	4.1	6.01.02.2.01.04	6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
										6.01.02.2.02	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
										6.01.02.2.02.01	6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan
										6.01.02.2.02.02	6	01	02	2.02	02	Review Kinerja dan Keuangan
										6.01.02.2.02.03	6	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	80	7	4	4.1	6.01.02.2.02.04	6	01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
										6.01.03	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
										6.01.03.2.01	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
										6.01.03.2.01.01	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
5.1.1.80.2	Pengawasan Managemen APIP	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	80	2	4	4.1	6.01.03.2.01.02	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										8.01.03	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
										8.01.03.2.01	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
										8.01.03.2.01.01	8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
										8.01.03.2.01.02	8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
										8.01.03.2.01.03	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
5.1.1.80.1	Desk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	80	1	4	4.1	8.01.03.2.01.04	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.80.6	Desk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Legislatif tahun 2019-2024	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	1	80	6	4	4.1	8.01.03.2.01.05	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
5.1.2.90.1	Pembinaan dan monitoring evaluasi serta pengawasan Pilchiksung tahun 2019	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	90	1	4	4.1	8.01.03.2.01.05	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
										8.01.03.2.01.06	8	01	03	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan
										XXX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										XXX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										XXX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										XXX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										XXX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										XXX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										XXX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										XXX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										XXX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										XXX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										XXX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										XXX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										XXX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa
5.1.2.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	6	1	4	4.1	XXX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										XXX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.2.49	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAU)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	49	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.2.48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DBH Pajak)	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	48	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	3	4	4.1	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	12	4	4.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	6	4	4.1	X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.1.2.2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
5.1.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	20	4	4.1	X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5.1.2.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	21	4	4.1	X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	22	4	4.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.1.2.2.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	23	4	4.1	X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Daerah Kabupaten	5	1	2	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur







**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	4.02				SEKRETARIAT DPRD
FUNGSI	1				PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.11				SEKRETARIAT DPRD
VARIAN KODE ORGANISASI	4-2	0-0	0-0	01	SEKRETARIAT DPRD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										4	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
										4.02	4	02				SEKRETARIAT DPRD
										4.02.02	4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
										4.02.02.2.01	4	02	02	2.01		Layanan Administrasi DPRD
										4.02.02.2.01.01	4	02	02	2.01	01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD
5.1.1.15.3	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekretariat DPRK	5	1	1	15	3	4	4.1	4.02.02.2.01.02	4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD
5.1.1.15.4	Rapat-rapat Paripurna	Sekretariat DPRK	5	1	1	15	4	4	4.1	4.02.02.2.01.02	4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD
5.1.1.15.8	Rekrutmen anggota Panwaslih (Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah)	Sekretariat DPRK	5	1	1	15	8	4	4.1	4.02.02.2.01.02	4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD
5.1.1.15.9	Penjaringan Anggota KIP/KPU (Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah)	Sekretariat DPRK	5	1	1	15	9	4	4.1	4.02.02.2.01.02	4	02	02	2.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD
										4.02.02.2.01.03	4	02	02	2.01	03	Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD
5.1.2.16.7	Penyediaan Sandang/Pangan (Logistik) Rumah Jabatan	Sekretariat DPRK	5	1	2	16	7	4	4.1	4.02.02.2.01.04	4	02	02	2.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										4.02.02.2.01.05	4	02	02	2.01	05	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD
										4.02.02.2.01.06	4	02	02	2.01	06	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
										4.02.02.2.02	4	02	02	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
										4.02.02.2.02.01	4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
										4.02.02.2.02.02	4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
										4.02.02.2.02.03	4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
										4.02.03	4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
										4.02.03.2.01	4	02	03	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
										4.02.03.2.01.01	4	02	03	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
5.1.1.15.1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRK	5	1	1	15	1	4	4.1	4.02.03.2.01.02	4	02	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda
										4.02.03.2.01.03	4	02	03	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
										4.02.03.2.01.04	4	02	03	2.01	04	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik
										4.02.03.2.01.05	4	02	03	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD
										4.02.03.2.02	4	02	03	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran
										4.02.03.2.02.01	4	02	03	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS
										4.02.03.2.02.02	4	02	03	2.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
										4.02.03.2.02.03	4	02	03	2.02	03	Pembahasan APBD
										4.02.03.2.02.04	4	02	03	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan
										4.02.03.2.02.05	4	02	03	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester
										4.02.03.2.02.06	4	02	03	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										4.02.03.2.03	4	02	03	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
										4.02.03.2.03.01	4	02	03	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
										4.02.03.2.03.02	4	02	03	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
										4.02.03.2.03.03	4	02	03	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
										4.02.03.2.03.04	4	02	03	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
										4.02.03.2.03.05	4	02	03	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
										4.02.03.2.03.06	4	02	03	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
										4.02.03.2.03.07	4	02	03	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran
										4.02.03.2.04	4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
										4.02.03.2.04.01	4	02	03	2.04	01	Orientasi DPRD
5.1.1.15.7	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRK	5	1	1	15	7	4	4.1	4.02.03.2.04.02	4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD
5.1.1.70.7	Optimalisasi Peran Media Center Pemerintah Daerah	Sekretariat DPRK	5	1	1	70	7	4	4.1	4.02.03.2.04.03	4	02	03	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
										4.02.03.2.04.04	4	02	03	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
										4.02.03.2.04.05	4	02	03	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
										4.02.03.2.04.06	4	02	03	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
										4.02.03.2.04.07	4	02	03	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD
										4.02.03.2.05	4	02	03	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5.1.1.15.6	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK dalam Daerah	Sekretariat DPRK	5	1	1	15	6	4	4.1	4.02.03.2.05.01	4	02	03	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah
										4.02.03.2.05.02	4	02	03	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
5.1.1.15.5	Kegiatan Reses	Sekretariat DPRK	5	1	1	15	5	4	4.1	4.02.03.2.05.03	4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										4.02.03.2.06	4	02	03	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
										4.02.03.2.06.01	4	02	03	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD
										4.02.03.2.06.02	4	02	03	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD
										4.02.03.2.07	4	02	03	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah
										4.02.03.2.07.01	4	02	03	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
										4.02.03.2.07.02	4	02	03	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
										4.02.03.2.08	4	02	03	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
										4.02.03.2.08.01	4	02	03	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
										4.02.03.2.08.02	4	02	03	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD
										4.02.03.2.08.03	4	02	03	2.08	03	Pelaksanaan Undang-undang DPRD
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
5.1.1.69.3	Penyusunan dan finalisasi data program keuangan (Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah)	Sekretariat DPRK	5	1	1	69	3	4	4.1	X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.20	Penyediaan jasa Pengamanan Gedung/ Kantor/ Rumah Jabatan (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran)	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	20	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Administrasi Keuangan-Rekening Belanja 5.1.2.2.1.13 Jasa tenaga pengamanan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	12	4	4.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	13	4	4.1	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.1.2.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	14	4	4.1	X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat DPRK	5	1	2	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	5	4	4.1	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.2.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	6	4	4.1	X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.1.2.2.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	20	4	4.1	X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	22	4	4.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	26	4	4.1	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	28	4	4.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
5.1.2.2.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	41	4	4.1	X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sekretariat DPRK	5	1	2	2	42	4	4.1	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat DPRK	5	1	2	3	2	4	4.1	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKALATUR
URUSAN	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	5.01					PERENCANAAN
FUNGSI	1					PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.05					PERENCANAAN
VARIAN KODE ORGANISASI	5-1	0-0	0-0	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										5	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
										1.03.03	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
										1.03.03.2.01	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4.2.1.16.9	Pendamping Program Pamsimas III, Sanimas IDB dan Kotaku	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	2	16	9	4	4.3	1.03.03.2.01.12	1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
										2.09	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
										2.09.04	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
										2.09.04.2.01	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
4.2.1.22.24	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	24	4	4.3	2.09.04.2.01.01	2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
4.2.1.22.23	Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	23	4	4.3	2.09.04.2.01.01	2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
										2.11	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
										2.11.02	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
										2.11.02.2.01	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
4.2.1.21.49	Penyusunan Dokumen RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	49	4	4.3	2.11.02.2.01.01	2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
										2.11.02.2.01.02	2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
										2.11.02.2.02	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota
										2.11.02.2.02.01	2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
	Usulan dalam revisi Renstra (Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD)									2.11.02.2.02.02	2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
										2.11.02.2.02.03	2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
										2.11.03	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
										2.11.03.2.01	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim, pengurangan resiko bencana (RAD-API PRB)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	2	25	4	4	4.3	2.11.03.2.01.01	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
4.2.2.25.4	Rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim, pengurangan resiko bencana (RAD-API PRB)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	2	25	4	4	4.3	2.11.03.2.01.02	2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
										2.14.02	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
										2.14.02.2.01	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
										2.14.02.2.01.01	2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
4.2.1.23.7	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	7	4	4.3	2.14.02.2.01.02	2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
										2.14.02.2.01.03	2	14	02	2.01	03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
										2.14.02.2.01.04	2	14	02	2.01	04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
										2.14.02.2.02	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
										2.14.02.2.02.01	2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan
										2.14.02.2.02.04	2	14	02	2.02	04	Pemetaan Kependudukan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										2.14.02.2.02.05	2	14	02	2.02	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
										2.14.02.2.02.06	2	14	02	2.02	06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
										2.14.02.2.02.07	2	14	02	2.02	07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
										2.14.02.2.02.10	2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
										2.20	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
										2.20.02	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
										2.20.02.2.01	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
										2.20.02.2.01.01	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
										2.20.02.2.01.02	2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
										2.20.02.2.01.03	2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral
										2.20.02.2.01.04	2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
										2.20.02.2.01.05	2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur
										2.20.02.2.01.06	2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
										5.01	5	01				PERENCANAAN
										5.01.02	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
										5.01.02.2.01	5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.2.1.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	8	4	4.3	5.01.02.2.01.01	5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
4.2.1.21.50	Revisi RPJM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	50	4	4.3	5.01.02.2.01.01	5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
4.2.1.21.51	Revisi RPJP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	51	4	4.3	5.01.02.2.01.01	5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
4.2.1.21.35	Penyusunan rancangan RKPD perubahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	35	4	4.3	5.01.02.2.01.01	5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
4.2.1.21.45	Penyusunan RPJM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	45	4	4.3	5.01.02.2.01.01	5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									5.01.02.2.01.02	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
4.2.1.21.9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	9	4	4.3	5.01.02.2.01.03	5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD									5.01.02.2.01.04	5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
4.2.1.21.21	Integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	21	4	4.3	5.01.02.2.01.05	5	01	02	2.01	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
4.2.1.21.43	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan secara elektronik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	43	4	4.3	5.01.02.2.01.05	5	01	02	2.01	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
4.2.1.22.13	Penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	13	4	4.3	5.01.02.2.01.06	5	01	02	2.01	06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
4.2.1.22.16	Updating Indikator Ekonomi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	16	4	4.3	5.01.02.2.01.07	5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
4.1.1.15.8	Penyusunan Profil BAPPEDA Kabupaten Aceh Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	1	1	15	8	4	4.3	5.01.02.2.01.07	5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
4.1.1.26.1	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Pusat Jejaringan Inovasi Daerah (PUJA INDAH)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	1	1	26	1	4	4.3	5.01.02.2.01.07	5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
4.2.1.22.22	Penyusunan Analisis COR/ICOR Kabupaten Aceh Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	22	4	4.3	5.01.02.2.01.07	5	01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
										5.01.02.2.01.08	5	01	02	2.01	08	Pengamanan Data Informasi Pembangunan Daerah
4.1.1.15.6	Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	1	1	15	6	4	4.3	5.01.02.2.01.09	5	01	02	2.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
										5.01.02.2.02	5	01	02	2.02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
										5.01.02.2.02.01	5	01	02	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah
										5.01.02.2.02.02	5	01	02	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah
4.2.1.21.22	Penyusunan dan pengusulan kegiatan sumber dana DAK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	22	4	4.3	5.01.02.2.02.03	5	01	02	2.02	03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah
										5.01.02.2.03	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
4.2.1.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	13	4	4.3	5.01.02.2.03.01	5	01	02	2.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
										5.01.02.2.03.02	5	01	02	2.03	02	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.1.1.27.1	Pengawasan dan Pemantauan Germas Hidup Sehat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	1	1	27	1	4	4.3	5.01.02.2.03.03	5	01	02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
4.2.1.23.8	Fasilitasi Forum Pendidikan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	8	4	4.3	5.01.02.2.03.03	5	01	02	2.03	03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
										5.01.02.2.03.04	5	01	02	2.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah
										5.01.03	5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
										5.01.03.2.01	5	01	03	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
4.2.1.23.6	Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/konsistensi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	6	4	4.3	5.01.03.2.01.01	5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan
	Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/konsistensi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	6	4	4.3	5.01.03.2.01.02	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan
	Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/konsistensi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	6	4	4.3	5.01.03.2.01.03	5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pemerintahan
										5.01.03.2.02	5	01	03	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
	Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/konsistensi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	6	4	4.3	5.01.03.2.02.01	5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pembangunan Manusia
	Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/konsistensi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	6	4	4.3	5.01.03.2.02.02	5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pembangunan Manusia
	Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/konsistensi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	6	4	4.3	5.01.03.2.02.03	5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Pembangunan Manusia
										5.01.03.2.03	5	01	03	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
	Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/konsistensi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	6	4	4.3	5.01.03.2.03.01	5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
	Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/konsistensi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	6	4	4.3	5.01.03.2.03.02	5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
	Inventarisasi dan Evaluasi Kesesuaian/konsistensi dan integrasi program dalam dokumen perencanaan Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	23	6	4	4.3	5.01.03.2.03.03	5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
										5.01.04	5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
										5.01.04.2.01	5	01	04	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
4.2.1.22.14	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	14	4	4.3	5.01.04.2.01.01	5	01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Perekonomian
	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	14	4	4.3	5.01.04.2.01.02	5	01	04	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Perekonomian

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	14	4	4.3	5.01.04.2.01.03	5	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
										5.01.04.2.02	5	01	04	2.02		Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	14	4	4.3	5.01.04.2.02.01	5	01	04	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	14	4	4.3	5.01.04.2.02.02	5	01	04	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	14	4	4.3	5.01.04.2.02.03	5	01	04	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
										5.01.04.2.03	5	01	04	2.03		Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	14	4	4.3	5.01.04.2.03.01	5	01	04	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	14	4	4.3	5.01.04.2.03.02	5	01	04	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
	Sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	14	4	4.3	5.01.04.2.03.03	5	01	04	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
										5.01.05	5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
										5.01.05.2.01	5	01	05	2.01		Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
4.2.1.21.48	Sinkronisasi program pusat, propinsi dan daerah dibidang sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	48	4	4.3	5.01.05.2.01.01	5	01	05	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
	Sinkronisasi program pusat, propinsi dan daerah dibidang sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	48	4	4.3	5.01.05.2.01.02	5	01	05	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
	Sinkronisasi program pusat, propinsi dan daerah dibidang sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	48	4	4.3	5.01.05.2.01.03	5	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
										5.01.05.2.02	5	01	05	2.02		Fasilitasi dan Movev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinarmagaan dan Perhubungan
	Sinkronisasi program pusat, propinsi dan daerah dibidang sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	48	4	4.3	5.01.05.2.02.01	5	01	05	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinarmagaan dan Perhubungan
	Sinkronisasi program pusat, propinsi dan daerah dibidang sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	48	4	4.3	5.01.05.2.02.02	5	01	05	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinarmagaan dan Perhubungan
	Sinkronisasi program pusat, propinsi dan daerah dibidang sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	48	4	4.3	5.01.05.2.02.03	5	01	05	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinarmagaan dan Perhubungan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										5.01.05.2.03	5	01	05	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
	Singkronisasi program pusat, propinsi dan daerah dibidang sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	48	4	4.3	5.01.05.2.03.01	5	01	05	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
	Singkronisasi program pusat, propinsi dan daerah dibidang sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	48	4	4.3	5.01.05.2.03.02	5	01	05	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
	Singkronisasi program pusat, propinsi dan daerah dibidang sarana dan prasarana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	48	4	4.3	5.01.05.2.03.03	5	01	05	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
										5.05	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
										5.05.02	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
										5.05.02.2.01	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
										5.05.02.2.01.01	5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
										5.05.02.2.01.02	5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
										5.05.02.2.01.03	5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
										5.05.02.2.01.04	5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
										5.05.02.2.01.05	5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
										5.05.02.2.01.06	5	05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
										5.05.02.2.01.07	5	05	02	2.01	07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
										5.05.02.2.01.08	5	05	02	2.01	08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
										5.05.02.2.01.09	5	05	02	2.01	09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
										5.05.02.2.01.10	5	05	02	2.01	10	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
										5.05.02.2.01.11	5	05	02	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
										5.05.02.2.01.12	5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										5.05.02.2.01.13	5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
										5.05.02.2.01.14	5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
										5.05.02.2.01.15	5	05	02	2.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang
										5.05.02.2.02	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
										5.05.02.2.02.01	5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
										5.05.02.2.02.02	5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
										5.05.02.2.02.03	5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
										5.05.02.2.02.04	5	05	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
	Usul Revisi rentra (Penelitian dan Pengembangan Pariwisata)									5.05.02.2.02.05	5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
										5.05.02.2.02.06	5	05	02	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
										5.05.02.2.02.07	5	05	02	2.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
										5.05.02.2.02.08	5	05	02	2.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
										5.05.02.2.02.09	5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
										5.05.02.2.02.10	5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
										5.05.02.2.02.11	5	05	02	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
										5.05.02.2.03	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Penyusunan profil komoditi unggulan kabupaten Aceh Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								5.05.02.2.03.01	5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penyusunan profil komoditi unggulan kabupaten Aceh Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								5.05.02.2.03.02	5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.22.17	Rencana Aksi Pembangunan Industri 2021-2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	17	4	4.3	5.05.02.2.03.02	5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
										5.05.02.2.03.03	5	05	02	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
4.2.1.22.15	Penyusunan profil komoditi unggulan kabupaten Aceh Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	15	4	4.3	5.05.02.2.03.04	5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
4.2.1.22.18	Studi Kelayakan Pembangunan Kawasan Peternakan Kabupaten Aceh Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	18	4	4.3	5.05.02.2.03.04	5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
4.2.1.22.20	Rencana Aksi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kab. Aceh Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	20	4	4.3	5.05.02.2.03.05	5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
4.2.1.22.19	Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kab. Aceh Selatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	19	4	4.3	5.05.02.2.03.05	5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
4.1.1.26.2	Masterplan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( ZWP3K)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	1	1	26	2	4	4.3	5.05.02.2.03.05	5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
										5.05.02.2.03.06	5	05	02	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
										5.05.02.2.03.08	5	05	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
										5.05.02.2.03.09	5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
										5.05.02.2.03.10	5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
										5.05.02.2.03.11	5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2.1.22.21	Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	22	21	4	4.3	5.05.02.2.03.12	5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
										5.05.02.2.03.13	5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
										5.05.02.2.04	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
										5.05.02.2.04.01	5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
										5.05.02.2.04.02	5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
										5.05.02.2.04.03	5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
										5.05.02.2.04.04	5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
										5.05.02.2.04.05	5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
										6.01.03	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
										6.01.03.2.01	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										6.01.03.2.01.01	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
4.2.1.21.40	Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	40	4	4.3	6.01.03.2.01.02	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
										6.01.03.2.02	6	01	03	2.02		Asistensi dan Pendampingan
										6.01.03.2.02.01	6	01	03	2.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
										6.01.03.2.02.02	6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	19	4	4.3	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.01	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.02	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.03	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
										7.01.06.2.01.04	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.06.2.01.05	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.06	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.07	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
										7.01.06.2.01.08	7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.2.1.21.41	Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan gampong	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	2	1	21	41	4	4.3	7.01.06.2.01.09	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.06.2.01.10	7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
										7.01.06.2.01.11	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.06.2.01.12	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat
										7.01.06.2.01.13	7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
										7.01.06.2.01.14	7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
										7.01.06.2.01.15	7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
										7.01.06.2.01.16	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
										7.01.06.2.01.17	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.1.1.26.3	Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	1	1	26	3	4	4.3	7.01.06.2.01.18	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
10.1.2.19.4	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	1	2	19	4	4	4.3	7.01.06.2.01.18	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	1	4	4.3	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	2	4	4.3	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	7	4	4.3	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	8	4	4.3	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	10	4	4.3	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	11	4	4.3	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	12	4	4.3	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	13	4	4.3	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	15	4	4.3	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	17	4	4.3	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	1	18	4	4.3	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	2	7	4	4.3	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	2	9	4	4.3	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	2	10	4	4.3	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	2	22	4	4.3	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	2	24	4	4.3	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	2	26	4	4.3	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	2	28	4	4.3	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	1	2	3	2	4	4.3	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
										X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
										X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	Diusulkan dalam revisi Renstra (Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan)									X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4.1.1.15.9	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (SIDa)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	1	1	15	9	4	4.3	X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	5.02				KEUANGAN
FUNGSI	1				PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.08				KEUANGAN
VARIAN KODE ORGANISASI	5-2	0-0	0-0	01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										5	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
										2.10	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
										2.10.05	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
										2.10.05.2.01	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Pengadaan tanah (alternatif)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	7	1	4	4.4	2.10.05.2.01.01	2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengadaan tanah (alternatif)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	7	1	4	4.4	2.10.05.2.01.02	2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
										5.02	5	02				KEUANGAN
										5.02.02	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.1.1.8.19	Penyusunan KUA	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	19	4	4.4	5.02.02.2.01.01	5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS
5.1.1.8.20	Penyusunan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	20	4	4.4	5.02.02.2.01.01	5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.8.21	Penyusunan KUA Perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	21	4	4.4	5.02.02.2.01.02	5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
5.1.1.8.22	Penyusunan PPAS Perubahan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	22	4	4.4	5.02.02.2.01.02	5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.01.03	5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.01.04	5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD
5.1.1.8.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	2	4	4.4	5.02.02.2.01.05	5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
5.1.1.8.3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	3	4	4.4	5.02.02.2.01.05	5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
5.1.1.8.4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	4	4	4.4	5.02.02.2.01.06	5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
5.1.1.8.5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	5	4	4.4	5.02.02.2.01.06	5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
5.1.1.8.18	Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Kabupaten	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	18	4	4.4	5.02.02.2.01.07	5	02	02	2.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
5.1.1.8.9	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	9	4	4.4	5.02.02.2.01.08	5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.01.09	5	02	02	2.01	09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.01.10	5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.01.11	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
										5.02.02.2.02	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.1.1.8.16	Penataan Administrasi Bendahara Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	16	4	4.4	5.02.02.2.02.01	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	Penataan Administrasi Bendahara Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	16	4	4.4	5.02.02.2.02.02	5	02	02	2.02	02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah
	Penataan Administrasi Bendahara Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	16	4	4.4	5.02.02.2.02.03	5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5.1.1.8.15	Pengelolaan Penata Usahaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	15	4	4.4	5.02.02.2.02.04	5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.8.17	Pengelolaan Data/rekapitulasi Gaji dan Tunjangan CPNSD dan PNSD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	17	4	4.4	5.02.02.2.02.05	5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.02.06	5	02	02	2.02	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.02.07	5	02	02	2.02	07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.02.08	5	02	02	2.02	08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.02.09	5	02	02	2.02	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.02.10	5	02	02	2.02	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
										5.02.02.2.03	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.01	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.02	5	02	02	2.03	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.03	5	02	02	2.03	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
5.1.1.8.6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	6	4	4.4	5.02.02.2.03.04	5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.1.1.8.7	Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Per- tanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	7	4	4.4	5.02.02.2.03.04	5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.05	5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.06	5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.07	5	02	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.08	5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.09	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.10	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.03.11	5	02	02	2.03	11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
5.1.1.8.8	Pembinaan/ Sosialisasi/ Penyusunan Laporan Keuangan SKPK	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	8	4	4.4	5.02.02.2.03.12	5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
										5.02.02.2.04	5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.04.01	5	02	02	2.04	01	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.04.02	5	02	02	2.04	02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.02.2.04.03	5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
										5.02.03	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
										5.02.03.2.01	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.1.1.8.1	Penyusunan Standar Satuan Harga	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	1	4	4.4	5.02.03.2.01.01	5	02	03	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.02	5	02	03	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.03	5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.04	5	02	03	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
5.1.1.7.1	Pengadaan tanah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	7	1	4	4.4	5.02.03.2.01.05	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
5.1.1.8.10	Peningkatan Manajemen Aset atau Barang Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	10	4	4.4	5.02.03.2.01.05	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.06	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.07	5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.08	5	02	03	2.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
5.1.1.8.11	Evaluasi/appraisal aset/barang daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	11	4	4.4	5.02.03.2.01.09	5	02	03	2.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.10	5	02	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.11	5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.12	5	02	03	2.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.03.2.01.13	5	02	03	2.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
										5.02.04	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
										5.02.04.2.02	5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.04.2.02.01	5	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5.1.1.8.12	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	12	4	4.4	5.02.04.2.02.02	5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.04.2.02.03	5	02	04	2.02	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.04.2.02.04	5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.04.2.02.05	5	02	04	2.02	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
5.1.1.8.14	Pengelolaan Database PAD dan PBB	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	14	4	4.4	5.02.04.2.02.06	5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.04.2.02.06	5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.04.2.02.07	5	02	04	2.02	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.04.2.02.08	5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.04.2.02.09	5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									5.02.04.2.02.10	5	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah
5.1.1.8.13	Pendataan/pengawasan dan Penagihan Sumber-sumber PAD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	8	13	4	4.4	5.02.04.2.02.11	5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.1.1.9.1	Pembinaan dan Pengelolaan pencairan dana desa	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	1	9	1	4	4.4	7.01.06.2.01.03	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023) Rapat koordinasi konsultasi dalam daerah									7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.1.2.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	6	1	4	4.4	X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.1.2.6.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	6	3	4	4.4	X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	1	4	4.4	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	2	4	4.4	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	3	4	4.4	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
5.1.2.1.21	Penyediaan jasa pengamanan gudang/ kantor/ rumah jabatan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	21	4	4.4	X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5.1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	6	4	4.4	X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	7	4	4.4	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	8	4	4.4	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	10	4	4.4	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	11	4	4.4	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	12	4	4.4	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	13	4	4.4	X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	15	4	4.4	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	17	4	4.4	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	1	18	4	4.4	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	2	5	4	4.4	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	2	7	4	4.4	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	2	9	4	4.4	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	2	22	4	4.4	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	2	24	4	4.4	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.10.1	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	10	1	4	4.4	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	2	42	4	4.4	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
5.1.2.2.45	Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan ruko, kios, pasar los dan gudang	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	2	45	4	4.4	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.1.2.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	1	2	2	44	4	4.4	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
	Tidak / Belum Tercantum dalam Renstra 2019-2023 (Diusulkan masuk dalam revisi Renstra 2019-2023)									X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	5.03	5.04				KEPEGAWAIAN; PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSI	1					PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.09	1.07				KEPEGAWAIAN; PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
VARIAN KODE ORGANISASI	5-3	0-0	0-0	01		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										5	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
										1.03	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.1.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	3	4	4.5	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
5.1.2.2.45	Pembangunan pagar gedung kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	45	4	4.5	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										4.01.04	4	01	04			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM

										4.01.04.2.02	4	01	04	2.02		Penataan Organisasi
5.1.2.8.6	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	6	4	4.5	4.01.04.2.02.01	4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
										4.01.04.2.02.02	4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
										4.01.04.2.02.03	4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
										5.03	5	03				KEPEGAWAIAN
										5.03.02	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
										5.03.02.2.01	5	03	02	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN
										5.03.02.2.01.01	5	03	02	2.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN
										5.03.02.2.01.02	5	03	02	2.01	02	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional
5.1.2.8.5	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	5	4	4.5	5.03.02.2.01.03	5	03	02	2.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
										5.03.02.2.01.04	5	03	02	2.01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian
										5.03.02.2.02	5	03	02	2.02		Administrasi Kepegawaian
5.1.2.8.2	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	2	4	4.5	5.03.02.2.02.01	5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
5.1.2.8.12	Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) (Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	12	4	4.5	5.03.02.2.02.01	5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
										5.03.02.2.02.02	5	03	02	2.02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan
										5.03.02.2.02.03	5	03	02	2.02	03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan
5.1.2.4.4	Pengurusan SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	4	4	4	4.5	5.03.02.2.02.04	5	03	02	2.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
										5.03.02.2.02.05	5	03	02	2.02	05	Pelaksanaan Proses Pemberhentian Pegawai
										5.03.02.2.02.06	5	03	02	2.02	06	Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian

										5.03.02.2.02.07	5	03	02	2.02	07	Pengelolaan Mutasi ASN
5.1.2.8.3	Penempatan PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	3	4	4.5	5.03.02.2.02.08	5	03	02	2.02	08	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN
										5.03.02.2.02.09	5	03	02	2.02	09	Pembuatan Daftar Penjagaan Kenaikan Pangkat
5.1.2.8.4	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	4	4	4.5	5.03.02.2.02.10	5	03	02	2.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
										5.03.02.2.03	5	03	02	2.03		Peningkatan Kapasitas ASN
5.1.2.8.10	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	10	4	4.5	5.03.02.2.03.01	5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN
5.1.2.5.8	Penyelenggaraan evaluasi, penilaian, asesmen, tes dan kelayakan dalam pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	5	8	4	4.5	5.03.02.2.03.02	5	03	02	2.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
5.1.2.8.11	Pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	11	4	4.5	5.03.02.2.03.02	5	03	02	2.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
										5.03.02.2.03.03	5	03	02	2.03	03	Pengembangan Assessment Center
										5.03.02.2.03.04	5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
										5.03.02.2.03.05	5	03	02	2.03	05	Fasilitasi Profesi ASN
5.1.2.5.5	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	5	5	4	4.5	5.03.02.2.03.06	5	03	02	2.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
5.1.2.9.2	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	9	2	4	4.5	5.03.02.2.03.06	5	03	02	2.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
										5.03.02.2.03.07	5	03	02	2.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
										5.03.02.2.03.08	5	03	02	2.03	08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
										5.03.02.2.03.09	5	03	02	2.03	09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
										5.03.02.2.04	5	03	02	2.04		Pengembangan Karir ASN
										5.03.02.2.04.01	5	03	02	2.04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN
										5.03.02.2.04.02	5	03	02	2.04	02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir

										5.03.02.2.05	5	03	02	2.05		Pembinaan ASN
										5.03.02.2.05.01	5	03	02	2.05	01	Pembinaan Disiplin ASN
5.1.2.8.9	Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	9	4	4.5	5.03.02.2.05.02	5	03	02	2.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5.1.2.8.8	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8	8	4	4.5	5.03.02.2.05.03	5	03	02	2.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
										5.04	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
										5.04.02	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
										5.04.02.2.01	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis
5.1.2.5.6	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	5	6	4	4.5	5.04.02.2.01.01	5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.1.2.9.1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	9	1	4	4.5	5.04.02.2.01.01	5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
										5.04.02.2.01.02	5	04	02	2.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
										5.04.02.2.01.03	5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5.1.2.5.7	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah (Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	5	7	4	4.5	5.04.02.2.01.04	5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
										5.04.02.2.02	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
										5.04.02.2.02.01	5	04	02	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional
										5.04.02.2.02.02	5	04	02	2.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
										5.04.02.2.02.03	5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
										5.04.02.2.02.04	5	04	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar

										5.04.02.2.02.05	5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
										5.04.02.2.02.06	5	04	02	2.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
5.1.2.5.4	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon CPNS daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	5	4	4	4.5	5.04.02.2.02.07	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
										5.04.02.2.02.08	5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	1	19	4	4.5	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

											X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
											X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
											X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
											X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
											X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
											X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
											X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	1	1	4	4.5		X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	1	3	4	4.5		X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
											X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	1	8	4	4.5		X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	1	10	4	4.5		X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	1	12	4	4.5		X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	1	15	4	4.5		X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	1	17	4	4.5		X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
											X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	5	4	4.5		X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	7	4	4.5		X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
											X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	9	4	4.5	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	10	4	4.5	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	22	4	4.5	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	24	4	4.5	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	26	4	4.5	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2	28	4	4.5	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.1.2.3.1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	3	1	4	4.5	X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	3	2	4	4.5	XXX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										XXX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
5.1.2.3.4	Pengadaan pakaian KORPRI	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	3	4	4	4.5	XXX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	3	5	4	4.5	XXX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										XXX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										XXX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										XXX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
										XXX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
										XXX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5.1.2.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	5	3	4	4.5	XXX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	1		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	2		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	3		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	4		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	5		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.8	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	8		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.9	Program Pendidikan kedinasan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	1	2	9		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	5.03				KEPEGAWAIAN
FUNGSI	1				PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.09				KEPEGAWAIAN
VARIAN KODE ORGANISASI	??-??	0-0	0-0	??	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										5	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
										5.03	5	03				KEPEGAWAIAN
5.2.1.11.3	Rapat Kerja dan Muscab. (Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri)	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	2	1	11	3	4	4.5	5.03.02.2.03.04	5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5.2.1.11.4	Seleksi Atlet Olah Raga Korpri tingkat Kab. Aceh Selatan. (Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri)	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	2	1	11	4	4	4.5	5.03.02.2.03.04	5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5.2.1.11.5	Pelaksanaan Porda KORPRI (Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri)	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	2	1	11	5	4	4.5	5.03.02.2.03.04	5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5.2.1.11.7	Penyelenggaraan hari hari besar nasional (Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri)	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	2	1	11	7	4	4.5	5.03.02.2.03.04	5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5.2.1.12.1	Pembentukan dan Penguahan LKBH KORPRI ( Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Korpri)	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	2	1	12	1	4	4.5	5.03.02.2.03.04	5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
5.2.1.12.2	Pembentukan Badan Usaha Milik Anggota Korpri ( Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Korpri)	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	2	1	12	2	4	4.5	5.03.02.2.03.04	5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.2.1.12.3	Pembekalan (Pelatihan Kewirausahaan) bagi Anggota KORPRI yang akan memasuki masa pensiun ( Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Korpri)	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	2	1	12	3	4	4.5	5.03.02.2.03.04	5	03	02	2.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	19	4	4.5	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	1	4	4.5	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	2	4	4.5	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5.1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	6	4	4.5	X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	7	4	4.5	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	8	4	4.5	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	10	4	4.5	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	11	4	4.5	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	12	4	4.5	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	15	4	4.5	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	17	4	4.5	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	1	18	4	4.5	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	2	5	4	4.5	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	2	7	4	4.5	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	2	9	4	4.5	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	2	10	4	4.5	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	2	22	4	4.5	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	2	24	4	4.5	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	2	28	4	4.5	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
5.1.2.2.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	2	44	4	4.5	X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	3	2	4	4.5	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
5.1.2.3.4	Pengadaan pakaian KORPRI	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	3	4	4	4.5	X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	3	5	4	4.5	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas



SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	3		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	1	2	5		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.2.1.11	Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	2	1	11		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.2.1.12	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Korpri	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	2	1	12		4	4.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Kegiatan yang belum dipetakan :

1	Pelaksanaan MTQ Korpri Tingkat Kabupaten (Program Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Syariat Islam bagi ASN)
2	Pemberdayaan LPTQ/MTQ Korpri Tingkat Daerah dan Nasional (Program Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Syariat Islam bagi ASN)
3	Pembinaan Kader Qori-Qori'ah Korpri (Program Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Syariat Islam bagi ASN)
4	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) (Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)
5	Pelaksanaan Pendidikan tenaga Kader (Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri)
6	Penyediaan Peningkatan Pembinaan Rohani (Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri)
7	Rapat Kerja dan Muscab. (Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri)
8	Seleksi Atlet Olah Raga Korpri tingkat Kab. Aceh Selatan. (Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri)
9	Pelaksanaan Porda KORPRI (Program Peningkatan Pemberdayaan Anggota Korpri)



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	6.01				INSPEKTORAT DAERAH
FUNGSI	1				PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.12				INSPEKTORAT
VARIAN KODE ORGANISASI	6-1	0-0	0-0	01	INSPEKTORAT

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										6	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.1.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Inspektorat	5	1	2	2	3	4	4.2	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										6.01	6	01				INSPEKTORAT DAERAH
										6.01.02	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
										6.01.02.2.01	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal
5.1.1.7.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Inspektorat	5	1	1	7	1	4	4.2	6.01.02.2.01.01	6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.6	Reviu RKA SKPD	Inspektorat	5	1	1	7	6	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.8	Reviu LKPD	Inspektorat	5	1	1	7	8	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.12	Reviu Tender Pra DIPA, PBJ Realisasi Anggaran Per Triwulan APBK dan Dana Desa	Inspektorat	5	1	1	7	12	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.13	Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	Inspektorat	5	1	1	7	13	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.7.14	Reviu LAKIP Kabupaten	Inspektorat	5	1	1	7	14	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.22	Reviu DAK Fisik	Inspektorat	5	1	1	7	22	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.24	Reviu DOKA	Inspektorat	5	1	1	7	24	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.25	Reviu Renstra	Inspektorat	5	1	1	7	25	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.26	Reviu Renja	Inspektorat	5	1	1	7	26	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.27	Reviu LPPD/LKPJ/i-LPPD	Inspektorat	5	1	1	7	27	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.31	Reviu pelaksanaan anggaran	Inspektorat	5	1	1	7	31	4	4.2	6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
	Reviu Dana Desa (Diajukan untuk revisi Renstra 2019-2023)									6.01.02.2.01.02	6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.28	Pembangunan Zona Integritas	Inspektorat	5	1	1	7	28	4	4.2	6.01.02.2.01.03	6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.29	Pembangunan Zona WBK/WBBM	Inspektorat	5	1	1	7	29	4	4.2	6.01.02.2.01.03	6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.23	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat	5	1	1	7	23	4	4.2	6.01.02.2.01.04	6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.10	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Inspektorat	5	1	1	7	10	4	4.2	6.01.02.2.01.04	6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.17	Evaluasi Maturitas SPIP	Inspektorat	5	1	1	7	17	4	4.2	6.01.02.2.01.04	6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.18	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Inspektorat	5	1	1	7	18	4	4.2	6.01.02.2.01.04	6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
										6.01.02.2.02	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
5.1.1.7.2	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Penda	Inspektorat	5	1	1	7	2	4	4.2	6.01.02.2.02.01	6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.30	Pengawasan atas permintaan pimpinan	Inspektorat	5	1	1	7	30	4	4.2	6.01.02.2.02.01	6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan
	Audit dengan tujuan tertentu (Diajukan untuk revisi Renstra 2019-2023)									6.01.02.2.02.01	6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan
	Reviu Dokumen atas Permintaan Pimpinan (Diajukan untuk revisi Renstra 2019-2023)									6.01.02.2.02.02	6	01	02	2.02	02	Review Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.3	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	5	1	1	7	3	4	4.2	6.01.02.2.02.03	6	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.7.4	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Inspektorat	5	1	1	7	4	4	4.2	6.01.02.2.02.03	6	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan
	Evaluasi atas permintaan pimpinan (Diajukan untuk revisi Renstra 2019-2023)									6.01.02.2.02.04	6	01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.5	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Inspektorat	5	1	1	7	5	4	4.2	6.01.02.2.02.04	6	01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
5.1.1.7.9	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR)	Inspektorat	5	1	1	7	9	4	4.2	6.01.02.2.02.04	6	01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan
										6.01.03	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
										6.01.03.2.01	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan
5.1.1.8.1	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya	Inspektorat	5	1	1	8	1	4	4.2	6.01.03.2.01.01	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
5.1.1.8.2	Penilaian Angka Kredit	Inspektorat	5	1	1	8	2	4	4.2	6.01.03.2.01.01	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
5.1.1.8.3	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat	5	1	1	8	3	4	4.2	6.01.03.2.01.01	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
5.1.1.8.4	Pelayanan Jasa Advisory	Inspektorat	5	1	1	8	4	4	4.2	6.01.03.2.01.01	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
5.1.1.9.1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Inspektorat	5	1	1	9	1	4	4.2	6.01.03.2.01.01	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
5.1.1.9.2	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Inspektorat	5	1	1	9	2	4	4.2	6.01.03.2.01.01	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
5.1.1.7.33	Survey Penilaian Integritas ((Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHI))	Inspektorat	5	1	1	7	33	4	4.2	6.01.03.2.01.02	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
5.1.1.7.20	Survei Penilaian Integritas (Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHI)	Inspektorat	5	1	1	7	20	4	4.2	6.01.03.2.01.02	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
5.1.1.7.7	Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P)	Inspektorat	5	1	1	7	7	4	4.2	6.01.03.2.01.02	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
5.1.1.7.21	Survei Kepuasan Masyarakat	Inspektorat	5	1	1	7	21	4	4.2	6.01.03.2.01.02	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
										6.01.03.2.02	6	01	03	2.02		Asistensi dan Pendampingan
										6.01.03.2.02.01	6	01	03	2.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
5.1.1.7.11	Pendampingan pemeriksaan BPK-RI dan penyusunan Rencana Aksi hasil pemeriksaan BPK-RI	Inspektorat	5	1	1	7	11	4	4.2	6.01.03.2.02.02	6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan
5.1.1.7.19	Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Inspektorat	5	1	1	7	19	4	4.2	6.01.03.2.02.02	6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.7.15	Pengawasan Pungli	Inspektorat	5	1	1	7	15	4	4.2	6.01.03.2.02.02	6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan
5.1.1.7.16	Pengawasan Gratifikasi	Inspektorat	5	1	1	7	16	4	4.2	6.01.03.2.02.02	6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan
5.1.1.7.32	Pelaksanaan pelatihan mandiri	Inspektorat	5	1	1	7	32	4	4.2	6.01.03.2.02.02	6	01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
5.1.2.1.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Inspektorat	5	1	2	1	19	4	4.2	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat	5	1	2	1	1	4	4.2	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	5	1	2	1	2	4	4.2	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	5	1	2	1	3	4	4.2	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5.1.2.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	5	1	2	1	6	4	4.2	X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Inspektorat	5	1	2	1	7	4	4.2	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inspektorat	5	1	2	1	8	4	4.2	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Inspektorat	5	1	2	1	10	4	4.2	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat	5	1	2	1	11	4	4.2	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	5	1	2	1	12	4	4.2	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	5	1	2	1	15	4	4.2	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Inspektorat	5	1	2	1	17	4	4.2	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat	5	1	2	1	18	4	4.2	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	5	1	2	2	5	4	4.2	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	5	1	2	2	7	4	4.2	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Inspektorat	5	1	2	2	9	4	4.2	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Inspektorat	5	1	2	2	10	4	4.2	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat	5	1	2	2	22	4	4.2	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	5	1	2	2	24	4	4.2	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Inspektorat	5	1	2	2	26	4	4.2	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	5	1	2	2	28	4	4.2	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	7					UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	7.01					KECAMATAN
FUNGSI	1					PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.13					KECAMATAN
VARIAN KODE ORGANISASI	7-1	0-0	0-0	12		KECAMATAN LABUHAN HAJI BARAT

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7	7					UNSUR KEWILAYAHAN
										1.03	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.1.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	2	3	4	4.1	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										2.08	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
										2.08.02	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
										2.08.02.2.02	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.08.02.2.02.01	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
4.1.1.48.4	Penyelenggaraan Hari Darmawanita/PKK dan hari Ibu dan Anak (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Labuhanhaji Barat	4	1	1	48	4	4	4.1	2.08.02.2.02.01	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	Penyelenggaraan Hari Darmawanita/PKK dan hari Ibu dan Anak (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Labuhanhaji Barat	4	1	1	48	4	4	4.1	2.08.02.2.02.02	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
										5.01	5	01				PERENCANAAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										5.01.02	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
										5.01.02.2.01	5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.2.1.47.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Kecamatan Labuhanhaji Barat	4	2	1	47	1	4	4.1	5.01.02.2.01.02	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RRPD) Tingkat Kecamatan
										7.01	7	01				KECAMATAN
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										7.01.02.2.02	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
										7.01.02.2.02.01	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
										7.01.02.2.02.02	7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
										7.01.02.2.02.03	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
										7.01.02.2.03	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.03.01	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.03.02	7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
										7.01.02.2.04	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
										7.01.02.2.04.01	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
										7.01.02.2.04.02	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
										7.01.02.2.04.03	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
										7.01.03	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
										7.01.03.2.01	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.03.2.01.01	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
										7.01.03.2.01.02	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
										7.01.03.2.01.03	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
										7.01.03.2.02	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
										7.01.03.2.02.01	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
										7.01.03.2.02.02	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
										7.01.03.2.02.03	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
										7.01.03.2.02.04	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan
										7.01.04	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										7.01.04.2.01	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.04.2.01.01	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
										7.01.04.2.01.02	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
										7.01.04.2.02	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
										7.01.04.2.02.01	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
										7.01.05	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										7.01.05.2.01	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Labuhanhaji Barat	4	1	1	48	1	4	4.1	7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
										7.01.05.2.01.02	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
										7.01.05.2.01.03	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
										7.01.05.2.01.04	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.05.2.01.05	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.05.2.01.06	7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
										7.01.05.2.01.07	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
										7.01.05.2.01.08	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.01	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.02	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.03	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
										7.01.06.2.01.04	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.06.2.01.05	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.06	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.07	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
										7.01.06.2.01.08	7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.09	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
										7.01.06.2.01.10	7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
										7.01.06.2.01.11	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.06.2.01.12	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
										7.01.06.2.01.13	7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
										7.01.06.2.01.14	7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
										7.01.06.2.01.15	7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.06.2.01.16	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
										7.01.06.2.01.17	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
										7.01.06.2.01.18	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	12	4	4.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	2	22	4	4.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	2	28	4	4.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	3	2	4	4.1	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
										X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
5.1.2.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	5	1	4	4.1	X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5.1.2.5.5	Peningkatan sumber daya Aparatur	Kecamatan Labuhanhaji Barat	5	1	2	5	5	4	4.1	X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	7				UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	7.01				KECAMATAN
FUNGSI	1				PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.13				KECAMATAN
VARIAN KODE ORGANISASI	7-1	0-0	0-0	04	KECAMATAN LABUHAN HAJI

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7	7					UNSUR KEWILAYAHAN
										5	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
										5.01	5	01				PERENCANAAN
										5.01.02	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
										5.01.02.2.01	5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.2.1.47.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Kecamatan Labuhanhaji	4	2	1	47	1	4	4.1	5.01.02.2.01.02	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Tingkat Kecamatan
										7.01	7	01				KECAMATAN
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.02.2.02	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
										7.01.02.2.02.01	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
										7.01.02.2.02.02	7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
										7.01.02.2.02.03	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
										7.01.02.2.03	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
										7.01.02.2.03.01	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
										7.01.02.2.03.02	7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
										7.01.02.2.04	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
										7.01.02.2.04.01	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
										7.01.02.2.04.02	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
										7.01.02.2.04.03	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
										7.01.03	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
										7.01.03.2.01	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
										7.01.03.2.01.01	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
										7.01.03.2.01.02	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
										7.01.03.2.01.03	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
										7.01.03.2.02	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
										7.01.03.2.02.01	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.03.2.02.02	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
										7.01.03.2.02.03	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
										7.01.03.2.02.04	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan
										7.01.04	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										7.01.04.2.01	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.04.2.01.01	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
										7.01.04.2.01.02	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
										7.01.04.2.02	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
										7.01.04.2.02.01	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
										7.01.05	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										7.01.05.2.01	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Labuhanhaji	4	1	1	48	1	4	4.1	7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
										7.01.05.2.01.02	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
										7.01.05.2.01.03	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
										7.01.05.2.01.04	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
										7.01.05.2.01.05	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.05.2.01.06	7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.05.2.01.07	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
										7.01.05.2.01.08	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.01	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.02	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.03	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
										7.01.06.2.01.04	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.06.2.01.05	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.06	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.07	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
										7.01.06.2.01.08	7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.09	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
										7.01.06.2.01.10	7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
										7.01.06.2.01.11	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.06.2.01.12	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat
										7.01.06.2.01.13	7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
										7.01.06.2.01.14	7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.06.2.01.15	7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
										7.01.06.2.01.16	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
										7.01.06.2.01.17	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
										7.01.06.2.01.18	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	12	4	4.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	2	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5.1.2.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	2	21	4	4.1	X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	2	22	4	4.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
										X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Labuhanhaji	5	1	2	3	5	4	4.1	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
										X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal



**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	7				UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	7.01				KECAMATAN
FUNGSI	1				PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.13				KECAMATAN
VARIAN KODE ORGANISASI	7-1	0-0	0-0	11	KECAMATAN LABUHAN HAJI TIMUR

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7	7					UNSUR KEWILAYAHAN
										1	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										1.03	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										1.03.08	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
										1.03.08.2.01	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
5.1.2.2.3	Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	3	4	4.1	1.03.08.2.01.02	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
										5	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
										5.01	5	01				PERENCANAAN
										5.01.02	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
										5.01.02.2.01	5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.2.1.47.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kecamatan Labuhanhaji Timur	4	2	1	47	1	4	4.1	5.01.02.2.01.02	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
										7.01	7	01				KECAMATAN
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										7.01.02.2.02	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
										7.01.02.2.02.01	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
										7.01.02.2.02.02	7	01	02	2.02	02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
										7.01.02.2.02.03	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
										7.01.02.2.03	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
										7.01.02.2.03.01	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
										7.01.02.2.03.02	7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
										7.01.02.2.04	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
										7.01.02.2.04.01	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
										7.01.02.2.04.02	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
										7.01.02.2.04.03	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
										7.01.03	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
										7.01.03.2.01	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
										7.01.03.2.01.01	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
										7.01.03.2.01.02	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
										7.01.03.2.01.03	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
										7.01.03.2.02	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.03.2.02.01	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
										7.01.03.2.02.02	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
										7.01.03.2.02.03	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
										7.01.03.2.02.04	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan
										7.01.04	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										7.01.04.2.01	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.04.2.01.01	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
										7.01.04.2.01.02	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
										7.01.04.2.02	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
										7.01.04.2.02.01	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
										7.01.05	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										7.01.05.2.01	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
										7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Labuhanhaji Timur	4	1	1	48	1	4	4.1	7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
										7.01.05.2.01.02	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
										7.01.05.2.01.03	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
										7.01.05.2.01.04	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
										7.01.05.2.01.05	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.05.2.01.06	7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
										7.01.05.2.01.07	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
										7.01.05.2.01.08	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.01	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.02	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.03	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
										7.01.06.2.01.04	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.06.2.01.05	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.06	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.07	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
										7.01.06.2.01.08	7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.09	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
										7.01.06.2.01.10	7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
										7.01.06.2.01.11	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.06.2.01.12	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat
										7.01.06.2.01.13	7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
										7.01.06.2.01.14	7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
										7.01.06.2.01.15	7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.06.2.01.16	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
										7.01.06.2.01.17	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
										7.01.06.2.01.18	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	3	4	4.1	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	12	4	4.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5.1.2.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	21	4	4.1	X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	22	4	4.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	26	4	4.1	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	28	4	4.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.1.2.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Labuhanhaji Timur	5	1	2	2	42	4	4.1	X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan





SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.04.2.01	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.04.2.01.01	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
										7.01.04.2.01.02	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
										7.01.04.2.02	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
										7.01.04.2.02.01	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
										7.01.05	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										7.01.05.2.01	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Meukek	4	1	1	48	1	4	4.1	7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
										7.01.05.2.01.02	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
										7.01.05.2.01.03	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
										7.01.05.2.01.04	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
										7.01.05.2.01.05	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.05.2.01.06	7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
										7.01.05.2.01.07	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
										7.01.05.2.01.08	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.01	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.02	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.03	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
										7.01.06.2.01.04	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.06.2.01.05	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C





































































SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23

Kegiatan yang belum dipetakan :

1	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)
2	Pembinaan, Monitoring, dan evaluasi Pelaksanaan Fasilitas Pelayanan Paten (Program Penataan Daerah Otonomi Baru)
3	Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (Program Penataan Administrasi Kependudukan)
4	Peningkatan Kemampuan aparat pengelolaan persampahan (Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan)

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	7				UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	7.01				KECAMATAN
FUNGSI	1				PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.13				KECAMATAN
VARIAN KODE ORGANISASI	7-1	0-0	0-0	13	KECAMATAN KLUET TENGAH

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7	7					UNSUR KEWILAYAHAN
										2.08.02	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
										2.08.02.2.02	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
4.1.1.48.4	Penyelenggaraan Hari Darmawanita/PKK dan hari Ibu dan Anak	Kecamatan Kluet Tengah	4	1	1	48	4	4	4.1	2.08.02.2.02.01	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
										2.08.02.2.02.02	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
										5	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
										5.01	5	01				PERENCANAAN
										5.01.02	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
										5.01.02.2.01	5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.2.1.47.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Kecamatan Kluet Tengah	4	2	1	47	1	4	4.1	5.01.02.2.01.02	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Tingkat Kecamatan
										7.01	7	01				KECAMATAN
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C



SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.03.2.02.02	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
										7.01.03.2.02.03	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
										7.01.03.2.02.04	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan
										7.01.04	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										7.01.04.2.01	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.04.2.01.01	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
										7.01.04.2.01.02	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
										7.01.04.2.02	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
										7.01.04.2.02.01	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
										7.01.05	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										7.01.05.2.01	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Kluet Tengah	4	1	1	48	1	4	4.1	7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
										7.01.05.2.01.02	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
										7.01.05.2.01.03	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
										7.01.05.2.01.04	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
										7.01.05.2.01.05	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.05.2.01.06	7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
										7.01.05.2.01.07	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
										7.01.05.2.01.08	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C































SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.03.2.02.03	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
										7.01.03.2.02.04	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan
										7.01.04	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										7.01.04.2.01	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.04.2.01.01	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
										7.01.04.2.01.02	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
										7.01.04.2.02	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
										7.01.04.2.02.01	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
										7.01.05	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										7.01.05.2.01	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Kluet Timur	4	1	1	48	1	4	4.1	7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
										7.01.05.2.01.02	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
										7.01.05.2.01.03	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
										7.01.05.2.01.04	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
										7.01.05.2.01.05	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.05.2.01.06	7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
										7.01.05.2.01.07	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
										7.01.05.2.01.08	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C









SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.5.5	Peningkatan sumber daya Aparatur (Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)	Kecamatan Kluet Timur	5	1	2	5	5	4	4.1	X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4.1.1.48.2	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Daerah (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Kluet Timur	4	1	1	48	2	4	4.1		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.1.1.48	Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah	Kecamatan Kluet Timur	4	1	1	48		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.2.1.47	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Kluet Timur	4	2	1	47		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kluet Timur	5	1	2	1		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kluet Timur	5	1	2	2		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Kecamatan Kluet Timur	5	1	2	3		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Kluet Timur	5	1	2	5		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Kegiatan yang belum dipetakan :

1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Daerah (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)
---	---

A  
B  
C

A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C





SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.04.2.01	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.04.2.01.01	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
										7.01.04.2.01.02	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
										7.01.04.2.02	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
										7.01.04.2.02.01	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
										7.01.05	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										7.01.05.2.01	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.1.148.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Bakongan	4	1	1	48	1	4	4.1	7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
										7.01.05.2.01.02	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
										7.01.05.2.01.03	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
										7.01.05.2.01.04	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
										7.01.05.2.01.05	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.05.2.01.06	7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
										7.01.05.2.01.07	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
										7.01.05.2.01.08	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.01	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.02	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.03	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
										7.01.06.2.01.04	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C

A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C  
A  
B  
C









**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	7					UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	7.01					KECAMATAN
FUNGSI	1					PELAYANAN UMUM
SUB FUNGSI	1.13					KECAMATAN
VARIAN KODE ORGANISASI	7-1	0-0	0-0	15		KECAMATAN BAKONGAN TIMUR

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7	7					UNSUR KEWILAYAHAN
										2	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
										2.08	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
										2.08.02	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
										2.08.02.2.02	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
										2.08.02.2.02.01	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
										2.08.02.2.02.02	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
										5	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
										5.01	5	01				PERENCANAAN
										5.01.02	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
										5.01.02.2.01	5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
4.2.1.47.1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kecamatan Bakongan Timur	4	2	1	47	1	4	4.1	5.01.02.2.01.02	5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan
										7.01	7	01				KECAMATAN
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										7.01.02.2.02	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
										7.01.02.2.02.01	7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
										7.01.02.2.02.02	7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
										7.01.02.2.02.03	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
										7.01.02.2.03	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
										7.01.02.2.03.01	7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
										7.01.02.2.03.02	7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
										7.01.02.2.04	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
										7.01.02.2.04.01	7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
										7.01.02.2.04.02	7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
										7.01.02.2.04.03	7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
										7.01.03	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.03.2.01	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
										7.01.03.2.01.01	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
										7.01.03.2.01.02	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
										7.01.03.2.01.03	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
										7.01.03.2.02	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
										7.01.03.2.02.01	7	01	03	2.02	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
										7.01.03.2.02.02	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
										7.01.03.2.02.03	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
										7.01.03.2.02.04	7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan
										7.01.04	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										7.01.04.2.01	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.04.2.01.01	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
										7.01.04.2.01.02	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
										7.01.04.2.02	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
										7.01.04.2.02.01	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
										7.01.05	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										7.01.05.2.01	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Bakongan Timur	4	1	1	48	1	4	4.1	7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
										7.01.05.2.01.02	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
										7.01.05.2.01.03	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
										7.01.05.2.01.04	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
										7.01.05.2.01.05	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.05.2.01.06	7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
										7.01.05.2.01.07	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
										7.01.05.2.01.08	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.01	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.02	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.03	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
										7.01.06.2.01.04	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.06.2.01.05	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.06	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.07	7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.06.2.01.08	7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.09	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
										7.01.06.2.01.10	7	01	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
										7.01.06.2.01.11	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
										7.01.06.2.01.12	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat
										7.01.06.2.01.13	7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
										7.01.06.2.01.14	7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
										7.01.06.2.01.15	7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
										7.01.06.2.01.16	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.1.2.5.4	Pembinaan Perangkat Desa		5	1	2	5	4	4	4.1	7.01.06.2.01.17	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
										7.01.06.2.01.18	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	3	4	4.1	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	12	4	4.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	2	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	2	22	4	4.1	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	2	28	4	4.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Bakongan Timur	5	1	2	3	2	4	4.1	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
										X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun































SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
4.1.1.48.2	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Daerah (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Trumon Timur	4	1	1	48	2	4	4.1		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.1.1.48.3	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Trumon Timur	4	1	1	48	3	4	4.1		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.1.1.48	Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah	Kecamatan Trumon Timur	4	1	1	48		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.2.1.47	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Trumon Timur	4	2	1	47		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Trumon Timur	5	1	2	1		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Trumon Timur	5	1	2	2		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Kecamatan Trumon Timur	5	1	2	3		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Trumon Timur	5	1	2	5		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

A  
B  
CA  
B  
C

Kegiatan yang belum dipetakan :

1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Daerah (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)
2	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)

































SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										7.01.04.2.01.01	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
										7.01.04.2.01.02	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
										7.01.04.2.02	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
										7.01.04.2.02.01	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
										7.01.05	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
										7.01.05.2.01	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Kecamatan Sawang	4	1	1	48	1	4	4.1	7.01.05.2.01.01	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
										7.01.05.2.01.02	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
										7.01.05.2.01.03	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
										7.01.05.2.01.04	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
										7.01.05.2.01.05	7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
										7.01.05.2.01.06	7	01	05	2.01	06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
										7.01.05.2.01.07	7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
										7.01.05.2.01.08	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
										7.01.06	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
										7.01.06.2.01	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.01	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
										7.01.06.2.01.02	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
										7.01.06.2.01.03	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
										7.01.06.2.01.04	7	01	06	2.01	04	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.2.5.4	Pembinaan Perangkat Desa (Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)	Kecamatan Sawang	5	1	2	5	4	4	4.1	7.01.06.2.01.05	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
										7.01.06.2.01.06	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

A  
B  
CA  
B  
C









**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
BIDANG URUSAN	8.01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FUNGSI	2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN
SUB FUNGSI	2.01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
VARIAN KODE ORGANISASI	8-1	0-0	0-0	01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										8	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
										8.01	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.2.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	19	1	1.5	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										8.01.02	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
										8.01.02.2.01	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3.4.1.17.4	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	17	4	1	1.5	8.01.02.2.01.01	8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										8.01.02.2.01.02	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3.4.1.17.5	Penyelenggaraan Hari Lahir Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Bela Negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	17	5	1	1.5	8.01.02.2.01.03	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3.4.1.17.8	Pembauran Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	17	8	1	1.5	8.01.02.2.01.03	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3.4.1.17.6	Pembentukan Layanan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) (Program pengembangan wawasan kebangsaan)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	17	6	1	1.5	8.01.02.2.01.03	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3.4.1.17.7	Pelatihan Kader Bela Negara (Program pengembangan wawasan kebangsaan)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	17	7	1	1.5	8.01.02.2.01.03	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
										8.01.02.2.01.04	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
										8.01.02.2.01.05	8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan
										8.01.03	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
										8.01.03.2.01	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
										8.01.03.2.01.01	8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
										8.01.03.2.01.02	8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
										8.01.03.2.01.03	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
3.4.1.21.6	Pembinaan dan Penyuluhan kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	21	6	1	1.5	8.01.03.2.01.04	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.21.7	Pengawasan Perkembangan Politik dalam Kabupaten Aceh Selatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	21	7	1	1.5	8.01.03.2.01.05	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
										8.01.03.2.01.06	8	01	03	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan
										8.01.04	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
										8.01.04.2.01	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
										8.01.04.2.01.01	8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3.4.1.21.8	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja LSM, Ormas, OKP dan Lembaga lainnya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	21	8	1	1.5	8.01.04.2.01.02	8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
										8.01.04.2.01.03	8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3.4.1.21.9	Tim Terpadu Pengawasan Ormas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	21	9	1	1.5	8.01.04.2.01.04	8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
										8.01.04.2.01.05	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan
										8.01.05	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
										8.01.05.2.01	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
3.4.1.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	17	1	1	1.5	8.01.05.2.01.01	8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
										8.01.05.2.01.02	8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
										8.01.05.2.01.03	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3.4.1.20.1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat))	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	20	1	1	1.5	8.01.05.2.01.04	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
3.4.1.17.9	Monitoring dan Laporan Ketahanan Ekonomi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	17	9	1	1.5	8.01.05.2.01.05	8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghawat Kenceraaan di Daerah
										8.01.05.2.01.06	8	01	05	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan
										8.01.06	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
										8.01.06.2.01	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
										8.01.06.2.01.01	8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
										8.01.06.2.01.02	8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3.4.1.16.6	Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	16	6	1	1.5	8.01.06.2.01.03	8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3.4.1.16.7	Kewaspadaan Dini Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	16	7	1	1.5	8.01.06.2.01.04	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3.4.1.16.8	Pemantauan Orang Asing (PORA)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	16	8	1	1.5	8.01.06.2.01.04	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
										8.01.06.2.01.05	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
										8.01.06.2.01.06	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	1	1	1.5	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	2	1	1.5	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.2.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	3	1	1.5	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	7	1	1.5	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	8	1	1.5	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	10	1	1.5	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	11	1	1.5	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	12	1	1.5	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.2.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	15	1	1.5	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.2.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	17	1	1.5	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.2.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1	18	1	1.5	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.2.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	2	5	1	1.5	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	2	9	1	1.5	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.2.2.10	Pengadaan mebeleur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	2	10	1	1.5	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
5.1.2.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	2	22	1	1.5	X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.2.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	2	24	1	1.5	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	2	26	1	1.5	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.2.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	2	28	1	1.5	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.2.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	3	2	1	1.5	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.2.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	3	5	1	1.5	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
5.1.2.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	5	1	1	1.5	X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
										X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
3.4.1.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	16		1	1.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
3.4.1.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	17		1	1.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
3.4.1.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	20		1	1.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
3.4.1.21	Program pendidikan politik masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	4	1	21		1	1.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	1		1	1.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	2		1	1.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	3		1	1.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	1	2	5		1	1.5	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	9				UNSUR KEKHUSUSAN
BIDANG URUSAN	9.02				SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU *****) Kekhususan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
FUNGSI	2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN
SUB FUNGSI	2.02				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
VARIAN KODE ORGANISASI	??	0-0	0-0	??	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										9	9					UNSUR KEKHUSUSAN
										9.02	9	02				SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU *****) Kekhususan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
										9.02.02	9	02	02			PROGRAM SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU ACEH *****) KDA
										9.02.02.1.01	9	02	02	1.01		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama *****) KDA
										9.02.02.1.01.01	9	02	02	1.01	01	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama *****) KDA
										9.02.02.1.01.02	9	02	02	1.01	02	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama *****) KDA
1.1.1.57.3	Pendidikan Kader Ulama (PKU)	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	57	3	4	4.1	9.02.02.1.01.03	9	02	02	1.01	03	Pendidikan Kader Ulama *****) KDA
1.1.1.57.1	Rapat Kerja dan Musyawarah MPU	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	57	1	4	4.1	9.02.02.1.01.04	9	02	02	1.01	04	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama *****) KDA
1.1.1.57.2	Muzakarah Ulama (OTSUSU)	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	57	2	4	4.1	9.02.02.1.01.05	9	02	02	1.01	05	Muzakarah Masalah Keagamaan *****) KDA
1.1.1.57.5	Pengawasan Aliran Sesat	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	57	5	4	4.1	9.02.02.1.01.06	9	02	02	1.01	06	Pengkajian Aliran Sempalan *****) KDA
										9.02.02.1.01.07	9	02	02	1.01	07	Pertejemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										9.02.02.1.01.08	9	02	02	1.01	08	Kajian Kebijakan Daerah *****) KDA
1.1.1.57.4	Pelatihan Menulis dan Penerbitan Buku dan Kitab	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	57	4	4	4.1	9.02.02.1.01.09	9	02	02	1.01	09	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama *****) KDA
										9.02.02.1.01.10	9	02	02	1.01	10	Nadwah/Mubahasah Ilmiah *****) KDA
1.1.1.57.6	Sosialisasi Fatwa MPU	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	57	6	4	4.1	9.02.02.1.01.11	9	02	02	1.01	11	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam *****) KDA
										9.02.02.1.01.12	9	02	02	1.01	12	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan *****) KDA
										9.02.02.1.01.13	9	02	02	1.01	13	Kajian Pedoman Keagamaan *****) KDA
										9.02.02.1.01.14	9	02	02	1.01	14	Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) *****) KDA
										9.02.02.1.01.15	9	02	02	1.01	15	Pendidikan Kader Ulama (Otsus) *****) KDA
										9.02.02.1.01.16	9	02	02	1.01	16	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota) *****) KDA
										9.02.02.1.02	9	02	02	1.02		Silaturahmi Ulama- Ulama *****) KDA
										9.02.02.1.02.01	9	02	02	1.02	01	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah *****) KDA
										9.02.02.1.02.02	9	02	02	1.02	02	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah *****) KDA
										9.02.02.1.02.03	9	02	02	1.02	03	Kunjungan Muhibah Ulama *****) KDA
										9.02.02.1.03	9	02	02	1.03		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama *****) KDA
1.1.1.57.7	Seminar Sertifikat Halal	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	57	7	4	4.1	9.02.02.1.03.01	9	02	02	1.03	01	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal *****) KDA
1.1.1.57.8	Terawasinya Produk Rumah Tangga Yang Bersertifikasi Halal	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	57	8	4	4.1	9.02.02.1.03.02	9	02	02	1.03	02	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal *****) KDA
										9.02.02.1.03.03	9	02	02	1.03	03	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal *****) KDA
										9.02.02.1.03.04	9	02	02	1.03	04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal *****) KDA
										9.02.02.1.03.05	9	02	02	1.03	05	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										9.02.02.1.03.06	9	02	02	1.03	06	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota) *****) KDA
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
1.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.1.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	3	4	4.1	X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	12	4	4.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
1.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1.1.1.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	1	2	28	4	4.1	X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor





**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI				NOMENKLATUR
URUSAN	9				UNSUR KEKHUSUSAN
BIDANG URUSAN	9.04				SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH *****) Kekhususan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
FUNGSI	9				PERLINDUNGAN SOSIAL
SUB FUNGSI	9.04				SOSIAL
VARIAN KODE ORGANISASI	??	0-0	0-0	??	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										9	9					UNSUR KEKHUSUSAN
										9.04	9	04				SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH *****) Kekhususan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
										9.04.02	9	04	02			PROGRAM BAITUL MAL ACEH *****) KDA
										9.04.02.1.01	9	04	02	1.01		Pengelolaan Ziswaf *****) KDA
										9.04.02.1.01.01	9	04	02	1.01	01	Penyusunan Perencanaan Ziswaf *****) KDA
										9.04.02.1.01.??	9	04	02	1.01	??	Pengelolaan Wakaf *****)
										9.04.02.1.02	9	04	02	1.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal *****) KDA
3.1.1.41.1	Sosialisasi dan Penyaluran Zakat	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	3	1	1	41	1	4	4.1	9.04.02.1.02.01	9	04	02	1.02	01	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf *****) KDA
										9.04.02.1.02.02	9	04	02	1.02	02	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota *****) KDA
										9.04.02.1.02.03	9	04	02	1.02	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM *****) KDA
										9.04.02.1.02.04	9	04	02	1.02	04	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal *****) KDA
										9.04.02.1.03	9	04	02	1.03		Peningkatan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Ziswaf *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										9.04.02.1.03.01	9	04	02	1.03	01	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir *****) KDA
										9.04.02.1.03.02	9	04	02	1.03	02	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin *****) KDA
										9.04.02.1.03.03	9	04	02	1.03	03	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil *****) KDA
										9.04.02.1.03.04	9	04	02	1.03	04	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf *****) KDA
										9.04.02.1.03.05	9	04	02	1.03	05	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin *****) KDA
										9.04.02.1.03.06	9	04	02	1.03	06	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah *****) KDA
										9.04.02.1.03.07	9	04	02	1.03	07	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil *****) KDA
										9.04.02.1.03.08	9	04	02	1.03	08	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq *****) KDA
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
										X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
										X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
5.1.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	2	5	4	4.1	X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	2	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5.1.1.2.10	Pengadaan mebeleur	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	2	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	2	26	4	4.1	X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	3	2	4	4.1	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	3	5	4	4.1	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
5.1.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	5	1	4	4.1	X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSISTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5.1.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	5	3	4	4.1	X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	2		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
3.1.1.41	Program Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	3	1	1	41		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	5		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	1		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	5	1	1	3		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

**HASIL PEMETAAN (PENYESUAIAN) NOMENKLATUR KEGIATAN DALAM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH 2019 - 2023  
MENURUT NOMENKLATUR URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

URUSAN / FUNGSI / KODE ORGANISASI	KODE / KLASIFIKASI					NOMENKLATUR
URUSAN	9					UNSUR KEKHUSUSAN
BIDANG URUSAN	9.01					DINAS SYARIAT ISLAM ACEH *****) Kekhususan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
FUNGSI	2					KETERTIBAN DAN KEAMANAN
SUB FUNGSI	2.02					KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
VARIAN KODE ORGANISASI	??	0-0	0-0	??		DINAS SYARIAT ISLAM

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										9	9					UNSUR KEKHUSUSAN
										1.01.02	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
										1.01.02.2.01	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.1.2.29.2	Festival Anak Shaleh	Dinas Syariat Islam	1	1	2	29	24	4.1		1.01.02.2.01.25	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
										1.01.07	1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH *****) Kekhususan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
										1.01.07.1.01	1	01	07	1.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah *****) KDA
										1.01.07.1.01.01	1	01	07	1.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah *****) KDA
										1.01.07.1.01.02	1	01	07	1.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah *****) KDA
	Operasional Madrasah Ulumul Quran (Tidak muncul dalam Laporan Renstra E-Planing)	Dinas Syariat Islam								1.01.07.1.01.03	1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah *****) KDA
										1.01.07.1.01.04	1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri *****) KDA
										1.01.07.1.01.05	1	01	07	1.01	05	Pembinaan Manajemen Dayah *****) KDA
										1.01.07.1.01.06	1	01	07	1.01	06	Penelitian dan Pengembangan Dayah *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										1.01.07.1.01.07	1	01	07	1.01	07	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah *****) KDA
										1.01.07.1.01.08	1	01	07	1.01	08	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah *****) KDA
										1.01.07.1.01.09	1	01	07	1.01	09	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah *****) KDA
										1.01.07.1.01.10	1	01	07	1.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah *****) KDA
										1.03.07	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
										1.03.07.2.01	1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota
1.1.3.32.1	Pembangunan/ Rehabilitasi Mesjid/ Meunasah	Dinas Syariat Islam	1	1	3	32	1	4	4.1	1.03.07.2.01.01	1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1.1.3.32.2	Pembangunan Balee Semeubut, TPA dan Pesantren	Dinas Syariat Islam	1	1	3	32	2	4	4.1	1.03.07.2.01.01	1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
1.1.3.32.3	Pembangunan/ Rehabilitasi Pagar Kuburan	Dinas Syariat Islam	1	1	3	32	3	4	4.1	1.03.07.2.01.01	1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.03.07.2.01.02	1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.03.07.2.01.03	1	03	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.03.07.2.01.04	1	03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
										1.05.02	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
										1.05.02.1.04	1	05	02	1.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayahul Hisbah *****) KDA
										1.05.02.1.04.01	1	05	02	1.04	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****) KDA
										1.05.02.1.04.02	1	05	02	1.04	02	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****) KDA
										1.05.02.1.04.03	1	05	02	1.04	03	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam *****) KDA
										1.05.02.1.04.04	1	05	02	1.04	04	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam *****) KDA
										1.05.02.1.04.05	1	05	02	1.04	05	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota *****) KDA
										1.05.02.1.04.06	1	05	02	1.04	06	Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.30.1	Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Syariah Islam	Dinas Syariah Islam	1	1	2	30	14	4.1		1.05.02.1.04.07	1	05	02	1.04	07	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku ***** KDA
										1.05.02.1.04.08	1	05	02	1.04	08	Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariah Islam ***** KDA
										1.05.02.1.04.09	1	05	02	1.04	09	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariah Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim ***** KDA
										1.05.02.1.04.10	1	05	02	1.04	10	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi ***** KDA
										1.05.02.1.04.11	1	05	02	1.04	11	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariah Islam ***** KDA
										7.01.02	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
										7.01.02.2.01	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.1.1.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dinas Syariah Islam	5	1	1	1	19	4	4.1	7.01.02.2.01.01	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
										7.01.02.2.01.02	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
										9.01	9	01				DINAS SYARIAT ISLAM ACEH ***** Kekhususan Aceh yang ditangani Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (KDA)
										9.01.02	9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH ***** KDA
										9.01.02.1.01	9	01	02	1.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam ***** KDA
										9.01.02.1.01.01	9	01	02	1.01	01	Pelatihan Mawaris ***** KDA
										9.01.02.1.01.02	9	01	02	1.01	02	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas ***** KDA
										9.01.02.1.01.03	9	01	02	1.01	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariah Islam ***** KDA
1.1.2.31.3	Hisab rukyah	Dinas Syariah Islam	1	1	2	31	3	4	4.1	9.01.02.1.01.04	9	01	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat ***** KDA
1.1.2.31.2	Pelatihan tajhiz jenazah	Dinas Syariah Islam	1	1	2	31	2	4	4.1	9.01.02.1.01.??	9	01	02	1.01	??	Usul tambah sub kegiatan "Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga keagamaan dalam pelaksanaan Syariah Islam
1.1.2.31.10	Peningkatan pembinaan kapasitas remaja mesjid	Dinas Syariah Islam	1	1	2	31	10	4	4.1	9.01.02.1.01.??	9	01	02	1.01	??	Usul tambah sub kegiatan "Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga keagamaan dalam pelaksanaan Syariah Islam
1.1.2.31.13	Peningkatan pembinaan kapasitas imam mesjid	Dinas Syariah Islam	1	1	2	31	13	4	4.1	9.01.02.1.01.??	9	01	02	1.01	??	Usul tambah sub kegiatan "Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga keagamaan dalam pelaksanaan Syariah Islam

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.31.14	Pembekalan guru TPA	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	14	4	4.1	9.01.02.1.01.??	9	01	02	1.01	??	Usul tambah sub kegiatan "Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga keagamaan dalam pelaksanaan Syariat Islam
1.1.2.31.22	Pembekalan calon khatib	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	22	4	4.1	9.01.02.1.01.??	9	01	02	1.01	??	Usul tambah sub kegiatan "Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga keagamaan dalam pelaksanaan Syariat Islam
										9.01.02.1.01.05	9	01	02	1.01	05	Seminar Problematika Syariat Islam *****) KDA
1.1.2.29.3	Pelatihan Kader Dakwah	Dinas Syariat Islam	1	1	2	29	3	4	4.1	9.01.02.1.01.06	9	01	02	1.01	06	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat *****) KDA
										9.01.02.1.02	9	01	02	1.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran *****) KDA
1.1.1.38.1	Penguatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Dinas Syariat Islam	1	1	1	38	1	4	4.1	9.01.02.1.02.01	9	01	02	1.02	01	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran *****) KDA
1.1.2.31.21	Pelatihan dewan hakim MTQ	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	21	4	4.1	9.01.02.1.02.02	9	01	02	1.02	02	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran *****) KDA
1.1.2.31.26	Pembinaan imam hafiz Al-quran	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	26	4	4.1	9.01.02.1.02.03	9	01	02	1.02	03	Pembinaan Imam Hafid Pada Masjid *****) KDA
1.1.2.31.28	Pelaksanaan MTQ tingkat provinsi	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	28	4	4.1	9.01.02.1.02.04	9	01	02	1.02	04	Pelaksanaan MTQ *****) KDA
1.1.2.31.29	Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	29	4	4.1	9.01.02.1.02.04	9	01	02	1.02	04	Pelaksanaan MTQ *****) KDA
1.1.1.38.2	Pembinaan Qori dan Qoriah	Dinas Syariat Islam	1	1	1	38	2	4	4.1	9.01.02.1.02.05	9	01	02	1.02	05	Pelatihan/Training Center Pesrta MTQ/STQ Tingkat Nasional *****) KDA
										9.01.02.1.02.06	9	01	02	1.02	06	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Provinsi *****) KDA
										9.01.02.1.03	9	01	02	1.03		Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama *****) KDA
										9.01.02.1.03.01	9	01	02	1.03	01	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam *****) KDA
										9.01.02.1.04	9	01	02	1.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam *****) KDA
1.1.2.31.30	Penyemarakan syiar islam	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	30	4	4.1	9.01.02.1.04.01	9	01	02	1.04	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam *****) KDA
4.1.1.48.3	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan	Dinas Syariat Islam	4	1	1	48	3	4	4.1	9.01.02.1.04.01	9	01	02	1.04	01	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam *****) KDA
										9.01.02.1.05	9	01	02	1.05		Pembinaan Dakwah dan Peribadatan Sebagai Syariat Islam *****) KDA
										9.01.02.1.05.01	9	01	02	1.05	01	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil *****) KDA
										9.01.02.1.05.02	9	01	02	1.05	02	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB_KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.30.4	Sosialisasi Penyuluhan Hukum/ Qanun Syariat Islam di Lembaga Pemasyarakatan	Dinas Syariat Islam	1	1	2	30	4	4	4.1	9.01.02.1.05.03	9	01	02	1.05	03	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan *****) KDA
1.1.2.31.25	Pembinaan pengurus Badan Kemakmuran Mesjid (BKM)	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	25	4	4.1	9.01.02.1.05.04	9	01	02	1.05	04	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh *****) KDA
1.1.2.29.1	Cerdas Cermat Syariat Islam	Dinas Syariat Islam	1	1	2	29	1	4	4.1	9.01.02.1.05.05	9	01	02	1.05	05	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam *****) KDA
										9.01.02.1.05.06	9	01	02	1.05	06	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat *****) KDA
										9.01.02.1.05.07	9	01	02	1.05	07	Pengiriman Khatib Jum'at ke Kecamatan*****) KDA
										9.01.02.1.05.08	9	01	02	1.05	08	Ceramah Bulan Suci Ramadhan (Gema Assalam)*****)
1.1.2.31.5	Penyelenggaraan pengajian/ tafsirdan hafidz Al-quran	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	5	4	4.1	9.01.02.1.05.09	9	01	02	1.05	09	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong *****) KDA
										9.01.02.1.05.10	9	01	02	1.05	10	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan *****) KDA
										9.01.02.1.05.11	9	01	02	1.05	11	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama *****) KDA
										9.01.02.1.06	9	01	02	1.06	0	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam *****) KDA
1.1.2.31.11	Safari dakwah islamiyah	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	11	4	4.1	9.01.02.1.06.01	9	01	02	1.06	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman *****) KDA
1.1.2.31.12	Pelatihan mu'allaf	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	12	4	4.1	9.01.02.1.06.01	9	01	02	1.06	01	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman *****) KDA
										9.01.02.1.06.02	9	01	02	1.06	02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam *****) KDA
										9.01.02.1.06.03	9	01	02	1.06	03	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam *****) KDA
										9.01.02.1.06.04	9	01	02	1.06	04	Pembinaan Keluarga Islami *****) KDA
										9.01.02.1.06.05	9	01	02	1.06	05	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah *****) KDA
										9.01.02.1.07	9	01	02	1.07	0	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam *****) KDA
1.1.2.30.2	Penyuluhan Hukum/Qanun Syariat Islam	Dinas Syariat Islam	1	1	2	30	2	4	4.1	9.01.02.1.07.01	9	01	02	1.07	01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam *****) KDA
1.1.2.31.4	Sosialisasi aturan-aturan agama islam	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	4	4	4.1	9.01.02.1.07.01	9	01	02	1.07	01	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam *****) KDA
										9.01.02.1.07.02	9	01	02	1.07	02	Bimbingan Teknis Peradilan Islam *****) KDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
1.1.2.30.6	Isbat Nikah	Dinas Syariat Islam	1	1	2	30	6	4	4.1	9.01.02.1.07.03	9	01	02	1.07	03	Isbat Nikah Bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin *****) KDA
										9.01.02.1.07.04	9	01	02	1.07	04	Workshop dan FGD Perkara Syariah *****) KDA
1.1.2.31.19	Komunikasi dan publikasi syariat islam	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31	19	4	4.1	9.01.02.1.07.05	9	01	02	1.07	05	Penyusunan Regulasi Syariat Islam *****) KDA
										9.01.02.1.07.06	9	01	02	1.07	06	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam *****) KDA
										9.01.02.1.08	9	01	02	1.08	0	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Jami' Kabupeten *****) KDA
										9.01.02.1.08.01	9	01	02	1.08	01	Pembinaan kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Jami' Kabupeten *****) KDA
										9.01.02.1.08.02	9	01	02	1.08	02	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Jami' Kabupeten *****) KDA
										9.01.02.1.08.03	9	01	02	1.08	03	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Jami' Kabupaten*****) KDA
										9.01.02.1.08.04	9	01	02	1.08	04	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Jami' Kabupaten*****) KDA
										9.01.02.1.08.05	9	01	02	1.08	05	Mendatangkan Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan Dari Luar Negeri *****) KDA
										9.01.02.1.08.06	9	01	02	1.08	06	Pelayanan BLUD *****) KDA
										X.XX.01	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
										X.XX.01.2.01	X	XX	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.01	X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.02	X	XX	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
										X.XX.01.2.01.03	X	XX	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.01.04	X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2.30.3	Pembuatan Buku Syariat Islam Dalam Angka	Dinas Syariat Islam	1	1	2	30	3	4	4.1	X.XX.01.2.01.05	X	XX	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										X.XX.01.2.02	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan
										X.XX.01.2.02.01	X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.02.02	X	XX	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										X.XX.01.2.02.03	X	XX	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
										X.XX.01.2.02.04	X	XX	01	2.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
										X.XX.01.2.02.05	X	XX	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										X.XX.01.2.02.06	X	XX	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										X.XX.01.2.02.07	X	XX	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
										X.XX.01.2.02.08	X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
										X.XX.01.2.02.09	X	XX	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
										X.XX.01.2.03	X	XX	01	2.03		Administrasi Umum
5.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	1	4	4.1	X.XX.01.2.03.01	X	XX	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	2	4	4.1	X.XX.01.2.03.02	X	XX	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										X.XX.01.2.03.03	X	XX	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.04	X	XX	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
										X.XX.01.2.03.05	X	XX	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
										X.XX.01.2.03.06	X	XX	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.07	X	XX	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	8	4	4.1	X.XX.01.2.03.08	X	XX	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5.1.1.1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.09	X	XX	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	10	4	4.1	X.XX.01.2.03.10	X	XX	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	11	4	4.1	X.XX.01.2.03.11	X	XX	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	12	4	4.1	X.XX.01.2.03.12	X	XX	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										X.XX.01.2.03.13	X	XX	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										X.XX.01.2.03.14	X	XX	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.1.1.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	15	4	4.1	X.XX.01.2.03.15	X	XX	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
										X.XX.01.2.03.16	X	XX	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.1.1.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	17	4	4.1	X.XX.01.2.03.17	X	XX	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
5.1.1.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1	18	4	4.1	X.XX.01.2.03.18	X	XX	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
										X.XX.01.2.03.19	X	XX	01	2.03	19	Pengadaan Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.20	X	XX	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.21	X	XX	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Syariat Islam	5	1	1	2	7	4	4.1	X.XX.01.2.03.22	X	XX	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.23	X	XX	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
5.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Syariat Islam	5	1	1	2	9	4	4.1	X.XX.01.2.03.24	X	XX	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.25	X	XX	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur
										X.XX.01.2.03.26	X	XX	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.27	X	XX	01	2.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.28	X	XX	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.29	X	XX	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
5.1.1.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Syariat Islam	5	1	1	2	24	4	4.1	X.XX.01.2.03.30	X	XX	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.03.31	X	XX	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
										X.XX.01.2.03.32	X	XX	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.33	X	XX	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
										X.XX.01.2.03.34	X	XX	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.35	X	XX	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
										X.XX.01.2.03.36	X	XX	01	2.03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
										X.XX.01.2.03.37	X	XX	01	2.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
										X.XX.01.2.03.38	X	XX	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
										X.XX.01.2.03.39	X	XX	01	2.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
										X.XX.01.2.03.40	X	XX	01	2.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
										X.XX.01.2.04	X	XX	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
										X.XX.01.2.04.01	X	XX	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
5.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas Syariat Islam	5	1	1	3	2	4	4.1	X.XX.01.2.04.02	X	XX	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
										X.XX.01.2.04.03	X	XX	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
										X.XX.01.2.04.04	X	XX	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri
5.1.1.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Syariat Islam	5	1	1	3	5	4	4.1	X.XX.01.2.04.05	X	XX	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
										X.XX.01.2.04.06	X	XX	01	2.04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
										X.XX.01.2.04.07	X	XX	01	2.04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
										X.XX.01.2.04.08	X	XX	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS
										X.XX.01.2.04.09	X	XX	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal
										X.XX.01.2.04.10	X	XX	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID. URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23
5.1.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Syariat Islam	5	1	1	5	3	4	4.1	X.XX.01.2.04.11	X	XX	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4.1.1.48.1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Dinas Syariat Islam	4	1	1	48	1	4	4.1		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.1.1.48.2	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Daerah (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)	Dinas Syariat Islam	4	1	1	48	2	4	4.1		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1.1.1.38	Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Al-Qur'an	Dinas Syariat Islam	1	1	1	38		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1.1.2.29	Program peningkatan kualitas keagamaan pada anak usia dini/ setingkat SD, SLTP, SLTA/ sederajat	Dinas Syariat Islam	1	1	2	29		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1.1.2.30	Program Pembinaan Hukum dan Pengawasan Syariat Islam	Dinas Syariat Islam	1	1	2	30		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1.1.2.31	Program Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Syariat Islam	Dinas Syariat Islam	1	1	2	31		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
1.1.3.32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Dinas Syariat Islam	1	1	3	32		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
4.1.1.48	Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah	Dinas Syariat Islam	4	1	1	48		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Syariat Islam	5	1	1	1		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Syariat Islam	5	1	1	2		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur	Dinas Syariat Islam	5	1	1	3		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
5.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Syariat Islam	5	1	1	5		4	4.1	Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Program kajian pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia tentang syariat Islam (Tidak muncul dalam Renstra E-Planing)	Dinas Syariat Islam								Tidak dipetakan cukup keg. saja	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A

Kegiatan yang belum dipetakan :

1	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)
2	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Daerah (Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Keagamaan, Nasional dan Daerah)

TAPAKTUAN,

MARET 2020

a.n. BUPATI ACEH SELATAN

PARA KEPALA BIDANG BAPPEDA

SEBELUM PEMETAAN										HASIL PEMETAAN						
KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	KODE EKSTING RPJM/RENSTRA/SIMDA							KODE LENGKAP	KODE					NOMENKLATUR URUSAN - KABUPATEN/KOTA
			MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	URUSAN	BID_URUSAN		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20	21	22	23

SEKRETARIS DAERAH,

KABUPATEN ACEH SELATAN,  
KABID. PP. EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

**H. NASJUDDIN, SH.MM**

Pembina Utama Madya  
Nip. 19641002 199403 1 002

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

**MASRIZAL, SE, M.Si**  
NIP. 19790414 200112 1 001

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

**SYAMSUL BAHRI, SH**  
NIP. 19660705 198711 1 002

**REZA FEBRIAN, S.Hi**  
19840203 200504 1 001

KABID. PP. SARANA DAN PRASARANA

**SYAIFUI KAMAL, ST, MT**  
19720906 200504 1 001

KABID. PP. KEISTIMEWAAN ACEH DAN SDM

**YUSRIZAL, S.Ag**  
19690929 200801 1 001

KABID. PROGRAM DAN  
PENDANAAN PEMBANGUNAN

**SUPRIANTO, S.Hut**  
19740915 200604 1 009